



MELAWAN  
**NEGARA**

PDI 1973-1986

PENULIS:

C O R N E L I S L A Y

**MELAWAN**

# **NEGARA**

**PDI 1973-1986**

CORNELIS LAY

MELAWAN

# NEGARA

PDI 1973-1986

# **MELAWAN NEGARA**

## **PDI (1973-1986)**

© Cornelis Lay

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Right Reserved*

Penulis	: Cornelis Lay
Penyunting Edisi I	: Utan Parlindungan
Penyunting Edisi Revisi	: Umi Lestari
Perancang Sampul dan Penata Letak	: Yohanes Paulus Mahadma Khrisna

Research Center for Politics and Government  
Departemen Politik dan Pemerintahan  
Universitas Gadjah Mada

Jl. Sosio Yustisia No.1, Bulaksumur, Yogyakarta 55281  
<https://polgov.fisipol.ugm.ac.id>  
Telp. (0274) 563365 ext. 212

ISBN: 978-602-96762-0-4  
xiv+300 hal, 15 cm x 22 cm  
Cetakan Pertama: April 2010  
Cetakan Kedua (edisi revisi): 2019

# PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Buku ini adalah bagian Bab III dari Skripsi penulis yang dipertahankan dalam ujian sarjana di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, pada 10 Juli 1987. Secara prinsip, data dan argumen yang dibangun di sepanjang buku ini (kecuali Bab I) adalah setara dengan Bab III yang tercantum dalam skripsi penulis. Perubahan yang dilakukan hanya sebatas pada pengorganisasian isi tulisan ke dalam bab-bab, termasuk pembenahan redaksional, dan penambahan sejumlah literatur baru yang relevan.

Dalam proses penyusunan skripsi, penulis menghabiskan waktu setidaknya dua tahun, terutama di Jakarta, guna menghimpun data maupun informasi yang dibutuhkan. Dan dalam rentang waktu tersebut, penulis mendapatkan keistimewaan luar biasa karena sempat mewawancarai tokoh-tokoh kunci, dan tokoh-tokoh yang mengawal 13 tahun proses formasi awal ketika PDI mulai berdiri pada 10 Januari 1973. Lebih dari itu, penulis diuntungkan oleh situasi konflik yang demikian luar biasa pada saat itu sehingga membikin masing-masing kubu dengan sukarela memberikan data dan mengungkapkan aneka cerita yang mustahil untuk diperoleh penulis dalam situasi yang normal. Penulis juga diuntungkan oleh *antusiasme* luar biasa dari para narasumber yang menempatkan politik sebagai *aktivisme* yang menyebabkan begitu banyaknya waktu yang bisa penulis peroleh dari masing-masing tokoh

untuk kesediaan mereka diwawancarai. Sejumlah tokoh bahkan mengizinkan penulis tinggal di rumah mereka. Dan bahkan ada kisah konyol ketika penulis dan salah seorang narasumber diusir oleh istrinya karena sudah hampir 24 jam kami menghabiskan waktu berdiskusi, padahal hari sudah menjelang subuh.

Lebih dari sekadar aneka keberuntungan yang membantu penulis secara akademik bisa merampungkan skripsi sebagaimana dikisahkan di atas, penulis bahkan mendapatkan kesempatan yang mungkin sangat sedikit orang bisa menikmatinya: kesempatan belajar dari sumber pertama mengenai bagaimana politik sehari-hari bekerja dan bagaimana politik yang seharusnya. Pengalaman ini menjadi begitu berharga bukan saja sebagai akademisi, tapi juga sebagai *homo politicus*, sebuah peran yang hingga hari ini masih tetap penulis lakoni melalui keterlibatan penulis dalam membantu PDI Perjuangan sebagai kekuatan penerus PDI.

Naskah tulisan dalam bentuk buku ini sebenarnya sudah diselesaikan penulis pada tahun 1996. Penulis menghabiskan waktu selama 3 bulan di Flinders University, Adelaide, Australia—dengan pembiayaan dari PAU Studi Sosial UGM—guna memformat kembali keseluruhan informasi dan gagasan dalam skripsi penulis, khususnya BAB III, sehingga menemukan bentuknya seperti sekarang ini. Karenanya, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga pada guru sekaligus kolega penulis di PAU Studi Sosial UGM, Prof. Dr. Nasikun yang kini sedang terbaring sakit. Atas dorongan dan bantuannya penulis dapat “bertapa” di Flinders University, Australia. Di tempat ini pula, sahabat karib Saya, Prof. Dr. Pratikno sedang menyelesaikan disertasinya. Terima kasih kepada Mas Tik dan Mbak Ida karena begitu seringnya Saya—sebagai bujangan—numpang makan di rumahnya di Flinders. Terima kasih juga dialamatkan pada Dr. Collin Brown dan Dr. Jim Schiller serta sejumlah kolega di Flinders University yang membantu

penulis.

Namun sayang—untuk tidak mengatakan sial—bahwa naskah yang sudah siap terbit kala itu, yang bahkan sudah sempat penulis tunjukkan ke Arief Budiman dan satu *hard copy*-nya sudah sempat diberikan kepada Bang Daniel Dhakidae, yang penulis mendapatkan komentar-komentarnya yang berharga, karena kecerobohan penulis, hilang tak tentu rimbanya. Kepada Bung Daniel yang sejak awal mendorong agar naskah ini diterbitkan dan bahkan hingga beberapa minggu yang lalu masih saja memberikan dorongan, penulis sampaikan penghargaan yang mendalam.

Tahun lalu—setelah lebih dari 13 tahun naskah ini menghilang—secara iseng penulis menanyakan pada Mas Poniman, rekan di PAU Studi Sosial UGM yang pernah menyalin naskah penulis untuk suatu keperluan. Dan di luar dugaan, naskahnya ditemukan di tengah rimba raya dokumen PAU Studi Sosial UGM, yang barangkali seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Memang tidak semua naskah tulisan bisa ditemukan. Bab I ternyata hilang secara permanen dan harus ditulis ulang. Terima kasih buat Mas Poniman atas kesabarannya memburu naskah yang hilang tersebut. Selanjutnya, di bawah teror bertubi-tubi dari Mas Utan Parlindungan, asisten di PolGov, unit riset dan kerja sama yang bernaung di bawah Jurusan Politik dan Pemerintahan (JPP) Fisipol UGM, yang dipimpin sahabat penulis Abdul Gaffar Karim. Bab I buku ini diselesaikan dalam waktu kurang dari 24 jam, hanya satu hari dari tenggat waktu yang ditetapkan Mas Utan untuk dimulainya *layout*. Terima kasih buat Mas Utan yang bukan saja telah setia menteror penulis lewat SMS, tetapi juga dengan sepenuh hati telah membantu membenahi berbagai kesalahan tik dan redaksional dalam naskah buku ini. Buat Cak Doel—Gaffar Karim—dan seluruh kru PolGov penulis berterima kasih karena telah meneruskan ambisi besar Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) yang kini

memiliki sapaan baru—Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) UGM—untuk mendorong dan sekaligus menerbitkan karya-karya mahasiswa dan dosen.

Ucapan terima kasih tak akan berhenti di situ. Sahabat-sahabat Saya di DPP adalah orang pertama yang berhak penuh atas terima kasih tak terhingga ini. Komunitas sosial dan epistemik yang diciptakan para karib penulis menjadikan lingkungan DPP sebagai lingkungan terbaik tempat dorongan menghasilkan karya-karya untuk diterbitkan menemukan alasan kuat. Pak Mashuri Maschab, Ibu Lien, Mas Haryanto dan Mbak Ratnawati yang juga penguji skripsi penulis, Mas Pratikno, Mas Purwo Santoso, Mas Bambang Purwoko, I Ketut Putra Erawan dan AAGN Ari Dwipayana, Cak Gaffar Karim, Mbak Linda Savirani dan Mas Mada Sukmajadi, Mas Wawan Mas'udi, Mas Nanang Indra Kurniawan, Mas Sigit Pamungkas, Mas Miftah Adi Ikhsanto, Mbak Azizah, Mas Bayu Dardias, Mas Hanif, dan Mbak Nova; dengan segala kerendahan hati saya ingin sampaikan terima kasih yang mendalam.

Kepada guru saya, guru kami di DPP dan orang tua saya, yakni Josef Riwu Kaho yang sekaligus sebagai dosen pembimbing skripsi, saya ingin menghaturkan terima kasih tak terhingga. Bukan saja karena telah “menculik” saya dan memaksa penulis untuk tidak pernah keluar kamar di rumah beliau selama satu bulan untuk menyelesaikan skripsi ini di tahun 1987, tapi, lebih lagi, karena kebesaran hati beliau untuk berdamai dengan diri sendiri untuk menerima fakta bahwa saya adalah “anaknyanya yang memberontak”. Tangan Pak Josef telah membimbing penulis hingga sejauh ini. Terima kasih kepada Bu Josef dan keempat putra-putrinya, terutama Jeng Lin yang pasti telah capek bolak-balik mengantar makan siang, yang begitu membantu selama penulis menyelesaikan skripsi.

Buku ini tak akan pernah hadir tanpa kebesaran hati para



narasumber membagi pengalaman dan informasi. Untuk itu terima kasih Saya haturkan kepada : Drs, Suryadi, Eks Ketua Umum DPP PDI; PNI, B.N Marbun, S.H., Eks Ketua DPP PDI dari Partai Katolik; almarhum dr. Sukowaluyo, Eks Ketua DPP PDI dari PARKINDO; Drs. Yahya Nasution , Eks Ketua DPP PDI dari MURBA; Jupri, S.H., Eks Ketua DPP PDI dari IP-KI; Ir. Andjar Siswojo, Eks Wakil Ketua DPP PDI dari PNI; Parulian Silalahi, Eks Wakil Ketua DPP PDI dari PARKINDO; Nico Daryanto, Eks Sekjen DPP PDI dari Partai Katolik, dan; Dimmy Haryanto, Eks wakil Sekjen dari DPP PDI dari PNI.

Kepada tokoh-tokoh peletak dasar PDI yang sebagiannya menjadi guru awal saya dalam belajar politik sebagai seni, dengan segala kerendahan hati penulis ingin sampaikan terima kasih yang mendalam kepada: almarhum Mh. Isnaeni, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Ketua Umum dan Eks Ketua PDI; almarhum M. Sanusi Hardjadinata, Eks Ketua Umum PDI, tokoh moralis yang banyak mengilhami penulis; Abdul Madjid, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Ketua dan Eks Wakil Sekjen PDI tokoh yang sepak terjangnya di era ini begitu mempesona; Drs. Hardjanto Sumodisastro, Eks Ketua PDI dan Eks Wakil Ketua DPR/MPR; Drs. Jusuf Merukh, Eks Wakil Sekjen dan Eks Ketua F-PDI di DPR RI; Drs. I.G.N Djakse, SEE, Eks Ketua PDI dan Eks Hakim agung pada Mahkamah Agung RI; Notosukardjo, Eks Ketua dan Eks Wakil Bendahara PDI dan Eks anggota F-PDI di DPR RI, dan; Sutomo HR, Eks anggota F-PDI di DPR RI terima kasih yang sama penulis sampaikan kepada almarhum Alexander Wenas, penanda tangan fusi dan Eks Ketua DPP PDI; Bang Sabam Sirait, penanda tangan deklarasi fusi dan Eks Sekjen DPP PDI dan Eks anggota DPA, tokoh satu-satunya di mana penulis berani menerima sanga 50 ribu rupiah dalam situasi tidak ada uang sepeser pun yang tersisa di kantong; DR. TAM. Simatupang, Eks Ketua DPP PDI; JHD. Tahamata, Eks Ketua dan Eks Wakil Bendahara DPP PDI; dan D. Walandouw,

Eks Wakil Bendahara DPP PDI, penulis ucapkan terima kasih.

Kepada F.S Wignjosumarsono, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Ketua DPP PDI, Eks wakil Ketua DPA; V.B da Costa, SEE, Eks Wakil Sekjen DPP PDI; M.B Samosir, Eks Bendahara Umum dan Eks Wakil Sekjen DPP PDI; Lo. Ginting SEE, tokoh yang banyak terlibat dalam proses pembentukan Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP), terima kasih yang sama penulis haturkan atas semua bantuan dan informasi selama penelitian. Ucapan yang sama ingin penulis sampaikan kepada: Akhmad Sukarmadidjaja, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Ketua DPP PDI; Moh. Sadrie, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks anggota MPR RI; dan Mustafa Supangat, Eks Wakil Bendahara dan Eks Wakil Sekjen DPP PDI. Kepada tiga tokoh peletak dasar PDI dari unsur Murba, Sugiharti Murbantoko, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Ketua DPP PDI; John Pakan, penanda tangan Deklarasi fusi dan Eks Wakil Sekjen DPP PDI; dan tokoh yang tidak secara langsung terlibat tetapi memainkan peranan penting, Wasid Suwarto, Eks Ketua Umum MURBA, terima kasih yang mendalam penulis haturkan.

Selama proses penelitian, Yahya Theo (MURBA) memberikan bantuan yang luar biasa di sekretariat DPP PDI. Terima kasih pada beliau penulis sampaikan. Demikian juga pada Bang Sihombing (PARKINDO) dan warga PDI yang begitu banyak membantu penulis. Sejumlah intelektual dan aktivis adalah bagian penting dari proses menghasilkan karya ini. Kepada Bung Frans Pariera (Eks Editor PT. Gramedia, Jakarta); Christ Siner Key Timu, dan Bung Manu Kaisepo terima kasih yang mendalam atas komentar yang berharga dan bantuannya selama penulis melakukan riset.

Para sahabat penulis Anton Nomleni, Boy Malesy, almarhum James dan Dessy, Bang Iskandar Siahaan dan Bang Deddy Reva, Sulastri Saleh, Johan, El dan Ronny Riwu Kaho,

kesemuanya yang telah menjadi bagian dari riset ini di Jakarta penulis haturkan terima kasih yang mendalam.

Sahabat-sahabat JIP angkatan 1980 terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis berikan kepada: Lalu Wildan, Harrist 1st, Makhdun Priyatno, Antoes “Bregos” Budi Santoso, Bakat Dharmawan Setyawan (Wawan Ebiet almarhum), Dovian Heyder dan Titik Raharjanti, Khoirul Fahtoni, Utiek, Henny, Krisna, Katorius Sinaga, Anak Agung Wesaka Puja, Pratikno, Hang Harsastro, Bambang, Sumurung Lubis, dan masih banyak lagi. Kepada Laurel Heyder dari Fakultas Hukum UGM terima kasih penulis haturkan. Begitu pula Mas Khalil, Mas Juwarto, Mas Juwarno, Mas Jarwo, dan almarhumah Mbak Ariasih, izinkan saya menyampaikan terima kasih yang mendalam.

Sahabat-sahabat saya di kelompok diskusi Semar: Bambang Wisnu, Bambang Daranendra, Anis Darato, Eno S. Sutrisno, Agus “Edan” Winoto, Pak Dhe, Antoes Budi Santoso, dan masih banyak lagi, kepada kalian semua terima kasih mendalam ini saya haturkan.

Di Bandung penulis menemukan tempat berteduh selama melakukan riset. Kepada keluarga Ir. Soenarko, SH, dan sahabat penulis Herry Gunawan serta Rudy yang dengan senang hati menerima penulis di rumah mereka, penulis ucapkan terima kasih.

Di Jakarta jiwa besar Mbah St. Atmodipuro dan keluarga Bapak Victor Doko yang telah memperlakukan penulis sebagai cucu dan anak dan diizinkan tinggal selama lebih dari dua tahun di rumah mereka, tidak ada kata lain yang bisa penulis sampaikan kecuali terima kasih.

Bagi rekan-rekan saya di Asrama NTT-Tegal Panggung tempat saya tinggal selama hampir 18 tahun: George Eman, Cor Corputy, John, Hengky, Pace, Bene, Remi, Anis, Frans Ujan,

Silverster Singu, Silvester, Yongky Asadoma dan masih banyak lagi yang tak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis ucapkan terima kasih. Poulkje, Ali, Thalib, Awad, adik-adik penulis yang tinggal di Asrama NTT, juga tak ketinggalan penulis ucapkan terima kasih.

Papa kecil, Kak Dato-Yatty, Kak Robert-Tina, Kak Ade, adik-adik Ince dan almarhum Ina serta semua keponakan, terima kasih secara tulus penulis sampaikan atas segala pengorbanan, doa, harapan, dan dorongannya.

Penulis ingin dedikasikan terima kasih tak terhingga buat Babu Tana (Elizabeth Lay-Raga) dan Nene Tana (Paulus Lay), kedua orangtua penulis yang berhak atas semua ucapan terindah yang bisa disampaikan seorang anak. Dan akhirnya, buku ini didedikasikan sebagai ungkapan cinta mendalam penulis buat Dhiera Anarkhy Rihi Lay (Arki) dan Dhivana Anarchia Ria Lay (Arsya) putra putri penulis dan istri tercinta, Jeanne Cynthia Lay-Lokollo.

Yogyakarta, April 2010

Cornelis Lay

# Daftar Isi

<b>Pengantar dan Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>v</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
A. Orde Baru dalam Debat .....	1
B. Pengorganisasian Bab.....	8
<b>BAB II Menuju ke Pelaminan yang Rapuh</b> .....	<b>15</b>
A. Asal-muasal Fusi.....	15
B. Perjalanan Mencari Cinta.....	33
C. KDP: Perjodohan Awal.....	46
D. Fraksi Bersama KDP: Pertunangan Tanpa Cinta.....	68
<b>BAB III Ke Arah Fusi Lima Parpol: "Perjalanan Meniti Buih"</b> .....	<b>74</b>
<b>BAB IV PDI 1973-1976: Mimpi Buruk "Sang Anak Haram"</b> .....	<b>106</b>
A. Memasuki Keluarga Baru.....	107
B. KONPERNAS: Merajut Yang Tercabik.....	117
C. Konflik Lintas Unsur: Kisah Perkelahian para "Ibu" .....	122
D. Konflik Lintas Elite: Kisah Perkelahian Para "Bapak" .....	129

- E. Misi “Damai-Serasi”: Ketika Idealisme Menjadi Dendam..... 139
- F. Kongres I: Mimpi Buruk Sang “*Anak Haram*” ..... 150

**BAB V PDI 1976-1981:**

**“Yang Tersesat di Belantara Konflik”..... 160**

- A. “Perbedaan Pola Politik”: Ketika yang Tersisa Cuma Kebencian..... 168
- B. *Reshuffle*: Petarungan Para “*Pendekar*” ..... 180
- C. DPP 16 Januari: Menjaring Kemustahilan..... 192
- D. Munas Pandaan: Persekutuan Para *Pariah*..... 217
- E. Ke Arah Kongres II: Perjalanan Tanpa Tujuan..... 224
- F. Panitia *Ad Hoc*: Pertarungan Dua “*Empu*” ..... 246
- G. Mundurnya Sanusi: Akhir Sebuah Kekecewaan ... 251
- H. Panitia Nasional Kongres II: Kerikil-Kerikil yang Tersisa ..... 256
- I. “*Kelompok Empat*”: Impian yang Terempas..... 262
- J. Kongres ke II: Pertarungan Tiga “*Pendekar*” ..... 270

**BAB VI PDI 1981-1986:**

**“Kuncup pun Berkembang, dan Kembang pun Layu” ....280**

- A. Negara sekuler: Pertarungan Dua “*Pendekar*” ..... 286
- B. Catur Mantap: Menguji Akal Sehat ..... 296
- C. Kongres Versus Munas: Pertarungan Akhir Dua “*Pendekar*” ..... 304
- D. Kongres III: Perjalanan Menuju Kematian ..... 311
- E. Lahirnya DPP PDI: Akhir Proses Pembusukan Politik ..... 330

**Daftar Pustaka .....343**

**PROFIL PENULIS .....363**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Orde Baru dalam Debat

Di sepanjang 32 tahun kekuasaan Orde Baru, kajian, pemahaman, dan sekaligus pelabelan mengenai politik Indonesia ditandai dua karakteristik dasar: *pertama*, penekanan pada pertanyaan mengenai seberapa plural Indonesia sebagai suatu entitas politik yang dipahami dari watak pengambilan kebijakannya? Kajian yang menekankan pada interaksi kekuasaan dalam proses kebijakan yang bersifat terbatas di ranah negara seperti ini menghasilkan spektrum pelabelan politik Indonesia yang bersifat stereotipe mulai dari negara yang homogen ala *Beamtenstaat* maupun *bureaucratic polity* ala Jackson hingga pada model-model kepolitikan pluralisme terbatas yang bermunculan kemudian.<sup>1</sup>

Berbagai pelabelan di atas mengandaikan kebijakan

---

1 McVey, Ruth T, 1977, "The Beamtenstaat in Indonesia", hal. 137, bab dalam "Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate", Ben Anderson and Kahin (ed), Singapore: Equinox Publishing; Gordon, Alec, 1993, "Imagining Histories and the Real Thing: A Critique of Anderson and Benda on the 'Otonomous State' in Indonesia", dalam *Journal of Contemporary Asia*, vol. 23, issue 4, page 444-464; Sutherland, Heather, 1979, "The Making of a Bureaucratic Elite: The Colonial Transformation of The Javanese Priyayi", Singapore: Southeast Asia Publication Series; Jackson, Karl D, 1980, "Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia!", dalam D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.), "Political Power and Communications in Indonesia", UCP.

baik sebagai arena maupun sebagai proses merupakan inti utama dalam memahami politik. Peristiwa di luarnya adalah nonpolitik. Walaupun peristiwa di luarnya harus disertakan dalam analisis, hal tersebut dibaca sebagai perluasan dari kontestasi di ranah kebijakan yang eksklusif berlangsung di ranah negara. Dengan demikian, kajian sejenis di atas mengandaikan ketidakrelevanan kekuatan di luar negara sebagai obyek kajian akademik guna menjelaskan perpolitikan Indonesia. Tidak mengherankan jika pemahaman mengenai politik Indonesia di sepanjang bentangan sejarah politik Orde Baru adalah sejarah tentang negara dan bahkan sejarah tentang kedigdayaan negara sebagai entitas satu-satunya yang menentukan praktis segala dinamika di tingkat sistem politik secara keseluruhan. Kekuatan rakyat terorganisasi yang berada di luar negara adalah perluasan dari kekuasaan negara dan sepenuhnya harus dipahami dalam kerangka bekerjanya negara. Kita, dengan demikian, diyakinkan secara akademis oleh pelabelan di atas untuk mempercayai bahwa satu-satunya cara untuk memahami Indonesia adalah dengan memahami dinamika di ranah negara berikut aktor-aktor di dalamnya. Kajian-kajian yang berusaha untuk mendapatkan alternatif penjelasan di luar dinamika dalam negara, diandaikan tidak relevan; dan karenanya, sebagaimana dibuktikan melalui minimnya kajian di luar negara di era ini, sah untuk diabaikan.

Sudah tentu, terdapat variasi penjelasan mengenai akar dari corak negara yang dilabelkan di atas, misalnya, penjelasan mengenai kontinuitas masa lalu dalam raut negara patrimonial atau *rent seeking* sebagai motif, sekaligus corak struktural



negara yang tumbuh lebih kemudian.<sup>2</sup> Namun, esensi bahwa Negara adalah kuat, otonom, dan sekaligus menjadi satu kesatuan perangai yang dapat dipahami melalui isolasinya dari kekuatan di luar dirinya praktis disepakati sebagai ciri-ciri Negara Orde Baru.

Karakter kedua dari kajian-kajian selama Orde Baru berlangsung adalah, hampir kesemuanya memusatkan diri pada usaha untuk membongkar dan memahami logika kerja kekuasaan di tingkat negara pusat, dan untuk sejumlah batas, institusi-institusi modern sebagai perluasan dari negara—parpol, pemilu, parlemen, institusi militer, birokrasi, dsb.—juga di pusat. Hal ini mengandaikan, negara pada tingkatan yang lebih rendah adalah tidak relevan dan walaupun harus dipahami, ia harus dimaknai sebagai perluasan perangai dan cara kerja negara nasional. Politik Indonesia selama 32 tahun Orde Baru adalah politik negara pusat. Tidak mengherankan jika kajian-kajian mengenai politik lokal selama periode ini praktis sangat miskin dalam hal komparasi dengan periode selepasnya, yang dilabeli sebagai periode “Reformasi”. Walaupun sejumlah literatur bermunculan di periode ini, praktis, hampir semuanya, bercerita tentang dua kemungkinan berikut ini: politik lokal sebagai arena ekspansi watak negara nasional dan/atau dimengerti dalam kerangka yang bersifat murni administratif

---

2 Mas'ood, Mohtar, 1989, “Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971”, LP3ES; Kunio, Yoshihara, 1990, “Kapitalisme Semu Asia Tenggara”, Jakarta: LP3ES; Webber, D, 2006, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Soeharto Indonesia”, *Democratization* Vol. 13 No.3 hal.396-420; Robison, Richard, 1997, “Capitalisme and Bureaucratic State in Indonesia: 1965-1975”, Australia: Sidney University; Crouch, Harold, 1979, “Patrimonialism and Military Rule in Indonesia”, *World Politics*, Vol. 31.

dan legalistik.<sup>3</sup>

Buku ini, yang berjudul *Melawan Negara: PDI 1973 - 1986*, mengungkap dimensi lain: negara Orde Baru jauh dari digdaya dan jauh dari utuh. Ia adalah gambaran dari sebuah negara dengan kapasitas *governability* yang rendah dan terfragmentasi secara luar biasa. Ia adalah target yang rapuh dari siasat kekuatan politik massa yang direpresentasikan oleh PDI. Berbagai siasat yang dikembangkan PDI di sepanjang bentangan tahun 1973-1986, mulai dari konflik yang bahkan menjurus ke arah bunuh diri politik hingga kolaborasi dengan atau bahkan terkesan sebagai “menjilat” bagian-bagian negara—yang menjadi fokus buku ini—memberikan gambaran watak reaksioner negara yang jauh dari penggambaran mayoritas literatur tentang Orde Baru. Agenda-agenda tindakan negara otoritarian yang dibayangkan dalam berbagai literatur sebagai gambaran dari kuatnya negara ini, dalam realitasnya bukan merupakan tindakan otonom dari sebuah institusi solid yang kuat: kesemuanya adalah respons atas stimulus yang dikembangkan dan berkembang dalam dunia kaum pinggiran dan kaum tertindas—kaum Marhaen, kaum sandal jepit, wong cilik, akar rumput—yang direpresentasikan oleh PDI. Stimulus yang secara sangat sengaja dimaksudkan untuk menggugat secara terus-menerus keabsahan obsesi negara mengenai harmoni sebagai prakondisi yang harus dipenuhi dan sekaligus tujuan normatif yang ingin direngkuh Orde Baru.

Aneka perlawanan atas negara yang dilakukan PDI, terutama lewat metode penciptaan konflik intern, secara fundamental menghantam inti dari obsesi kepolitikan Orde

---

3 Riwu Kaho, Josef, 1982, “Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia”, Jakarta: Bina Aksara; \_\_\_\_, 1988, “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya”, Jakarta: Rajawali Press; Pratikno, 2005, “Local Democracy and Governance in Indonesia”, dalam Priyambudi Sulistyanto, et.al (ed), “Regionalism in Post-Soeharto Indonesia”, Routledge Curzon.

Baru: keteraturan dan harmoni, berikut kepatuhan dan ketergantungan yang di era Orba dibahasakan sebagai 'stabilitas politik'.

Lewat siasatnya yang bervariasi, PDI selama kurun waktu ini, dan terus berkembang hingga tumbanganya Orde Baru, menguras energi ekonomi, politik, dan moral negara secara habis-habisan.

Analisis dan data yang disajikan di sepanjang buku ini mendemonstrasikan sedemikian mahalanya harga yang harus ditebus Orde Baru guna menjinakkan perlawanan PDI atas negara. Imajinasi untuk menghasilkan politik yang teratur dan harmonis yang dibangun di atas kepatuhan dan ketergantungan harus dibayar dengan sangat mahal oleh rezim Orde Baru. Secara politik perlawanan PDI memaksa negara mulai dari tingkat Presiden hingga ke ujung paling akhirnya, RT serta struktur militer dan intelijen mulai dari Pangab dan Pangkopkamtib hingga Babinsa bekerja praktis 24 jam dengan ekstra tenaga yang harus dikeluarkan. Secara ekonomi, negara dipaksa untuk menebusnya dengan dana yang tidak terhingga, mulai dari anggaran yang harus disediakan untuk kepentingan resmi, seumpama Kongres dan pertemuan partai, hingga pada dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas ilegal bagi kepentingan pembungkaman seperti penyuapan dan dana aktivitas operasi tertutup. Secara moral, harga yang harus ditebus Orde Baru juga luar biasa: Orde Baru hadir sebagai sosok kejam di mata sebagian besar rakyat kebanyakan.

Temuan-temuan yang disajikan dalam buku ini, dengannya, membantah sebagian dari corak analisis mengenai Orde Baru. Di samping membongkar ketidakabsahan mitos negara kuat Orde Baru dengan ketunggalan wataknya, karya ini sekaligus menggugat premis standar, terutama mengenai "pemisahan" antara negara dan masyarakat politik di luarnya yang menandai

banyak penulisan tentang Indonesia di era Orde baru. Negara adalah arena perluasan kontestasi kekuatan di luarnya, jauh dari bayangan bahwa negara otonom dan dapat bertindak terbebas dari kekuatan di luarnya. Negara begitu rawan atas sabotase dan penyusupan kekuatan rakyat yang direpresentasikan oleh PDI.

Di samping meragukan mayoritas kajian atas Orde Baru, data yang tersebar dalam buku ini secara samar-samar mengungkapkan bekerjanya logika dari perspektif yang tumbuh dan menguat kemudian dalam memahami Indonesia pasca-Orde Baru, yakni perspektif memberikan penekanan pada pertanyaan tentang seberapa efektif negara Indonesia dalam mengelola publik? Pertanyaan ini mengandaikan pentingnya pemahaman atas kapasitas negara dalam mengatur publik sebagai cara untuk memahami politik. Sebuah perspektif, tentang *governability*, yang telah menghasilkan kerangka pembilahan baru mengenai negara (*strong state*, *weak state*, *failed state*, dan *collapse state*) yang ketika berinteraksi dengan kekuatan di luarnya, memunculkan varian baru corak negara, yaitu *quasi state*, *shadow state*, dan *de facto state*.

Kerangka pemahaman baru ini awalnya digunakan untuk memahami kepolitikan negara-negara di kawasan Afrika yang ditandai oleh meluasnya fenomena "*refusal of state institutions (army, executive, local government, and populations) to recognize each other's authority*" yang menyebabkan mereka gagal dalam menyediakan dan melakukan *delivery political goods* bagi warganya.<sup>4</sup> Dalam keterbatasannya, perspektif ini kemudian dipakai sejumlah ahli untuk memahami kepolitikan Indonesia

---

4 Lihat misalnya, kumpulan tulisan Zartman, I William, 1995, "Introduction: Posing the Problem of State Collapse" yang diedit oleh I William Zartman, (ed.), *Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*, Lynne Rienner Publishers, Boulder-London.

pasca turunnya Soeharto,<sup>5</sup> sesuatu yang tidak terbayangkan di era ini, juga di mata riset untuk yang sebagiannya dituangkan dan terdapat dalam isi buku ini. Namun, buku ini memang tidak memberi kesimpulan yang tegas mengenai apakah dinamika bercorak patologis yang menandai Orde Baru merupakan fungsi dari kegagalan negara. Hal ini disebabkan karena periode ketika karya ini dihasilkan sama sekali tidak menyediakan panduan teoritik ke arah tersebut. Karya ini juga tidak memberikan penggambaran mengenai apakah konflik dan pergulatan, termasuk identitas dalam PDI ketika itu adalah ekspresi dari lemahnya struktur negara yang menempatkan negeri ini dalam situasi politik mati-hidup (*the politics of survival*) sebagaimana diargumentasikan Migdal dalam konteks pergulatan identitas di aras lokal.<sup>6</sup> Tetapi runtutan argumentasi yang dibangun dan data yang disajikan mengungkapkan, fungsi dasar negara modern dalam makna Hobbesian dan Weberian, terutama sebagai penjamin keamanan intern dan penjamin kepastian representasi dan legitimasi, gagal dipenuhi negara Orde Baru.

Dalam berbagai keterbatasan data dan analisis, buku ini memberikan penggambaran baru mengenai kepolitikan Orde Baru yang menjauhi cara pandang umum yang berlaku. Hanya saja, sebagaimana akan tergambar dalam bab-bab berikut buku ini, watak kedua dari studi mengenai Orde Baru yang serba

- 
- 5 Kajian-kajian awal mengenai Indonesia pasca-Orde Baru yang menggunakan perspektif ini, terutama sebagai respons atas kegagalan Indonesia dalam menyediakan "keamanan" yang direfleksikan melalui kegagalan dalam mengelola konflik di berbagai daerah sebagai *political goods*, dapat dilihat dalam, antara lain: Donald K. Emmerson, "Will Indonesia Survive?", *Foreign Affairs*, May/June 2000; Paul Dibb and Peter Prince, "Indonesia's Grim Outlook", *Orbis*, Fall 2001; Jusuf Wanandi, Indonesia: "A Failed State?", *The Washington Quarterly*, Vol. 25, No. 3, Summer 2002; Robert I. Roberg, "The New Nature of Nation-State Failure", *The Washington Quarterly*, Vol 25, No. 3, Summer 2002.
- 6 Migdal, J., 1988, "Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capability in the Third World", Princeton, NJ.: Princeton University Press.

“pusat”—kecuali untuk kasus ketika daerah mulai memasuki arena konflik pasca pertemuan di Malang—praktis tidak banyak tersentuh. Karya ini, sebagaimana karya-karya lain yang mengkaji Orde Baru, tetap menempatkan Jakarta sebagai lokus tunggal politik Indonesia.

## **B. Pengorganisasian Bab**

Buku ini diorganisir ke dalam enam bab. Dimulai dari pendahuluan (Bab I) dan kemudian dilanjutkan ke bab II, yang memaparkan *setting* historis terbentuknya KDP (Kelompok Demokrasi Pembangunan), pascageger politik tahun 1965. KDP adalah rahim bersemainya embrio “bayi prematur” bernama PDI. Di masa-masa ini, dalam kondisi trauma yang akut dan kecurigaan antarsesama warga, aktivitas politik serba diawasi oleh Negara. Partai politik warisan Orde Lama dikendalikan dan didisiplinkan oleh Orde Baru sebagai rezim pemenang yang berhak dan berkuasa penuh dalam melakukan restrukturisasi politik tahun 1960-an. Orde Baru melakukan restrukturisasi, bukan saja menyangkut persoalan “mau dibawa ke mana” negara ini, tetapi juga mengamankan kekuasaan negara dalam bingkai “transformasi sistem kepartaian”. Di permukaan, restrukturisasi politik ini nyaris tanpa perlawanan, dan juga tanpa protes berkepanjangan dari partai-partai politik. Namun, di bawah permukaan, rangkaian perlawanan tak berkesudahan terus bermunculan. Oleh Orde Baru, partai politik disederhanakan dan dilokalisir ke dalam dua jargon afiliasi, yaitu “material-spiritual” dan “spiritual-material”. Partai politik Islam (NU, Masyumi, PERTI, dll) yang mewakili kelompok “spiritual-material” didorong untuk berfusi menjadi PPP, sedangkan partai politik berhaluan Soekarnoisme-Marhaenisme seperti PNI, IPKI dan Murba, Kristen seperti PARKINDO dan Partai Katolik, yang mewakili kelompok “material-spiritual”, didorong untuk berfusi menjadi KDP. Di luar itu, Orde Baru juga melahirkan

kelompok lain yang ambivalen, yaitu kelompok kekarya (GOLKAR), karena tidak melabeli dirinya sebagai partai, tetapi berhak ikut bertarung dalam Pemilu. Bagi kelompok material spiritual, fusi ini merupakan kolaborasi yang “janggal dan aneh” bukan saja karena masing-masing partai memiliki pengalaman historis yang berbeda, tetapi juga karena fusi ini dianggap parsial, karena menggabungkan partai berhaluan Marhaenisme dengan partai berhaluan keagamaan (Kristen-Katolik) ke dalam satu kubu, yang selanjutnya akan dijelaskan prosesnya dengan sangat rinci, walaupun dalam suasana penuh tekanan dan dilema, bahkan diramalkan menjadi sumber perpecahan dan konflik. Namun, untuk mewujudkan gagasan ini, Orde Baru tidak saja menempuh jalur konstitusional lewat Tap. MPRS No. XXII/MPRS/1966, tetapi juga menggunakan mekanisme “*stick and carrot*”, atau “*reward and punishment*” bagi partai-partai politik “semu” yang akan bertarung dalam Pemilu 1971.

Perampangan partai politik ke dalam kubu *material* dan *spiritual* serta perjodohan yang tak diinginkan mewarnai kisah bab III. Kekuatan eksternal (negara) yang semakin tak terbandung, ditambah lagi persoalan intern KDP—menyangkut legitimasi dan pembagian porsi kedudukan partai-partai dalam fusi—tak bisa dihindarkan turut membidani lahirnya “bayi PDI” lewat “Deklarasi 10 Januari 1973”. Namun, sebelum itu, skenario demi skenario dimainkan oleh rezim agar mewujudkan dalam dirinya sebuah rekayasa politik “perkawinan dini” yang diperankan oleh aktor-aktor elite partai, yang tidak saja dituntun menuju kursi pelaminan yang megah dan berkilau, tetapi juga disuguhi “racun mematikan” jika parpol hasil fusi menolak mengucapkan “ijab kabul” sebagai bukti kesetiaan kepada penguasa. Akan tetapi, dalam prosesnya, perjodohan ini menampilkan sebuah dagelan yang tidak saja mendefisitkan arti demokrasi yang sesungguhnya, tetapi juga dibayang-bayangi kekhawatiran bahwa fusi akan gagal dilakukan. Indikasi ini

tampak jelas dari upaya masing-masing parpol untuk saling berebut peran atau saling tidak percaya, bahkan menghakimi lewat tuduhan dosa-dosa sejarah masa lalu. Di sini, parpol yang akan berfusi mencurahkan berbagai gagasan menyoal persiapan dan pematangan fusi, dan bahkan cenderung memaksakan caranya masing-masing, sehingga tidak mudah mendamaikan perbedaan yang demikian tajam saat itu. Pro-kontra menyangkut nama, asas ciri, tujuan, dan prinsip-prinsip partai baru hasil fusi yang akan dibentuk membuktikan sulitnya membangun konsensus di antara elite-elite parpol. Kesemuanya, secara fundamental menggambarkan variasi metode perlawanan PDI atas negara.

Bab IV menceritakan hikayat kelahiran PDI yang tak diharapkan berlangsung. Tak terbantahkan bahwa pembusukan politik semakin menggejala dan mencederai wajah demokrasi sepanjang tahun 1973 hingga 1976. Otoritas politik, yang dengan sangat lihai dikendalikan oleh Orde Baru, semakin menjelaskan alasan mengapa Orde Baru berkepentingan menancapkan taring eksistensinya ke dalam tubuh PDI, yaitu lewat intervensi atau campur tangan dalam urusan internal PDI. Campur tangan yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga keluarga baru yang memiliki hak asuh terhadap bayi PDI yang telah dengan susah payah dilahirkan. Pelan tapi pasti, para elite digiring memasuki rimba raya kemelut tak berkesudahan. Namun, di saat bersamaan, para elite PDI memerosotkan diri ke dalam konflik yang lebih dalam yang melewati batas yang ditoleransi oleh negara; konflik yang mengancam inti obsesi Orde Baru mengenai ketertiban dan harmoni. Konflik perebutan hegemoni kekuasaan ini tidak saja berhenti di level antarpol, tapi menyerang ke kawan separtai pula. Konflik di tubuh unsur PNI (setelah dibubarkan) antara Isnaeni dan Sunawar; perang antar unsur-unsur PDI; rivalitas antartokoh dan seterusnya, meninggalkan rekam jejak



bagi perjalanan tumbuh berkembangnya “bayi PDI” berikutnya. Dalam kondisi ini pun, konflik semakin diperkeruh oleh Orde Baru dengan memunculkan rivalitas baru (Sanusi-Usep) yang dikehendaki Pemerintah karena konflik intern PDI dianggap membahayakan tatanan yang sudah cukup lama dibangun oleh rezim sehingga, mau tidak mau, perlu diselamatkan, tetapi, tetap saja, dengan kompensasi yang menggiurkan untuk menjinakkan orang-orang yang bertikai. Selanjutnya, catatan penting di bab ini adalah, di tengah-tengah persiapan kongres, paling tidak, ada kesepakatan yang mampu diwujudkan oleh elite-elite parpol. Di antaranya: komposisi personalia Kongres I yang diselenggarakan pada 12-13 April 1976 dan juga agenda organisasi yang tetap berjalan. Bahkan dalam suasana penuh konflik sekalipun, Kongres I mampu menghasilkan dokumen-dokumen penting, seperti Deklarasi Pembentukan PDI, Piagam Perjuangan PDI, AD/ART, Program Perjuangan, Susunan DPP PDI, dll. Inilah momentum bersejarah bagi PDI sebagai sebuah partai hasil fusi, hadir menawarkan konsensus yang sangat mahal harganya bagi pendewasaan politik kala itu, dan pelajaran penuh makna bagi PDI sebagai kekuatan yang digadang-gadang akan memperjuangkan demokrasi.

Bab V buku ini secara spesifik menarasikan lebih tajam serpihan konflik yang menegaskan adanya konfigurasi elite dalam sekat-sekat “patronase” yang memecah belah kekuatan PDI sepanjang 1976 hingga 1981, sekaligus memecah negara dan menguras energi Orde Baru secara lebih besar lagi. Menjelang kongres II, terbentuknya kubu-kubu dalam tubuh PDI yang tidak saja mendamaikan mereka yang sebelumnya bertikai (kubu Isnaeni dan Sunawar), tetapi juga mengumandangkan perang terbuka terhadap kubu Sanusi-Usep yang saat itu menggenggam pucuk kepemimpinan PDI, yang notabene “direstui” Pemerintah. Upaya penyingkiran lawan-lawan politik untuk saling menjatuhkan lewat cara-cara inkonstitusional

atau bahkan kekerasan fisik lazim terjadi di era ini. Krisis intern dalam tubuh PDI ditandai dengan adanya “Ketetapan *Reshuffle*” 25 November 1977, yang menghendaki Sanusi-Usep “lengser keprabon” dengan tuduhan menyimpang dari “Empat *Strategical Points*”, yaitu: Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945; Melanjutkan perjuangan Orba; Menerima Dwi Fungsi ABRI; dan Mendukung Soeharto. Sementara pihak Sanusi-Usep balik menyerang dengan mengeluarkan “Surat Keputusan (SK)” tanggal 24 November 1978 yang membebastugaskan Isnaeni-Sunawar sebagai anggota DPP PDI. Isu sentral yang mengemuka di era ini adalah “perbedaan pola politik” antara kedua kubu dalam merumuskan aktivitas partai. Perang dua kubu ini akhirnya menampilkan wajah tunggal di balik “topeng artifisial” sesungguhnya, yaitu *vested interest* masing-masing kubu dalam arena yang bernama “hegemoni kekuasaan”. Akan tetapi, di saat bersamaan menunjukkan semakin piawainya elite PDI memainkan kartu harmoni yang diobsesikan negara. Sebagaimana kisah sebelumnya, lagi-lagi, Pemerintah turun tangan sebagai variabel penting “pihak penengah” dalam menurunkan tensi konflik untuk memecah kebuntuan ini. Selain itu, “Imbauan Pandaan”, yang melihat dua kubu sebagai sumber konflik PDI, berhasil mendorong “rujuk semu” di antara keduanya, tetapi bukan berarti konflik akan segera tuntas dan usai. Rujuk ini justru memunculkan persoalan baru di tempat lain. Inilah fase ketika dimensi konflik meluas, bukan lagi dimonopoli elite-elite nasional saja, tetapi juga merambah sampai ke daerah-daerah. Konflik akhirnya bertransformasi menjadi standar perilaku bagi elite lokal—terutama yang memiliki kepengurusan kembar—untuk bisa mempertahankan posisinya di partai, bahkan menggunakan cara barbarian penuh intrik dengan cara menjilat dan saling memfitnah sesama anggota pengurus. Daerah yang selama politik Orde Baru adalah nonaktor, lewat PDI, mendapatkan momentum untuk memasuki arena politik dengan konflik sebagai metode pokok.

Bab terakhir buku ini memaparkan periode ketiga perjalanan PDI (1981-1986) yang mencitrakan dirinya dalam raut apriori terhadap sejarah masa lalu yang kelam. Menghanyutkan, sekaligus menenggelamkan generasi pendahulunya yang mengalami pembusukan yang parah, sambil menggali liang kubur bagi generasi kedua yang mewarisi setumpuk persoalan yang mendesak untuk diurai. Bahkan sebelum memasuki arena Kongres III tahun 1986, di atas puing-puing konflik yang bertebaran, isu perpecahan kembali menggejala lewat dukungan dan penolakan terhadap ide Negara Sekuler di bawah patronase Sunawar, dan Negara Pancasila di bawah patronase Hardjanto. Polarisasi yang terbentuk juga menyangkut penyelenggaraan Kongres dan Munas, membawa konsekuensi pada kondisi yang serba terfragmentasi—termasuk ide PARKINDO dan Partai Katolik kembali ke jalur keagamaan. Selain itu, tuntutan agar PDI segera melakukan regenerasi kepengurusan mencapai titik jenuh ketika Kongres III berakhir tanpa susunan DPP, dan menyerahkan urusan tersebut ke tangan Pemerintah lewat Mendagri. Beberapa pihak menilai, Kongres III PDI gagal karena “mengikuti kecenderungan” dan mencerminkan keinginan Negara. Namun, di mata elite-elite PDI, kongres tidak gagal karena di luar susunan DPP telah dihasilkan beberapa rancangan yang disahkan dalam Sidang Pleno Kongres dan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kongres. Akan tetapi, sulit diucapkan dengan nada optimis bahwa PDI hadir sebagai mitra sejajar Pemerintah dan mampu menempatkan diri menjadi kekuatan penyeimbang sebagaimana “fitrah” partai sejatinya. Ketimpangan ini justru menegaskan kembali hilangnya sendi-sendi demokrasi, yakni ketika fungsi partai untuk mengoreksi kinerja Pemerintah tidak menemukan ruang yang lapang, bahkan dipersempit guna memapankan stabilitas politik yang diangankan Orde Baru. Walhasil, Suryadi muncul sebagai figur baru yang justru mendapat dukungan penuh Pemerintah karena memenuhi kriteria yang diidamkan, termasuk di “internal PDI”

sendiri. Profil Suryadi tidak hanya memuaskakan Pemerintah dari segi hubungan “kekerabatan”, tetapi juga berkaitan dengan latar belakang Suryadi yang jauh dari kemelut parpol selama ini. Kelahiran generasi ketiga, di bawah payung kepemimpinan Suryadi, sekaligus menandai akhir perjalanan kiprah generasi tua dalam tubuh PDI dan mengalami pembusukan. “Kuncup pun berkembang, dan kembang pun layu”. Namun, kisah yang seakan indah ini, dalam perkembangannya, tetap bersetia pada sejarah diri sendiri: mereka tetap melawan negara dengan berbagai metode.

## BAB II

# MENUJU KE PELAMINAN YANG RAPUH

### A. Asal-muasal Fusi

Pada mulanya adalah ide. Ide tentang restrukturisasi kehidupan politik yang bukan semata-mata sebuah gelombang gema yang dipantulkan dari masa lalu sejarah (politik) Indonesia, tetapi sekaligus produk dari sebuah imaginasi tentang masa depan. Ide ini sendiri bukan sesuatu yang sepenuhnya hasil pergulatan pemikiran para peletak dasar dari rezim yang melabeli dirinya sendiri sebagai Orde Baru. Ide untuk mencapai stabilitas politik melalui penyederhanaan kompleksitas politik<sup>1</sup> dan pereduksian politik sebagai sarana pembangunan ekonomi<sup>2</sup> sedang memasuki tahap-tahap perkembangan awal yang banyak digandrungi negara-negara dunia ketiga. Dalam konteks Indonesia, ide ini mendapatkan momentum justru karena merupakan simpul pertemuan antara kekecewaan, kebencian,

- 
- 1 Samuel P. Huntington, 1968, "Political Order in Changing Society", New Haven: Yale University Press, hal 315-320; 1971, "Political Development and Political Decay", dalam Henry Bienen (ed.), *The Military and Modernization*, Chicago: Aldine-Atherton Inc, hal 190.
  - 2 W. W. Rostow, 1971, "Politics and The Stages of Growth"; 1959, "The Stages of Economic Growth", *Econ History Review*; 1960, "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto", Cambridge: Cambridge University Press, Chapter 2, "The Five Stages of Growth-A Summary", hal 4-16.

penolakan, dan terlebih lagi, trauma atas masa lalu yang terus menggantung sebagai mendung kelabu di langit Jakarta dengan impian tentang harmoni sosial sebagai terminal perjalanan Indonesia sebagai sebuah bangsa di masa nanti.

Jejak-jejak yang ditorehkan oleh gagasan restrukturisasi politik itu sudah tampak sejak era yang dilabeli secara negatif oleh Orde Baru sebagai “Demokrasi Terpimpin”. Ide ini hadir sebagai hasil evaluasi atas era keperkasaan partai-partai yang “bising”.<sup>3</sup> Kebisingan politik—instabilitas politik, jatuh-bangunnya kabinet,<sup>4</sup> sengketa politik-ideologi,<sup>5</sup> pembangkangan daerah-daerah,<sup>6</sup> dst.—selama era 1950-an hingga penggalan

- 
- 3 Wacana penyederhanaan partai politik hingga ke bentuk berwajah tunggal pernah secara eksplisit disampaikan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Kuburkan Partai-Partai Politik” pada peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956, (dikutip ulang dalam Feith dan Castles, 1970, “Indonesian Political Thinking; 1945-1965”, hal 81-83).
  - 4 Di era Revolusi Kemerdekaan antara tahun 1945-1949, tercatat paling tidak tiga kabinet yang hanya seumur jagung; Kabinet Sjahrir I (14 November 1945-12 Maret 1946); Kabinet Amir Sjahrifuddin II (11 November 1947-29 Januari 1948), dan Kabinet Hatta II (4 Agustus 1948-20 Desember 1948). Sementara interval tahun 1950-1957, akibat sistem politik “parlementer liberal”, tercatat sembilan kabinet jatuh bangun, yakni, antara lain, Kabinet: Susanto, Halim, Natsir, Sukiman-Suwiryo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastroamidjojo II, dan Djuanda yang berujung Dekrit 5 Juli 1959. Lihat, Arbi Sanit, 1981, “Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan Politik dan Sistem Kepartaian”, Jakarta, hal 23-50.
  - 5 Feith menyebut karakter partai politik di Indonesia sebagai “Locked of Cohesion” atau disebut juga partai berserak. Lihat, Herbert Feith, 1968, “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia”.
  - 6 Soekarno, 2001, “Indonesia Menggugat, Cetakan II, Jakarta: Gunung Agung; Marwati dan Notosusanto, “Sejarah Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia”, Jakarta: Balai Pustaka; Rocha, 2002, “Pembangkangan Sipil”, Pasuruan: Tadarus; M.C Ricklefs, 1998, “Sejarah Indonesia Modern”, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

tengah 1960-an yang mencapai kulminasinya pada tahun 1965<sup>7</sup> yang telah menghadirkan partai berikut dunia politik sebagai wakil sah dari makhluk dan kehidupan tanpa peradaban. Oleh karenanya, era ini dan aktor-aktor yang membintangi aneka peristiwa di era ini, bukan saja mengundang penolakan, tetapi juga menghasilkan trauma politik mendalam di lingkaran elite Orba. Ketika penolakan dan trauma ini mengalami proses politisasi dan ideologisasi secara masif, keduanya bertransformasi menjadi penolakan dan trauma negara, bangsa, dan masyarakat; dan, dengannya, meletakkan landasan politik dan ideologi yang kuat bagi restrukturisasi politik.<sup>8</sup>

Jejak ide di atas semakin transparan, ketika persoalan bagaimana meraih legitimasi hadir sebagai teka-teki politik yang harus segera dijawab Pemerintahan pasca-1965 yang dimotori Angkatan Darat (AD). Rute pembangunan (ekonomi) yang diyakini bisa secara cepat bertuah dalam memberikan kepuasan material bagi masyarakat akhirnya menjadi pilihan.<sup>9</sup> Pilihan rute ini menggeret ke atas stabilitas untuk menduduki skala

- 
- 7 Peristiwa malam 31 September, yang oleh Orba disebutkan sebagai "kudeta PKI", masih kontroversi. Lihat, Cribb, Robert, 1990, "The Indonesian Killing of 1965-1966", Australia: Monash University; Mortimer, Rex, 1974, "Indonesian Communist Under Soekarno", Ithaca and London: Cornell University Press; Wertheim, W.F, 1967, "The Missing Link", Artikel; M, Fic, Victor, 2005, "Kudeta 1 Oktober 1965", Jakarta: YOI; Cornell Paper atau Cornell Report yang ditulis oleh Anderson, Ruth Me Vey, RexMortimer dan George Kahin; Ben Anderson dan Ruth Me Vey, 1971, "A Preliminary Analysis of The October 1, 1965 Coup In Indonesia", Ithaca, NY: Cornell University Press; Parlindungan, Utan, 2007'Genjer-Genjer: Kuasa dan Kontestasi Makna, Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.
  - 8 Murtopo Ali, 1978, "Strategi Kebudayaan", Jakarta: Yayasan Proklamasi; Nasikun, 1984, "Sistem Sosial Indonesia", Jakarta: Rajawali; Mac Iver and Charles H. Page, 1967, "Society, an Introductory Analysis", New York: Rinehart and Company Inc.
  - 9 Tampaknya kesimpulan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran mengenai pembangunan politik yang berkembang pesat di era ini. Lihat, Rostow, 1960, "The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto", Cambridge: Cambridge University Press., Chapter 2, "The Five Stages of Growth-A Summary.

tertinggi prioritas politik Orba.<sup>10</sup> Di tingkat inilah, pengendalian dan pendisiplinan politik menjadi imperatif sifatnya.

Pertemuan di antara unsur-unsur di atas telah menggiring restrukturisasi kehidupan politik sebagai gagasan ke arah pemantapannya secara konstitusional yang diwujudkan dalam raut Tap. MPRS No. XXII/MPRS/66. Secara formal prosedural, ketetapan ini dapat dieja sebagai simpul pertemuan kehendak politik antaraelite Orba dengan tokoh-tokoh kekuatan politik. Namun, secara substantif ketetapan ini merupakan tanda dimulainya fase kebangkrutan partai-partai. Pada tahapan ini, pertanyaan di sekitar apakah “pertemuan kehendak politik” di atas dicapai lewat konsensus yang demokratis atau lewat mekanisme pemaksaan menjadi kehilangan makna karena ia telah menjadi keharusan konstitusional yang mesti diwujudkan. Pada fase ini, di tengah-tengah iklim seperti digambarkan di atas, proses penciptaan Kelompok Demokrasi Pembangunan (KDP), cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI), berlangsung.

Proses penciptaan KDP merupakan manifestasi tahap awal dari ide restrukturisasi kehidupan politik di tingkat praktik. Proses ini ditandai oleh serangkaian kegiatan konsultatif antara presiden dengan tokoh-tokoh partai yang diinisiatifkan oleh presiden. Pada saat bersamaan, proses ini dikepong isu pembubaran partai-partai hingga batas waktu tertentu yang sangat fungsional sebagai instrumen pemaksa. Di antara keduanya—di antara proses konsultasi resmi dan isu pembubaran partai-partai—, para petugas “penghubung Presiden” memainkan peranan luar biasa dalam mengamankan skenario demi skenario yang membloke semua kemungkinan pengkhianatan atas pakem yang tersedia.

---

10 Gagasan ini terkait dengan keresahan Huntington atas persoalan negara-negara baru dan jawaban yang diberikannya. Lihat, Huntington, 1968, “Political Order in Changing Society”, New Haven: Yale University Press.



Serial konsultasi antara presiden dan tokoh-tokoh parpol berawal pada 7 Februari 1970. Dalam forum konsultasi kolektif 9 parpol dengan presiden ini, untuk pertama kalinya gagasan pengelompokan partai-partai dimunculkan. Ide ini bahkan menjadi tema tunggal perbincangan. Pengelompokan ini diniatkan menjodohkan partai-partai atas dasar persamaan aksentuasi. Secara apriori, penekanan pada aspek material dan penekanan pada aspek spiritual dirumuskan sebagai titik-titik persamaan yang akan mempertautkan masing-masing partai ke dalam pengelompokan yang dirancang. Dengan begitu, ide ini memuarakan pengelompokan partai ke dalam dua kategori kelompok, yakni Kelompok Material-Spiritual dan Kelompok Spiritual-Material. Sebuah pembilahan yang dengan segera mengingatkan kita pada tujuan formal dari proses pembangunan nasional Indonesia, yakni masyarakat adil makmur, material-spiritual.<sup>11</sup>

Setiap ide perjodohan punya rasionalitas. Begitu pula dengan ide pengelompokan partai-partai. Keharusan untuk menjamin terciptanya stabilitas politik yang diyakini sebagai tanggung jawab bersama dimunculkan Kepala Negara sebagai poin terpenting yang melatarbelakangi gagasannya. Secara lebih spesifik, ide ini dimaksudkan untuk meredam konflik yang mungkin muncul dalam kampanye Pemilu 1971 yang kian mendekat; dan juga dalam rangka membuka ruang semakin lebar bagi pelaksanaan pembangunan yang masih berada pada fase infantil. Pengelompokan partai-partai, dengannya, difungsikan untuk meminimalkan konflik sosial politik. Ia memainkan peran instrumental dalam hal menjinakkan, meredam, sekaligus melokalisir konflik di tingkat sistem politik. Dengan logika ini, partai-partai memang telah sejak dini diniatkan menjadi arena lokalisasi konflik yang difungsikan untuk mengalihkan

---

11 Sejak awal tujuan pembangunan oleh Orba telah dirumuskan dalam GBHN dan TAP-TAP MPR tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993.

atau menyerap konflik, baik yang potensial maupun yang akut, di tingkat sistem politik. Sebagai konsekuensi, konflik intern yang merupakan bagian terpenting dari perjalanan PDI, dan juga PPP, selepas fusi harus dibaca dalam makna yang lebih optimistik, bahkan harus disyukuri. Konflik partai telah berkontribusi menciptakan stabilitas di tingkat sistem politik. Inilah sumbangsih terbesar PDI dan PPP bagi sistem politik. Di samping alasan-alasan tadi, secara strategis, pengelompokan partai diarahkan untuk mewujudkan Tap. No. XXII/MPRS/66 yang menghendaki adanya penciutan jumlah kekuatan politik yang diizinkan bermain secara absah di arena sistem politik Indonesia.

Selepas konsultasi kolektif dengan elite-elite dari 9 parpol, pada tanggal 27 Februari 1970, tatap muka yang lebih khusus lagi dilakukan Presiden dengan lima kekuatan politik yang diandaikan memenuhi kriteria sebagai perwakilan kelompok material-spiritual: Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Kristen Indonesia (PARKINDO), Partai Katolik, Ikatan Persatuan Kemerdekaan Indonesia (IP-KI), dan MURBA dihadirkan sebagai wakil-wakil sah dari kategori ini. Dalam konsultasi itu, selain penegasan kembali gagasan pengelompokan yang dicetuskan pada 7 Februari 1970, juga disarankan cara pengelompokan yang oleh Presiden ditegaskan sebagai penyederhanaan cara kerja dan berpikir dengan mengambil bentuk “up konfederasi parpol”.<sup>12</sup> Pengelompokan, oleh Presiden Soeharto, juga diharapkan sebagai titik persiapan ke arah kehadiran suatu UU tentang kepartaian/keormasan dan kekaryaan, selain dapat berfungsi sebagai penampung sisa suara hasil Pemilu 1971 dalam bentuk *stembus accord*.

---

12 Dalam hal ini Presiden mengusulkan agar partai-partai politik tidak perlu membentuk kepengurusan baru, kecuali dalam bentuk “Dewan Ketua-Ketua Umum Parpol” yang dibantu oleh sebuah “Badan Pekerja” sebagai “brain trust”. Lihat, dokumen “Catatan Konsultasi Antara Presiden Soeharto dengan PNI, IP-KI, MURBA, PARKINDO, dan Partai Katolik”, 27 Februari 1970.

Walaupun penyatuan partai-partai merupakan ide Soeharto, tetapi sang presiden masih tetap berhati-hati dan menahan diri dan tidak terlampau jauh mendikte partai-partai. Ia menyerahkan secara penuh penentuan nama kelompok pada kesepakatan elite-elite parpol. Demikian pula, sekalipun pengelompokan partai politik benar-benar dikehendaki segera terealisasi, presiden tetap berhati-hati untuk tidak memaksakannya diwujudkan sesegera mungkin. Masih sulit diperhitungkannya reaksi massa pendukung masing-masing parpol boleh jadi merupakan penghambat penting dan, karenanya, dibutuhkan waktu guna mematangkan situasi sehingga cukup kondusif untuk merealisasi ide yang ada.<sup>13</sup> Tatap muka kali ini, di samping telah lebih dapat menjernihkan gagasan penyatukandangan parpol-parpol yang diajukan presiden, juga dimanfaatkan tokoh-tokoh parpol untuk mendapatkan penjelasan langsung tentang beberapa masalah politik yang beredar luas dalam masyarakat. Presiden merespons dengan memberikan jawaban-jawaban langsung atas pertanyaan-pertanyaan pokok yang diajukan pihak parpol.

Di forum ini aneka gagasan presiden, terutama yang menyangkut penyatuan partai-partai ke dalam satu kubu, mendapat sambutan dari elite-elite parpol yang menghadirinya. Hanya saja, hal ini tidak secara otomatis menunjukkan telah dicapainya kesamaan sikap di antara para elite parpol dalam merespons ide Soeharto, terutama para elite yang tidak

---

13 *Ibid*, Hal ini terungkap dari harapan Presiden Soeharto kepada lima parpol untuk tidak mengeluarkan "*dekrit*" berkenaan dengan pengelompokan, tetapi cukup dalam bentuk "*pernyataan*". Banyaknya tanggal-tanggal penting pada bulan Maret dikedepankan Presiden sebagai alasan resmi untuk menghindari adanya dekrit. Namun, sulit diingkari dan barangkali merupakan salah satu alasan penting bahwa massa parpol belum cukup terkondisikan untuk mewujudkan ide di atas.

menghadiri pertemuan.<sup>14</sup> Sebaliknya, gagasan ini telah berubah secara cepat menjadi paspor politik yang mengizinkan tokoh-tokoh parpol membangun kutub-kutub politik yang saling berseberangan yang secara kumulatif akan memengaruhi perkembangan lanjutan PDI sebagai hasil perkawinan silang yang janggal dari lima parpol.

Bagi para petinggi parpol pendukung Soeharto, ide ini diterjemahkan sebagai tuntutan obyektif dan strategis dari sistem politik dalam kerangka menata kembali kehidupan politik Indonesia yang tercerai-berai. Pada kutub lainnya, para petinggi yang tidak atau kurang mendukung, cenderung menangkap gagasan di atas dalam kacamata curiga. Ide ini dieja sebagai bagian dari rekayasa politik yang terencana guna mengakhiri eksistensi partai-partai.<sup>15</sup> Dalam situasi seperti ini, para pendukung gagasan Soeharto melangkah bahkan lebih jauh lagi dengan menyiapkan usulan lebih konkret.<sup>16</sup> Dan karena mereka berada di garis yang sejajar dengan Kepala Negara, mudah diperkirakan optimisme bahwa gagasan di atas akan terealisasi

---

14 Dalam wawancara penulis dengan tokoh-tokoh lama lima partai, terungkap cukup substantif jumlah tokoh partai yang menolak gagasan pengelompokan partai-partai versi Presiden tersebut.

15 Beberapa sumber yang diwawancarai penulis mengungkapkan, setelah konsepsi pembaharuan politik diterima, lima parpol semakin didorong ke arah "penyempitan ruang gerak", sehingga sulit bagi mereka untuk mengelak dari keharusan untuk melakukan pengelompokan. Karenanya, sebagian dari mereka menyimpulkan, pengelompokan partai-partai politik merupakan bagian dari rekayasa politik Orba untuk menyingkirkan parpol dari arena politik.

16 Hardi, misalnya, menawarkan pembuatan UU yang memuat beberapa pasal saja guna mengatur pengelompokan partai-partai. Di samping itu, ia juga mengusulkan pengelompokan secara gradual yang dimulai dengan adanya kerja sama yang terus berkembang menjadi konfederasi, dan terakhir fusi. Akhmad Sukarmadidjaja, menawarkan peningkatan kerja sama antarpol yang selama ini telah ada di MPRS sebagai langkah awal menuju fusi. Lihat *"Catatan Dari Pertemuan Lima Parpol"*, 7 Maret 1970.

menjadi bagian dari keyakinan dan tingkah laku politik mereka.<sup>17</sup> Hanya saja para pendukung gagasan Soeharto tidak hadir dalam raut utuh. Mereka pun berserakan ke dalam dua kutub berbeda, yakni antara yang melihatnya sebagai “keharusan strategis” karena tuntutan perkembangan obyektif kehidupan politik, dan yang melihatnya sebagai “pilihan taktis” karena ketiadaan alternatif bagi parpol untuk menentukan atau mengambil sikap lain di luar yang ditawarkan Presiden.<sup>18</sup> Situasi pengelompokan seperti ini terbawa terus dalam proses lanjutan menuju fusi PDI, bahkan selepas fusi, ketika para pendukung ide presiden ini mendapati diri mereka sebagai pemenang formal dalam persaingannya melawan mereka yang menolak. Perbedaan ini secara terus menerus mengalami proses politisasi, bahkan ideologisasi atau sakralisasi secara berlebihan, terutama ketika persaingan antarelite parpol dan unsur yang begitu sering terjadi mulai mengeras. Perlombaan di antara sesama pendukung gagasan Soeharto guna membuktikan diri sebagai pihak yang paling fanatik dalam mengamini gagasan ini dengan persetujuan, akhirnya menjadi fenomena politik umum yang berkembang.

---

17 Optimisme ini tercermin dari pendapat, antara lain, Sukarni (MURBA) yang meyakini pengelompokan di antara mereka bukan sesuatu yang sulit karena adanya kesamaan sejarah, yakni pernah saling bergandengan tangan di saat-saat genting, seperti menjelang Dekrit 5 Juli '59. Optimisme ini juga terungkap lewat visi M. Siregar (PARKINDO) yang meyakini penggabungan kerja sama dan ideologi akan memungkinkan mereka menyusun program bersama. Lo Ginting (Partai Katolik) juga mengedepankan optimisme serupa, ia melihat masalah pengelompokan sebagai hal mudah, sejauh kesempatan untuk saling bertemu guna mendiskusikan persamaan-persamaan di antara mereka cukup tersedia, lihat, “Catatan Konsultasi...”, Op. cit.

18 Sulit ditunjukkan secara pasti tokoh-tokoh yang mewakili sikap ini. Akan tetapi, wawancara penulis dengan elite-elite yang terlibat dalam proses pembentukan KDP yakni, antara lain, Mustafa Supangat, Akhmad Sukardidjaja, M. Sadrie, dari IP-KI; Murbantoko dan John Pakan (MURBA), Lo Ginting, V.B. da Costa, Wignyosumarsono (Partai Katolik); Sabam Sirait, A. Wenas, T.A.M. Simatupang (PARKKINDO); dan Mh. Isnaeni, Abdul Madjid, Hardjantho dan Hardi (PNI) mengungkapkan adanya perbedaan pendapat dalam merespons ide ini ke dalam kutub-kutub “strategis dan taktis”.

Di samping aktivitas normal, yaitu konsultasi dengan presiden seperti disebutkan di atas, dikembangkan, atau netralnya, merebak, pula isu pembubaran partai-partai sampai batas waktu 11 Maret 1970, apabila elite-elite parpol gagal mencapai kesepakatan mengadakan pengelompokan. Sulit dipastikan sumber dari isu ini, tapi tampaknya disebarkan secara sengaja guna memberikan tekanan pada partai-partai yang masih enggan menggerombolkan diri di bawah satu atap.<sup>19</sup> Secara umum ancaman pembubaran partai-partai oleh kebanyakan elite parpol diklaim tidak memberikan pengaruh atau tidak menjadi tekanan bagi tokoh lima parpol berlabel Material-Spiritual ini dalam mengkreasikan Kelompok Demokrasi Pembangunan.<sup>20</sup> Hanya saja, bila dilihat dasar pertimbangan Pernyataan Bersama mereka untuk mengadakan kerja sama yang ditandatangani oleh masing-masing Ketua, 9 Maret 1970<sup>21</sup>, dan juga rangkaian pembicaraan dengan Presiden pada tanggal 12 Maret 1970,<sup>22</sup> serta penentuan tanggal

---

19 Dalam forum konsultasi 12 Maret 1970, Presiden mengakui hal ini. Hanya saja, ia menolak anggapan bahwa pembubaran parpol merupakan visi dari Orba. Diungkapkannya, "memang di kalangan masyarakat ada pendapat yang menghendaki pembubaran Partai-partai, juga di kalangan ABRI ada oknum-oknum, tapi ABRI secara keseluruhan tidak demikian." Lihat, "Pertemuan Kelompok Lima Partai dengan Presiden Soeharto", 12 Maret 1970.

20 Wawancara penulis dengan para tokoh lima parpol mengungkapkan rendahnya pengaruh isu ini, bahkan ada yang berujar bahwa isu ini tidak pernah ada.

21 Dalam hal ini penekanan banyak diberikan pada vitalnya fungsi parpol sebagai lembaga demokrasi dan sarana perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Lihat, "Pernyataan Bersama", 9 Maret 1970.

22 Dalam tatap muka kelompok lima partai dengan Presiden, 12 Maret 1970, isu ini menyita banyak perhatian, baik Presiden maupun tokoh-tokoh lima parpol. Lo Ginting, misalnya, secara khusus memberikan penjelasan tentang akibat-akibat yang ditimbulkan isu ini terhadap mereka. Antara lain disebutkan bahwa isu pembubaran partai sekitar 11 Maret menimbulkan berbagai pengaruh, yakni, sebagai "letter of intent", munculnya isu ini "kena sasaran" juga. Meski demikian, ia menegaskan pula, "Pernyataan Bersama" mereka bukan diutamakan untuk menjawab isu tersebut, lihat, "Pertemuan Kelompok, ...., Op.cit.

pengumuman Pernyataan Bersama, yakni 9 Maret 1970,<sup>23</sup> maka sulit untuk tidak mengatakan isu pembubaran partai-partai telah berfungsi sebagai kekuatan pemaksa yang bertanggung jawab terhadap percepatan realisasi pembentukan kelompok ini. Menanggapi isu pembubaran partai-partai, Soeharto mengembuskan “kesejukan” tersendiri dengan memberikan jaminan bahwa ia tidak akan menempuh cara tersebut.<sup>24</sup> Penjernihan dan penegasan ini, dalam sejumlah batas, membuat hari-hari panjang yang mesti dilalui para elite parpol dengan kecemasan mulai berlalu, sekalipun tak sepenuhnya mampu menepis kecurigaan dan sekaligus kecemasan yang meluas di kalangan para elite parpol.

Proses pembentukan KDP juga banyak diwarnai sepak terjang politik para petugas penghubung Presiden Soeharto yang diarahkan untuk memacu pengelompokan. Para *petugas penghubung* ini awalnya digagas sebagai jembatan antara pihak partai dan presiden yang diharapkan ikut membantu partai-partai menyelesaikan masalah di sekitar pengelompokan.<sup>25</sup> Namun, dalam perkembangan selanjutnya mereka mengisyaratkan hal lain. Posisinya sebagai jembatan lebih banyak dimanfaatkan sebagai momentum legitimasi untuk secara permanen terlibat dalam intern PDI ketimbang untuk membantu kelima parpol. Bagi sebagian tokoh PDI, seperti

---

23 “Pernyataan Bersama” dikeluarkan tanggal 9 Maret 1970, 2 hari sebelum batas waktu pembubaran partai versi isu. Ini mengungkapkan bahwa tokoh lima parpol sendiri meyakini kebenaran isu ini dan, karenanya, mereka tidak berani melampaui toleransi waktu yang diizinkan.

24 Dalam pertemuan 12 Maret 1970 Presiden menegaskan, “walaupun saya sebagai pengemban TAP. MPRS No. IX secara konstitusional bisa membubarkan partai-partai politik, namun saya tegaskan, saya tidak berkeinginan untuk itu”. Akan tetapi, jaminan ini bukan tanpa catatan, karena Soeharto sekaligus mengingatkan agar parpol tidak boleh menjadi penghalang bagi pembangunan.

25 Dua Perwira tinggi AD, Ali Murtopo dan Sudjono Humardani ditunjuk oleh Presiden sebagai “petugas penghubung” sejak 12 Februari 1970. Lihat, “Catatan Konsultasi .....,” Op.cit.

terungkap dalam wawancara dengan penulis, para *penghubung* ini dipandang sebagai kekuatan ekstra PDI yang ikut andil dalam kemelut yang berlarut, walaupun bagi sebagian elite parpol yang mandiri dan berbobot kehadiran lembaga *penghubung* ini diyakini tidak memiliki makna yang berarti.<sup>26</sup>

Ide pengelompokan partai-partai yang diprakarsai Presiden tidak saja menyita perhatian kalangan parpol, tetapi juga menjadi perhatian kalangan luas di Indonesia. Hal ini tercermin dari sedemikian luas dan intensnya liputan media massa.<sup>27</sup> Ide tersebut telah melegalisasi terjadinya diskusi luas dengan variasi tanggapan yang beraneka pula. Sebagai misal, ada yang menganggap bahwa sekalipun ide tersebut simpatik dan menyegarkan, tetapi dipandang “terlambat” karena telah digodoknya UU tentang Pemilu yang mengambil bentuk sistem pemilihan proporsional dan bukan distrik.<sup>28</sup> Ada juga pihak yang menawarkan memulai ide tersebut justru berasal dari

---

26 Tokoh-tokoh semisal Hardi, Sukarni, M. Siregar, dan beberapa lainnya, adalah figur-figur yang sangat sulit ditaklukan ketika itu. Sejumlah kasus mengindikasikan hal ini. Sebagai contoh, pertemuan intern lima parpol, 7 Maret 1970, dilangsungkan di ruang kerja Siregar, padahal sebelumnya “petugas penghubung” sudah “menawarkan” bekas perumahan “Karkam” sebagai tempat pertemuan. Namun, “tawaran” ini ditolak tegas Sukarni dan Siregar. Contoh lainnya adalah penolakan tegas Hardi dan Sukarni atas “permintaan” para penghubung untuk ikut dalam rapat tersebut. Petugas penghubung akhirnya hanya disertakan ketika pertemuan sudah mencapai fase final, sesuai dengan keinginan Hardi dan Sukarni. Lihat, “Catatan Dari Pertemuan”, Op.cit.

27 Lihat, misalnya harian Kompas, Sinar Harapan, Pedoman, Indonesia Raya, KAMI, Suluh Marhaen, Berita Buana, Berita Yudha, dan sebagainya selama bulan-bulan Februari, Maret dan April 1970.

28 Misalnya, S. Tasrif, “Ide Pengelompokan Partai-partai” dalam “Kritik dan Komentar”, Indonesia Raya, 10 Maret 1970. Dengan mengambil bentuk atau sistem pemilihan proporsional, bukan distrik, menurut Tasrif, peluang kerja sama antarpapol menjadi mustahil. Kalaupun kerja sama terjadi, masih menurutnya, hal ini sekedar untuk tidak mengecewakan Presiden.



kalangan generasi muda<sup>29</sup> yang diandaikan steril dari konflik. Adam Malik, salah seorang tokoh utama MURBA di masa lalu yang akhirnya bergabung ke GOLKAR, menanggapi pelaksanaan gagasan pengelompokan partai-partai sebagai sesuatu yang menguntungkan, terutama bagi partai-partai kecil, karena dapat mengadakan *stembus accord*, sesuatu yang menurutnya tidak dikehendaki partai-partai asas.<sup>30</sup> Komentar-komentar serupa terus bermunculan. Bahkan jauh setelah gagasan penyatuan partai-partai terealisasi, ia masih tetap bertahan sebagai bahan perdebatan publik. Sementara itu kalangan media massa menghadirkan isu etika, yang mengingatkan agar menghindari penggunaan cara-cara pemaksaan dan mengharapkan agar pengelompokan dapat dibangun di atas *platform* bersama.<sup>31</sup> Hal-hal yang juga merupakan tuntutan dan harapan partai-partai seperti yang diungkapkan para petingginya selama wawancara dengan penulis. Akan tetapi, seperti yang dibuktikan dalam perjalanan sejarah parpol selanjutnya, terutama sejarah yang ditoreh PDI sendiri, tuntutan dan harapan di atas tetap menggelandang di dunia antah-berantah yang jauh dari keseharian mereka.

Pada skala mikro gagasan pengelompokan partai-partai mengakibatkan terjadinya pergulatan internal, baik antara lima parpol (PNI, PARKINDO, Partai Katolik, IP-KI, dan

---

29 Lihat, misalnya, Sufyar, "Satu Pemikiran tentang 'Pengelompokan' bagaimana kalau dimulai dari Pemuda?", dalam Suluh Marhaen, 7 Maret 1970. Dalam artikel ini Sufyar mengingatkan agar pengelompokan tidak bermakna sekadar "berkelompok", tapi harus dipahami sebagai suatu prinsip pengorganisasian. Untuk itu dua alternatif cara ditawarkan. *Pertama*, pengelompokan dicapai lewat operasionalisasi "sistem gugur" melalui mekanisme pemilihan umum—ide ini tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran dua parpol besar waktu itu, PNI dan NU. Dan *kedua*, apabila mekanisme di atas gagal dioperasionalkan, pencapaian gagasan di atas diwujudkan lewat ormas-ormas pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang diharapkan memainkan peranan sebagai pelopor.

30 Lihat, Sinar Harapan, 11 November 1970.

31 Lihat misalnya, "Induk Karangan", KAMI, 12 Februari 1970.

MURBA) maupun dalam internal masing-masing unsur. Guna merespons gagasan presiden, suatu rangkaian pertemuan di antara tokoh-tokoh lima parpol dilakukan, diawali pada tanggal 7 Maret 1970. "Soal-Soal Sekitar Pengelompokan Partai-Partai"<sup>32</sup> adalah fokus perbincangan dalam pertemuan yang menobatkan M. Siregar dari PARKINDO sebagai pimpinan tatap muka ini. Mengawali perbincangan, Siregar, meskipun menganjurkan untuk menghindari ketergesa-gesaan, tetap mengharapkan dapat dicapai "pertemuan pendapat" di antara mereka dalam merespons gagasan presiden. Setelah beberapa penjelasan umum Siregar, forum pertemuan dilanjutkan dengan mendengarkan serangkaian pendapat yang diajukan para petinggi masing-masing parpol. Ikut menyumbangkan pendapat berturut-turut Hardi dari PNI, Akhmad Sukarmadidjaja dari IP-KI, Lo Ginting mewakili Partai Katolik, Maruto Nitimihardjo mewakili MURBA dan M. Siregar dari PARKINDO. Pokok-pokok pembicaraan dalam pertemuan 7 Maret ini masih diwarnai hal-hal yang bersifat umum dan strategis, menyisakan persoalan-persoalan teknis operasional sebagai pekerjaan rumah. Dalam pertemuan ini, kembali tersingkap sejumlah persoalan, misalnya posisi eks Masyumi, PSI, dan ABRI dalam pengelompokan<sup>33</sup> yang sebenarnya sudah dipersoalkan dalam konsultasi dengan presiden. Mencuatnya hal ini mengindikasikan masih kaburnya ide pengelompokan bagi sebagian elite partai. Pertemuan ini juga diwarnai kekhawatiran kemungkinan munculnya polarisasi antara kelompok Islam dan non-Islam sebagai akibat langsung adanya pemisahan antara *kelompok material* dan *kelompok*

---

32 Pembicaraan berlangsung di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M. Siregar, di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Hardi dan Gde Djakse (PNI), Akhmad Sukarmadidjaja (IP-KI); Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (MURBA), V.B. Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik); serta M. Siregar dan Sabam Sirait (PARKINDO). Lihat, "Catatan Dari Pertemuan", Op.cit.

33 Dalam pertemuan dengan Presiden, 27 Februari 1970, M. Siregar mempersoalkan keterkaitan antara pengelompokan dan penyederhanaan dan hubungan antara parpol yang berkelompok dengan ABRI dan Golkar, *Ibid.*

*spiritual*<sup>34</sup>. Kecemasan yang sebenarnya juga telah dilontarkan dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto.<sup>35</sup>

Sekalipun kekhawatiran munculnya polarisasi antara kekuatan Islam dan non-Islam telah sedikit banyak dijelaskan Soeharto, tampaknya belum merupakan jawaban yang meyakinkan bagi pihak parpol. Hal ini terekam dari kenyataan bahwa pertanyaan di sekitar isu yang sama masih tetap mengedepan dalam pertemuan berikutnya antara lima partai politik pada 24 Maret 1970.<sup>36</sup> Terungkapnya ke permukaan kekhawatiran semacam ini bisa saja dibaca sebagai alternatif cara mengelakkan diri dari keterpaksaan mengikuti gagasan Presiden. Betapa pula, pengemasan isu polarisasi Islam dan non-Islam ke dalam bentuk kecemasan politik ini sedikit banyak mengharuskan Soeharto sebagai pencetus ide untuk melakukan kalkulasi kembali risiko-risiko politik yang mungkin mengekori ide pengelompokan partai-partai. Hasil kalkulasi kembali inilah yang diharapkan para elite parpol akan melunakan gagasan presiden. Dengan ini, pemunculan isu polarisasi ke dalam sekat-sekat kekuatan Islam dan non-Islam sedikit banyak harus dibaca sebagai mekanisme perlawanan terhadap gagasan dominan Soeharto kala itu. Akan tetapi, pemunculan isu polarisasi ini juga dapat dibaca secara lain, yakni sebagai ekspresi dari kematangan dan kearifan berpolitik para elite parpol yang

---

34 Keharusan untuk mengeliminasi bahaya ini dikedepankan oleh Hardi (PNI) dalam forum bersama lima parpol, 7 Maret 1970. *Ibid.*

35 Pada forum “konsultasi” dengan parpol, 12 Maret 1970, Presiden sendiri melihat adanya kemungkinan munculnya polarisasi ini. Akan tetapi, menurut Soeharto, ini menjadi mungkin bila ide pengelompokan dipandang dari sisi negatifnya. Karenanya, Presiden mengajak tokoh-tokoh parpol untuk melihatnya dari sisi positif yang menguntungkan bangsa dan negara.

36 Dalam pertemuan lima parpol, 24 Maret 1970, Supangat tetap mempersoalkan hal ini, bahkan disebutnya sebagai “soal tersulit”. Lihat “Pertemuan Lima Partai”, 24 Maret 1970. Hal ini kembali ditegaskannya dalam wawancara dengan penulis di kediamannya, Jl. Otista 70 Taman Indah 23, Jatinegara, Jakarta, pada 27 Agustus 1986.

mensubordinasikan kepentingan terbatas kelompoknya di bawah kepentingan bangsa yang lebih luas. Kematangan dan kearifan yang boleh jadi merupakan hasil kumulasi pengalaman yang menyadarkan mereka akan mahalnnya harga konflik sebagai akibat dari polarisasi seperti yang telah dibuktikan oleh sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Manakah di antara kedua kemungkinan di atas yang mendekati kebenaran, sulit dipastikan. Namun, bisa diperkirakan keduanya memainkan peranan berarti.

Untuk mengeliminir kemungkinan munculnya polarisasi yang tidak dikehendaki, yang mungkin saja mengekori langkah penyatuan partai-partai, tokoh-tokoh parpol *Kelompok Material-Spiritual* mempertimbangkan secara serius untuk menyertakan salah satu partai berbasis Islam dalam pengelompokan yang direncanakan.<sup>37</sup> Di samping itu, langkah lain untuk mengeliminir bahaya polarisasi adalah dengan mengajukan alternatif baru pengelompokan, yakni ke dalam 5 atau 4 kelompok. Alternatif ini memunculkan 2 kelompok Islam, 1 kelompok Nasionalis, 1 kelompok Kristen, dan 1 Kelompok Karya sebagai pelaku-pelaku di pentas politik Indonesia. Juga terdapat pemikiran untuk membelah pengelompokan pada skala sistem politik ke dalam dua kategori besar atau lebih, dikenal dengan *dwi grup*, seperti ditawarkan IP-KI.<sup>38</sup> Alternatif-alternatif di atas, sekali lagi, dapat dibaca sebagai bagian dari perlawanan politik elite parpol atas ide presiden yang dominan. Hanya saja, alternatif-alternatif gagasan di atas tidak berada dalam tataran yang selaras dengan

---

37 Wawancara penulis dengan tokoh-tokoh pembentuk KDP menguatkan hal ini. Dalam pertemuan lima parpol, 24 Maret 1970, Lo Ginting menginformasikan adanya keinginan salah satu partai Islam (PERU) dan tokoh-tokoh muda Islam untuk menyatu ke dalam kelompok mereka. Informasi ini disebutkan bersumber dari salah satu tokoh Islam, Subchan, *Ibid*.

38 Gagasan ini dikonstater oleh Maruto Nitimihardjo sebagai hal yang telah diterima oleh semua parpol ketika ia mengajukannya pada pertemuan I lima parpol, 7 Maret 1970. *Ibid*. Dalam wawancara dengan penulis, 27 Agustus 1986, M. Supangat (IP-KI) membenarkan adanya ide *dwi grup* ini.

gagasan Soeharto sehingga dalam perkembangan selanjutnya tenggelam di bawah bayang-bayang ide Kepala Negara.

Sekalipun ide mengeliminir kemungkinan terjadinya polarisasi Islam-non Islam gagal mengambil bentuk nyata, pihak lima parpol tetap berusaha mengurangi bahaya tersebut. Hal ini terungkap dalam pokok pikiran yang berhasil dikonsensuskan di antara mereka untuk Pernyataan Bersama.<sup>39</sup> Dalam pokok-pokok pikiran Pernyataan Bersama tersebut, hal yang relevan dengan kekuatiran munculnya polarisasi adalah, penegasan “prinsip keterbukaan bagi semua kekuatan sospol dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan nasional”.<sup>40</sup> Frasa ini merupakan fondasi terpenting bagi pembentukan (fusi) PDI seperti yang tercermin dalam Deklarasi Pembentukan PDI. Prinsip keterbukaan ini memberikan ruang yang sama bagi semua kelompok maupun individu, baik yang terbentuk atas dasar pembilahan secara horizontal (suku, agama, misalnya) atau secara vertikal (pelapisan sosial atau kelas), untuk menjadi bagian dari pengelompokan yang ada. Dalam ungkapan lain, prinsip ini membuka kesempatan bagi masing-masing kelompok melakukan *walk out* atau *walk-in (walk-up)*.<sup>41</sup>

Kemungkinan munculnya bahaya polarisasi Islam dan non-Islam, bukan saja menjadi bagian dari keprihatinan dan kecemasan tokoh-tokoh parpol. Hal ini juga menjadi keprihatinan dan kecemasan masyarakat luas, seperti yang

---

39 Pokok-pokok pikiran ini berhasil dirumuskan setelah 4 jam pertemuan elite-elite lima parpol di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M. Siregar, 9 Maret 1970. Lihat “Pernyataan Bersama”, 9 Maret 1970.

40 Prinsip ini merupakan hasil penggodokan sejak pertemuan pertama lima parpol, 7 Maret, yang disetujui oleh semua elite. Lihat “Catatan Dari Pertemuan Lima Parpol”, 7 Maret 1970, *Op.cit.*

41 Dikedepankan oleh Lo Ginting dalam pertemuan mereka, 24 Maret 1970; pertemuan yang dirancang sebagai forum lanjutan guna menuntaskan aneka masalah yang belum tersudahi selepas diumumkan pernyataan bersama, 9 Maret 1970. Lihat “Pertemuan ....”, 24 Maret 1970, *Op.cit.*

terungkap dari komentar-komentar yang dimunculkan oleh berbagai media massa.<sup>42</sup>

Kecemasan lain yang merebak selama pertemuan antarpetinggi partai adalah daya desakan Pemerintah yang sedemikian kuatnya agar mereka harus mengamini ide penyatuan versi Presiden yang harus diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kuatnya desakan ini, bahkan hingga perlu menghadirkan isu pembubaran partai-partai sampai batas waktu 11 Maret 1970 sebagai kekuatan pemaksa, melahirkan persoalan tersendiri bagi pihak lima partai. Persoalan-persoalan ini bukan saja berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi lintas unsur dan intra unsur yang memang sudah bisa diperkirakan sebelumnya, tapi juga berkaitan dengan eksistensi parpol di panggung politik Indonesia. Akhmad Sukarmadidjaja, tokoh teras IP-KI, mempertanyakan arti partai-partai dan perannya di mata Pemerintah. Ia sampai pada kesimpulan bahwa parpol hanya berfungsi sebagai alat legitimasi bagi Pemerintah, sesuatu yang secara tegas ditolaknya.<sup>43</sup> Serial pertemuan antara lima parpol juga, ditandai kecurigaan terhadap gagasan pengelompokan oleh presiden yang terungkap lewat munculnya tanda tanya di sekitar latar belakang ide ini yang diyakini melibatkan *vested interest* Pemerintah.<sup>44</sup> Ide penyatuan partai-partai ke dalam kandang yang satu ini diperkirakan punya kaitan logis dengan kepentingan penguasa untuk tampil sebagai pemenang dalam pemilu yang bakal digelar tahun 1971.

---

42 Sebagai contoh, lihat "Tajuk Rencana" Indonesia Raya, 12 Februari 1970, yang memuji ide Presiden yang dinilai tak akan muncul dari parpol, tetapi, di saat bersamaan, mengkhawatirkan efek dari pengelompokan yang "Islam saja". Lihat juga, "Induk Karang", KAMI, "Pengelompokan Partai Dari Segi Lain" yang mengedepankan kecemasan yang hampir sama.

43 Dikedepankannya dalam pertemuan lima parpol, 7 Maret 1970, terutama untuk merespons isu pembubaran partai-partai. Lihat, "Catatan Dari.....", 7 Maret 1970, *Op.cit.*

44 Penilaian ini dilontarkan Akhmad Sukarmadidjaja dalam pertemuan lima parpol, 7 Maret 1970. *Ibid.*

Sekalipun sederetan persoalan serius masih tetap menggantung sebagai mendung pekat di langit para parpol, tampaknya elite parpol telah mencapai kesepakatan untuk merespons ide Presiden Soeharto dengan dukungan. Ide ini diamini secara positif, karena mereka melihat urgensi pengelompokan bukan saja bagi kepentingan masing-masing parpol, tetapi juga masyarakat politik secara keseluruhan.<sup>45</sup> Dengan ini, rencana perjodohan dimufakati. Namun, ini belum akhir cerita yang diharapkan. “Cinta”, landasan bersama yang sangat dibutuhkan bagi pengelompokan, belum mengisyaratkan tanda-tanda kehadirannya. Ia masih harus ditemukan untuk kemudian dipupuk di antara lima parpol yang, sialnya, memiliki sangat sedikit alasan untuk saling mencintai. Sementara itu, menemukan bentuk dan batas-batas hubungan serta kata sandi, nama, bagi pengelompokan yang bisa sama dimengerti menjadi keharusan lain yang tak bisa ditunda. Hal-hal di atas menjadi krusial justru untuk memberikan makna bagi pengelompokan yang disepakati dan sekaligus untuk memastikan tetap tegaknya sopan santun dan tata krama di antara mereka.

## B. Perjalanan Mencari Cinta

Menyangkut bentuk pengelompokan, Hardi dari PNI mengusulkan agar mewajah dalam bentuk “kerja sama ringan” yang menjamin masing-masing parpol tetap memiliki kedaulatan dan identitas sendiri-sendiri. Atas dasar kerja sama ringan ini, Hardi membayangkan mereka akan menyusun *common platform* yang disandarkan pada *common interest*. M. Siregar (PARKINDO), dalam usulannya, lebih menitikberatkan pada hal-hal yang secara konkret bisa dilakukan dalam pengelompokan, khususnya dalam Pemilu 1971. *Stembus accord* ia pahami

---

<sup>45</sup> Di antara para tokoh parpol bahkan ada yang beranggapan bahwa ide kerja sama (pengelompokan) seharusnya datang dari mereka, tetapi kesempatan tersebut telah “dicuri” dari parpol. Lo Ginting, dalam pertemuan lima parpol, 7 Maret 1970. *Ibid.*

sebagai salah satu hal konkret yang mungkin bisa diwujudkan secara bersama-sama.

Perundingan tanggal 7 Maret 1970 antar lima parpol akhirnya difokuskan pada dua masalah utama. Pertama, apakah satu pernyataan bersama (deklarasi) akan dikeluarkan, setelah disetujui akan mengeluarkan sikap bersama, sebelum tanggal 11 Maret 1970. Forum akhirnya sepakat mengeluarkan “pengumuman” kerja sama lima parpol pada 9 Maret 1970. Sementara rumusan pernyataan kerja sama itu sendiri dilimpahkan penyusunan drafnya pada Hardi (PNI) dan akan dipelajari bersama dalam pertemuan berikutnya yang dijadwalkan pada 9 Maret 1970 di tempat yang sama. Penggarapan draf-draf tambahan dan perubahan dibebankan kepada pihak IP-KI dan MURBA, sementara PARKINDO dan Partai Katolik bertanggung jawab dalam menyusun “pokok-pokok pikiran” untuk pernyataan bersama dan pertemuan selanjutnya. Kedua, bagaimana sifat pengelompokan ini? Apakah akan terbuka bagi kekuatan-kekuatan sosial politik di luar lima parpol, terutama kekuatan Muslim, atau sebaliknya hanya terbatas pada lima parpol semata? Persoalan ini akhirnya ditangguhkan untuk dibicarakan lebih mendalam dalam pertemuan berikutnya.

Pertemuan ke II, 9 Maret 1970, difokuskan pada dua acara pokok. Pertama, penuntasan penyusunan naskah deklarasi atau pernyataan bersama. Untuk itu, forum kali ini mempelajari draf yang telah disiapkan oleh PNI (Hardi) dan draf-draf perbaikan dan tambahan yang dirancang oleh MURBA dan IP-KI. Penelaahan forum sampai pada kesimpulan bahwa perlunya pembentukan suatu kepanitiaan tersendiri. Panitia Perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni (PNI), M. Supangat (IP-KI), Murbantoko (MURBA), Lo SH. Ginting (Partai Katolik), dan Sabam Sirait (PARKINDO) akhirnya dibentuk. Panitia Perumus dipasrahi kewajiban merumuskan naskah “Pernyataan Bersama” lima



parpol berlabel *Material-Spiritual* yang berhasil dituntaskan saat itu juga. Setelah Panitia Perumus menyelesaikan tugasnya, rumusan yang ada kemudian ditandatangani masing-masing ketua parpol,<sup>46</sup> untuk selanjutnya diadakan konferensi pers dengan M. Siregar dari PARKINDO menjadi juru bicaranya.

Pada saat yang bersamaan dengan rapat Panitia Perumus, para ketua lima parpol mengadakan pertemuan dengan *petugas penghubung* Presiden Soeharto untuk menjelaskan hal-hal yang telah dicapai. Melihat momentum yang dipilih bagi hadirnya para *petugas penghubung*, jelas menunjukkan rendahnya pengaruh mereka. Lembaga ini hanya disertakan setelah semua masalah fundamental bagi pengelompokan berhasil diselesaikan oleh tokoh-tokoh lima parpol sendiri. Suatu hal yang pada perkembangan PDI khususnya, dan parpol lain umumnya, tidak pernah bisa dicapai lagi oleh partai-partai politik.

Sekalipun rumusan pernyataan bersama berhasil dibuat, tapi sebenarnya masih banyak masalah yang tidak terselesaikan. Beberapa di antaranya, yang banyak menyita pembicaraan, adalah masalah di sekitar fungsi partai, sesuatu yang hingga saat ini masih tetap kabur, hubungannya dengan ideologi, masalah keterbukaan, dan nama dari kelompok yang sudah dibentuk.

Kedua, materi pokok yang dibicarakan dalam pertemuan 9 Maret 1970 adalah penyusunan pokok-pokok pikiran selanjutnya yang diperlukan setelah deklarasi dikumandangkan. Persoalan ini terselesaikan setelah membahas materi-materi yang disiapkan kubu PARKINDO dan Partai Katolik.

Apabila diperhatikan rentang waktu keluarnya Pernyataan Bersama dengan momen pertama munculnya

---

46 Para penanda tangan "Pernyataan Bersama" adalah Hardi (PNI), Melancthon Siregar (PARKINDO), V.B. Da Costa (Partai Katolik), Akhmad Sukarmadidjaja (IP-KI), dan Sukarni Kartowidagdo (MURBA). Penandatanganan dilakukan pada 9 Maret 1970.

ide pengelompokan, yaitu 1 bulan 2 hari (7 Februari sampai dengan 9 Maret 1970) dan juga sedemikian banyaknya perbedaan di antara partai-partai politik, maka jangka waktu yang sedemikian singkat untuk menyelesaikan permasalahan politik yang demikian pelik hanya dapat ditafsirkan sebagai telah sedemikian matangnya tokoh-tokoh parpol dalam mengantisipasi perubahan politik yang berkembang, atau telah sedemikian kuatnya tekanan yang diterima elite-elite parpol sehingga mereka dihadapkan pada ketiadaan alternatif kecuali untuk menyetujui ide yang ada. Dan tampaknya alternatif jawaban kedua inilah yang lebih mungkin.<sup>47</sup>

Demikian pula, apabila diperhatikan figur-figur yang terlibat serta jumlahnya<sup>48</sup> dalam proses pengelompokan, jelas kesan keelitisan itu tidak terhindarkan. Pengelompokan hanya merupakan urusan elite, jauh dari pertimbangan massa pendukung (anggota) masing-masing (unsur) parpol. Bentuk penyelesaian seperti ini secara bertahap bertukar wajah menjadi suatu proses pelucutan kekuasaan politik anggota untuk dialihkan secara hampir mutlak ke tangan para elite parpol. Lebih jauh lagi, proses yang elitis telah membentangkan jarak psikologis yang semakin lebar antara pemimpin dengan massa dan semakin menyusutkan rasa tanggung jawab pemimpin terhadap massa. Perubahan orientasi ini, menandai fase awal kebangkrutan politik massa dan sekaligus membuka peluang yang semakin luas bagi pementapan konsep massa

---

47 Semua elite partai yang diwawancarai penulis mengindikasikan ke arah ini. Bahkan ada yang bertanya, "Coba dipikirkan secara obyektif, apakah mungkin parpol yang sedemikian berbeda latar belakang dan sebagainya rela untuk mengadakan pengelompokan?". Wawancara dengan Hardjantho, 8 Oktober 1986, di ruang Wakil Ketua DPR/MPR, Jakarta.

48 Elite yang terlibat kurang lebih berjumlah 14 orang yakni, antara lain, Hardi, Gde Djakse, Isnaeni (PNI), M. Siregar, Sabam Sirait (PARKINDO), V.B. Da Costa, Duriat, Lo Ginting, Harry Tjan (Partai Katolik), Akhmad Sukarmadidjaja, M. Supangat (IP-KI), dan Sukarni, Maruto Nitimihardjo, Murbantoko (ketiganya dari MURBA).

mengambang yang mulai dikenalkan Pemerintah. Ini sekaligus menandai era awal terjadinya eksodus orientasi politik para elite parpol dari massa ke Pemerintah, bahkan para elite tertentu yang bertakhta di lingkaran pusat kekuasaan. Gejala-gejala di atas, secara kumulatif, mengukuhkan keabsahan logika Hukum Besi Oligarki-nya Michels<sup>49</sup> dan menciptakan ketergantungan yang ekstrem dari elite-elite parpol pada para *godfather* politik di luar lingkungan perdikan parpol.<sup>50</sup> Sedikit banyak hal itu dapat menjelaskan munculnya rangkaian konflik internal dalam tubuh parpol pada umumnya, dan PDI pada khususnya.

Kembali ke *Pernyataan Bersama* lima parpol. Hal ini mendapat perhatian luas dan mengundang komentar yang luas pula.<sup>51</sup> *Pernyataan Bersama* tersebut tampak dengan jelas ingin menghilangkan kesan bahwa pengelompokan yang terbentuk semata-mata hanya karena adanya “anjuran” atau hanya dalam kerangka merespons gagasan Soeharto. Hal ini tampak dari pokok-pokok pikiran yang secara formal dirumuskan untuk menjustifikasi pengelompokan yang ada. Pokok-pokok pikiran ini, antara lain, menekankan hal-hal: menyadari tugas fundamental perjuangan rakyat Indonesia, menyadari tingkat perjuangan rakyat dalam mengisi kemerdekaan yang

---

49 Michels mengatakan bahwa Hukum Besi Oligarki adalah kondisi menyimpang perilaku penguasa yang diberi kewenangan menjalankan pemerintahan. Dalam artian, pemerintah bersama kaum borjuasi (pengusaha) menentukan secara mutlak kebijakan-kebijakan yang menyangkut kehidupan publik, seperti kebijakan politik, ekonomi maupun sosial, tanpa memperhatikan aspirasi dari bawah (rakyat). Lihat R. Michels, “The Iron Law of Oligarchy”, (Vol.III Encyclopedia Britannia, 1997).

50 Wawancara penulis dengan elite-elite lima parpol mengindikasikan bahwa setiap tokoh, terutama yang nantinya selalu terbelit sengketa internal, senantiasa mempunyai beking atau di-*back up* oleh elite tertentu di pusat-pusat kekuasaan (rezim).

51 Lihat misalnya, harian Suluh Marhaen, 11 Maret 1970; 21 Maret 1970; Berita Yudha, 11 Maret 1970; Angkatan Bersenjata, 11 Maret 1970 (editorial); Induk Karangan Kami, 11 Maret 1970; Kompas, 10 Maret 1970; Pedoman, 11 dan 23 Maret 1970.

membutuhkan peningkatan usaha bersama semua kekuatan politik, meyakini vitalnya fungsi parpol sebagai lembaga demokrasi dan alat perjuangan mengisi kemerdekaan, dan juga menghargai dan menyambut baik gagasan pengelompokan Presiden Soeharto. Atas dasar-dasar itulah, para petinggi lima parpol akhirnya sampai pada pernyataan penting mereka, yakni:

1. Ketersediaan untuk mengadakan kerja sama untuk kepentingan nasional,
2. Hal-hal yang menyangkut dasar, sifat, pengorganisasian, program kerja, prosedur dan nama kerja sama akan ditentukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Rumusan di atas, tampak mengikuti logika rumusan proklamasi kemerdekaan Indonesia, tetapi dengan konsekuensi-konsekuensi yang saling bertolak belakang.

Penyebarluasan naskah Pernyataan Bersama melalui media massa pada 9 Maret 1970 disusul acara-acara tatap muka dengan presiden.<sup>52</sup> Pada kesempatan tersebut, tokoh-tokoh parpol menjelaskan proses ke arah Pernyataan Bersama<sup>53</sup> dan rasionalitas di balik pemberian penekanan atau perhatian khusus pada fungsi parpol di dalam pernyataan mereka.<sup>54</sup>

Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, baik antara para tokoh kelima parpol itu maupun antara mereka dengan presiden, pembicaraan banyak dipusatkan pada persoalan

---

52 Presiden didampingi oleh, antara lain, Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono. Sedangkan petinggi-petinggi parpol yang hadir adalah Hardi dan Djakse (PNI); Akhmad Sukarmadidjaja dan M. Supangat (IP-KI); Maruto Sitimihardjo (MURBA); V. B. da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik); serta M. Siregar dan Sabam Sirait (PARKINDO). Lihat, "Pertemuan Kelompok ...", 12 Maret 1970, *Op.cit.*

53 Disampaikan oleh M. Siregar dan digarisbawahi oleh Hardi, *Ibid.*

54 Dikedepankan oleh Lo Ginting terutama untuk menanggapi isu pembubaran parpol.

interaksi parpol dengan kekuatan di luar parpol. Tetapi forum pertemuan kali ini justru membawa serta ke permukaan kesulitan internal salah satu kekuatan politik, yakni, IP-KI dalam rangka pengelompokan. IP-KI merasa dirugikan dengan masuk ke dalam kelompok ini, terutama karena kekuatan ini sejak awal pembentukannya tidak mengenal adanya asas khusus selain Pancasila. Inilah untuk kali pertama isu ideologi mengedepan secara terbuka, yang akan terus bergulir di sepanjang perjalanan PDI. Kesulitan lain yang dimunculkan tokoh IP-KI adalah bahwa dalam dirinya banyak tergabung warga eks Masyumi dan golongan Kristen/Katolik Sulawesi Utara.<sup>55</sup> Untuk menjembatani kesulitan internal ini, tokoh-tokoh IP-KI menawarkan alternatif lain dalam pengelompokan ini, yaitu meminta pada unsur-unsur lain untuk melepaskan “*beginsel*” masing-masing sebagai syarat kesertaannya dalam kelompok; atau kekuatan ini diizinkan dapat memilih bersekutu dengan kekuatan lain yang lebih diminati karena memiliki kesejajaran ideologi, yakni Golkar. Khusus mengenai alternatif terakhir, Soeharto mempersilahkan IP-KI bergabung ke dalam Golkar dengan syarat IP-KI harus membubarkan diri terlebih dahulu.<sup>56</sup> Sesuatu yang tidak disyaratkan bagi pengelompokan di luar Golkar. Dalam kesempatan lain, harapan IP-KI untuk bersekutu dengan Golkar ditanggapi lain oleh presiden. Jenderal Soeharto tetap mengharapkan IP-KI menjadi bagian sah dari pengelompokan yang ada guna mem-Pancasila-kan kelompok tersebut.<sup>57</sup> Sesuatu yang mengungkapkan keraguan Presiden terhadap orientasi dan komitmen ideologis empat kekuatan politik lainnya. Dengan munculnya persoalan

---

55 Dilonarkan oleh Sukarmadidjaja, “Pertemuan Kelompok 12 Maret 1970, *Op.cit.*”

56 Jawaban Presiden atas permintaan Achmad Sukarmadidjaja. *Ibid.*

57 Wawancara penulis dengan Mustafa Supangat di kediamannya, Jakarta, 5 September 1986, dan dengan M. Sadrie, di rumahnya, Gang Edi 1/66 Guntur, Jaksel, 7 September 1986.

IP-KI, berarti pula pengelompokan tidak saja menimbulkan konsekuensi- konsekuensi lintas parpol sebagai akibat terjadinya pola hubungan baru, tapi juga melahirkan problem internal masing-masing unsur yang tidak pernah tersudahi hingga sekarang.

Sebagai langkah lanjutan dan sekaligus konsekuensi dari Pernyataan bersama, setelah pertemuan dengan Presiden Soeharto pada 12 Maret 1970, kelima parpol mulai mengadakan serangkaian pertemuan guna menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan pengelompokan mereka. Pada tanggal 24 Maret 1970, bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M. Siregar, pertemuan kembali dilakukan.<sup>58</sup>

Pertemuan kali ini berusaha lebih memperjelas sosok kelompok yang telah dibentuk, baik menyangkut nama, sifat, pengorganisasian, program, dan juga dasar yang dijadikan sebagai pijakan bersama. Namun, sampai pertemuan kali ini pun IP-KI belum juga terbebas dari pergulatan internalnya. Akhmad Sukarmadidjaja, tokoh utama IP-KI, sekalipun secara pribadi menegaskan dapat menerima semua karya bersama ke arah pengelompokan, tetapi sikap politiknya ini belum cukup mampu meyakinkan para anggotanya. Pula, pengelompokan IP-KI ke dalam Kelompok Spiritual-Material akan menimbulkan persoalan sama, terutama yang menyangkut ideologi. Dengan alasan ini, IP-KI ingin mengadakan pertemuan tersendiri dengan Presiden guna membicarakan persoalan tersebut.<sup>59</sup> Setelah pertemuan ketika Soeharto memberikan “beban

---

58 Perundingan dihadiri oleh Hardi dan Usep Ranawijaya (PNI), V.B. da Costa, Lo Ginting dan Duriat (Partai Katolik), Akhmad Sukarmadidjadja dan Mustafa Supangat (IP-KI), M. Siregar, J.C.T. Simorangkir dan Sabam Sirait (PARKINDO), serta Maruto Nitimihardjo (MURBA). Lihat, “Pertemuan Lima Partai 24 Maret 1970, *Op.cit.*

59 Keruwetan internal unsur IP-KI ini disampaikan oleh Ketuanya, Akhmad Sukarmadidjadja, setelah M. Siregar sebagai pimpinan pertemuan membuka sidang, *Ibid.*

tambahan” kepada IP-KI dan sekaligus meyakinkan posisi ideologisnya sebagai kekuatan “pengawal Pancasila” yang, karenanya, memiliki kewajiban ideologis “mem-Pancasila-kan” pengelompokan yang ada, Dewan Pimpinan Pusat IP-KI dapat mengambil sikap tegas, yakni bergabung dengan empat parpol, meskipun ada reaksi dari daerah-daerah.<sup>60</sup> Pertemuan terpisah dengan presiden telah berfungsi sebagai kekuatan pembenar bagi elite IP-KI untuk mengabaikan tuntutan warganya. Ini bisa dipahami, karena para elite IP-KI bisa dengan mudah menemukan alasan “ketiadaan alternatif” sebagai jawaban politis kepada pengikutnya, sekalipun dari sudut kuantitas sangat kecil muncul persoalan, ketika IP-KI masuk ke salah satu pengelompokan.

Selepas rapat pertama para tokoh lima parpol dengan presiden mereka baru mulai membicarakan persoalan nama, sifat, pengorganisasian serta program kelompok setelah Sabam Sirait dari PARKINDO yang didukung M. Siregar, juga dari PARKINDO, mengusulkan hal tersebut. Menyambut usulan Sabam Sirait, Lo Ginting (Partai Katolik) mengusulkan “Kelompok Demokrasi Kesejahteraan” atau “Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan” sebagai calon nama bagi kelompok mereka setelah sebelumnya diusulkan bentuk kelompok dapat mengambil salah satu dari bentuk konfederasi, aliansi, koalisi, liga, atau badan kerja sama. Nama dan sifat pengelompokan yang ditawarkan Lo Ginting ini, sekalipun dipandang bagus oleh Maruto Nitimihardjo dari MURBA, tapi ia hanya setuju pada sifat atau bentuknya, tidak pada namanya. Secara spesifik Maruto memilih konfederasi sebagai bentuk atau sifat pengorganisasian karena pilihan-pilihan lainnya menurut tokoh MURBA ini, terlalu longgar.

---

60 Jawaban Sukarmadidjaja, terutama, guna menanggapi pertanyaan M. Nitimihardjo yang mempersoalkan apakah forum akan menanggapi persoalan yang diajukan IP-KI, serta untuk pertanyaan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan IP-KI. *Ibid.*

Sedangkan untuk nama, diusulkan “Kelompok Gotong Royong” sebagai perasan dari Pancasila, yang oleh Maruto Nitimihardjo dipandang sekaligus sebagai instrumen untuk menghindari terjadinya polarisasi Islam dan non-Islam seperti yang mereka cemaskan selama ini.

Usep Ranawidjaja dari PNI, dengan mempertimbangkan bobot isi yang dikandung dalam sebuah nama, ada tidaknya dukungan terhadap sebuah nama, serta efek psikopolitik yang ditimbulkan sebuah nama, mengusulkan “Kelompok Nasionalis” sebagai nama bagi pengelompokan yang akan dibentuk. Sama seperti tokoh-tokoh lainnya, Usep menyetujui konfederasi sebagai bentuk atau sifat dari pengelompokan. Sedangkan menyangkut nama “Kelompok Gotong Royong” seperti yang ditawarkan Maruto Nitimihardjo, Usep Ranawidjaja mengajukan keberatan. Penolakan ini terutama dikaitkan dengan efek psikopolitik yang ditimbulkannya. Gotong Royong merupakan jargon politik yang punya kaitan erat dengan Orde Lama. Karenanya, Usep mencemaskan pengadopsian sebutan ini akan membuka peluang ke arah penafsiran lain yang merugikan mereka. *Self-censorship* dalam hal nama ini, dengannya, merupakan langkah untuk mengelakkan risiko-risiko politik yang mungkin ditimbulkan oleh pilihan nama.

M. Supangat (IP-KI) mengusulkan Badan Kerja Sama sebagai sifat atau bentuk pengelompokan, dengan “Kelompok Pembangunan” sebagai namanya. Supangat punya alasan untuk ini. Baginya, pilihan atas sebuah nama harus mencerminkan substansi dari pergulatan di tingkat negara. Karena pergulatan utama Pemerintah adalah pembangunan, maka pilihan nama bagi bakal kelompok mereka harus pula paralel dengan tugas utama Pemerintah ini. Sabam Sirait, dengan melihat pada sifat kelompok yang terbuka bagi kekuatan lain dan bagi pembaharuan, juga kedaulatan dan identitas masing-masing masih dipertahankan, serta tujuan pengelompokan sendiri



yang terutama diarahkan untuk mengantisipasi Pemilu 1971—pokok-pokok pikiran yang sebelumnya sudah dikedepankan oleh Hardi, Siregar, dan Presiden Soeharto sendiri—mengusulkan “Kelompok Demokrasi dan Pembangunan” atau “Kelompok Sosial Demokrat” sebagai nama dari kelompok lima parpol ini. Tawaran Sabam, di satu sisi, memang mudah dibaca sebagai ekspresi dari preferensi PARKINDO, tetapi di saat bersamaan lebih metampakkan diri sebagai “jalan tengah” yang mengakomodasi berbagai ide yang berseliweran. Oleh karenanya, usulan ini dengan cepat merebut simpati Usep, sekalipun sejumlah catatan tetap diberikan Usep. Tanpa mengkhianati usulan awalnya, Usep melangkah lebih jauh dengan mengkombinasikan penggunaan istilah “Demokrat” yang ditawarkan Sabam dan “Nasionalis” yang digenggamnya. Hanya saja Usep menolak penggunaan label “Nasional Demokrat” karena berkonotasi “Barat”, dan lebih memilih “Kelompok Kerakyatan dan Kebangsaan” sebagai nama bagi pengelompokan. Pemakaian istilah “Kebangsaan” oleh Usep Ranawidjaja ditegaskan karena tugas-tugas kebangsaan masih sangat penting dan menonjol, terutama, dalam menghadapi tantangan dari luar dan dalam negeri yang makin menghebat, sesuatu yang menjadi visi tokoh-tokoh PNI sesamanya.

Upaya Usep meyakinkan semua pihak tidak berjalan mulus. Penolakan segera muncul dari kubu IP-KI. Bagi IP-KI, seperti terungkap dalam argumentasi Supangat, penekanan pada istilah “Kebangsaan” mengandung bahaya. Pemakaian istilah ini dapat menggiring pemikiran orang menafsirkan secara negatif bahwa kelompok mereka mengandaikan pihak lain tidak mempedulikan kebangsaan. Sebaliknya pengadopsian istilah “Pembangunan” seperti yang ditawarkan IP-KI, menurut Supangat, akan lebih menguntungkan karena memiliki kesejajaran dengan tugas utama rezim dan sekaligus karena istilah ini belum tentu digunakan oleh Kelompok Karya (kini

Golkar) sebagai namanya. Dengan penegasan M. Supangat ini, IP-KI bukan saja ingin menunjukkan penolakannya atas ide PNI (Usep), tetapi sekaligus ingin mempertegas usulan awalnya.

Maruto Nitimihardjo dari MURBA jauh lebih arif dalam menerima gagasan lainnya. Setelah mempertimbangkan berbagai keberatan yang diajukan sehubungan nama yang diusulkannya, yakni "Gotong Royong", tokoh ini sepakat dengan kehendak umum untuk menghindari pemakaian istilah ini. Sebagai gantinya, Maruto Nitimihardjo mendukung penggunaan "Pembangunan" sebagaimana ditawarkan IP-KI. Rasionalitas di balik dukungannya adalah bahwa dalam istilah "Pembangunan" mengandung aksi, tindakan. Akan tetapi, bisa diperkirakan bahwa ini baru separuh alasan. Sebagian lainnya tersimpan di wilayah kepentingan keduanya seperti yang akan terungkap dalam sejarah perkembangan PDI berikutnya. MURBA, lewat Maruto Nitimihardjo, tampaknya juga tidak sepenuhnya ingin menjadi penyokong fanatik dari ide IP-KI. Tokoh ini tetap membuka diri bagi ide "Kerakyatan" dan "Kebangsaan" seperti yang ditawarkan Partai Katolik, PARKINDO dan PNI. Hanya saja, Maruto menegaskan lebih memihak yang pertama ketimbang yang terakhir seandainya harus memilih salah satu di antaranya.

Memperhatikan perkembangan pembicaraan, Sabam Sirait, mengajak Usep Ranawidjaja untuk melangkah maju dengan mempertimbangkan bahwa mereka semua adalah "nasionalis-nasionalis sejati" yang tak perlu diragukan lagi rasa kebangsaannya. Selain dasar ini, dan dengan melihat tantangan dan tugas berat di antara mereka, penekanan lainnya adalah menyangkut kerakyatan dan pembangunan. Setelah menguraikan perkembangan penggunaan istilah "Kerakyatan" yang sejak tahun 60-an lebih diresapi dalam istilah "Demokrasi", Sabam menawarkan untuk menamai kelompok mereka dengan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan" atau "Kelompok Demokrasi Pembangunan". Sedangkan sifat atau bentuknya,

tetap konfederasi—agar lebih dimengerti masyarakat, dipakai istilah Badan Kerja Sama (BKS). Akhirnya, Usep Ranawidjaja. menyetujui nama “Kelompok Demokrasi Pembangunan” dalam rangka perwujudan BKS yang isinya konfederasi.<sup>61</sup> Karena masing-masing ide tampak bisa diakomodasi ke dalam nama-nama yang ada, ia juga menemukan pendukungnya di kubu IP-KI, MURBA, dan Partai Katolik. Kelompok ini akhirnya muncul dengan nama “Badan Kerja Sama Demokrasi Pembangunan” atau lebih sering disebut “Kelompok Demokrasi Pembangunan” (KDP).

Dari gejala di atas, jelas terungkap bahwa proses ke arah penentuan nama merupakan perwajahan dari proses pertarungan politik antara masing-masing kekuatan pembentuk kelompok baru ini. Perjuangan di sekitar ini menjadi demikian berarti bagi masing-masing elite parpol bukan dalam makna ideologisnya, tapi justru dalam makna praktis dan simbolisnya. Hal ini hanya bisa dimengerti kalau diperhatikan bahwa arena politik satu-satunya yang masih bermakna dan disisakan bagi elite parpol adalah dalam kelompoknya sendiri. Karenanya, kegagalan dalam memperjuangkan ruang politik dan memberikan makna politik yang sesuai bagi diri sendiri dan kelompoknya berarti pula kematian politik. Pada saat yang bersamaan, kita dapat menyaksikan awal kelahiran koalisi tak sengaja antar empat parpol kecil (IP-KI, MURBA, PARKINDO, dan Partai Katolik) yang saling menopang sehingga, di satu sisi, mampu menggagalkan usulan yang ditawarkan PNI (diwakili Usep Ranawidjaja) sekaligus, di sisi lain, mampu mempertahankan usulan awal mereka. Munculnya “koalisi tak sengaja” ini, seperti yang terungkap secara lebih gamblang dalam perkembangan PDI berikutnya, dimotori oleh kekuatan yang sama, yakni ketakutan akan kemungkinan dominasi PNI

---

61 Uraian tentang nama kelompok, terutama didasarkan pada dokumen “Pertemuan Lima Partai...”, *Op.cit.*

dalam kelompok baru ini. Ketakutan bersama semacam ini, tampaknya terus berlanjut hingga masuknya kelima parpol ke dalam PDI dan sekaligus merupakan salah satu akar penyebab yang sangat penting bagi lahir dan tetap bertahannya kemelut di kandang sang Banteng.

Perdebatan panjang para elite lima parpol pada 24 Maret 1970, di samping berhasil menyelesaikan sengketa atas nama bagi kelompok lima parpol ini, berhasil menetapkan dua orang sebagai narahubung yang bertugas di BKS, yakni M. Siregar dari PARKINDO dan Hardi dari PNI. Siregar disepakati sebagai figur yang bertindak sebagai ketua, sedangkan Hardi menggantikannya apabila berhalangan. Juga disepakati rencana pertemuan-pertemuan lanjutan, tanpa perlu dihadiri para ketua umum atau salah satu unsur, dengan syarat pertemuan serupa tidak dapat mengambil keputusan. Dengan ini benih-benih awal cinta sudah tersemai. Namun, masih diperlukan waktu lebih dari setahun lagi bagi benih-benih awal cinta ini untuk mekar. Ini pun hanya dimungkinkan berkat kehadiran tangan-tangan terampil yang mampu meramu sejumlah kemustahilan untuk menjadi kenyataan.

### **C. KDP: Perjudohan Awal**

Menjelang pelantikan anggota-anggota DPR RI hasil Pemilihan Umum 1971, pada 28 Oktober 1971 Presiden Soeharto mengundang parpol-parpol dan Golkar ke Istana Merdeka guna membicarakan masalah-masalah kenegaraan yang penting. Pertemuan tersebut berlangsung selama dua kali, masing-masing pada tanggal 6 dan 8 Oktober 1971. Dua forum ini membahas tiga masalah politik pokok. *Pertama*, masalah yang menyangkut DPR hasil Pemilu 1971 yang meliputi pelantikan, pembagian fraksi serta masalah voting. Gagasan pembentukan “fraksi bersama” muncul ke permukaan sebagai salah satu agenda yang harus dipikirkan pihak kekuatan-kekuatan politik.

*Kedua*, menyangkut pengelompokan partai-partai dalam rangka penyederhanaan kepartaian. Pengelompokan yang telah ada, oleh presiden, ditegaskan sebagai tahap pertama menuju penyederhanaan kepartaian di Indonesia. Terminal akhir perjalanan penyederhanaan kepartaian itu sendiri, menurut visi Soeharto, hanya akan menyisakan “*tiga bendera*” (tanda gambar) yang dibayangkan sudah harus terwujud dalam Pemilu berikut yang diagendakan pada tahun 1976. Meskipun presiden hanya menghendaki tiga tanda gambar dalam musim Pemilu nanti, ia sendiri menegaskan tidak mengharapkan adanya pembubaran partai-partai atau fusi di antara mereka, kecuali bila dikehendaki sendiri oleh partai-partai itu. Dengan pertimbangan dan penegasan seperti ini, presiden hanya mengharapkan terjadinya suatu konfederasi antarpol dalam membawa satu tanda gambar yang sama dalam menghadapi Pemilu 1976. Eksistensi masing-masing parpol, seperti yang banyak dicemaskan elite parpol akan berakhir, tetap terjamin. Akan tetapi, hal ini akan bergeser secara drastis beberapa saat kemudian ketika fusi menjadi pilihan tunggal bagi masing-masing kekuatan politik.

*Ketiga*, menyangkut status MPRS setelah terpilihnya anggota-anggota DPR—yang juga merupakan anggota MPR—, dan ikwhal Pimpinan MPR mendatang. Perangkapan atau pemisahan jabatan antara pimpinan MPR dan DPR mengedepan sebagai isu.

Masalah-masalah atau gagasan-gagasan yang disampaikan Presiden Soeharto di atas diharapkan akan ditanggapi oleh pihak partai-partai dan Golkar yang dijadwalkan bertemu lagi dengan Presiden pada tanggal 8 Oktober 1971 atau dua hari setelah pertemuan 6 Oktober 1971 itu.

Guna merespons hal-hal di atas, di samping adanya pertemuan internal masing-masing parpol, atas prakarsa pihak

IP-KI (Hasjim Ning dan Akhmad Sukarmadidjaja), digelar pula suatu arena bersama (wadah pertemuan) bagi lima parpol anggota KDP pada 7 Oktober 1971 di kediaman Hasjim Ning. Pertemuan ini berhasil mencapai beberapa kesepakatan medasar. Kesepakatan menonjol adalah, KDP diikrarkan bersifat terbuka sehingga membuka ruang yang luas bagi anggota kelompok untuk berpindah kelompok dan, sebaliknya, bagi yang bukan anggota untuk menjadi bagian dari KDP. Prinsip ini diekspresikan, antara lain, dalam sikap PARKINDO dan Partai Katolik yang seutuhnya menyetujui diusahakannya salah satu atau beberapa Partai Islam masuk menjadi anggota KDP. Sementara itu, menanggapi gagasan “fraksi bersama” yang “diusulkan” Presiden Soeharto, elite-elite KDP sepakat mewujudkannya dalam bentuk “gabungan fraksi”. Berbagai pokok kesepakatan ini akhirnya disampaikan kepada Presiden Soeharto pada pertemuan kedua, yakni pada 8 Oktober 1971, oleh masing-masing parpol anggota KDP.<sup>62</sup>

Pada 25 Oktober 1971, sekali lagi presiden mengadakan pertemuan dengan partai-partai, Golkar, dan ABRI yang mempunyai perwakilan di DPR dengan fokus pembicaraan diarahkan pada masalah: Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi-fraksi di DPR, serta juru bicara masing-masing fraksi.

Mengenai Pimpinan DPR, Presiden Soeharto mengusulkan agar posisi sangat terhormat tersebut dipasrahkan kepada wakil dari partai yang memperoleh suara (kursi) terbanyak dalam Pemilu 1971, yakni NU. Secara langsung dan khusus Presiden Soeharto menunjuk Idham Chalid untuk nantinya bertindak sebagai Ketua DPR. Sedangkan untuk posisi Wakil-Wakil Ketua,

---

62 Pertemuan II tidak bersifat kolektif seperti pada pertemuan I. Masing-masing unsur mendapat jatah gilirannya masing-masing untuk menemui Presiden. Uraian di sekitar ini terutama didasarkan pada stensilan yang dikeluarkan DPP IP-KI, “Penjelasan Mengenai Situasi Politik serta Eksistensi Partai-Partai Politik Pada Saat Akhir-akhir ini”, 30 Oktober 1971.

Presiden mengusulkan adanya 4 wakil ketua yang mewakili empat fraksi yang berumah di DPR: Fraksi ABRI, Fraksi Golkar, Fraksi KDP dan KPP (Kelompok Persatuan Pembangunan, yang akhirnya menjadi Partai Persatuan Pembangunan, PPP). Lebih jauh lagi, Presiden Soeharto mengusulkan figur-figur yang layak menduduki posisi Wakil Ketua DPR di atas. Masing-masing mereka adalah Irjen (POL) Domo Pratomo sebagai perwakilan dari Fraksi ABRI; Drs. Sumiskun mewakili Fraksi Golkar; Mh. Isnaeni mewakili kepentingan Fraksi KDP; dan J. Naro, SH. bertindak atas nama Fraksi KPP. Rangkaian usulan Presiden Soeharto di atas, menurutnya, dimaksudkan sebagai realisasi pertemuan tanggal 6 dan 8 Oktober 1971 yang lalu. Sedangkan mengenai Pimpinan-Pimpinan Fraksi di DPR, yang sedianya akan dituntaskan dalam pertemuan kali ini, ditunda pembicaraannya dan diagendakan untuk dibicarakan kembali seusaai Pimpinan DPR dengan susunan seperti diusulkan di atas sudah terwujud.

Bisa dipastikan kealpaan pimpinan fraksi akan memperumit persoalan komunikasi di Dewan. Menyadari hal ini, Soeharto merasa perlu mengusulkan kehadiran lembaga juru bicara setiap fraksi guna memecahkan persoalan di atas. Usulan itu terus berlanjut hingga pada tingkat yang lebih konkret ketika sejumlah nama ditawarkan oleh Presiden Soeharto untuk melakoni fungsi sebagai jembatan penghubung antara fraksi dengan Ketua Sementara DPR. Posisi jembatan dimaksudkan terutama untuk meratakan jalan bagi proses pemilihan Ketua dan Wakil Ketua (tetap) DPR, sehingga usulan Soeharto tidak menemukan kesulitan berarti dalam perjalanannya. Dari pihak fraksi KDP, Presiden mengajukan nama-nama Flarjantho (PNI), V.B. da Costa (Partai Katolik), dan J.D. Tahamata (PARKINDO) sebagai juru bicara bagi Fraksi KDP.

Selepas pertemuan dengan Soeharto itu, maka, atas inisiatif partai-partai yang hadir dalam pertemuan tanggal 25

Oktober 1971—PNI, PARKINDO dan Partai Katolik (IP-KI dan MURBA tidak mempunyai wakil di DPR)—, dirancang suatu forum bersama lima parpol anggota KDP, dengan mengambil tempat di rumah Sunawar Sukowati (PNI), di Jakarta, pada 27 Oktober 1971. Forum kali ini mengupas hasil pertemuan dengan Presiden Soeharto. Setelah melalui rangkaian pembicaraan yang alot dan berkepanjangan di meja perundingan, forum akhirnya mencapai beberapa kesepakatan mendasar. Kesepakatan pertama adalah mengeluarkan “Pernyataan Bersama” yang ditujukan kepada Ketua Sementara DPR tentang tiga hal penting, masing-masing:

- *Terbentuknya Fraksi Kelompok Pembangunan di DPR dengan nama Fraksi Demokrasi Pembangunan,*
- *Mengusulkan Mh. Isnaeni sebagai Wakil Ketua DPR dari Fraksi KDP,*
- *Menunjuk Drs. Hardjantho, V.B. da Costa serta J. Tahamata sebagai juru bicara Fraksi KDP dalam mengurus segala persoalan dengan Ketua Sementara DPR-RI.*

Dengan hasil ini, berarti pula parpol tunduk pada usulan presiden. Tidak satu pun butir kesepakatan yang mengindikasikan adanya bias dari rancangan dasar yang dimunculkan Soeharto. Nama-nama yang ditawarkan parpol, seperti terekam di atas, seutuhnya mencerminkan preferensi presiden. Di samping kesepakatan di atas, pertemuan 27 Oktober juga mengeluarkan keputusan- keputusan lainnya yang sama-sama mendasarnya. Keluar, forum menghasilkan dua hal penting yakni, *pertama*, mengeluarkan “Pernyataan Bersama Tentang Pengukuhan KDP”. Dan *kedua*, mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap terbentuknya Fraksi KDP di DPR. Sementara ke dalam, ke internal masing-masing partai anggota KDP, forum pertemuan kali ini mengeluarkan “Instruksi Bersama” yang ditujukan pada cabang-cabang di daerah-daerah



untuk juga mengimitasi hasil kerja pengurus pusat dengan membentuk KDP-KDP di tempat masing-masing, dan sekaligus membentuk Fraksi dengan pola dasar yang sama di masing-masing DPRD. Di antara elite lima parpol sendiri, dicapai titik-temu untuk membentuk “Panitia Lima” yang, jauh dari mencerminkan jumlah anggotanya, masing-masing kekuatan politik diwakili oleh dua orang yang bertindak sebagai anggota panitia. Panitia ini bertugas menyusun draf struktur organisasi dan hal-hal lain yang berhubungan dengan KDP.

Selama setidaknya setahun, aktivitas KDP tidak pernah terdengar lagi, bahkan secara samar-samar sekalipun. Ledakan aktivitas baru terjadi selepas rangkaian pembicaraan dengan Presiden Soeharto. Oleh karenanya, “prestasi- prestasi” yang dicapai di antara mereka, seperti disebutkan di atas, jelas berkorelasi secara langsung dengan berbagai “saran” dan “usul” Soeharto dalam pertemuan-pertemuan bersama mereka. Serangkaian pertemuan dengan Soeharto dan sekaligus aneka usulan yang ditawarkannya telah berfungsi sebagai “pemacu” bagi KDP atau bahkan telah menjadi “tekanan terselubung” bagi anggota-anggota KDP untuk lebih bersegera merealisasikan gagasan pengelompokan hingga mencapai titik tuntas. Hal ini tampaknya sangat manjur, yang terungkap lewat keluarnya “*Pernyataan Pengukuhan*” yang diikuti berbagai aktivitas selanjutnya. “*Pernyataan Pengukuhan*” lima parpol yang ditandatangani masing- masing ketua, 28 Oktober 1971,<sup>63</sup> dengannya, lebih merupakan jawaban atas berbagai pembicaraan dengan Presiden Soeharto selama bulan Oktober 1971 ketimbang suatu keputusan sukarela masing-

---

63 Pemilihan tanggal ini, betapa pun, bukan suatu kebetulan, tetapi terkait dengan dua pertimbangan pokok. *Pertama*, kesakralan yang melekat pada tanggal ini; sesuatu yang sangat *inheren* dalam kultur Indonesia. *Kedua*, dan ini yang terpenting, karena bertepatan dengan saat pelantikan anggota DPR Pemilu 1971, di mana sebelumnya Presiden telah menekankan perlu kehadiran Fraksi KDP di DPR.

masing kekuatan politik. Akibatnya, kesan ketergesa-gesaan mendominasi “Pernyataan Pengukuhan” ini.

Ketergesa-gesaan semakin terasa, apalagi jika deretan masalah fundamental yang belum terselesaikan di antara mereka ikut diperhitungkan. Persoalan-persoalan seperti pimpinan kelompok, tata pengorganisasiannya, dan juga programnya masih menggantung sebagai persoalan tidak terselesaikan. Padahal mudah disepakati bahwa hal-hal tersebut sedemikian pentingnya bagi suatu organisasi, betapa pun longgarnya ikatan di antara mereka. Memang bisa dimaklumi, kesibukan menyongsong Pemilu 1971 menyita perhatian, energi, dan sumber daya masing-masing kekuatan politik pembentuk KDP karena bertalian dengan eksistensi masing-masing. Akan tetapi, kiranya bukan merupakan suatu alasan yang kuat bila dilihat sebelumnya mereka telah bersedia bekerja sama.

Hal-hal berkenaan tata cara keorganisasian KDP yang sangat prinsipiell bagi organisasi ini menyita waktu satu tahun dan dua puluh hari untuk dapat dirampungkan, yaitu dengan ditetapkannya “Ketentuan- ketentuan Pokok Kelompok Demokrasi Pembangunan”, pada 8 Maret 1972. Ketentuan-ketentuan ini merupakan hasil puncak dari rangkaian pertemuan maraton yang dilaksanakan, masing-masing: 28 Oktober 1970 antara para pimpinan lima parpol; hasil pertemuan Panitia 5 pada 3 dan 10 November 1971, dan pada 11 dan 16 Desember 1971; serta pertemuan antar-Pimpinan Pusat lima parpol, berturut-turut pada 15 dan 26 November 1971, 3 dan 14 Januari 1972, serta 8 Februari 1972.

Walaupun telah dicapai kesepakatan mengenai “Ketentuan-Ketentuan Pokok”, sejumlah problema pelik masih tersisa, yang akhirnya dituangkan dalam bentuk “Memorandum”. Tiga masalah krusial tercatat dalam memorandum ini, yakni:

- *Masalah dwi partai atau dwi grup,*
- *Masalah keanggotaan perorangan dan/atau organisasi massa yang tidak berafiliasi dengan Partai anggota Kelompok Demokrasi Pembangunan,*
- *Masalah hak-hak asasi manusia.*

Ketiga isu di atas, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Februari 1972, bertepatan dengan pengesahan penandatanganan “Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP”. “Dwi Partai”, tampaknya merupakan gagasan lama yang kembali digulirkan IP-KI yang, dalam kerangka penyederhanaan kehidupan kepartaian, lebih menghendaki adanya dua partai sebagai aktor-aktor di panggung politik nasional. Boleh jadi IP-KI mengandaikan kehidupan kepartaian yang ideal dengan hanya melibatkan interaksi dua kekuatan politik, masing-masing partai Pemerintah atau partai yang berkuasa dan partai oposisi. Gagasan ini, tampaknya jauh dari preferensi yang ada di benak kekuatan-kekuatan politik lainnya. PNI, meskipun pada awalnya tidak menentang ide “dwi grup” atau “dwi partai” secara terbuka, tetap meletakkan syarat, yakni asalkan dilaksanakan dengan cara wajar tanpa pemaksaan dari atas. Dalam perkembangan pembicaraan, posisi PNI berubah secara drastis. Konsepsi “dwi partai”, setelah dikontraskan dengan konstitusi Indonesia, akhirnya ditolak PNI. Bagi elite-elite PNI, karena penjelasan Pasal 22 UUD 1945 tidak mengenal Sistem Parlementer, maka mereka menolak gagasan “dwi grup” atau “dwi partai” dalam pengertian adanya dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni satu pemerintah dan satu oposisi. Dengan bangunan logika di atas, kubu PNI lebih jauh menegaskan, jika dalam Sidang MPR hasil Pemilu 1971 ada kekuatan yang menginginkan perwajahan riil dari ide “dwi grup”, maka itu berarti harus ada perombakan dalam konstitusi yang justru merupakan kebalikan dari tujuan Pemilu 1971. Dengan pendirian ini, masuknya persoalan “dwi grup” ke dalam agenda utama perbincangan KDP sangat sulit diamini PNI. PNI, lebih

cenderung bermain dengan ide “tiga polarisasi”, yakni antara Kekuatan Nasionalis, Kekuatan Agama, dan Kekuatan Karya.<sup>64</sup> Preferensi PNI ini sangat mudah dimaklumi karena secara pasti akan memberikan kaveling politik baginya sebagai kekuatan yang meyakini dirinya dan sekaligus diangankan pihak lain sebagai wakil paling absah dari kekuatan nasionalis di lahan politik nasional.

Sekalipun gagasan “dwi grup” dalam KDP ditawarkan IP-KI, tidak berarti persoalan ini steril dari pertimbangan lain. Salah satu faktor yang bisa banyak menjelaskan kuatnya penolakan atas gagasan yang ada adalah bahwa ia merupakan bagian dari strategi elite-elite Orba yang konon akan menggalang pembentukan “dwi grup” pada tahun 1974 guna merombak struktur politik. Gagasan ini, nantinya dikenal dengan sebutan “Deklarasi ’74”, yang merupakan hasil penyusunan bersama beberapa perwira utama Orba.<sup>65</sup> Dengan memperhatikan latar belakang seperti ini, maka logis apabila PNI sebagai kekuatan yang pernah menikmati kebesaran dan banyak mengalami masa-masa sulit sejak Orba hadir sebagai penguasa baru, akan bertarung habis-habisan untuk menihilkan setiap ide yang dipikirkan mewakili dunia yang diangankan elite Orba.

---

64 Lihat pandangan Isnaeni (PNI), seperti dikutip, Sinar Harapan, 23 Maret 1971.

65 *Ibid.* Crouch, melihat ide “dwi grup” sebagai raut reaksi kelompok radikal Angkatan Darat yang menolak kehadiran parpol atas banyaknya konsesi yang diberikan Pemerintah terhadap parpol. Dalam kalkulasi kekuatan ini, apabila ide ini diwujudkan, parpol-parpol yang ada akan dibubarkan untuk digantikan oleh dua parpol baru. Pemerintah Pusat, walaupun bersimpati terhadap usul ini, masih menurut Crouch, tetap tidak memberikan izin untuk mengambil tindakan keras terhadap parpol di Jawa Barat karena mengkhawatirkan pembalasan parpol di daerah-daerah lain. Gagasan ini sebenarnya berawal dari gagasan “dwi partai” yang dilunakkan oleh Dharsono, Panglima Siliwangi, dkk.nya, sebagai akibat dari adanya pembatasan oleh Pusat. Sejak tahun 1969, sistem “dwi grup” ini telah mewarnai DPRD di beberapa Kabupaten di Jawa Barat. Lihat Harold Crouch, 1986, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, hal. 283-284. Sumber lain menyebutkan, ide “dwi grup” merupakan hasil musyawarah masyarakat Jabar tahun 1967 yang didukung kuat oleh Dharsono, Panglima Siliwangi.

Gagasan “dwi grup” adalah salah satu darinya. Dengan ini, realisasi ide ini bukan saja menganggangi konstitusi, seperti yang didebat Isnaeni, guna memistifikasi penolakan PNI, tapi, yang lebih mendasar lagi, karena secara langsung bermakna sebagai penciutan yang semakin drastis bagi ruang gerak parpol, terutama PNI, yang sudah mengalami kesulitan intern sebagai akibat langsung dari penciutan struktur internalnya. Demikian pula, melihat hulunya, ide “dwi grup” yang diperkirakan berpangkal pada elite-elite utama Orba, maka lumrah bila ide yang secara aktual dimunculkan IP-KI ini kemudian dicurigai dan tidak dikehendaki empat parpol lainnya, terutama PNI. Ide ini dipertimbangkan sebagai ekspresi dari adanya intervensi pihak luar ke dalam wilayah kedaulatan KDP. Kecurigaan ini menjadi semakin sempurna karena akar kesejarahan IP-KI sebagai kekuatan yang dikreasikan oleh tangan tangan sejumlah perwira Angkatan Darat serta purnawirawan. Situasi kecurigaan seperti ini, sekalipun dalam realitasnya belum tentu benar, tetap bertahan dan menjadi bagian dari perjalanan KDP, untuk seterusnya menerabas masuk ke halaman PDI sebagai partai baru.

Permasalahan kedua adalah ikhwal keanggotaan. Polarisasi antara sifat perorangan dan/atau organisasi muncul sebagai isu, hanya saja sulit dipastikan sumbernya. Wawancara

penulis dengan tokoh-tokoh lima parpol<sup>66</sup> mengindikasikan bahwa ide ini berpangkal dari pihak Partai Katolik yang tidak dapat memberikan jaminan masuknya secara otomatis para anggota dan organisasi massa di bawah payung perlindungannya dalam KDP, bahkan partai baru nantinya. Salah satu persoalan yang nantinya juga menjadi sumber pertikaian dalam PDI, terutama dalam hal alokasi kekuasaan, lebih khusus lagi dalam alokasi figur ke posisi-posisi politik di dalam maupun di luar struktur PDI.

Persoalan ketiga, yaitu persoalan hak-hak asasi manusia, yang juga sulit ditelusuri asal-muasalnya. Namun, secara tidak langsung, dalam wawancara dengan penulis, beberapa tokoh kelima parpol tersebut mengindikasikan persoalan tersebut bermula dari kubu PARKINDO yang menghendaki dimasukkannya masalah hak-hak asasi manusia dalam “Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP”.<sup>67</sup> Dalam perkembangannya,

---

66 Wawancara dengan Mh. Isnaeni di kediamannya pada 21 Agustus 1986. Diungkapkan Isnaeni, anggota atau organisasi yang dipayungi Partai Katolik tidak dibawa serta ke dalam pengelompokan, juga ke PDI, tetapi justru sebaliknya lebih banyak yang melakukan eksodus politik ke Golkar. Wawancara penulis dengan Lo Ginting (Partai Katolik) di kantornya pada 17 September 1986, juga membenarkan sinyalemen Isnaeni itu. Lo Ginting bahkan menekankan, ia sudah menegaskan kepada unsur-unsur lainnya bahwa partainya tidak dapat menjamin dan memaksakan anggota dan organisasi massanya untuk masuk dalam KDP atau partai baru yang akan dibentuk nantinya. Hal ini boleh jadi berkaitan dengan tradisi penggunaan “saluran majemuk” oleh umat Katolik dalam berpolitik yang menempatkan partai sebatas sebagai salah satu kemungkinan saluran. Pendapat baik Isnaeni dan Lo Ginting tadi dibantah oleh Samosir dalam kesempatan wawancara dengan penulis. Sebaliknya, menurut Samosir, Partai Katolik-lah yang terbanyak memberikan kontribusinya dalam KDP dan PDI, yakni melalui berbagai organisasi/Yayasan yang dipunyainya. Wawancara dengan MB Samosir di Yayasan Kasimo pada 4 September 1986.

67 Dari beberapa sumber yang diwawancarai penulis terungkap, bahwa masalah hak-hak asasi ini ingin disertakan PARKINDO ke dalam “Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP”, walaupun akhirnya PARKINDO menyerah dan merelakannya untuk sekadar menjadi catatan. Juga diindikasikan ikhwal hak-hak asasi ini dipindahkan dari pasal-pasal Konstitusi RIS. Dari wawancara dengan John Pakan di kediamannya pada 15 September 1986.

usul PARKINDO ini ditafsirkan sebagai representasi yang sah dari “semangat liberalisme dan federatif”, terutama karena dikaitkannya masalah-masalah hak-hak asasi ini dengan Pasal-Pasal dalam UUDS 1950. Isu ini semakin mengeras karena ditopang kenyataan empiris bahwa tokoh-tokoh PARKINDO umumnya berasal dari daerah-daerah di luar pulau Jawa yang identik sebagai tempat bersemayamnya kekuasaan. Fakta ini secara sederhana dijadikan sebagai acuan dalam menilai derajat loyalitas PARKINDO kepada Negara Kesatuan dan ideologi Pancasila. Sama seperti nasib IP-KI dengan ide “dwi grup”-nya, sekalipun klaim semacam ini belum tentu mewakili realitas, isu serupa setidaknya telah cukup bermakna dalam menciptakan kerenggangan, bahkan kecurigaan, dalam tubuh KDP, terutama antara kekuatan Kristen dengan kekuatan lainnya. Bahkan, jauh setelah fusi pun isu keterkaitan PARKINDO, juga Partai Katolik, dengan kekuatan-kekuatan kapitalisme/imperialisme sebagai penopang dana, masih tetap berkembang.<sup>68</sup>

Persoalan-persoalan yang masih menggantung atau setidaknya masih menjadi catatan bagi masing-masing kekuatan seperti diungkap di atas, pada kenyataannya, tidak cukup kuat untuk mengurangi, apalagi menghentikan langkah lanjutan dari KDP. Hal ini secara jelas tercermin dari keberhasilan elite-elite lima parpol merumuskan “Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP”, yang terdiri dari sebelas bab dan delapan belas pasal.

Satu hal yang menarik dalam ketentuan ini adalah adanya keluwesan masing-masing unsur pada tingkat ideologi. Secara dini, masing-masing unsur telah mengemas ideologinya untuk disimpan di kotak perbendaharaan sendiri. Tidak satu pun unsur yang setia menggenggam ideologi di tangannya ketika

---

<sup>68</sup> Hal ini terungkap dari dokumentasi dan wawancara. Isu ini sering menghadirkan diri sebagai batu sandungan yang cukup signifikan dalam hubungan antara PARKINDO-Partai Katolik dengan unsur-unsur lainnya dalam PDI.

memasuki arena musyawarah. Ini tampak jelas dari penempatan Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar pengelompokan KDP tanpa diembel-embeli hal lainnya. Menariknya, hal ini terutama karena, hingga tahun-tahun tersebut, peranan ideologi unsur masih sedemikian besarnya dalam mendikte perilaku politik masing-masing partai dan para elitnya. Ideologi unsur bahkan masih terawat rapi di hati dan pemikiran sebagian besar elite parpol waktu itu. Sekalipun proses ke arah "de-ideologisasi" sudah mulai mengambil tempat dalam perpolitikan Indonesia, isu ke arah ideologi tunggal masih belum menunjukkan tanda-tanda muncul ke permukaan.

Setiap pengelompokan punya impian yang ingin direngkuh. Demikian pula dengan KDP. Impian-impian ini dibakukan dalam Pasal 5 Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP yang mengatur tentang tujuan dari kelompok, yakni:

- *Kelanggengan kemerdekaan dan kedaulatan yang sempurna serta kesentosaan bagi rakyat Negara hukum/Negara kesatuan RI,*
- *Terwujudnya masyarakat adil dan makmur jasmaniah, dan rohaniah,*
- *Terwujudnya perdamaian dunia yang hakiki yang menjamin hubungan antar bangsa-bangsa berdasarkan persamaan dan kekeluargaan.*

Dengan rumusan di atas, KDP ingin agar sedapat mungkin bisa hadir dengan impian yang kurang lebih sejajar dengan impian negara. Suatu upaya yang dapat dibaca sebagai langkah politik untuk menunjukkan urgensi dan vitalnya partai dalam suatu sistem politik demokratis.

Untuk menggapai impian yang dikemas rapi dalam untaian kata-kata indah di atas, KDP menempatkan beberapa usaha sebagai sarannya. Pasal 6 Ketentuan-Ketentuan Pokok



KDP secara pasti menekankan pada usaha-usaha mendidik, mencerdaskan, dan menyadarkan rakyat; mempersiapkan konsepsi-konsepsi yang bernilai dalam segala bidang kegiatan masyarakat, membantu dan mengamankan terlaksananya pembangunan yang demokratis, seimbang dan progresif satu sama lain sesuai hakikat Ketetapan MPRS No. XXII tahun 1966, sebagai bentuk-bentuk kerja politik guna mewujudkan tujuan KDP. Penekanan yang diberikan pada istilah demokratis, seimbang, dan progresif, mengandung di dalamnya tuntutan kemajuan yang berdimensi keadilan. Inilah yang nantinya berkembang menjadi visi dan salah satu ciri dari PDI selama periode 1970-an hingga penggalan awal 1980-an, bahkan hingga paruh 1990-an.

Untuk tidak mengkhianati ikrar bersama mendirikan kelompok atas prinsip keterbukaan, KDP membuka pintu halamannya bagi kehadiran warga baru, sekalipun sedikit syarat ditempelkan di pintu gerbang halaman KDP. Secara lengkap syarat-syarat untuk menjadi bagian dari KDP adalah parpol atau organisasi politik yang diakui sah oleh Pemerintah; sepakat pada landasan dan tujuan KDP; sanggup ikut dalam usaha-usaha kelompok; dan terakhir, tunduk pada Ketentuan-Ketentuan Pokok dan ketentuan lainnya dari KDP. Meskipun keterbukaan seperti ini ditawarkan, dalam praktiknya ia hanya berakhir sebagai sopan santun politik. Secara praktis, sampai berakhirnya pengelompokan, tidak pernah ada parpol atau kekuatan politik lain yang jatuh cinta, atau diizinkan untuk jatuh cinta, untuk kemudian memutuskan masuk ke ikatan perjodohan janggal lima parpol yang ada.

Seperti halnya jenjang struktural organisasi masing-masing parpol pembentuk, KDP pun mengenal adanya lima tingkatan, yaitu KDP Pusat untuk tingkat nasional; KDP Daerah untuk Dati I atau setingkatnya; KDP Cabang untuk Dati II dan wilayah setingkatnya; KDP Anak Cabang untuk Kecamatan

atau setingkatnya; serta KDP Ranting untuk tingkat desa atau setingkatnya.

Pada tingkat nasional, KDP dipimpin oleh suatu Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang bertindak sebagai "Badan Musyawarah Antar Pimpinan Pusat dari kelima Partai anggota pendiri KDP". Pimpinan MKDP diatur dan ditentukan oleh MPKP sendiri, demikian juga tata kerjanya. Lembaga tingkat nasional yang memilih dan menentukan diri sendiri (*self-appointed body*) ini diagendakan untuk bersidang sekurang-kurangnya tiga bulan sekali dan dapat pula dilakukan sewaktu-waktu atas permintaan sekurang-kurangnya dua parpol pendiri. Mekanisme persidangan per triwulan ini, erat kaitannya dengan sistem kepemimpinan bergilir yang menggunakan siklus tiga bulanan sebagai basis waktu rotasi.

Masih di tingkat pusat, guna melicinkan jalan bagi kerja MPKP, dibentuklah Sekretaris Jenderal Kelompok dengan jumlah penghuninya sebanding dengan anggota partai pembentuk. Secara otomatis, posisi ini dijabat oleh Sekjen, Wakil Sekjen, atau Sekretaris dari kekuatan politik anggota KDP yang ditunjuk oleh masing-masing kekuatan politik. Sama halnya dengan posisi sebagai figur nomor satu di MPKP, fungsi atau posisi Sekjen Kelompok ini dijabat secara bergiliran dengan masa gilir tiga bulan sesuai dengan hasil ketetapan MPKP. Pada tingkat operasional, MPKP dilengkapi dengan sejumlah jemari dalam bentuk biro-biro yang baik jumlah, bentuk dan susunan, tugas, tanggung jawab, dan personalianya ditentukan oleh MPKP. Biro-biro ini, dalam melakukan tugasnya, bertanggung jawab kepada MPKP dengan dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal KDP. Dengan mengikuti pola yang sama, diciptakan pula struktur organisasi KDP di semua jenjang.

Struktur kelembagaan seperti dipetakan di atas secara tegas mengungkapkan sedemikian kuatnya sentralisasi kekuasaan di

genggaman MPKP. Hal ini mudah dipahami, terutama bila dilihat bahwa model pengelompokan ini merupakan suatu bentuk baru dalam tata hubungan antar kekuatan politik di Indonesia yang belum pernah ada presedennya. Dengan memusatkan seluruh kekuasaan di satu tangan, akan dapat dihindari kesalahan langkah yang mungkin saja terjadi bila suatu model pendelegasian wewenang secara luas diberlakukan. Sentralisasi kekuasaan sekaligus bisa menghindari terjadinya diskusi atau polemik di tingkat lebih rendah yang bukan saja mahal dari segi waktu, tapi sekaligus potensial untuk mementahkan semua skenario yang telah ada. Karena KDP lebih sebagai respons atas kehendak negara ketimbang didorong oleh kebutuhan dan pertimbangan obyektif lima parpol pembentuk, maka sentralisasi kekuasaan semakin diperlukan: ia merupakan mekanisme pengamanan politik yang prinsipiel guna memastikan cita-cita yang lebih besar (penyederhanaan kepartaian) dapat diwujudkan tanpa harus melewati proses dialog atau negosiasi serta pengambilan keputusan yang menyebar ke banyak tangan.

Setelah Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP disepakati, pada 17 Maret 1972 berhasil dikonstruksi suatu organ kepemimpinan tingkat Pusat. Hal ini ditandai dengan tersusunnya personalia MPKP, Sekjen Kelompok, dan Biro-Biro sebagai pendukung. Penyusunan personalia di atas adalah untuk memenuhi Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP, Bab VII, pasal 12, 13, dan 14 yang mengatur tentang Bentuk dan Susunan Pimpinan Tingkat Nasional seperti diuraikan di atas. Pada saat penetapan personalia MPKP, mahkota tertinggi sebagai Ketua, dan sekaligus merupakan penghormatan yang wajar bagi PNI sebagai kekuatan politik terbesar, disematkan kepada Mh. Isnaeni (PNI), sementara Achmad Sukarmadidjaja (IP-KI) bertakhta di posisi Wakil Ketua. Di bawahnya, berjejer para ketua parpol lainnya sebagai anggota-anggota MPKP, masing-masing:

- IP-KI:  
Akhmad Sukarmadidjaja, DR. HM N.M. Hajim Ning, dan A.P. Tanri.
- Partai Katolik  
Drs. Ben Mang Reng Say, EC. Pelaunsoeka, dan R.G. Duriat.
- *PARKINDO*  
J.C.T. Simorangkir, SH, Drs. Z.J. Manusama, dan Alexander Wenas.
- MURBA  
Murbantoko, J.S. Adries, dan Drs. Zakaria Ra'ib.
- PNI  
Mh. Isnaeni, Prof. Dr. Sunawar Sukowati, SH, dan Drs. Hardjantho Sumodisastro.<sup>69</sup>

Untuk jabatan Sekretariat Jenderal Kelompok, ES. Wignyosumarsono dari Partai Katolik mendapatkan kehormatan pertama menduduki posisi tertinggi, yakni sebagai Ketua, dengan Sabam Sirait dari unsur PARKINDO mengekori di belakangnya sebagai Wakil Ketua. Namun, posisi di atas tidak abadi karena, sesuai dengan kesepakatan elite-elite lima parpol, semua posisi di atas akan dirotasi di antara mereka. Anggota-anggota Sekretariat Jenderal Kelompok yang nantinya akan secara bergiliran memimpin adalah berturut-turut:<sup>70</sup>

- W.A .Chalik dari unsur IP-KI,
- F.S. Wignyosumarsono dari Partai Katolik,
- Sabam Sirait dari unsur PARKINDO,

---

69 Berdasarkan kesepakatan elite-elite pembentuk KDP, fungsi Ketua digilir sesuai urutan di atas, dengan masa gilir ditentukan per tiga bulan.

70 Berdasarkan Pasal 13 sub (c) Ketentuan-Ketentuan Pokok KDP, fungsi Ketua Sekjen ini dijabat secara bergiliran mengikuti pola yang berlaku bagi fungsi Ketua.

- John Pakan dari MURBA,
- Abdul Madjid dari PNI.

Demikian pula, guna membantu MPKP pada tingkat operasional, MPKP membentuk empat biro, masing-masing:

- Biro Politik,
- Biro Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,
- Biro Kesejahteraan Rakyat,
- Biro Umum.

Setiap biro menampung jumlah anggota setara dengan jumlah parpol anggota KDP. Setiap kekuatan politik anggota KDP, memastikan diri memiliki seorang utusan (wakilnya) dalam biro yang bertindak secara kolektif untuk menyelesaikan masalah-masalah operasional KDP.

Setelah berhasil merampungkan susunan personalia, baik untuk kepengurusan pada MPKP, Sekretariat Jenderal Kelompok, maupun Biro-Biro, KDP melakukan lompatan lebih jauh lagi. Berhasil dirumuskannya “Landasan dan Tujuan Perjuangan Kelompok Demokrasi Pembangunan” pada 8 Juni 1972 menandainya. Landasan dan Tujuan ini ditandatangani masing-masing Ketua dan Sekjen dari Parpol anggota KDP atas nama parpolnya masing-masing. Pada bagian Pembukaan angka (4), disebutkan:<sup>71</sup>

Landasan Bersama Kelompok Demokrasi Pembangunan adalah landasan-landasan dimaksud sebagai suatu perangkat pengaturan yang dapat menjadi pedoman di dalam merumuskan cita-cita bersama di dalam program-program yang praktis dan pragmatis, baik yang menyangkut masalah kemasyarakatan maupun kenegaraan, berdasarkan Demokrasi Pancasila.

---

71 Kelompok Demokrasi Pembangunan Pusat, Landasan dan Tujuan Perjuangan

Sebagai sebuah landasan politik, mistifikasi atau ideologisasi atasnya merupakan keharusan. Ideologisasi ini terekam dalam rumusan butir (5) yang secara tegas menyatakan bahwa landasan tersebut merupakan suatu konsepsi strategis yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Di dalam rumusan landasan inilah terungkap bahwa secara ideal KDP merupakan suatu tim kerja yang pada prinsipnya menempatkan semua anggotanya secara sama dalam hal derajat, fungsi, dan kemungkinannya. Prinsip keadilan yang berulang harus membentur kegagalan dalam praktik, justru karena ketimpangan yang tajam di antara masing-masingnya sulit dijumpai. Secara praktis KDP menuangkan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila—yang tidak pernah dirumuskan secara jelas dan tegas—ke dalam bentuk program-program pembangunan, di segala segi perikehidupan bangsa dan negara, sesuai dengan intensitas kebutuhan masyarakat yang berkembang. Bertolak dari dua pemikiran di atas, totalitas KDP adalah mengangankan dirinya akan berusaha mewujudkan Demokrasi Pancasila dan menegakan hak-hak asasi manusia, dan mencegah kemungkinan-kemungkinan sebaliknya.

- *Bertumpu pada rangkaian pertimbangan seperti dikemukakan di atas, KDP merumuskan tiga hal mendasar yang diidealkan sebagai trade mark dirinya:*
- *Anggota Kelompok memandang secara vertikal pada Pancasila yang melandasi demokrasi yang hendak diperjuangkan,*
- *Anggota Kelompok memandang secara horizontal pada sesama anggota sebagai sama sederajat dan kemungkinannya,*
- *Anggota kelompok merumuskan cita-cita dalam program pembangunan yang praktis dan pragmatis.*

Seperti juga organisasi lainnya, KDP pun melengkapi diri dengan “landasan” tempat berpijak. Dalam hal ini, KDP membaginya ke dalam sejumlah kategori yang agak kabur, yakni

Landasan Dasar, Landasan Struktural, Landasan Operasional, Landasan Fungsional, dan Landasan Material.

KDP secara pasti memancangkan Pancasila yang diyakini mengandung nilai-nilai hakiki kerohanian, pandangan, sikap dan arah hidup di halaman terdepan pengelompokan. Pancasila adalah Landasan Dasar KDP. Dengan keyakinan yang sama, jiwa dan semangat UUD 1945 secara formal menempati tempat terhormat sebagai Landasan Struktural KDP. Akan tetapi, penempatan jiwa dan semangat Pancasila secara terhormat ini tidak berakhir begitu saja. KDP menjustifikasinya dengan sejumlah alasan yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>72</sup>

- *Prinsip demokrasi kita adalah manusia sebagai insan makhluk Tuhan,*
- *Demokrasi Pancasila sebagai tersirat dalam UUD '45 menuntut adanya keadilan, ...kebebasan yang bertanggung jawab, dan... pengakuan sosio pluralisme...,*
- *Cara (taktik) demokrasi kita yang pokok adalah Pemilu musyawarah, sedangkan institusinya adalah kepartaian, keormasan dan kekaryaan,*
- *Penolakan dominasi dari satu golongan/kekuatan tunggal.*

Landasan Operasional, yang menurut elite-elite lima parpol merupakan pijakan dalam merumuskan hal-hal yang praktis operasional, dirumuskan KDP sebagai “tecermin dalam TAP-TAP MPR”. Dengan bertumpu pada ini, sasaran perjuangan KDP kemudian dirumuskan secara longgar, yakni “sesuai dengan aspirasi rakyat yang berkembang”. Demi dapat berfungsinya pengelompokan secara bersama, elite-elite KDP merasa perlu untuk menghadirkan Landasan Fungsional sebagai pengawal pengelompokan mereka; sesuatu yang mengindikasikan masih sedemikian rapuhnya dasar perjodohan lima parpol

---

72 *Ibid.*, sub C, angka 4, huruf (a), (b), (c).

yang ada. Dengan kawalan Landasan Fungsional di atas, walaupun menyadari adanya perbedaan-perbedaan, tetapi terhadap hal-hal yang membutuhkan konsensus nasional—yakni yang menyangkut kepentingan rakyat banyak—KDP dapat menciptakan langkah-langkah politis praktis dan strategis guna mencapai konsensus. Sakralisasi dari apa yang disebut “kepentingan rakyat banyak” dalam rumusan di atas jelas merupakan upaya pembenaran bagi langkah-langkah persekutuan lima parpol sehingga tidak secara mencolok metampakkan diri sebagai kekalahan tragis partai-partai. Langkah-langkah yang dikategorikan sebagai langkah “politik taktis dan strategis” di atas dirumuskan elite-elite KDP sebagai berikut:

- *Suasana yang demokratis,*
- *Mencegah dominasi golongan/kekuatan tunggal,*
- *Menentang usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila,*
- *Kesatuan bahasa dalam hal-hal yang prinsipiel,*
- *Tidak saling mengadakan intervensi dalam urusan intern masing-masing anggota KDP,*
- *Menciptakan stabilitas politik, ideologi, dalam rangka ketahanan ideologi menuju ketahanan nasional,*
- *Mengembangkan dan menggunakan hak kontrol yang konstruktif,*
- *Menggunakan pendekatan yang sosio-politis-kultural,*
- *Mengusahakan terciptanya relasi, inter-relasi, komunikasi, serta akomodasi intern dan ekstern.<sup>73</sup>*

“Landasan Material” dimunculkan ke permukaan guna mencapai apa yang disebut petinggi-petinggi KDP sebagai

---

73 *Ibid.*, sub D, angka 3, huruf (a) sampai (i).



“perimbangan antara aspirasi dan kenyataan”. Butir-butir dari Landasan Material adalah sebagai berikut:

- *Pengembangan nilai materialnya (...) tidak dibenarkan memusnahkan nilai-nilai spiritual, rohaniah, sosial budaya bangsa,*
- *Berusaha untuk mengembangkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang merupakan tulang punggung dari modernisasi tanpa menjadi budak dan korban darinya,*
- *Pengembangan bidang material tidak boleh mengelompok pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat,*
- *Mampu untuk mengadakan pendekatan-pendekatan yang praktis,*
- *Kemajuan di bidang material adalah guna memantapkan kemajuan spiritual serta demikian pula sebaliknya.<sup>74</sup>*

Butir-butir di atas mengindikasikan ketaksaan sikap sekaligus kekhawatiran tokoh-tokoh lima parpol dalam merespons modernisasi yang mulai ditempuh Orba sebagai rute pintas untuk memberikan kepuasan material secara cepat bagi rakyat.

Dalam rangka merealisasikan baik landasan maupun tujuan seperti digagas di atas, KDP merancang, atau lebih tepatnya merencanakan untuk merancang, berbagai program baik yang bersifat umum atau khusus, serta mempertimbangkan waktu, berjangka panjang dan pendek.<sup>75</sup>

Dengan berhasil ditetapkannya Landasan dan Tujuan KDP, maka tahapan awal krusial ke arah pemenuhan syarat-

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, sub E, angka 2, huruf (a), (b), (c), (d), (e).

<sup>75</sup> Uraian yang menyangkut Landasan dan Tujuan Kelompok Demokrasi Pembangunan sepenuhnya diambil dari “Landasan dan Tujuan Perjuangan Kelompok Demokrasi Pembangunan” yang ditandatangani bersama oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Parpol anggota KDP.

syarat internal guna pembentukan suatu forum kerja sama telah terpenuhi. Di atas dasar inilah berbagai bentuk kerja sama lebih konkret mulai diupayakan.

#### **D. Fraksi Bersama KDP: Pertunangan Tanpa Cinta**

Seperti sudah didiskusikan pada bagian sebelumnya, menjelang pelantikan anggota DPR hasil Pemilu 1971, Presiden Soeharto kembali mengundang tokoh-tokoh partai dan Golkar untuk mendiskusikan sejumlah persoalan politik penting. Persoalan-persoalan yang ada dimintakan untuk segera dicari alternatif pemecahannya oleh masing-masing kekuatan politik untuk nantinya kembali dibicarakan dengan Presiden Soeharto. Satu dari sekian banyak permasalahan yang diungkapkan kepada Soeharto adalah yang menyangkut pengorganisasian fraksi di DPR. Soeharto secara tegas mengedepankan kehendaknya agar pengorganisasian fraksi dapat berfungsi secara efektif dan efisien, sekaligus mampu menihilkan kemungkinan munculnya disharmoni dalam hubungan kerja sama antara legislatif dan eksekutif. Dalam forum pertemuan 6 dan 8 Oktober 1971, Presiden mengemukakan pemikiran yang menghendaki agar peringkasan kepartaian juga tercermin di DPR. Untuk itu, penyederhanaan dan perampingan fraksi dalam bentuk pembentukan “Fraksi Bersama” ditawarkan presiden sebagai alternatif. Jika ini berjalan, dan dalam kenyataannya berjalan, maka Dewan hanya akan dihuni 4 fraksi, masing-masing, Fraksi Material-Spiritual—ini menyangkut KDP-, Fraksi Spiritual-Material, Fraksi ABRI, dan Fraksi Golkar.

Dalam pertimbangan Presiden, seandainya dalam DPR terwujud hanya empat fraksi seperti yang diidealkannya, maka DPR akan dapat bekerja lebih cepat, efektif dan efisien—ukuran-ukuran standar yang inheren dalam setiap perbincangan mengenai modernisasi yang sangat diyakini elite Orde Baru. Yang terpenting dari peringkasan dan pepadatan

fraksi ini adalah harapan bahwa kerja sama antara legislatif dan eksekutif dapat berjalan tanpa harus menerjang badai ketidakpastian seperti yang didemonstrasikan oleh hubungan eksekutif-legislatif di era Demokrasi Liberal. Keyakinan dan harapan yang hampir sepenuhnya memuat kepentingan Pemerintah ini akhirnya terealisasi. Seperti yang dikonfirmasi sejarah perkembangan lembaga perwakilan rakyat kita, pihak Pemerintah praktis tidak mendapatkan kesulitan berarti, apalagi perlawanan dari lingkaran DPR dalam membicarakan berbagai isu yang membutuhkan kesertaan dan pengesahan formal lembaga legislatif.

Upaya penataan kelembagaan DPR dalam bentuk pemadatan dan peringkasan fraksi ini telah memberikan manfaat yang sangat luar biasa bagi Pemerintah (eksekutif) di masa-masa berikutnya, sekalipun hal ini mesti dibayar mahal dalam bentuk kelumpuhan hampir total lembaga ini. Kelumpuhan ini melahirkan kesinisan di kalangan masyarakat yang di ujungnya mengeja DPR hanya sebatas sebagai lembaga “pengabsah” kemauan Pemerintah (*rubber stamp*), sementara para anggotanya secara sinis dilabeli dengan predikat 4-D (Datang, Duduk, Diam, Duit) di dadanya, yang meruntuhkan semua kebanggaan dan kewibawaan lembaga ini. Kesinisan ini jelas merupakan ungkapan kekecewaan yang dalam terhadap lembaga ini, sekaligus ekspresi dari gugatan atas dominasi eksekutif di pelataran politik Indonesia. Kelumpuhan lembaga legislatif, sebenarnya merupakan ekspresi atau cerminan dari kelumpuhan partai-partai, yang juga bermakna kelumpuhan politik masyarakat sipil secara keseluruhan.

Kelompok lima parpol yang sudah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bentuk KDP, karena dihadapkan pada kebuntuan alternatif, akhirnya mengamini gagasan Fraksi Bersama di atas. Hal ini terekspresikan dalam bentuk kesepakatan lima parpol mengelompokkan diri di DPR, seperti

yang ditegaskan dalam Pernyataan Pengukuhan, 28 Oktober 1971, yang diikuti penyampaian Pernyataan Bersama kepada ketua Sementara DPR-RI pada tanggal yang sama. Dokumen ini secara eksplisit mengungkapkan kesepakatan lima parpol untuk melakukan persekutuan di tingkat legislatif dalam wajah Fraksi Bersama. Atas dasar pernyataan di atas, di DPR-RI lahirlah lembaga politik baru yang dikenal dengan sebutan Fraksi KDP. Fraksi ini merupakan kelanjutan model, setelah sebelumnya KDP, perjodohan silang lima kekuatan politik yang praktis tidak memiliki ciri-ciri kesamaan, kecuali dalam hal nasib politik, yakni ketika mereka sama-sama berada di lingkaran paling luar politik Indonesia dan menjadi obyek langsung dari proses penataan politik.

Pemadatan dan peringkasan fraksi-fraksi di DPR ini tidak lepas dari pengamatan masyarakat luas. Mahbub Djunaidi, dalam sebuah artikelnya, melihat kehadiran fraksi-fraksi tersebut sebagai “Fraksi Gaya Baru” yang diejanya sebagai ekspresi dari gejala lain, yakni “devaluasi” parpol. Fraksi-fraksi yang ada ini, oleh Mahbub Djunaidi, dinilai sebagai bukan fraksi, kecuali dalam hal namanya karena praktis merupakan “suatu pengelompokan kolektif yang (di) lehernya digantungkan label fraksi”<sup>76</sup> tanpa menyisakan sedikit pun karakter sebagai sebuah fraksi. Tetapi penilaian kritis dan sarkastis seperti ini, tidak cukup bertuah membalikkan kenyataan bahwa pemadatan dan peringkasan fraksi telah disepakati hadir dan telah dibentuk. Bahkan, melalui “Keputusan Bersama” lima parpol anggota KDP, tanggal 27 Oktober 1971, telah diinstruksikan pada semua daerah atau cabang di seluruh Indonesia untuk membentuk Fraksi Demokrasi Pembangunan di dalam DPRD I dan DPRD II masing-masing dengan mengimitasi secara penuh patron yang telah dirancang di tingkat nasional. Demikian pula, kepada

---

<sup>76</sup> Mahbub Djunaidi, “*Fraksi Gaya Baru, Suatu “Devaluasi” Parpol*”, dalam harian Kompas, 8 November 1971.

daerah-daerah telah diintruksikan memulai pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan bersama di legislatif.

Instruksi bersama di atas, praktis tidak menemukan perlawanan di tingkat lokal, setidaknya-tidaknya secara terbuka. Dalam waktu relatif singkat, anggota KDP yang memiliki anggota di DPRD I dan DPRD II mulai berlomba-lomba mengkreasikan lembaga politik yang disebut “Fraksi Bersama” di DPRD masing-masing. Hanya saja, semangat yang menggebu-gebu bukanlah modal tunggal untuk dapat mewujudkan ide di atas di semua daerah atau cabang. Hingga Juni 1973, artinya sudah lima bulan mereka hidup dalam alam fusi, dan tidak lagi sekadar pengelompokan, sejumlah daerah masih diadang kesulitan membentuk “Fraksi Bersama”. Fatalnya, kegagalan ini di beberapa daerah, bukan karena adanya perlawanan dari parpol, tapi justru karena birokrasi lokal tidak merestui kehadirannya, suatu ironi karena gagasan ini berasal dari Presiden Soeharto sendiri. Kasus ini mengekspresikan betapa persoalan penataan politik masih sangat jauh dari pengetahuan daerah-daerah, bahkan dari pengetahuan mereka-mereka yang merupakan “wajah negara” di tingkat lokal. Namun, kegagalan membentuk fraksi bersama tidak saja karena keusilan birokrasi lokal. Dalam sejumlah kasus, tidak diizinkan pembentukkan “Fraksi Bersama” disebabkan di daerah-daerah tersebut KDP—untuk kemudian menjadi PDI—hanya memiliki seorang anggota di DPRD.<sup>77</sup>

Untuk merealisasi pembentukan “Fraksi Bersama” di sejumlah daerah bermasalah, PDI (hal ini terjadi setelah fusi), terpaksa harus meminta belas kasihan penguasa, dalam hal ini

---

<sup>77</sup> Daerah-daerah di mana PDI tidak ditabukan oleh penguasa lokal untuk membentuk fraksi sendiri, antara lain Dati I Sulawesi Selatan, Dati I Sumatra Barat. Alasan resminya karena anggota Dewan asal PDI hanya satu, karenanya terpaksa bergabung dengan fraksi lain. Untuk Dati II yang bermasalah, tercatat antara lain, Lahat (Sumsel), Aceh Tengah (DI Aceh).

Pangkokamtib, sebagai lembaga politik yang paling prinsipiel waktu itu untuk ikut membantu mereka dalam menghadapi kerewelan birokrasi lokal. Permohonan bantuan ini dilakukan melalui surat DPP PDI No. 49/ EX/A/DPP/1973, tertanggal 18 Juni 1973 yang merupakan kelanjutan dari pembicaraan internal DPP PDI pada 7 Juni 1973 yang difokuskan pada masalah "Susunan Fraksi-Fraksi Dalam Lembaga DPRD Tk I dan Tk II". Secara prinsipiel, surat tadi meminta perhatian dan sekaligus bantuan Pangkokamtib untuk memungkinkan terbentuknya Fraksi PDI di daerah-daerah tempat PDI tidak diizinkan membentuk fraksi sendiri dan terpaksa harus bergabung dengan fraksi lain. Dalam surat-surat yang sama juga dikemukakan bahwa pelaksanaan hal di atas memerlukan adanya "Keputusan Pemerintah", dalam hal ini Mendagri.

Kerumitan di sejumlah daerah bukan merupakan penghalang bagi F-DP di tingkat nasional untuk berkiprah. Berbagai aktivitas bersama di DPR dan MPR, dan terutama dalam sidang-sidang BP MPR, menandai kerja sama antaranggota dewan asal fraksi ini. Fraksi yang ada juga tidak dibiarkan mengelana sendirian di dalam Dewan, karena sebuah tim pemikir diciptakan secara khusus oleh KDP untuk mendukung dan menyuplai F-DP di DPR dengan pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran. Tim Pemikir ini terdiri dari empat sub panitia, masing-masing:

- *Sub Panitia GBHN, dikoordinasi oleh Sadjarwo,*
- *Sub Panitia Pola Pembangunan, dikoordinasi oleh Sardju, Ismunandar,*
- *Sub Panitia Tata Tertib dan Tata Cara, dikoordinasi oleh Purwanto,*
- *Sub Panitia Tap-Tap, dikoordinasi oleh F.S. Wignjosumarsono.*

Panitia Tim Pemikir diketuai seorang Ketua Panitia Besar

yang dipercayakan pada Mh. Isnaeni dari PNI. Panitia inilah yang memberikan berbagai masukan kepada para anggota Dewan dari KDP untuk dijadikan bahan sumbangan pemikiran KDP di Sidang-sidang MPR. Kehadiran panitia atau tim ini semakin meringankan beban anggota Dewan asal KDP yang hanya berjumlah 30 orang dan anggota MPR yang berjumlah 42 orang. Lebih lagi, kepanitiaan ini telah berfungsi sebagai medan interaksi bagi anggota KDP untuk saling bekerja sama dan saling lebih mengenal—hal penting bagi persiapan masuknya mereka ke bentuk kerja sama yang lebih rapat—atau, justru sebaliknya, untuk lebih saling membenci.

## **BAB III**

# **KE ARAH FUSI LIMA PARPOL: PERJALANAN MENITI BUIH**

Pengelompokan ke dalam KDP yang diikuti dengan pemadatan dan peringkasan di tingkat DPR/D ke dalam bentuk Fraksi bersama, seperti sudah dibicarakan adalah sebatas sebagai arena pertunangan—transisi—menuju perkawinan massal lima parpol. Selazimnya proses perkawinan tanpa cinta, unsur paksaan hampir-hampir menjadi kekuatan tunggal yang bisa memastikan pertunangan tak berantakan di tengah perjalanan. Dengannya, menjadi logis apabila proses ke arah fusi lima parpol ditandai oleh kuatnya tekanan eksternal terhadap tokoh-tokohnya agar sesegera mungkin mengakhiri hak hidupnya masing-masing dan membentuk kekuatan baru melalui mekanisme fusi.

Tekanan eksternal yang kuat ini, pertama-tama dapat direkam dari adanya penggarapan daerah-daerah secara dini yang difungsikan untuk mempercepat proses fusi yang dinilai berjalan lamban di tingkat nasional. Sejumlah daerah secara dini mulai menyatakan diri “berfusi”, dengan menggunakan nama sendiri-sendiri, melangkahi proses di tingkat nasional tempat para pimpinan lima parpol belum melangkah sejauh itu. Fusi-fusi prematur seperti yang terjadi di Palembang, Solo, dan masih banyak daerah lainnya itu memaksa para pimpinan pusat kelima parpol anggota KDP mengeluarkan Surat Keputusan



bernomor 42/KD/1972, 24 Oktober 1972. SK ini secara pokok menegaskan bahwa kemungkinan ke arah fusi sementara dirintis, dan oleh karenanya para pengurus di daerah-daerah diharapkan mengekang nafsunya untuk tidak tergesa-gesa memasuki pelaminan. Dengan SK ini, semua persoalan yang menyangkut fusi diambil alih pimpinan pusat lima parpol.

Penggarapan atas sejumlah daerah guna memaksa terjadinya fusi secara segera seperti itu oleh sebagian tokoh dipandang sebagai bukti yang meyakinkan adanya rekayasa politik yang dilakukan rezim dalam usaha mengakhiri peran parpol.<sup>1</sup> Namun, untuk sebagian lainnya, hal tersebut dikatakan "tidak mempunyai dampak langsung" dan juga "tidak merupakan tekanan" bagi pimpinan pusat untuk segera merealisasi fusi.<sup>2</sup> Bahkan ada indikasi bahwa fusi prematur di sejumlah daerah merupakan "berkah terselubung" bagi para petinggi lima parpol di tingkat nasional. Hal ini dapat dipahami apabila dicermati bahwa pimpinan pusat lima parpol pada saat tersebut sedang dihadapkan pada persoalan bagaimana menemukan pijakan legitimasi yang dapat membenarkan langkah fusi yang tak terhindarkan lagi. Dalam keadaan yang demikian, fusi awal di daerah-daerah telah difungsikan secara cerdik oleh pimpinan pusat guna memperlancar proses fusi di tingkat nasional.<sup>3</sup> Dalam pengertian ini, pimpinan pusat parpol dapat menjustifikasi langkah fusi mereka dengan merujuk pada kecenderungan fusi prematur yang dilakukan di sejumlah daerah. Fusi dilakukan,

---

1 Wawancara dengan tokoh-tokoh yang terlibat proses fusi, umumnya mengukuhkan sinyalmen di atas, sekali pun dirumuskan dalam ungkapan yang bervariasi.

2 Wawancara dengan, misalnya Supangat, Samosir, Wignjosumarsono, dan Sabam Sirait.

3 Wawancara penulis dengan Samosir, 4 September 1986, Jl. Kramat V/18a, Jakarta. Ia mengungkapkan bahwa langkah-langkah daerah tersebut menguntungkan sebagai landasan hukum bagi pimpinan pusat untuk mewujudkan fusi di tingkat nasional.

singkatnya, justru dalam kerangka merespons secara positif tuntutan daerah-daerah—yang juga berarti tuntutan anggota (parpol)—dan oleh karenanya pimpinan pusat masing-masing parpol terbebas dari kemungkinan penghakiman oleh anggota masing-masing. Dengan alasan ini, fusi prematur di sejumlah daerah, sekalipun terjadi atas sponsor Pemerintah, dan karenanya sepenuhnya merupakan skenario penguasa, mendapatkan dukungan terselubung pimpinan lima parpol. Alasannya sangat sederhana, langkah fusi daerah secara langsung ikut memecahkan dilema pelik yang dihadapi elite pusat, yakni menemukan legitimasi.

Indikasi lain yang menunjukkan kuatnya tekanan eksternal dalam memacu segera terwujudnya proses fusi—walaupun sangat sulit ditunjukkan bukti-bukti konkretnya—terekspresi dalam pandangan tokoh-tokoh lima parpol. Secara umum mereka menegaskan adanya tekanan yang sangat kuat, sekalipun sulit ditunjukkan rautnya yang pasti. Dalam mengekspresikan besarnya tekanan dari atas, Sanusi Hardjadinata, Mantan Ketua Umum DPP PDI, yang akhirnya mengundurkan diri, menggunakan istilah “iming-iming” dan “amang-amang”. Dua istilah yang, jika dibaca melalui pengalaman di ranah lain, merupakan fondasi dasar dari sistem politik otoritarianisme Soeharto. Keduanya mengacu pada penggunaan kombinasi dua cara dalam menekan parpol, yakni menakut-nakuti atau “ancaman” (amang-amang); dan membeli (iming-iming).<sup>4</sup> Penggunaan ganjaran ganda “reward” dan “punishment” (*carrot and stick*) itu praktis merupakan bagian dari pengalaman hari lepas hari yang mesti dilalui Sanusi Hardjadinata selama menjadi orang nomor satu di PDI. Bukti

---

4 Wawancara dengan Sanusi Hardjadinata, di kediamannya di Bandung, 28 Oktober 1986. Istilah yang sama digunakannya dalam salah satu tulisannya, “Mampukah Rakyat Memikul Beban Yang Terus Menerus Bertambah Sebagai Akibat Pembangunan Politik Orde Baru Dalam Selamatkan Demokrasi”, hal. 9.

samar-samar atau tidak langsung lainnya dari kuatnya tekanan eksternal atas proses fusi dapat ditelusuri dari deretan harapan dan permintaan yang secara berulang disuarakan pihak parpol yang menghendaki agar tidak adanya campur tangan Pemerintah dalam urusan intern parpol.<sup>5</sup> Dari situ, sulit menghindari kesan atau penarikan kesimpulan umum bahwa Pemerintah memang secara riil dan intens terlibat dalam menekan partai-partai guna sesegera mungkin merealisasikan fusi yang merupakan bagian dari proyek restrukturisasi kehidupan politik Indonesia yang dirancang Orba.

Dari kacamata kepentingan rezim, keterlibatannya dalam urusan internal lima partai jelas dibutuhkan, bahkan dibenarkan, terutama untuk mengeliminasi unsur-unsur "ekstrem kiri (Eki)" yang diperkirakan banyak bercokol dalam tubuh parpol dan menjinakkan perilaku "radikal" elite parpol yang masih sulit berdamai dengan lingkungan politik baru yang sedang dibangun Orba. Penjinakan perilaku "radikal" ini menjadi semakin prinsipiel bagi Orba karena merupakan bagian dari *conditionalities*<sup>6</sup> yang diharuskan untuk bisa dicapai sebelum kekuatan Barat bersedia memberikan bantuan bagi pembangunan Indonesia. Sementara pembangunan itu sendiri sangat dibutuhkan karena di dalamnya mengandung persoalan legitimasi Orba. Kenyataan bahwa PDI dilahirkan dari rahim PNI sebagai salah satu pusat persemaian dan pertumbuhan nasionalisme Indonesia yang "garang" di masa

---

5 Lihat wawancara Hardi dengan harian *Sinar Harapan*, 13 April 1970. Hardi, Pejabat Ketua Umum PNI sebelum Kongres XII di Semarang ini menegaskan, "campur tangan Eksekutif dalam kehidupan partai-partai politik merupakan problema dewasa ini yang perlu dihadapi, karena fenomena ini tidak akan berhenti pada PNI saja". Lihat juga pemberitaan *Suluh Marhaen* selama berlangsungnya Kongres PNI ke - XII di Semarang

6 Ransom, David, 1974, "Ford Country: Building an Elite for Indonesia", Esai dalam "The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid", (ed.), Steve Weissmen: Ramparts Press Inc., hal 93-116.

lalu dan merupakan tulang punggung pendukung Bung Karno,<sup>7</sup> menyebabkan ia dicurigai akan membawa serta “cacat bawaan salah seorang ibu” ini. Karenanya, menjadi sah bagi rezim untuk secara dini dan intens mengawasi proses kelahirannya sebagai tindakan pencegahan sebelum “cacat bawaan” ini menemukan rongga untuk berkembang. Dengan kata lain, intervensi maksimal atas parpol selama proses ke arah fusi menjadi sesuatu yang wajib hukumnya bagi Orba untuk memastikan elemen-elemen nasionalis “radikal” telah henggang dari perpolitikan formal nasional. Keterlibatan ini sekaligus dibutuhkan karena merupakan cara paling murah dan cepat bagi rezim melicinkan jalan bagi terealisasinya secara segera berbagai gagasan yang telah dirancangnya sendiri. Keberhasilan dalam penataan kepartaian merupakan langkah strategis guna penataan yang lebih luas dalam kehidupan politik. Karenanya, ia menjadi terlampaui riskan untuk dibiarkan berjalan secara alamiah. Akan tetapi, bagi kepentingan parpol sebagai infrastruktur politik, keterlibatan Pemerintah telah membuka peluang yang semakin luas bagi munculnya intrik, sampai pada bentuk atau cara yang paling kasar sekalipun—seperti menjual rekan separtai sendiri—<sup>8</sup> yang mungkin tak terbayangkan sebelumnya. Lebih

---

7 Kahin, Audrey R dan Kahin, George McT, 1997, “Subversive sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia”, (Terj.), “Subversion as Foreign Policy: The Secret of Eisenhower and Dulles Debaclé in Indonesia”, (ed.), Leirissa, Jakarta: Pustaka Utama.

8 Tradisi “*mem-PKI-kan*” atau menuduh sesama tokoh parpol sebagai “*anti-Soeharto, anti-Orba, anti-ABRI, anti-Dwi Fungsi ABRI, anti modal asing*, dan sederetan anti- lainnya, mengakar sangat dalam di dunia para politikus lima parpol. Umumnya tema-tema menyeramkan itu merebak dalam situasi kemelut sebagai “senjata” dalam pertarungan di antara sesama mereka. Sebagai contoh, pada 4 Juli 1972, muncul sebuah tulisan yang diberi judul yang mengundang horor, *Jaringan Kelompok dalam Tubuh PNI yang akan Menegakkan Garis Lama dan pada Dasarnya Menentang Kepemimpinan dan Politik Presiden Soeharto*. Sederetan nama dipajang dalam tulisan ini sebagai wakil dari mereka-mereka yang dikategorikan sebagai “anti-Soeharto”. Aneka aktivitas berikut kantong-kantong yang menjadi wilayah operasi atau basis nama-nama ini, tidak ketinggalan, disertakan pula.

lagi, kecenderungan-kecenderungan negatif (konflik, intrik, dsb.) mengalami proses pelembagaan dan akhirnya mencapai puncak kesempurnaannya sebagai budaya bagi tokoh-tokoh parpol selanjutnya. Hal ini, pada gilirannya semakin meyakinkan rezim dan publik secara luas bahwa parpol adalah sebuah persoalan bagi Indonesia.

Walaupun di antara pihak para elite Orba, terutama Soeharto, dengan parpol telah dicapai kesepakatan untuk meringkas kehidupan kepartaian, tapi terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua kubu ini dalam hal cara ke arah perwujudan ide tersebut. Demikian pula dalam lingkaran partai-partai, di antara kekuatan politik yang pernah besar, PNI misalnya, dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya, perbedaan mencolok dalam memaknakan apa yang disebut penyederhanaan kepartaian juga terjadi. Perbedaan-perbedaan yang ada mengharuskan kehadiran negosiasi di antara masing-masingnya sebagai mekanisme mencapai kompromi. Tetapi negosiasi hanya mungkin berlangsung dalam situasi adanya perimbangan kekuatan atau adanya penghargaan timbal-balik. Namun, dalam kondisi yang lain, yang terjadi justru sebaliknya, yakni penaklukan, dengan sarana damai atau keras, salah satu pihak.

PNI bersepakat dengan Soeharto untuk menyederhanakan kehidupan kepartaian. Tetapi dalam hal cara, PNI menawarkan untuk mempergunakan sarana demokrasi untuk merealisasikan ide ini. Seleksi lewat mekanisme Pemilu dianggap oleh PNI sebagai cara yang paling tepat dan demokratis meringkas kehidupan kepartaian.<sup>9</sup> Melalui mekanisme ini, demikian alur

---

9 Wawancara dengan para petinggi PNI, misalnya dengan Hardi, Isnaeni, Hardjantho, A. Madjid, Djakse, dan Merukh memastikan hal ini. Tokoh-tokoh ini mengungkapkan, sejak awal PNI memang menghendaki agar penyederhanaan kepartaian ditempuh lewat mekanisme demokrasi, yakni lewat mekanisme pemilu. Lihat juga *Indonesia Raya*, 7 April 1971.

logika PNI, bukan saja penggunaan instrumen-instrumen kekerasan atau pemaksaan bisa dihindari, tapi sekaligus secara prinsipiel menyertakan warga masyarakat dalam proses politik yang terjadi. Secara teknis, PNI menawarkan agar jumlah parpol nantinya akan ditentukan oleh perolehan suara masing-masing dalam Pemilu. Kekuatan politik yang tetap dijamin hak hidupnya adalah mereka-mereka yang melampaui target suara tertentu, kini dikenal dengan *electoral treeshold*. PNI menawarkan tiga juta suara waktu itu. Sedangkan parpol-parpol yang gagal mencapai jumlah suara di atas diberi pilihan untuk membubarkan diri atau bergabung dengan salah satu kekuatan politik yang mencapai target di atas.<sup>10</sup> Dalam wawancara dengan penulis, Isnaeni mengungkapkan, dengan penyederhanaan kepartaian melalui mekanisme Pemilu, akan diperoleh kepastian kekuatan politik mana yang memang didukung rakyat—yang berarti, dikehendaki rakyat tetap hidup—dan mana yang tidak. Melalui mekanisme ini, PNI memperkirakan hanya akan tersisa dua parpol, yakni PNI dan NU yang akan muncul sebagai pemenang di pentas nasional, di samping tentunya partainya Pemerintah, yakni Golkar. Tetapi cara ini jauh dari selaras dengan apa yang dikehendaki elite-elite Orba yang tidak saja menghendaki penyusutan jumlah, tapi, di atas segalanya, pembaruan partai.<sup>11</sup> Ide ini juga memungguni kepentingan partai-partai kecil yang terancam bangkrut kalau mekanisme pemilu digunakan. Karenanya menjadi logis apabila partai-partai kecil bukan saja tidak memberikan dukungan, tapi, lebih lagi, secara aktif menentang gagasan PNI.

Dilihat dari kepentingan PNI sebagai empat kekuatan politik terbesar di pentas nasional, berdasarkan ukuran Pemilu

---

10 Wawancara dengan Mh. Isnaeni, di rumahnya, *Op.cit.*

11 *Ibid.*

1955,<sup>12</sup> ide perampangan kepartaian lewat pemilu jelas sangat menguntungkanannya. Secara obyektif, PNI bukan saja memiliki massa yang secara kuantitatif sangat substantif (dalam Pemilu 1971, PNI meraih lebih dari 3 juta suara), tetapi juga memiliki basis massa yang pasti (umumnya masyarakat yang dikategorikan sebagai warga "abangan")<sup>13</sup> dan menasional dalam cakupan wilayah dukungannya. Sebaliknya, dari kepentingan partai-partai kecil, dalam artian jumlah massa dan lingkup pengaruhnya, rute pemilu sama sekali tidak menarik, sebab meniti rute ini bermakna sebagai perjalanan menuju liang kematian bagi mereka. Penolakan kekuatan-kekuatan politik di atas punya rasionalitas lain, yakni bertalian dengan keengganan mengakhiri eksistensi mereka yang dijamin secara hukum. Hal ini semakin dilegitimasi oleh kalkulasi lain, yakni bahwa mereka pernah berjasa dalam perjuangan bangsa ini. Namun, kegigihan PNI untuk bertahan pada ide sendiri tidak semata-mata berdiri di atas keangkuhan atas keunggulan jumlah massa. Kegigihan ini sekaligus merupakan salah satu ekspresi dari perlawanannya atas pemaksaan berlebihan negara. Perlawanan ini diarahkan pada dua kemungkinan tujuan. Pertama, mempertahankan agar mekanisme PNI tetap hidup, sekalipun dalam lingkungan politik baru yang berada di luar cita-citanya. Bisa diperkirakan, apabila ide PNI yang muncul sebagai pemenang, maka apabila fusi harus dilakukan atas ukuran hasil Pemilu 1971, PNI secara otomatis memiliki legalitas hidup berdasarkan prinsip-prinsipnya sendiri. Kedua, penentangan itu dimaksudkan

---

12 Pemilu 1955 diikuti oleh ratusan kontestan partai politik, tetapi hanya empat parpol yang mampu mendulang suara terbanyak, diurutkan dari yang terbesar, yakni PNI (22,3%), Masyumi (20,9%), NU (18,4%), dan PKI (16,3%). Lihat Pamungkas, Sigit, 2009, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: JIP Fisipol UGM, hal 64-67.

13 Geertz, Clifford, 1960, *"The Religion of Java"*, Chicago: Chicago Press, (Terj.), Geertz, 1983, *"Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa"*, Jakarta: Pustaka Jaya.

untuk merentang waktu. Dalam hal ini, apabila pemilu 1976<sup>14</sup> yang akan dijadikan sebagai arena penentuan fusi, PNI masih tetap memiliki cadangan waktu yang cukup untuk menata diri sehingga bisa menampilkan diri sebagai kekuatan politik yang cukup bermakna. Dengan kalkulasi di atas, PNI terus bertahan dengan gagasan perampangan parpol melalui mekanisme pemilu. Tokoh-tokohnya baru “menyerah” setelah lembaga dengan daya tekan yang sangat tinggi, Pangkoptikamtib, menghadirkan diri secara riil di tengah-tengah persengketaan antara tokoh-tokoh PNI dan empat kekuatan politik lainnya. Dalam pertemuan 8 Januari 1973 dengan Pangkoptikamtib Jenderal Sumitro barulah PNI menarik kembali usulannya itu,<sup>15</sup> yakni penyederhanaan kepartaian. Dalam situasi seperti ini, pemaknaan seperti ditawarkan presiden menjadi sedemikian menarik bagi tokoh-tokoh partai-partai kecil karena memberikan jaminan kepastian bagi mereka untuk tetap bertahan hidup. Hal ini menuntun langkah pihak partai-partai kecil di luar PNI memasuki arena “koalisi terselubung” dengan Pemerintah untuk menghadapi PNI. Sebuah pilihan cara yang paling logis bagi partai-partai kecil guna mempertahankan hak hidupnya. Situasi seperti ini akan terus menandai perjalanan PDI nantinya, dan banyak mempengaruhi perkembangan internal PDI selanjutnya.

Sejajar dengan pilihan rute yang ditempuh ke arah penyederhanaan kepartaian, dalam melihat pengertian fusi pun PNI lebih melihatnya sebagai penyerapan secara organisatoris massa partai-partai politik kecil ke dalam partai besar. Dan

---

14 Pemilu kedua yang dilaksanakan tahun 1977 awalnya direncanakan berlangsung tahun 1976.

15 *Ibid.* Dalam pertemuan ini, akhirnya PNI sepakat dengan PANGKOPKAMTIB agar penyederhanaan kepartaian dilakukan melalui penggabungan parpol-parpol yang sehaluan. Bagi PNI, seperti diungkap Isnaeni dan sejumlah tokoh lainnya lagi, langkah PNI di atas merupakan ekspresi dari keikhlasan PNI yang tidak berprinsip ingin meneng sendiri. Akan tetapi, bisa diperkirakan, yang lebih mungkin, PNI memang dihadapkan pada kebuntuan pilihan.



karena PNI adalah yang terbesar -- menurut ukuran Pemilu 1955 dan 1971 --, maka tokoh-tokoh PNI meyakini bahwa sebuah kewajaran apabila partai-partai lainnya melebur ke dalamnya.<sup>16</sup> Hal ini, menimbulkan reaksi tokoh-tokoh parpol lain di luar PNI. Fusi bagi mereka—karena mereka memiliki eksistensi hukum—adalah peleburan semua organisasi parpol menjadi satu parpol baru.<sup>17</sup> Fusi, dengannya, menjadi pengakhiran eksistensi semua kekuatan politik yang ada dan permulaan bagi kehadiran suatu kekuatan politik baru. Tentunya, hal ini tidak dapat diterima begitu saja oleh PNI.<sup>18</sup> Silang pendapat yang tajam antara tokoh-tokoh lima parpol ini akhirnya harus dibayar mahal. Secara bertahap, perbedaan yang ada melemahkan *bargaining position* terhadap penguasa yang menyebabkan dominasi konsepsi dan pemaknaan versi penguasa atas penyederhanaan kepartaian tidak terhindarkan.<sup>19</sup>

Dalam kalkulasi waktu pun, antara penguasa dan partai-partai terdapat perbedaan tajam. Bagi partai-partai, perkawinan silang di antara mereka digagaskan untuk melewati suatu proses alamiah sehingga memungkinkan tercapai kristalisasi di antara mereka. Ini berarti, partai-partai menghendaki rentangan waktu yang lebih panjang lagi untuk dapat saling menyesuaikan diri. Namun, di pihak Penguasa, fusi dilihat

---

16 Wawancara penulis dengan Gde Djakse (PNI) di rumahnya di Jakarta pada 5 September 1986 memastikan hal ini. Hal ini diperkuat oleh Wawancara penulis dengan M. Sadrie (IP-KI) di rumahnya di Jakarta Selatan. Sadrie mengungkapkan, fusi bagi unsur-unsur yang kecil bermakna penyerahan semua aktivitas untuk diserap oleh PDI, tapi bagi PNI, fusi dimaknai hanya sebagai penyerahan politik saja, sementara organ-organnya tidak.

17 Wawancara dengan Djakse, *Ibid.*

18 Hardjantho, misalnya mempertanyakan, “Apakah adil apabila yang kecil dan yang besar diperlakukan sama?” Wawancara dengan Hardjantho, di ruang Wakil Ketua DPR/MPR, 8 Oktober 1986.

19 Djakse dalam wawancara dengan penulis menyatakan, perbedaan-perbedaan dalam melihat fusi ini menyebabkan konsepsi Pemerintah seperti yang tertuang dalam UU 3/75 menjadi dominan, *Op.cit.*

sebagai proyek segera yang diikat target waktu yang ketat. Benturan antara dua gagasan ini akhirnya tak terhindari dalam hal mengejar target waktu untuk memastikan dominasinya atas gagasan yang diusulkan partai-partai. Hal ini berakibat pada semakin sempitnya ruang gerak parpol, yang akhirnya terpaksa menerima fusi sebagai “*living reality*” yang harus diakomodasi guna menghindari terjadi korban yang lebih parah di tingkat massa.<sup>20</sup>

Di antara kesibukan partai-partai mencari pemecahan atas “cara”, “esensi” dan “kalkulasi waktu” untuk melakukan fusi, kubu PARKINDO dan Partai Katolik memunculkan gagasan membentuk partai sendiri—Partai Kristen Demokrat—atau setidaknya-tidaknya memperluas kerja sama di antara keduanya. Gagasan ini pertama-tama dikemukakan oleh Partai Katolik yang dimotori oleh V.B. da Costa dan Kasimo dengan dua kalkulasi: *Pertama*, merupakan langkah pembuka menuju fusi yang lebih luas dengan parpol lainnya. *Kedua*, sebagai upaya antisipatif apabila fusi yang sementara digarap gagal menemukan bentuknya. Dalam argumentasi kekuatan Katolik, seandainya fusi yang sementara digarap ternyata gagal, kekuatan PARKINDO dan Partai Katolik telah berhasil mencapai kerja sama lebih luas di antara mereka, yang berarti berjalan di rel yang sama dengan penyederhanaan kepartaian yang sedang dikembangkan.<sup>21</sup> Munculnya gagasan yang diprakarsai secara perorangan ini kemudian diikuti oleh adanya pertemuan di antara beberapa tokoh dari kedua kubu untuk menjajaki

---

20 Wawancara dengan Hardjantho, *Op.cit.* Ditegaskan oleh Hardjantho bahwa parpol tidak memiliki pilihan selain berfusi. Karenanya, proses transformasi secara alamiah yang lebih baik gagal mengambil bentuk riil. Dalam kondisi “setengah dikejar target waktu”, masih menurut Hardjantho, secara yuridis organisatoris, parpol akhirnya terpaksa melihat fusi sebagai “*living reality*”. Pandangan yang senada dilontarkan pula oleh tokoh-tokoh lainnya.

21 Wawancara penulis dengan V.B. da Costa di kantornya di Jakarta, 17 September 1986.

kemungkinan realisasi ide tersebut. Hanya saja, *appeal* ke presiden yang diharapkan akan memberikan restu atas ide di atas, berakhir dengan hasil yang bertolak-belakang dengan yang diharapkan kedua parpol ini. Oleh karenanya, ujung-ujungnya gagasan ini berakhir sebatas sebagai inisiatif perorangan dan tidak pernah menjadi kesepakatan formal kedua kekuatan ini.<sup>22</sup> Alasan utama yang dikemukakan pencetus gagasan ini adalah untuk memperlancar jalannya fusi lima parpol.<sup>23</sup> Akan tetapi tak dapat diabaikan bahwa hal ini sekaligus untuk memenuhi aspirasi keduanya yang boleh jadi membaca peluang yang diberikan pada kekuatan politik Islam untuk memiliki kekuatan politik sendiri sebagai peluang politik bagi diri mereka juga.<sup>24</sup>

Sulit diketahui bagaimana proses ke arah pencabutan gagasan ini oleh pihak PARKINDO dan Partai Katolik setelah *appeal* ke presiden. Tetapi salah satu kemungkinannya adalah adanya jaminan presiden tidak memperkenankan kekuatan Islam membentuk parpol atas dasar keagamaan. Gagasan pembentukan/pendirian Partai Kristen Demokrat akhirnya harus dibayar cukup mahal karena, dalam perkembangannya, telah menjadi salah satu pusat kecurigaan partai lain terhadap kekuatan PARKINDO dan Partai Katolik yang dieja sebagai

---

22 Ide ini tidak pernah sampai pada taraf organisasi, dalam artian bukan merupakan keputusan formal Sekretariat Bersama PARKINDO-Partai Katolik, walaupun antusiasme di kalangan kedua parpol dalam menyambut kemunculan gagasan ini sangat besar. Dari wawancara dengan Sabam Sirait di Yayasan Komunikasi, Jl. Matraman Raya 10a, Jakarta, terungkap bahwa usulan hanya diajukan oleh pihak Frans Seda dan Kasimo ke Presiden dan tidak pernah oleh Sekretariat Bersama PARKINDO- Partai Katolik. Karenanya, bukan merupakan kesepakatan yang bulat. Sementara da Costa justru menyatakan, soal fusi PARKINDO-Partai Katolik pernah ditanyakan oleh Sabam untuk direalisasikan. Wawancara dengan da Costa, *Ibid*.

23 Wawancara dengan da Costa, *Ibid*, wawancara dengan Lo Ginting, *Op.cit*, wawancara dengan F.S. Wignjosumarsono di kantor DPA, 25 Agustus 1986.

24 Gagasan ini sebenarnya lumrah saja, seperti yang diungkapkan Isnaeni. Ia menegaskan, adalah wajar apabila kekuatan Kristen-Katolik berharap untuk memiliki parpol sendiri. Wawancara dengan Isnaeni, *Op.cit*.

“berkiblat internasional”, dan karenanya, diragukan loyalitasnya pada bangsa ini.<sup>25</sup> Dalam proses ke arah fusi keduanya dicurigai sebagai agen imperialisme dan kapitalisme.<sup>26</sup> Kecurigaan serupa baru mereda setelah tokoh-tokoh PARKINDO dan Partai Katolik dapat meyakinkan koleganya bahwa mereka punya komitmen kebangsaan yang kuat—mereka, bagaimanapun adalah kekuatan-kekuatan nasionalis dalam selimut keagamaan yang dari segi kesejarahannya telah membuktikan diri sebagai pembela negara dan bangsa. Dan yang lebih penting lagi, performa para tokoh kedua parpol ini sangat meyakinkan sebagai nasionalis-nasionalis sejati yang menentang Belanda sehingga bisa memungguni kecurigaan tokoh-tokoh parpol lainnya yang melihat mereka sebagai “antek Belanda”.<sup>27</sup> Di samping itu, PARKINDO-Partai Katolik juga masih dipertanyakan kesungguhannya dalam menghayati Pancasila sebagai satu

---

25 Berbagai wawancara dan sumber dokumentasi yang berhasil dihimpun penulis mendukung hal ini.

26 Rentangan panjang sejarah masa lalu ketika orang-orang Kristen mendapatkan keistimewaan yang membedakan mereka dari warga lainnya, bisa diperkirakan ikut mewarnai cara pandang di atas.

27 Wawancara penulis dengan A. Wenas di rumahnya di Jakarta, 1 September 1986, mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi PARKINDO pada awalnya, terutama, karena diasosiasikan sebagai antek Belanda, ia menjelaskan, elite-elite parpol lainnya berulang kali mempertanyakan loyalitas PARKINDO. Hal ini terungkap dalam pandangan Soenawar Sukowati, misalnya, yang menyatakan bahwa ia tidak dapat mengerti apa alasan PARKINDO dan Partai Katolik bergabung ke dalam Kelompok Nasionalis. Namun, masih menurut Wenas, setelah dirinya dan tokoh Partai Katolik menjelaskan, pihak Sunawar dapat menerima kehadiran mereka. Wawancara dengan M. Sadrie, *Op.cit.* juga mengungkapkan hal yang sama. Ia menyatakan, pada hakikatnya PARKINDO dan Partai Katolik tidak bisa masuk kelompok Nasionalis, tapi, karena menurut keduanya, aspirasi mereka dapat tertampung, maka keduanya dapat diterima.

totalitas,<sup>28</sup> walaupun secara formal sudah mengakuri Pancasila sebagai fondasi bersama.

Upaya kedua kekuatan ini meyakinkan tiga sejawatnya memang cukup berhasil. Namun, ini tidak berarti keragu-raguan terhadap kedua parpol ini berakhir. Dalam perkembangan selanjutnya isu serupa sering muncul pada momentum-momentum tertentu, misalnya menjelang kongres atau pada periode memuncaknya konflik intern PDI. Di pihak kekuatan PARKINDO-Partai Katolik kecenderungan untuk tidak sepenuhnya mempercayai parpol lainnya, terutama PNI dan MURBA, juga berkembang. PNI, bagi PARKINDO dan Partai Katolik—terutama Partai Katolik—dicurigai keterkaitannya dengan PNI ASU yang Orla, sedangkan MURBA dipandang sebagai kekuatan yang melanjutkan ajaran Trotsky.<sup>29</sup> Ketidakpercayaan dan sekaligus kecurigaan timbal-balik ini bukan semata-mata menghadapkan kekuatan politik Kristen (PARKINDO dan Partai Katolik) dengan tiga kekuatan lainnya. Kecurigaan serupa menyebar secara merata di semua kekuatan, sehingga membentuk suatu matriks saling curiga dan saling tidak percaya yang sangat kompleks. Partai-partai politik lainnya mencurigai PNI yang dikaitkan dengan PNI-ASU dan

---

28 Wawancara penulis dengan Jusuf Merukh (PNI) di kantornya di Jakarta, menegaskan bahwa meskipun mereka sama-sama dalam Front Nasionalis dan mendasarkan diri pada Pancasila, tapi tokoh-tokoh Kristen dan Katolik masih berafiliasi ke agama. PARKINDO dan Partai Katolik, dalam menghayati Pancasila, masih menurut Merukh, ada plus minusnya, yakni lebih menghayati sila pertama sementara sila lainnya tidak dihayati secara utuh

29 Da Costa menegaskan, persoalan utama saat itu bukanlah agama, tapi apakah mereka bisa bersatu dengan PNI yang ada ASU-nya serta apakah bisa ada kesepakatan ideologis dengan MURBA yang notabene melanjutkan ajaran Trotsky. Wawancara dengan da Costa, *Op.cit.*

Orla, sehingga diragukan “ke-Pancasila-annya”,<sup>30</sup> atau, paling tidak, penghayatannya atas Pancasila diyakini tidak tuntas, hanya menekankan pada kebangsaan dan keadilan sosial.<sup>31</sup>

Mekarnya rasa saling curiga dan saling tidak percaya di antara parpol-parpol ini, telah berakibat serius dan luas, bukan saja selama proses menuju ke arah fusi, tapi terus bertahan setelah kelimanya menemukan dirinya harus hidup berdampingan di satu kandang. Saling curiga dan saling tidak percaya telah meletakkan alasan-alasan yang kuat bagi masing-masingnya untuk saling membenci dan saling berseteru, dan sekaligus membenarkan perseteruan yang ada. Karenanya, solidaritas dan soliditas yang sedemikian dibutuhkan bagi suatu organisasi yang sehat gagal menemukan rongga untuk bersemai, apalagi, untuk tumbuh dan mekar. Saling curiga, saling tidak percaya, dan saling membenci ini yang bisa banyak menjelaskan mengapa, setelah lama berfusi, mekanisme unsur dalam PDI tetap bertahan. Dalam keadaan yang diliputi rasa saling curiga, saling tidak percaya, dan saling membenci seperti ini pengembangan kerja sama di antara lima parpol yang akan berfusi pun sulit dilakukan. Kerja sama lebih banyak menampakkan diri dalam raut parsial dan lebih didasarkan pada mekanisme unsur ketimbang suatu bentuk kerja sama

---

30 Wawancara dengan Sadrie, misalnya, mengungkapkan bahwa pada Musyawarah Nasional IP-KI di tahun 1967 pernah dikeluarkan resolusi untuk membubarkan PNI. Akibatnya, banyak tantangan psikologis yang dihadapi selama proses ke arah fusi dan setelah fusi, apalagi, latar belakang PNI menyebabkannya dicurigai tidak setia pada Pancasila.

31 Banyak tokoh yang diwawancarai yang menegaskan hal ini. Bahkan dari kalangan PNI nada yang sama terdengar. Merukh, misalnya, mengkritik tokoh-tokoh PNI dengan menyebutkan penghayatan PNI atas *Marhaenisme* sangat tebal sedangkan terhadap Pancasila lebih menekankan pada Kebangsaan dan Keadilan Sosial saja. Pandangan Merukh ini ditampik oleh rata-rata tokoh PNI yang diwawancarai. Bagi mereka *Marhaenisme* dan Pancasila adalah identik, dan, karenanya, tidak perlu dipertentangkan, sekalipun tetap diakui bahwa *Marhaenisme* pernah diselewengkan dan diidentikkan dengan “*Marxisme*” yang diterapkan di Indonesia”.

menyeluruh berdasarkan mekanisme PDI.

MURBA, misalnya, dari pengakuan salah seorang tokohnya, lebih dapat bekerja sama dengan PNI dibandingkan dengan PARKINDO dan Partai Katolik.<sup>32</sup> Sebaliknya PARKINDO, tampaknya hanya lebih akrab kepada Partai Katolik dan sebaliknya, sebelum keakuran keduanya hancur berantakan di akhir tahun 1970-an. Sedangkan IP-KI, sekalipun cukup dapat bekerja sama secara luas dengan empat kekuatan yang lain, tetap lebih cenderung ke PNI dengan alasan nasionalismenya. Pada pihak PNI, MURBA dan IP-KI tidak pernah diperhitungkan secara politik sebagai kekuatan berarti, sekalipun secara berulang keduanya telah membuktikan diri sebagai "sandungan" terberat bagi PNI. Koalisi-koalisi segmental seperti ini selalu mengalami perubahan konfigurasi, sehingga sulit ditelusuri secara pasti motif-motif atau rasionalitas di balik koalisi dan perubahan koalisi. Yang bisa dipastikan adalah bahwa tidak pernah sekali pun dalam perjalanan PDI sebagai kekuatan politik terajut suatu koalisi permanen di antara mereka. Setiap unsur, dapat saja mengubah rekanan politiknya sesuai perkembangan keadaan. Ungkapan Isnaeni, "dalam politik, tak ada lawan dan kawan yang permanen, kecuali kepentingan", seperti ditegaskannya dalam wawancara dengan penulis, menemukan pembenaran empirisnya dalam PDI.

Namun, pola konflik dan koalisi yang senantiasa berubah ini pula yang dapat banyak menjelaskan kekenyalan PDI dalam

---

32 Wawancara dengan Murbantoko, di kediamannya di Bogor. Ia menegaskan, lebih mudah bagi MURBA berdialog dengan PNI dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya. Dengan PARKINDO dan Partai Katolik Murbantoko ia mengaku merasa kurang akrab. Boleh jadi, penilaian Partai Katolik terhadap MURBA sebagai penerus ajaran Trotsky ikut berpengaruh dalam hal ini, apalagi Kongres IV MURBA di Jakarta, telah menyepakati untuk membaca Murbaisme sebagai ajaran Tan Malaka.

menghadapi tekanan eksternal yang terus dihadapi. Pola koalisi cair ini, telah menyulitkan rezim penguasa untuk membangun aliansi permanen dalam PDI. Sebuah kontrol yang bersifat total, dengannya, gagal dicapai. Dengan ini, pola konflik dan koalisi yang berubah secara cepat adalah bagian prinsipiell dari strategi dan siasat elite lima parpol dalam menghadapi negara yang sedang bertransformasi menjadi negara otoritarian.

Dengan demikian, banyaknya perbedaan yang menyertai lima kekuatan politik dan tingginya derajat kecurigaan, ketidakpercayaan dan kebencian timbal balik di antara mereka, maka secara obyektif fusi mustahil dilakukan; atau setidaknya-tidaknya masih membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Akan tetapi karena fusi merupakan proyek rezim, maka secara otomatis “logika proyek” berikut akibat-akibat yang menyertainya, menjadi hukum baginya. Dengan alasan ini, masuk akal bila tokoh-tokoh lima parpol kemudian sama bergumam, fusi “merupakan pengorbanan tertinggi pihak parpol, karena rela menanggung segala akibat yang sudah dapat diperhitungkan jauh sebelumnya bila fusi dilaksanakan’.

Jika dalam hubungan lintas lima telah terjadi dan berkembang berbagai persoalan seperti telah disebutkan di atas, maka pada intern masing-masing parpol pun persoalan-persoalan serupa menghadirkan diri secara terang-terangan. Pergulatan intern setiap parpol yang akan berfusi mewujudkan diri dalam bentuk pergulatan antara kelompok dan elite yang ingin berfusi serta kelompok dan elite yang menolak gagasan fusi.<sup>33</sup> Di samping itu, di antara kelompok dan elite yang sepakat untuk memasuki fusi, terbelah lagi ke dalam kelompok dan elite

---

33 Para penentang fusi umumnya menjustifikasi penolakan mereka atas ide ini ‘karena tidak melihat adanya makna strategis yang menguntungkan parpol’. Pendapat semacam ini relatif tersebar pada semua parpol tanpa terkecuali. Para penentang fusi, akhirnya memilih untuk berada di luar pagar politik resmi yang tersedia.



yang "ingin segera" mewujudkan fusi dan yang "lebih berhati-hati".<sup>34</sup>

Demikian juga, dalam hubungan lintas parpol, persoalan "segera tidaknya fusi" muncul ke permukaan sebagai pusat persengketaan yang sulit didamaikan. Partai Katolik dan PARKINDO sering dikategorikan sebagai kekuatan yang tidak menghendaki fusi, karena lambat dalam memutuskannya. Karena alasan ini, keduanya hampir "ditinggalkan" pada saat-saat paling akhir menjelang fusi.<sup>35</sup> Dalam memahami kelambanan dan ketidاكلambanan ini, kedua parpol ini mengajukan alasan tersendiri, yakni, dengan mengutip pepatah Medan, "lambat karena ada yang ditunggu, cepat karena ada yang akan dikejar."<sup>36</sup> Kategorisasi semacam ini bukan semata-mata monopoli PARKINDO dan Partai Katolik. Label yang sama juga dipasungkan ke dada PNI, yang konon menyebabkan kekuatan ini pernah pula dipertimbangkan untuk ditinggalkan saja oleh empat

---

34 Partai Katolik, misalnya, terpolarisasi ke dalam dua kutub pengelompokan. *Pertama*, kutub yang disebut "kelompok piring" atau kelompok Tanah Abang; dan *kedua*, kelompok generasi tua (Kasimo, dkk). Kelompok pertama menghendaki agar fusi "segera", sementara yang kedua lebih berhati-hati dan tidak ingin terburu-buru. Walaupun figur-figurnya sangat sulit dipastikan, polarisasi serupa menandai semua unsur. Di kubu MURBA, misalnya, terjadi persaingan keras antara kelompok Wasid Suwanto (eks Ketua MURBA setelah Sukarni), yang hampir-hampir tidak menunjukkan minatnya pada fusi, dan kubu Murbantoko yang berpandangan sebaliknya.

35 Wawancara dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.*, dan Sabam Sirait, *Op.cit.* Keduanya menegaskan, sikap Partai Katolik dan PARKINDO yang "lamban" ini sering disalahartikan unsur-unsur lain sebagai sikap penolakan atas fusi. Wawancara dengan Isnaeni, *Op.cit.*, juga mengungkapkan hal yang sama. Isnaeni mengemukakan, dalam pertemuan terakhir, 10 Januari 1973, antara lima parpol dengan Pangkoptamb Jendral Sumitro, sang jenderal sempat marah karena sikap keras kepala tokoh-tokoh Partai Katolik. Karenanya, masih menurut Isnaeni, Pangkoptamb menegaskan untuk meninggalkan saja mereka yang tidak setuju.

36 Sabam Sirait dalam wawancara dengan penulis, *Ibid*, menyebutkan bahwa bagi pihak PARKINDO, kelambanan langkah mereka karena "ada yang hendak ditunggu", meskipun ia sendiri tidak mengungkapkan secara jelas tentang hal ini.

parpol lainnya.<sup>37</sup> Secara logis baik PNI, PARKINDO, maupun Partai Katolik, bisa diperkirakan cenderung untuk menolak fusi atau setidaknya tidaknya ingin terus merentang waktu. Ketiganya punya alasan kuat untuk itu. Ketiganya sama-sama memiliki basis sosial yang cukup dan pasti untuk meyakinkan diri sendiri bahwa mereka dapat hidup sebagai kekuatan politik tanpa harus melewati proses perkawinan silang dengan kekuatan-kekuatan politik lainnya. Sebaliknya IP-KI dan MURBA yang memiliki basis sosial yang bukan saja sangat terbatas, tapi juga terkonsentrasi di sejumlah daerah kantong yang sangat kecil, lebih memilih fusi sebagai alternatif terbaik guna mengukuhkan keberadaannya.

Dalam keadaan yang sarat dengan persoalan pelik seperti yang terpetakan di atas, lima parpol digiring memasuki arena perundingan. Menjadi sangat logis kemudian apabila masing-masingnya tetap gigih memperjuangkan agar minimal beberapa ciri dasar yang inheren dalam diri mereka mewarnai “calon bayi partai baru” yang siap dilahirkan. Pergulatan ke arah ini terekspresikan dalam berbagai bentuk dan mengambil berbagai peristiwa selama proses menuju fusi. Pilihan nama yang akan dilabelkan pada “calon bayi partai” merupakan salah satu sentrum pergulatan penting.

Setelah melampau fase musyawarah panjang, tiga kemungkinan nama muncul sebagai bakal nama partai baru. Masing-masingnya adalah sebagai berikut:

- *Partai Demokrasi Pancasila*, yang akhirnya dibatalkan penggunaannya karena mempertimbangkan kesan pada nama tersebut yang mengandaikan pihak lain di luar mereka tidak Pancasila-lais,
- *Partai Demokrasi Pembangunan*, yang dianggap belum juga

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan M. Sadrie, *Op.cit.*

memadai, serta

- *Partai Demokrasi Indonesia*, yang dianggap telah mencakup kedua pengertian yang terkandung dalam nama sebelumnya.

Tercapainya konsensus atas nama di atas, terutama, karena adanya pertimbangan serta keyakinan bahwa partai baru tersebut haruslah mencerminkan suatu bentuk “demokrasi yang Indonesia”. Suatu bentuk ekspresi pemihakan kultural terhadap ide demokrasi yang coba dieja ke dalam konteks cita rasa kultural negeri sendiri. Karena alasan yang demikian, sebenarnya pada awalnya Partai Demokrasi Indonesia tidak dimaksudkan untuk disingkat menjadi PDI seperti yang kini dikenal. “Demokrasi Indonesia” menurut para pengagasnya dipahami sebagai suatu kesatuan pengertian yang menunjukkan pembedaan diri dengan demokrasi lainnya. Penyingkatan menjadi PDI akhirnya terjadi juga, bukan sebagai hasil kesepakatan para pendirinya, akan tetapi lebih sebagai produk kerja media massa yang didorong oleh kepentingan praktis pemberitaan. Dengan singkatan PDI, dirasakan lebih ringkas dan lebih mudah untuk diingat.<sup>38</sup>

Walaupun deretan perbedaan masih saja memagari lingkungan lima parpol yang akan berfusi, tapi akhirnya mereka sendiri berusaha secara maksimal menyingkirkan sekat-sekat pembentuk perbedaan dan mulai memikirkan persamaan-persamaan di antara mereka. Kemunculan sikap ini, oleh tokoh parpol yang diwawancarai, disebut sebagai wujud dari kemauan baik dan semangat persatuan di antara mereka untuk menyelesaikan masalah kenegaraan yang besar dan mendasar.

Dengan semangat menemukan “persamaan-persamaan” ini, berbagai perbedaan dapat disisihkan dan pertemuan 10

---

38 Uraian tentang nama PDI didasarkan pada wawancara penulis dengan tokoh-tokoh yang terlibat intens dalam mendukuni kelahiran PDI, misalnya: Sabam Sirait, A. Madjid, F. S. Wignjosumarsono, Mh. Isnaeni, Murbantoko, John Pakan, A. Wenas, A. Sukarmadidjaja, M. Sadrie, dan M. Supangat.

Januari, yang dipimpin oleh Ben Mang Reng Say dari Partai Katolik, berhasil merajut sejumlah prinsip dasar yang sama. Prinsip-prinsip dasar ini kemudian dikemas dalam bentuk deklarasi, yaitu “Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia”. Dokumen politik ini ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris masing-masing parpol yang berfusi, yang menandai kelahiran PDI dan pengakhiran secara formal eksistensi masing-masing unsur. Para penanda tangan tersebut, masing-masing:<sup>39</sup>

- PNI  
Mh. Isnaeni dan A. Madjid,
- PARKINDO  
Wenas dan Sabam Sirait,
- Partai Katolik  
Ben Mang Reng Say dan F.S.  
Wignjosumarsono,
- IP-KI  
Akhmad Sukarmadidjaja dan M. Sadrie,
- MURBA  
Sugiarto Murbantoko dan John Pakan.

Deklarasi Pembentukan PDI ini ditandatangani pada pukul 24.00, 10 Januari 1973, dan akhirnya dikenal sebagai “Deklarasi 10 Januari 1973”. Deklarasi ini secara ideal dibayangkan sebagai “pernyataan kelahiran PDI dan sekaligus dijadikan sebagai landasan dan sumber bagi kehidupan serta gerak dan kegiatan

---

39 Lihat, *Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia*.

Partai selanjutnya".<sup>40</sup> Namun, secara empiris, justru merupakan pernyataan kelahiran konflik sebagai sebuah institusi sekaligus mekanisme politik baru.

Dasar-dasar persamaan yang berhasil dihimpun sehingga memberikan alasan bagi lima parpol berfusi adalah: *Pertama*, kesediaan bersama mereka untuk memfusiikan diri ke dalam PDI dalam rangka penyederhanaan dan pembaharuan struktur dalam kehidupan politik di Indonesia; *kedua*, prinsip keterbukaan PDI bagi setiap warga negara, tanpa perbedaan suku, keturunan, kedudukan dan/ atau agama; *ketiga*, Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan PDI. Inilah tiga prinsip pokok yang oleh para pendirinya<sup>41</sup> dipandang sebagai fondasi yang tak boleh diubah atau diganti dan yang akan dipertahankan terus selama PDI sebagai kekuatan politik di Indonesia tetap diakui hak hidupnya.

"Deklarasi 10 Januari 1973" akhirnya disiarkan secara luas lewat pernyataan pers pada tanggal 11 Januari 1973 yang dipandu oleh Ben Mang Reng Say. Pada kesempatan tersebut, di samping Ben Mang Reng Say, yang ikut memberikan keterangan persnya adalah Isnaeni, Wenas, Sukarmadidjaja, dan Murbantoko. Ben Mang Reng Say dalam kesempatan tersebut menyatakan, fusi merupakan suatu klimaks dari proses pembaharuan dan penyederhanaan yang telah berlangsung di antara mereka selama dua tahun terakhir.<sup>42</sup> Dalam keterangannya Isnaeni mempertegas posisi nama Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang disebutkannya guna menggamblangkan bahwa watak dan kepribadian PDI bukan demokrasi liberal dan bukan pula

---

40 Laporan DPP PDI mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973 kepada Kongres I PDI, dalam "Kongres Pertama PDI", hal. 37.

41 Wawancara penulis dengan 9 (sembilan) dari 10 (sepuluh) penanda-tangan Deklarasi 10 Januari kembali mengukuhkan hal ini.

42 Lihat, *Kompas*, 12 Januari 1973

demokrasi sentralistis, tetapi “Demokrasi Indonesia” yang diidentikkan dengan “Demokrasi Pancasila”. A. Wenas dalam kesempatan ini hanya mengedepankan bahwa proses ke arah fusi didukung secara penuh oleh kelima parpol dan tidak satu pun di antara mereka yang menghambat. Bisa dipastikan keterangan Wenas ini dimaksudkan untuk memotong spekulasi tentang tajamnya perbedaan pendapat di antara lima parpol selama proses ke arah fusi. Dan sekaligus, tentunya, untuk mengeliminir kesan umum adanya keterpaksaan pada beberapa parpol untuk berfusi. Di pihak lain, Sukarmadidjaja mengungkapkan harapan lima parpol akan adanya partai yang kuat dan berkepribadian, yang lebih merupakan pesan kepada Pemerintah. Sedangkan Murbantoko membeberkan langkah-langkah lanjutan yang akan diambil mereka untuk memastikan bayi PDI bisa tumbuh dan berkembang.<sup>43</sup>

Deklarasi itu bukanlah akhir semua persoalan. Kerja politik yang tak kalah berat dan rumitnya menanti elite-elite lima parpol. Karenanya, pada diktum 3 “Deklarasi 10 Januari 1973” ditegaskan tentang keharusan pembentukan suatu tim yang difungsikan untuk menyusun Anggaran Dasar (AD), struktur, dan prosedur organisasi yang diperlukan sehubungan dengan adanya fusi. Diktum ini telah melegalisasi pembentukan sebuah tim yang dikenal sebagai “Tim 10” guna menyusun rencana Piagam Perjuangan Partai, AD/ART, serta Program Perjuangan Partai. Tim ini dikomandoi Sunawar Sukowati, salah satu figur yang akan banyak mewarnai perjalanan PDI selama tahun-tahun 1970-an dan awal 1980. Tongkat komando dari tangan Sunawar Sukowati akhirnya dialihkan kepada Sadjarwo karena Sunawar dipercayakan menjabat sebagai Dubes untuk RDV oleh Pemerintah. Susunan lengkap anggota “Tim 10” adalah sebagai berikut:

---

43 *Ibid.*

<i>Ketua</i>	:	Sadjarwo, SH (PNI);
<i>Wakil Ketua</i>	:	J.C.T. Simorangkir, SH (PARKINDO);
<i>Sekretaris</i>	:	John Pakan (MURBA);
<i>Anggota-anggota</i>	:	1. W.A.Chalik 2. M. Supangat 3. F.S. Wignjosumarsono 4. M.B. Samosir 5. T.A.M. Simatupang 6. J.B. Andries 7. M.A. Gowi

Dengan terbentuknya “Tim 10” ini, tergenapilah pesan diktum nomor 3 “Deklarasi 10 Januari 1973”. Namun, sekali lagi, ini bukan merupakan terminal terakhir. Perjalanan panjang masih membentang di depan, menciptakan rongga-rongga yang terbuka luas bagi kepentingan masing-masing unsur untuk bermekaran. Pertemuan-pertemuan “Tim 10” hadir sebagai wacana pergulatan kepentingan masing-masing unsur karena setiap wakil unsur memikul di pundaknya beban misi yang harus di-goal-kan di arena “Tim 10”.

Sebagai langkah lanjutan, “Tim 10” mulai merancang dan menyelenggarakan serangkaian pertemuan guna menyusun laporan dan rekomendasi kepada Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) mengenai tiga hal penting, yaitu: Piagam Perjuangan Partai, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, serta Program Perjuangan Partai. Laporan dan rekomendasi “Tim 10” kemudian dibahas berturut-turut pada tanggal-tanggal 2, 3, 5, dan 9 Maret 1973 dalam rapat MPP yang mengambil tempat di rumahnya Hasjim Ning. Dalam Rapat MPP pada tanggal 5 Maret 1973 berhasil diputuskan 2 hal penting, masing-masing:

- Penyelesaian Piagam Perjuangan, Anggaran Dasar, Anggaran

Rumah Tangga dan Program Perjuangan yang selanjutnya diserahkan pada DPP PDI,

- Setelah disahkan berdirinya DPD PDI Tingkat I serta DPD PDI Tingkat II di seluruh tanah air, akan diselenggarakan suatu pertemuan yang luas dan bersifat nasional, sebagai forum prosedural untuk lebih memperlancar proses fusi.

Rapat MPP tanggal-tanggal 2, 3, 5, dan 9 Maret 1973 juga membahas berbagai Rancangan Ketetapan (Rantap) mengenai materi persidangan MPR yang akan segera digelar antara 12 Maret 1973 sampai dengan 24 Maret 1973.

Terlepas dari produk yang dihasilkannya, pembentukan “Tim 10” sulit dibaca sebagai refleksi dari tingginya tingkat kesiapan lima parpol memasuki area fusi. Menurut beberapa tokoh PDI, Tim ini tidak sepenuhnya siap dan juga lebih banyak bersifat reaktif. Bahkan dalam banyak hal, “Tim 10” justru di luar koordinasi pimpinan parpol yang berfusi.<sup>44</sup>

Dalam suatu rapat nonsetop DPP DPI di Cibogo yang dihadiri “Tim 10”, dari tanggal 8 sampai 10 Juni 1973, berhasil dirumuskan AD/ART PDI.<sup>45</sup> Sedangkan Piagam Perjuangan Partai masih tetap menggantung tanpa kepastian. AD/ART akhirnya disahkan dalam Rapat DPP yang dipimpin Sunawar Sukowati pada 26 Juli 1973, untuk kemudian dikukuhkan dalam rapat MPP 4 Agustus 1973 yang berlangsung di kediaman Hasjim Ning. Piagam Perjuangan Partai baru dapat dikukuhkan pada rapat MPP PDI yang juga

---

44 Wawancara dengan T.A.M. Simatupang di rumahnya di Jakarta, 10 Agustus 1985, mengungkapkan adanya indikasi ketidaksiapan tokoh masing-masing unsur pada tingkat konseptual dalam menanggapi fusi ketika diadakan pembicaraan dalam Tim Pengurus (Tim 10).

45 Unsur PNI mengklaim bahwa AD/ART yang ada merupakan raut kemenangan PNI, karena dari format AD/ART yang ada, dan juga beberapa substansinya, tidak lebih merupakan milik PNI yang berganti nama. Pandangan serupa, seperti terungkap dari wawancara dengan tokoh-tokoh PNI, memiliki pendukung yang substantif dalam PNI.



dihadiri oleh Pimpinan Dewan Pertimbangan Pusat Partai, tanggal 19-20 September 1973, bertepatan dengan pengesahan Program Perjuangan Partai. Kedua dokumen politik penting ini dinyatakan mulai berlaku surut sejak 4 Agustus 1973, bertepatan dengan pengesahan AD/ART PDI. Dalam Piagam Perjuangan Partai ditegaskan bahwa hakikat PDI adalah sebagai:<sup>46</sup>

- “Sarana dan penegak Demokrasi Pancasila yang menjadi wadah pemersatu dan sasaran perjuangan rakyat untuk:
- Secara sadar dan wajar dapat menggunakan kedaulatan dan hak berorganisasinya,
- Secara tertib dan tenteram serta dengan bebas dan terbuka dapat menyalurkan aspirasinya”.

Seperti juga kisah KDP, impian yang ingin dicapai PDI dirancang sedemikian rupa agar berjalan paralel dengan tujuan nasional dan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu “... untuk melenyapkan penderitaan rakyat..., menuju terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam tata susunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila; dan untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka, berdaulat dan terhormat di antara bangsa-bangsa di dunia...”.<sup>47</sup> Realisasi tujuan-tujuan di atas, memerlukan kehadiran apa yang disebut Haluan Perjuangan Partai, yang mencakup bidang politik, ekonomi, agama, sosial budaya, pertahanan/ keamanan, internasional dan umum.<sup>48</sup> Untuk pemenuhan hal-hal di atas, disusunlah Program Perjuangan PDI yang dimengerti sebagai rangkaian program dalam segala bidang dan yang ditetapkan oleh Kongres Partai.<sup>49</sup> Program-program perjuangan mencakup, bidang-bidang politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Garis-Garis Besar Haluan

---

46 Lihat, Piagam Perjuangan Partai, Sub I, (A).

47 *Ibid.*, Sub I, (C).

48 *Ibid.*, Sub II, angka I dan seterusnya.

49 Lihat *Program Perjuangan PDI*, bagian Pendahuluan.

Negara, Pembangunan HANKAMNAS, Pembangunan Ekonomi, Masalah Kehidupan Beragama, dan seterusnya.<sup>50</sup>

Persaingan antara lima parpol yang berfusi dalam upaya masing-masing untuk mewarnai PDI, sebagai “anak” yang dilahirkan dari rahim mereka, juga mengambil arena lain, yakni ketika perbincangan *asas ciri* PDI mengambil tempat. PNI menawarkan “Demokrasi dan Kebangsaan” sebagai asas ciri PDI,<sup>51</sup> yang tidak cukup mudah diakuri kekuatan-kekuatan lainnya. Keberatan atas usulan PNI ini—terlepas dari kesepakatan masing-masing parpol bahwa kedua asas tersebut adalah relevan untuk semuanya—terutama, karena Demokrasi dan Kebangsaan, dipahami sebagai identik dengan Marhaenisme yang merupakan asas PNI. PARKINDO, di pihak lain, menawarkan Keadilan Sosial sebagai asas PDI, yang ditampik PNI karena keadilan sosial dimengerti PNI sebagai “tujuan”, bukanlah “asas”.<sup>52</sup>

Demokrasi dan Kebangsaan yang disodorkan PNI di meja perundingan ini merupakan bentuk lunak dari pikiran dasar Marhaenisme, walaupun tidak dengan nama sama. Perjuangan untuk mewarnai PDI secara ideologis ini menjadi prinsipiel

---

50 *Ibid.*, bagian I, dan seterusnya.

51 Wawancara dengan A. Madjid, *Op.cit.* dan Isnaeni, *Op.cit.*, mengungkapkan bahwa Kebangsaan dan Demokrasi merupakan asas ciri yang diusulkan mereka berdua.

52 Dari wawancara dengan Sabam Sirait, *Op.cit.*, terungkap bahwa Keadilan Sosial merupakan asas ciri yang ditawarkan PARKINDO. Hal ini juga dibenarkan oleh Madjid ketika dalam wawancara dengan penulis. Ia mengungkapkan kembali alasan penolakan terhadap Keadilan Sosial seperti yang ditawarkan PARKINDO. Menurutnya, penolakan ini merupakan “trik” yang sengaja dipakai guna dapat dipertukarkan dengan Kebangsaan dan Demokrasi yang ditawarkan PNI. Dengan “trik” ini, Madjid memaksa terjadinya tawar menawar dan kompromi di antara mereka, yang memungkinkan tetap diakurinya usulan PNI. Pemikiran bahwa penolakan atas Keadilan Sosial merupakan “trik” PNI tampaknya sangat beralasan apabila cakupan makna demokrasi dalam visi Marhaenisme, yakni mencakup dimensi ekonomi dan politik, ikut diperhitungkan, tersirat pula di dalamnya prinsip Keadilan Sosial.

bagi PNI karena hanya dengan demikian PNI tidak hadir sebagai pecundang total dalam proses politik nasional. PNI harus berkelahi untuk mendapatkan ruang bagi dirinya sendiri, terlepas dari betapa kecil pun ruang yang mungkin diperoleh. Keinginan mengadopsi Demokrasi dan Kebangsaan, dengannya lebih dimaksudkan sebagai signal perlawanan terhadap Pemerintah ketimbang pemaksaan ke intern PDI, sekalipun akibat-akibat yang ditimbulkannya lebih terasa di intern PDI. Di pihak lain, "Keadilan Sosial" yang ditawarkan PARKINDO merupakan upaya kekuatan politik Kristen ini mengekspresikan salah satu fondasi ajaran Kristen, yakni "kasih".<sup>53</sup> Walaupun perbincangan di sekitar asas ciri PDI berlangsung alot dan ditandai pula oleh kecurigaan tinggi, tampaknya semua pihak sampai pada kesepakatan bahwa ketiga hal yang ditawarkan, yakni *Demokrasi*, *Kebangsaan*, dan *Keadilan Sosial* merupakan ciri-ciri pokok yang memang senantiasa menjadi rujukan dasar sekaligus tujuan perjuangan masing-masing. Klaim yang merata ini menguntungkan semua pihak karena, dengannya, bukan saja benturan yang bersifat ideologis bisa terhindarkan, tapi juga menyediakan bukti bahwa ketiga asas ciri yang ada merupakan spiritualitas dari masing-masing unsur pembentuk. Suatu hal yang sedikit banyak dapat menjelaskan mengapa konflik ideologis dalam tubuh PDI relatif tidak menonjol, terlepas dari adanya upaya mistifikasi pada tingkat ideologi terhadap sejumlah isu yang dijadikan pusat konflik di antara kubu atau elite dalam PDI di periode-periode berikutnya.

Bagi pihak PNI sendiri, diterimanya Demokrasi dan Kebangsaan sebagai asas PDI dirasakan sebagai hasil maksimal yang sudah mewakili dan mencerminkan identitas dirinya dalam PDI. Karenanya, PNI merasa "menang". Perasaan yang juga merasuki parpol unsur fusi lainnya. Akibatnya, tidak satu pihak pun di antara mereka yang merasa dikalahkan atau dirugikan

---

53 Wawancara dengan Sabam Sirait, *Op.cit.*

dalam penentuan asas ciri ini. Dengan keadaan seperti ini, satu-satunya wilayah tempat tokoh-tokoh lima parpol bisa mencapai kesepakatan tanpa kontroversi yang berarti adalah dalam hal penentuan asas ciri ini. Dengan diamininya *demokrasi, kebangsaan, dan keadilan sosial* dengan anggukan setuju oleh elite-elite lima parpol sebagai asas ciri PDI, maka pada tataran ideologis telah dicapai rumusan yang sama, terlepas dari kenyataan bahwa pada tingkat operasionalnya, prinsip-prinsip di atas terlampaui sulit dirumuskan. Asas ciri ini akhirnya diintegrasikan ke dalam konstitusi PDI, yakni ke dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PDI yang secara bangga menyatakan, “PDI... berwatak serta bercirikan Demokrasi Indonesia, Kebangsaan Indonesia dan Keadilan Sosial...”

Kembali ke “Deklarasi 10 Januari 1973”. Deklarasi ini sendiri secara negatif merupakan perintah bunuh diri politik bagi lima parpol yang berfusi. Diktum 4 deklarasi mewajibkan setiap unsur melakukan penyelesaian intern dalam rangka fusi. Pesan ini bermakna pengakhiran eksistensi masing-masing unsur. Sebagai tindak lanjutnya, tiap-tiap unsur, sesuai tata-cara organisasi masing-masing, mulai mengambil langkah-langkah bunuh diri secara politik. PNI mengambil jalur Munas yang diselenggarakan di Jakarta, pada 27 dan 28 Januari 1973, untuk mengakhiri dirinya. Munas ini berhasil memproduksi poin-poin penting guna melegalkan pemunahan diri sendiri ini. Yang mendasar di antaranya adalah:

- Pengertian fusi adalah pengakhiran eksistensi dari suatu organisasi/ partai yang berfusi,
- Masalah fusi PNI dengan partai-partai lainnya dalam KDP adalah suatu realita yang tidak dipersoalkan lagi,
- Menyetujui kebijaksanaan DPP PNI dalam menghadapi fusi,
- Menyerahkan kepada DPP PNI (yang telah dibubarkan) untuk menentukan bentuk, forum dan waktu mengenai

pengakhiran eksistensi PNI sebagai parpol.

PARKINDO menghadirkan “Sidang Dewan Partai VII yang diperluas” dengan mengambil lokasi di Sukabumi, 8 sampai 10 Juli 1973, sebagai mekanisme untuk merespons fusi. Sidang Dewan Partai akhirnya memberikan persetujuan sepenuhnya atas semua kebijaksanaan DPP PARKINDO dalam rangka fusi menjadi PDI. Persetujuan untuk mengakhiri hak hidup sendiri ditempuh Partai Katolik dengan menggunakan rute “Sidang Dewan Partai yang diperluas” yang berlangsung di Jakarta, 25-27 Februari 1973. Dan sesuai dengan keputusan Kongres Bandung 1968 dan Kongres Yogyakarta di akhir tahun 1971 yang membahas tentang pembaharuan dan penyederhanaan kehidupan dan struktur politik, sidang kali ini mengambil keputusan, “menerima dan menyetujui sepenuhnya Deklarasi PDI”; sekaligus “menerima dan menyetujui sepenuhnya langkah-langkah dan kebijaksanaan DPP Partai Katolik dalam rangka pembentukan PDI”. Dengan ini, Partai Katolik telah menjadi masa lalu.

Musyawarah Dewan Paripurna Nasional ke IV IP-KT pada tanggal 25-27 Mei 1973 di Tugu/Puncak, Bogor, yang dijadikan sebagai arena penuntasan fusi ke intern IP-KI, menyatakan dengan bulat melaksanakan fusi IP-KI bersama-sama empat parpol lainnya menjadi PDI sesuai dengan “Deklarasi 10 Januari 1973”. Forum musyawarah juga memberikan kekuasaan penuh kepada DPP IP-KI untuk melaksanakan fusi tersebut, sampai tersusunnya dasar dan hukum-hukum keorganisasian yang definitif dari PDI. Pihak MURBA—sesuai dengan ketentuan Pasal 11 AD partai yang menyatakan pembubaran partai harus dilakukan oleh suatu kongres yang khusus untuk itu atau, bila kongres gagal dilakukan, harus melewati referendum anggota—menyelenggarakan referendum untuk memastikan kematiannya. Hasil referendum yang diselenggarakan selama April-Juli 1973, akhirnya dituangkan dalam keputusan Sidang

Dewan Partai MURBA, pada 1-3 Agustus 1973. Keputusan ini kemudian disampaikan pada DPP PDI yang secara prinsip menyetujui fusi MURBA ke dalam PDI.

Proses ke arah “pengingkaran diri sendiri” lewat mekanisme masing-masing parpol seperti diindikasikan di atas, berjalan tanpa hambatan berarti, setidaknya-tidaknya secara terbuka. Dengan berhasilnya masing-masing parpol mengadakan “penyelesaian” intern dalam raut pengakhiran eksistensi mereka, maka adalah wajar bila dikatakan partai-partai politik telah melakukan pengorbanan maksimal guna berlangsungnya restrukturisasi kehidupan politik. Namun, bila diperhatikan bahwa aneka forum yang sedemikian penting ini—karena menyangkut pengakhiran eksistensi—justru dilakukan setelah ditetaskannya PDI melalui “Deklarasi 10 Januari 1973”, maka jelas forum-forum yang ada hanya bertindak atau difungsikan untuk mengabsahkan fusi yang tak dapat dielakkan lagi. Forum-forum bunuh diri politik di atas adalah bagian dari ritual politik untuk memberikan impresi bahwa fusi yang terjadi berlangsung atas dasar konsensus demokratis.<sup>54</sup>

Tiga hari selepas penanda tangan “Deklarasi 10 Januari 1973”, telah berhasil dibentuk lembaga MPP dan DPP berdasarkan kombinasi prinsip-prinsip “representatif-proporsional-toleran”. Berdasarkan ini, untuk posisi DPP unsur PNI dianugerahi kehormatan untuk diwakili oleh tiga anggotanya, sementara unsur lainnya masing-masing dijatah dengan dua anggota. Untuk MPP, masing-masing unsur diwakili secara sama oleh lima orang. Walaupun PNI memperoleh tiga

---

54 Berbagai sumber PDI yang dihubungi penulis membenarkan hal ini. Umumnya mereka menyatakan bahwa aneka kegiatan intern ini sebenarnya lebih dimaksudkan untuk mengesankan bahwa demokrasi masih ada. Disimpulkan demikian karena, menurut elite-elite PDI ini, berbagai forum yang dilaksanakan dicemari secara luar biasa oleh tangan-tangan luar. Akibatnya, forum memang disediakan oleh partai-partai unsur, tapi semua produk forum ditentukan oleh kekuatan eksternal.

posisi dan posisi terpenting, yakni posisi ketua umum juga diperolehnya, tapi jika hasil di atas dipahami sebagai refleksi dari perjuangan antarunsur, maka jelas PNI jauh dari berhasil.<sup>55</sup> Apalagi rumusan “representatif-proporsional-toleran” ini nantinya akan dijadikan sebagai patokan dasar dan dieksploitasi sedemikian rupa di tingkat penyusunan kepengurusan daerah-daerah yang akhirnya berkembang menjadi salah satu pusat sengketa.<sup>56</sup> Dengan selesainya pelaksanaan diktum-diktum “Deklarasi 10 Januari 1973”, maka secara *de jure* PDI menampilkan diri sebagai kekuatan sosial politik yang utuh. Namun, secara *de facto* masih tidak lebih dari konfederasi parpol-parpol—dengan ketidakpercayaan timbal-balik yang serius—karena masih sedemikian kuatnya cakar-cakaran antarunsur mencengkeram tubuh PDI. Inilah warna PDI hingga hari ini.

---

55 Abdul Madjid, salah satu tokoh utama PNI yang terlibat intens dalam proses fusi mengakui bahwa dalam proses perkelahian untuk mendudukkan personil ke dalam PDI ia mengalami kegagalan. Sekalipun demikian, ditegaskannya bahwa dalam hal mewarnai PDI untuk asas dan sebagainya, PNI berhasil dengan baik. Wawancara dengan A. Madjid, ... *Op.cit.*

56 Menurut beberapa tokoh PDI, prinsip ini sering dituntut secara tidak masuk akal di daerah-daerah dalam penyusunan personalia. Akibatnya, sejumlah figur pengurus di tingkat daerah yang tak punya kaitan apa pun dengan suatu unsur perlu “diunsurkan” terlebih dahulu agar kriteria formula representatif-toleran- proporsional bisa terpenuhi. Fenomena ini bahkan masih tetap bertahan hingga hari ini dalam PDI.

## **BAB IV**

### **PDI 1973-1976:**

### **MIMPI BURUK “SANG ANAK HARAM”**

Penggalan pertama periode perjalanan panjang PDI sebagai sebuah kekuatan politik bermula sejak 10 Januari 1973, saat Deklarasi Pembentukan PDI ditandatangani hingga mencapai terminalnya di saat berakhirnya Kongres I tanggal 13 April 1976. Formalnya periode ini diniatkan sebagai kurun waktu bagi pematapan fusi dan unifikasi antarunsur yang berserakan. Sebuah periode yang diidealkan, bukan saja sebagai masa bulan madu bagi unsur-unsur dan elite-elite pembentuk PDI, tapi sekaligus sebagai era pencurahan cinta-kasih bagi bayi PDI yang baru saja dilahirkan. Setidak-tidaknya begitulah yang diniatkan dalam Ketentuan Peralihan (Pasal 28 ayat (3)) Anggaran Dasar PDI, yang lengkapnya berbunyi:

*“Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.... PDI harus menyelenggarakan kongres yang pertama untuk mengukuhkan: Piagam Perjuangan, AD dan ART, Program Perjuangan Partai; mengesahkan dan menyempurnakan aparat PDI”.*

Namun, seperti yang akan dibicarakan secara detail dalam bagian-bagian berikut ini, secara material pematapan fusi dan unifikasi yang dibayangkan tetap berada di dunia angan-angan, walaupun di tingkat formal elite-elite PDI tetap berkemat-komit tentang pematapan fusi dan unifikasi. Bulan madu tak



pernah terjadi, dan cinta-kasih bersama bagi sang bayi menjadi sebuah kemewahan. Kelahiran formal bayi PDI dari rahim lima parpol—tanpa preseden, tanpa cinta, di luar perkiraan, dan janggal—yang dipaksa melakukan “perkawinan silang” atau yang resminya disebut ‘fusi’, akhirnya hadir lebih sebagai sebuah bencana bagi dirinya sendiri. Secara faktual, baik unsur-unsur pembentuk maupun tokoh-tokoh yang mengerami PDI, tetap menghadirkan diri sebagai elemen-elemen terpisah yang bukan saja saling membenci, saling mencurigai dan saling tidak mempercayai, tapi, lebih lagi, punya kemampuan luar biasa menemukan dan mereproduksi semua kemungkinan alasan agar tetap sah saling membenci, saling mencurigai, dan saling tidak memercayai. Akibatnya, PDI secara tragis menjadi target berulang kemarahan lima ibu dan berpuluh-puluh ayah yang saling mencakar, meskipun secara berulang pula diklaim sebagai “buah hati tercinta”. Kisah perjalanan PDI selanjutnya menghadirkan ketaksaan sikap para ibu dan ayah. Di satu sisi ia dieja sebagai anak haram yang sangat dibenci karena telah merampas semua hak yang melekat dalam diri lima ibu dan sekian banyak ayah sebagai parpol, tapi, di saat bersamaan, ia dicintai justru karena di dalamnya mengalir darah masing-masing unsur dan elite parpol yang memungkinkan mereka bisa tetap mengklaim legitimasi bagi dirinya sendiri.

#### **A. Memasuki Keluarga Baru**

Bermodalkan secarik “surat perkawinan” berupa Deklarasi 10 Januari 1973, pada 13 Januari 1973 kelima parpol berhasil membentuk Majelis Pimpinan Pusat (MPP) yang menurut Ketentuan Peralihan AD PDI ayat (2) berfungsi sebagai pengganti Majelis Permusyawaratan Partai hingga

terselenggaranya Kongres I PDI.<sup>1</sup> MPP terdiri dari 25 orang, kelima parpol diwakili secara seimbang, yakni oleh lima orang untuk masing-masing unsur. Asal unsur dan nama masing-masing wakil adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- IP-KI  
Akhmad Sukarmadidjaja; HNMN. Hasjim Ning; A.P. Tanri; M. Supangat, dan; dan W.A. Chalik,
- MURBA  
Murbantoko; John Pakan; Zakaria Ra'ib; M. Nasution, dan; J.B. Andries,
- Partai Katolik  
Wignjosumarsono; Ben Mang Reng Say; M.B. Samosir; R.G. Duriat, dan; F.C. Pelaunsuka,
- PARKINDO  
Wenas; Sabam Sirait; J.C.T. Simorangkir; J.H.D. Tahamata, dan; T.A.M. Simatupang,
- PNI  
Mh. Isnaeni; S. Sukowati; A. Madjid; Budi Dipojuwono, dan; Gowi.

Pada saat bersamaan dibentuk pula organ yang nantinya paling banyak disengketakan, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Personalial DPP terdiri dari 11 orang dengan komposisi 3:2:2:2:2. Sebagai unsur terbesar, PNI mengkaveling tiga posisi, masing-masing posisi kunci sebagai Ketua Umum, salah satu

---

1 Pasal 13 AD PDI menegaskan, Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) adalah lembaga tertinggi di bawah dan di antara dua Kongres. Namun, fungsi ini, sesuai Pasal 28 ayat (2), baru efektif berlaku setelah Kongres I. Guna mengisi kevakuman yang ada, maka posisinya digantikan oleh Majelis Pimpinan Pusat.

2 DPP PDI, Dokumen Selektat Partai Demokrasi Indonesia, 1973, hal. 23.

dari lima posisi Ketua dan satu Sekjen. Empat kekuatan lainnya berbagi posisi secara merata di antara mereka, masing-masing menduduki salah satu ketua dan sekjen, kecuali untuk PARKINDO yang dipercayakan untuk mengendalikan posisi sebagai Sekjen Koordinator.<sup>33</sup> Hasil Pemilu 1971, dan juga Pemilu 1955, tanpanya dijadikan sebagai pijakan dalam alokasi jumlah dan posisi di atas. PNI merupakan kekuatan terbesar sesuai hasil Pemilu 1971 dan juga 1955, sementara PARKINDO berada di peringkat kedua, diikuti oleh Partai Katolik yang, nantinya, dipasrahi kekuasaan atas posisi Bendahara Umum PDI. Susunan selengkapnya dari DPP PDI yang pertama ini adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

Ketua Umum	:	Mh. Isnaeni (PNI)
Ketua	:	A. Sukarmadidjaja (IP-KI)
Ketua	:	Ben Mang Reng Say (Partai Katolik)
Ketua	:	A. Wenas (PARKINDO)
Ketua	:	Sugiarto Murbantoko (MURBA)
Ketua	:	Sunawar Sukowati (PNI)
Sekjen Koord.	:	Sabam Sirait (PARKINDO)
Sekjen	:	W.A. Chalik (IP-KI)
Sekjen	:	F.S. Wignjosumarsono (Partai Katolik)
Sekjen	:	John Pakan (MURBA)
Sekjen	:	Abdul Madjid (PNI)

Kedua lembaga ini, MPP dan DPP, merupakan organ pimpinan partai di tingkat Pusat atau Nasional. Pembentukan keduanya diikuti pemberian hak, wewenang, serta legalitas guna

---

3 “Laporan DPP PDI mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973 kepada Kongres I PDI”, dalam Kongres Pertama PDI, hal. 39.

4 “Dokumen Selekt...”, *Op.df.*, hal.23.

mengurus dan mengatur tata pembinaan kehidupan dan gerak PDI selanjutnya. Sebagai konsekuensi, sejak 13 Januari 1973, secara fisik, organisatoris PDI telah menampilkan diri ke luar sebagai sebuah parpol yang paripurna,<sup>5</sup> sebuah partai baru yang memiliki otonomi dalam mengatur dan mengendalikan mekanismenya sendiri. Namun, hal ini lebih mewajah sebagai harapan yang diletakkan di pundak PDI ketimbang sebagai realitas. Secara faktual PDI lebih menghadirkan diri sebagai “federasi” atau “konfederasi” dari beberapa parpol yang tetap menggenggam otonominya sendiri-sendiri ketimbang sebagai sebuah parpol otonom. Fusi memang sudah diikrarkan sebagai “kuburan politik” bagi eksistensi masing-masing parpol yang sama-sama bersepakat untuk “mengalihkan semua kegiatan politik masing-masing ke dalam PDI”. Akan tetapi, pembusukan diri sendiri secara formal dan pengalihan aneka kegiatan politik ke lahan PDI yang lebih bersifat formalitas organisatoris belum merupakan kekuatan yang cukup untuk mengubur eksistensi unsur-unsur pada tingkat material. Bahkan sebaliknya, seperti yang diakui rata-rata elite PDI, unsur-unsur semakin kuat bertahan dan sekaligus menjadi kunci penentu yang mendominasi mekanisme pengelolaan dan penataan PDI. Di luar mekanisme negara yang tampak omnipoten, mekanisme unsur ini hadir sebagai penentu yang mengesampingkan, bahkan menggusur, mekanisme PDI sendiri.

Setelah terbentuknya MPP dan DPP, pada 17 Januari 1973, DPP PDI menghadap presiden guna melaporkan terbentuknya PDI,<sup>6</sup> yang disambut gembira karena gagasan yang dicituskannya

---

5 *Ibid.*

6 Dalam versi Laporan resmi DPP PDI, pertemuan tanggal 17 Januari dengan Presiden disebutkan sebagai, “guna melaporkan terbentuknya PDI serta tersusunnya MPP dan DPP PDI”. Dengan ini ada kesan bahwa PDI merupakan proyek yang dibebankan di pundak elite-elite parpol. Karenanya, mereka wajib mempertanggungjawabkannya kepada pemberi proyek. Lihat, Laporan Perkembangan PDI,.... *Op.cit.*, hal.39.

beberapa tahun lalu kini mengambil bentuk riil. Kegembiraan ini diikuti anjuran kepada PDI membentuk sejumlah “tim” untuk kepentingan konsolidasi, sekaligus agar dapat memberikan penjelasan pada, baik internal masing-masing unsur, masyarakat luas, maupun Pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Anjuran ini disertai pemberian bantuan material guna membiayai kerja tim-tim yang ada. Kealpaan dana dalam tubuh PDI menyebabkan “uluran tangan” Presiden Soeharto di atas serta merta disambut gembira, apalagi pembentukan sejumlah tim ke daerah-daerah dalam pemahaman tokoh-tokoh PDI adalah perlu sebagai suatu prosedur dalam rangka pemfusan.<sup>7</sup> Akhirnya terbentuk delapan tim yang mewakili delapan daerah kerja, yang masing-masingnya dikendalikan oleh seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota. Delapan daerah kerja dan personalia tim-tim tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumatera bagian utara yang terdiri dari Aceh, Sumut, Sumbar, dan Riau dengan ketua tim Sunawar Sukowati,
2. Sumatera bagian selatan mencakup Jambi, Sumsel, Lampung, dan Bengkulu dengan ketua tim Hasjim Ning,
3. Pulau Jawa, terdiri dari DKI Jaya, Jabar, Jateng, Jatim, dan Jogja yang diketuai oleh Isnaeni,
4. Kalimantan Barat yang diketuai oleh F.C. Pelaunsuka,
5. Kalimantan bagian timur terdiri dari Kalsel, Kalteng, dan Kaltim dengan ketua timnya Pamudji,
6. Bali dan Nusa Tenggara, terdiri dari Bah, NTB, dan NTT diketuai oleh Ben Mang Reng Say,
7. Sulawesi, terdiri dari Sulsel, Sultra, Sulteng, dan Sulut dengan ketua tim Akhmad Sukarmadidjaja, dan

---

7 *Ibid.*, hal. 40.

8. Maluku dan Irian Jaya yang diketuai oleh Djon Tahamata.

Tim akhirnya berkembang menjadi sembilan, setelah dipecahnya tim ke Irian Jaya dan Maluku karena tak dapat dilaksanakan secara bersamaan, terutama karena pembentukan PDI di Maluku diadang persoalan khusus. Tim ke Maluku akhirnya dipimpin Ben Mang Reng Say, sedangkan ke Irian Jaya, dipimpin Sabam Sirait. Kerja tim ke daerah-daerah akhirnya membuahkan hasil, yaitu dengan terbentuk dan disahkannya DPD-DPD PDI dan kepengurusannya di 26 provinsi di seluruh Indonesia. Pendirian dan pengesahan DPD-DPD PDI tersebut adalah sebagai berikut:

1. DPD Sumatra Utara disahkan dengan SK Pengesahan No. I/DPP/1973 tertanggal 22 Februari 1973, dengan Ketua DPD Abdullah Eteng,
2. DPD Lampung disahkan dengan SK Pengesahan No. II/DPP/1973 tertanggal 22 Februari 1973 dengan Ketua Umum Radja Sjah Alam,
3. DPD DIY disahkan dengan SK Pengesahan No. III/DPP/1973 tertanggal 24 Februari 1973 dengan Ketua Umumnya Notosukardjo,
4. DPD Jambi disahkan dengan SK Pengesahan No. IV/DPP/1973 tertanggal 24 Februari 1973, dengan Ketua Umum Zainoeddin Abbas,
5. DPD DKI Jaya disahkan dengan SK Pengesahan No. V/DPP/1973 tertanggal 17 Februari 1973, dengan Ketua Umum Jusuf Merukh,
6. DPD DI Aceh disahkan dengan SK Pengesahan No. VI/DPP/1973 tertanggal 22 Februari 1973 dengan Ketua Umumnya Che Umar,
7. DPD Sumatra Selatan disahkan dengan SK Pengesahan No.

- VII/ DPP/1973 tertanggal 15 Maret 1973 dengan Ketua Umumnya Kemas H.A. Fahrudin,
8. DPD Kalimantan Barat disahkan dengan SK Pengesahan No. VIII/ DPP/1973 tertanggal 15 Maret 1973 dengan Ketua Umum F.C. Pelaunsuka,
  9. DPD Jawa Barat disahkan dengan SK Pengesahan No. IX/DPP/1973 tertanggal 15 Maret 1973 dengan Ketua Umumnya Dudy Singadilaga,
  10. DPD NTT disahkan dengan SK Pengesahan No. X/DPP/1973 tertanggal 15 Maret 1973 dengan Ketua Umumnya G. Sani Fenat,
  11. DPD Kalimantan Selatan disahkan dengan SK Pengesahan No. XI/ DPP/1973 tertanggal 15 Maret 1973 dengan Ketua Umum Anang Hasan,
  12. DPD Riau disahkan dengan SK Pengesahan No. XII/DPP/1973 tertanggal 30 Maret 1973 dengan Ketua Umum A. Malik Mansyur,
  13. DPD Jawa Timur disahkan dengan SK Pengesahan No. XIII/ DPP/1973 tertanggal 10 Mei 1973 dengan Ketua Umum Haji Doel Arnowo,
  14. DPD Jawa Tengah disahkan dengan SK Pengesahan No. XIV/ DPP/1973 tertanggal 10 Mei 1973 dengan Ketua Umum Boerhan,
  15. DPD Sulawesi Utara disahkan dengan SK Pengesahan No. XV/ DPP/1973 tertanggal 11 Mei 1973 dengan Ketua Umum M.W. Mamarimbing,
  16. DPD Kalimantan Timur disahkan dengan SK Pengesahan No. XVI/DPP/1973 tertanggal 23 Mei 1973 dengan Ketua Umum Sjachrumsjah Idris,
  17. DPD Sumatra Barat disahkan dengan SK Pengesahan No.

- XVII/ DPP/1973 tertanggal 23 Mei 1973 dengan Ketua Umum Mansjoer Arief,
18. DPD Kalimantan Tengah disahkan dengan SK Pengesahan No. XVIII/DPP/1973 tertanggal 23 Mei 1973 dengan Ketua Umum Josep Laut,
  19. DPD Sulawesi Tengah disahkan dengan SK Pengesahan No. XIX/ DPP/1973 tertanggal 30 Mei 1973 dengan Ketua Umum M.T. Abdullah,
  20. DPD Sulawesi Tenggara disahkan dengan SK Pengesahan No. XX/ DPP/1973 tertanggal 30 Mei 1973 dengan Ketua Umum A. A. Rere,
  21. DPD Sulawesi Selatan disahkan dengan SK Pengesahan No. XXI/ DPP/1973 tertanggal 13 Juni 1973 dengan Ketua Umum Mustamin Dg. Matutu,
  22. DPD Irian Jaya disahkan dengan SK Pengesahan No. XXII/ DPP/1973 tertanggal 13 Juni 1973 dengan Ketua Umum Steef P. Nafuni,
  23. DPD Bali disahkan dengan SK Pengesahan No. XXIII/ DPP/1973 tertanggal 13 Juni 1973 dengan Ketua Umum Tjokorda Bagus Sayoga,
  24. DPD Bengkulu disahkan dengan SK Pengesahan No. XXIV/ DPP/1973 tertanggal 13 Juni 1973 dengan Ketua Umum Djohan Argoef,
  25. DPD NTB disahkan dengan SK Pengesahan No. XXV/ DPP/1973 tertanggal 13 Juni 1973 dengan Ketua Umum Lalu Ratna Ti,
  26. DPD Maluku disahkan dengan SK Pengesahan No. XXVI/ DPP/1973 tertanggal 11 Juli 1973 dengan Ketua Umum L.C. Nikijuluw.<sup>8</sup>

---

8 "Dokumen Selektia ...", Op.cit., hal. 30-38.



Proses pembentukan dan pengesahan DPD di seluruh wilayah tanah air dapat diselesaikan dalam waktu relatif singkat—sekitar enam bulan sejak fusi yang ditandai dengan terbentuknya DPD Maluku pada 11 Juli 1973. Namun, pembentukan dan pengesahan Cabang-Cabang (DPC-DPC), tidaklah berjalan mulus. Perlawanan yang diberikan elite birokrasi tingkat lokal di sejumlah daerah membuat kerja tim terseok-seok. Karenanya, guna melicinkan pelaksanaan pembentukan Cabang-Cabang, DPP PDI harus meminjam tangan penguasa politik dalam negeri, yakni melalui Mendagri, untuk memerintahkan para bawahannya, yakni para bupati/walikota, agar memperlancar pembentukan DPC-DPC PDI yang belum dibentuk.<sup>9</sup> “Bantuan” Mendagri akhirnya menghasilkan pembentukan 203 Cabang PDI selama bulan-bulan kedua dan ketiga tahun 1974. Walaupun, hingga 1976, di beberapa daerah belum juga bisa dibentuk karena berbagai alasan. Di Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, misalnya, penundaan terjadi karena dihadapkan pada kekurangan tenaga pemimpin sebagai akibat adanya larangan bagi pegawai negeri terlibat dalam partai.<sup>10</sup> Secara keseluruhan, hingga berlangsungnya Kongres I PDI, telah berhasil dibentuk dan disahkan sebanyak 257 DPC di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 1973 terbentuk 154 Cabang,
2. Tahun 1974 terbentuk 77 Cabang,

---

9 Pertemuan DPP PDI dengan Mendagri, 27 Februari 1974, sebenarnya dirancang untuk membicarakan persoalan pembatalan Kongres I PDI, tetapi sekaligus dimanfaatkan oleh para petinggi PDI guna membicarakan aneka hambatan praktis yang dihadapi dalam pembentukan cabang-cabang dan sekaligus meminta bantuan Mendagri agar dapat memperlancar pembentukan cabang-cabang lewat para Bupati/Walikota. Lihat, “Laporan Perkembangan PDI...”, *Op.cit.*, hal.50.

10 *Ibid.*, hal.53. Hal ini disesalkan PDI karena kesulitan serupa, menurut mereka, sudah harus lenyap setelah berlakunya UU No. 3 Tahun 1975.

3. Tahun 1975 terbentuk 20 Cabang,
4. Tahun 1976 terbentuk 6 Cabang.

Pada tanggal 28 November 1975, DPP, berdasarkan pada keputusan rapatnya tanggal 26 November 1975, mengeluarkan “Instruksi tentang pembentukan Komisaris dan Pembantu Komisaris di Kecamatan dan Desa”. Instruksi bernomor 383/IN/D/DPP/XI/1975 ini secara pokok menegaskan untuk “segera membentuk Komisaris Pembantu di setiap Kecamatan dan Desa” yang dalam pembentukannya harus tetap bercermin pada ketentuan UU No. 3/1975. Dengan terbentuknya struktur dan susunan kepengurusan PDI di semua jenjang yang dimungkinkan perundang-undangan, dan juga telah meratanya persebaran organisasi PDI di seluruh wilayah tanah air, maka PDI telah menampilkan dirinya sebagai partai berskala nasional, meskipun baru dalam makna simboliknya.

Guna melicinkan mekanisme organisasinya di tingkat pusat dan sekaligus sebagai upaya untuk mengadakan pembagian tugas, DPP PDI membentuk lima departemen yang masing-masingnya dikendalikan seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua, kecuali Departemen Pendidikan Kader/Pembinaan Massa yang hanya dikendalikan seorang Ketua. Susunan selengkapannya dari kelima departemen yang dibentuk adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. *Departemen Politik*, diketuai Usep Ranawidjaja (PNI) dengan Wakilnya John Pakan (MURBA),
2. *Departemen Ekubang/Kesra*, diketuai Akhmad Sukarmadidjaja (IP-KI) dengan Wakilnya Sabam Sirait (PARKINDO),
3. *Departemen Penerangan*, diketuai Alexander Wenas

---

11 *Ibid.*, hal.60.

(PARKINDO) dengan Wakilnya M.B. Samosir (Partai Katolik),

4. *Departemen Pendidikan Kader/Pembinaan Massa*, diketuai Abdul Madjid (PNI),
5. *Departemen Organisasi*, diketuai F.S. Wignjosumarsono (Partai Katolik) dengan Wakilnya A. Tagor Harahap (IP-KI).

Dari komposisi di atas, tampak unsur MURBA tidak terwakili sebagai ketua salah satu departemen, walaupun mudah diperkirakan bahwa pembagian ke dalam lima Departemen di atas didasarkan pada pertimbangan adanya lima unsur pembentuk PDI. Bila komposisi di atas dipertimbangkan sebagai hasil dari suatu perjuangan politik antarunsur, maka MURBA jelas tersisihkan dari pertarungan tersebut karena hanya mampu menempatkan satu wakilnya dalam posisi Wakil Ketua Departemen Politik. Sementara PNI menguasai tiga posisi, yakni dua ketua dan seorang wakil ketua. Tiga unsur lainnya, PARKINDO, Partai Katolik dan IP-KI, masing-masing diwakili oleh dua orang, masing-masing satu ketua dan satu wakil ketua.

## **B. KONPERNAS: Merajut Yang Tercabik**

Upaya lain guna memantapkan fusi yang telah diikrarkan adalah dengan dicanangkannya rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional PDI yang dirancang sebagai “forum prosedural untuk menciptakan pra-kondisi yang sebaik-baiknya menjelang Kongres I PDI”.<sup>12</sup> Untuk kepentingan ini, sekaligus untuk melaporkan hasil konsolidasi ke daerah-daerah, DPP PDI kembali menghadap Presiden Soeharto pada 18 Juni 1973, yang baik hasil konsolidasi atau rencana penyelenggaraan Munas-nya bukan saja disambut gembira, tapi juga mendapatkan “restu” presiden.<sup>13</sup> Sambutan yang sama diterima dari Wapres

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal.42.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Dalam budaya politik Indonesia, “lembaga restu” adalah sangat menentukan.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX,<sup>14</sup> ketika pada 19 Juni 1973, DPP PDI menghadap kepadanya.

Sementara persiapan penyelenggaraan Munas dilakukan, upaya penyelesaian Piagam Perjuangan Partai dan Program Perjuangan Partai yang disiapkan oleh “Tim 10” juga terus berjalan. Setelah kedua naskah penting ini terselesaikan dan disahkan MPP bersama-sama dengan dokumen-dokumen lainnya, serta telah dibentuk dan disahkannya 26 DPD serta 203 DPC di seluruh Indonesia, Munas PDI berhasil diselenggarakan. Munas, akhirnya mengambil nama, “KONPERNAS” (Konsultasi dan Penataran Nasional) dan dilangsungkan di Jakarta, 20 s/d 24 September 1973. KONPERNAS dihadiri utusan-utusan yang mencerminkan kelima unsur dari DPD-DPD seluruh Indonesia, para anggota MPP, DEPERPU, dan Fraksi PDI di DPR, serta tokoh-tokoh lainnya.<sup>15</sup> Forum ini sekaligus dimanfaatkan oleh DPP PDI untuk menjanging input—atau lebih tepatnya diharuskan untuk itu—dari lingkaran penguasa. Hadir untuk memberikan ceramah adalah, antara lain, Mayjen. Ali Murtopo—petugas “penghubung presiden” era pembentukan KDP; Mayjen. Subiyono yang mewakili Dep. Hankam; Menteri Negara J.B. Sumarlin yang mewakili BAPPENAS; Mayjen. Sunandar yang mewakili Mendagri; Sulaiman yang mewakili Menlu; dan Prof. Sunario, mewakili Dewan Harian Angkatan 1945.<sup>16</sup> KONPERNAS akhirnya menerima laporan DPP yang secara garis besar menguraikan proses kelahiran PDI, aktivitas-aktivitasnya sampai terselenggaranya KONPERNAS, dan juga berbagai landasan dan latar belakang pemikiran yang dijadikan haluan dan landasan PDI.<sup>17</sup>

---

14 *Ibid.*, hal.43.

15 *Ibid.*

16 *Ibid.*, hal.44.

17 *Ibid.*, hal.43.

Dengan diterimanya penjelasan DPP ini berarti secara umum KONPERNAS berjalan dengan baik dan lancar, setidaknya tidaknya dilihat dari sudut kepentingan penyelenggaraan forum itu sendiri. Namun, suasana yang oleh pihak PDI dinilai baik di awalnya ini akhirnya diguncangkan oleh adanya pertemuan khusus antara peserta KONPERNAS yang berasal dari unsur PNI yang dilangsungkan di kediaman Sunawar, Jalan Sriwijaya, Jakarta, 22 September 1973.<sup>18</sup> Pertemuan yang diprakarsai Burhan, Ketua DPD PDI Jateng yang oleh pihak lain disebutkan sebagai “dengan persetujuan dan sponsor Sunawar Sukowati” telah menciptakan situasi genting dalam hubungan antara PNI dengan unsur-unsur lainnya. Ia telah menggeret kembali ke permukaan rasa saling curiga dan saling tidak percaya yang benih-benihnya sudah ditabur luas selama proses ke arah “perkawinan silang” (fusi) lima parpol. Kecurigaan dan ketidakpercayaan ini semakin mekar, terutama, karena dalam pertemuan tersebut muncul ke permukaan suara-suara atau kehendak-kehendak yang oleh unsur-unsur lain dinilai disintegratif dengan cara mengobarkan pendirian-pendirian yang bersifat ekstrem. Keharusan bagi PNI untuk mendominasi PDI atau PDI harus menjadi milik PNI adalah dua isu pokok yang mendominasi wilayah kecemasan partai-partai lain, yang diproduksi dalam pertemuan intraunsur PNI di atas. Mencuatnya tuntutan sejumlah eksponen dalam PNI di atas, telah menjadi alasan yang melegalisasi keresahan dan kecurigaan unsur lain untuk semakin membesar dan memberikan izin politik bagi mereka untuk mulai berbicara tentang adanya unsur-unsur ekstrem dalam PNI yang mulai menggagalkan kekuatan dan meningkatkan usaha untuk menguasai PDI. Hal terakhir ini dianggap sebagai ancaman serius yang membahayakan kepentingan unsur-unsur lain. Peristiwa itu merupakan titik

---

18 Hal ini terungkap dari sebuah dokumen yang sedianya akan dijadikan bahan laporan resmi DPP PDI.

permulaan bagi hidup kembalinya tendensi kemunduran dan keraguan psikologis dalam proses pembauran PDI.<sup>19</sup> Dari sudut yang lain, langkah PNI itu sangat mudah dimaklumi sejauh ia dipahami sebagai upaya kekuatan politik yang tersisih untuk tetap menyintas dan menemukan rongga bagi dirinya sendiri. Tentunya karena konsepsi yang dinilai “radikal” yang diproduksi dalam pertemuan PNI di atas merupakan cara PNI—atau sejumlah elemen dalam PNI—memberikan makna yang berbeda mengenai fusi, yang bertabrakan dengan apa yang dibayangkan negara.

Meskipun terjadi perkembangan lain yang kurang menguntungkan bagi PDI seperti dijelaskan di atas, KONPERNAS tetap menduduki posisi strategis dalam tahapan perkembangan PDI. Forum ini merupakan kesempatan pertama bagi tokoh masing-masing unsur yang berfusi pada tataran nasional dan daerah untuk saling berinteraksi. Suatu hal yang bukan saja dapat dijadikan sebagai peluang untuk pembauran dan pengembangan solidaritas, tapi sekaligus untuk semakin mengentalkan kebencian, ketidakpercayaan, kecurigaan, dan akhirnya permusuhan. Strategisnya forum ini dapat pula dilihat dari kenyataan bahwa beberapa saat sebelum penyelenggaraan, masing-masing unsur yang berfusi telah menyerahkan dokumen yang secara pokok menegaskan sikap “mengalihkan semua kegiatan politik masing-masing unsur ke dalam PDI”,<sup>20</sup> walaupun masih bersifat formal-organisatoris yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas di lapangan. Bahkan yang terjadi justru pengalihan konflik dari masing-masing unsur pembentuk ke dalam PDI sebagai arena baru. Dengan hasil seperti di atas, terlepas dari munculnya situasi krusial sebagai akibat adanya pertemuan utusan-utusan DPD PNI, 22 September 1973, adalah tidak berlebihan bila DPP PDI sendiri menempatkan

---

19 *Ibid.*

20 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.44.

KONPERNAS sebagai “tonggak kemajuan” dalam proses fusi.<sup>21</sup> Demikian pula, bila forum ini dipahami dari tujuannya sebagai forum prosedural bagi pemantapan fusi, maka ia bersifat fungsional.

Walaupun KONPERNAS tidak dirancang untuk mengambil suatu keputusan, tapi tetap membuka ruang bagi adanya usulan-usulan dan saran-saran yang dimanfaatkan DPP PDI bagi kelanjutan gerak PDI.<sup>22</sup> Kelonggaran yang diberikan terhadap berbagai usulan yang disampaikan forum terekam dalam pengumuman hasil kesimpulan yang disiarkan DPP yang mendasarkan diri pada rapat 24 September 1973. Secara pokok ditegaskan, “menghargai dan menerima baik semua saran / usul untuk menjadi bahan yang kemudian akan dibahas guna menentukan kebijaksanaan DPP PDI.<sup>23</sup> Dengan ini, KONPERNAS sekaligus telah difungsikan sebagai forum penjarangan input bagi DPP dan pengembangan demokrasi dari bawah. Di samping pengumuman di atas, DPP juga mengumumkan tentang saat mulai berlakunya berbagai naskah partai, yakni sejak pengesahannya oleh MPP. Juga diumumkan pembentukan DPC-DPC sebanyak-banyaknya pada masing-masing wilayah PDI di seluruh tanah air sebelum penyelenggaraan Kongres I. Hal ini, nantinya diikuti oleh dikeluarkannya SK No. 383/IN/D/DPP/XI/1975, 28 November, seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Sebagaimana rencana penyelenggaraan KONPERNAS yang melibatkan restu presiden, berakhirnya kegiatan ini juga dilaporkan DPP pada Presiden Soeharto yang puas dengan perkembangan yang ada.<sup>24</sup>

---

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 DPP PDI menghadap Presiden pada tanggal 10 Oktober 1973 guna melaporkan hasil-hasil KONPERNAS dan sekaligus perkembangan PDI sejauh ini, *Ibid.*, hal.45.

Berbagai upaya ke arah pemantapan fusi dalam kenyataannya dihadapkan kepada kendala serius. Kemelut internal yang diekspresikan lewat konflik, baik antarunsur, intraunsur, maupun antartokoh, secara pasti mulai menemukan pijakan yang kokoh di lahan PDI. Kemelut internal sebenarnya telah mulai menunjukkan tanda-tanda kehadirannya jauh sebelum fusi dicapai, yang dapat ditelusuri dari jejak-jejak perbedaan, kecurigaan, dan ketidakpercayaan di antara baik unsur-unsur atau tokoh-tokoh yang ditorehkan selama dan setelah proses pembentukan KDP serta Fraksi Bersama di DPR, yang terus berkembang dan merambah luas selama dan setelah penandatanganan “Deklarasi 10 Januari 1973”. Namun, di era-era sebelumnya konflik hadir dalam raut “malu-malu kucing”, tidak setegas di alam fusi.

### **C. Konflik Lintas Unsur: Kisah Perkelahian para “Ibu”**

Konflik lintas unsur mulai mencuat ke permukaan sehari setelah Deklarasi fusi ditandatangani, yakni pada 11 Januari 1973. Kisah ini berawal dari—setidak-tidaknya—pembentukan DPD DKI Jakarta oleh PNI, IP-KI, dan MURBA yang diprakarsai kelompok Sunawar yang tidak menyertakan pihak PARKINDO dan Partai Katolik.<sup>25</sup> Oleh kedua kekuatan ini, hal itu tidak dapat ditafsirkan lain kecuali bahwa sebagai upaya penyingkiran mereka dari arena PDI dan sekaligus sebagai bukti ketidakikhlasan PNI (dalam hal ini Sunawar, dkk) untuk bersandingan dengan PARKINDO dan Partai Katolik. Kemunculan masalah ini, walaupun telah dapat diperkirakan jauh sebelumnya, tetap saja memperuncing hubungan di antara lima parpol. Kekuatan PARKINDO dan Partai Katolik akhirnya berhadap-hadapan dengan PNI, MURBA, dan IP-KI dalam situasi penuh ketegangan. Hanya saja, ketegangan ini dapat kembali diregangkan ketika pihak PARKINDO dan

---

25 Wawancara dengan Mh. Isnaeni, *Op.cit.*



Partai Katolik mencoba untuk memahami gejala di atas sebatas sebagai produk dari perilaku politik “oknum” tertentu dalam tubuh PNI, dan tidak dieja sebagai sikap politik PNI secara keseluruhan.

Munculnya ketidakpercayaan yang menuntun kubu Sunawar mencadangkan kecurigaan pada dua kekuatan Kristen ini mudah dimengerti, sebab, seperti telah diuraikan pada Bab III, kedua kekuatan ini pernah mengajukan permohonan ke pihak Presiden untuk diizinkan mendirikan parpol sendiri. Bagi Sunawar, dkk., hal ini ditafsirkan sebagai perwujudan ketidakikhlasan PARKINDO dan Partai Katolik bersanding dengan mereka. Kehadiran keduanya lebih karena keterpaksaan sebagai akibat dari penolakan presiden atas ide pembentukan partai sendiri bagi keduanya, bukan keputusan yang bersumber dari keinginan bebas. Dengan demikian, apabila dilihat secara keseluruhan, kedua belah pihak yang saling berhadapan mempunyai alasan yang sama kuat dan sahnya untuk saling curiga dan saling tidak percaya, terlepas dari akibat negatifnya pada proses pemantapan fusi yang sedang berlangsung. Secara obyektif, seperti diungkapkan Isnaeni, “penyatuan lima kandang tidaklah mudah”, dan terlebih lagi, proses pemantapan fusi itu sendiri masih membutuhkan waktu panjang yang diperkirakan “mungkin setelah 20 tahun”,<sup>26</sup> setelah berbagai doktrin yang telah disepakati lima parpol ditempa.<sup>27</sup> Karenanya, seperti diungkapkan salah satu tokoh PDI, “waktu 13 tahun untuk menyatukan pendapat lima parpol, masih terasa terlalu singkat”.<sup>28</sup>

Hanya saja, waktu, dan juga generasi, nantinya, bukan

---

26 Wawancara dengan Hardjantho S., *Op.cit.*

27 Dari sebuah dokumen yang tidak jelas sumbernya tentang “Kemelum Fusi PDI”, hal ini terungkap.

28 Wawancara dengan M. Sadrie, *Op.cit.*

merupakan variabel tunggal untuk menjelaskan konflik, apalagi ketika konflik telah bertukar diri sebagai instrumen perlawanan dan sekaligus merupakan ekspresi dari pemaknaan politik yang memunggungi makna resmi yang dirumuskan negara yang mendominasi wacana politik. Sejarah yang ditulis PDI membuktikan kebenaran spekulasi di atas. Konflik dijadikan *way of life* bagi eksponen pada semua strata PDI justru karena ia ditolak secara resmi dalam tata cara pemaknaan formal atas politik dan kekuasaan di Indonesia.

Konflik lintas unsur juga terjadi dalam proses penentuan anggota BP MPR 1973, ketika Isnaeni dan Sunawar ingin menempatkan IP-KI dan MURBA di luar arena.<sup>29</sup> Hal-hal di atas, ditambah lagi dengan adanya pertemuan di rumah Sunawar pada awal-awal KONPERNAS, seperti yang sudah dijelaskan, semakin memperluas horizon dan spektrum konflik yang tidak saja menghadapkan PARKINDO-Katolik dengan IP-KI-PNI-MURBA, tapi IP-KI-MURBA yang semula berkoalisi dengan PNI dalam menentang PARKINDO-Partai Katolik kini membentuk “koalisi kilat” dengan PARKINDO-Partai Katolik guna menghadapi PNI. “Koalisi semu dan terpaksa” seperti ini, tetap saja mengandung di dalamnya benih-benih keretakan yang mudah muncul ke permukaan. Pola koalisi semacam akan terus berulang pada periode-periode berikutnya, terlepas dari kenyataan basis bagi adanya koalisi sedemikian rapuhnya sehingga dengan mudah ambruk. Dan seperti yang sudah diindikasikan sebelumnya, pola konflik dan koalisi yang sedemikian cairnya, dapat dibaca sebagai siasat para elite lima parpol dalam menghadapi kerakusan negara untuk melakukan kontrol total atas mereka. Perkelahian dan persekutuan yang terus berubah telah menyulitkan penguasa untuk menemukan teman sejati di tubuh PDI yang dapat secara konsisten diperalat.

---

29 Dokumen yang direncanakan sebagai bahan laporan resmi DPP PDI, *Op.cit.*

Sementara konflik lintas unsur terus berlangsung, persiapan ke arah kongres, sekalipun tersendat-sendat, terus dilakukan. Rapat DPP menetapkan Jakarta sebagai tempat penyelenggaraan Kongres. Rencana yang siap dimintakan pengesahannya oleh MPP,<sup>30</sup> akhirnya mentah kembali setelah dalam rapat berikutnya, 23 Januari 1974, Sunawar menginginkan tempat lainnya.<sup>31</sup> Hal ini memaksa rapat DPP memutuskan mengalihkan penentuan tempat kongres ke tangan rapat MPP. Sekalipun gagal menentukan tempat kongres, rapat DPP 23 Januari 1974 berhasil menetapkan waktu bagi penyelenggaraan kongres, yakni tanggal 28 s/d 31 Maret 1974.

Usulan Sunawar mengenai pengalihan tempat kongres dari Jakarta ke daerah lain tampaknya tidak terlepas dari adanya “Kata Mufakat”<sup>32</sup> yang dicapai Munas PNI yang berlangsung tanggal 2 dan 3 Februari 1974 di Jakarta. “Kata Mufakat” yang ditandatangani bersama oleh Isnaeni (Ketua I) PNI (in likuidasi), Sunawar (Ketua II) dan Hardjantho (Ketua III) tersebut antara lain menetapkan Semarang sebagai tempat Kongres PDI I karena Semarang merupakan salah satu basis terpenting PNI. Dalam situasi luar biasa ketika Semarang gagal diperjuangkan sebagai tempat Kongres PDI I, dokumen “Kata Mufakat” menegaskan agar berkonsultasi dengan Panitia Penyusun Strategi milik PNI yang diketuai Sunawar serta DPD PNI/PDI Jateng untuk mengalihkan ke tempat lain, dengan catatan “*harus tetap dipilih yang mencerminkan sfeer PNP*”.<sup>33</sup>

Selain merekomendasikan tempat penyelenggaraan kongres PDI, Munas PNI pada 2 dan 3 Februari 1974 juga

---

30 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal. 46.

31 Dokumen yang direncanakan sebagai laporan resmi, DPP PDI, *Op.cit.*

32 Kata mufakat ini merupakan hasil dari MUNAS PNI yang diikuti oleh DPP PNI, BMP (Badan Musyawarah Partai), dan utusan-utusan DPP PNI seluruh Indonesia.

33 Kata Mufakat Munas PNI, 2 dan 3 Februari 1974, Bagian II.

menetapkan pembentukan “Panitia Penyusun Strategi” yang ditugaskan untuk:<sup>34</sup>

1. Menyempurnakan AD/ART PDI,
2. Mempersiapkan tata tertib Kongres PDI, mencakup:
  - Hak suara dalam Kongres
  - Penentuan utusan-utusan
  - Prosedural pemilihan Ketua Umum DPP/formatur tunggal, serta prosedural pemilihan Ketua umum MPP PDI,
3. Menetapkan jumlah komposisi DPP PDI dengan memperhatikan faktor-faktor kuantitas dan kualitas yang dilandasi prinsip proporsional-toleran dan menjamin representasi yang wajar dari semua unsur dalam PDI,
4. Menyempurnakan Program Perjuangan dan Program politik PDI dalam menjamin pengamanan aspirasi nasional.

Panitia ini diketuai Sunawar Sukowati yang juga disertai kewajiban mengamankan strategi ini.<sup>35</sup> Munas PNI juga menugaskan secara khusus kepada petugas-petugas PNI di PDI (Isnaeni, Sunawar dan Abdul Madjid) mengusahakan sejauh mungkin susunan Panitia Kongres PDI I dapat diisi unsur-unsur PNI, terutama untuk fungsi-fungsi yang penting.<sup>36</sup> Hal ini mestinya tidak istimewa, karena bisa dipastikan hal-hal yang sebanding juga dilakukan empat kekuatan lainnya. Namun, karena hal ini dimunculkan oleh PNI sebagai kekuatan terbesar dan hadir di tengah-tengah situasi saling curiga dan saling tidak percaya merupakan suasana kebatinannya, strategi internal PNI di atas menemukan dirinya berada di tengah-tengah pusat sengketa. Munas PNI, dengannya, menjadi alasan lain yang

---

34 *Ibid.*, Bagian III.

35 *Ibid.*, Bagian IV.

36 *Ibid.*, Bagian V.

melegalisasi lebih lanjut benturan di antara unsur PNI melawan empat unsur lainnya; bahkan nantinya antarelite PNI sendiri. Apalagi, Munas PNI kali ini telah mengukuhkan “Kata mufakat” DPP PNI (in likuidasi) yang merupakan hasil rapat DPP PNI (in likuidasi) pada 2 Februari 1974.

Dokumen “Kata Mufakat” DPP PNI yang ditandatangani Mh. Isnaeni dan Sunawar Sukowati ini menjadi problematik karena secara pokok memuat kesepakatan intern PNI atas pencalonan Sunawar sebagai Ketua Umum/Formatur tunggal DPP PDI, yang dalam penyusunan personalia DPP PDI serta komposisinya harus dibicarakan serta dimufakati pula oleh Isnaeni; dan sekaligus menyepakati pencalonan Isnaeni sebagai Ketua Umum MPP PDI.<sup>37</sup> Pencalonan keduanya bahkan ditempatkan sebagai “paket” yang harus berhasil kedua-duanya.<sup>38</sup> Di samping itu, dokumen yang sama mewajibkan seluruh jajaran PNI/massa Marhaen menyukseskan berperannya PNI dalam PDI, menjaga persatuan dan kesatuan, dan tidak boleh terjadinya *revance* dalam tubuh PNI.<sup>39</sup> Berdasarkan kedua “Kata Mufakat” (Kata Mufakat Munas PNI dan DPP PNI) di atas, pada tanggal 9 Februari 1974 DPP PNI (in likuidasi) menyampaikan surat bernomor 06/DPP/ Sek/II/1974 perihal “Penyampaian Hasil Pokok Pendirian PNI Dalam Menghadapi Kongres PDI I” yang, antara lain, menegaskan kembali hasil Munas PNI, 2 dan 3 Februari 1974. Surat yang ditandatangani Hardjantho dan Aberson, masing-masing sebagai Ketua III DPP PNI (in likuidasi) dan Sekjen III ini, juga ditujukan kepada anggota DEPERPU PDI, DEPERPA PNI (in likuidasi), anggota MPP PDI, serta DPD PNI (in likuidasi) di seluruh Indonesia.

---

37 Kata Mufakat DPP PNI hasil rapat tanggal 2 Februari 1974, angka 1 dan 3, sub (b).

38 *Ibid.*, angka 2.

39 *Ibid.*, angka 3, sub (a) dan (c).

Reaksi pertama yang muncul dari unsur-unsur lainnya adalah dibatalkannya jadwal rapat 11 Februari 1974 yang sedianya mengagendakan pembicaraan tentang tata tertib kongres. Rapat ditangguhkan sampai 20 Februari 1974. Rangkaian reaksi selanjutnya bahkan lebih jauh lagi. Empat kekuatan lainnya tiba-tiba menghadirkan wajah negara secara lebih riil di tengah-tengah keresahan mereka. Ini dimanifestasikan dalam wujud pertemuan 13 Februari 1974 antara anggota-anggota DPP PDI di luar PNI dengan Kabakin Mayjen. Yoga Sugama yang membicarakan apa yang oleh tokoh-tokoh parpol non-PNI dibahasakan sebagai “keresahan” dalam tubuh PDI sebagai akibat dari usaha-usaha disintegratif dari sementara unsur PNI. Pertemuan serupa juga dilakukan dengan pihak Kaskopkamtib Laksamana Sudomo, 16 Februari 1974. Pertemuan dengan dua organ negara yang menggenggam kekuasaan besar ini memberikan keyakinan pada delapan anggota DPP PDI di luar unsur PNI untuk memberikan tanggapan terhadap surat DPP PNI (in likuidasi). Surat tanggapan ini secara tegas dan pasti menolak sepenuhnya isi surat DPP PNI (in-likuidasi) karena dinilai sebagai “kemunduran dalam fusi, bertentangan dengan Deklarasi dan dokumen PDI lainnya, serta menimbulkan kegoncangan dalam PDI sampai ke daerah-daerah”.<sup>40</sup> Surat tanggapan ini akhirnya dibacakan dalam rapat PDI pada 20 Februari 1974 yang telah dijadwalkan akan membicarakan tata-tertib kongres yang telah ditunda pembicaraannya. Akibatnya, sekali lagi rapat DPP PDI untuk membicarakan tata-tertib kongres ditangguhkan sampai 25 Februari, yang akhirnya terselenggara dan dihadiri semua fungsionaris, kecuali Sukarmadidjaja yang sedang sakit.

Dalam rapat ini—dan ini merupakan langkah surut persiapan Kongres I—diputuskan untuk menangguhkan

---

40 Lihat, surat yang ditandatangani 8 fungsionaris DPP PDI tanggal 18 Februari 1974.

pelaksanaan Kongres PDI sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Alasan-alasan yang menyangkut persiapan-persiapan di bidang teknis, perlunya penciptaan prakondisi agar kongres tidak merupakan *setback* dalam proses fusi, adanya masalah psiko-politis, dan mengingat pelaksanaan Repelitea perlu diperhatikan—suatu alasan yang tampaknya dicari-cari—serta perlu ada pemantapan dan pembinaan stabilitas dalam semua bidang,<sup>41</sup> hadir sebagai poin utama yang membenarkan penangguhan kongres. Sebagai tindak lanjut, diadakanlah pertemuan dengan Mendagri pada 27 Februari 1974 yang tidak disertai pihak PNI untuk membicarakan masalah penundaan kongres yang diikuti pertemuan serupa dengan presiden, 6 Maret 1974, yang membenarkan tindakan penundaan kongres. Namun, Presiden Soeharto tetap berharap penundaan kongres tidak mengakibatkan berhentinya perkembangan fusi PDI. Untuk itu, ia berpesan agar PDI mengadakan persiapan-persiapan yang sebaik-baiknya sehingga kongres bisa terjamin kesuksesannya dan waktu penundaan kongres dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi organisasi.<sup>42</sup> Tidak satu pun elite parpol yang menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan presiden. Akan tetapi, seperti dibuktikan sejarah PDI berikutnya, tak satu pun juga elite PDI yang secara sungguh-sungguh mewujudkan amanat Presiden dalam kerja politik riil.

#### **D. Konflik Lintas Elite: Kisah Perkelahian Para “Bapak”**

Di samping konflik lintas unsur, kemelut internal PDI juga bertabur konflik antartokohnya yang mulai metampakkan tanda-tanda kehadirannya ketika konflik terbuka antara Isnaeni (Ketua Umum DPP PDI) versus Sunawar (Ketua PDI) mulai mengambil tempat. Kedua tokoh ini pada Kongres PNI XII

---

41 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.50.

42 *Ibid.*, hal.50-51.

Semarang bernaung di kubu yang satu,<sup>43</sup> demikian pula ketika “Kata Mufakat” DPP PNI dan Munas PNI, 2 dan 3 Februari 1974, dirumuskan. Namun, ini tidak dengan sendirinya menjamin keakuran abadi di antara mereka. Demikian pula, perjalanan PDI berikutnya memastikan kedua tokoh ini sempat bahu-membahu dalam menentang DPP di bawah pimpinan Sanusi-Usep, tapi, sekali lagi, keakuran abadi bukan merupakan hukum dalam dunia politik keduanya.

Karena kedua tokoh yang berseteru ini berasal dari satu kubu, PNI, maka konflik di antara mereka dengan cepat mengabsahkan anggapan, bahwa “yang bertengkar senantiasa PNI melawan PNI”.<sup>44</sup> Klaim yang selalu berulang dimunculkan empat parpol lainnya yang ingin menggarisbawahi bahwa sumber kemelut intern PDI adalah PNI, sedang di pihak lain, “unsur lain diajak, yang bila tidak mengikutinya akan dimusuhi”.<sup>45</sup> Penilaian ini senantiasa ditepis PNI. Bagi tokoh-tokoh PNI, sama sekali tidak beralasan mengkambinghitamkan PNI sebagai sumber kemelut internal PDI,<sup>46</sup> justru karena unsur-unsur lain pun memiliki andil besar. Bahkan bagi sebagian tokoh PNI, konflik PDI dipandang sebatas akibat dari adanya siasat *divide et impera* yang dijalankan unsur lain, bahkan kekuatan lain di luar PDI, yang mengkhawatirkan kemungkinan dominasi PNI dalam PDI

---

43 Pada awalnya Isnaeni berada dalam kubu “Keruk-Nasinya Hardi”, tapi pada saat-saat Kongres Semarang, ia “meloncat” ke kubu Osa-Usep, bersama Sunawar Sukowati.

44 Wawancara dengan F.S. Wignjosumarsono, *Op.cit.*, yang dibenarkan pula oleh tokoh lainnya. Penilaian serupa cukup merata di kalangan luar PNI.

45 *Ibid.*, yang dibenarkan pula oleh tokoh lainnya.

46 Wawancara dengan Hardjantho, *Op.cit.*, yang juga didukung tokoh-tokoh PNI lainnya.



karena ia merupakan potensi terbesar.<sup>47</sup> Di samping itu, konflik antara Isnaeni dan Sunawar dipahami sebagai hal yang memang dikehendaki “sponsor-sponsor” yang berasal dari lingkaran penguasa guna menciptakan situasi perpecahan internal yang pada gilirannya akan dipergunakan sebagai sarana legitimasi keterlibatan penguasa sebagai “penengah”.<sup>48</sup> Model ini, secara keseluruhan difungsikan sebagai strategi memenangkan kelompok kuat, yakni Golkar.<sup>49</sup> Reaksi serentak pihak PNI ini, justru semakin meyakinkan kekuatan non-PNI untuk percaya pada anggapan bahwa “apabila telah membicarakan soal PNI, mereka pasti bersatu, walaupun dari luar tampak bertengkar”.<sup>50</sup>

Bagi tokoh-tokoh lain dalam PNI, konflik Isnaeni dan Sunawar merupakan produk “rivalitas individu”<sup>51</sup> ketika keduanya merasa paling berhak atas posisi Ketua Umum PDI.<sup>52</sup> Oleh karena itu, konflik lebih bermakna sebagai pertarungan memperebutkan hegemoni kekuasaan. Penjelasan ini pun tak sepenuhnya dibenarkan tokoh-tokoh lain yang melihat sumber konflik dua petinggi PNI ini ada perbedaan dalam melihat “atas dasar apa PDI mesti dibawa”.<sup>53</sup> Isnaeni diyakini telah terlampaui banyak memberikan konsesi pada unsur lain dan

---

47 Hampir semua tokoh PNI membenarkan hal ini, juga beberapa tokoh di luar kubu PNI. Menurut mereka, kombinasi kepemimpinan Isnaeni yang merakyat dengan Sunawar yang konseptual-strategis dapat membawa PDI ke arah kemajuan. Akan tetapi, tampaknya hal ini tidak dikehendaki elite-elite di pusat kekuasaan rezim.

48 Wawancara dengan Sanusi Hardjadinata, *Op.cit.*

49 *Ibid.*

50 Sebuah sumber di Sekretariat PDI yang telah sejak awal mengikuti perkembangan PDI mengungkapkan ini.

51 Semua tokoh yang diwawancarai mendukung sinyalemen ini.

52 Wawancara dengan Abdul Madjid, *Op.cit.*

53 Wawancara dengan Gde Djakse, *Op.cit.*

sebaliknya merugikan PNI,<sup>54</sup> karenanya ia harus dieliminasi. Dan ini diwujudkan lewat sebuah forum hasil kreasi Sunawar, yakni Musyawarah Antar Daerah PNI (in likuidasi) seluruh Indonesia. Forum ini mengeluarkan keputusan: *pertama*, menetapkan Sunawar sebagai “satu-satunya” juru bicara PNI yang berwenang membicarakan setiap masalah, termasuk masalah PDI;<sup>55</sup> *kedua*, membebastugaskan Isnaeni dan Madjid selaku Ketua I PNI dan Sekjen I PNI;<sup>56</sup> *ketiga*, menarik keduanya selaku petugas PNI dalam PDI dan sekaligus digantikan Sunawar.<sup>57</sup> Isnaeni sendiri—juga Madjid—bukan saja menolak poin-poin keputusan di atas, tapi sekaligus tidak mengakui adanya forum Musyawarah Antardaerah dimaksud, yang dalam bahasanya sendiri disebutkan “tidak tahu menahu dan tidak membenarkan adanya Munas-Munas” karena diyakini hanya menimbulkan keresahan-keresahan.<sup>58</sup> Dengannya, Isnaeni menegaskan, bila aktivitas serupa ditolerir terus menerus, justru akan menghambat konsolidasi PDI.<sup>59</sup> Konflik Isnaeni dan Sunawar berakibat lanjut. Isnaeni, sebagai salah satu penanda tangan “Kata Mufakaf”, 2 dan 3 Februari 1974, akhirnya menarik kembali dukungannya karena ia yakin “sudah tidak relevan lagi untuk berpijak pada pangkal tolak konsensus 2-3 Februari”.<sup>60</sup> Hal yang oleh kelompok Sunawar dinilai “mengkhianati keputusan-

---

54 Lihat, dasar pemikiran Keputusan pembebasan tugas Isnaeni dan Madjid dalam SK. No. 02/ORG/1974. SK ini adalah hasil Musyawarah Antardaerah PNI se-Indonesia.

55 Keputusan Musyawarah antar Daerah PNI Se-Indonesia No. 01/ORG/1974, bagian II.

56 *Ibid.*, Keputusan No. 01/ORG/1974 dan 02/ORG/1974.

57 *Ibid.*

58 Lihat, surat yang ditandatangani oleh 8 fungsionaris DPP PNI (in likuidasi), masing-masing oleh Isnaeni, I.A. Muis, Abdul Madjid, Karundeng, Budi Dipoyuwono, M.A. Gowi, Adipranoto, dan H.N.P.S. Siregar yang dialamatkan kepada KasKopKamtib, 21 Oktober 1974.

59 Surat Isnaeni tanggal 15 November 1974 kepada KasKopKamtib.

60 Surat Isnaeni kepada KasKopKamtib tanggal 12 November 1974.

keputusan Munas PNI”,<sup>61</sup> yang semakin memperuncing konflik di antara kedua kubu ini.

Sejajar dengan penarikan kembali dukungannya atas konsensus 2-3 Februari, Isnaeni menyepakati komposisi DPP PDI dengan rumusan 3 : 2 : 2 : 2 : 2, yang berarti meniadakan “Kata Mufakat Munas”, 2 - 3 Februari Pasal III ayat (3) — yang ditegaskan kembali dalam Musyawarah Antar Daerah PNI (in likuidasi) seluruh Indonesia—yang mengajukan formula “proporsional-representatif-toleran”. Formula yang disepakati Isnaeni ini dinilai telah merugikan PNI, bahkan telah “menjual PNI ke partai-partai lain”.<sup>62</sup> Kubu Sunawar menghendaki lima personel bagi PNI dalam DPP PDI, bukan tiga personel seperti yang disetujui Isnaeni.<sup>63</sup> Dengan perkembangan ini, konflik yang awalnya sangat mungkin bermula dari ambisi keduanya memperebutkan posisi Ketua Umum PDI akhirnya berkembang menjadi konflik yang menyangkut mekanisme apa yang akan dipergunakan dalam PDL Sunawar lebih cenderung kepada mekanisme PNI atau atas dasar peran PNI, sebaliknya, Isnaeni cenderung pada mekanisme PDI atau atas dasar peran PDI.

Konflik akhirnya berujung pada polarisasi di tingkat massa, karena disertakan oleh keduanya untuk menyokong kubu masing-masing. Konflik juga telah menjadi paspor politik penting bagi sejumlah elite penguasa yang memungkinkan mereka memasuki arena PDI, baik karena alasan stabilitas atau karena masing-masing tokoh yang bertikai secara sadar dan sengaja meminjam tangan elite-elite penguasa ini bagi

---

61 Keputusan Musyawarah Antardaerah No. 02/ORG/1974, *Op.it.*, angka 1.

62 Wawancara dengan John Pakan, *Op.cit.*

63 *Ibid.*, juga wawancara dengan Samosir, *Op.cit.*

kepentingan masing-masing.<sup>64</sup> Akibatnya, di satu sisi, kita menyaksikan konflik dengan kecepatan luar biasa merambah ke tingkat basis yang memporakporandakan rencana pemantapan fusi. Sementara di sisi lain, peminjaman tangan sejumlah elite di lingkaran kekuasaan telah menjerat masing-masing kubu yang bertikai ke arah ketergantungan terhadap elite ekstra-PDI ini.

Kemungkinan konflik seperti di atas tampaknya telah dapat diperkirakan sebelumnya oleh petinggi-petinggi lima parpol. Salah satu sumber mengungkapkan bahwa pernah ada pemikiran dan upaya mempertimbangkan dan meminta kesediaan—sekalipun tidak pernah merupakan keputusan formal—tokoh yang dinilai dapat mengintegrasikan semua potensi yang dimiliki PDI. Adam Malik, tokoh utama MURBA di masa lalu, adalah salah satu yang masuk dalam kategori di atas.<sup>65</sup> Namun, walaupun lobi ke arah tersebut sudah dilakukan,<sup>66</sup> keinginan ini tidak pernah dapat direalisasikan, terutama, karena Adam Malik yang telah menjadi salah satu tokoh teras Golkar, tidak bersedia memenuhi harapan PDI. Dengan ini, upaya yang diusulkan Sunawar mengalami kegagalan dan berakhir sebatas sebagai keinginan.

Konflik Isnaeni dan Sunawar ini akhirnya, seperti juga konflik lintas unsur sebelumnya, kembali menghadirkan sosok

---

64 Semua tokoh PDI yang diwawancarai menegaskan adanya hal ini, bahkan ditunjukkan pula siapa-siapa tokoh yang “mem-back-up” kedua tokoh ini. Juga sebuah dokumentasi berupa stensilan yang mensinyalir bahwa dua elite dari pusat kekuasaanlah tokoh yang berdiri di belakang Sunawar, yang dibantah kebenarannya oleh Presiden dalam suatu pertemuan dengan DPP PDI.

65 Wawancara dengan Murbantoko, *op.cit.* mengungkapkan, Sunawar pernah mengusulkan padanya untuk meminta kesediaan Adam Malik sebagai Ketua Umum PDI yang konon juga didukung tokoh lainnya.

66 *Ibid.* Setelah dihubungi Murbantoko, Adam Malik merasa keberatan, kecuali bila Presiden menugaskannya untuk itu. Dan oleh Murbantoko disebutkan, seharusnya penugasan diberikan karena akan memberikan pengaruh yang lain bagi perkembangan PDI.

negara yang tidak menghendaki berakhirnya karya mereka, yakni penyederhanaan politik, yang mulai metampakkan hasilnya untuk bertindak sebagai penengah. Ini diwakili oleh kehadiran Sudomo selaku Kaskopkamtib. Keterlibatan Sudomo membuahkan “jabat tangan perdamaian,” apalagi Sudomo cukup arif dalam membagi kekuasaan di antara keduanya: Posisi Ketua Umum dikuasai Sunawar sementara Isnaeni bertakhta atas posisi Ketua MPP PDI.<sup>67</sup> Hanya saja kesepakatan ini terlampaui rapuh. Beberapa saat setelahnya, keduanya kembali melupakan pipa perdamaian yang telah diisap bersama di hadapan Sudomo. Kapak peperangan kembali digali, dan suara pekikan perang kembali membahana. Keadaan ini membikin Sudomo kelabakan. Karenanya, ia sempat mengusulkan kepada Presiden agar salah satu dari mereka “*di-Dubes-kan*,”<sup>68</sup> usulan yang rupanya tidak dikehendaki Soeharto. Konflik keduanya semakin rumit setelah berkembang isu Sunawar—lewat Sudjono Humardani—dibekingi presiden untuk menjadi Ketua Umum DPP PDI, yang ternyata, setelah dikonfirmasi ke Soeharto, adalah isu tidak benar.<sup>69</sup>

Konflik akhirnya mencapai fase kritis yang tidak menyisakan ruang kemungkinan untuk mempertemukan kedua tokoh ini di meja perundingan. Bahkan, karena konflik dua tokoh PNI di atas, Presiden Soeharto menilai PNI telah menjadi “penghalang” di dalam PDI.<sup>70</sup> Karenanya, alternatif yang tersisa bagi Pemerintah adalah menemukan orang ketiga yang akan menggantikan kedua tokoh ini—tentunya seorang figur integratif yang cukup punya wibawa dalam PNI. Dalam situasi

---

67 Dalam berbagai kesempatan pertemuan dengan tokoh-tokoh PDI antara tahun 1979 dan 1980, hal ini diungkapkan kembali oleh Sudomo; lihat, misalnya “*Risalah Pertemuan Pangkoptamtib dengan DPP PDI*”, 5 Januari 1980.

68 *Ibid.*

69 Lihat, misalnya “*Kemelut Fusi PDI*”, tanpa sumber dan tanggal penerbitan.

70 Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*

seperti ini, Sanusi Hardjadinata, seorang tokoh PNI Jawa Barat yang punya pengalaman luas dalam bidang Pemerintahan, tapi belia dalam hal kepartaian, muncul sebagai pilihan menarik. Penampilannya yang cukup menyejukkan di hadapan negara membuat ia menempati skala prioritas dalam preferensi negara untuk dihadirkan sebagai figur ketiga.

Sanusi sebenarnya pernah menyatakan keluar dari keanggotaan PDI sebagai ekspresi dari ketidaksetujuannya atas iklim dan kultur politik yang berkembang<sup>71</sup>—suatu hal yang tak pernah dibicarakan dalam pertemuan dengan Presiden Soeharto, dan yang akhirnya sering diungkit-ungkit dalam konflik Sanusi-Usep versus Isnaeni-Sunawar<sup>72</sup> —; dan oleh karenanya secara logis tidak memiliki hak dalam PDI. Apalagi, pada awalnya Sanusi menolak pengelompokan partai ke dalam kategori *Material-spiritual* dan *Spiritual-Material*. Hanya saja, karena secara moral ia merasa bertanggung jawab dan karena Isnaeni-Sunawar dinilainya telah “rela melangkahi bangkai kawan sendiri”, Sanusi akhirnya menyatakan kesediaannya setelah dihubungi Presiden Soeharto.<sup>73</sup> Namun, kesediaan ini tidak steril dari syarat, yakni ia diizinkan untuk menyertakan Usep Ranawidjaja seseorang yang sangat berpengalaman dalam mengelola dan mengendalikan parpol.<sup>74</sup> Di samping itu, syarat lain yang diajukan adalah keharusan bagi adanya konsultasi baik dengan DPP PDI maupun dengan tokoh PNI yang berada

---

71 Lihat, surat Sanusi kepada Isnaeni, 13 Januari 1973.

72 Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*

73 *Ibid.* Sanusi menceritakan bahwa ia pertama kali dihubungi oleh Sudharmono melalui telepon yang meminta kesediaannya untuk memenuhi undangan Presiden.

74 Wawancara saya dengan berbagai sumber membenarkan adanya syarat semacam ini. Hal ini berkenaan dengan relatif terbatasnya pengalaman Sanusi dalam mengelola dan mengendalikan parpol, suatu hal yang banyak dimiliki Usep. Namun, terdapat juga kemungkinan lain, yakni karena memang keduanya berasal dari satu kubu (Osa-Usep) di era Kongres PNI Semarang, di samping berasal dari daerah yang sama, yakni Jawa Barat.

di luar halaman PDI.<sup>75</sup> Syarat-syarat di atas akhirnya dipenuhi dan dalam konsultasi dengan tokoh-tokoh yang ada Sanusi memperoleh dukungan luas. Dengan dukungan yang sangat kuat—baik dari presiden, tokoh-tokoh PDI, maupun tokoh-tokoh PNI lama—Sanusi akhirnya masuk dalam formasi DPP PDI sebagai Ketua Umum, sedangkan Usep sebagai Ketua, menggantikan Isnaeni dan Sunawar dari unsur PNI.

Proses pengalihan kepemimpinan dari tangan Isnaeni-Sunawar ke tangan Sanusi-Usep ini dapat berjalan dengan mulus, tampaknya, karena tidak terlepas dari kompensasi politik yang dinikmati Isnaeni-Sunawar. Isnaeni dianugerahi posisi sebagai Wakil Ketua DPR/MPR, sementara posisi Menteri Negara Kesra menjadi porsi Sunawar.<sup>76</sup> Sementara ke internal PDI, keduanya dianugerahi kedudukan sebagai anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI.<sup>77</sup> Dengan dicapainya konsensus itu, penyusunan skenario pengalihan kekuasaan kemudian dimulai. Keduanya secara resmi mengajukan “permohonan alih tugas” kepada DPP PNI (in likuidasi) dan DPP PDI. Dalam rapat DPP PDI, 17 Februari 1975, prosedur formal pengalihan kekuasaan berhasil dirumuskan. Lahirlah Keputusan nomor 132/IN/D/DPP/11/1975 yang secara pokok memuat tiga hal.

- *Membebaskan sdr. Mh. Isnaeni dan Prof. Dr. Sunawar Sukowati, SH., masing-masing sebagai Ketua Umum dan Ketua DPP PDI,*
- *Menetapkan sdr. H. Sanusi Hardjadinata dan sdr. Prof. Usep Ranawidjaja, SH., masing-masing sebagai Ketua Umum dan*

---

75 Wawancara dengan Hardi, *Op.cit.* Hardi menegaskan, sebelum menerima kewajiban untuk menata PDI, Sanusi pernah menghubunginya guna meminta pendapatnya yang memberikan dukungan. Bahkan, pada kesempatan tersebut, Sanusi sekaligus meminta kesediaan Hardi untuk terlibat dalam membina kader PDI nantinya. Sekalipun ia menyatakan kesanggupannya, hal ini tidak pernah terjadi karena tidak didukung oleh banyak kalangan.

76 Berbagai tokoh PDI yang diwawancarai mengungkapkan kembali hal ini.

77 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.58.

*Ketua DPP PDI,*

- *Mengangkat sdr. Mh. Isnaeni dan sdr. Prof. Dr. Sunawar Sukowati, SH., sebagai anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI.*

Dua poin hadir sebagai pertimbangan resmi bagi keluarnya keputusan di atas, yaitu:<sup>78</sup>

- *Perlu lebih adanya peningkatan konsolidasi organisasi/Partai pada waktu ini, khususnya dalam rangka persiapan Kongres dan Pemilihan Umum, serta peningkatan partisipasi Partai dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional,*
- *Perlu adanya pendayagunaan yang sebaik-baiknya dari setiap tenaga yang ada dalam tubuh PDI.*

Keputusan rapat DPP ini, akhirnya dikukuhkan hari berikutnya oleh MPP, lewat rapatnya tanggal 18 Februari 1975 yang menghasilkan keputusan dengan nomor: I/ORG/DPP/1975. Pengukuhan keputusan DPP oleh MPP ini menutup halaman pertama perjalanan panjang PDI meniti buih, tapi sekaligus membuka awal baru menuju pengembaraan panjang mengarungi badai tanpa tepian.

Sementara itu, seperti terungkap dalam sebuah dokumen lain,<sup>79</sup> perang antarunsur juga hadir sebagai bagian dari dinamika politik PDI di daerah-daerah. Di samping kasus menonjol, yakni DPD DKI Jaya seperti yang telah diuraikan di atas, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga menghadirkan kisah yang hampir mirip dengan kisah PDI di tingkat pusat. Persoalan terwakili atau

---

78 *Ibid.*, h. 57. Ini merupakan versi resmi yang dikeluarkan DPP PDI dalam memberikan laporan pada DPD dan PDC di sekitar kasus ini.

79 Dokumen tak bertanggal ini, sebenarnya merupakan Inventarisasi Masalah yang perlu ditanggulangi dalam rangka pembinaan prakondisi Kongres I PDI yang merupakan hasil kerja Murbantoko, Sunawar, Wignjosumarsono, Abdul Madjid, serta John Pakan.



tidaknya unsur-unsur, hubungannya dengan penguasa lokal, dan rivalitas antartokoh<sup>80</sup> muncul sebagai masalah-masalah utama yang dihadapi daerah-daerah. Pada tingkat DPC, kantung permasalahan terpusat, terutama, di Cabang-Cabang Jawa Tengah dengan karakter masalah yang tidak jauh berbeda.<sup>81</sup>

Situasi kemelut yang membelit PDI pada semua jenjang ini, sebenarnya, sama-sama disadari oleh semua unsur. Namun, masing-masingnya gagal bermain menurut logika konsepsi “semua kartu dibuka di atas meja”,<sup>82</sup> padahal semuanya sama-sama bersepakat, itulah alternatif terbaik bagi PDI.

### **E. Misi “Damai-Serasi”: Ketika Idealisme Menjadi Dendam**

Dengan tersingkirnya Isnaeni dan Sunawar, rintangan ke arah pemantapan fusi untuk sementara tersingkir pula, terutama karena peluang ke arah persiapan kongres—Kongres Pemantapan Fusi—yang terbenam di tengah-tengah konflik keduanya, kini mulai terkuak kembali.

Merekatkan kembali solidaritas yang tercabik tampaknya menjadi agenda pertama yang dibebankan pada DPP Sanusi. “Misi Damai dan Serasi”, sebuah misi yang sangat berat, untuk tidak disebutkan sebagai “mission imposible”, adalah rumusan resmi yang diberikan terhadap misi yang diidealkan akan merajut kembali solidaritas yang tercabik ini. Namun, seperti yang akan dilihat lebih lanjut, misi ini bertukar raut secara

---

80 *Ibid.*, diperkuat oleh beberapa tokoh daerah PDI, seperti oleh Jupri (IP-KI) dari Jateng dalam wawancara dengan penulis, 5 September 1986. Ia menjelaskan bahwa di Jawa Tengah, fusi tidak merata ada unsur-unsur yang tertinggal karena tak disertakan, atau karena memang tak ingin disertakan. Penilaian semacam ini, didukung pula oleh tokoh-tokoh lainnya yang diwawancarai.

81 Inventarisasi masalah ..., Op.cit.

82 *Ibid.*, yang sebenarnya ingin menekankan pada keterbukaan semua unsur, tanpa *reserve* dalam menatap fusi.

drastis menjadi salah satu pusat persoalan dalam PDI di masa-masa berikutnya.

Sebagai “orang baru” yang harus menata banyak masalah lama yang pelik, Sanusi mesti menyusun agenda kerja yang teratur. Langkah pertama yang diayunkan DPP baru di bawah Sanusi-Usepadalah menemui Presiden Soeharto pada 19 Februari 1975, sehari setelah dikukuhkannya DPP ini oleh MPP. Presiden, seperti biasanya, di samping menerima baik DPP baru ini, juga mengharapkan agar DPP dapat bekerja mempersiapkan Kongres I dan memasuki Pemilu 1977. Bukan sekadar ucapan selamat dan harapan yang diterima DPP Sanusi. Presiden sekaligus menjanjikan akan menulis surat pemberitahuan kepada pejabat-pejabat Pemerintah Pusat dan Daerah yang intinya menegaskan dukungannya terhadap keputusan DPP/MPP PDI mengenai perubahan pimpinan tersebut.<sup>83</sup> Janji Soeharto ini dipenuhinya pada tanggal 20 Februari 1975.<sup>84</sup> Surat dukungan ini sekaligus mewajibkan pihak-pihak yang dituju untuk memberikan bantuan bagi PDI dalam rangka konsolidasi,<sup>85</sup> sedangkan bagi DPP PDI sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaksanaan pembangunan.<sup>86</sup> Harapan yang disampaikan Presiden, baik lisan, seperti dalam pertemuan 19 Februari 1975, maupun tertulis, seperti terungkap dalam surat bertitimpangsa 20 Februari 1975, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbedaan mendasar dengan dasar pertimbangan keputusan DPP PDI 17 Februari 1975. Hal ini tentunya bukan merupakan

---

83 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*

84 Lihat, *Surat Presiden* tertanggal 20 Februari nomor B-11 /Pres/2/1975. Surat berklasifikasi ‘penting’ mengenai pergantian Pimpinan DPP PDI ini ditujukan kepada pembantu-pembantu Presiden, masing-masing Mendagri, Menhankam, KasKopKamtib, Kepala Bakin, para Pangkowlhan, para Gubernur/KDH dan para Pangdam (Ketua Muspida).

85 *Ibid.* Tentunya surat ini harus dibaca sebagai instruksi kepada pihak-pihak yang dituju.

86 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*

suatu kebetulan, melainkan hasil konsensus antara penguasa dan PDI, apalagi bila dukungan langsung Presiden yang demikian kuatnya pada DPP PDI baru di bawah kendali Sanusi-Useup ikut diperhitungkan.

Langkah kedua yang ditempuh DPP Sanusi adalah melakukan serangkaian kunjungan ke daerah-daerah dengan dua sasaran pokok: Pertama, memperkenalkan diri pada daerah-daerah, dan kedua, menjalankan “misi damai dan serasi” guna merekatkan kembali solidaritas di daerah-daerah yang selama ini merenggang sebagai imbas langsung dari konflik di tingkat Pusat. Dalam bahasa PDI sendiri, kunjungan ke daerah-daerah merupakan upaya “pemantapan fusi, terutama mental fusi”<sup>87</sup> yang memang masih sangat rapuh.

Di tingkat DPP PDI, langkah-langkah ke arah pemantapan fusi juga mulai diayunkan. Hal ini ditandai dengan berhasil disepakatinya keputusan di antara mereka untuk:<sup>88</sup>

1. *Kongres Pertama adalah Kongres Fusi dilaksanakan dengan berpegang teguh pada AD. Juga ketentuan-ketentuan lain pada ART. Pelaksanaan secara luwes diarahkan pada pengukuhan dan pengesahan sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) AD. Kongres Pertama merupakan forum untuk pengakhiran eksistensi kelima Partai yang berfusi,*
2. *Kongres Pertama memberikan pula kesempatan untuk:*
3. *Menyusun langkah-langkah pelaksanaan Program Perjuangan,*
4. *Mengatur persiapan menghadapi Pemilu yang akan datang.*

Hanya saja kata sepakat untuk menyelenggarakan Kongres I belum dapat dicapai, terutama, karena DPP— bersama

---

87 *Ibid.*, hal.62.

88 *Ibid.*, hal.62-63.

Fraaksi PDI di DPR—dihadapkan pada persoalan lain yang membutuhkan perhatian ekstra, yakni pembicaraan tentang RUU Parpol dan Golkar, yang akhirnya diundangkan menjadi UU No. 3/1975. Persoalan lain yang dihadapi adalah pembentukan Komisaris-Komisaris di kecamatan-kecamatan dan Pembantu-Pembantu di desa-desa yang belum terselesaikan.<sup>89</sup> Baru pada 30 Desember 1975 rencana penyelenggaraan kongres tercantum kembali dalam agenda rapat DPP PDI. Rencana ini berkembang cepat dan semakin pasti setelah pembentukan *Steering Committee* (SC) dan *Organizing Committee* (OC) oleh DPP PDI yang sekaligus diperbantukan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban DPP.<sup>90</sup>

Dalam rangkaian pertemuan DPP selanjutnya dicapai kesepakatan bahwa pelaksanaan Kongres I diselenggarakan oleh DPP, dan Jakarta ditetapkan sebagai arena penyelenggaraan yang dijadwalkan berlangsung selama 11-13 April 1976. Berbagai rancangan yang diperlukan berkaitan dengan kongres, akhirnya bisa dipersiapkan untuk disahkan MPP, yang kemudian disahkan/dikukuhkan lagi oleh kongres.<sup>91</sup> Termasuk di dalamnya adalah *Tata Tertib Kongres*, yang Pasal 1-nya kembali mempertegas posisi kongres I sebagai *Kongres Pemantapan Fusi*, dan Pasal 3 mengatur pembatasan jumlah utusan Cabang sebanyak lima orang, yang tentunya harus mencerminkan lima unsur yang berfusi.<sup>92</sup>

Dengan terselesaikannya berbagai persiapan ini, maka penyelenggaraan Kongres Pertama PDI dapat dilangsungkan. Sebuah tonggak kemajuan dalam proses fusi, dengannya, berhasil ditegakkan, tapi sekaligus merupakan awal dari

---

89 *Ibid.*, hal.63.

90 *Ibid.*

91 *Ibid.*

92 *Ibid.*, hal.64.

perjalanan panjang yang penuh tantangan. Terutama karena eksistensi unsur-unsur, yang secara formal telah disepakati untuk berakhir dalam kongres ini, tetapi, dalam praktiknya, masih bertahan dengan kukuhnya.

Walaupun di bawah kepemimpinan Sanusi PDI tampak lancar dalam proses ke arah pemantapan fusi, tapi sebenarnya upaya mewujudkan “*misi damai dan serasi*” tetap diadang kendala yang cukup merepotkan. Fatalnya, persoalan yang muncul justru merupakan imbas langsung dari semangat mewujudkan “*misi damai dan serasi*” kubu Sanusi yang berlebihan yang menjebakannya ke dalam pilihan politik yang bukan saja tidak taktis, tapi sekaligus tidak realistis. “*Misi damai dan serasi*” yang merupakan manifestasi idealisme politik Sanusi untuk menciptakan harmoni internal, akhirnya membawa ia ke dalam semangat untuk menyingkirkan sesegeranya semua yang dipandang sebagai sumber kemelut. Akibatnya, misi ini merosot menjadi semacam “balas dendam politik” terhadap semua hal yang berlabel “Isnaeni-Sunawar”, yang membuka ruang bagi munculnya kritik yang terus meluas. Dalam perkembangannya, Sanusi menemukan misi, diri, dan kubu penopangnya secara keseluruhan terpuruk ke lembah intrik dan konflik baru.

“*Balas dendam politik*” kubu Sanusi di atas terekspresi lewat langkah pembenahan DPD-DPD dan DPC-DPC, yang merupakan sisa-sisa masalah di era Isnaeni-Sunawar, ketika ia memangkas hampir semua figur yang berbau Isnaeni-Sunawar. Akibatnya, kubu Sanusi mendapat penentangan luar biasa dari unsur-unsur teras PNI dan DPD/DPC yang dibenahi. Pembenahan DPD/DPC dimulai dengan penyingkiran tokoh-tokoh daerah untuk digantikan dengan apa yang disebut sebagai, “*bukan orang Isnaeni dan bukan orang Sunawar*”<sup>93</sup> yang menurut kubu

---

93 Dari sebuah dokumen yang dibuat IP-KI, 3 April 1976, “*Ikhtiar Perkembangan Fusi*”, terungkap adanya konsep “bukan orang Isnaeni-bukan orang Sunawar”.

IP-KI disertai oleh masuknya sejumlah figur *PNI Keruk Nasi (Kerukunan Nasional)* dari kubu Hardi, orang-orangnya Isnaeni-Madjid, serta beberapa orang yang dispekulasikan sebagai ASU ideal. Hal ini konon terjadi, antara lain di kawasan Jawa Barat, yakni Surya Pranata, di DKI, Suwondo, di Aceh, T. Thaib Ali, dan di Garut, Kusnaedi.<sup>94</sup>

Khusus PDI DKI Jaya, lewat rapat DPP PDI, 2 Mei 1975, Sanusi dipercayakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>95</sup> Berdasarkan pertimbangan, penyelesaian di DPD/DPC DKI Jaya semata-mata hanya menyangkut unsur PNI, yang penyelesaiannya oleh unsur merupakan kelaziman, serta telah disepakatinya komposisi personalia dari PNI di DPD/DPC di DKI Jaya oleh tokoh PNI dalam PDI, Sanusi mengeluarkan serangkaian keputusan penggantian personalia-personalia PNI dalam PDI di daerah ini.<sup>96</sup> *Surat-Surat Keputusan* tersebut<sup>97</sup> kemudian diikuti permohonan *clearence* bagi nama-nama personalia baru ke pihak Laksus KopKamtibda/Kodam V Jaya<sup>98</sup> yang melahirkan tantangan keras dari MURBA dan IP-KI di DPP

---

94 *Ibid.*

95 Hal ini terlihat dalam surat Sanusi tertanggal 26 Juli 1975 yang ditujukan kepada DPP PDI yang dimaksudkan sebagai "*laporan*" pada DPD mengenai langkah-langkah pembenahan atas DPD/DPC DKI Jaya yang dilakukannya.

96 *Ibid.*

97 SK-SK tersebut masing-masing: No. 246, 247, 248, 249, 250/IN/A/III/DPP/1975, 26 Juli 1975, perihal "Pengesahan susunan DPC-DPC PDI di Jakartd' dan SK DPP No. XXVII/ DPP/1975, perihal "pergantian personalia unsur PNI dalam DPD PDI DKI Jakarta".

98 Lihat, *Surat* DPP PDI tanggal 25 Juli 1975 No. 288/EX/C/DPP/VII/1975 perihal "*permintaan clearence*" yang ditandatangani usep Ranawidjaja dan Abdul Madjid. Surat ini dialamatkan kepada Laksus KopKamtibda/Kodam V Jaya.

PDI,<sup>99</sup> DPP PNI (in likuidasi),<sup>100</sup> serta sebagian fungsionaris DPD DKI Jaya.<sup>101</sup> Akibatnya, kubu Sanusi dipaksa menanggukkan rencana peresmian personalia baru di daerah ini, yang secara resmi dilakukan lewat surat yang ditandatangani Abdul Madjid.<sup>102</sup> Padahal sebelumnya telah direncanakan untuk dilakukan peresmian pada 14 Agustus 1975.

Munculnya persoalan baru sebagai akibat penanganan DPD/DPC DKI Jaya itu menandai lembaran baru perjalanan PDI menjelajahi ketidakpastian. Kali ini konflik memperhadapkan kubu Sanusi-Usep (PNI), PARKINDO, dan Partai Katolik dengan pihak MURBA dan IP-KI sebagai dua kutub yang saling mencakar. Pertarungan antarunsur ini semakin mengeras setelah barisan IP-KI dan MURBA mengajukan surat protes

---

99 Lihat, masing-masing Surat DPP PDI tanggal 28 Juli 1975 kepada Laksus KopKamtibda/Kodam V Jaya No. 291/EX/C/ DPP/VII/1975 yang ditandatangani oleh Akhmad Sukarmadidjaja dan John Pakan; Surat DPP PDI tanggal 30 Juli 1975 yang ditujukan kepada DPD PDI DKI Jakarta, No. 293/EX/C/ DPP/VII/1975 dengan penanda tangan yang sama. Keduanya, secara pokok, menolak surat DPP PDI yang ditanda tangani Usep-Madjid dan menolak SK-SK DPP PDI perihal pengesahan DPD/ DPC-DPC di DKI Jakarta. Penolakan dilakukan karena produk-produk tersebut bukan merupakan buah dari rapat DPP PDI.

100 Lihat, *Surat* DPP PNI (in likuidasi) tanggal 29 Juli 1975, No. 12/DPP/VII/1975 perihal “Penetapan Personalialia dari Unsur PNI di DPD PDI DKI Jakarta dan DPC-DPC PDI”. Surat yang ditandatangani oleh Sunawar Sukowati, Hardjantho, dan Aberson M.S. ini disampaikan kepada DPP PDI. Secara pokok surat menolak SK-SK yang dikeluarkan Sanusi karena dinilai bertentangan dengan angka 4 Deklarasi Fusi.

101 Lihat, *Surat* bernomor khusus 02/DPD/1975 tanggal 31 Juli 1975, perihal “Sikap DPD PDI DKI Jakarta” yang ditujukan kepada DPP PDI. Surat ini ditandatangani oleh John Sam Sabarudin dan Marwan Adam di samping tertera pula tanda-tangan tokoh-tokoh IP-KI, MURBA dan sejumlah tokoh PNI DPD PDI DKI Jaya, masing- masing L. J.B. Manoppo, J. Eddy Sonjaya, Marwan Adam, Sam Sabarudin R, J.L.L. Taulu, T.M. Arifin dan Suharno. Dalam surat tertanggal 12 Agustus 1975 ini elite-elite DPD Jakarta ini menegaskan bahwa mereka “tidak mengakui SK. No. XXVII/ DPP/1975” yang dikeluarkan Sanusi.

102 Lihat, surat “Penundaan Peresmian Pejabat-Pejabat baru DPD PDI DKI Jaya”, 13 Agustus 1975 yang ditandatangani Abdul Madjid.

terhadap Sanusi (PNI), Wenas (PARKINDO), Wignjosumarsono (Partai Katolik), Usep (PNI), Sabam Sirait (PARKINDO), dan M.B. Samosir (Partai Katolik),<sup>103</sup> yang dinilai telah melakukan “tindakan yang merobek-robek fusi”,<sup>104</sup> karena secara sepihak dalam rapat 30 Desember 1975, yang tidak dihadiri MURBA dan IP-KI, telah memutuskan hal yang merugikan kedua unsur ini.<sup>105</sup> Konflik akhirnya merambah ke dunia lain yang selama ini belum terjamah. Wawancara Sanusi dengan media massa yang dinilai sebagai “*penonjolan sifat sekuler dari PDI*”,<sup>106</sup> penggunaan dana Kongres PDI I,<sup>107</sup> serta isu di sekitar waktu, tempat, sifat, dan tema Kongres I<sup>108</sup> dan telegram ke daerah-daerah,

---

103 Lihat, *Surat* yang ditandatangani oleh Sukarmadidjaja, Muhidin Nasution, John Pakan, Adi Tagor, Pamudji, tanggal 14 Januari 1976, yang ditujukan kepada tokoh-tokoh PDI dari unsur PNI, PARKINDO dan Partai Katolik.

104 *Ibid.* Tindakan-tindakan tersebut menyangkut: keputusan sahnya rapat yang tidak perlu dihadiri semua unsur yang dinilai bertentangan dengan konsensus fusi; keharusan bagi setiap surat keluar untuk ditandatangani oleh Sanusi (Ketua Umum) dan Sabam Sirait (Sekjen) sebagai syarat keabsahannya. Hal yang terakhir ini dinilai tokoh-tokoh IP-KI dan MURBA sebagai perampokan atas kedaulatan oleh Sanusi-Sabam. Secara kumulatif, hal-hal di atas diyakini kubu IP-KI-MURBA sebagai wujud “pelanggaran yang sangat prinsipiel dan semena-mena”.

105 Lihat, “Ikhtiar Perkembangan Fusi”, *Op.cit.* Dalam “Ikhtiar” ini Sanusi, Madjid, Wignjo, dan Sabam, dihakimi sebagai pihak yang secara intensif menganggangi landasan organisasi yang sudah diletakkan. Sejumlah contoh diberikan guna menopang kesahihan penilaian di atas. Masing-masing, penghapusan kaveling IP-KI dan MURBA di posisi Bendahara dan Sekjen tanpa persetujuan rapat, tapi hanya dengan nota Ketua Umum; perombakan DPD DKI Jaya tanpa rapat DPP, serta perubahan DPD Aceh hanya dengan mengandalkan kesaktian nota Ketua Umum, tanpa rapat DPP.

106 *Ibid.* Wawancara Ketua Umum Sanusi Hardjadinata yang dinilai menonjolkan sifat sekuler PDI, disebutkan kubu Sukarmadidjaja sebagai bukan produk rapat DPP. Kubu ini juga menuntut penjelasan Sanusi atas isu di atas.

107 *Ibid.* tokoh-tokoh IP-KI mensinyalir adanya pengambilan dan penggunaan dana kongres sebanyak Rp. 75.000.000,- untuk tiket, akomodasi, konsumsi, yang menurut IP-KI belum pernah dibicarakan sebelumnya. Karenanya, IPKI menuntut pertanggung-jawaban kubu Sanusi.

108 *Ibid.* Hal ini, menurut kubu IP-KI berkaitan dengan telah dikirimkannya instruksi ke daerah-daerah mengenai tanggal dan tempat kongres, tanpa melalui prosedur pengesahan oleh MPP.



merebak sebagai tema-tema baru yang melegalkan perkelahian antarunsur.<sup>109</sup>

Di luar persoalan di atas, DPP Sanusi juga dihadapkan pada munculnya surat DPP PNI (in likuidasi), 10 November 1975, yang ditandatangani Hardjantho, Sunawar dan Aberson, guna menggantikan A. Madjid selaku Sekjen DPP PDI dari unsur PNI.<sup>110</sup> Surat ini pun menjadi bagian dari kepedulian IP-KI yang meminta untuk diselesaikan segera oleh kubu PNI dan menolak mengesahkan produk-produk rapat DPP PDI, kecuali yang menyangkut penyelesaian masalah internal PNI (in likuidasi) di atas.<sup>111</sup> Setiap peluang sekecil apapun tampaknya selalu merupakan kesempatan yang akan dieksploitasi secara maksimal untuk menyudutkan pihak lain, sehingga sulit untuk diletakkan secara proporsional apa sebenarnya sumber sengketa di antara unsur-unsur ini. Konflik akhirnya diperuntukkan bagi konflik itu sendiri, tanpa memiliki kejelasan arah dan sasarannya. Namun, konflik dan koalisi tanpa pola dan tanpa alasan yang jelas ini pula yang menjadi modalitas yang menjelaskan kekenyalan PDI dalam melewati arus besar intervensi Negara.

Perubahan fungsionaris PDI tidak semata-mata melibatkan unsur PNI. Hal serupa pun terjadi pada unsur lain, yang diawali

---

109 *Ibid.* Isu di sekitar ini termasuk antara lain, pengiriman telegram ke daerah-daerah yang isinya mengintimidasi utusan-utusan daerah. Dalam telegram yang ada ditegaskan akan adanya penolakan atas utusan unsur apabila melebihi jumlah yang ditolelir di DPP, yakni dua orang bagi setiap unsur di setiap Cabang.

110 Lihat, *Surat* DPP PNI (in likuidasi) tanggal 10 November 1975, No. 014/DPP-P2S/ XI/1975 yang antara lain, menarik Abdul Madjid dari posisi Sekjen PDI unsur PNI dan digantikan dengan H. Pamudji, Wakil Ketua Fraksi PDI di DPR. Alasan standar yang dikedepankan sebagai dasar pertimbangan adalah agar DPP PDI dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan juga mengingat keputusan Musyawarah Antar Daerah PNI (in likuidasi), 2 - 3 Februari 1974, yang telah pula menarik Madjid dan Isaeni.

111 Lihat, *Surat* yang ditandatangani Akhmad Sukarmadidjaja dan Adi Tagor, 30 Desember 1975, yang ditujukan kepada DPP PDI.

oleh surat "*permintaan alih tugas*" dari Sugiarto Murbantoko—salah satu Ketua PDI dari unsur MURBA. Berdasarkan SK No. 220/IN/D/DPP/V/1975 akhirnya Murbantoko dibebaskan dari kedudukannya, dan digantikan oleh Muhidin Nasution.<sup>112</sup> Sebelumnya, Ben Mang Reng Say, Ketua DPP PDI dari unsur Partai Katolik, dan F.S. Wignjosumarsono (Sekjen) mengajukan pula "*permintaan alih tugas*". Namun, berbeda dengan Murbantoko yang tidak pernah terungkap ke permukaan alasan di balik permintaan alih tugasnya, Ben Mang Reng Say diangkat menjadi Dubes di Portugal.<sup>113</sup> Posisinya sebagai Ketua DPP, akhirnya digantikan oleh Wignjosumarsono.<sup>114</sup> Sedangkan posisi Sekjen yang selama ini dijabatnya, dialihkan ke M.B. Samosir.<sup>115</sup> Dari kubu IP-KI, W.A. Chalik, Sekjen DPP PDI, mengajukan surat "*permintaan pengunduran diri*"<sup>116</sup> yang kemudian dikabulkan DPP PDI yang menggantikannya dengan A. Tagor Harahap.<sup>117</sup>

Di luar figur Ben Mang Reng Say, alasan-alasan bagi pengunduran diri elite-elite PDI dari berbagai unsur di atas sulit dipastikan, kecuali bahwa mayoritas dari mereka selalu berjalan di jalur "keras"; dan, karenanya, boleh jadi "pengunduran diri" mereka merupakan bagian dari upaya pembersihan intern PDI. Pergantian fungsionaris DPP PDI antar waktu ini, akhirnya

---

112 Laporan perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.59. Menurut pengakuan Murbantoko, surat "*permintaan alih tugas*" dibuatnya karena ia memang tidak dikehendaki Ali Murtopo yang terlanjur melihatnya sebagai "Isnaeni-Isnaeni kecil". Wawancara dengan Murbantoko, *Op.cit.* Dari sebuah dokumen tanpa hari dan tanggal penerbitan yang sulit dilacak sumbernya, ketersingkiran Murbantoko justru dikaitkan dengan ketidak-sepakatannya atas tindakan John Pakan membela Sunawar dalam konflik dengan Isnaeni.

113 Laporan Perkembangan PDI, *Ibid.*

114 Lihat SK DPP PDI No. 221 /IN/D/DPP/1975, 12 Mei 1975.

115 *Ibid.*

116 Surat "*permintaan pengunduran diri*" ini dibuat tanggal 25 Oktober 1975 dan disampaikan melalui IP-KI dengan surat DPP IPKI No. 25/OP/DPP/XI1/1975.

117 Lihat SK DPP PDI tanggal 14 November 1975, No. 373/IN/D/DPP/XI/1975.

dikukuhkan MPP pada 5 dan 7 April 1976.<sup>118</sup> Dengan beberapa pergantian ini, maka susunan kepengurusan DPP PDI hingga memasuki Kongres I adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum : H. Sanusi Hardjadinata
- Ketua-ketua : 1. A. Sukarmadidjaja  
2. A. Wenas  
3. F.S Wignjosumarsono  
4. M. Nasution  
5. Usep Ranawidjaja
- Sekjen Koord. : Saban Sirait
- Sekjen-Sekjen ; 1. A. Tagor Harahap  
2. M.B. Samosir  
3. J. Pakan  
4. A. Madjid

Di antara kerumitan internal di atas, PDI masih sempat memperingati hari ulang tahunnya yang pertama, 10 Januari 1974, bertepatan dengan acara peresmian pemakaian gedung PDI yang baru di Jalan Diponegoro 58, Jakarta.<sup>119</sup> Lebih penting lagi, persiapan ke arah kongres terus berjalan. Bahkan DPP PDI mencapai kesepakatan penting mengenai komposisi personalia

---

118 Laporan Perkembangan PDI, Op.cit., hal. 60. Hal ini sebelum direncanakan untuk dibicarakan dalam rapat DPP PDI yang telah dijadwalkan pada tanggal 30 bulan sebelumnya. Sekali pun belum dikukuhkan oleh MPP, pada praktiknya petinggi-petinggi baru ini sudah melakonkan perannya di DPP PDI.

119 *Ibid.*, hal.45., Perayaan Ulang Tahun dihadiri oleh DPP, MPP, DEPERPU, Fraksi PDI di DPR-MPR, dan staf sekretariat. Gedung ini merupakan sumbangan Presiden yang secara resmi diberikan pada 5 Desember 1973. Sebelumnya, DPP PDI bersekretariat (sementara) di bekas Kantor Pusat DPP PNI, Jalan Salemba Raya 73, Jakarta.

DPP PDI yang nantinya akan disahkan Kongres I. Formula yang digunakan dalam penentuannya adalah 9 : 6 : 6 : 4 : 4, yakni 9 untuk PNI, 6 untuk PARKINDO, 6 untuk Partai Katolik, 4 untuk IP-KI, dan 4 untuk MURBA.<sup>120</sup> Pengisian personalia didasarkan atas asas *toleran-proporsional*,<sup>121</sup> dengan tata cara pencantuman nama berdasarkan urutan-urutan sebagai berikut: PNI, PARKINDO, Partai Katolik, IP-KI, MURBA.<sup>122</sup> Hak untuk pengisian nama-nama masing-masing pejabat menjadi monopoli DPP unsur yang berfusi.<sup>123</sup> Demikian pula di antara kemelut yang menjerat PDI, roda organisasi secara keseluruhan tetap berjalan. Frekuensi rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPP<sup>124</sup> dan MPP PDI,<sup>125</sup> sejauh bisa disepakati sebagai tolok ukurnya, secara kuantitatif telah cukup memadai, meskipun, ironisnya, produk-produk pertemuan mereka justru lebih banyak berbuah implikasi sebaliknya dari yang diharapkan.

## F. Kongres I: Mimpi Buruk Sang “Anak Haram”

Setelah berbagai persiapan baik yang langsung berhubungan dengan kongres maupun persiapan-persiapan prakondisi yang memadai untuk itu terselesaikan, pesta politik,

---

120 Lihat Lampiran Keputusan No. II/Kongres U MPP/1976, Keputusan A, angka 1.

121 *Ibid.*, angka 2.

122 *Ibid.*, angka 3. Urutan ini didasarkan pada urutan perolehan suara dalam Pemilu 1971.

123 *Ibid.*, angka 3. Dengan ini memungkinkan setiap unsur dijamin keterwakilannya dalam posisi-posisi strategis.

124 *Ibid.*, hal 60. Secara kuantitatif, penyelenggaraan rapat dapat dirinci sebagai berikut: tahun 1974 sebanyak 38 kali, tahun 1975 sebanyak 42 kali rapat.

125 *Ibid.* Sejak pembentukannya di tahun 1973, MPP PDI telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 kali, masing-masing: tanggal 1 Juli 1973 dengan acara: mengesahkan AD/ART, Piagam Perjuangan dan Program Perjuangan PDI; tanggal 18 Februari 1974 dengan acara: pelaksanaan konsolidasi dan efisiensi dalam PDI; tanggal 31 Maret 1974 dengan acara Laporan tahunan DPP PDI; tanggal 5 April 1976 dengan acara penyelenggaraan Kongres I PDI serta tanggal 7 April 1976, Laporan DPP PDI pada kongres dan pelaksanaan kongres I.

Kongres I PDI akhirnya dilangsungkan pada 12-13 April 1976. Seperti umumnya peristiwa politik, penilaian,<sup>126</sup> harapan,<sup>127</sup>—tak ketinggalan dari pihak penguasa<sup>128</sup>—kecemasan,<sup>129</sup> usulan,<sup>130</sup> hadir mendahului peristiwa kongres itu sendiri. Dan, seperti umumnya tata-krama budaya politik Indonesia, tiga hari sebelum penyelenggaraan, 9 April 1976, DPP PDI bersilaturahmi kepada Mendagri guna mendapatkan “petunjuk pengarahannya”<sup>131</sup> dan sekaligus merekam sikap dan harapan Pemerintah terhadap pelaksanaan kongres.

Kongres akhirnya diawali dengan pidato pembukaan Ketua

---

126 Lihat misalnya harian *Kompas*, 29 Maret 1976. Forum kali ini di mata harian ini, “*bukan kongres biasa, tapi bukan pula kongres luar biasa*”. Lebih jauh kongres ini dieja sebagai sarana guna menyudahi “masa transisi” dalam PDI.

127 Lihat harian *Merdeka*, 12 April 1976, yang mengharapkan agar label “demokrasi” yang disematkan di dada PDI dapat terwujud. Lihat pula *Sinar Harapan* dalam Tajuk Rencananya, “Menyongsong Kongres Pertama PDI”, 7 April 1976. Harian ini mengharapkan agar kongres sukses karena diyakini sebagai kebutuhan nasional.

128 Dalam serial pertemuan, baik dengan Kabakin, Pangkopkamtib, atau pun dengan Presiden, tema agar PDI dapat menjaga stabilitas nasional serta berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan, selalu berulang diwejangkan kepada elit-elit PDI.

129 Lihat *Kompas*, 29 Maret, *Op.cit.* Kehadiran aktivitas “para pengungkit” yang memanfaatkan jemarinya berupa “oknum-oknum” di dalam tubuh parpol sebagai “pengungkit” dicemaskan oleh harian ini akan semakin mengeruhkan masalah PDI.

130 Lihat, misalnya, harian *Berita Yudha*, 12 April 1976, yang mengusulkan kepada Pemerintah untuk menindak secara tegas “*para pengungkit*” yang ikut bermain dalam PDI apabila mereka tidak mau secara sukarela menghentikan aktivitasnya.

131 Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.27-30. Dalam forum ini Mendagri di samping menitikkan sederetan harapan juga kembali mengingatkan PDI akan arti pentingnya kongres ini bagi PDI dan organisasi kekuatan sopol lainnya. Di samping itu, peringatan standar agar kongres tidak mengabaikan petunjuk Presiden juga dikedepankannya. Mendagri sekaligus mengingatkan agar pelaksanaan dan pembiayaan kongres dapat dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap mampu menghasilkan keputusan-keputusan yang sifatnya merupakan pengukuhan perkawinan antarmereka.

Umum PDI, Sanusi Hardjadinata serta sambutan Presiden.<sup>132</sup> Setelah acara seremonial di atas, kongres mulai mengukuhkan berbagai dokumen penting partai,<sup>133</sup> mulai dari *Deklarasi Pembentukan PDI, Piagam Perjuangan PDI, AD/ART, Program Perjuangan*, hingga susunan *DPP PDI*; di samping mencapai konsensus mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan organisasi, Pemilu beserta Pendirian Politik PDI Mengenai Pemilu; Politik yang menyangkut Umum, Dalam Negeri dan Luar Negeri, serta Ekobang/Sosbud.

Seperti juga kisah organisasi lainnya, proses pemilihan Ketua Umum merupakan pusat pergulatan kekuasaan terpenting, bukan saja di antara unsur-unsur pembentuk dan elite-elite PDI, tapi juga kekuatan ekstra di luarnya. Penguasa, yang mungkin terkesan oleh keberhasilan kerja Sanusi, telah “memplot” agar figur ini terpilih sebagai penguasa tertinggi PDI. Hal ini terekspresi secara jelas dari langkah memobilisasi daerah-daerah guna mengalirkan dukungan bagi Sanusi,<sup>134</sup> tindakan yang, menurut pengakuannya sendiri, “*disesalkan*”, karena merepresi kemungkinan berkembangnya proses

---

132 Lihat pidato pembukaan Sanusi Hardjadinata. Sanusi kembali menyusuri garis besar rute perjalanan panjang PDI, hambatan yang dihadapi, serta harapan-harapan yang diletakkan di pundak pada Kongres I. Lihat, sambutan Presiden pada Kongres I PDI yang mengetengahkan tugas-tugas yang menyongsong PDI, serta harapannya agar PDI dapat menghindari diri dari praktik-praktik politik buruk di masa lalu.

133 Lihat masing-masing Keputusan Kongres No. I s/d No. IX/KPTS/KD/PDI/1976.

134 Wawancara penulis dengan Sanusi Hardjadinata, *Op.cit.* Ia mengungkapkan para utusan daerah-daerah sebelum menghadiri kongres telah dipesan untuk memilihnya sebagai Ketua Umum PDI. Hal ini pun dibenarkan oleh tokoh-tokoh PDI lainnya yang diwawancarai penulis.

demokrasi yang wajar.<sup>135</sup> Sanusi, pada akhirnya, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI tanpa ia harus hadir di arena pemilihan.

Keterlibatan Pemerintah yang dalam ini, di satu sisi memang berbicara atas nama dan mewakili kepentingan-kepentingan sendiri, tapi di sisi lain, merupakan respons terhadap “undangan terbuka” elite-elite PDI yang begitu sering menciptakan konflik yang melegitimasi kehadiran Pemerintah. Basis material penopang keberadaan PDI, khususnya untuk pembiayaan Kongres I, bukan saja tidak dimiliki PDI,<sup>136</sup> tapi juga “dana sumbangan Pemerintah” dijadikan pusat sengketa antarelite dan unsur.

Kongres I PDI, akhirnya ditutup dengan pidato Ketua Umum, Sanusi Hardjadinata yang, antara lain, berujar bahwa dengan selesainya Kongres I ini berarti proses pengfusi-an telah tuntas paripurna<sup>137</sup> dan berakhir pula eksistensi lima unsur yang berfusi. Untuk itu, ia minta kerelaan semua pihak menerima fusi—sekalipun disadarinya memang berat—demi kebesaran sang pewaris baru, PDI.<sup>138</sup>

Menyambut berakhirnya *Kongres Pengukuhan Fusi* ini, sebuah harian Ibukota mengingatkan PDI untuk secara dini

---

135 *Ibid.* Dijelaskan, sebagai seorang yang demokratis, ia sebenarnya tidak dapat menerima kenyataan dirinya dipilih tanpa proses demokrasi yang wajar. Sebagai ungkapan rasa sesal dan penolakannya, Sanusi menjelaskan, ia memilih untuk mengurung dirinya di kamar penginapan selama berlangsungnya proses pemilihan Ketua Umum. Pimpinan sidang didelegasikannya kepada Usep Ranawidjaja. “Perlawanan lunak” semacam ini, tidak membuahkan hasil apa pun kecuali memastikan bahwa skenario ia akan menjadi Ketua Umum tergenapi.

136 Dana bagi penyelenggaraan kongres yang berjumlah Rp. 75.000.000,- sepenuhnya berasal dari kedermawanan Pemerintah.

137 Lihat Pidato Penutupan Kongres I PDI oleh Ketua Umum, Sanusi Hardjadinata, 13 April 1976.

138 *Ibid.*

memikirkan penempatan tenaga muda—persoalan yang berkaitan dengan kaderisasi yang tetap problematik hingga hari ini bagi PDI—yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan.<sup>139</sup> Tetapi, isu di atas tampak berada di luar skala prioritas elite PDI, bahkan juga Negara. Karenanya terabaikan begitu saja walaupun sejumlah upaya *parsial* pernah coba dilakukan. Dalam perkembangannya, isu justru semakin mengeras yang menghadap-hadapkan generasi baru dan generasi tua dalam situasi konflik.

Berakhirnya Kongres I berarti pula tergenapinya amanat Ketentuan Peralihan Pasal 28 ayat (3) AD PDI. “*Fusi Tuntas Paripurna*” secara formal, berhasil dicapai. Suatu tonggak kemajuan baru dalam proses fusi berhasil ditegakkan. Tetapi masih terlalu rapuh di hadapan keangkuhan kekuasaan yang lebih menyukai kehadiran “*bonsai*” yang tetap mewarisi keliaran-keliaran alamiah rimba raya, tapi hadir artistik di tengah keteduhan kediaman ketimbang “tumbuhan sungguhan”. Demikian pula, tonggak yang ditegakkan masih terlampau rapuh dihadapkan pada naluri kependekaran para elite parpol yang terlanjur memahami dunia politik sebagai rimba raya tempat beradunya pedang permusuhan.

Pada tataran formal, berakhirnya Kongres I PDI jelas merupakan langkah maju dalam proses fusi, tapi di dalamnya tetap mengandung ketaksaan. Di satu sisi, secara formal peran unsur-unsur dinyatakan berakhir, tapi di sisi yang lain, dalam praktik, justru menunjukkan grafik menaik. Petinggi-petinggi parpol terjebak pada loyalitas ganda, PDI dan unsur-unsurnya di waktu bersamaan. Mereka terjebak di tengah-tengah keraguan akan masa depan PDI yang terpaksa mereka lahirkan untuk memenuhi proyek penataan politik Orba, dan ketakutan akan “label pengkhianat” bila unsur yang telah

---

139 Lihat Tajuk Rencana, *Sinar Harapan*, 14 April 1976.



membesarkan mereka ditinggalkan. Sebuah dilema psikologis yang tidak mudah dipecahkan. Yang mengedepan kemudian, kecenderungan elite parpol untuk tampil sebagai pahlawan unsur sekaligus pahlawan PDI yang berarti pula pahlawan Orba. Kecenderungan ini semakin menguat karena tokoh-tokoh parpol dihadapkan pada keharusan untuk menata sikap, orientasi, dan tingkah laku politik agar selaras dengan irama yang didendangkan Orba, padahal ini merupakan penyangkalan yang hampir mustahil atas lingkungan dan tata-cara berpolitik yang melingkupi dan membentuk sikap, orientasi, dan tingkah laku politik mereka di masa lalu. Dengannya, sebuah bentuk kompromi yang cukup janggal muncul: secara substantif elite-elite parpol tetap berjalan dengan logika kerja format politik lama, tapi diwadahi oleh format politik baru yang sama sekali bertolak belakang dengan pemahaman dan penghayatan politik yang mereka miliki.<sup>140</sup>

Salah satu produk penting—putusan MPP yang direkomendasikan kepada Kongres I PDI—ialah mempercayakan pada Sanusi, Ketua Umum, untuk menyempurnakan DPP. Sanusi dijamin kekuasaannya untuk mengisi nama dari masing-masing unsur sesuai dengan struktur dan komposisi yang telah disepakati,<sup>141</sup> yang tidak dapat segera direalisasi walaupun telah direncanakan untuk diumumkan pada saat penutupan kongres.<sup>142</sup> Penundaan terjadi, terutama, karena kegagalan internal PNI mencapai kesepakatan dalam menentukan personalia, padahal

---

140 Tentu saja, siapa pun tidak akan menghayalkan perubahan sikap dan orientasi politik hanya dalam “semalam”, karena ia merupakan hasil sosialisasi politik dan pengalaman politik yang mendarah daging.

141 Lihat *Keputusan Kongres I PDI*, No. VI/KPTS/KP/PDI/1976, tentang Organisasi, angka 1.

142 Dari sebuah dokumen yang menguraikan tentang “Kemelut PDI”, tanpa tahun dan tanggal, terungkap bahwa rencana pengumuman dan pelantikan pengurusan DPP baru akan dilakukan pada penutupan Kongres I. Hal ini sangat beralasan dari tinjauan tata organisasi yang umum dan normal.

pemberian hak kepada Sanusi justru menyangkut personalia asal PNI<sup>143</sup>—mencerminkan kerasnya pertarungan di antara faksi-faksi dalam PNI<sup>144</sup>—, terutama antara Isnaeni, Sanusi dan Hardjantho, sebagai figur-figur yang juga mengklaim wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah personalia DPP PDI asal PNI.<sup>145</sup> Menurut Sanusi, berlarutnya penyempurnaan DPP PDI, karena ia berusaha keras bersikap adil dalam pertentangan Isnaeni-Sunawar. Kubu Isnaeni, begitu pengakuan Sanusi, mendesaknya untuk hanya menyertakan Isnaeni dalam formasi DPP dan menyingkirkan Sunawar, sementara ia bertahan dengan skenario: “memasukkan kedua-duanya, atau tidak sama sekali”.<sup>146</sup> Menurut Sunawar, berlarutnya masalah di atas karena ia dan Isnaeni sama sekali tidak diberi peluang dalam forum Kongres I, dan DPP yang dibentuk hanya disusun Sanusi sendiri, bukan oleh para mandataris, khususnya dari eks unsur PNI.<sup>147</sup> Klaim yang sama juga diajukan Hardjantho yang melihat adanya manipulasi konsensus lima unsur yang telah disahkan MPP,

---

143 Keputusan Kongres I No. VI, *Op.cit.* Hal ini merupakan hasil keputusan Komisi Organisasi sebagai jawaban atas belum dapat dituntaskannya masalah ini oleh PNI.

144 *Ibid.* Hal ini ditopang oleh kenyataan bahwa empat unsur lainnya telah menyusun dan merekomendasikan nama-nama fungsionaris dari unsur masing-masing sesuai dengan syarat-syarat yang diajukan MPP. Apalagi, *Lampiran Keputusan MPP No. II/MPP/1976* sebagai hasil musyawarah pendahuluan antara MPP dengan lima parpol yang berfusi, telah menyepakati adanya batas waktu penyerahan daftar nama-nama fungsionaris DPP PDI dari masing-masing unsur sampai pukul 12.00 WIB, tanggal 12 April 1976. Untuk ini, lihat pula, “*Pernyataan Sikap Unsur IPKI*”, tanggal 1 Desember 1978, yang ditandatangani oleh Akhmad Sukarmadidjaja.

145 Lihat, Pernyataan Unsur IPKI, *Ibid.*, yang menegaskan bahwa Musyawarah Pendahuluan antara MPP dan eks unsur telah membuahkan konsensus nama-nama yang diberi wewenang penuh untuk menyelesaikan masalah personalia DPP PDI dari unsur masing-masing. Dan keempat nama di atas ditegaskan IP-KI sebagai nama-nama yang disepakati dari pihak PNI, dengan Hardjantho sebagai juru bicara.

146 Lihat, konferensi pers Sanusi seperti dikutip *Kompas*, 2 Desember 1977.

147 Lihat, Konferensi pers Sunawar seperti dikutip *Merdeka*, 29 November 1977.

12 April 1976,<sup>148</sup> yang sebenarnya tinggal disahkan saja oleh kongres. Menurutnya, lima unsur telah mencapai konsensus mengenai “telah tuntasnya fusi” dan nama-nama personalia DPP dari masing-masing unsur, yang tinggal membutuhkan pengukuhan Kongres I. Akan tetapi, masih menurut Hardjantho, dengan bermacam-macam dalih, Sanusi-Usep menggelapkan konsensus yang ada sehingga para utusan kongres harus pulang tanpa mengetahui susunan DPP PDI.<sup>149</sup> Karenanya, dan mengingat ketentuan Pasal 36 ayat (3) ART PDI,<sup>150</sup> Isnaeni menilai DPP Sanusi sebagai “bukan DPP hasil Kongres”, terutama, karena DPP tidak pernah memenuhi ketentuan ART di atas. DPP hasil kongres tidak pernah ada, kecuali yang disusun oleh Sanusi sesuai kongres.<sup>151</sup>

Kemelut di atas, akhirnya terselesaikan dengan tidak bersedianya Isnaeni dan Sunawar duduk dalam formasi baru tersebut.<sup>152</sup> Melihat pada kegigihan kubu Isnaeni dan Sunawar dalam menentang kubu Sanusi-Usep dalam penyusunan kepengurusan DPP PDI, maka dicapainya “kesepakatan” antara Isnaeni dan Sunawar merupakan hasil tawar-menawar politik yang melibatkan “tangan terampil” yang menggenggam kekuasaan besar, yang bisa diperkirakan berasal dari lingkaran kekuasaan (Negara). Dengan ini DPP PDI dapat pula disusun, tapi setelah adanya clearance dari Mendagri dan Kaskopkamtib.<sup>153</sup>

---

148 Lihat, Konferensi pers Hardjantho seperti dikutip *Berita Buana*, 28 November 1977.

149 *Ibid.*

150 Pasal 36 ayat (3) ART PDI menegaskan, “Pejabat-pejabat Partai dalam DPP setelah dipilih oleh Kongres mengucapkan janji setia kepada Partai di muka Kongres”.

151 Lihat, Konferensi pers Isnaeni seperti dikutip *Suara Karya*, 4 Januari 1978.

152 Konferensi pers Sanusi, *Op.cit.* Hal ini juga diperkuat dokumen berupa foto oleh harian *Kompas* yang mengabadikan momentum ketika Isnaeni menyerahkan surat ketidaksediaannya untuk duduk dalam DPP PDI. Sanusi pada kesempatan tersebut, didampingi Sabam Sirait dan Abdul Madjid.

153 Lihat, *Kemelut Fusi PDI, Op.cit.*

Susunan selengkapnya dari DPP PDI hasil Kongres I adalah sebagai berikut:<sup>154</sup>

Ketua Umum	:	M. Sanusi Hardjadinata
Ketua-Ketua	:	1. Prof. Usep Ranawidjaja, SH 2. Alexander Wenas 3. F.S. Wignjosumarsono 4. Akhmad Sukarmadidjaja 5. Muhidin Nasution 6. Abdul Madjid 7. J.H.D. Tahamata 8. F.C. Pelaunsuka 9. Andi Parenrengi Tanri 10. John B. Andries 11. Drs. TAM. Simatupang 12. Drs. I.G.N. Gde Djakse 13. R.G. Duriat 14. Notosukardjo 15. Rasjid Sutan Radja Mas
Sekjen	:	Sabam Sirait
Wasekjen	:	1. Sulomo, BA 2. B.D. Blegur, SH 3. Drs. M.B. Samosir 4. Dr. Adi Tagor Harahap 5. John Pakan 6. Ir. Andjar Siswojo 7. V.B. da Costa, SH
Bendahara Umum	:	G. Sani Fenat, BA

---

154 Lihat, Laporan Perkembangan PDI, *Op.cit.*, hal.124.

**BAB IV** PDI 1973-1976: Mimpi Buruk “Sang Anak Haram”

Ketua Umum	:	M. Sanusi Hardjadinata
Bendahara	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. M.T. Siregar</li><li>2. Ny. Walandouw</li><li>3. Mustafa Supangat</li><li>4. Drs. Zakaria Ra'ib</li></ol>

## **BAB V**

### **PDI 1976-1981:**

#### **“Yang Tersesat di Belantara Konflik”**

Penggalan kedua perjalanan Sang Banteng dimulai sejak berakhirnya Kongres I (1976) hingga memasuki era-era kritis menjelang Kongres II (1981). Seperti juga kisah sebelumnya, era ini pun diangankan sebagai era ketika fusi telah tuntas paripurna dan harmoni internal bisa dicapai. Tetapi kesaksian sejarah perjalanan PDI sepanjang tahun-tahun di era ini bercerita tentang kisah sebaliknya. Kehangatan dan keserasian sebuah keluarga, yang dibayangkan akan bisa dengan mudah dicapai lewat penyingkiran secara sementara pilar-pilar konflik atau penyatuan kutub-kutub yang bertikai, menemukan dirinya berakhir sebagai angan-angan belaka. Demikian pula, “uluran tangan” Negara, yang berulang kali mengedepankan jargon persatuan-kesatuan dan stabilitas nasional sebagai acuan ideologis bersama untuk mengekang perilaku politik temperamental yang ditampilkan elite-elite PDI, berakhir sebatas sebagai penundaan konflik. Periode ini secara hampir sempurna diwarnai krisis intern berkepanjangan yang hampir-hampir saja membangkrutkan semua skenario restrukturisasi politik yang sudah rapi dirancang. Kalau pun suasana tenteram di internal PDI bisa dicapai, ia merupakan fenomena sementara: suatu interlude yang memiliki basis yang sangat rapuh untuk dijadikan sebagai pijakan bagi upaya-

upaya penciptaan kedamaian intern yang lebih permanen dan bermakna. Karenanya, menjadi logis bila di era ini hampir semua kemungkinan sumber daya dan kecakapan politik yang dimiliki oleh, terutama, negara dikerahkan guna menyelamatkan keadaan. Bagaimanapun, posisi sang bayi PDI yang terus mengapung di tengah-tengah samudera badai konflik tanpa tepian merupakan ancaman paling langsung bagi kelangsungan rancangan besar penataan politik oleh Orba.

Walaupun di akhir-akhir periode awal perjalanannya PDI telah berhasil mengukuhkan berbagai kesepakatan antarunsur dan antartokoh, tapi ini hanya berupa gencatan senjata sementara. Periode kevakuman ini, secara maksimal digunakan masing-masing pihak untuk mengasah lembing dan tombak guna memasuki perang baru dengan alasan-alasan "lama". Kapak peperangan mulai digali lagi setelah pihak IP-KI-MURBA yang dimotori Akhmad Sukarmadidjaja dan Muhidin Nasution mulai metampakkan ketidaksepakatannya atas kepemimpinan Sanusi-Usep. Kedua tokoh terakhir ini dihakimi telah menyimpang dari norma-norma organisasi, bertindak semena-mena, diktator, seenaknya sendiri, dan sederetan peringai buruk lainnya yang tidak dapat diterima dan ditolerir begitu saja oleh IP-KI-MURBA.<sup>1</sup> Perang terbuka akhirnya pecah mengekori pernyataan Sukarmadidjaja dan Muhidin Nasution, 19 Oktober 1976, yang "tidak lagi mempercayai kepemimpinan Sanusi-Usep". Pernyataan tokoh IP-KI-MURBA yang dibuntuti oleh merebaknya isu keterlibatan Sanusi dalam "Gerakan

---

1 Hampir semua dokumen yang mengetengahkan kemelut intern PDI memuat tentang hal ini. Lihat, misalnya, "Pernyataan Unsur IP-KI.", *Op.cit.*, "Kemelut Fusi PDI", *Op.cit.*

Sawito” ini semakin merumitkan masalah.<sup>2</sup> Apalagi daerah-daerah mulai juga melangkah masuk ke medan laga, ditandai muncul reaksi penolakan DPD DKI Jaya atas pernyataan Sukarmadidjaja-Nasution<sup>3</sup> yang diikuti reaksi sebaliknya dari daerah yang sama.<sup>4</sup> Dengan ini, horizon konflik semakin meluas, merembesi daerah-daerah.

Untuk menjembatani perbedaan yang semakin melebar dalam DPP PDI, pembentukan sebuah tim, nantinya disebut Tim Enam, diikhtiarkan.<sup>5</sup> Tetapi tampaknya jurang perbedaan

- 
- 2 Isu ini dibicarakan dalam pertemuan antara Tim Enam DPP PDI dengan pemerintah. Mendagri dalam kesempatan ini menegaskan, ia secara pribadi “percaya pada Sanusi”. Sementara itu, sekalipun membenarkan adanya pengakuan Sawito ketika diinterogasi bahwa ia pernah dua kali menghubungi Sanusi, Kaskopkamtib tetap menegaskan bahwa untuk sementara Sanusi dianggap tidak terlibat. Lihat, “resume Pokok-pokok Pembicaraan antara Tim Enam DPP PDI bersama Mendagri dan Kaskopkamtib”, tanggal 30 November 1976. Kata-kata “untuk sementara” sendiri telah membuka ruang manuver yang semakin lebar karena wataknya yang multitafsir dan dapat digunakan secara efektif oleh kedua kubu yang bertikai sebagai dasar untuk melegalisasi tindakan-tindakan mereka.
  - 3 Reaksi penentangan DPD DKI Jaya muncul dalam “pernyataan” DPD DKI Jaya, 25 Oktober 1976, yang ditandatangani oleh Dr. H. R. Soewondo (Ketua) dan Drs. Robert Tambunan, dua tokoh pendukung utama Sanusi di DKI. Pernyataan ini secara pokok menolak tegas pernyataan Ketua DPP PDI Sukarmadidjaja dan Nasution tertanggal 19 Oktober 1976, mencela tindakan tersebut sebagai inskonstitusional dan anarkhis; tetap mendukung Sanusi, dan meminta kepada Sanusi sebagai formatur tunggal/Mandataris Kongres PDI I untuk meninjau kedudukan Sukarmadidjaja dan Nasution. Lihat “Pernyataan DPD PDI DKI Jakarta”, 25 Oktober 1976.
  - 4 Reaksi sebaliknya dimunculkan eksponen-eksponen IP-KI dalam tubuh PDI se-DKI. Kubu ini dengan tegas “menolak pernyataan DPD DKI Jakarta tertanggal 25 Oktober, mencela adanya unsur pemecah-belah dalam tubuh DPD PDI Jakarta; dan mendesak agar DPP PDI segera menyelesaikan masalah DKI Jaya sesuai Keputusan Kongres T. Lihat, “Pernyataan eksponen-eksponen IPKI dalam Tubuh PDI se-DKI Jakarta”, 28 Oktober 1976. Pernyataan ini akhirnya ditarik dengan “pernyataan” lainnya yang sekaligus menyerahkan masalah tersebut pada DPP PDI, lihat “pernyataan”, 30 Oktober 1976, yang ditandatangani oleh J.L.L. Taulu, A. Efendi dan Arifin.
  - 5 Tim Enam terdiri dari Sanusi Hardjadinata, Usep Ranawidjaja, Akhmad Sukarmadidjaja, Muhidin Nasution, Alexander Wenas dan F.S. Wignjosumarsono.



menganga sedemikian lebarnya sehingga sulit dipertemukan kecuali lewat bantuan kekuatan yang bisa mengkonstruksi bangunan "penengah" yang kokoh. Dan ini bermakna melegalisasi kehadiran Negara yang memang senantiasa sangat "bermurah-hati". Secara teknis kehadiran Negara ini diwujudkan melalui pertemuan antara Tim Enam DPP PDI dengan Mendagri dan Kaskopkamtib, dua lembaga yang paling banyak "menolong" PDI.<sup>6</sup> Pusat sengketa antara Sanusi-Usep—yang akhirnya meluas ke Sabam Sirait<sup>7</sup>—dengan tokoh-tokoh IP-KI-MURBA, Sukarmadidjaja, dan Nasution, akhirnya terungkap dalam pertemuan ini.<sup>8</sup> Usep mengatakan bahwa terasa sulit bagi DPP untuk mencapai penyelesaian sebelum pernyataan Sukarmadidjaja dicabut. Tuntutan ini ditolak kubu

---

6 Pertemuan berlangsung pada tanggal 30 November 1976 dihadiri oleh Tim Enam dari DPP PDI, sementara dari Pemerintah hadir, masing-masing Mendagri, Kaskopkamtib, Brigjen TNI Erman Harirustaman dan Kol. TNI. Soewondo.

7 Terutama karena Sabam dan kekuatan PARKINDO-Partai Katolik senantiasa melapis di belakang Sanusi. Di samping itu, Sabam ikut menandatangani, bersama-sama dengan Sanusi, keputusan-keputusan DPP PDI yang oleh Nasution dan Sukarmadidjaja dipandang tidak sah karena belum atau tidak pernah dirapatkan DPP.

8 Masalah yang menjadi pusat sengketa, menurut Nasution, antara lain: banyak keputusan DPP yang ditandatangani oleh Sanusi-Sabam, termasuk keputusan mengenai calon-calon PDI untuk Pemilu yang telah dikirimkan ke Lembaga Pemilihan Umum (LPU), tidak merupakan hasil rapat. Dengan ini, Nasution merasa hanya dijadikan sebagai sampiran yang tak punya makna dalam DPP. Tokoh ini, di satu sisi, akhirnya menolak untuk dijadikan sekadar "embel-embel", tetapi, di sisi lain, menuntut untuk juga mempunyai hak dan kewajiban yang setara dalam DPP PDI. Dengan logika berpikir di atas, Sukarmadidjaja justru mempersoalkan siapa sesungguhnya ancaman bagi PDI. Dalam ungkapannya, "yang merongrong Sanusi-Usep atau Sanusi-Usep yang merongrong kewibawaan PDI". Di samping isu di atas, tokoh utama IP-KI ini juga mengungkapkan adanya perbedaan "pola politik"—dan bukan sekadar pertentangan pribadi—yang menjadi sumber kemelut yang ada. Lihat Resume Pokok-Pokok, ..., *Op.cit.*

Sukarmadidjaja.<sup>9</sup> Sementara Pemerintah tidak banyak bergeser dari pola lama yang dikenal, yakni tetap hadir dengan jawaban dan harapan standar, yakni tetap mengharapkan adanya penyelesaian oleh intern PDI, walaupun tetap siap membantu bila memang diperlukan.<sup>10</sup> Konflik lintas unsur itu metampakkan perubahan konfigurasi. Koalisi empat unsur versus PNI yang sempat mengkristal sebelumnya kini tak lagi menyisakan bekasnya. Kini MURBA-IP-KI secara resmi bercerai dengan PARKINDO dan Partai Katolik yang akhirnya dipersunting PNI. MURBA-IP-KI versus PNI-PARKINDO-Partai Katolik menjadi rumus baru.

Tim Enam yang dirancang untuk menemukan rumusan penyelesaian di antara kubu-kubu yang bertikai, di ujungnya berakhir sebagai kesia-siaan. Ia dibubarkan oleh DPP yang kemudian mengalihkan tanggung-jawab ke pundak Ketua Umum untuk menyelesaikan pekerjaan Tim Enam yang terbengkalai.<sup>11</sup> Sanusi yang menggenggam mandat DPP, dalam kenyataannya, terbentur kesulitan yang sama dengan yang dihadapi Tim Enam. Karenanya, ia dipaksa menempuh rute klasik berpaling kepada Negara. Namun, rute penyelesaian yang ditempuh Sanusi lewat penggunaan kewibawaan kekuasaan di luar PDI—lewat pertemuan dengan Mendagri dan Kaskopkamtib, 26 Oktober 1976—juga berakhir pada kebuntuan. Mendagri dan Kaskopkamtib memang meyakinkan DPP dan DPD/DPC yang

---

9 Penolakan ini terjadi karena, bagi Sukarmadidjaja, yang utama bukan sekadar pernyataannya *an sich*, tapi materinya yang meliputi antara lain: pembenahan daerah-daerah berdasarkan pertimbangan “*like dan dislike*”, terutama dalam menyingkirkan orang-orang Isnaeni-Sunawar. *Ibid.*

10 *Ibid.*

11 Tim ini dibubarkan berdasarkan keputusan rapat DPP tanggal 27 September 1977 yang dihadiri oleh 19 dari 29 anggota DPP. Lihat, “Resume Rapat DPP”, 27 September 1977. Rapat akhirnya memberikan mandat pada Sanusi untuk menyelesaikan pekerjaan tim yang terbengkalai, antara lain, menyangkut tambahan 10 anggota MPR asal PDI. Kewenangan ini diberikan dengan catatan harus memperhatikan unsur DPP dan daerah.

telah terbentuk di bawah kepemimpinan Sanusi untuk terus berjalan di bawah payung perlindungan Pemerintah yang siap mengamankan berbagai kebijaksanaan DPP dengan jalan tidak mentolerir adanya rongrongan dalam tubuh PDI.<sup>12</sup> Hanya saja, keyakinan dan jaminan yang diberikan ini lebih bermakna sebagai sopan-santun politik ketimbang sesuatu yang sungguh-sungguh diniatkan untuk direalisasi. IP-KI dan MURBA, terutama IP-KI, seperti sudah dibicarakan sebelumnya, menggenggam wasiat Presiden Soeharto sebagai kekuatan Pancasila yang dibebani misi "mem-Pancasila-kan PDI". Karenanya, tidak bisa dinihilkan begitu saja.

Konflik akhirnya sedikit mereda ketika DPP dan daerah-daerah "sepakat mempetieskan" masalah intern guna memenangkan PDI dalam Pemilu. Namun, "kesepakatan" yang ada bukanlah produk domestik PDI. Ia dimaksudkan lebih untuk merespons penegasan Pemerintah agar menjamin adanya stabilitas menjelang Pemilu ketimbang untuk kepentingan sang Banteng sendiri. Dalam kenyataannya, protes kubu Hardjantho-Isnaeni-Sunawar terus berlangsung—terutama di sekitar apa yang disebut kubu ini sebagai "manipulasi konsensus lima parpol"—dan baru mereda ketika Sudomo menyerukan kepada mereka untuk menanggukkan semua protes dan unek-unek agar persiapan Pemilu tidak terinterupsi.<sup>13</sup> Demikian pula, IP-KI-MURBA hanya sebatas menukar raut konflik ke bentuk baru yang lebih senyap, sehingga tidak bikin gaduh persiapan Pemilu seperti yang diamanatkan Sudomo. Keduanya memilih menyusutkan keterlibatannya dalam aktivitas PDI menyongsong pemilu, sebagian sebagai lanjutan konflik lama, tetapi sebagian

---

12 Lihat, "Siaran Pers" Depdagri yang disampaikan oleh Kabag Humas Depdagri, Feisal Tamim, 26 Oktober 1976. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Sanusi dan Usep dari PDI sedangkan dari Pemerintah, hadir antara lain, Mendagri, Kaskopkamtib dan, Feisal Tamim.

13 Lihat, Konferensi pers Hardjantho seperti dikutip Berita Buana, *Op.cit.*

lainnya adalah sebagai protes atas “ketidakadilan” yang diterima mereka sehubungan dengan pencalonan anggota DPR.<sup>14</sup> Dengan ini perkembangan kemelut metampakkan tetap bertahannya alasan-alasan lama sebagai hulu konflik, tetapi persoalan alokasi kekuasaan—yang di dalamnya terkandung pengaruh, materi dan prestise sosial—menemukan pijakan yang makin kuat sebagai alasan pembenar konflik. Ini secara lebih spesifik terekspresikan dalam “pembagian kursi DPR” yang memunculkan terminologi “adil” dan “tak adil” sebagai kata kunci.

Konflik, dengannya, tetap bertahan walaupun “stabilitas” muncul sebagai kata dengan kekuatan pemaksa yang mampu merepresi untuk tenggelam sebagai gejala di bawah permukaan. Dalam situasi seperti ini, PDI sempat menyisakan ruang bagi diri sendiri untuk merayakan ulang tahunnya yang keempat,<sup>15</sup> dan Sanusi dalam pidato politiknya, di samping memperkenalkan berbagai program PDI, juga secara sengaja menekankan posisi PDI sebagai wadah pemersatu rakyat,<sup>16</sup> ungkapan yang lebih mewakili dunia harapan. Situasi damai di permukaan “demi pemilu” ini tidak bertahan lama. Di bulan Mei, 1977, Jusuf Merukh, dkk.—yang dikenal sebagai “orang-orangnya Sunawar”—mulai melakukan gerilya politik dengan

- 
- 14 Tokoh IP-KI-MURBA yang diwawancarai penulis menegaskan, mereka dirugikan dalam hal pencalonan ke DPR—dan juga pada posisi-posisi tertentu—karena unsur lain selalu memakai hasil Pemilu 1971 sebagai dasar pertimbangan. Menurut elite-elite IPKI dan MURBA, menggunakan hasil Pemilu sebagai dasar distribusi kekuasaan di PDI adalah tidak realistis.
- 15 Perayaan Ulang Tahun ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, dan dihadiri oleh ribuan massa anggota PDI. Lihat, *Merdeka*, 21 Januari 1977.
- 16 Lihat, “*Pidato Politik Ketua Umum PDI*” dalam rangka HUT PDI ke IV.

menyebarkan selebaran ke warga PNI<sup>17</sup> yang merugikan PDI, dan sebaliknya, malah menguntungkan Golkar dalam Pemilu 1977. Langkah Merukh, dkk. mengundang reaksi keras DPP yang diekspresikan dalam bentuk pemecatan mereka.<sup>18</sup> Sementara dari DPD Jatim, protes keras atas kunjungan Gde Djakse dan Blegur, yang dikenal dekat dengan Sanusi, menyemarakkan berbagai peristiwa menjelang pemilu.<sup>19</sup>

Di tingkat DPP, Sunawar hadir dengan kisah baru. Ia mengindikasikan adanya "perbedaan pola politik" antara Sukarmadidjaja-Nasution, dkk. dengan DPP PDI. Dan ini, masih menurut Sunawar, bersumber pada keinginan DPP PDI Sanusi untuk mencetuskan adanya "hak interpelasi lewat Fraksi PDI di DPR".<sup>20</sup> Isu yang tidak disepakati Sukarmadidjaja,

---

17 Lihat, *Salemba*, No. 32/Tahun II, 16 Mei 1976. Lihat pula, *Merdeka*, 27 Mei 1976. Motif-motif dari pengobaran perpecahan menjadi pusat sorotan media ini. Di samping itu, tradisi "pecat-memecat" sebagai cara penyelesaian permasalahan dalam PDI dan adanya unsur-unsur yang gegabah melakukan tindakan yang justru menguntungkan pihak lawan dalam Pemilu 1977, tapi tetap mengklaim diri sebagai unsur PDI, adalah dua hal lainnya yang disoroti.

18 Wawancara penulis dengan T.A.M. Simatupang, *Op.cit.* Ia mengungkapkan bahwa DPP PDI pernah memecat Jusuf Merukh bersama sejumlah orang lainnya karena menyebarkan selebaran ke lingkaran PNI agar tidak memilih PDI, tapi malah menganjurkan untuk memilih Golkar dalam Pemilu 1977.

19 Protes DPD Jawa Timur disampaikan baik dalam raut surat pribadi Marsoesi kepada Supangat, maupun dalam bentuk surat DPD Jawa Timur yang dialamatkan kepada DPD PDI. Surat DPD, 10 Juni 1977, dengan nomor 306/DPD-PDI/IN/A/VI-77 ini ditandatangani Marsoesi selaku Ketua dan M.Y.A. Jawawi Sp selaku Wakil Sekretaris. Kunjungan Gde Djakse dan Blegur ke sejumlah daerah di Jatim yang mem-*bypass* DPD diprotes kubu Marsoesi. Demikian pula, pertemuan kedua tokoh di atas dengan pejabat-pejabat Jatim, yang menurut rekaan Marsoesi, dimaksudkan untuk merancang suatu skenario pengalihan kekuasaan secara paksa di DPD Jatim dari tangannya ke tangan Soendoro.

20 Lihat wawancara Sunawar dengan *Berita Buana*, 4 Juni 1977. Ia menyesalkan hal ini karena telah mengarah ke polarisasi dalam DPP PDI. Ia juga mengungkapkan kekecewaannya atas keinginan DPP PDI mencetuskan hak interpelasi di Dewan. Menurut Sunawar, keinginan semacam ini merupakan ekspresi dari "sikap politik yang tidak senang kepada Pemerintah".

dkk. ini dengan cepat mengembara mencari mangsa. Atas nama ketidaksetujuan atas "hak interpelasi", kubu Sanusi-Usep dihakimi ingin mengembalikan semangat liberalisme Barat yang bertentangan dengan Pancasila.<sup>21</sup> Penggalan kata "perbedaan pola politik", selanjutnya akan menjadi frasa sentral dan sekaligus alat legitimasi bagi munculnya rangkaian aktivitas yang nantinya menuntun langkah sang Banteng menapaki rimba raya ketidakpastian.

### A. "Perbedaan Pola Politik": Ketika yang Tersisa Cuma Kebencian

Atas nama adanya "perbedaan pola politik", Sukarmadidjaja bersama John Pakan mengeluarkan pernyataan tentang pencalonan Jenderal Soeharto sebagai calon tunggal Presiden dari pihak DPP PDI.<sup>22</sup> Pernyataan ini mengundang reaksi keras DPP, khususnya, Sanusi,<sup>23</sup> yang ditimpali reaksi balik yang sama ganasnya dari kubu Sukarmadidjaja.<sup>24</sup> Pernyataan pencalonan

- 
- 21 Isu ini diakui oleh elite-elite yang diwawancarai penulis. Dalam wawancara dengan penulis, Sanusi juga membenarkan hal ini.
  - 22 Pernyataan ini dikeluarkan pada 18 September 1977 dan dilansir secara luas oleh media massa tanggal 24 September 1977. Menurut Sukarmadidjaja, apa yang dilakukannya "pada hakikatnya adalah sikap DPP" karena dalam rapat-rapatnya hampir semua anggota DPP menyepakatinya. Di samping itu, ia sekaligus menilai langkahnya sebagai pengejawantahan dari aspirasi mayoritas rakyat Indonesia.
  - 23 Bagi Sanusi, langkah Sukarmadidjaja ini merupakan tindakan sepihak karena soal calon Presiden belum diputuskan dalam rapat DPP. Lihat pernyataan pers Sanusi selepas pertemuan dengan Presiden, seperti yang dikutip *Merdeka*, 27 September 1977. Dalam wawancara dengan saya, Sanusi mengungkapkan, bahwa Presiden dalam pertemuan dengannya memahami dan membenarkan sikap Sanusi (DPP) yang hendak menyalurkan soal calon Presiden lewat Fraksi PDI.
  - 24 Lihat, "Tanggapan Ketua DPP Akhmad Sukarmadidjaja Terhadap Penyiaran Wawancara Ketua Umum Sanusi Hardjadinata tanggal 27 September 1977", tertanggal 27 September 1977; lihat pula, siaran pers Sukarmadidjaja seperti dikutip Kompas, 30 September 1977, yang disampaikan setelah pertemuan dengan Presiden. Siaran pers ini menekankan agar DPP jangan "plin-plan" dan memberi "kucing dalam karung".

Soeharto sebagai Presiden oleh Sukarmadidjaja mengundang perhatian Kaskar Hankam, yang kemudian mempersoalkan kebenarannya pada kubu Sanusi.<sup>25</sup> Secara singkat pertanyaan klarifikasi di atas di jawab Usep sebagai "belum diputuskan DPP".<sup>26</sup> Di samping itu, alasan standar bahwa pencalonan Presiden merupakan kewenangan MPR yang tidak ingin dilampaui Sanusi muncul sebagai alasan penopang.<sup>27</sup> Hal ini dibenarkan T.A.M. Simatupang,<sup>28</sup> tapi pada kesempatan lain ia mengisyaratkan, DPP sebenarnya telah mengeluarkan SK yang ditandatangani Sanusi dan Sabam tentang Calon Presiden dari PDI, yang disampaikan kepada fraksi PDI sebagai pedoman. Namun, hal ini belum dapat diumumkan, karena DPP belum

---

25 Pertemuan DPP PDI dengan Kaskar Hankam, 24 September 1977 dihadiri oleh Kaskar Hankam, Letjen Darjatmo, Mayjen Mansyoer, Sukarton, Usep, Wigiosumarsono, M. Nasution, M.B. Samosir, T.A.M. Simatupang, antara lain mempertanyakan adanya pernyataan di surat kabar tentang calon Presiden dari PDI. Hal ini terungkap dalam sebuah surat T.A.M. Simatupang kepada A. Wenas yang melaporkan hasil pertemuan dengan Kaskar Hankam, 24 September 1977.

26 *Ibid.*, Usep menegaskan pernyataan di atas sebagai "pendapat pribadi".

27 *Ibid.*, ia menghendaki agar masalah ini disalurkan secara wajar lewat Fraksi PDI di DPR/MPR. Lihat pula, "*Konferensi Pers Sanusi*", 27 September 1977, yang antara lain menegaskan bahwa "pernyataan pers dari sementara pimpinan PDI tentang siapa calon Presiden sebelum MPR terbentuk, merupakan tindakan tidak wajar dan hanya bikin ribut". Penilaian ini muncul, seperti ditegaskan Sanusi, karena hal itu bertentangan dengan mekanisme Demokrasi Pancasila.

28 Lihat "*Konferensi Pers T.A.M. Simatupang*", 24 September 1977. Simatupang menekankan bahwa DPP belum memutuskan calon Presiden, sekalipun demikian, ia yakin Soeharto yang akan diajukan PDI, mengingat sebagian besar anggota DPP dalam rapat-rapatnya menghendaki demikian.

menghubungi orang tersebut.<sup>29</sup> Bagi Sukarmadidjaja kisah pencalonan Presiden adalah kisah lain. Figur utama IP-KI ini menyatakan bahwa dari berbagai resume rapat DPP, soal pencalonan Presiden sudah dibicarakan. Karenanya, ia bahkan balik menuduh Sanusi yang ingin mengadu domba ABRI dengan jalan “mau lihat arah angin” dan hendak menggunakan “teknik fraksi bermain sendiri.”<sup>30</sup> Akibatnya, tokoh ini merasa wajib meragukan arah politik Sanusi yang dirumuskan Sukarmadidjaja dalam ungkapan, “Quo vadis Sanusi?”<sup>31</sup> Masalah calon Presiden terus mengembara hingga mencapai titik yang hampir mematikan kubu Sanusi, terutama, karena ia diyakini oleh kubu Sukarmadidjaja “berambisi untuk menjadi Presiden”.<sup>32</sup>

Sangatlah naif untuk percaya bahwa isu-isu yang berserakan di serambi PDI steril dari campur tangan

---

29 Lihat “Konferensi Pers T.A.M. Simatupang” seperti dikutip *Kompas*, 28 Oktober 1977. Disebutkan, sebenarnya dalam rapat DPP, 26 September 1977, masalah calon Presiden telah diputuskan dan telah dikeluarkan dalam bentuk SK yang akan dijadikan pedoman oleh Fraksi PDI. Rapat ini dihadiri oleh 19 orang dari 29 anggota DPP PDI. Simatupang juga mengungkapkan perasaan janggalnya karena justru mereka yang tak hadir dalam rapat di atas yang kini meributkan masalah tersebut. Lihat pula *Merdeka*, 28 Oktober 1977, di mana TAM. Simatupang menegaskan bahwa nama calon Presiden dari PDI belum dapat diumumkan, karena DPP belum sempat menghubunginya. “Demi sopan santun”, masih menurut Simatupang, “DPP PDI baru akan menyiarkannya, setelah terlebih dahulu bertemu dengan calon tersebut”.

30 Menurut Sukarmadidjaja dalam rapat DPP Sanusi mengatakan antara lain, “agar DPP realistis, karena di dalam negara kita segala sesuatu ditentukan oleh ABRI. Karenanya, siapa yang diusulkan ABRI itulah yang pasti jadi dan DPP PDI hanya mendukung saja”. Dengan alasan ini, karena ABRI belum mengedepankan calonnya, PDI akan berkonsultasi terlebih dulu. Hal ini, menurut Sukarmadidjaja dikarenakan Sanusi belum yakin bahwa ABRI akan mencalonkan Soeharto. Sikap seperti ini dinilai Sukarmadidjaja sebagai “mengandung itikad tidak baik”, lihat. *Ibid.*

31 *Ibid.*

32 Tuduhan-tuduhan serupa bermekaran selama era ini, memaksa Sanusi bertemu dengan Presiden untuk menjernihkannya. Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*



kekuatan luar<sup>33</sup> yang menggenggam kekuasaan besar. Ketika bermekarnya isu yang ada diikuti oleh penggunaan cara-cara yang kurang wajar hanya untuk membenarkan adanya masalah tersebut,<sup>34</sup> cukup banyak kalangan PDI yang mulai memahami bahwa Sanusi hanya sebatas terminal antara. Terminal paling akhir dari perjalanan panjang isu-isu yang berseliweran adalah penyingkirkan Usep yang dinilai "anti Dwi Fungsi ABRI".<sup>35</sup>

Sementara masalah pencalonan Presiden masih menghangat, DPP diadang masalah "pencalonan pimpinan DPR/MPR".<sup>36</sup> Pencalonan Isnaeni telah memicu lahirnya penentangan di sejumlah kalangan PDI. Persoalan ini mengedepan setelah A.P. Batubara mengajukan "surat pengunduran diri", baik sebagai Wakil Ketua DPD PDI DKI Jaya maupun dari pencalonannya sebagai anggota DPR, sebagai protes atas keputusan DPP mencalonkan Isnaeni.<sup>37</sup> Dalam menentukan pimpinan DPR/MPR, PDI, lebih khusus lagi lingkaran DPP, terpolarisasi ke

---

33 Wawancara dengan Sanusi, *Ibid.* Tokoh-tokoh lainnya-pun membenarkan hal ini.

34 *Ibid.* Sanusi menjelaskan, ia pernah menerima radiogram dari DPD PDI Irian Jaya yang menyatakan selamat atas dicalonkannya Sanusi dan Usep, masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Diinformasikan pula, berita tersebut bersumber dari Radio Australia yang, setelah Sanusi meminta bantuan seorang rekannya di Bakin untuk menyelidiki kebenarannya, ternyata tidak benar. Radio Australia tidak pernah menyiarkannya.

35 Kebanyakan tokoh PDI yang diwawancarai membenarkan hal ini. Disebutkan, target sesungguhnya bukannya Sanusi, tapi Usep. Hal ini dipertegas oleh dokumen "*Risalah Pertemuan Pangkajene dengan DPP PDI*", 5 Januari 1980. Dalam risalah ini, antara lain, disebutkan bahwa Sudomo menegaskan, ia memang sejak dulu tidak menghendaki masuknya Usep dalam DPP PDI karena dinilai masih tetap anti-ABRI/Dwi Fungsi ABRI.

36 Menurut beberapa sumber, sebenarnya perbedaan dalam pengajuan calon pemimpin DPR/MPR inilah yang merupakan pemacu yang mempercepat terbentuknya DPP tandingan.

37 Lihat, "*Surat*" dari A.P. Batubara, 30 September 1976, yang intinya menolak pencalonan Isnaeni sebagai calon nomor 1 dari DKI Jaya, ia meyakini keputusan DPP mencalonkan Isnaeni ini merupakan kesalahan atau kekeliruan.

dalam dua kutub.<sup>38</sup> Kutub pertama menghendaki agar calon pimpinan DPR/MPR asal PDI dipilih dari anggota DPP yang berada di Fraksi, sementara kubu kedua justru menghendaki skenario sebaliknya.<sup>39</sup> Titik temu di antara keduanya tidak dicapai di meja perundingan. Ironisnya, kegagalan dalam merumuskan kesepakatan di antara DPP ini tidak terletak pada alasan masing-masing kubu yang mustahil dipertemukan, tetapi tampaknya lebih sebagai kesengajaan. Ketidaksepakatan ini, bukan saja semata-mata dipertahankan, tapi bahkan dipacu untuk menciptakan prakondisi yang cukup memadai untuk memberikan keabsahan baru bagi munculnya aktivitas baru yang ditargetkan “langsung mematikan” pihak lawan. Dan ini, akan segera mengambil bentuk riil berupa munculnya rangkaian aktivitas yang membidani kelahiran DPP “kembar” dan, nantinya, beranak pinak dalam bentuk DPD dan DPC “kembar”.

Sinyalemen di atas akan menemukan maknanya apabila memerhatikan serangkaian fakta berikut ini. Rapat DPP pada 30 September 1977, yang dirancang untuk mencapai kata mufakat mengenai calon pimpinan DPR/MPR, berakhir dengan

---

38 Kutub pertama terdiri dari Sanusi, Usep serta kekuatan PARKINDO-Partai Katolik. Sedang kutub kedua, terdiri dari IP-KI-MURBA dengan pelopornya Sukarmadidjaja, Nasution, dan Pakan. Terdapat seorang warga PNI di kutub kedua ini, yakni Andjar Siswojo, yang dikenal sebagai ‘orangnya Isnaeni’.

39 Polarisasi memuncak dalam rapat DPP tanggal 29 September 1977, yang menyebabkan rapat gagal mencapai kata sepakat. Pihak pertama mempertimbangkan efektivitas komunikasi dalam membenarkan pilihannya, sedangkan pihak kedua mempertimbangkan persamaan hak asasi untuk dipilih dan memilih yang sama-sama dimiliki oleh setiap anggota PDI guna membenarkan dirinya.

kekecewaan.<sup>40</sup> Akibatnya, kearifan tradisional tunggal yang dikenal elite-elite PDI kembali menyapa ramah: DPP berharap untuk dapat menyerahkan penyelesaian segala persoalan intern PDI ke pihak Presiden Soeharto, setelah Sanusi menilai DPP tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah politik, termasuk pencalonan pimpinan DPR/MPR.<sup>41</sup> Ironisnya lagi, ini pun akan menjadi pusat rujukan kubu anti Sanusi untuk mengklaim bahwa "DPP tidak berfungsi lagi".<sup>42</sup> Akan tetapi, ini bukan akhir cerita, karena episode peperangan berikutnya siap digelar dengan akibat-akibat yang jauh lebih serius lagi.

Pada 1 Oktober 1977 Usep mengambil inisiatif mengumpulkan anggota-anggota Fraksi PDI di DPR/MPR guna mendengarkan "pengarahan" Ketua Umum. Tetapi inisiatif ini memicu kemarahan kubu Sukarmadidjaja<sup>43</sup> yang menilainya sebagai "tindakan sepihak". Dalam pertemuan dengan anggota Fraksi ini Sanusi, antara lain menyampaikan hal-hal:

- *Pimpinan Fraksi PDI untuk sementara ditangani oleh 3 orang masing masing Usep, Sabam dan da Costa;*
- *DPP telah memutuskan bahwa yang dicalonkan dalam pimpinan DPR/ MPR adalah anggota Fraksi yang duduk sebagai anggota DPP; dan*
- *Fraksi adalah alat Partai yang harus tunduk kepada direktiven*

---

40 Dalam versi Sukarmadidjaja, dkk., rapat 30 September 1977 tersebut telah gagal karena Sanusi baru membuka rapat pada pukul 12.00, dan juga hanya berlangsung untuk beberapa menit. Sebelumnya, Sanusi diberitakan menemui Isnaeni guna meminta kesediaannya mengundurkan diri dari pencalonan, tetapi ditolak Isnaeni. Lihat "Penjelasan mengenai tindak penyelewengan yang dilakukan Sanusi dan Usep dalam menghadapi persidangan I DPR/MPR", 21 Oktober 1977. Penjelasan ini ditandatangani oleh Sukarmadidjaja.

41 *Ibid.*

42 Lihat, *Kompas*, 28 Oktober 1977; *Merdeka*, 28 Oktober 1977.

43 Lihat, Penjelasan Sukarmadidjaja, *Op.cit.*

*DPP PDI.*<sup>44</sup>

Kubu Sukarmadidjaja, yang sejak awal menghendaki Isnaeni—boleh jadi disebabkan oleh alasan tunggal, yakni bahwa figur ini adalah pilihan yang lebih dikehendaki kekuatan ekstra PDI ketimbang Usep yang, seperti diindikasikan di atas, “anti dwi fungsi ABRI”—sebagai calon dari PDI,<sup>45</sup> dan karenanya bisa dipastikan disokong Isnaeni, menolak penetapan-penetapan tadi karena mengggapnya “tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.<sup>46</sup> Sukarmadidjaja, bahkan menilai Usep telah mengambil alih kepemimpinan politik PDI dengan menggunakan Fraksi, karena Usep-lah inisiator yang mengumpulkan anggota Fraksi.<sup>47</sup> Kemelut yang terus berlanjut tidak menghentikan langkah DPP PDI untuk tetap mengajukan Usep sebagai calon pimpinan DPR/MPR, apalagi hal ini disokong oleh 26 anggota dari 29 anggota Fraksi PDI.<sup>48</sup> Pencalonan Usep, bagi kubu Sukarmadidjaja, diklaim sebagai “bukan keputusan

---

44 *Ibid.*

45 Lihat misalnya, “*Surat T.A.M. Simatupang kepada Wenas*”, *Op.cit.* Di sini antara lain disebutkan, bahwa pihak M. Nasution—kubunya Sukarmadidjaja—merencanakan untuk mengajukan Isnaeni sebagai calon pimpinan DPR/MPR, dan Sunawar sebagai salah satu calon Menteri. Lihat pula surat John Pakan dan Andjar Siswojo kepada F-PDI yang juga mengusulkan Isnaeni pada posisi yang sama. ‘Waktu yang mendesak’ dipakai keduanya sebagai alasan pengajuan Isnaeni. Lihat pula, “*Surat pencalonan Isnaeni sebagai pimpinan DPR/MPR*” tanggal 19 September 1977 yang diajukan oleh beberapa fungsionaris dari lima DPC PDI di lingkungan DKI Jaya kepada DPP. Surat ini juga berisikan dukungan bagi pencalonan Isnaeni.

46 *Ibid.* Bahkan untuk ini, Pakan dan Siswojo sebagai anggota DPP PDI telah mengajukan surat kepada Fraksi PDI, 2 Oktober 1977, yang secara pokok tidak membenarkan adanya keputusan tentang Ketua Fraksi, maupun calon pimpinan MPR seperti yang disampaikan Sanusi. Lihat surat kepada Ketua Fraksi dan anggota Fraksi PDI di DPR/MPR, yang ditandatangani John Pakan dan Andjar Siswojo.

47 Penjelasan Sukarmadidjaja, *Op.cit.* Lihat juga, *Merdeka*, 28 Oktober 1977.

48 Pencalonan Usep merupakan hasil keputusan yang dicapai dalam pertemuan antara F-PDI dengan Ketua Umum, Sanusi, 1 Oktober 1977 yang diprakarsai Usep. Baik pertemuan maupun hasil yang dicapainya tidak diakui Sukarmadidjaja, dkk.

rapat DPP”, bahkan kesepakatan dalam rapat Fraksi yang menjagokan Usep diyakini kubu Sukarmadidjaja sebagai buah dari manipulasi politik. “Surat penjelasan” salah seorang anggota Fraksi yang hadir dalam rapat, yang menyatakan, “belum pernah ditandatangani pernyataan yang mendukung Usep untuk calon pimpinan DPR/MPR”<sup>49</sup> dikedepankan kubu Sukarmadidjaja sebagai alat bukti adanya manipulasi. Polarisasi PDI ke dalam kutub-kutub yang mendukung Isnaeni—yang menolak Usep dan yang mendukung Usep— menolak Isneni, akhirnya merembes jauh ke daerah-daerah, meletakkan alasan-alasan kuat untuk segera terbentuknya DPD/DPC “kembar”.

Dalam situasi seperti ini, DPP PDI dipaksa untuk kesekian kalinya secara bijak melihat pada variabel Negara sebagai satu-satunya penyelamat yang tersisa bagi diri mereka. Ini dilakukan lewat konsultasi dengan Kaskar Hankam, yang menurut Isnaeni,<sup>50</sup> sekalipun nama Usep memang tak secara tegas ditolak Hankam sebagai calon pimpinan DPR/MPR, tapi pihak Hankam menganjurkan untuk mencalonkan yang lain saja.<sup>51</sup> Namun, kubu Sanusi-Usep membahasakan ungkapan Kaskar Hankam ini secara lain, yakni sebagai isyarat diizinkan DPP menentukan sendiri calonnya. Usep, dengannya, tetap dicalonkan. Sikap kubu Sanusi-Usep ini dengan cepat ditangkap sebagai peluang oleh kubu Sukarmadidja-Isnaeni untuk meyakinkan diri sendiri dan para pendukung serta penguasa,

---

49 Lihat surat Irwan Sukarman seperti dikutip dalam “Penjelasan mengenai tindak”, *Op.cit.*, yang, antara lain, menyebutkan bahwa mereka memang menandatangani daftar hadir, tapi tanpa lampiran dan penjelasan. Dengan ini, berarti hasil yang ada merupakan produk manipulasi. Namun, hanya 1 dari 26 penanda tangan yang keberatan, sehingga, bisa dipastikan, Usep benar didukung anggota Fraksi

50 Lihat “Konferensi pers Isnaeni” seperti dikutip *Pelita*, 1 Desember 1977, yang mengungkapkan adanya delegasi PDI yang ditugaskan untuk menemui Kaskar Hankam pada tanggal 2 Oktober 1977. Delegasi ini dimandatkan untuk berkonsultasi sekitar nama-nama calon pimpinan DPR/MPR.

51 *Ibid.*

bahwa kubu Sanusi-Usep kini meniti rute politik konfrontatif<sup>52</sup> atau “menempuh kebijaksanaan membentur batu karang”<sup>53</sup> dan tidak berdiri di atas realitas.

Di samping Usep, DPP PDI sebenarnya juga mengajukan Sabam Sirait dan Da Costa sebagai calon pimpinan DPR/MPR. Namun, ketiga tokoh ini, tidak mendapatkan dukungan fraksi-fraksi lainnya. Karenanya, setelah pemilihan pimpinan DPR berlangsung, Marsoesi<sup>54</sup> menegaskan seharusnya ketiganya mengundurkan diri sebelumnya karena tidak dicalonkan oleh ketiga fraksi lain (PPP, ABRI, dan Golkar). Dalam pertarungan menuju kursi pimpinan DPR/MPR, walaupun Usep didukung mayoritas anggota DPP dan Fraksi PDI, dukungan internal yang ada belum cukup menjamin masuknya Usep ke dalam formasi kepemimpinan DPR/MPR. Hal ini sangat mudah dimengerti karena Usep tidak memperoleh dukungan pihak Pemerintah seperti halnya Isnaeni.<sup>55</sup> Isnaeni, dengan demikian, meskipun bukan merupakan orang yang dicalonkan DPP PDI, tapi karena dimunculkan dan sekaligus didukung Fraksi ABRI, Golkar, dan PPP, akhirnya terpilih sebagai Wakil Ketua DPR/MPR. Dengan terpilihnya Isnaeni, terkuak pula alasan di balik kemelut pencalonan pimpinan DPR/MPR, yang oleh Sukarmadidjaja dicari akar pembenarannya pada adanya “perbedaan pola politik”. Kemelut yang ada, sederhana saja, ditargetkan untuk menyingkirkan Usep. Sukarmadidjaja, dkk. telah difungsikan sebagai instrumen kekuatan luar PDI yang memang tidak

---

52 *Ibid.* Lihat pula “Wawancara Isnaeni” seperti dikutip *Merdeka*, 3 Desember 1977.

53 Konferensi pers Isnaeni, *Pelita*, *Op.cit.*

54 Lihat Konferensi pers Marsoesi seperti dikutip *Berita Buana*, 12 Oktober 1977. Marsoesi, antara lain, menyebutkan, “seharusnya, mereka sebagai politikus harus menunjukkan jiwa besar dengan mengundurkan diri”.

55 Pemilihan pimpinan DPR/MPR berlangsung pada tanggal 3 Oktober 1977. Isnaeni dijagokan tiga Fraksi lainnya, yakni ABRI, Golkar, dan PPP yang sekaligus dapat dilihat sebagai indikasi bahwa ia memang figur yang direstui Pemerintah.

menghendaki kehadiran Usep. Apalagi Sanusi-Usep dinilai mempunyai target tertentu dalam Sidang Umum MPR, Maret 1978.<sup>56</sup>

Terpilihnya Isnaeni sebagai wakil ketua DPR/MPR, jelas merupakan suatu pukulan politik yang tidak kecil bagi kubu Sanusi-Usep. Pada tingkat paling minim, hal ini merupakan indikasi dicabutnya dukungan Pemerintah yang pada awalnya sangat diterima keduanya. Karenanya, meskipun sempat beredar isu rencana kubu Sanusi-Usep *me-recall*, bahkan memecat Isnaeni,<sup>57</sup> dalam perkembangannya kebijaksanaan serupa tidak pernah ditempuh. Langkah lebih realistis—atau mungkin lebih tepatnya dipaksa untuk realistis—yang diambil Sanusi-Usep ini sedikit menolong kubunya. Apabila tindakan kaku, yakni *recalling* atau pemecatan diambil, maka bisa dipastikan akan mengundang kemarahan lebih lanjut kekuatan ekstra-PDI dan semakin mengukuhkan anggapan yang disebarkan bahwa mereka menempuh kebijaksanaan konfrontatif.<sup>58</sup> Dan dengan sikap yang seperti ini pula Sanusi-Usep agak terhindar dari kemungkinan dicap sebagai "pembangkang Pemerintah", suatu hal, yang walaupun dibantah habis-habisan oleh kubu Sanusi-Usep,<sup>59</sup> tetap saja muncul ke permukaan.

---

56 Oleh Sukarmadidjaja, Sanusi-Usep digosipkan membidik target tertentu dalam Sidang Umum MPR yang akan membahas GBHN dan memilih presiden dan wakil presiden. Lihat, "Penjelasan mengenai tindak penyelewengan ..., *Op.cit.*

57 Lihat, misalnya, Virga Belen, "Dilema PDI menghadapi Pencalonan Pimpinan DPR" dalam *Merdeka*, 11 Oktober 1977.

58 Lihat, misalnya, "Ketetapan Reshuffle DPP PDI" bagian 'Memperhatikan' dan angka 5, yang ditandatangani Sukarmadidjaja, Nasution, Noto Sukardjo, dan A. Tagor, 25 November 1977.

59 Tuduhan bahwa Sanusi-Usep menempuh kebijaksanaan konfrontatif, dengan merujuk pada kasus pencalonan Usep sebagai pimpinan DPR/MPR, dibantah oleh Sanusi-Usep. Keduanya, antara lain, menegaskan bahwa DPP PDI tetap mencalonkan Usep yang lain dari Fraksi lainnya justru guna mempertahankan hak demokrasi yang fundamental, yakni mencalonkan pimpinan.

Alasan-alasan pembenar DPP PDI Sanusi bagi pencalonan Usep memunculkan gejala menarik. Ia merupakan suatu bentuk perlawanan politik yang dirancang dan dijalankan secara sadar terhadap kecenderungan Negara yang sangat kuat dalam memaksakan kehendaknya. Bagi Sanusi, perlawanan ini menjadi sah, karena diniatkan untuk mempertahankan “hak demokrasi yang fundamental dari Fraksi PDI di dalam lembaga demokrasi, yakni hak untuk mencalonkan pimpinan”.<sup>60</sup> Namun, ini tidak secara otomatis menihilkan motif-motif individual seperti rivalitas antara kubu Sanusi-Usep dengan kubu Isnaeni-Sunawar yang menjadi kekuatan pendorong prinsipielnnya pula.

Sanusi-Usep, di ujungnya, “mengikhlasakan” Isnaeni tetap sebagai Wakil Ketua DPR/MPR.<sup>61</sup> Akan tetapi “keikhlasan” bukan merupakan daya moral politik yang cukup mujarab meredakan ketegangan yang terjadi selama ini seperti yang mungkin diperkirakan pihak luar.<sup>62</sup> Nyatanya, kemelut terus berlanjut.

Krisis intern yang berlarut, akhirnya memberikan alasan logis bagi beberapa daerah mulai berbicara tentang kebutuhan untuk sesegeranya menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB),<sup>63</sup> di samping keinginan mengembalikan mandat DPP

---

60 Lihat “Penjelasan tentang apa yang dinamakan Reshuffle DPP PDI”, tanggal 13 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh DPP PDI dengan SK No. 412/IN/D/DPP/ XI1/1977. SK yang ditandatangani oleh Sanusi dan Sabam ini dialamatkan kepada semua DPP/DPC PDI seluruh Indonesia.

61 *Ibid.* Sanusi menegaskan bahwa hal tersebut sebagai bukti dari sikap “demokratis” dan “toleran” dari pihaknya.

62 Dalam mendiskusikan terpilihnya Isnaeni, banyak media massa yang mencemaskan kemungkinan sikap kaku DPP Sanusi. Mereka meminta agar Sanusi dengan jiwa besar menerima fakta terpilihnya Isnaeni dengan cara mengakui dan mengukuhkannya. Ini diyakini sebagai cara terbaik. Lihat, misalnya, *Merdeka*, 15 Oktober 1977.

63 Lihat, misalnya, pernyataan pers Ipik Asmasubrata seperti dikutip *Merdeka*, 11 Oktober 1977; lihat juga pernyataan serupa dari Marsoesi seperti dikutip *Kompas*, 12 Oktober 1977.



PDI kepada Presiden guna menyusun DPP baru.<sup>64</sup> Tuntutan di atas, secara tersirat mengandaikan bahwa sumber kemelut PDI adalah di dalam tubuhnya sendiri. Namun, bagi pihak lain, yang lebih memercayai variabel di luar kandang Sang Banteng sebagai sumber kemelut, solusinya bermuara ke arah lain.<sup>65</sup>

Usulan KLB, betapa pun rasionalnya serta betapa pun diinginkan pihak Sanusi sendiri, bahkan oleh banyak pengamat,<sup>66</sup> tidak dapat diterima begitu saja oleh kubu Sanusi-Usep. Hadirnya figur Ipik Asmasoebrata dan Marsoesi yang selama ini dikenal sebagai "corong" yang membahasakan kepentingan Isnaeni-Sunawar sebagai pengusul adanya KLB adalah kendala utama. Dalam pemahaman kubu Sanusi-Usep, usul kongres merupakan bagian dari strategi kubu Isnaeni-Sunawar. Karenanya, memasuki arena ini sama maknanya dengan bermain seturut strategi musuh.

Untuk menghindari tidak bermain sesuai skenario kubu lawan, penyelesaian internal lewat rapat DPP ditawarkan sebagai alternatif oleh kubu Sanusi-Usep. Tetapi skenario ini berakhir dengan penolakan kubu Sukarmadidjaja-Nasution.<sup>67</sup> Bagi kubu Sukarmadidjaja "suatu rapat DPP PDI sama sekali

---

64 Ibid. Pernyataan pers Ipik yang mengajukan alternatif ini bila KLB gagal diselenggarakan.

65 Lihat, misalnya, surat A. P. Batubara yang mengatasnamakan tokoh muda/generasi penerus PDI DKI Jaya, 18 Oktober 1977. Surat yang meminta untuk menertibkan "oknum-oknum" yang dengan sengaja melibatkan diri dan bahkan mendorong kemelut PDI ini dialamatkan kepada Kaskopkamtib.

66 Lihat, misalnya, *Merdeka*, 15 Oktober 1977. Harian ini menegaskan, "tidak ada logika lain yang lebih rasional pada DPP PDI selain mempersiapkan diri untuk menyelenggarakan Kongres". Pendapat semacam ini lazim berkembang kala itu.

67 Undangan dan laporan ini ditampik Nasution melalui sebuah nota bertanggal 7 November 1977; serta oleh Sukarmadidjaja melalui surat pada 8 November 1977. Nota dan surat dua anggota DPP ini ditujukan kepada Sekjen DPP PDI.

tidak ada guna dan artinya lagi".<sup>68</sup> Ketika politik sudah dibaca dalam makna hitam/putih seperti ini, bisa diperkirakan semua kemungkinan penyelesaian internal di tingkat DPP menjadi mentah. Imbauan terbuka<sup>69</sup> banyak kalangan, juga tidak cukup berwibawa untuk memaksa masing-masing pihak yang bersengketa mengekang naluri saling membunuh mereka. Karenanya, jabat tangan perdamaian semakin jauh terbang ke dunia mimpi.

### **B. *Reshuffle: Petarungan Para "Pendekar"***

Tertutupnya saluran dialog antara sesama anggota DPP PDI hanya punya makna tunggal: stagnasi upaya penyelesaian kemelut yang sudah mencapai fase krisis. Stagnasi ini tiba-tiba mencair secara cepat ketika krisis intern mencapai batas ambang toleransi yang ditandai dengan dikeluarkannya "*Ketetapan Reshuffle DPP PDP*" oleh Sukarmadidjaja. *Ketetapan Reshuffle* ini disakralkan Sukarmadidjaja dengan cara memproklamasikan dirinya sebagai "*Pemrakarsa dan Pengemban Amanat Para Mandataris Partai-Partai yang Berfusi dalam PDI*",<sup>70</sup> suatu lembaga yang bukan saja tidak dikenal dalam AD/ART PDI, tapi sekaligus tidak pernah eksis selama proses panjang menuju fusi. *Ketetapan* ini juga ditandatangani dua orang Ketua DPP, masing-masing M. Nasution (MURBA) dan Notosukardjo (PNI); serta dua orang Wakil Sekjen, A. Siswojo (PNI) dan Tagor (IP-KI).<sup>71</sup>

*Ketetapan Reshuffle* yang dikeluarkan pada tanggal

---

68 Lihat, Nota Nasution ..., *Ibid.*

69 Lihat "Surat terbuka" kepada semua anggota DPP yang disampaikan oleh PARKINDO dan Partai Katolik, 10 November 1977. Secara pokok surat ini meminta semua pihak untuk menyadari kembali keberadaan PDI sebagai alat perjuangan.

70 Lihat "*Ketetapan Reshuffle*", *Op.cit.*

71 *Ibid.*

25 November 1977 dan diliput luas media massa ini,<sup>7272</sup> menempatkan "kebijaksanaan DPP PDI, cq. Sanusi-Usep, yang dipandang menjurus ke arah yang membahayakan kelangsungan PDI"<sup>73</sup> pada pusaran dalih. Di atas rumusan yang longgar ini, serangkaian "dosa" Sanusi-Usep kemudian dideretkan. Ini dimulai dari adanya berbagai tindakan penyelewengan, seperti manipulasi ketetapan MPP 11 April 1976; pencalonan anggota DPR yang tidak demokratis; tidak adanya petunjuk dalam kampanye Pemilu bagi daerah-daerah; praktik sepihak; keputusan tanpa rapat DPP; serta pengelolaan organisasi dan administrasi yang bersifat tertutup; dan berakhir dengan penilaian atas kekalahan PDI dalam Pemilu sebagai produk dari sikap Sanusi yang tidak jelas kebijakannya, konfrontatif, dan pendekatan ke pihak yang berwenang tidak meyakinkan. Polarisasi politik dan penggunaan metode "menghalalkan segala cara", juga muncul sebagai dosa-dosa politik prinsipial yang dilakukan DPP Sanusi-Usep.<sup>74</sup>

Dengan segerobak dosa politik yang dibuat Sanusi-Usep di atas, dan diimbui keyakinan kubu Sukarmadidjaja akan tanggung-jawab besar menyongsong Sidang Umum MPR, tidak berfungsinya DPP, serta tidak mungkin diselenggarakannya kongres, maka tokoh ini menempuh langkah *Reshuffle* sebagai "jalan penyelamatan". Rute ini, menurutnya, cukup relevan secara yuridis organisatoris karena mendasarkan diri pada ketetapan MPP 11 April 1976.<sup>75</sup>

Yang mengesankan dari langkah *Reshuffle* tokoh utama IP-KI ini adalah bahwa ia tidak ditargetkan kepada anggota

---

72 Lihat, misalnya, *Antara*, 25 November 1977, *Merdeka*, 26 November 1977 yang memuat "Ketetapan Reshuffle" DPP PDI sesuai dengan yang disampaikan oleh John Pakan dalam konferensi persnya.

73 Lihat, "Ketetapan Reshuffle", *Op.cit.*

74 *Ibid.*

75 *Ibid.*

DPP dari kubu sendiri (IP-KI), tapi dirancang justru untuk menyingkirkan para anggota DPP PDI asal eks unsur PNI yang berseberangan dengan kubunya. Sanusi, Usep, Madjid, Djakse, Radja Mas, Soelomo, dan M.T. Siregar, kesemuanya dari PNI, diwajibkan dalam Ketetapan Reshuffle Sukarmadidjaja untuk menyingkir dari arena kepemimpinan PDI, digantikan oleh Isnaeni, Sunawar, Hardjanto, Marsoesi, Siswojo—sebelumnya adalah salah satu Wasekjen DPP PDI yang “dinaikkan” menjadi Ketua — Adi Pranoto, S. Adiwidjaja dan Soetjipto M.<sup>76</sup>

Kubu Sanusi-Usep tidak dapat membenarkan dan menerima tindakan Sukarmadidjaja yang dinilai, “*a-demokratis dan inkonstitusional*”,<sup>77</sup> bahkan telah “*merampas kedaulatan kongres*”.<sup>78</sup> Urut-urutan logika “kemarahan” kubu Sanusi-Usep di atas bisa dimaklumi karena salah satu keputusan *Reshuffle* yang penting adalah bahwa DPP PDI susunan lama dinyatakan tidak ada lagi, sedangkan DPP susunan baru setelah *Reshuffle* bertindak selaku *caretaker*.<sup>79</sup> Hal ini tidak dapat ditafsirkan lain oleh pihak Sanusi kecuali merupakan “peniadaan DPP hasil kongres”,<sup>80</sup> yang bermakna bahwa Sukarmadidjaja telah melewati dan sekaligus menyubordinasikan kewenangan Kongres di bawah kewenangannya. Reaksi keras turut dilontarkan kubu PARKINDO-Partai Katolik sebagai sekutu tradisional Sanusi-

---

76 Lihat, Lampiran I Ketetapan Reshuffle ..., *Ibid.*

77 Lihat, misalnya, “Press release Ketua Umum DPP PDI”, 25 November 1977, yang juga diedarkan ke daerah-daerah. Pengedaran ke daerah-daerah ini dimaksudkan sebagai pegangan bagi daerah-daerah dalam menghadapi kasus *reshuffle*. Lihat pula “Penjelasan dan Pernyataan” anggota DPP PDI asal eks unsur PNI, 29 November 1977. Penjelasan dan pernyataan ini ditandatangani oleh 7 dari 9 anggota DPP PDI asal eks unsur PNI: Sanusi, Usep, Madjid, Radja Mas, Djakse, Soelomo, dan M.T. Siregar. Lihat juga *Merdeka*, 26 November 1977, dan *Antara*, 26 November 1977.

78 Penjelasan dan Pernyataan, ... *Ibid.*

79 Lihat, Ketetapan Reshuffle, ... *Op.cit.*

80 Pernyataan dan Penjelasan, ... *Op.cit.*

Usep,<sup>81</sup> anggota DPP PDI asal PNI di luar Notosukardjo dan Siswojo,<sup>82</sup> daerah-daerah,<sup>83</sup> generasi muda,<sup>84</sup> serta *slagorde* PNI lainnya.<sup>85</sup> Sebaliknya, dukungan bagi kubu DPP Reshuffle pun tidak sedikit, baik dari kalangan DPP PDI,<sup>86</sup> daerah-daerah, maupun generasi muda dan *slagorde* PNI/PDI.<sup>87</sup> Suatu hal yang menarik, sekaligus tragis dalam kasus ini adalah, semakin terpolarnya daerah dan seluruh jajaran PDI dalam kutub-kutub yang saling bertolak belakang. Akibatnya, *Reshuffle* yang dibayangkan pemrakarsanya sebagai instrumen kebijaksanaan

- 
- 81 Lihat, pernyataan PARKINDO dan Partai Katolik, 25 November 1977, yang "tidak membenarkan usaha reshuffle, karena melangkahi keputusan kongres, serta AD/ ART PDI" dan menilai langkah kubu Sukarmadidjaja itu sebagai "perbuatan politik yang bertentangan dengan demokrasi". Pernyataan ini ditandatangani oleh 12 orang anggota DPP asal PARKINDO-Partai Katolik. Lihat pula *Antara*, 27 November 1977; *Merdeka*, 27 November 1977, serta; *Berita Buana*, 28 November 1977. PARKINDO- Partai Katolik bukan saja tidak mengakui Reshuffle dengan tetap mendukung DPP hasil Kongres I, tetapi sekaligus menolak pencantuman nama mereka dalam DPP versi Resuffle.
- 82 Lihat Pernyataan dan Penjelasan dari anggota DPP PDI asal PNI, *Op.cit.*, juga *Kompas*, 29 November 1977.
- 83 Dukungan, misalnya, datang dari DPD DKI Jaya, Sulsel, Irja, dan Jawa Barat. Lihat *Sinar Harapan*, 29 November 1977, dan *Berita Buana*, 3 Desember 1977.
- 84 Misalnya "Kelompok Salemba Raya 1973" yang "mendukung konstitusi", lihat *Merdeka*, 8 Desember 1977; "Generasi Baru Indonesia 1977" yang mengirim karangan bunga kepada Isnaeni sebagai simbol "telah matinya demokrasi dalam PDI", *Merdeka*, 1 Desember 1977; "Kelompok Generasi Muda PDI" (74 orang) yang menegaskan "bukan mendukung person-person, tapi putusan kongres", *Kompas*, 2 Desember 1977; "Generasi Muda Indonesia" yang menilai *reshuffle* sebagai "pengeruhan kehidupan Demokrasi Pancasila", *Kompas*, 2 Desember 1977.
- 85 Misalnya dari "fungsionaris ormas-ormas PNI" yang terdiri dari GSNI, GMNI, LKN, dan Petani. Dalam rapat mereka, 5 Desember 1977, ormas-ormas di bawah payung perlindungan PNI di masa lalu ini meskipun mengklaim diri "tidak memihak", tetap mengungkapkan pemihakan mereka "pada tegaknya demokrasi konstitusional partai". Lihat *Sinar Harapan*, 6 Desember 1977.
- 86 Misalnya dari IP-KI dan MURBA, serta Notosukardjo dan Siswojo.
- 87 Misalnya Sumsel, DKI, Sulut, Aceh. Lihat, *Suara Karya*, 5 Desember 1977. Dukungan juga datang dari "Kelompok Generasi Muda Bandung", *Merdeka*, 8 Desember 1977.

politik guna “menjamin keutuhan dan kekuatan partai”, telah berubah menjadi bencana yang memporak-porandakan seluruh bangunan politik PDI yang sudah sangat rapuh.

Di antara dentuman suara perang pernyataan yang terus membahana, DPP Sanusi berusaha “menjelaskan” kepada dan sekaligus “meminta dukungan dan perlakuan yang adil” dari pusat-pusat kekuasaan politik penting dalam Negara. Ini diupayakan lewat surat yang ditujukan kepada Menhankam,<sup>88</sup> Kapolri,<sup>89</sup> Mendagri,<sup>90</sup> Kaskopkamtib,<sup>91</sup> Ketua MA,<sup>92</sup> dan Kabakin.<sup>93</sup> Dalam surat ke organ-organ penting negara di atas, DPP Sanusi, antara lain, mengedepankan: adalah hal yang wajar bagi kehidupan suatu organisasi untuk senantiasa mendasarkan diri kepada AD/ART, sama wajarnya dengan—setelah berakhirnya kongres—penggunaan produk-produk kongres dan bukan keputusan sebelumnya sebagai dasar hukum dari suatu tindakan. Dua hal ini menurut kubu Sanusi, telah dilanggar kubu Sukarmadidjaja.<sup>94</sup> Karenanya, dengan berbagai pertimbangan, terutama, karena adanya pelanggaran terhadap keputusan kongres, tidak dikenal dan diaturnya

- 
- 88 Surat No. 399/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 89 Surat No. 400/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 90 Surat No. 394/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 91 Surat No. 398/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 92 Surat No. 397/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 9 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 93 Surat No. 401/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 9 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.
- 94 Secara pokok, surat-surat di atas diawali dengan penjelasannya mengenai hal ini.

lembaga *reshuffle* dalam AD/ART PDI,<sup>95</sup> dan fakta bahwa 19 dari 29 anggota DPP PDI menolak tindakan *reshuffle* serta empat anggota dari yang tersisa belum menentukan sikapnya,<sup>96</sup> maka DPP Sanusi menyatakan sikapnya: tindakan Sukarmadidjaja adalah a-demokratis, in-konstitusional, serta tidak sah.<sup>97</sup> Demikian pula, klaim Sukarmadidjaja sebagai "pengemban amanat para mandataris partai-partai yang berfusi dalam PDI" dipertanyakan,<sup>98</sup> karena menurut Sanusi masalah "mandataris" dan penetapan seseorang atau beberapa orang sebagai "mandataris" partai-partai yang berfusi, tidak pernah terdengar sebelum dan selama berlangsungnya Kongres I.<sup>99</sup>

Dengan alasan-alasan di atas, secara otomatis DPP hasil *reshuffle* merupakan DPP yang "tidak sah".<sup>100</sup> Berangkat dari logika di atas, kubu Sanusi meminta agar pihak-pihak yang dituju surat DPP PDI agar tidak dapat dan tidak boleh membenarkan DPP Isnaeni, bahkan harus melarangnya. Bagi kubu Sanusi, kebutuhan akan hal itu semakin mendesak, justru karena DPP Isnaeni mulai menghubungi daerah-daerah, yang dikhawatirkan kubu Sanusi akan lebih menggoncangkan daerah-daerah.<sup>101</sup> Bagi kubu Isnaeni, tindakan *reshuffle* punya makna sebaliknya: secara esensial ia merupakan tindakan

---

95 Lihat, misalnya, surat DPP PDI yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, *Op.cit.* Lihat pula, AD/ART PDI. Tidak satu pun pasal AD/ART yang mengatur mengenai ketentuan *reshuffle*.

96 Mereka yang menolak terdiri 6 anggota asal PARKINDO, 6 anggota asal Partai Katolik, 7 anggota asal PNI. Sedangkan yang belum menentukan sikapnya, masing-masing 2 anggota asal MURBA dan 2 anggota asal IP-KI.

97 Lihat, surat DPP PDI kepada Mendagri, ... *Op.cit.*

98 Lihat, misalnya, Penjelasan dan Pernyataan, ..., *Op.cit.*

99 *Ibid.* Di sini dijelaskan, di dalam Kongres I maupun pertemuan menjelang kongres, istilah "mandataris" tidak pernah terdengar. Juga disebutkan, tidak pernah ditetapkan seseorang atau beberapa orang sebagai "mandataris partai yang berfusi".

100 *Ibid.*

101 Surat DPP PDI kepada Menhankam dan Kapolri, *Op.cit.*

“koreksi”<sup>102</sup> karena, seperti dikedepankan Hardjantho—salah seorang yang diangkat sebagai Ketua DPP *Reshuffle*—keadaan sudah semrawut.<sup>102</sup>

Menurut Ketetapan *Reshuffle* itu, tugas pokok DPP baru hasil *reshuffle* adalah menyangkut:<sup>103</sup>

- *Segera membentuk MPP dan DEPERPU dan alat-alat kelengkapan organisasi seperti dimaksud dalam AD/ART,*
- *Menyelenggarakan kongres biasa pertama, selambat-lambatnya akhir tahun 1978,*
- *Mengadakan konsolidasi organisasi secepat-cepatnya sampai pada eselon basis untuk menjamin keutuhan dan kekuatan Partai, terutama perwujudan kemantapan fusi.*

Berdasarkan mandat di atas, DPP Isnaeni mulai membentuk MPP yang diagendakan untuk mengadakan rapat pada 18 - 20 Desember 1977 di Jakarta.<sup>104</sup> Hal ini mengundang reaksi DPP Sanusi yang melihatnya sebagai “*usaha mencari legalitas untuk menopeni tindakan-tindakan mereka yang jelas-jelas tidak ilegal.*” Lebih jauh, DPP Sanusi menganggap penyelenggaraan Kongres MPP sebagai ekspresi dari pola pemikiran yang hendak menyelewengkan kepribadian dan struktur PDI dari semangat yang terkandung dalam UUD 1945.<sup>105</sup> Alasan-alasan penolakan atas MPP bentukan DPP Isnaeni, juga coba diramu kubu Sanusi dengan menyoroti proses pembentukannya yang dinilai

---

102 Pernyataan pers Hardjantho, seperti dikutip *Berita Buana*, 28 November 1977. Ia menegaskan, “reshuffling DPP PDI dibenarkan, karena situasinya sudah kacau”.

103 Ketetapan *Reshuffle*, ..., *Op.cit.*

104 Anggota MPP berjumlah 120 orang. MPP ini menyelenggarakan rapatnya di Hotel Marcopolo, Jakarta.

105 Naskah keterangan pers DPP PDI, “Kepribadian dan Struktur PDI diselewengkan dari UUD 1945 oleh apa yang menamakan dirinya DPP Isnaeni-Sunawar”, 23 Desember 1977. Lihat pula *Pelita*, 24 Desember 1977.



"mengabaikan kedaulatan DPC-DPC",<sup>106</sup> karena tidak disertai utusan-utusan Cabang yang dipilih oleh Konpercab.<sup>107</sup> Peluang ke arah pembentukan MPP di atas sebenarnya mendapatkan pembenaran empiris karena DPP Sanusi telah melakukan kesalahan politik, yakni tidak merealisasikan perintah kongres untuk membentuk MPP, serta alat kelengkapan organisasi lainnya seperti yang terkandung dalam AD/ ART, padahal sudah hampir mencapai satu setengah tahun. Kelengahan atau kesengajaan ini, akhirnya menjadi salah satu titik lemah DPP Sanusi yang secara maksimal dieksploitir kubu Isnaeni.<sup>108</sup> Dan yang lebih mendasar lagi, hal di atas menjadi mungkin karena kuatnya dukungan kekuatan ekstrapartai yang masih belum juga mampu melapukkan Usep secara politik, padahal cukup banyak waktu dan tenaga telah dicurahkan untuk itu.

Penolakankubu Sanusi-Usep atas rencana penyelenggaraan rapat MPP hadir dalam berbagai raut, termasuk mengirimkan surat keberatan kepada Kaskopkamtib,<sup>109</sup> Kapolri,<sup>110</sup> dan Mendagri.<sup>111</sup> Rapat yang mengambil tempat di Hotel Marcopolo ini, seperti mudah diperkirakan, sekaligus berfungsi sebagai

---

106 Lihat tulisan A. Madjid, *Hakikat Utama MPP*, 14 Desember 1977, dan Keterangan pers DPP PDI, Kepribadian dan Struktur..., *Ibid.* Lihat surat DPP PDI kepada DPD/DPC PDI seluruh Indonesia, No. 346/IN/D/DPP/XII/1977, tanggal 22 Desember 1977, tentang "Apa yang dinamakan MPP PDI adalah tidak sah"

107 adjid, "Hakikat utama", ..., *Ibid.*

108 Lihat pernyataan pers Isnaeni seperti dikutip *Pelita*, 1 Desember 1977. Disebutkan, satu setengah tahun sudah usia DPP Sanusi, tapi belum juga mampu membentuk MPP. Karenanya, PDI mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah partai yang bersifat nasional. Isnaeni juga menyebutkan ketidakjelasan departemen-departemen sebagai organ untuk melancarkan putaran roda organisasi.

109 Surat DPP PDI No. 398a/EX/C/DPP/XII/1977, 13 Desember 1977, tentang "keberatan atas penyelenggaraan MPP oleh apa yang dinamakan DPP Reshuffle".

110 *Ibid.*, dengan No. 400a/EX/C/DPP/XII/1977.

111 *Ibid.*, dengan No. 394a/EX/C/DPP/XII/1977.

forum untuk “mengadili DPP Diponegoro” (DPP Sanusi). Karenanya, Madjid memberinya label sebagai “peradilan yang biadab”.<sup>112</sup> Namun, penilaian semacam ini tidak mengurangi semangat saling membunuh di antara kedua kubu, sekaligus sebaliknya, ia berfungsi sebagai kekuatan yang efektif bagi masing-masing kubu menemukan alasan-alasan pembenar yang lebih canggih lagi, bukan saja dalam rumusan, tapi juga dalam daya membunuhnya. Dalam hal ini, ternyata kubu Isnaeni jauh lebih imajinatif, dibuktikan dari kemampuannya untuk dengan mudah dan cepat menemukan alasan yang *powerful* guna melegitimasi langkah *Reshuffle*. Penyimpangan terhadap “Empat Strategical Points” oleh kubu Sanusi-Usep, tiba-tiba menghadirkan diri sebagai rumusan ideologis yang menakutkan, karena secara politik-ideologis telah menempatkan kubu Sanusi dalam posisi sebagai “lawan Orde Baru”. “Empat Strategical Points” ini adalah:<sup>113</sup>

- *Mempertahankan Pancasila dan UUD 1945,*
- *Melanjutkan perjuangan Orba,*
- *Menerima Dwi fungsi ABRI dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat banyak,*
- *Menyatukan diri/mendukung kepemimpinan Jenderal Soeharto.*

Terebih lagi, masih menurut kubu Isnaeni, “penyimpangan” atas empat hal di atas diikuti sikap politik Sanusi-Usep serta kekuatan Kristen-Katolik yang menopangnya, yang mendukung “Demokrasi Liberal”.<sup>114</sup> Karenanya, Isnaeni merasa berkewajiban

---

112 Wawancara penulis dengan Madjid, *Op.cit.* Disebutkan, pada waktu pertemuan dengan Kabakin, Desember 1977, ia menegaskan bahwa rapat DPP/MPP Marcopolo merupakan “peradilan yang biadab”.

113 Lihat “Bahan-bahan untuk Briefing” yang dibuat oleh Isnaeni, tanpa tanggal pembuatan.

114 *Ibid.*

“menyelamatkan” empat poin strategis di atas dari kemurtadan kubu Sanusi-Usep-Kristen-Katolik.<sup>115</sup> Bagi kubu Sanusi-Usep, klaim kubu Isnaeni dibaca sebagai “alat memfitnah” yang dipergunakan Isnaeni untuk “menonjolkan diri sebagai pahlawan”. Dan karena Presiden tidak pernah membekukan DPP PDI,<sup>116</sup> hal ini dimengerti kubu Sanusi-Usep sebagai bukti tentang tidak pernah adanya penyimpangan terhadap “empat strategical point”—yang merupakan butir-butir konsensus nasional—seperti yang diyakini kubu Isnaeni.

*Reshuffle* berikut rangkaian aktivitas yang mengekorinya dan yang melahirkan krisis internal ini, sulit dilepaskan dari adanya campurtangan rezim. Kalaupun tidak secara kelembagaan, beberapa tokoh teras di pusat-pusat kekuasaan (eksekutif) ikut mem-*back-up* dan membenarkan langkah-langkah kubu Isnaeni-Sukarmadidjaja, termasuk Sunawar. Sejumlah dokumen,<sup>117</sup> spekulasi yang merebak di masyarakat,<sup>118</sup> pemberitaan intens TVRI atas aktivitas serta pandangan-pandangan kubu Isnaeni-Sunawar, serta, yang terpenting, pernyataan kesediaan Wakabakin Ali Murtopo, untuk memberikan pidato politik pada HUT PDI yang akan diselenggarakan kubu Isnaeni-Sunawar,<sup>119</sup> adalah indikator-indikator yang sekalipun masih sangat kasar, tapi cukup kuat untuk mendukung spekulasi di atas. Betapa pun,

---

115 *Ibid.*

116 *Ibid.*

117 Lihat, misalnya, “Usaha penyelesaian Kemelut PDI” yang dibuat kubu PARKINDO-Partai Katolik, 12 Desember 1977. Dokumen ini mensinyalir “adanya sementara kalangan Pemerintah yang memberi angin gerakan Akhmad Sukarmadidjaja-Isnaeni-Sunawar”.

118 Hal ini terungkap, misalnya, lewat spekulasi wartawan yang menanyakan kepada Soejono Humardani tentang kebenaran isu keterlibatannya sebagai “dalang reshuffle”. Lihat, *Merdeka*, 7 Desember 1977.

119 Artikel dalam *Merdeka*, 4 Januari 1978, yang mewartakan kesediaan Ali Murtopo untuk memberikan pidato politik dalam HUT PDI yang akan diselenggarakan 17 Januari 1978. Disebutkan juga bahwa kesediaan tersebut atas “restu Presiden”.

dua hal terakhir di atas sulit ditafsirkan lain kecuali sebagai raut dukungan terhadap DPP Isnaeni. Kubu Sanusi, karena merasa dirugikan pemberitaan TVRI, secara resmi mengajukan “protes” kepada direktur TVRI dan Menteri Penerangan.<sup>120</sup> Dukungan terselubung elite penggenggam kekuasaan atas DPP Isnaeni, di satu sisi, menempatkannya pada posisi lebih menguntungkan untuk ofensif, tapi di sisi lain, memunculkan keraguan akan keabsahan alasan-alasan yang melandasi tindakan *Reshuffle*. Ini bisa dilihat dari meluasnya spekulasi terjadinya “konsensus-konsensus terselubung” antara kubu Sukarmadidjaja-Isnaeni-Sunawar dengan pihak “sponsor” atau “dalang”, yang secara umum dikaitkan dengan “cacat pribadi”<sup>121</sup> atau ambisi.<sup>122</sup> Pada gilirannya, isu “konspirasi” karena “cacat pribadi” atau “ambisi” ini, dipakai sebagai “senjata” oleh kubu Sanusi-Usep guna mempertahankan diri dan sekaligus menyerang kubu lawan

---

120 Surat protes dengan No. 396/EX/C/DPP/XII/1977 kepada Menteri Penerangan dan No. 397 kepada Direktur TVRI. Disebutkan, pemberitaan aktivitas dan pandangan DPP PDI yang tidak sah, di samping ikut mempopulerkan DPP tak sah ini, juga mendidik rakyat untuk membenarkan dan mendukung tindakan-tindakan a-demokratis dan in-konstitusional. Kedua surat ini dikirim pada tanggal 30 November 1977.

121 Perkembangan konflik akhirnya memasuki wilayah cacat pribadi, dengan masing-masing pihak secara maksimal menelusuri kelemahan-kelemahan pribadi untuk nantinya diekspos secara luas. Sebagai contoh, Isnaeni disebut memiliki cacat sebagai tangan kanannya Subandrio, mantan Waperdam I era Orla. Tokoh yang sama juga disebutkan berumah di tubuh PNI sebagai “keruk nasi”-nya Hardi, yang tersingkir dalam Kongres PNI XII Semarang. Sunawar disebut sebagai bekas anggota Ormas PKI, SB Postel—untuk ini lihat pula *Harian Rakyat*, 4 November 1955, yang memuat daftar nama-nama peserta Kongres SB Postel dan Sunawar tercantum sebagai salah satu pesertanya. Hal ini dibenarkan oleh Sunawar, tetapi ia menegaskan bahwa ia telah keluar dari organisasi tersebut. Lihat *Angkatan Bersenjata*, 30 November 1978.

122 Sunawar, misalnya, digosipkan memendam ambisi untuk menjadi wakil presiden; wawancara penulis dengan Sanusi, *Op.cit.* Sementara Isnaeni memendam ambisi yang tak kalah besarnya, yakni ingin bercokol di posisi sebagai wakil ketua DPR/MPR.

yang juga terampil dalam menggunakan isu yang sama.<sup>123</sup>

Perkembangan kemelut PDI akhirnya menemukan persinggahan baru ketika perlombaan untuk membuktikan diri dan kubu sendiri sebagai "yang paling Orba" menjadi hukum-hukum wajib yang memagari dan mengaturi tingkah-laku politik masing-masing. Saling melabeli lawan sebagai Orla, Asu, anti-dwi fungsi ABRI, anti-Soeharto, dan sederetan atribut lain yang menyeramkan secara politik-ideologis, menjadi kelumrahan di antara kubu-kubu dan elite yang bertikai. PDI, di ujungnya, metampakkan diri sebagai anak haram yang mewarisi semua kemungkinan kebobrokan dan perangai buruk politik masa lalu, sekaligus menjadi sarang dari kemaksiatan, intrik dan ambisi politik. Fatalnya, hal-hal di atas justru merupakan buah fantasi masing-masing pihak yang saling bertikai.

Dengan hadirnya DPP PDI Kongres I (Sanusi-Usep) dan juga adanya DPP *Reshuffle* (Isnaeni-Sunawar), maka DPP PDI secara substantif dan organisatoris terpecah ke dalam dua kutub yang saling mengklaim keabsahan. PARKINDO-Partai Katolik, karena bersikukuh tidak menyeberang ke DPP Isnaeni-Sunawar, tiba-tiba menemukan dirinya penuh ditemplei label-label, semisal tidak nasionalis, tidak rela berfusi, ingin menguasai PDI dengan cara mendukung pemimpin yang lemah, dsb.<sup>124</sup> Label-label ini, merangsang imajinasi kubu PARKINDO-Partai Katolik untuk percaya bahwa "memang pada dasarnya Sunawar hanya menghendaki PDI berintikan PNI-IPKI-MURBA saja".<sup>125</sup> Dengan

---

123 Usep diisukan anti dwi fungsi ABRI, sementara Sanusi digosipkan terlibat dalam gerakan Sawito dan sekaligus menggenggam impian yang sama dengan Sunawar di benaknya, yakni ingin menjadi wakil presiden.

124 Isu-isu serupa praktis menjadi bagian dari keseharian elite PDI di era ini. Lihat, misalnya, "Bahan-bahan untuk briefing" ..., *Op.cit.*

125 Lihat pernyataan pers Simatupang seperti dikutip *Sinar Pagi*, 24 Desember 1977. Hal ini kembali dikuatkannya ketika diwawancarai penulis. Lihat juga pernyataan pers Usep seperti dikutip *Pelita*, 14 Desember 1977, dan *Sinar Pagi*, *Ibid.*

ini sengketa lama antara PARKINDO-Partai Katolik versus Isnaeni-Sunawar di sekitar keinginan PARKINDO-Partai Katolik yang tak pernah terealisasi untuk membentuk partai sendiri di luar PDI<sup>126</sup> dan keengganan Sunawar menerima keduanya kembali menemukan momentum. Keinginan membentuk parpol ini, uniknya, ditafsirkan secara taksa oleh kubu Isnaeni-Sunawar: sebagai “bukti ketidaksediaan berfusi”, tapi sekaligus sebagai usaha penyingkiran secara persuasif atas keduanya oleh Usep. Dan Usep, dalam imajinasi kubu Isnaeni-Sunawar, adalah figur yang menyarankan agar PARKINDO dan Partai Katolik meniti rute mendirikan parpol sendiri, dengan alasan kekuatan Islam diberi kesempatan tersebut.<sup>127</sup>

### C. DPP 16 Januari: Menjaring Kemustahilan

Seminggu selepas Ketetapan Reshuffle diproklamkan Sukarmadidjaja, DPP Sanusi mencoba menawarkan “penyelesaian damai”, terutama bagi anggota DPP. Ini berawal dengan imbauan terbuka kepada anggota DPP yang “telah menimbulkan musibah” agar kembali ke pelukan DPP PDI.<sup>128</sup> Suatu langkah lunak,<sup>129</sup> terutama, karena memprioritaskan persatuan kesatuan dan stabilitas menjelang SU MPR. Selepasnya, “tindakan peringatan”<sup>130</sup> dimunculkan, tapi tak satu pun yang membuahkan tanggapan, kecuali dalam makna

---

126 Rencana ini diungkapkan oleh surat dari kedua kekuatan ini yang direncanakan akan disampaikan kepada presiden, Desember 1977.

127 Hal ini terungkap dalam “Kemelut Fusi PDI” yang tidak diketahui sumber dan tanggal pembuatannya

128 Lihat, bahan Konferensi pers DPP PDI, 1 Desember 1977.

129 Langkah ini dikategorikan lunak, terutama bila implikasi yang telah ditimbulkan oleh tindakan *reshuffle* ikut dikalkulasi. Apalagi, cukup banyak pihak yang meminta kubu Sanusi mengambil langkah lebih drastis berupa tindakan penegakan disiplin partai yang memang sah menurut konstitusi PDI.

130 Lihat “Konsep Penyelesaian Kemelut PDI” yang dibuat oleh PARKINDO-Partai Katolik, 3 Desember 1977; dan lihat *Kompas*, 2 Desember 1977.

negatifnya karena kubu Sukarmadidjaja-Isnaeni-Sunawar "merasa tidak terikat"<sup>131</sup> dan bahkan memandangnya sebatas "lelucon".<sup>132</sup> Tanggapan ini oleh kubu Sanusi-Usep diamini sebagai sesuatu yang "semakin memperjelas petualangan politik tak senonoh keduanya, yang ingin meniadakan DPP PDI hasil Kongres P'.<sup>133</sup> Dengannya, ruang bagi kemungkinan penyelesaian damai atas inisiatif sendiri menjadi tertutup. Yang tersisa kemudian adalah adanya kesediaan pihak luar bertindak sebagai penengah. Tanda-tanda ke arah ini mulai metampakkan titik-titik terang setelah Wilopo, salah seorang tokoh senior PNI, atas permintaan banyak pihak menyanggupi diri sebagai juru damai.<sup>134</sup> Optimisme dan kegembiraan banyak muncul menandai kesediaan Wilopo ini,<sup>135</sup> tapi tetap ada pesimisme.<sup>136</sup>

Kubu-kubu yang berseteru secara spontan mengamini kesediaan Wilopo sebagai alternatif penyelesaian yang mungkin dapat menyelamatkan keadaan. Modal awal ke arah

---

131 Pernyataan pers Isnaeni seperti dikutip *Merdeka*, 3 Desember 1977, mengungkapkan ketidakterikatannya pada tindakan peringatan organisatoris DPP Sanusi. Di samping itu Isnaeni juga menegaskan, "penindakan dengan hukuman peringatan terhadap fungsionaris DPP Reshuffle, tidak sederhana, tanpa memperhatikan keputusan-keputusan kongres dan MPP 12 April 1976".

132 Pernyataan pers Sunawar, seperti dikutip *Merdeka*, 5 Desember 1977 dan *Kompas* di hari yang sama. Sunawar mengungkapkan hal ini dalam bahasa Sunda, "eta mah bododoran (itu sih lelucon)".

133 *Merdeka*, 5 Desember 1977.

134 Lihat *Merdeka*, 1 Desember 1977; *Kompas*, 8 Desember 1977. Kesediaan Wilopo, salah satu sesepuh PNI dan sekaligus Ketua DPA ini, merupakan hasil inisiatif Adam Malik (Ketua DPR-MPR).

135 Sanusi, Usep, Sabam, Djakse, Madjid, dan Isnaeni secara bersamaan menyatakan kegembiraan atas kesediaan Wilopo, dalam *Kompas*, 8 Desember 1977, dan *Sinar Harapan*, 1 Desember 1977.

136 Pesimisme tampak dari tanggapan Sunawar. Menurutnya, "perbedaan pola politik" antara kedua kubu ini akan menyulitkan Wilopo mempertemukan keduanya. Bahkan, masih menurut Sunawar, akan menyusahkan Wilopo sendiri, apalagi dalam usia yang telah lanjut. Wawancara Sunawar dengan *Kompas*, 8 Desember 1977.

penyelesaian sudah tersedia, apalagi keduanya sama-sama mengakui pentingnya kerukunan antarmereka dan sama-sama memosisikan penyelesaian yang ada bukan saja harus dapat diterima kubu PNI, tapi juga unsur-unsur lain dalam PDI.<sup>137</sup> Namun, kesulitan segera mengintip karena persoalan yang menyangkut “atas dasar apa penyelesaian mesti dilakukan” muncul sebagai kendala mendasar. Pihak Sanusi—lewat Sanusi sendiri beserta Usep, Djakse, Wenas, Sabam, dan Madjid—menghendaki konstitusi partai, AD/ART, dan Keputusan-Keputusan Kongres I, sebagai pijakan. Sementara kubu Isnaeni-Sunawar menghendaki forum MPP bentukannya karena diyakini sebagai “yang paling representatif untuk menyelesaikan segala perbedaan yang ada”.<sup>138</sup> Pola penyelesaian dengan landasan yang bertabrakan ini menyulitkan posisi Wilopo karena yang mana pun yang dipakai pasti ditolak salah satu kubu, karena pilihan-pilihan yang tersedia mengandung pengingkaran sekaligus pemihakan terhadap salah satu kubu.

Di antara kesulitan yang dihadapi, dua tahap dirancang Wilopo guna mempertemukan kubu Isnaeni-Sunawar dengan Sanusi-Usep. Tahap pertama dimulai dengan mengadakan pertemuan terpisah kedua kubu yang tidak dihadiri Sunawar, sekalipun surat sudah dikirimkan Wilopo.<sup>139</sup> Dalam pertemuan dengan kubu Sanusi, telah dicapai sejumlah titik temu. Akan tetapi dalam pertemuan dengan kubu Isnaeni, walaupun peta permasalahan telah dapat dipahami Wilopo, forum belum bisa beranjak jauh, terutama, karena belum disepakatinya permintaan Wilopo agar rencana rapat MPP ditangguhkan. Wilopo memperhitungkan, apabila rapat MPP diteruskan, akan

---

137 Untuk jelasnya lihat rangkaian wawancara *Kompas* dengan tokoh-tokoh kedua kubu pada edisi 8 Desember 1977.

138 *Ibid.*

139 Keterangan pers Wilopo dalam *Merdeka*, 8 Desember 1977, dan *Kompas*, 8 Desember 1977.



timbul kesulitan,<sup>140</sup> sementara kubu Isnaeni-Sunawar tetap bertahan dengan spekulasi bahwa PARKINDO-Partai Katolik akan menghadirinya. Spekulasi yang ternyata tidak terbukti, karena keduanya tidak bersedia hadir dalam rapat MPP sebagai ekspresi ketidaksetujuan atas lembaga dan rapat tersebut. Bagi pihak Isnaeni, MPP dipandang sebagai "cara yang simpel" untuk menyudahi kemelut dan krisis internal yang ada. Karenanya, tidak mungkin ditunda.<sup>141</sup>

Setelah pertemuan terpisah dengan masing-masing kubu, pada 10 Januari pertemuan antara kubu Sanusi-Usep dan Isnaeni-Sunawar yang diprakarsai Wilopo dapat dilaksanakan. Namun, pertemuan kali ini sebatas menghasilkan pesimisme, yang menyebabkan gagasan "menyerahkan kembali" ke presiden menjadi satu-satunya peluang yang disepakati. Kesulitan, ironisnya, justru berpangkal pada posisi Wilopo sebagai anggota DEPERPU kubu Sanusi.<sup>142</sup> Kehadirannya dalam rapat DEPERPU yang diselenggarakan Sanusi, membikin kubu Isnaeni-Sunawar memiliki alasan sah untuk meragukan kredibilitas Wilopo sebagai penengah yang dapat bertindak adil.<sup>143</sup> Marsoesi, salah satu Ketua DPP Isnaeni, bahkan secara terang-terangan menegaskan, "tidak perlu adanya penengah seperti Wilopo...", "MPP yang mempunyai wewenang penyelesaian, bukan Wilopo."<sup>144</sup> Posisi Wilopo semakin pelik karena pernyataan persnya yang menyebutkan Sukarmadidjaja sebagai pihak yang "menjalankan proyek perpecahan",<sup>145</sup> bukan

---

140 *Ibid.* Lihat juga *Merdeka*, 16 Januari 1978.

141 *Ibid.*

142 Wilopo sebenarnya sudah menjadi anggota DEPERPU PDI sejak awal berdirinya.

143 Pernyataan pers Isnaeni, dikutip *Suara Karya*, 4 Januari 1978. Ia mengungkapkan bahwa posisi Wilopo menyebabkannya sulit berfungsi sebagai penengah.

144 Pernyataan pers Marsoesi, dalam *Ibid.*

145 Pernyataan pers Wilopo, seperti dikutip *Kompas*, 8 Desember 1977.

saja menimbulkan reaksi keras kubu IP-KI yang menilainya “semakin memperuncing perpecahan”,<sup>146</sup> tapi juga semakin meyakinkan kubu Isnaeni-Sanusi bahwa Wilopo sedang bermain menurut skenario kubu Sanusi-Usep. Dengan ini, skenario perdamaian menembus kebuntuan dengan mengandalkan kewibawaan tokoh-tokoh internal PDI ini berakhir sebagai variabel yang semakin memperumit masalah. Karenanya, sekali lagi, seperti juga pada kisah-kisah sebelumnya, alternatif satu-satunya yang tersisa—dan tampaknya ini yang ditargetkan—adalah mengharapkan uluran tangan rezim sebagai juru damai.

Pemerintah, melalui Bakin, sejak awal kemelut sebenarnya telah “beringan-tangan” menemukan cara penyelesaian kemelut. Kehadiran beberapa petugas Bakin yang terus-menerus memonitor perkembangan upaya penyelesaian yang dilakukan Wilopo,<sup>147</sup> berikut rangkaian konsultasi pihak Bakin dengan masing-masing unsur, bisa dicatat sebagai indikasi ke arah ini. Namun, keterlibatan langsung baru dimulai setelah Wilopo menyerah.

Pertemuan antara Bakin dengan kubu-kubu sesama PNI yang bertikai melahirkan dua pola penyelesaian yang saling bertolak belakang. *Pertama*, pola yang menghendaki penyerahan seutuhnya pada Pemerintah—dan bisa diduga pola ini bersumber pada kubu Isnaeni-Sunawar—dan *kedua*, pola yang menghendaki penyelesaian melalui konstitusi partai.<sup>148</sup> Akibatnya, sejauh pertemuan yang dilakukan, belum juga dicapai kata sepakat di antara kubu Sanusi-Usep dan Isnaeni-

---

146 Reaksi keras dikeluarkan Tanri (IP-KI), salah seorang Ketua DPP Isnaeni. Lihat, *Suara Karya*, 4 Januari 1978.

147 Lihat “Usaha penyelesaian kemelut PDI...”, *Op.cit.*

148 Lihat surat PARKINDO-Partai Katolik kepada Presiden perihal “Penyelesaian Kemelut PDI”, 12 Januari 1978. Juga diperkuat wawancara penulis dengan Madjid, *Op.cit.*

Sunawar.<sup>149</sup>

Pertemuan Bakin dengan pihak PARKINDO-Partai Katobk, memunculkan tiga alternatif pola pemecahan yang berasal dari kedua kekuatan ini.<sup>150</sup> *Pertama*, penyelesaian berdasarkan konstitusi partai, khususnya Keputusan Kongres I nomor VI, dan lebih khusus lagi, mengenai “penyempurnaan DPP PDI”. Tiga langkah mendasar diajukan PARKINDO-Partai Katolik—pencabutan Ketetapan Reshuffle, mempertemukan faksi-faksi dalam PNI yang bertikai guna memusyawarahkan personalia di antara mereka, dan hasil musyawarah (guna memenuhi tertib organisasi) diajukan ke DPP PDI melalui Sanusi, untuk kemudian disetujui DPP PDI—sebagai keharusan. DPP inilah yang secara bersama-sama akan mempersiapkan rapat MPP sebagai forum untuk mengesahkan penyempurnaan DPP PDI. *Kedua*, penyelesaian melalui Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai Pasal 12 ayat (4) AD dengan ketentuan, kongres segera dilaksanakan (10 Januari 1978). Peserta KLB adalah DPC/DPD sebelum *Reshuffle* yang diwakili lima utusan. Pimpinan KLB adalah DPP Kongres I dan dipercayakan pada unsur PARKINDO-Partai Katolik dan diagendakan untuk membicarakan masalah tunggal, yakni penyelesaian kemelut DPP PDI. Komposisi DPP hasil KLB secara apriori harus disepakati bersama dengan DPP hasil Kongres I, kecuali Ketua Umum, yang harus disetujui bersama lima unsur. *Ketiga*, memberikan alternatif partai keempat bagi Isnaeni-Sunawar atau kelompok lainnya, kerangka alternatif ini ditawarkan untuk dipikirkan setelah SU MPR berakhir. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kekuatan

---

149 Wawancara dengan Madjid, *Ibid.*, menegaskan bahwa atas usul Adipranoto dari kubu Isnaeni, sempat tercetus keinginan untuk menempuh rute voting. Namun, cara ini tidak dikehendaki kubu Sanusi dan juga Kabakin. Voting dimunculkan karena perbedaan di antara kedua kubu sudah mustahil dipertemukan.

150 “Usaha Penyelesaian Kemelut PDI”, makalah yang diajukan PARKINDO-Partai Katolik dalam pertemuan dengan Bakin, 2 Januari 1978.

ini akhirnya mempercayakan sepenuhnya penyelesaian kepada pihak Pemerintah, dengan catatan agar tetap berpegang pada konstitusi partai.<sup>151</sup>

Di samping itu, pembersihan pembusukan politik, pengecualian semua tokoh yang bertikai sehingga tidak lagi duduk dalam DPP yang akan dibentuk,<sup>152</sup> atau penunjukan lima figur yang mewakili lima unsur yang difungsikan sebagai “formatur” guna membentuk DPP PDI yang mengecualikan tokoh kubu PNI dari posisi Ketua Umum<sup>153</sup> muncul sebagai alternatif-alternatif lain. Skenario terakhir penyelesaian kemelut yang dimunculkan adalah, semua tokoh yang bertikai mengundurkan diri dan mempercayakan pengelolaan PDI pada generasi muda.<sup>154</sup> Sanusi-Usep, tampaknya cukup siap menghadapi skenario terakhir ini. Keduanya tidak berkeberatan jika harus mengundurkan diri<sup>155</sup> sejauh Pemerintah dapat meyakinkan “dosanya” dan juga siap membicarakan kemungkinan pengunduran diri Usep, jika memang Pemerintah menghendaki

---

151 Lihat, surat PARKINDO-Partai Katolik kepada Presiden, “Penyelesaian Kemelut PDI”, Op.cit.

152 Juga dimunculkan kubu PARKINDO-Partai Katolik selepas pertemuan dengan Bakin. tampaknya banyak kalangan di luar PDI yang juga mempertimbangkan alternatif ini.

153 Lihat “Kemelut Fusi PDI” yang tampaknya juga berasal dari kubu PARKINDO-Partai Katolik. Alternatif ini ditawarkan sebagai pilihan terakhir apabila pihak-pihak yang bersengketa tidak mungkin dipertemukan lagi.

154 Usul ini banyak muncul dari kalangan generasi muda dan tokoh luar PDI. Lihat, misalnya, wawancara *Sinar Harapan* dengan Kama Radjasa, 9 Desember 1977.

155 Sanusi ketika dihubungi tokoh-tokoh PARKINDO-Partai Katolik di Bandung, 4 Desember 1977, mengungkapkan kesediaan dirinya dan Usep untuk mengundurkan diri dari DPP. Namun, hal ini hanya akan dilakukan dengan tiga syarat; *Pertama*, Sukarmadidjaja, Pakan, serta penanda tangan *Ketetapan Reshuffle* lainnya juga harus mengundurkan diri. *Kedua*, Isnaeni-Sunawar harus tetap berada di luar DPP. *Ketiga*, Ketua Umum DPP PDI harus berasal dari anggota DPP yang tersisa. Lihat, “Surat PARKINDO-Partai Katolik kepada Presiden”, Op.cit.; juga keterangan pers Sanusi dalam *Merdeka*, 14 Januari 1978.

demikian, serta jika Usep dipandang sebagai "ganjalan" dalam proses penyelesaian kemelut.<sup>156</sup>

Perkembangan penyelesaian kemelut dan krisis intern atas "jasa baik" Bakin ini akhirnya mengarah ke skenario berikut: pembekuan DPP, baik hasil Kongres I, maupun *Reshuffle*" oleh Presiden Soeharto setelah mendengarkan/menerima laporan Bakin.<sup>157</sup> Selanjutnya Kabakin diperintahkan membentuk *caretaker*, sampai selesai SU MPR. Selain PNI, komposisi *caretaker*" tidak mengalami perubahan dari komposisi personalia DPP yang ada. Setelah *caretaker* dibentuk, barulah penyelenggaraan kongres dapat berlangsung, yang pembiayaannya dibebankan ke kantung Pemerintah.<sup>158</sup> Skenario yang nantinya akan mereproduksi diri selepas Kongres IV yang sarat dengan brutalitas di Medan.

Keinginan Pemerintah di atas, tidak disepakati kubu Sanusi-Usep karena menilainya sebagai justifikasi terhadap tindakan *Reshuffle* Sukarmadidjaja, dkk., yang berarti pula membenarkan semua tuduhan yang dilontarkan ke pihaknya.<sup>159</sup> Dalam perkembangan terakhir, skenario di atas tidak sepenuhnya dapat bertahan. Pendekatan kembali ke kubu-kubu yang berseteru menghasilkan pola acuan baru: pihak Sanusi diminta oleh Ali Murtopo (Bakin) membentuk satu DPP baru yang fungsionarisnya terdiri dari kedua DPP yang ada (DPP Kongres dan *Reshuffle*). Juga, seperti yang umumnya diakui tokoh-tokoh yang diwawancarai,<sup>160</sup> karena Usep yang menjadi target pembusukan politik, pihak Bakin (AH Murtopo) meminta kerelaan kubu Sanusi menyisihkan Usep dan sebaiknya, sebagai

---

156 Surat PARKINDO-Partai Katolik kepada presiden, *Ibid*.

157 *Ibid*.

158 *Ibid*. Lihat pula keterangan pers Ali Murtopo, WaKabakin, seperti dikutip *Merdeka*, 13 Januari 1978.

159 Pernyataan pers Sanusi dalam *Merdeka*, 14 Januari 1977.

160 Misalnya wawancara penulis dengan Madjid, *Op.cit*.

kompensasinya, kubu Isnaeni merelakan

Sunawar berdiri di luar pagar DPP baru.<sup>161</sup> Skenario penyelesaian yang ingin Usep di kubu Sanusi dan Sunawar di kubu Isnaeni tidak disepakati Sanusi. Bagi Sanusi, bila persatuan yang akan dicapai, maka semuanya harus masuk atau tidak sama sekali.<sup>162</sup> Sikap keras ini jelas tidak menguntungkan posisinya pada tahap selanjutnya.

Di ujungnya, betapa pun besarnya perbedaan dan betapa pun kerasnya masing-masing pihak bertahan, tapi karena SU MPR semakin mendekat, kubu-kubu yang bertikai diharuskan mencapai kompromi. Pertemuan dengan Bakin, 14 dan 16 Januari 1978, menghasilkan “kompromi”, yakni:<sup>163</sup> *Pertama*, dibentuk satu DPP Harian yang anggota-anggotanya terdiri dari kombinasi dua DPP yang bertikai. *Kedua*, dibentuk pula DPP Paripurna guna menampung anggota kedua DPP yang tidak masuk ke dalam formasi DPP Harian. *Ketiga*, DPP baru dibebani dua tugas pokok, yaitu; ikut mensukseskan SU MPR, Maret 1978 dan menyelenggarakan kongres partai selambat-lambatnya akhir tahun 1978. Dengan ini, kecuali empat unsur lainnya, terjadi pergeseran dan pergantian personalia sebagai berikut: *Pertama*, dari kubu Sanusi tersingkir Djakse, Radja Mas, M.T. Siregar, dan Soelomo. *Kedua*, dari kubu Isnaeni, tersingkir Siswojo—sebelumnya Wajeksen DPP Sanusi yang diangkat menjadi Ketua dalam DPP Isnaeni—, Soetjipto, Karundeng, Gowi, Marsoesi, Soebekti, dan Soeparman. *Ketiga*, yang masuk ke dalam formasi baru dari kubu Sanusi-Usep adalah Sanusi, Usep, dan Madjid. *Keempat*, yang masuk dari kubu Isnaeni-Sunawar adalah Isnaeni, Sunawar, Hardjantho, Adipranoto,

---

161 Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*

162 *Ibid.*

163 Lihat “Pernyataan” tanggal 17 Januari 1978 yang merupakan hasil kompromi kedua kubu yang bertikai.

dan Notosukardjo. *Kelima*, dari DPP PNI (in likuidasi), Aberson—tokoh yang lebih condong ke kubu Sanusi-Usep—ikut bergabung ke dalam DPP versi baru ini. Posisi Ketua Umum tetap dikendalikan Sanusi. Setelah pergeseran dan pergantian ini, formatur DPP PDI hasil penyelesaian politis 16 Januari 1978 adalah sebagai berikut:

- Ketua Umum : Sanusi Hardjadinata
- Ketua-ketua : 1. Mh. Isnaeni  
2. Sunawar Sukowati  
3. Hardjantho Sumodisastro  
4. Usep Ranawidjaja  
5. Abdul Madjid  
6. Alexander Wenas  
7. J.H.D. Tahamata  
8. TAM. Simatupang  
9. Akhmad Sukarmadidjaja  
10. Muhidin Nasution  
11. F.G. Pelansoeika  
12. Andi Parenrengi Tanri  
13. John B. Andries  
14. R.C. Doeriat.
- Sekjen : Sabam Sirait
- Wasekjen : 1. M.S. Aberson  
2. B.D. Blegur  
3. Adi Tagor Harahap  
4. John Pakan  
5. Adipranoto  
6. V.B. da Costa
- Bendahara Umum : 1. G. Sani Fenat  
2. Notosukardjo  
3. Ny. D. Walandouw  
4. Mustafa  
5. Supangat Zakaria Ra'ib.

Dipertahankannya Sanusi sebagai Ketua Umum DPP PDI merupakan hasil konsensus internal para pimpinan dari

unsur PNI. Sanusi secara simbolis menggantikan kedudukan Hadisubeno, Ketua Umum DPP PNI hasil Kongres Semarang yang telah meninggal. Demikian pula, masuknya Isnaeni, Sunawar, serta Hardjantho, berkaitan erat dengan kapasitas dan posisi formal mereka, masing-masing sebagai Ketua DPP PNI. Sehingga dari sisi ini, tampak sekali dasar penyelesaian yang ada semakin memperkuat posisi unsur sebagai mekanisme penentu dalam PDI dan, sebaliknya, merapuhkan fusi dan dasar-dasar bagi munculnya mekanisme PDI sebagai mekanisme tunggal yang seharusnya dijadikan acuan dasar pengelolaan dan pengendalian PDI.

Terbentuknya DPP PDI hasil penyelesaian politik 16 Januari 1978 — yang akhirnya dibaptis sebagai “DPP 16 Januari”—bermakna sebagai berakhirnya kemelut internal tahap kedua PDI. Hanya saja, motif-motif, mekanisme, dan basis penyelesaian lebih dirangsang oleh dan merupakan respons terhadap tekanan sistem politik yang memprioritaskan stabilitas pada skala maksimum dalam menyambut SU MPR, bukan karena telah dicapainya kesepakatan-kesepakatan mendasar di antara mereka. Karenanya, penyelesaian di atas ibarat membangun rumah di atas pasir.

DPP 16 Januari, sekalipun tetap terjebak di rimba persoalan, masih bisa menunaikan salah satu tugas utama yang diwajibkan ke pundaknya, yakni ikut menyukseskan SU MPR. Partisipasi aktif dan kuat para petugasnya di MPR bisa dipakai sebagai ukuran. Demikian pula, dan ini yang lebih mendasar, kekhawatiran bahkan tuduhan yang melegalisasi rangkaian upaya penyingkiran Usep, bahwa kubu Sanusi-Usep mempunyai target tertentu dalam SU MPR dan akan mengobrak-abrik pimpinan DPR/MPR, berakhir sebagai kecemasan imajiner kubu Isnaeni-Sunawar dan Pemerintah belaka. Apa yang dituduhkan tidak pernah berwujud riil di arena SU MPR, sekalipun persengketaan di sekitar pengajuan materi untuk SU MPR tetap



tak terhindarkan.

Di luar mengamankan tugas utama di atas, DPP sempat meluangkan diri kembali merayakan peringatan HUT PDI ke V yang dipusatkan di Solo pada 24 Januari 1978. Namun, jika menimbang masih bertahannya pertarungan terselubung antarkubu, penyelenggaraan HUT PDI kali ini lebih merupakan kemenangan kubu Isnaeni-Sunawar. Isnaeni-Sunawar bukan saja hadir sebagai pemrakarsa, tetapi sekaligus dapat mendemonstrasikan kuatnya kombinasi dukungan yang diraihinya, yakni dari Pemerintah, yang diwakili oleh kehadiran Wabakin Ali Murtopo, dan dari akar rumput PDI yang dibuktikan oleh kehadiran massa yang besar.<sup>164</sup>

Sebelum realisasi penyelenggaraan peringatan HUT PDI, rapat pertama DPP 16 Januari diselenggarakan. Walaupun suasana kaku mewarnai pertemuan, kecuali Aberson yang tampak netral,<sup>165</sup> kesepakatan membentuk tim-tim berupa Kelompok-Kelompok Kerja yang bertugas menghimpun aneka masukan yang akan dibicarakan DPP PDI, bisa dicapai. Tim-tim ini dipecah ke dalam tiga Kelompok Kerja: Kelompok Kerja Politik yang ditugasi mempersiapkan bahan-bahan bagi SU MPR; Kelompok Kerja Organisasi yang bertanggung jawab atas penghimpunan bahan-bahan bagi konsolidasi internal; dan Kelompok Kerja Administrasi/Keuangan yang difungsikan menghimpun bahan-bahan bagi pemecahan masalah tertib administrasi dan keuangan partai.

Pokja-Pokja ini menghimpun berbagai bahan dari usulan para anggota DPP yang kemudian direkomendasikan kepada DPP untuk dirapatkan. Dari berbagai usulan, beberapa masalah

---

<sup>164</sup> Wakakabin Ali Murtopo memberikan pidato politik yang disambut meriah oleh massa. Lihat *Suara Karya*, 25 Januari 1978, dan *Berita Buana*, 26 Januari 1978. Massa yang hadir diperkirakan tidak kurang dari 6000 orang.

<sup>165</sup> *Sinar Harapan*, 20 Januari 1978.

berikut ini mendapat sorotan khusus. *Pertama*, di bidang politik muncul ke permukaan masalah-masalah penyelesaian pengisian anggota tambahan/imbangan MPR (10 orang); penyelesaian masalah pimpinan fraksi, masalah calon presiden dan wakil presiden; materi-materi SU MPR, seperti GBHN, P-4 dan Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa; dan penegasan kembali pola politik dan ideologi PDI.<sup>166</sup> *Kedua*, di bidang organisasi hadir sebagai pusat kepedulian adalah masalah-masalah: pemantapan kembali DPP PDI sesuai semangat fusi 10 Januari; pembentukan departemen-departemen; penuntasan masalah DPD/DPC “Kembar”; masalah konferensi Daerah/Cabang; masalah komisaris; tanda anggota; lambang dan salam partai; pembentukan DEPERPU; SK-SK DPP setelah tanggal 30 September 1977; serta masalah personalia sekretariat DPP PDI. Juga, masalah rancangan keputusan DPP dan melengkapi DPP Pleno dengan perimbangan 18:12:12:12:12 (66 orang)<sup>167</sup> ikut diagendakan. *Ketiga*, di bidang administrasi dan keuangan, persoalan-persoalan menonjol mencakup pembentukan komisi verifikasi untuk menanggulangi biaya Pemilu, Kongres 1976, serta biaya lainnya sampai September 1977, komisi verifikasi untuk pengeluaran September dan seterusnya; penggunaan keuangan bantuan Pemerintah; biaya perjalanan dan transportasi; ketentuan administrasi surat-menyurat; petugas sekretariat, dan masalah perubahan stempel DPP DPI.

Upaya-upaya untuk kembali membangun PDI secara tertib dan teratur dengan jalan mengembalikan mekanisme PDI sebagai mekanisme tunggal dalam pengelolaan partai ini, sayangnya, kecuali untuk bidang politik, mesti berhadapan dengan sejumlah kendala di tingkat praktik. Situasi “damai

---

166 Diusulkan oleh, antara lain, Isnaeni, Wenas, dan Supangat pada tanggal 21 Januari, 28 Januari, dan 30 Januari 1978.

167 *Ibid.* Juga usulan dari Adipranoto dan Zakaria Ra'ib, pada 28 Januari dan 30 Januari 1978.

demis SU MPR", seperti sudah diindikasikan di atas, terlampaui rapuh di hadapan intrik yang terus berkembang. Kemelut tetap mengintip di tengah-tengah jabatan dan senyum kekeluargaan.

Jejak-jejak kemelut mulai tampak lagi tidak lebih dari sebulan setelah penyelesaian 16 Januari dicapai. Perbedaan penafsiran atas makna penyelesaian politis 16 Januari antara kubu PARKINDO-Partai Katolik dengan IP-KI-MURBA, terutama mengenai perubahan komposisi DPP PDI, muncul sebagai pemicu. IP-KI-MURBA menafsirkan penyelesaian 16 Januari sebagai termasuk "koreksi" terhadap perimbangan komposisi DPP PDI yang dikembalikan pada jiwa Deklarasi 10 Januari, yakni 3:2:2:2:2.<sup>168</sup> Pembahasan seperti ini mestinya logis seandainya "fusi tuntas-paripurna" dijadikan patokan dasar, tapi menjadi tidak logis, bahkan naif, karena setiap unsur, termasuk IP-KI-MURBA, tetap bertahan pada mekanisme unsur. Berbekal penafsiran di atas, IP-KI-MURBA mengirimkan surat kepada ketua umum dan sekjen DPP PDI<sup>169</sup> yang memberitahukan telah terjadi "pemekaran DPP PDI" dari 29 orang menjadi 33 orang. Moh. Sadrie, Sudarso Sudarno, Rasjid Noer dan Moh. Tambuh dipromosikan sebagai anggota-anggota DPP PDI tambahan dari IPKI dan MURBA. Surat Supangat ini, kemudian dipersoalkan di dalam rapat Kelompok Kerja Organisasi, dan disepakati untuk diselesaikan lewat "pertemuan para Ketua eks unsur". Pertemuan ini tidak menghasilkan apa pun kecuali kesepakatan meminta bantuan Kabakin untuk bermurah hati berfungsi sebagai "arbiter". Sebelum rencana ini terlaksana, T.A.M. Simatupang dan Tahamata telah mengajukan surat kepada DPP PDI yang intinya "menolak adanya pemekaran". Menurut penafsiran PARKINDO,

---

168 Lihat "Memorandum Perihal Perkembangan Masalah Penyelesaian Dalam Tubuh DPP PDI" yang dikeluarkan unsur IP-KI. Hal ini dibenarkan oleh M. Naution dan John Pakan (MURBA), 15 Maret 1978.

169 Lihat surat M. Supangat, 11 Januari 1978.

penyelesaian 16 Januari “hanya menyangkut personalia asal eks unsur PNP”,<sup>170</sup> seperti yang diumumkan Kabakin. Penafsiran PARKINDO ini oleh IP-KI-MURBA segera diterjemahkan sebagai “trik machiavelistis (trik bermutu rendah)” yang selalu dipakai PARKINDO-Partai Katolik guna “memusnahkan unsur IP-KI-MURBA”, baik di tingkat Pusat atau daerah-daerah.<sup>171</sup> Dengan ini, konflik lintas unsur antara PARKINDO-Partai Katolik versus IP-KI-MURBA yang selama ini tenggelam dalam bayang-bayang kebesaran konflik antar tokoh-tokoh PNI mulai menguak ke permukaan.

Pertarungan lintas unsur juga terjadi di sekitar pengajuan anggota MPR (10 orang) tambahan. IP-KI-MURBA menuntut agar formula pengajuan didasarkan pada perimbangan yang mencerminkan jiwa Deklarasi. Klaim berdasarkan perimbangan hasil Pemilu 1977 yang didasarkan pada bayangan Pemilu 1971, menurut keduanya, tidak relevan lagi. Tuntutan ini semakin mengeras, terutama, karena menurut tokoh-tokohnya, IP-KI-MURBA tidak pernah memperoleh kesempatan yang wajar, adil, dan mencerminkan jiwa Deklarasi dalam pembagian posisi, baik di DPP, pimpinan DPR/MPR, Fraksi, serta di Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang lalu. Dengan ini, IP-KI dengan dukungan total dari MURBA, menuntut jatah dua personal dari 10 anggota MPR tambahan yang menjadi hak PDI.<sup>172</sup>

Perebutan posisi baik dalam hal perimbangan kuantitas, maupun kualitas, merupakan isu sentral yang selalu membelit internal DPP PDI dan daerah-daerah sejak awal. Namun, hal ini tidak pernah terdengar hingga ke luar, karena masing-masing pihak selalu membungkusnya secara rapi dalam alasan-alasan yang bersifat strategis, bahkan ideologis. Konflik atas dasar

---

170 Lihat surat T.A.M. Simatupang dan Tahamata, 25 Februari 1978.

171 Memorandum ..., *Op.cit.*

172 *Ibid.*

perebutan posisi menjadi "sakral" di balik keseraman ideologi sehingga tidak sempat metampakkan raut aslinya sebagai konflik *vested interest* masing-masing elite yang haus kekuasaan.

Konflik juga terjadi ketika pihak PARKINDO-Partai Katolik mengusulkan untuk memasukkan Keputusan Menteri Agama No. 70/1977 ke dalam agenda rapat DPP untuk diperbincangkan, yang tidak didukung unsur lainnya, terutama yang tercermin dari sikap MURBA. Bagi MURBA mengikuti keinginan PARKINDO-Partai Katolik tidak menguntungkan karena hal ini berarti "akan melibatkan PDI dalam masalah yang peka dan bertentangan dengan kebijaksanaan pimpinan nasional".<sup>173</sup> Respons di atas mengecewakan kekuatan PARKINDO-Partai Katolik karena Keputusan Menag tersebut memiliki dampak yang luas bagi kepentingan kalangan Kristen-Katolik di Indonesia.

Sekalipun benih-benih perpecahan telah tersemai di hampir semua lahan yang tersedia bagi PDI, tetapi masih butuh waktu beberapa saat sebelum benih-benih itu tumbuh bermekaran dalam bentuk konflik terbuka untuk yang kesekian kalinya. Langkah lanjutan Isnaeni-Sunawar yang mulai memprakarsai pembentukan DPD/DPC, seperti DPD Jabar di bawah pimpinan A. Rivai, DPD Sumut di bawah pimpinan Asro Effendi, DPD Kalsel di bawah pimpinan H. Imansyah, serta DPC-DPC di daerah-daerah Jateng, Lampung, serta Sumut,<sup>174</sup> menandai kembalinya musim berkonflik. Langkah Isnaeni-Sunawar—yang juga telah dilakukan sebelumnya atas nama *Reshuffle*—segera mengundang reaksi kubu Sanusi-Usep yang

---

173 Diajukan M. Nasution dalam pertemuan dengan Bakin. Lihat "Resume Pertemuan DPP PDI dengan Kabakin"—Kabakin diwakili oleh Deputi III Brigjen. Aswismarno—, 29 Desember 1978. Dari DPP PDI, hadir kubu IP-KI-MURBA serta Isnaeni dan Sunawar.

174 Lihat "Pokok-pokok Permasalahan DPP PDI" yang tampaknya dibuat oleh Kelompok Pandaan, 23 Desember 1979.

memvonisnya sebagai “praktik tercela”.<sup>175</sup> Tindakan itu dipahami sebagai upaya penggalangan potensi untuk mendukung kubu sendiri, dan sebaliknya merongrong DPP PDI, serta, di ujungnya, “mengacaukan” daerah-daerah<sup>176</sup> Langkah-langkah di atas sekaligus mengingkari keputusan rapat DPP tanggal 3 Agustus 1978, yang telah menyepakati “tidak ada lagi pembentukan DPC tandingan” bahkan, sebaliknya, “cabang-cabang kembar hendaknya diusahakan menjadi satu”.<sup>177</sup> Protes kubu Sanusi-Usep, tidak sedikit pun menyurutkan langkah Isnaeni-Sunawar yang terus memproduksi SK-SK pembentukan DPD/DPC tandingan. Gejolak ini semakin mengeras sehubungan dengan pembentukan Panitia Kongres PDI II. Isnaeni-Sunawar dinilai telah “mempraktikkan cara-cara licik dalam menyusun Panitia 11/Presidium Panitia Kongres, ...tanpa memedulikan pendapat dan saran-saran dari anggota DPP lainnya”.<sup>178</sup> Keduanya telah “memaksa” pembentukan Presidium Panitia Kongres.<sup>179</sup> Untuk mengimbangi langkah Isnaeni-Sunawar tadi, kubu Sanusi-Usep, dengan dukungan mayoritas anggota DPP, mengajukan *counter proposal* atas konstruksi Panitia 11 hasil kreasi Isnaeni-Sunawar, tapi ditolak Isnaeni-Sunawar dengan dukungan penuh IP-KI-MURBA.<sup>180</sup>

Penolakan Sanusi-Usep yang didukung penuh PARKINDO-

---

175 Lihat “Alasan yang dapat membenarkan Tindakan Ketua Umum DPP PDI” yang dikeluarkan kubu Sanusi, 11 Desember 1978.

176 Pernyataan pers Sanusi seperti dikutip *Kompas*, 25 November 1978.

177 *Ibid.*

178 Lihat, “Alasan yang ...”, Op.cit.

179 Lihat, “Pokok-pokok permasalahan....”, Op.cit.

180 Lihat, “Alasan yang ...”, Op.cit.

Partai Katolik atas Panitia 11 versi Isnaeni-Sunawar<sup>181</sup> oleh kubu Isnaeni dipandang telah merongrong pelaksanaan salah satu tugas pokok sesuai konsensus 16 Januari; yang bermakna "tidak menghargai arti penyelesaian 16 Januari."<sup>182</sup> Dengan ini, kubu Isnaeni-Sunawar berusaha membenturkan kubu Sanusi-Usep dengan pihak Pemerintah, cq. Kabakin, yang telah berjasa dalam membidani terwujudnya penyelesaian politik 16 Januari.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan, masing-masing kubu menempuh rute sendiri-sendiri ketika pengelolaan dan pengendalian PDI terpolar ke dalam dua kubu yang saling mengklaim keabsahan sebagai DPP PDI. Akibatnya, berbagai kebijaksanaan, keputusan, serta hal lainnya, senantiasa hadir dalam bentuk kembar, yaitu di satu sisi dari DPP PDI yang berintikan Isnaeni-Sunawar-IPKI-MURBA, serta di sisi lain, Sanusi-Usep-Hardjantho-ARKINDO-Katolik.<sup>183</sup> Yang hadir kemudian, bukan saja DPP kembar, tapi lebih lagi, PDI kembar.

Kesepakatan membentuk pokja-pokja, sebenarnya merupakan langkah maju bagi PDI, apalagi usulan-usulan riilnya telah diperbincangkan dalam rapat-rapat DPP, maupun rapat terbatas pokja-pokja. Sejumlah hasil kajian serial rapat yang ada telah dituangkan dalam bentuk keputusan, misalnya, Keputusan No. 559/IN/D/DPP/IV/1978 tentang Penyelesaian permasalahan adanya DPD dan/atau DPC PDI yang kembar yang

---

181 Panitia ini terdiri dari 11 orang dan dibaptis dengan nama "Presidium Panitia Kongres Nasional ke II". Formula yang digunakan dalam membentuknya berdasarkan perbandingan komposisi 3:2:2:2:2. Anggota-anggotanya adalah: Sukarmadidjaja, Wenas, Tanri, Pakan, Andries, Duriat, Hardjantho, Isnaeni, Sunawar, Sabam, dan Wignjosumarsono. Panitia ini sekaligus dilengkapi oleh anggota pengganti, yakni Supangat, Nasution, Tahamata, Samosir, dan Adipranoto.

182 Lihat Resume pertemuan dengan Kabakin, 29 Desember 1978, *Op.cit.*

183 Hardjantho sebelumnya masuk dalam kubu Isnaeni-Sunawar pada waktu dilakukan *reshuffle* oleh Sukarmadidjaja, tetapi dalam kemelut terakhir ia berpihak pada kubu Sanusi-Usep.

dikeluarkan pada 17 April 1978.<sup>184</sup> Persiapan-persiapan ke arah kongres juga sudah mendekati titik penyelesaian, demikian pula dengan pembentukan MPP serta berbagai masalah organisasi lainnya. Namun, berbagai keputusan di atas hanya merupakan produk salah satu kubu, Isnaeni-Sunawar atau Sanusi-Usep, sehingga tidak pernah mendapatkan pengakuan bersama.

Kegagalan mencapai konsensus minimal, kembali melegalkan kehadiran konflik sebagai lembaga dan mekanisme perebutan kekuasaan, pengaruh dan legitimasi. Topangan yang dinikmati kedua kubu, baik dari massa (DPD/DPC) maupun dari elite-elite di pusat kekuasaan bukan saja memberikan legalitas dan perlindungan bagi masing-masingnya, tapi juga semakin meyakinkan bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar.

Rangkaian kegagalan mencapai konsensus memuncak dengan dikeluarkannya surat keputusan<sup>185</sup> oleh Sanusi sebagai Ketua Umum, 24 November 1978, yang “membebastugaskan Isnaeni-Sunawar dari kedudukannya sebagai anggota DPP PDI”. Rangkaian tindakan Isnaeni-Sunawar seperti dijelaskan di atas menempati jantung alasan bagi keluarnya SK ini. Di samping itu, desakan daerah-daerah, keinginan menghindari terlibatnya unsur lain dalam kemelut eks PNI, keinginan menjaga persatuan dan kesatuan, dan, yang terpenting, keyakinan bahwa Isnaeni-Sunawar merupakan sumber kemelut PDI,<sup>186</sup> secara kolektif munghadirkan diri sebagai alasan yang melegitimasi penyingkiran kedua tokoh itu dari pentas politik PDI. Seperti juga kisah-kisah sebelumnya, keputusan kali ini mengundang

---

184 SK yang ditandatangani Hardjantho dan Sabam Sirait ini ditujukan kepada DPD/DPC seluruh Indonesia sebagai patokan dalam menuntaskan masalah DPD/DPC kembar.

185 SK No. 003/KU/XI/1978 ini ditandatangani Sanusi.

186 Lihat *Ibid.*, dan juga keterangan-keterangan pers selanjutnya yang dikeluarkan kubu Sanusi seperti yang dikutip *Kompas*, 25 November 1978, *Berita Buana*, 27 November 1978, dan *Berita Buana*, 28 November 1978.



dukungan sekaligus tantangan dari lingkaran generasi muda,<sup>187</sup> daerah-daerah,<sup>188</sup> kalangan DPP PDI,<sup>189</sup> serta Fraksi PDI,<sup>190</sup> di samping penolakan dan tindakan balasan dari kubu Isnaeni-Sunawar. Dalam waktu sangat singkat, sejumlah kosa-kata baru yang meluncur dari kubu Isnaeni-Sunawar, semisal, "diktator",<sup>191</sup> "bebodoran of the year",<sup>192</sup> "PDI bukan milik Sanusi",<sup>193</sup> dan "killing ground"<sup>194</sup> hadir memperkaya perbendaharaan kamus politik PDI. Tindakan balasan yang sebanding diproduksi pada hari yang sama, yakni dengan dikeluarkannya Keputusan Mandataris PNI— suatu lembaga baru yang tak pernah diketahui asal-muasalnya—pada 24 November 1978, yang membebastugaskan sekaligus menarik Sanusi dari posisi Ketua Umum DPP PDI, dan menugaskan Isnaeni mengganti Sanusi sebagai pejabat Ketua Umum DPP PDI. Keputusan yang ditandatangani Sunawar, yang memproklamasikan diri sebagai "mandataris" eks unsur PNI berikut lembaga "Mandataris PNI" itu sendiri, sama seperti keputusan Sanusi, mendapati dirinya terjepit di tengah-tengah suara dengungan pro dan kontra yang

---

187 Lihat, misalnya, *Merdeka*, 28 November 1978, dan *Berita Buana*, 9 Desember 1978, yang merekam pendapat generasi muda PDI yang terpolarisasi ke dalam kubu-kubu yang mendukung dan yang menentang.

188 Lihat, misalnya, *Berita Buana*, 9 Desember 1978 dan 28 November 1978.

189 Sejumlah 18 dari 29 anggota DPP PDI, masing-masing dari unsur PARKINDO, Partai Katolik, serta sebagian besar dari unsur PNI, mendukung kebijaksanaan Sanusi ini.

190 Pernyataan pers Sabam Sirait serta Suryadi, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi PDI, seperti dikutip *Merdeka*, 25 November 1978, menyokong Sanusi. Sikap sebaliknya terekam dalam keterangan pers Isnaeni—yang menamai dirinya sebagai koordinator fraksi—, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 29 November 1978.

191 Pernyataan pers Isnaeni dalam *Merdeka*, 25 November 1978.

192 Pernyataan pers Sunawar, seperti dikutip *Berita Buana*, 27 November 1978.

193 Pernyataan pers Isnaeni, seperti dikutip *Merdeka*, 25 November 1978.

194 Keterangan pers Isnaeni, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 29 November 1978.

bising.<sup>195</sup> Perang pernyataan, kembali menghiasi perjalanan sang bayi “haram”,<sup>196</sup> menyeret PDI ke rimba raya konflik yang semakin rumit untuk diurai.

Adu kekuatan makin menemukan bentuk sempurnanya karena kedua kubu menemukan “pelindung setia” di lingkaran pusat-pusat kekuasaan. Pembebastugasan Isnaeni-Sunawar, dispekulasikan sebagai keputusan yang “direstui” salah satu pusat kekuasaan,<sup>197</sup> yang juga memberikan dukungan sebanding ke kubu Isnaeni-Sunawar.<sup>198</sup> Dukungan elite-elite dari pusat-pusat kekuasaan juga dinikmati generasi muda

---

195 Terdapat dua kutub pemikiran yang berseberangan dalam menanggapi lembaga mandataris. Kutub pertama terdiri dari mereka yang menolak keabsahan lembaga ini. Penolakan didasarkan pada: *pertama*, lembaga ini tak pernah dikenal dalam tradisi PNI. *Kedua*, walaupun ada, eksistensi PNI telah berakhir setelah ditandatanganinya fusi. *Ketiga*, lembaga ini semakin tidak relevan karena tenggang waktu peralihan seperti yang ditentukan dalam UU No. 3/1975 telah berlalu. Sanusi, Usep, Madjid, Suryadi, Aberson, di kutub ini. Sebaliknya, kutub kedua, membenarkan keberadaan lembaga mandataris dan sekaligus membenarkan bahwa Sunawar adalah figur yang disepakati sebagai pemegang mandat dari unsur PNI. Pendapat kedua ini ditopang oleh Isnaeni dan jajarannya, seperti Jusuf Merukh, Kemas Fahrudin, Burhan, Rivai, Darsoeki, Radja Syah Alam, dll. Lihat keterangan pers masing-masing kubu pada November dan Desember 1978, dan Januari 1979. Lihat pula “Pernyataan DPD-DPD PNI in likuidasi”, 25 November 1978.

196 Lihat “Pernyataan” PARKINDO-Partai Katolik, 27 November 1978; “Pernyataan”, yang dikeluarkan para penanggung-jawab referendum MURBA perihal fusi, 30 November 1978; dan “Pernyataan Unsur IP-KI”, 1 Desember 1978.

197 Dokumen “Pendapat DPD PDI Jawa Barat terhadap apa yang dinamakan Kongres PDI II” yang ditandatangani Oto Suryadinata dan T.D. Musir mengungkapkan, sebelum pembebastugasan Isnaeni-Sunawar, kubu Sanusi melakukan konsultasi dengan Kabakin. Dengannya, bisa dispekulasikan bahwa Kabakin mengetahui dan membenarkan langkah di atas. Penyebarluasan ketetapan pembebastugasan melalui TVRI semakin meyakinkan bahwa langkah Sanusi “direstui” oleh Pemerintah.

198 Dukungan bagi kubu Isnaeni diperolehnya bahkan sejak *reshuffle* tahun 1977. Ia juga diberi kesempatan untuk tampil di TVRI.

PDI<sup>199</sup> yang mulai mengambil ancang-ancang memasuki arena perkelahian. Dengan ini bisa diperkirakan, suatu skenario baru penyelesaian yang harus melibatkan generasi baru sedang dipersiapkan. Kemungkinan ke arah ini diperkuat oleh semakin menggumpalnya tuntutan bagi adanya regenerasi.<sup>200</sup>

Penyingkiran formal atas Isnaeni-Sunawar oleh sejumlah tokoh diyakini bukan sebagai hasil inisiatif yang otonom dari Sanusi, tapi lebih sebagai hasil kreasi Hardjantho yang kini bertukar sekutu. Karenanya, figur yang satu ini dijuluki sebagai "Senopati" dari seluruh kericuhan<sup>201</sup> yang memendam ambisi menjadi Ketua Umum PDI, yang tidak ditanggapi Hardjantho.<sup>202</sup> Keyakinan sejumlah tokoh di atas tampaknya memiliki alasan pembenar. Perkembangan kemelut selanjutnya mengindikasikan kemungkinan besarnya andil Hardjantho dalam penyudahan peran politik Isnaeni-Sunawar. Alasannya sederhana saja, karena momentum kali ini merupakan titik masuk bagi Hardjantho dan kalangan generasi muda ke arena pertarungan resmi. Kemelut ini, telah meletakkan landasan pembenar bagi adanya "Munas Antardaerah PDI di Pandaan" yang menyeret Hardjantho ke suatu posisi dengan *bargaining* kekuasaan yang kuat nantinya. Sejumlah tokoh lainnya meyakini langkah pembebastugasan Isnaeni-Sunawar sebatas pengulangan kisah

---

199 Kesempatan khusus diluangkan TVRI kepada tokoh-tokoh muda untuk mengisi acara *Masalah Kita*. Pembicaraanya adalah, antara lain, Suryadi, T.A.M. Simatupang, Aberson, dan Budihardjono. Tokoh-tokoh ini nantinya bertindak sebagai pelaku-pelaku utama dalam Munas antardaerah PDI yang berlangsung di Pandaan, Jatim, yang memaksa kubu Sanusi-Usep dan Isnaeni-Sunawar melakukan koalisi kilat.

200 Isu regenerasi mekar secara luar biasa, bahkan telah dieja sebagai sebuah "keharusan" yang menjadi tugas utama kongres mendatang, karena diyakini merupakan obat mujarab guna menyembuhkan konflik yang sudah kronis. Untuk ini lihat pemberitaan media massa selama November hingga Desember 1978 serta Januari 1979.

201 Pernyataan pers Ipik Asmasubrata seperti dikutip *Merdeka*, 27 November 1978.

202 Lihat *Berita Buana*, 27 November 1978.

persaingan lama Sunawar dan Usep. Karenanya, tokoh-tokoh ini meyakini, tindakan yang sepadan pun harus diberlakukan terhadap Usep, jika memang diniatkan untuk menghilangkan sumber kemelut.<sup>203</sup>

Alur pemikiran sejumlah tokoh di atas, yang mendapat sokongan dari generasi muda, termasuk yang berada di lingkaran DPP, semisal Hardjantho dan Sabam, awalnya tampak diakuri Sanusi. Persetujuan Sanusi atas bangun logika berpikir di atas diekspresikan lewat SK No. 004/KU/XII/1978 yang membebastugaskan Usep dari DPP PDI.<sup>204</sup> Namun, persetujuan atas logika di atas sangat sementara. SK itu hanya berusia seminggu karena dicabut kembali melalui SK. No. 005/KU/XX/1978.<sup>205</sup> Perubahan ini, menurut Hardjantho dan Sabam—setelah keduanya membentuk kubu baru guna menentang koalisi Sanusi-Usep dan Isnaeni-Sunawar—hanya direhabilitasi oleh Sanusi pribadi tanpa persetujuan dari DPP PDI.<sup>206</sup>

Pertentangan tajam kubu Sanusi-Usep versus Isnaeni-Sunawar tampaknya tidak mungkin dapat didamaikan lagi. Sikap Sanusi yang menegaskan *“tidak mungkin lagi berkompromi dengan pihak Isnaeni dan Sunawar, sebab setidaknya-tidaknya 18 dari 27 anggota DPP PDI tetap berada dalam lingkungan DPP, dan menyetujui tindakan Ketua Umum Sanusi terhadap*

---

203 Lihat misalnya wawancara dengan Theo Sambuaga dalam Merdeka, 28 November 1978. Ia menegaskan, “bila tindakan itu benar dimaksudkan untuk menghilangkan dan untuk mengakhiri sumber kericuhan dalam tubuh PDI... Sanusi tidak perlu kepalang tanggung. Untuk mencapai kebesaran PDI... Usep tidak cukup hanya dengan mengeluarkan pernyataan bersedia untuk mengundurkan diri”.

204 SK ini adalah hasil rapat DPP, 6 Desember 1979, bertepatan dengan pengesahan DPP PDI atas keputusan No. 110 tentang pembebastugasan Isnaeni-Sunawar.

205 SK ini dicabut kembali pada tanggal 13 Desember 1979 oleh Sanusi Hardjadinata.

206 Lihat pernyataan pers Hardjantho, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 10 Maret 1979.

*Isnaeni-Sunawar*<sup>207</sup>—meskipun Isnaeni masih menawarkan “dialog”<sup>208</sup>—memastikan tertutupnya ruang penyelesaian internal. Karenanya, satu-satunya peluang yang tersisa adalah menghadirkan kembali negara sebagai “juru damai”. “Undangan” ke arah ini sudah dilakukan masing-masing kubu, bahkan bersifat terbuka, ketika masing-masingnya, baik lewat pernyataan pers maupun lewat surat resmi ke Pemerintah, menegaskan “*perlunya bantuan Pemerintah*”, bahkan diimbui ungkapan pemanis bahwa keterlibatan Pemerintah ini “*bukan campur tangan*”.<sup>209</sup> Di samping mengandalkan pada kemurahhatian rezim, para petarung pun masih menyisakan sedikit ruang bagi kongres sebagai lembaga alternatif untuk menuntaskan kemelut yang ada,<sup>210</sup> sekalipun hal ini lebih sebagai basa-basi. Tentu saja karena ide kongres bisa dipastikan akan berhadapan dengan persoalan legalitas: siapa yang berhak menyelenggarakan kongres dalam situasi ketika masing-masingnya mengklaim diri sebagai yang paling berhak.

Dalam kemelut kali ini, kubu Isnaeni berhasil menguasai kantor sekretariat DPP PDI di Jl. Diponegoro, Jakarta, yang diklaimnya sebagai bukti keabsahan DPP-nya. Sanusi akhirnya hanya dapat mengendalikan partai dari kediaman-kediaman pribadi anggota DPP yang, menurut mereka, guna menghindari bentrokan fisik antar para pengikut. Penggunaan tempat kediaman Sanusi sebagai arena rapat—karena merupakan perumahan untuk pejabat tinggi negara—akhirnya mendapat

---

207 Pernyataan pers Sanusi, seperti dikutip *Kompas*, 20 Desember 1978.

208 Keterangan pers Isnaeni dalam *Angkatan Bersenjata*, 30 November 1978, yang menyatakan kesediaannya menempuh rute dialog.

209 Lihat, misalnya, pernyataan pers Sanusi, dikutip *Sinar Harapan*, 14 Februari 1979. Pernyataan serupa pun keluar dari kubu Isnaeni.

210 Keterangan pers Sanusi seperti dikutip *Kompas*, 24 Februari 1979; Isnaeni, dalam *Sinar Harapan*, 3 Februari 1979. Tema serupa terus dikumandangkan, termasuk oleh generasi muda, DPD/DPC, dan *slogorde* PDI lainnya. Lihat pemberitaan media selama akhir 1978 sampai akhir tahun 1980.

peringatan Sekretariat Negara.<sup>211</sup> Indikasi samar-samar dari ketiadaan dukungan pusat-pusat kekuasaan atas kubu Sanusi. Perebutan Sekretariat ini, menggiring langkah kemelut ke arah penggunaan kekerasan. Ini diawali oleh “penyerbuan” ke kediaman Wasekjen Adipranoto, sekaligus pemegang kunci kantor sekretariat DPP Isnaeni-Sunawar,<sup>212</sup> yang diikuti langkah serupa ke kantor Sekretariat DPP,<sup>213</sup> memaksa pihak keamanan terlibat. Dengan ini, penyertaan massa yang dulunya difungsikan sebagai *moral force* dan kekuatan pembentuk opini lewat perang pernyataan, kini mengalami kemerosotan luar biasa sebagai sarana “kekuatan fisik” guna mengintimidasi kubu lawan. Di atas segalanya, penggunaan sarana kekerasan fisik ini akan menjadi preseden dan sekaligus melegitimasi tindakan serupa dikemudian hari. Didudukinya kantor sekretariat DPP PDI oleh puluhan pemuda dari DPD DKI Jaya di bawah pimpinan A.P. Batubara, pada 15 Desember 1979, adalah bukti awal dari adanya reproduksi metode di atas. Reproduksi yang lebih massal dalam hal skala dan kebrutalan mengambil bentuk di Medan dalam Kongres IV PDI, hampir 15 tahun kemudian. Dan yang paling dramatis adalah penyerbuan yang dilakukan pada 1996 yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli.

---

211 Lihat *Sinar Harapan*, 14 Februari 1979.

212 Penyerbuan ke kediaman Adipranoto terjadi pada malam 1 Januari 1979, diikuti perusakan pagar halaman rumahnya pada hari berikutnya. Menurut kubu Isnaeni, hal ini dilakukan pendukung-pendukung Sanusi yang diotaki oleh Hardjantho. Kasus ini secara resmi dilaporkan ke Komdak Metro Jaya, dengan tembusan kepada Mensesneg, Mendagri, Pangkomkamtib, Panglima Kodam V Jaya/Laksusda Jaya. Di samping itu, juga disiarkan lewat pernyataan pers secara luas dan disampaikan ke cabang-cabang di daerah-daerah, 5 Januari 1979; Lihat “Laporan” ke Komdak Metro Jaya, 5 Januari 1979.

213 Penyerbuan terjadi pada 3 Januari 1979 oleh sekitar 80 orang yang diperkirakan sebagai pengikut setia Sanusi. Di samping perusakan, juga terjadi “pencurian” dokumen-dokumen dan inventaris DPP PDI, lihat *Ibid.*

#### D. Munas Pandaan: Persekutuan Para *Pariah*

Kemelut yang berlarut, bukan saja mengakibatkan kemacetan bergulirnya roda atau mekanisme organisasi, tapi juga telah menjadi momentum pengabsahan munculnya berbagai tuntutan sekaligus upaya guna menerobos stagnasi yang ada. Arus tuntutan generasi muda, terutama yang berada di lingkungan DPP, memperoleh bentuk lebih konkret setelah bertemu dengan arus tuntutan serupa dari daerah-daerah yang telah lama kecewa pada perangai politik yang ditampilkan DPP PDI. Diikuti kuatnya topangan dari kekuasaan, jalan ke arah pengorganisasian pendapat dan tuntutan akhirnya tak terbendung lagi. Secara konkret, mobilisasi pendapat dan tuntutan di atas muncul dalam bentuk penyelenggaraan "*Musyawahar Nasional antara DPD PDI Seluruh Indonesia*", di Pandaan, Jatim, 27-28 Februari 1979. Munas DPD PDI ini, dipelopori empat daerah basis utama PDI, DPD Jawa Timur, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara,<sup>214</sup> yang secara luar biasa mampu menjaring keterlibatan 24 dari 26 DPD PDI yang ada.

*Munas Pandaan* merupakan lembaga sekaligus mekanisme ekstrakonstitusional yang berada di luar jalur partai, karena tidak pernah diatur dalam AD/ART PDI. Sekalipun demikian, ia bisa dengan mudah mengklaim legitimasi, terutama, karena bukan merupakan peristiwa tunggal yang tiba-tiba muncul tanpa preseden. Aktivitas serupa pernah diselenggarakan, misalnya *Konpernas* di tahun 1973 yang difungsikan sebagai forum prosedural guna menciptakan prakondisi bagi Kongres

---

<sup>214</sup> Munas diprakarsai oleh Marsoesi (Ketua DPD Jatim) yang bertindak selaku Ketua Pemrakarsa, Notoksukardjo (Ketua DPD Yogya), Sumario (Ketua DPD Jateng), dan P. Siregar (Ketua DPD Sumut). Sebanyak 24 dari 26 DPD yang ada hadir sebagai peserta, kecuali DPD Jabar dan NTB. Hadir dalam Munas ini 108 pimpinan PDI dari 24 DPD. Kecuali Aceh (Thaib Ali), seluruh peserta ikut menandatangani hasil keputusan Munas. Bertindak selaku Ketua Pelaksana adalah Ramelan, dengan Sekretarisnya Suryadi.

I atau aktivitas serupa pada 17 dan 18 Desember 1977 yang diselenggarakan Sanusi, terutama untuk menghadapi kemelut kedua PDI.

Lima poin yang dirumuskan sebagai “*imbauan*” diputuskan dalam Munas masing-masing: *pertama*, kongres sebagai satu-satunya forum penyelesaian kemelut; *kedua*, menghimbau Sanusi-Usep-Isnaeni-Sunawar mengundurkan diri sebagai fungsionaris DPP PDI sekaligus memberikan kepercayaan kepada tokoh lain di DPP dan daerah-daerah untuk menggantikannya; *ketiga*, meminta bantuan Pemerintah menyelesaikan kemelut PDI; *keempat*, mendesak Pemerintah memberikan izin kongres; serta *kelima*, memberikan pedoman kerja kepada DPP<sup>215</sup> yang berisikan 7 butir, seperti terlampir dalam keputusan Munas.<sup>216</sup>

*Munas Pandaan* secara langsung menghasilkan reaksi penolakan kubu Isnaeni-Sunawar dan Sanusi-Usep. Mereka bukan saja tidak mengakuinya,<sup>217</sup> tetapi, terlebih lagi, telah menempatkan Munas sebagai tindakan “*liar*”.<sup>218</sup> Kemarahan bersama dua kubu yang selama lebih dari lima tahun terakhir ini saling mencakar secara cepat mengubah Munas Pandaan menjadi “kekuatan pemaksa” bagi keduanya untuk membentuk koalisi kilat. Dua hari selepas “*Imbauan Munas Pandaan*” Isnaeni-

---

215 Lihat Keputusan No. I/KPTS/MAD/1979, tentang “Jalan Keluar Mengatasi Kemelut DPP PDI”, 28 Februari 1979.

216 Lihat “Lampiran Pedoman Kerja dan Penugasan kepada DPP PDI” yang merupakan hasil keputusan Munas Pandaan. Di antara 7 pedoman kerja, yang penting adalah yang menyangkut persiapan ke arah kongres, pembentukan MPP, penyelesaian ekses-ekses kemelut di daerah-daerah, pembentukan Panitia Kongres Nasional II, dan pembatalan keputusan/garis kebijaksanaan yang bertentangan.

217 Lihat pernyataan pers bersama Isnaeni-Sunawar-Sanusi-Usep, seperti dikutip *Berita Buana*, 3 Maret 1979 dan *Sinar Harapan*, 5 Maret 1979.

218 Lihat, misalnya, pernyataan pers Aberson seperti dikutip *Kompas*, 27 Februari 1979.



Sunawar dan Sanusi-Usep mengadakan "rujuk" demi persatuan dan kesatuan,<sup>219</sup> yang oleh banyak kalangan disebutkan sebagai "rujuk semu",<sup>220</sup> dan, oleh karenanya, tetap dipertanyakan tingkat kesungguhannya.<sup>221</sup> Guna menjawab keragu-raguan ini para tokoh yang dikenal dengan akronim "SU-SI"—Sanusi-Usep-Sunawar-Isnaeni—mulai mengadakan serangkaian konsultasi dengan daerah-daerah, termasuk dengan peserta *Munas Pandaan*, memobilisasi dukungan,<sup>222</sup> melakukan "gerilya politik" guna mengkampanyekan "rujuk" mereka ke daerah-daerah pemrakarsa Munas,<sup>223</sup> dan, terakhir, mengadakan rapat bersama dengan daerah-daerah.<sup>224</sup> Rangkaian aktivitas di atas bermuara pada lahirnya "Pernyataan Mendukung Upaya

---

219 *Berita Buana*, 3 Maret 1979 dan *Sinar Harapan*, 5 Maret 1979. Di sini Isnaeni Sanusi, yakni *pertama*, memperkecil jarak antarmereka yang bertikai; *kedua*, penyelesaian perbedaan melalui kongres; dan *ketiga*, ketentuan-ketentuan organisasi yang dijalankan dan jangan dicampuri pihak luar.

220 Hardjantho, Sabam, T.A.M. Simatupang, Wenas, Wignjosumarsono, serta pelaku-pelaku aktif Munas Pandaan menilai rujuk Isnaeni-Sunawar-Sanusi-Usep sebagai "rujuk semu". Suryadi, bahkan, menyebutnya sebagai "rujuk yang rapuh". Lihat *Sinar Harapan*, 6 Maret 1979.

221 Menanggapi rujuk tokoh-tokoh SUSI, kubu Pandaan menegaskan, "sungguh pun beliau-beliau sudah rujuk kembali, kepercayaan kami kepada mereka sudah makin berkurang". Apalagi, rujuk terpaksa dilakukan karena desakan kubu Pandaan. Lihat pernyataan pers Marsoesi, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 5 Maret 1979.

222 Setelah tokoh-tokoh SUSI bersekutu kembali, tidak sedikit telegram dukungan yang diterima mereka. Akan tetapi, hal ini menjadi mungkin karena dimobilisir oleh keempat tokoh ini. Lihat lampiran daftar pernyataan mendukung dalam *Ibid.*, (lampiran no. 6).

223 Tokoh-tokoh SU-SI melakukan kampanye ke Jatim dan Sumsel. Sebanyak 20 dari 36 DPC di Jatim menghadiri pertemuan dengan Sanusi-Isnaeni-Sunawar, dan menyatakan dukungan terhadap langkah persatuan-kesatuan mereka. Lihat pernyataan 20 DPC Jatim, *Ibid.* Gerilya politik tokoh SU-SI berlangsung pada 8 Maret 1979 ke Jatim dengan Tim dan Sanusi-Usep-Sunawar dan 9 Maret 1979 ke Sumsel dengan Tim dan Sanusi-Isnaeni-Sukarmadidjaja-Nasution.

224 Rapat berlangsung pada tanggal 15 April 1979, dihadiri oleh 22 DPD, di kantor DPP PDI, Jln. Diponegoro.

*Kesatuan dan Persatuan*"<sup>225</sup> yang memberi landasan bagi mereka mendelegitimasi Munas dan segala produknya.

Hal menarik dari pertarungan antara kubu Pandaan dengan kubu SU-SI bukan saja terletak pada kegigihan masing-masing kubu mengeliminasi kubu lawan dan saling menuding di antara mereka,<sup>226</sup> tapi justru bahwa masing-masingnya memperoleh dukungan dari daerah-daerah yang sama—kecuali untuk Jabar, Aceh, NTB yang mendukung kubu SU-SI serta NTT, Sultra, Maluku, dan Yogyakarta yang mendukung kelompok Pandaan.<sup>227</sup> Lebih lagi, sekaligus tragis, pernyataan dukungan justru diperoleh kedua kubu dari figur-figur lokal yang sama.<sup>228</sup> Dengan ini, klaim kubu Pandaan sebagai manifestasi "suara daerah-daerah" dan klaim SU-SI bahwa "persatuan dan kesatuan telah tercapai" terasa sama naifnya.

Rujuknya kubu Sanusi-Usep dengan Sunawar-Isnaeni

- 
- 225 Konsultasi, mobilisasi dukungan, gerilya politik ke daerah-daerah dan rapat dengan DPD-DPD akhirnya melahirkan pernyataan mendukung atas langkah "persatuan-kesatuan" tokoh-tokoh SU-SI.
- 226 Perang pernyataan mengambil semua kemungkinan media dan saluran yang tersedia, la muncul lewat media massa, selebaran atau brosur yang dikirimkan ke daerah-daerah, instruksi-instruksi yang diberikan ke daerah-daerah, pengiriman surat-surat tandingan ke Pemerintah. Lihat pemberitaan media massa antara Februari dan Mei 1979.
- 227 Dengan membandingkan daftar penanda tangan keputusan Munas Pandaan dengan daftar penanda tangan pernyataan hasil rapat kubu SUSI dan DPD/DPD, 15 April 1979, saya menemukan hal menarik. Dari 26 DPD yang ada, hanya 7 DPD yang tidak ikut menandatangani kedua pernyataan yang ada. Sebanyak 19 DPD lainnya menandatangani kedua dokumen yang saling memunggungi ini. Lihat daftar penanda tangan kedua naskah ini.
- 228 Dengan cara yang sama, saya menemukan adanya kesamaan tokoh yang menandatangani kedua keputusan. Sebagai contoh, Ramelan (Wakil Ketua DPD Jatim), ketua penyelenggara Munas Pandaan yang ikut menandatangani hasil keputusan Munas Pandaan pada urutan 12 (Urutan I untuk Jatim) juga membubuhkan tanda tangan dukungannya pada pernyataan 15 April yang mendukung kubu SU-SI. Tanda tangan Ramelan berada di urutan ke 37. Hal serupa terjadi pada Royani Haminullah (Sekretaris DPD Kalsel), anggota DPP PDI di era Suryadi, dan J.D. Pusung. Sejumlah tokoh daerah lainnya juga melakukan hal yang sama.

sungguh mencengangkan. Betapa tidak, pertikaian keduanya yang sudah sedemikian mendalam, yang bahkan setelah segala kemungkinan cara dan sumber daya didayagunakan untuk mendamaikan keduanya tetap saja berakhir dengan frustrasi, sangat sulit dibayangkan akan berakhir dalam raut kerukunan. Karenanya, rujuknya keduanya sulit ditafsirkan lain kecuali adanya ancaman yang sedemikian menakutkan yang siap menerjang mereka. "Imbauan Pandaan" yang tampak sangat halus, sopan, dan persuasif mengandung pesan yang pasti: SU-SI harus menyudahi secara sukarela perjalanan politik mereka atau akan dipaksa untuk itu. Pesan semacam ini bisa dipastikan datang dari kekuatan ekstra PDI yang *powerful*.

Kembali bersekutunya kubu-kubu SU-SI dapat juga dibaca secara lain, seperti yang cenderung dilakukan pada waktu ini. Ia sekadar mempertegas bahwa aneka alasan perbedaan yang selama ini dikumandangkan hanya sekadar selubung pembalut alasan-alasan sebenarnya, yakni perebutan kursi, ambisi pribadi, dan sederetan lainnya yang melekat pada para politisi yang memang terbiasa "melacurkan diri". Hanya saja, cara penalaran di atas hanya sah apabila Munas Pandaan, berikut hasil-hasil dan tujuan yang ingin dicapainya, yakni mencari jalan penyelesaian kemelut sekaligus menerobos stagnasi roda organisasi di tingkat Pusat<sup>229</sup> dilihat sebagai produk otonom PDI yang steril dari kepentingan di luarnya. Sayangnya, justru hal sebaliknya yang terjadi. Munas Pandaan bukan saja diniatkan sejak awal sebagai arena pembusukan politik bagi tokoh-tokoh SU-SI, dan memproyeksikan Hardjantho sebagai Ketua Umum PDI nantinya,<sup>230</sup> tapi, terlebih lagi, ia merupakan hasil inisiatif

---

229 Pernyataan tokoh-tokoh pemrakarsa Munas Pandaan berulang kali menegaskan hal ini. Lihat misalnya pernyataan pers Marsoesi, *Merdeka*, 26 Februari 1979.

230 Lihat, misalnya pernyataan pers Aberson seperti dikutip *Kompas*, 27 Februari 1979. Ia menyebutkan, "... lalu ada satu sasaran lagi, mendudukkan Hardjantho sebagai Ketua Umum DPD PDI".

kekuasaan ekstra sebagai bagian dari strategi penyelesaian kemelut intern PDI. Penegasan berulang, terutama, oleh Sanusi tentang kesediaannya “mengundurkan diri” dari Ketua Umum DPP PDI, bahkan meski dipenuhi setahun kemudian pada saat penyelesaian kemelut relatif tuntas, semakin meyakinkan bahwa rujuk kilat SU-SI tidak sekadar bertumpu pada alasan-alasan taktis dan pribadi, seperti demi mengamankan “kursi”—sekalipun hal di atas tidak dapat diabaikan begitu saja—tapi juga memiliki akar yang lebih dalam. Rujuk keduanya, dalam beberapa hal, merupakan refleksi dari mekanisme perlawanan politik para penghuni kelas paria secara politik yang telah kehabisan akal dalam mempertahankan diri dari tekanan kekuasaan negara yang luar biasa.

Munas Pandaan telah memberikan pengaruh luar biasa dalam perubahan konfigurasi konflik dan koalisi dalam tubuh DPP PDI, bahkan PDI secara keseluruhan. *Pertama*, bersatunya Sanusi- Usep-Isnaeni-Sunawar (SU-SI) yang didukung MURBA-IP-KI, yang selama ini tak bisa didamaikan dengan Sanusi-Usep. Karenanya, mudah diperkirakan, antara kutub-kutub yang pernah bersengketa ini, walaupun telah bersatu, tetap memendam benih-benih kebencian, ketidakpercayaan, dan kecurigaan. Lebih lagi, mereka tetap terpolarisasi ke dalam faksi-faksi.<sup>231</sup> Demikian pula, rujuk di antara mereka bukan jaminan rujuknya para pengikut di tingkat basis, bahkan tidak pula merupakan jaminan bahwa upaya peyelesaian kemelut bisa tercapai seperti yang mereka bayangkan.<sup>232</sup> Apalagi bila melihat sedemikian luasnya akibat-akibat yang ditimbulkan oleh

---

231 Dari sebuah surat yang dikirimkan Hardjantho dan Sabam atas nama DPP PDI keseluruhan DPD/DPC, tanggal 26 April 1979, No. 45/IN/DPP/IV/1979 tentang “Permasalahan Kemelut dan Petunjuk”, terungkap bahwa SU-SI terpecah ke dalam 3 kubu: Sanusi dengan 3 pengikut; Isnaeni dengan 1 pengikut; sedangkan sisanya di bawah patronase Sunawar.

232 Setelah rujuk SU-SI, tema sentral yang selalu didendangkan adalah bahwa kemelut sudah usai karena mereka telah bersatu.

sengketa antarmereka, optimisme SU-SI bahwa penyelesaian masalah PDI akan tercapai terasa tidak realistis, bahkan cenderung mengabaikan konsekuensi-konsekuensi hukum organisatoris, psikologis, politis, bahkan ideologis yang harus ditanggung PDI.

*Kedua*, rujuk SU-SI—ketika Sanusi-Usep tidak berkonsultasi dengan anggota DPP lainnya, padahal pembebastugasan Isnaeni-Sunawar merupakan keputusan DPP—merupakan langkah “penyeberangan” ke kubu lawan yang selama ini ditempatkan sebagai DPP tandingan. Yang lebih penting lagi, hal tersebut telah mengakibatkan ambruknya “era bulan madu” antara Sanusi-Usep dengan kekuatan PARKINDO-Partai Katolik yang telah berlangsung lebih dari empat tahun. *Ketiga*, ambruknya koalisi Sanusi-Usep-Hardjantho, yang sempat terjadi, walaupun sangat rapuh,<sup>233</sup> dalam menyukseskan misi pembebastugasan Isnaeni-Sunawar, 24 November 1977, yang gagal. Bahkan perkembangan selanjutnya memastikan, pusat sengketa bergeser drastis dari kubu Sanusi-Usep versus Isnaeni-Sunawar, ke SU-SI versus kubu Hardjantho. *Keempat*, terbentuknya koalisi baru antara Hardjantho dengan kubu PARKINDO-Partai Katolik, yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Bahkan Hardjantho dengan kubu Kristen-Katolik sebelumnya bernaung di bawah payung perlindungan kubu-kubu Isnaeni-Sunawar dan Sanusi-Usep yang saling memunggungi, sehingga jarang menghadirkan diri sebagai pelaku-pelaku penting dalam konflik yang terjadi. Peristiwa *Reshuffle* yang mendudukkan Hardjantho dalam DPP *Reshuffle* yang secara keras ingin dihancurkan kubu PARKINDO-Partai Katolik yang tetap bertahan di benteng pertahanan DPP Kongres

---

233 Dalam suatu keterangan pers, Aberson (kubu Sanusi-Usep) mengungkapkan bahwa sebenarnya Sanusi sudah tidak sejalan dengan Hardjantho, ketika figur yang satu ini ingin menempuh rute inkonstitusional dalam penyelesaian konflik. Lihat *Kompas*, 27 Februari 1979.

I adalah ilustrasi yang bagus untuk ini. *Kelima*, untuk pertama kalinya kesolidan kekuatan PARKINDO pecah—walaupun sebelumnya pernah tercederai akibat *recalling* atas Parulian Silalahi sebagai anggota DPRD DKI Jaya.<sup>234</sup> Tetap bertahannya Walandouw (PARKINDO) di kubu Sanusi-Usep yang melebur sebagai SU-SI, yang berakhir dengan penarikannya dari keanggotaan DPR/MPR sekaligus sebagai Bendahara DPP PDI, menandai era konflik internal dalam PARKINDO. *Keenam*, dan ini yang terpenting, munculnya Hardjantho sebagai pilar baru konflik yang semakin memperluas horizon dan memperjamak wilayah konflik. *Ketujuh*, dalam perkembangannya, ambruknya koalisi Sanusi-Usep-Madjid yang telah berlangsung sejak awal kehadiran Sanusi-Usep (ditandai dengan munculnya “Kelompok Konstitusi” yang diproklamirkan Madjid-Aberson) sama sekali tidak memihak dalam kemelut yang ada, kecuali terhadap tegaknya konstitusi partai dan peraturan perundang-undangan.

Dari gambaran di atas, terekam adanya perubahan drastis konfigurasi baik koalisi maupun konflik di antara kekuatan-kekuatan dalam PDI. Tiga kutub utama yang saling mengintip dan mencakar menandai perjalanan PDI pasca Munas Pandaan, masing-masing: Kelompok SU-SI yang berintikan Sanusi-Usep-Isnaeni-Sunawar-MURBA-IP-KI versus Kelompok Pandaan yang berintikan Hardjantho- PARKINDO-Partai Katolik. Di antara dan sekaligus di luar keduanya, berdiri Kelompok Konstitusi, yang berintikan Madjid-Aberson yang nantinya akan menjadi inti dari salah satu pilar konflik di periode berikutnya.

## **E. Ke Arah Kongres II: Perjalanan Tanpa Tujuan**

Sejak konflik yang diawali munculnya Ketetapan Reshuffle,

---

<sup>234</sup> *Recalling* atas P. Silalahi dibicarakan dalam rapat DPD PDI, 17 Oktober 1979. Lihat “Kesimpulan Rapat Kelompok Organisasi DPD PDI”, 17 Oktober 1979.

tuntutan untuk menghadirkan kongres sebagai lembaga yang paling representatif untuk menyelesaikan kemelut internal telah santer terdengar. Bahkan salah satu tugas pokok DPP 16 Januari (produk penyelesaian politis yang kembali mempertautkan DPP Kongres I dengan DPP Reshuffle) adalah menyelenggarakan Kongres II sampai batas waktu akhir 1978. Namun, dalam perkembangannya bukan saja persiapan ke arah tersebut dijegal oleh konflik demi konflik; isu kongres itu sendiri justru telah menjadi salah satu pusat intrik terpenting yang memunculkan kemelut baru.

Persiapan ke arah Kongres II telah dirintis sejak terbentuknya pokja-pokja. Akan tetapi, setelah Isnaeni-Sunawar memprakarsai pembentukan Presidium Panitia Kongres Nasional, lebih dikenal sebagai Panitia 11, pada 26 Oktober 1978, semua hasil kerja pokja menjadi berantakan. Apalagi *counter-proposal* yang disiapkan kubu Sanusi-Usep sama sekali tak dihiraukan Isnaeni-Sunawar yang telah menuangkan konstruksi Panitia 11 ke dalam ketetapan DPP No. XI/ORG/DPP/XI/1978.<sup>235</sup>

*Konstruksi Panitia 11* beranggotakan Sukarmadidjaja, Wenas, Tanri, Pakan, Andries, Duriat, Hardjantho, Isnaeni, Sunawar, Sabam, dan Wignjosumarsono; dengan anggota-anggota pengganti: Supangat, Nasution, Tahamata, Samosir, dan Adipranoto. Konstruksi ini mengikuti logika formula perimbangan 3:2:2:2:2,<sup>236</sup> yang mengindikasikan kemenangan politik bagi kekuatan IP-KI-MURBA dalam proses penyusunan kepanitiaan yang ada. Dengan komposisi seperti ini, penolakan Sanusi-Usep menjadi sangat beralasan, bahkan imperatif sifatnya, karena tidak satu pun, termasuk anggota pengganti,

---

235 Keputusan ini ditandatangani Isnaeni dan Supangat.

236 Lihat Keputusan DPP PDI No. XI/ORG/DPP/XI/1978, khususnya Pasal 2 dan 3.

yang berasal dari kubunya.

Karena boikot kubu Sanusi-Usep-PARKINDO-Partai Katolik, walaupun telah dikonsultasikan dengan Pangkoptamb dan Sekretariat Negara, panitia ini mengalami kesulitan dalam kerjanya. Panitia 11 bentukan Isnaeni-Sunawar-IP-KI-MURBA tetap melangsungkan rapat-rapat dan menghasilkan cukup banyak hal yang penting, misalnya penyiapan pedoman pembentukan MPP<sup>237</sup> dan DEPERPU, serta penyiapan tata kerja panitia.<sup>238</sup> Namun, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, praktis tidak pernah disertai kubu Sanusi-Usep-PARKINDO-Partai Katolik, dan oleh karenanya sulit melangkah. Kesulitan ini baru terpecahkan ketika Sanusi, karena alasan kesehatan, harus beristirahat total selama dua minggu terhitung sejak tanggal 20 September 1987. Momentum ini dipergunakan secara maksimal oleh kubu Isnaeni-Sunawar-IP-KI-MURBA; apalagi Isnaeni diberi kepercayaan untuk bertindak sebagai koordinator yang bersama-sama ketua lainnya menggantikan tugas-tugas Ketua Umum.<sup>239</sup> Kealpaan Sanusi dalam aktivitas politik sehari-hari PDI yang dimanfaatkan kubu Isnaeni-Sunawar ini akhirnya menuai badai kemelut baru setelah Sanusi kembali aktif.

Pecahnya kemelut baru ini membuat usaha-usaha ke arah

---

237 Konstruksi MPP yang disepakati dalam rapat DPP PDI (tanpa kesertaan kubu Sanusi), 12 Oktober 1978, terdiri dari 29 anggota DPP ditambah 26 Ketua DPD PDI *ex-officio*, serta 6 orang pimpinan Fraksi. Dengannya keseluruhan anggota MPP berjumlah 61 orang. Lihat "Kesimpulan Rapat DPP PDI", 12 Oktober 1978.

238 Misalnya telah disepakati agar Presidium Panitia bersidang paling sedikit sekali dalam seminggu, agar dibentuk SC dan OC serta LC (*logisting Committee*) guna melancarkan kerja Panitia, dan agar ketua Presidium Panitia Kongres dijabat secara bergiliran. Lihat "Kesimpulan Rapat DPP PDI", 18 Oktober 1978.

239 Lihat surat Sanusi kepada DPD PDI, 21 September 1978. Dalam surat ini, di samping melampirkan keterangan dokter, Sanusi juga melimpahkan kewenangan kepada Isnaeni untuk bertindak sebagai koordinator di DPP PDI.



Kongres II ikut terbengkalai, bahkan perjalanan ke arah kongres itu sendiri telah berubah menjadi arena pergulatan baru. Setelah pembebastugasan Isnaeni- Sunawar oleh Ketua Umum, Sanusi pada tanggal 6 Desember 1987, DPP Sanusi mengadakan rapat. Selain menerima dan mengesahkan keputusan Ketua Umum di atas, rapat juga mulai menata langkah ke arah penyelenggaraan kongres, yakni dengan ditetapkannya kerangka keanggotaan MPP,<sup>240</sup> *pembentukan Panitia Kongres Nasional ke II PDI*, serta pedoman-pedoman tentang Konperda/ Konpercab.<sup>241</sup>

Formasi *Panitia Kongres ke II*, terdiri dari semua anggota DPP PDI dan sekaligus memanfaatkan kelompok-kelompok kerja DPP sebagai Panitia Pengarah (SC) yang dipimpin Wenas, Panitia Pelaksana (OC) yang dipimpin Hardjantho, dan Panitia perbekalan/perlengkapan yang dipimpin Wignjosumarsono. Dengan susunan ini, kubu Isnaeni-Sunawar, termasuk IP-KI-MURBA, disingkirkan dari posisi-posisi penting yang memungkinkan, yang bisa dipastikan ditolak kubu ini. Berdasarkan konstruksi Panitia di atas, pada 8 Desember 1978 diajukan surat permohonan izin Kongres II ke Pangkoptamb, <sup>242</sup> yang kemudian disusul surat serupa pada 5 Februari 1979.<sup>243</sup> Langkah serupa juga ditempuh DPP Isnaeni-Sunawar yang mendasarkan diri pada konstruksi Panitia 26 Oktober 1978 (*Panitia 11*), yang justru oleh kubu Sanusi dipandang belum pernah dituangkan dalam bentuk keputusan DPP dan bahkan telah ditolak dalam rapat DPP tanggal 22 November 1978.<sup>244</sup>

---

240 Lihat "Keputusan Rapat DPD PDI", 6 Desember 1978. MPP beranggotakan 29 anggota DPP plus 6 pimpinan Fraksi, 70 wakil daerah-daerah dan 58 yang diangkat. Jumlah di atas mendasarkan pada formula 18 12 : 12 : 8 : 8.

241 *Ibid.*

242 Lihat pernyataan pers Sanusi dalam *Kompas*, 20 Desember 1979, dan *Merdeka*, 20 Desember 1978, yang ditegaskannya lagi dalam kutipan oleh *Kompas*, 24 Februari 1979.

243 *Kompas*, 24 Februari 1979.

244 Lihat pernyataan pers Sabam dalam *Kompas*, 23 Desember 1978.

Surat permohonan yang sama dari dua DPP yang berbeda menyulitkan posisi Pangkopkamtib yang akhirnya mengambil posisi ambivalen. Di satu sisi, tetap mengakui satu-satunya DPP yang sah adalah yang dipimpin Sanusi,<sup>245</sup> tetapi, di sisi lain, tetap mengharuskan adanya kesatuan-persatuan di antara keduanya sebagai syarat pemberian izin.<sup>246</sup> Bagi kubu Sanusi-Usep syarat ini memungguni pengakuan bahwa DPP yang sah adalah yang dipimpinnya; karenanya Sanusi menolak syarat ini.<sup>247</sup> Sementara oleh kubu Isnaeni-Sunawar, syarat ini diamini dengan persetujuan. Di antara keasyikan kubu Isnaeni-Sunawar dan Sanusi-Usep memperebutkan “hak berkongres” inilah, penguasa secara diam-diam tetap mencari alternatif penyelesaian. Hal inilah yang tampaknya merupakan alasan mendasar masih tetap digantungnya pemberian izin kongres.

Keterlibatan Pemerintah, diawali dengan perintah Presiden Soeharto kepada Kabakin untuk menemukan cara-cara penyelesaian kemelut PDI. Kabakin mulai menghadirkan diri secara resmi di tengah-tengah kancah pertikaian elite PDI sejak 18 Desember 1978.<sup>248</sup> Selepas serangkaian pertemuan dengan masing-masing unsur—suatu hal yang semakin memperkokoh eksistensi unsur— Kabakin sampai pada keyakinan, kongres merupakan modal yang sebaiknya ditujukan untuk mencari penyelesaian, dan keikutsertaan Pemerintah adalah mutlak. Hal terakhir ini menemukan pbenarannya, baik karena alasan perundang-undangan (UU No. 3 tahun 1975) maupun karena pertimbangan-pertimbangan politis yang wajar.<sup>249</sup>

---

245 Lihat pernyataan pers Sudomo dalam *Ibid.*

246 *Ibid.*

247 Lihat pernyataan pers Sanusi, seperti dikutip *Kompas*, 24 Februari 1979.

248 Dari sebuah radiogram yang dikirimkan Kabakin kepada Gubernur/KDH seluruh Indonesia, terungkap bahwa Bakin kembali ditugaskan untuk menangani kemelut PDI sejak 18 Desember 1978.

249 *Ibid.* Kesimpulan/penilaian di atas didasarkan pada hasil serial pertemuan dengan kedua kubu yang bertikai di samping dengan DPD-DPD PDI.

Dua kesimpulan pokok ini mewakili realitas dan sebenarnya dapat dipakai Kabakin sebagai titik pijak penyelesaian. Tetapi Kabakin sendiri tampak masih ragu-ragu terlibat lebih jauh. Keragu-ruguan ini bersumber pada keinginan untuk semaksimal mungkin menjauhkan Pemerintah dari persoalan PDI, sementara pada saat yang bersamaan, ragu-ragu pula membiarkan PDI menemukan mekanisme penyelesaian sendiri. Sikap ragu-ragu dan serba tanggung ini menciptakan celah bagi kehadiran para "godfather politik" dari pusat-pusat kekuasaan ikut bermain di kandang sang Banteng, yang justru semakin mengeruhkan situasi dan melanggengkan kemelut.

Kesimpulan pertama, ide kongres merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan kemelut bukannya tanpa masalah. Kabakin dihadapkan pada kesulitan memastikan siapa yang akan dipercayai menyelenggarakan. Rangkaian konsultasi, baik dengan kubu Sanusi-Usep maupun dengan kubu Isnaeni-Sunawar, memberikan arah yang sangat kabur. Kubu Sanusi menawarkan dua pilihan: penyelenggara kongres adalah DPP Sanusi dan/atau kongres ditangguhkan sampai kemelut diselesaikan dahulu. Sedangkan kubu Isnaeni-Sunawar menawarkan lima alternatif: Pemerintah menunjuk DPP Isnaeni-Sunawar sebagai penyelenggara; penyelenggaranya adalah Presidium Panitia Kongres ke II (Panitia 11) bentukannya; para penanda tangan Deklarasi Fusi; atau Panitia bentukan Pemerintah yang anggota-anggotanya diambil dari dua kubu yang bertikai.<sup>250</sup>

Alternatif-alternatif yang ditawarkan kedua kubu, menyisakan ruang yang sangat sempit bagi kompromi, kecuali alternatif terakhir. Pengambilan salah satu alternatif bisa dipastikan akan mengundang reaksi kubu lainnya, yang berarti semakin memperjamak benih-benih konflik yang sudah sangat

---

250 *Ibid.*

jamak. Karenanya, Kabakin menghadirkan dua kemungkinan lain: penyelenggara kongres adalah DPP PDI minus PNI; dan/atau penyelenggara kongres adalah daerah-daerah.<sup>251</sup> Untuk alternatif kedua ini, beberapa daerah berbobot sedang dijajaki.<sup>252</sup> Dalam penjajakan berikutnya muncul skenario baru, yakni penyelenggara kongres adalah DPP PDI minus Sanusi-Usep-Isnaeni-Sunawar.<sup>253</sup> Gagasan ini bukan saja dipandang baik oleh Kabakin, tetapi lebih lanjut diperkenankan untuk berkembang dan bahkan ditawarkan ke daerah-daerah.<sup>254</sup> Inilah cikal bakal lahirnya Munas Pandaan seperti yang sudah dibicarakan di atas. Ide ini bergulir dengan kecepatan luar biasa, menjangkau tokoh-tokoh dalam DPP PDI, terutama Hardjantho dan kekuatan PARKINDO-Partai Katolik dan kalangan generasi muda yang dianggap potensial seperti Suryadi, yang akhirnya, secara kolektif, “memplot” berlangsungnya Munas Pandaan.

Apabila spekulasi yang berkembang bahwa Hardjantho memendam ambisi menjadi Ketua Umum DPP PDI adalah benar—dan ini besar sekali kemungkinannya—maka dapat diperkirakan adanya jaminan baginya untuk memimpin PDI di era pasca pemusnahan elite-elite tua, sebuah skenario yang juga dibuat pada Kongres I. Jaminan inilah yang menggoda Hardjantho menyepakati gagasan Kabakin di atas. Dukungan ini secara demonstratif diekspresikan dalam wujud berbalik menyerang Sanusi-Usep yang sebelumnya habis-habisan didukungnya. Hardjantho, elite-elite PARKINDO-Partai Katolik, dan Suryadi sebagai perwakilan generasi muda PDI, sebelumnya bukan saja ikut mendukung keputusan Sanusi membeastugaskan Isnaeni-Sunawar, tapi juga mendorongnya. Karenanya, ketika komponen-komponen ini memutuskan untuk

---

251 *Ibid.*

252 *Ibid.*, masing-masing DPD Jatim, DIY, Jateng, dan Sumatera Utara.

253 *Ibid.*

254 *Ibid.*

menyangkali produk sendiri, maka ini sulit dibaca lain kecuali bahwa pengingkaran ini merupakan bagian dari skenario besar guna menciptakan situasi kemelut yang membenarkan penyingkiran tokoh-tokoh SU-SI.

Bertumpu pada kemungkinan-kemungkinan di atas, maka Munas Pandaan bisa dieja sebagai bagian dari suatu strategi makroyangingin "menyudahi" peran politik politisi tua, terutama yang bersumber dari eks PNI. Skenario yang baru menemukan bentuk riilnya di arena Kongres III, April 1986. Strategi penyingkiran lewat Munas Pandaan—yang ingin metampakkan kesan demokratis— yang bertumpu pada gagasan Pemerintah yang dibenarkan, bahkan dilakonkan, para sejawat PDI sendiri, bagaimanapun, mengecewakan Sanusi. Sanusi bukan saja merasa telah dikhianati Pemerintah dan rekan sendiri, tapi, lebih lagi, merasa disia-siakan pengorbanannya karena kehadirannya di PDI justru atas kehendak dan permintaan Presiden Soeharto.

Indikasi skenario penyingkiran politik elite tua PNI ini semakin jelas dengan munculnya pernyataan Sudomo bahwa Pemerintah tetap tidak akan memberikan izin kongres, sekalipun Sanusi-Usep serta Isnaeni-Sunawar telah bersatu, sebelum masalah Pandaan ikut terselesaikan.<sup>255</sup> Walaupun rujuk SU-SI sangat rapuh dan bahkan cenderung mengabaikan implikasi-implikasi luas yang ditimbulkan konflik mereka, tapi sebagai modal ke arah penyelesaian kemelut, mestinya hal itu dapat dipertimbangkan. Apalagi rujuk mereka merupakan bagian dari *conditionalities* yang diwajibkan Pangkopkamtib sebelum pemberian izin berkongres. Namun, hal ini tidak dilakukan, bahkan disyaratkan untuk menyelesaikan terlebih dahulu masalah yang timbul karena Munas Pandaan, yang justru disponsori Pemerintah. Dengan ini, "kasus Pandaan" telah difungsikan sebagai "gejala baru" guna lebih mematangkan

---

255 Lihat pernyataan pers Sudomo, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 8 Maret 1979.

proses penyingkiran, sekaligus memberikan kesempatan munculnya secara lebih kuat kubu Pandaan.

Ancaman pembusukan politik yang demikian riil, diikuti perasaan dikhianati dan disia-siakan ini, bolehjadi merupakan pendorong sekaligus pembenar bagi langkah rujuk Sanusi-Usep dan Isnaeni-Sunawar. Langkah yang justru menjadi titik lemah kubu SU-SI karena secara maksimal akan dieksploitasi sebagai senjata menyerang oleh kelompok Pandaan. Tetapi ini tidak berarti Munas Pandaan semata-mata merupakan suatu skenario mendadak yang tidak mempunyai alasan-alasan obyektif. Ia sebenarnya merupakan ekspresi dari akumulasi kekecewaan yang telah lama muncul di daerah-daerah, yang akhirnya mendapat bentuk yang lebih konkret setelah terjadi pertemuan dengan ide Pemerintah yang relatif sejajar. Dengan kasus ini, horizon konflik tidak lagi sekadar menghadap-hadapkan sesama elite PDI di tingkat nasional, tapi justru telah menghadapkan elite pusat dengan elite lokal dalam situasi konflik yang akan terus bertahan sampai Kongres III.

Kembali pada rencana penyelenggaraan kongres, kubu Hardjantho juga secara resmi mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Kongres II. Dengannya, terdapat tiga surat permohonan izin kongres yang dimajukan tiga kubu yang berbeda, tapi mengatasnamakan parpol yang sama, yakni PDI. Hal ini, jelas menyulitkan Pemerintah, karena sekalipun rezim lebih condong ke kubu Pandaan, tapi tidak dapat begitu saja mengabaikan suara dua kubu lainnya. Persoalan siapa yang berhak menyelenggarakan kongres, akhirnya bergeser, bukan lagi antara kubu Sanusi-Usep-Hardjanto-PARKINDO-Partai Katolik versus kubu Isnaeni-Sunawar-IP-KI-MURBA, tapi justru antara kubu SUSI-IP-KI-MURBA versus Hardjantho-PARKINDO-Partai Katolik yang disokong beberapa daerah, dengan Pemerintah berdiri kokoh di belakangnya (kelompok Pandaan). Kubu Hardjantho, sebagai konsekuensi dari asal-usulnya,

lebih akomodatif terhadap usulan Kabakin, yakni sepakat mengembalikan posisi PDI pada penyelesaian 16 Januari 1978—yang juga disepakati kelompok SUSI—dan mempercayakan sepenuhnya pembentukan Panitia Kongres Nasional kepada kearifan Pemerintah—yang tidak disepakati kubu SU-SI.<sup>256</sup>

Pada saat hampir bersamaan, kubu PARKINDO-Partai Katolik mulai memasuki fase kejenuhan dalam mengikuti rangkaian kemelut yang ada, dan akhirnya memasrahkan kepada Pemerintah untuk sepenuhnya menangani PDI.<sup>257</sup> Sekalipun terjadi perbedaan-perbedaan yang tajam di antara kubu-kubu yang bertikai, tidak berarti skenario penyelesaian tanpa mengandalkan jasa Pemerintah tidak mereka upayakan karena, pascarujuk SU-SI, pihak ini mulai merintis jalan penyelesaian dengan mengajak PARKINDO-Partai Katolik bergabung,<sup>258</sup> yang disambut negatif. Bahkan kubu Kristen-Katolik menesali langkah "damai" Sanusi-Usep dengan Isnaeni-Sunawar.

Internal PNI sendiri telah pula mengadakan pertemuan,

---

256 Dapat dilihat dari "Surat" DPP PDI yang ditandatangani Hardjantho-Sabam, 8 September 1979, dan 16 Oktober 1979 kepada DPD/DPC seluruh Indonesia. Kedua surat ini menegaskan, antara lain, dikembalikannya posisi DPP PDI ke hasil penyelesaian 16 Januari, serta mempercayakan pembentukan *Panitia Kongres Nasional* kepada Pemerintah. Pada surat yang kedua bahkan ditegaskan, "...pembentukan Panitia yang disusun sendiri oleh DPP PDI adalah tidak mungkin dapat dicapai atau dijamin....". Gagasan di atas tidak disetujui kubu SU-SI-IP-KI-MURBA. Hal ini terungkap dalam surat mereka kepada Presiden, 10 November 1979 perihal "*Perkembangan Dalam Tubuh PDI*".

257 Lihat "Surat" kubu PARKINDO-Partai Katolik kepada Presiden, 25 April 1979, yang ditandatangani Wenas dan Wignjosumarsono. Sebelumnya, Wignjosumarsono, pada 15 Februari telah menghadap Presiden untuk menyampaikan hal serupa, yakni "*ketidakmampuan mereka untuk menyelesaikan kemelut yang ada, dan mohon pihak Presiden untuk turun tangan*".

258 Ditandai oleh pertemuan antara Sanusi dengan Kasimo, sesepuh Partai Katolik, yang juga Ketua DEPERPU PDI, 21 Maret 1979, dan pertemuan-pertemuan antara Isnaeni, Wenas, dan Wignjosumarsono pada 2, 3 dan 10 April 1979. Lihat surat DPP PDI kubu SU-SI kepada Presiden perihal "*Konsolidasi PDI*", *Op.cit.*

khususnya di antara bekas pemimpin PNI hasil Kongres Semarang.<sup>259</sup> Tapi terlepas dari kesepakatan atas langkah damai Isnaeni-Sanusi, forum ini lebih berfungsi untuk menghakimi Hardjantho ketimbang sebagai forum untuk menemukan cara-cara yang paling mungkin menyudahi kemelut.<sup>260</sup> Nyatanya, forum lebih berstatus sebagai arena pembuktian dukungan yang dimiliki kubu SU-SI—sesuatu yang tampaknya diilhami prinsip “massa aksinya” PNI—dan bukannya forum ke arah penyelesaian kemelut. Upaya kubu SU-SI ini, memang gagal menuai hasil bermakna. Akan tetapi, hal itu tetap menarik untuk disimak karena merupakan usaha politik untuk membenturkan “dukungan massa” yang dimilikinya terhadap “dukungan kekuasaan” yang diperoleh kubu Hardjantho (Pandaan). Strategi ini, sedikit banyak dapat menyelamatkan posisi tawar-menawar SUSI, yang terbukti dengan berhasil diredamnya tuntutan Munas Pandaan. Bahkan kubu SU-SI dan Pandaan berhasil mencapai “Kata Mufakat Bersama”<sup>261</sup> yang memuat lima kesepakatan pokok, masing-masing:<sup>262</sup> *pertama*, kembali bersatu dalam DPP 16 Januari; *kedua*, sumber sengketa dianggap tidak pernah ada; *ketiga*, kesepakatan sejak 16 Januari sampai dengan November 1979 tetap berlaku; *keempat*, siap mengantarkan PDI memasuki kongres; serta *kelima*, dalam rangka pelaksanaan kongres dan konsolidasi organisasi, di samping tetap berpegang pada AD/ART, juga akan selalu memperhatikan saran-saran dan pendapat Pemerintah. Demikian pula, bagi kedua kubu diwajibkan

---

259 Pertemuan berlangsung pada 2 April 1979. Sebanyak 10 dari 14 fungsionaris menyempatkan diri untuk hadir, kecuali Madjid yang sakit, Manuaba yang sudah pindah mukim ke Bali, Dipoyuwono yang sedang berada di Kanada, dan Hardjantho yang tidak memberikan kabar. Lihat *Ibid.*

260 Penegasan berulang di forum ini bahwa Hardjantho tidak bersedia hadir, dan sebagainya, bisa diperkirakan dimaksudkan untuk menyudutkannya.

261 Naskah ini ditandatangani pada 20 Juli 1979 oleh Sanusi, Isnaeni, dan Hardjantho di depan Kabakin.

262 Lihat, “Kata Mufakat Bersama”, 20 Juli 1979.



meyakinkan pendukungnya masing-masing.<sup>263</sup>

Namun, kesepakatan ini, khususnya mengenai "kembali bersatu dalam DPP 16 Januari", langsung diadang persoalan lain, yakni "pembengkakan" anggota DPP dari 29 menjadi 33 orang—bahkan 35, seandainya PNI pun memanfaatkan "jatahnya"—sebagai akibat bertambahnya 4 anggota dari unsur IP-KI-MURBA.<sup>264</sup> Persoalan 29 atau 33 anggota DPP ini akhirnya menjadi salah satu titik rawan yang hampir saja menggagalkan skenario penyelesaian di antara mereka. Demikian pula, kesepakatan terakhir, khususnya pada kalimat "akan selalu memperhatikan saran-saran dan pendapat Pemerintah", hadir sebagai persoalan tersendiri.

Mengekori kesepakatan 20 Juli di atas, berdasarkan butir 5 dalam Kata Mufakat Bersama, diadakan pertemuan gabungan antara Kabakin dengan Sanusi-Isnaeni-Hardjantho, 27 Juli 1979. Forum ini menghasilkan kesimpulan, menghargai prakarsa lahirnya dokumen tersebut, dan yang dianggap penting oleh Pemerintah adalah butir 1 dan 5. Kesimpulan lainnya, karena salah satu sumber malapetaka PDI adalah penyusunan Panitia Kongres Nasional, maka Pemerintah menempuh kebijaksanaan untuk meminta daftar usulan nama-nama dari kedua kubu yang akan dibahas dalam pertemuan DPP 16 Januari, yang merupakan satu paket penyelesaian.

Dengan titik tolak di atas, Kabakin mengirimkan surat perihal "Saran Susunan Panitia Nasional Kongres PDI ke Iiyang

---

263 Lihat, "Pokok-Pokok Permasalahan PDI....," *Op.cit.*

264 Setelah Isnaeni dikukuhkan sebagai Pejabat Ketua Umum PDI tanggal 24 November 1978, ia memenuhi tuntutan lama IP-KI-MURBA sebagai kompensasi atas dukungan mereka selama ini. Sanusi, setelah bersekutu ke dalam SU-SI, tampaknya terpaksa harus menerima ini. Bahkan adda disebutkan bahwa dialah yang selalu aktif melobi kubu Pandaan untuk menerima penambahan ini.

akan datang”,<sup>265</sup> yang rencananya akan dibahas dalam pertemuan bersama, akhir minggu pertama November 1979. Surat Kabakin juga menegaskan bahwa Panitia yang disarankannya bertanggung jawab kepada DPP PDI. Komposisi Panitia yang diusulkan Kabakin, yang didasarkan pada nama-nama yang dinominasikan masing-masing kubu, praktis menggunakan mekanisme unsur sebagai dasar penyusunannya.<sup>266</sup> Formula yang digunakan adalah 5 : 4 : 4 : 2 : 2, berturut-turut untuk PNI, PARKINDO, Partai Katolik, IP-KI dan MURBA, dengan susunan selengkapnya sebagai berikut.<sup>267</sup>

I.	Ketua Umum	Hardjantho Sumodisastro
	Wakil Ketua I	A. Wenas
	Wakil Ketua II	F.S. Wignjosumarsono
	Wakil Ketua III	A. Sukarmadidjaja
	Wakil Ketua IV	M. Nasution
II.	Sekretaris Umum	Sabam Sirait
	Wakil Sekretaris I	R.G. Duriat
	Wakil Sekretaris II	Penangian Siregar
III.	Steering Committee	
	Ketua	Budi Hardjono
	Wakil Ketua	A. Tagor Harahap
	Sekretaris	T.A.M. Simatupang.
IV.	Organizing Committee	
	Ketua	M.B. Samosir

---

265 Surat ini dikirimkan kepada DPP PDI, 1 November 1979, dengan No. R-1250/XI/1979, dan ditandatangani oleh Yoga Soegama, Kabakin.

266 Dari lampiran surat No. R-1250/XI/1979, terlihat bahwa pada setiap akhir nama anggota panitia ditambahi tanda dalam kurung keterangan asal unsur. Misalnya, Hardjantho (eks PNI). Pengakuan pada eksistensi unsur ini sekaligus semakin mengukuhkan dan membenarkan hal keunsuran ini.

267 Lihat lampiran surat Kabakin, *Ibid.*

Wakil Ketua	John Pakan
Sekretaris	Marsoesi
V. Logistic Committee:	
Ketua	R.G. Duriat
Wakil Ketua	J.H.D. Tahamata
Sekretaris	Notosukardjo.

Komposisi panitia di atas secara jelas menunjukkan bahwa tokoh-tokoh SU-SI dan kubunya tidak terwakili secara proporsional. Oleh karena itu membuahkan penolakan kubu ini. Mudah diperkirakan, komposisi di atas sebenarnya merupakan komposisi DPP baru yang diproyeksikan muncul dalam Kongres II. Penolakan, terutama oleh Sanusi, muncul lewat surat yang ditujukan pada Kabakin<sup>268</sup> dan juga pada Presiden.<sup>269</sup> Dalam surat keberatan kepada Kabakin disebutkan antara lain, "... penyelesaian masalah PDI hanya dapat dicapai dengan sebaik-baiknya jika dilaksanakan berdasarkan mekanisme Partai, seperti diatur dalam naskah asasi Partai sejak Deklarasi 10 Januari 1973..."<sup>270</sup> Sebuah skenario yang mengarah pada upaya penyelesaian yang dikembalikan kepada "para penanggungjawab fusi",<sup>271</sup> yang disebut Sanusi sebagai "usaha terakhir mencari penyelesaian".<sup>272</sup> Surat tersebut juga menegaskan, "...usulan Kabakin mudah untuk ditafsirkan sebagai tetap ingin merealisasi konsep Pandaan".<sup>273</sup> Keberatan ini, oleh kubu Pandaan, segera diterjemahkan sebagai "sikap konfrontatif" dan "apriori" atas uluran tangan Pemerintah, serta ingin *fully independence*, karena

268 Surat ini dikirimkan pada 8 November 1979, No. 425/EX/C/DPP/XI/1979, isinya perihal "Pendapat DPP PDI tentang Surat Kabakin No. R-1250".

269 Lihat tembusan, *Ibid.* Juga lihat "Pokok-pokok Permasalahan PDI, *Op.cit.*

270 Surat kepada Kabakin, *Ibid.*

271 Pernyataan pers Sanusi, *Kompas*, 16 November 1979.

272 Surat kepada Kabakin, ..., *Op.cit.*

273 *Ibid.*

merasa kuat. Lebih lagi, keberatan di atas dipahami sebagai ekspresi dari sikap “*tidak menyetujui pola regenerasi*”.<sup>274</sup>

Bertolak belakang dengan sikap kubu SU-SI, kubu Pandaan lebih akomodatif dan mendukung usulan yang diajukan Kabakin. Dalam rapatnya, 7 November 1979, kubu Pandaan, bukan saja dapat “mengerti” kebijaksanaan Kabakin, tapi juga dapat menerimanya. Kebijakan Kabakin dinilai sebagai maksimal dan cukup akomodatif sebagai jalan tengah ke arah penyelesaian kemelut. Bahkan ditegaskan, pergeseran dari prinsip yang diajukan Kabakin akan berakibat pada buyarnya usaha penggalangan selama ini dan merusak kepercayaan DPD/DPC dan massa PDI terhadap pimpinan PDI dan kewibawaan Pemerintah.<sup>276</sup><sup>275</sup> Sekalipun demikian, kubu Pandaan tetap mengajukan sejumlah catatan korektif, yang justru dimaksudkan untuk menanggalkan kekuasaan DPP. Usulan-usulan korektif ini, antara lain, berupa saran agar Panitia memiliki hubungan kerja yang horizontal dengan DPP 16 Januari dan keduanya wajib bertanggung jawab kepada kongres; perubahan komposisi Panitia (yang tidak bersifat fundamental); penertiban DPD/DPC kembar secara bersama-sama oleh Panitia dan DPP dengan memperhatikan saran dan pendapat MUSPIDA; dan keharusan kongres berlangsung sesuai dengan jadwal.<sup>276</sup>

Kontras pemikiran dalam menafsir kehadiran Pemerintah antara kubu SU-SI yang memosisikannya sebagai tidak atau kurang perlu dan kubu Pandaan yang melihatnya sebagai keharusan satu-satunya, semakin merapuhkan sendi-sendi kesepakatan bersama 20 Juli 1979. Kesepakatan ini akhirnya benar-benar ambruk setelah Kabakin dalam pertemuan 13

---

274 Lihat “Pokok-pokok Permasalahan PDI ...”, *Op.cit.*

275 *Ibid.*

276 Lihat “Risalah Rapat DPP PDI”, 1 November 1979.

November 1979 dengan kedua kubu<sup>277</sup> menyatakan lepas tangan, karena melihat berbagai tanggapan dari mayoritas anggota DPP tidak menghendaki campur tangan Pemerintah.<sup>278</sup>

Sebagai buah dari pertarungan politik, keputusan Kabakin ini merupakan kemenangan kubu SU-SI dan sekaligus tamparan politik bagi kubu Pandaan. Karenanya wajar jika dalam pertemuan tersebut Sanusi menyampaikan terima kasih sekaligus penghargaan pada Kabakin,<sup>279</sup> dan, sebaliknya, pihak Pandaan—yang tercermin dari ungkapan Hardjantho dan Wignjosumarsono—masih tetap mengharapkan Kabakin sedikit "membuka pintu" bagi dialog karena keduanya merasa sudah tidak mampu lagi menyelesaikan kemelut tanpa kehadiran Pemerintah.<sup>280</sup> Tokoh kubu Pandaan lainnya, Sabam, tampaknya cukup lugas dengan sikapnya yang tidak terlampau "menggantungkan diri" pada Pemerintah.<sup>281</sup>

Setelah Kabakin menyatakan lepas tangan, kesepakatan 20 Juli 1979 pun ikut runtuh. Masing-masing kubu akhirnya mengembara sendiri-sendiri. Usaha Sanusi membangun dialog dengan para penanggungjawab (penandatanganan) fusi sebagai bagian dari skenario mengembalikan penyelesaian kemelut ke Deklarasi Fusi—yang disebutkan sebagai alternatif terakhir—berakhir dengan kebuntuan. Bagi kubu PARKINDO-Partai Katolik, langkah Sanusi di atas dibahasakan sebagai "set-

---

277 Pertemuan ini merupakan pertemuan gabungan antarkubu yang bertikai. Hadir dari kubu SU-SI, masing-masing: Sanusi, Sukarmadidjaja, Usep, Pakan, Walandouw, dan Supangat. Sedangkan dari kubu Pandaan, Hardjantho, Wignjosumarsono, dan Sabam Sirait. Pihak Bakin dihadiri oleh Kabakin, Deputi I, Mayjen Rudjito, Deputi III, Mayjen Aswismarmo, serta Brigjen Slamet dan Kolonel Taryono. Lihat "Resume Pertemuan dengan Kabakin", 13 November 1979.

278 *Ibid.*

279 *Ibid.* Lihat pula *Merdeka*, 14 November 1979.

280 *Ibid.* Lihat pula *Kompas*, 14 November 1979.

281 *Ibid.*

*back*” dalam perfusian yang melangkahi berbagai produk yang telah dicapai PDI, seperti Keputusan Kongres, AD/ART, dan sebagainya; dan memungguni UU No. 3/1975 dan GBHN.<sup>282</sup>

Dalam situasi tanpa kepastian seperti ini, tuntutan daerah dan generasi muda semakin menggumpal, baik karena memang telah sampai pada batas kejenuhan atau karena dimobilisasi masing-masing kubu atau *“godfather politik”* dari pusat-pusat kekuasaan.<sup>283</sup> Situasi tanpa kepastian ini, membuahkan kelumpuhan total mekanisme organisasi, yang pada gilirannya, menjadi paspor politik bagi mekarnya tindakan “petualangan politik” yang semakin merumitkan kemelut. Petualangan politik ini mewujudkan diri dalam bentuk pendudukan kantor sekretariat DPP PDI oleh kelompok generasi muda yang dipimpin A.P. Batubara yang memproklamasikan lahirnya “Pimpinan Pelaksana Harian DPP PDI”. Dengan ini, kudeta politik oleh generasi baru hadir sebagai model.<sup>284</sup> A.P. Batubara, dkk., setelah menduduki kantor sekretariat DPP, mengumandangkan “Deklarasi”, yang isinya, antara lain, menegaskan, “krisis kepemimpinan PDI telah mengembangbiakkan krisis organisasi sehingga telah terjadi stagnasi dalam tubuh DPP PDI yang pada akhirnya akan menimbulkan krisis ideologi”<sup>285</sup>

Di samping itu, “demi Pancasila”, seperti yang tertera

---

282 Lihat surat DPP Hardjantho kepada Presiden, 20 November 1979, No. 351 / EX/D/DPP/XI/1979 tentang “Laporan Perkembangan PDI dan Penyelesaian Kemelut DPP PDI”.

283 Rapat DPP SU-SI, 25 Oktober 1979, mensinyalir adanya “rekayasa politik” yang mewarnai penyelesaian.

284 Pendudukan kantor sekretariat DPP PDI ini terjadi pada 15 Desember 1979.

285 Lihat “Deklarasi Pimpinan Pelaksanaan Harian DPP PDI”, 15 Desember 1979 yang ditandatangani oleh Batubara dan M.P. Purwanto.

pada angka V Deklarasi,<sup>286</sup> metampakkan diri sebagai selimut ideologi yang dipakai guna menyakralkan kudeta politik itu.

Dengan alasan-alasan di atas, kelompok ini memutuskan "mengambil alih untuk sementara kepemimpinan PDI di Pusat<sup>287</sup> hingga terlaksananya Kongres II. Tindakan luar-biasa dan "berani" dari Batubara dkk, ini membuahkan suara-suara pro dan kontra. Kubu Sanusi dan Hardjantho, menolak tindakan tersebut atas nama kesakralan konstitusi. Kudeta dinilai inkonstitusional,<sup>288</sup> yang juga dibenarkan banyak kalangan.<sup>289</sup> Senandung mendukung langkah Batubara juga terdengar, misalnya dari pernyataan Suryadi bahwa hanya ada dua resep penyelesaian kemelut PDI, yakni tindakan kudeta yang berani atau keterlibatan Pemerintah tanpa perlu malu-malu atau sungkan.<sup>290</sup> Keyakinan yang akhirnya membuktikan kebenarannya pada pengalaman Suryadi sendiri ketika ia diempaskan di arena Kongres Medan 1993 melalui mekanisme yang kurang lebih sama. Batubara sendiri, memang membenarkan tindakannya sebagai "inkonstitusional", tapi dia juga mengharapkan untuk melihat isi tindakan tersebut dan bukan pada cara yang digunakannya.<sup>291</sup> Apalagi baginya tindakan

---

286 *Ibid.*, angka V, yang menegaskan, "oleh karena ideologi PDI adalah ideologi Negara yaitu Pancasila, hal mana tentu saja tidak dapat lagi ditawarkan atau direvisi, dan kewajiban PDI adalah untuk mengisi dan mengemban Pancasila ..."

287 *Ibid.* DPP PDI dipimpin oleh Pimpinan Pelaksana Harian dengan ketuanya adalah Batubara, Sekretaris Purwanto, dan anggota-anggota, masing-masing T.H. Sitorus, T.M. Arifin, N. Hadisardjono, B. Tambunan, L. Gaina Dara, Soeharno, dan A. W. Siregar.

288 Lihat, misalnya, *Kompas* dan *Berita Buana*, 19 Desember 1979.

289 Lihat, misalnya, keterangan pers Ipik Asmasubrata dalam *Berita Buana*, *Ibid.*; pernyataan pers Dimmy Haryanto (Wasekjen DPP PDI era Suryadi), *Ibid.*; dan pernyataan pers Hardjantho dalam *Berita Buana*, 24 Desember 1979, yang menolak dua resep Suryadi.

290 Lihat pernyataan pers Suryadi dalam *Kompas*, 19 Desember 1979.

291 Keterangan pers A. P. Batubara, seperti dikutip, *Berita Buana*, 19 Desember 1979.

pimpinan PDI selama ini pun tidak meniti jalur konstitusi. Kudeta Batubara, dkk., kemudian diikuti surat pemberitahuan pada tanggal 17 Desember 1979 kepada anggota DPP PDI,<sup>292</sup> yang akhirnya melahirkan reaksi keras dari DPD DKI Jaya di bawah pimpinan Soewondo.

Jejak ke arah “kudeta” Batubara sudah tampak sebulan sebelumnya, yakni dengan munculnya memorandum yang dirancang oleh “Forum Komunikasi dan Studi Pemuda PDI”, 21 November 1979.<sup>293</sup> Bahkan di kalangan generasi tua pun kecenderungan serupa juga merebak karena tak lagi menemukan alternatif.<sup>294</sup> “Kudeta” Batubara, dkk., bukan tindakan otonom yang bebas dari kepentingan kekuatan di luar PDI. Bahkan sangat kuat kesan bahwa langkah ini “setengah direstui” Pemerintah. Hadirnya para petugas dalam pakaian preman pada saat-saat berlangsungnya “kudeta” yang mengambil sikap pasif dan *low profile*, diikuti pernyataan pers Batubara yang menandakan, “apa salahnya jika ada pihak seperti Pemerintah yang ikut membantu” semakin memperkuat dugaan bahwa langkah Batubara “direstui”.<sup>295</sup> Bisa diperkirakan bahwa langkah Batubara, dkk., jika tidak secara langsung dimaksudkan untuk memaksa kubu Sanusi untuk menerima uluran tangan Pemerintah, setidaknya-didaknya itu dimaksudkan sebagai tekanan bagi semua kubu yang bertikai untuk segera menuntaskan

---

292 Surat ini diberi nomor 17/PPH/PDI/XII/79 perihal “Pemberitahuan”. Isi surat secara pokok mengevaluasi DPP PDI yang dinilai telah gagal mempersatukan potensi di pusat dan daerah-daerah.

293 Lihat “Memorandum Forum Komunikasi & Studi Pemuda PDI”, 21 November 1979. Lembaga ini dimotori oleh A. W. Siregar, dkk.

294 Misalnya pernyataan pers Ipik Asmasubrata dalam *Berita Buana*, 27 November 1979.

295 Ketika Batubara ditanyai wartawan tentang kehadiran para petugas keamanan berpakaian preman lengkap dengan *handie-talkie*—oleh wartawan disebutkan bahwa hal itu adalah isyarat adanya “restu”—Batubara hanya tersenyum dan mengajukan jawaban seperti dikutip di atas. Lihat *Kompas*, 19 Desember 1979.



kemelut. Namun, bila mengingat bahwa setelah itu Sudomo mulai menggantikan posisi Kabakin, maka bisa pula ditafsirkan bahwa "kudeta" Batubara, dkk., merupakan prakondisi yang memang dibutuhkan untuk mengabsahkan kehadiran kembali Negara di tengah kancah pertarungan internal PDI. Hal ini diperlukan bukan karena secara konstitusional Pemerintah tidak dijamin haknya untuk "membina" partai yang senantiasa bermakna pengendalian dan pendisiplinan politik, tapi justru karena Pemerintah, lewat Kabakin, telah telanjur menyatakan lepas tangan. Karenanya, sebuah alasan yang logis mesti diciptakan guna menghalalkan kehadiran negara.

Pada tingkat paling minim, "kudeta" ini kembali memaksa Sanusi meminta bantuan Pangkoptim<sup>296</sup> dan Kadapol Kodak Metro Jaya<sup>297</sup> untuk "menertibkan" kantor Sekretariat DPP PDI. Bagi Sanusi, tindakan di atas bukan lagi sekadar urusan internal PDI, tapi sudah merupakan urusan keamanan, bertolak belakang dengan Sudomo yang masih tetap pada pendirian bahwa hal tersebut masih merupakan urusan internal PDI.<sup>298</sup> Di fase berikutnya, pada 20 Desember 1979, kubu SU-SI mendatangi Pangkoptim guna menemukan alternatif penyelesaian kemelut. Dalam forum ini telah diisyaratkan akan diselenggarakannya Kongres II pada April 1980.<sup>299</sup> Sehari selepasnya, 21 Desember 1979, Pangkoptim mengadakan pertemuan dengan Batubara, yang akhirnya sepakat melakukan "pertemuan menyeluruh", pada medio Januari 1979. Dalam

---

296 Hal ini terungkap dari adanya surat DPP SU-SI pada Pangkoptim, 15 Desember 1979, No. 767/EX/C/DPP/XII/ 1979 perihal "Ketertiban Kantor DPP PDI".

297 Surat DPP SU-SI kepada Kadapol Kodak Metro Jaya, 15 Desember 1979 perihal "Mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak dari ruangan gedung DPP PDI".

298 Keterangan pers Sudomo dalam *Merdeka*, 19 Desember 1979.

299 Pertemuan dihadiri Sanusi, Sunawar, Nasution, Sukarmadidjaja, dan Pakan. Pangkoptim didampingi Pangdam V Jaya Mayjen Norman Sasono dan Kadapol Metro Jaya Anton Sudjarwo.

forum inilah, Batubara menyerahkan kunci kantor DPP pada Pangkopkamtib yang telah menyegel kantor tersebut sehari sebelumnya. Akibatnya, baik DPP kubu Sanusi (SU-SI), DPP kubu Hardjantho (Pandaan), maupun Pimpinan Pelaksana Harian yang merupakan DPP Batubara, harus “menggelandang” dalam mengendalikan PDI.

Kronologi di atas mengungkapkan ke permukaan, bahwa “kudeta” Batubara, dkk., akhirnya benar-benar menunjukkan efektivitasnya atau “ada hikmahnya”, menurut versi internal PDI. Peristiwa ini telah dapat memaksa kedua kubu yang bersengketa untuk lebih realistis melihat problema PDI yang sudah benar-benar darurat. Alasan bagi penyelesaian konflik kini mulai terbuka kembali.

Pada tanggal 23 Desember 1979, pertemuan antara kubu Hardjantho dengan Pangkopkamtib dilakukan,<sup>300</sup> yang tampaknya merupakan prosedur rutin sebagai awal menuju penyelesaian kemelut. Suatu forum penjajakan awal bagi “pertemuan menyeluruh”. Pada 26 Desember 1979, pertemuan antara kubu SU-SI dan Pandaan dilakukan,<sup>301</sup> yang kembali mengungkapkan rencana “pertemuan menyeluruh”. Dijadwalkan, dalam forum “pertemuan menyeluruh” akan disampaikan *appeal* Ketua Umum kepada PARKINDO-Partai Katolik agar rela menerima penambahan empat anggota DPP baru dari IP-KI dan MURBA.<sup>302</sup> Hal ini berkaitan dengan kembali mencuatnya persoalan “membengkaknya” anggota DPP. Kubu IP-KI-MURBA tetap bersikukuh, bahkan mengancam akan mengundurkan

---

300 Pertemuan berlangsung di kediaman Sudomo. Hadir dalam forum ini: Hardjantho, Sabam, Wenas, Samosir, T.A.M. Simatupang, Wignjosumarsono, dan Duriat.

301 Pertemuan dihadiri Sanusi, Isnaeni, Sunawar, Sukarmadidjaja, M. Nasution, Hardjantho, Wenas, Sabam Sirait, dan Wignjosumarsono.

302 Lihat “Risalah Pertemuan Pangkopkamtib dengan anggota-anggota DPP PDI”, 26 Desember 1979.

diri dari PDI bila tuntutan mereka tidak dipenuhi,<sup>303</sup> sementara PARKINDO-Partai katolik, menolak penambahan yang ada.

Di antara keasyikan para seteru menikmati pesta reuni yang dirancang Pangkoptik, Kelompok Konstitusi yang pada awalnya *low profile* mulai menuntut kesertaannya dalam proses penyelesaian. Bagi kubu yang dimotori Madjid ini, bukan DPP Diponegoro (SU-SI) dan Pandaan saja yang harus didengar, tetapi pihak-pihak lain harus disertakan karena mewakili mayoritas nurani massa. Kubu Madjid, bahkan mengusulkan agar kubu-kubu yang bertikai disisihkan dalam proses berikutnya, sekalipun tidak bermakna harus dimusnahkan secara politik. Secara praktis Kelompok Konstitusi mengusulkan agar Panitia Kongres nantinya tidak berasal dari dalam DPP guna menghindari "penunggan" oleh kubu yang bertikai.<sup>304</sup>

Sebenarnya masih banyak masalah yang mengganjal dalam pertemuan menyeluruh kali ini.<sup>305</sup> Namun, massa dan pers membutuhkan berita gembira, dan, karenanya, para petinggi yang saling bertikai perlu menegaskan bahwa DPP telah bersatu.<sup>306</sup> Selepasnya, pada 5 Januari 1980, Pangkoptik kembali mengadakan pertemuan dengan kubu Pandaan yang mengajukan beberapa syarat yang harus dipenuhi kubu SU-SI, karena bila tidak kubu ini akan "menghentikan dialog dengan pihak sana". Kubu Pandaan juga meminta Pangkoptik "mem-by pass" semua kegiatan agar dapat langsung ke arah kongres. Yang menarik dari rangkaian pertemuan terpisah antara kubu yang bertikai dengan Pangkoptik adalah

---

303 *Ibid.* Ancaman ini dilontarkan oleh Sukarmadidjaja dan Nasution.

304 Lihat *Merdeka* dan *Kompas*, 3 Januari 1980.

305 Lihat "Risalah Pertemuan Pangkoptik dengan DPP PDI", 5 Januari 1980. Masalah-masalah tersebut, antara lain: jumlah anggota DPP (29 atau 33); pembentukan Panitia Kongres; Penyelesaian DPD/DPC kembar; masalah tenaga sekretariat, dan pembekuan bantuan keuangan.

306 "Risalah ...", 26 Desember 1979, *Op.cit.*

sikap Pangkoptikamtib yang “mendukung” semuanya, sehingga setiap kubu merasa “dibenarkan” dan di-*back up*”. Akibatnya, masing-masing dituntun semakin “mendekatkan diri” kepada Pangkoptikamtib.

Rapat menyeluruh diselenggarakan pada 7 Januari 1980 di Wisma Yani, dan 10 Januari 1980 di Wisma Elang Laut. Pertemuan kubu-kubu yang sudah resmi berdamai ini lebih sebagai sopan santun politik atau bahkan keterpaksaan ketimbang mewakili realitas. Ketegangan hubungan masih saja menyelimuti, seperti terungkap dalam kesimpulan rapat DPP Hardjantho, 13 Maret 1980, ketika kubu Sanusi dipandang “*tidak ikhlas menerima uluran tangan Pemerintah, bahkan bermaksud menggagalkan*”.<sup>307</sup> Tujuannya, masih menurut kubu Hardjantho, agar konflik terus berlanjut dan kongres tidak dapat diselenggarakan. Karenanya, kelompok Hardjantho merasa perlu menyiapkan “strategi” tersendiri guna menghadapi “*pihak sana*”.<sup>308</sup>

#### **F. Panitia Ad Hoc: Pertarungan Dua “Empu”**

Guna menerobos kemacetan, Pangkoptikamtib, di samping mengusulkan agar masalah membengkaknya anggota DPP “ditunda”, juga mengusulkan pembentukan Panitia Ad Hoc yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan kongres yang dijadwalkan pada April 1980. Ide ini pertama kali dilontarkan dalam pertemuan 14 Januari 1980 dan terus dibicarakan dalam pertemuan 21 Januari, 29 Januari (batal), serta 21 Februari 1980, yang diselingi dua kali pembatalan rapat serupa, dan mencapai puncaknya pada rapat 17 Maret 1980 di Wisma Elang Laut. Namun, rangkaian pertemuan

---

307 Lihat “Kesimpulan Rapat DPP PDI”, 13 Maret 1980 yang dilangsungkan di kediaman A. Wenas.

308 Terungkap dari dalam sebuah dokumen berjudul “Catatan-catatan Penting Sebagai Pedoman” yang memuat dasar-dasar pemikiran yang dipergunakan dalam menghadapi “pihak sana”.

di atas belum cukup bertuah untuk menghasilkan kata mufakat. Kegagalan ini bukan bersumber pada ketidaksepakatan atas ide di atas, tapi lebih pada jumlah dan komposisi serta pembagian kerja yang dapat menjamin tercerminnya keinginan semua pihak. Kegagalan ini oleh kubu Pandaan dinilai sebagai kesengajaan kubu SU-SI, dan, karenanya, kubu ini kembali mempertegas keinginan awalnya untuk mempersilakan Pemerintah "mem-bypass" situasi yang ada untuk langsung menuju kongres. Kubu SU-SI sendiri, tampaknya tidak terlalu ikhlas menerima ide itu, sekalipun akhirnya diharuskan.

Dalam pertemuan 17 Maret 1980 di Wisma Elang Laut, Sudomo mengharapkan "*pengertian mendalam*" semua pihak agar menghasilkan keputusan pembentukan Panitia Ad Hoc<sup>309</sup> yang akhirnya terwujud dengan jumlah personel 10 orang sesuai dengan keinginan Pangkoptik dan kelompok Pandaan. Jumlah 10 orang ini dimaksudkan sebagai refleksi dari komposisi perbandingan 5:5 bagi tiap kubu. Mengenai penyusunannya, forum mempercayakan kepada Ketua Umum, Sanusi yang akan dibantu Pangkoptik, yang justru lebih dominan nantinya. Panitia bertugas mempersiapkan dan merumuskan berbagai masalah yang bertalian dengan persiapan kongres, seumpama pembentukan SC dan OC, dan penyelesaian masalah DPD/DPC kembar. Hasil kerja *Panitia Ad Hoc* kemudian dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan kepada DPP.<sup>310</sup>

Penyusunan Panitia Ad Hoc oleh Sanusi dengan bantuan Pangkoptik ini akan menjadi salah satu titik paling rawan dalam hubungan antara Sanusi dan Sudomo sebagai akibat dari perbedaan mendasar dalam menafsirkan konsensus yang dilakukan keduanya. Silang pendapat yang tajam antara keduanya menyebabkan Sanusi mengeluarkan "*pernyataan dan*

---

309 Lihat "Risalah Singkat Pertemuan DPP PDI", 17 Maret 1980.

310 *Ibid.*

*pengumuman*”,<sup>311</sup> 11 Juni 1980, yang secara pokok “*melimpahkan tanggung jawab pada DPP PDI yang telah dikukuhkan dan disahkan oleh Kongres I guna mengatasi kebuntuan yang melanda DPP PDI!*”<sup>312</sup> Dengannya, kesepakatan 17 Maret 1980 dan kesepakatan untuk menyusun Panitia Ad Hoc secara bersama-sama berantakan di tengah jalan sebelum melangkah secara berarti. Keadaan seperti ini menempatkan skenario penyelesaian lewat *Panitia Ad Hoc* berada di ujung tanduk. Karenanya, sebuah konsensus minimal antara Pangkopkamtib dan Sanusi harus dicapai, sebab, jika tidak, bisa dipastikan kerangka penyelesaian kemelut yang sedang dijalankan akan ambruk kembali.

Sulit dipastikan apa sumber pertikaian antara Sanusi dan Pangkopkamtib. Namun, bila diperhatikan dari hasil konsensus antara keduanya,<sup>313</sup> maka sumbernya, boleh jadi, terletak pada keinginan Sanusi untuk menyertakan Usep dan Madjid dalam komposisi *Panitia Ad Hoc*, ide yang sama sekali tidak disepakati Pangkopkamtib. “Konsensus 27-28 Juni 1980” yang mengindikasikan perbedaan juga berhulu pada “*posisi Panitia terhadap DPP dan sebaliknya*”. Sanusi bertahan untuk menyubordinasikan Panitia pada DPP yang tidak diakuri Pangkopkamtib yang—seperti yang ditawarkan kubu Pandaan—ingin menempatkan keduanya sebagai lembaga sejajar.

Setelah dicapai kesepakatan pada 27-28 Juni 1980, Sanusi harus meninggalkan tanah air untuk kepentingan kesehatannya—sesuatu yang dispekulasikan sebagai

---

311 Lihat “Pernyataan dan Pengumuman Ketua Umum DPP PDI”, No. X-60/KU/VI/ PDI/80, 11 Juni 1980.

312 *Ibid.* DPP beranggotakan 11 orang.

313 Dalam pertemuan empat mata antara Sanusi dengan Pangkopkamtib, 27-28 Juni 1980, dicapai dua kesepakatan: *Pertama*, Ketua Umum tidak duduk di dalam Panitia Ad hoc agar panitia ini benar-benar disubordinasikan pada DPP; *Kedua*, Usep dan Madjid disertakan dalam Panitia. Lihat “Surat Sanusi kepada Pangkopkamtib Sudomo”, 23 Juli 1980.

"penyingkiran" Sanusi, tapi secara tegas ditepis oleh Sanusi.<sup>314</sup> Karenanya, atas permintaan Sudomo,<sup>315</sup> Sanusi mengirimkan sebuah nota<sup>316</sup> kepada Pangkopkamtib yang intinya "*memohon agar Pangkopkamtib berkenan merampungkan penyusunan Panitia Ad Hoc*". Nota Sanusi juga mengharapkan agar Usep dan Madjid disertakan dalam kepanitiaan tersebut.<sup>317</sup> Akan tetapi, rupanya hal terakhir ini diabaikan Pangkopkamtib. Selama Sanusi di luar negeri, Pangkopkamtib melakukan rangkaian pertemuan dengan DPP (Bersatu) PDI dan akhirnya pada 13 Juli 1980 berhasil mencapai titik temu bahwa Panitia Ad Hoc tetap berjumlah 10 orang, dan bahwa Usep dan Madjid tidak termasuk dalam formasi tersebut.<sup>318</sup> Panitia Ad Hoc bahkan menyertakan Sanusi dan Sabam, masing-masing karena fungsinya sebagai Ketua Umum dan Sekjen DPP PDI,<sup>319</sup> dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:<sup>320</sup> Sanusi, Isnaeni, Sunawar, Hardjantho, Wenas, Wignjosumarsono, Sukarmadidjaja, Nasution, Notosukardjo, dan Sabam Sirait.

Susunan kepanitiaan di atas, mengecewakan Sanusi yang akhirnya, mengundang reaksi kerasnya. Dalam surat tanggal 18 Juli 1980 Sanusi menegaskan, "*tidak dapat membenarkan dan tidak dapat menerima*"<sup>321</sup> kepanitiaan hasil kreasi Sudomo itu, disusul surat berikutnya setelah mendapatkan balasan dari Pangkopkamtib.<sup>322</sup> Surat kedua ini lebih mempertegas penolakannya. Ia mengatakan, "*tidak bertanggung jawab atas*

---

314 Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*

315 Lihat "Surat Sanusi kepada anggota DPP PDI", tanggal 21 Juli 1980.

316 Lihat "Nota Ketua Umum DPP PDI kepada Laksmana Sudomo", 28 Juni 1980.

317 *Ibid.*

318 Lihat Surat dari Laksamana TNI Sudomo kepada Sanusi, Ketua Umum DPP PDI, 21 Juni 1980.

319 *Ibid.*

320 *Ibid.*, lihat pula *Sinar Harapan*, 14 Juli 1980.

321 Lihat surat Pangkopkamtib kepada Sanusi, *Ibid.*

322 Lihat surat dari Sanusi kepada Pangkopkamtib, 18 Juli 1980.

*Panitia tersebut*”<sup>323</sup> Dua surat protes tadi tidak mengubah keyakinan Pangkoptkamtib yang mungkin memperkirakan, pemenuhan tuntutan Sanusi akan kembali memicu kemelut baru. Karenanya, Panitia akhirnya berjalan terus, meninggalkan Sanusi yang makin marah. Karena sikap kerasnya, Sanusi akhirnya menemukan dirinya terisolir, menyebabkannya kehilangan peluang untuk bisa tetap mengikuti derap langkah DPP secara keseluruhan.

*Panitia Ad Hoc*, sekalipun merupakan kesepakatan bersama hampir semua tokoh, kecuali Sanusi—dan juga Usep dan Madjid—di mata Pangkoptkamtib masih terlalu rawan dibiarkan melangkah sendiri. Bahkan untuk sekadar rapat, kehadiran Pangkoptkamtib sebagai “penunggu” seakan menjadi sesuatu yang wajib sifatnya.<sup>324</sup> Dalam rapat pertama, 6 Agustus 1980, di samping menegaskan agar Panitia berjalan terus, juga disepakati bahwa Kongres II akan diselenggarakan pada Desember 1980.<sup>325</sup> Namun, penjadwalan di atas baru dicapai setelah Pangkoptkamtib mengancam “*tidak akan menyertakan PDI dalam Pemilu 1982, bila tidak berhasil menyelenggarakan kongres sampai batas waktu Desember 1980*”.<sup>326</sup>

Upaya berulang kali memdamaikan kubu-kubu yang bertikai pada akhirnya mencapai hasilnya dengan berhasil “disatukannya” semua kelompok yang berbeda dalam rapat

---

323 Lihat surat Sanusi kepada Pangkoptkamtib, 23 Juli 1980. Dalam surat ini Sanusi, antara lain, menegaskan, “membiarkan saya duduk dalam Panitia Ad Hoc yang Bapak umumkan tanggal 13 Juli 1980 itu berarti mengingkari tanggung jawab saya”.

324 Rapat pertama Panitia Ad Hoc, 6 Agustus 1980, dihadiri oleh 8 dari 10 anggota (Sanusi tidak hadir untuk mempertegas sikap penolakannya atas Panitia tersebut). Wenas juga berhalangan, tapi karena sedang berada di Manado. Rapat kali ini “didampingi” oleh Pangkoptkamtib.

325 Lihat “Resume Rapat Panitia Ad hoc DPP PDI I”, 6 Agustus 1980.

326 Keterangan pers Pangkoptkamtib, dalam *Pelita*, 17 Januari 1980.



tanggal 5 September 1980 di Wisma Elang Laut.<sup>327</sup> Hasil terpenting rapat 5 September adalah "berfungsinya kembali secara normal dan efektif DPP PDI."<sup>328</sup> Untuk membuktikan kesungguhannya, DPP ini dianugerahi gelar "DPP Bersatu",<sup>329</sup> yang bagi sejumlah orang, dipahami sebagai lelucon. Sekalipun demikian, DPP Bersatu sudah merupakan modal penting untuk kembali menghidupkan rencana penyelenggaraan kongres sebagai forum penyelesaian kemelut secara tuntas. Forum rapat yang sama juga kembali menegaskan komitmen pertemuan pertama agar *Panitia Ad Hoc* bekerja terus dan penjadwalan kongres pada Desember 1980 sesuai dengan "anjuran" Pangkopkamtib. Pemerintah sendiri merasa yakin DPP telah bersatu dan siap melangkah lagi. Keyakinan ini diekspresikan lewat penyerahan kunci gedung Sekretariat DPP PDI, menandai berakhirnya masa penyegelan yang telah berjalan 9 bulan.

### G. Mundurnya Sanusi: Akhir Sebuah Kekecewaan

Walaupun di permukaan *DPP Bersatu* tampak berjalan normal dan efektif, benih-benih kekecewaan yang menyertai penyelesaian tersebut tidak bisa disembunyikan untuk seterusnya. Setelah DPP berusia satu bulan 10 hari, Sanusi memutuskan mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai ketua umum dan juga anggota PDI. Keputusan ini mengejutkan jajaran PDI dan penguasa, terutama Pangkopkamtib karena dilakukan Sanusi ketika berbagai serpihan dalam PDI terajut kembali dan sejumlah skenario yang lebih "cantik" sedang dimatangkan. Keputusan ini sekaligus kontroversial, karena Sanusi tidak turut menikmati buah kerjanya sendiri. Ia tidak

---

327 Hadir dalam rapat ini 20 dari 29 anggota DPP PDI, kecuali Isnaeni yang sedang sakit, Simatupang, Walandouw, Sani Fenat, Blegur, Tanri, da Costa, Pelaunsuka, dan Madjid.

328 Lihat "Resume Rapat DPP PDI", 5 September 1980, di Wisma Elang Laut, Jakarta.

329 Konferensi pers Ketua Umum DPP PDI, 6 September 1980.

ikut menikmati situasi kebersamaan yang sedemikian mahalanya ditemui di periode sebelumnya. Akan tetapi keputusan ini juga wajar bila dilihat bahwa justru dengan dicapainya kebersamaan, berarti terpenuhi pula misi kehadirannya di PDI; Misi yang dibebankan di pundaknya oleh Presiden ketika pertama kali memintanya menata PDI.

Rencana pengunduran diri Sanusi bukan merupakan hal baru. Ia sudah membicarakannya beberapa kali dengan sejumlah karibnya<sup>330</sup> yang memintanya untuk tetap bertahan. Keinginan serupa juga telah diisyaratkannya secara samar-samar kepada Pangkoptib, sekalipun dengan catatan, ia ingin “turun secara terhormat”, yakni melalui forum kongres.<sup>331</sup> Sehari sebelum pernyataan pengunduran dirinya diumumkan, Sanusi masih melakukan pertemuan dengan Pangkoptib, saat itu ia mengisyaratkan rencana di atas dalam wujud: *pertama*, menegaskan telah tuntasnya tugas yang dipercayakan kepadanya, ditandai dengan bersatunya kembali DPP PDI. *Kedua*, mengungkapkan keinginannya untuk beristirahat. Menanggapinya, Pangkoptib menyarankan agar dilakukan melalui arena kongres dengan terlebih dahulu membicarakan dengan anggota-anggota DPP lainnya, dan berkonsultasi dengan Pemerintah.<sup>332</sup> Pembicaraan ini dipahami sebagai “konsensus” oleh Pangkoptib yang mulai menyusun skenario menempatkan Sanusi, bersama-sama dengan Isnaeni-Sunawar, ke dalam Dewan Pembina/MPP, atau “tempat terhormat” lainnya,<sup>333</sup> yang lebih merupakan posisi seremonial tanpa kekuasaan politik. Namun, sementara skenario di atas belum

---

330 Wawancara penulis dengan Sanusi, *Op.cit.* Lihat pula *Kompas*, 13 Januari 1981.

331 Lihat “Risalah pertemuan Pangkoptib dengan DPP PDI”, 5 Januari 1980, *Op.cit.*

332 Keterangan pers Pangkoptib Sudomo, seperti dikutip *Kompas*, 31 Oktober 1980.

333 *Ibid.*

menemukan bentuk pastinya, Sanusi tiba-tiba mengundurkan diri, meruntuhkan segala bangunan rencana yang ada.

Demikian mendadaknya pengunduran diri Sanusi hingga tidak satu pun sejawatnya, termasuk yang terdekat sekali pun, yang mengetahuinya. Seperti diungkapkannya kembali dalam wawancara dengan penulis, keputusan kali ini benar-benar otonom, lepas dari tekanan luar. Sanusi mengacu pada kesehatannya sebagai sebab pengunduran dirinya. Namun, alasan ini hanya untuk menyederhanakan persoalan. Apabila ditelusuri berbagai aktivitas dan pernyataan sebelum, selama, dan selepas pengunduran dirinya, maka akumulasi sebab yang kompleks yang bersumber pada persoalan yang benar-benar bersifat politislah alasan prinsipielnnya. Dan ini menyangkut ketidaksepatannya terhadap praktik dan budaya politik yang berkembang dan dikembangkan.

Jejak-jejak ketidaksepatan ini, dengan mudah dapat ditelusuri dari alasan pengunduran dirinya yang pertama, 12 Maret 1973,<sup>334</sup> ketika tuduhan atas ketidakmampuannya mengikuti dinamika perkembangan parpol masa tersebut dimunculkan sebagai sebab utama. Jejak-jejak di atas makin transparan dari penjelasannya kepada DPP PDI, 31 Oktober 1980. Secara garis besar Sanusi menguraikan sebab-sebab kehadirannya di DPP PDI, proses terpilihnya sebagai Ketua Umum dalam Kongres I yang disebutnya "*telah disusun skenarionya oleh sponsor*",<sup>335</sup> dan sumber kemelut PDI. Untuk hal yang satu ini Sanusi melihat "*penggabungan yang dilakukan atas penetapan Pemerintah yang menghendaki adanya penyederhanaan dan pendayagunaan kehidupan politik, akan*

---

334 Lihat surat Sanusi kepada Isnaeni, 12Maret 1973 yang menyatakan pengunduran dirinya dari keanggotaan PDI dan sekaligus menolak untuk menduduki posisi tertentu dalam struktur organisasi PDI.

335 Lihat "Penjelasan Sanusi kepada DPP PDI tentang pengunduran dirinya", 31 Oktober 1980.

*tetapi jauh dari cara-cara yang demokratis*<sup>336</sup> sebagai sumber utama konflik, di samping ketergantungan dalam hal dana dan fasilitas pada Pemerintah. Akibatnya, campur tangan luar menjadi besar sekali.<sup>337</sup> Hal-hal di atas, menurut Sanusi, merupakan kelanjutan dan akibat logis dari pelaksanaan suatu pola dasar strategi yang ingin membangun kekuasaan autokratis dan menjurus ke kediktatoran.<sup>338</sup> Inilah praktik dan budaya politik yang ditentangnya selama ini.

Jejak-jejak alasan itu semakin jelas terlihat dalam “safari politik” Sanusi ke daerah-daerah basis PNI di Jatim dan Jateng selepas pengunduran dirinya. Dalam kesempatan ini ia berulang menggarisbawahi, *“dalam situasi di mana norma-norma kehidupan demokrasi sudah timpang dan kacau, seperti yang berlaku sekarang ini, PDI tidak lagi dapat diforsir untuk dikembangkan dan dijadikan sebagai alat perjuangan rakyat”*.<sup>339</sup> Dalam wawancara dengan penulis di Bandung dan Jakarta, Sanusi juga mengungkapkan sisi lain pengunduran dirinya. Ini berkaitan dengan penolakannya atas “skenario” yang telah ditawarkan Pangkopkamtib dalam penyusunan DPP PDI baru hasil kongres. Dijelaskannya, Pangkopkamtib sebenarnya sudah mempunyai ide susunan DPP baru tersebut, tapi harus direalisasi lewat kongres. Sanusi, oleh Pangkopkamtib, diminta terus memimpin PDI sampai kongres yang diskenariokan akan memilihnya sebagai formatur tunggal. Dalam menyusun DPP baru, sang formatur tunggal itu—Sanusi—akan diminta “mengkonsultasikan” nama-nama anggota DPP dengan Pangkopkamtib. Menurut perkiraan Sanusi, sekalipun nama-nama tersebut belum (tidak) dijelaskan Pangkopkamtib, ia yakin yang akan dimunculkan adalah Hardjantho, bersama

---

336 *Ibid.*

337 *Ibid.*

338 *Ibid.*

339 Lihat *Merdeka*, 28 Oktober 1980.

Isnaeni dan Sunawar yang memiliki peluang sangat besar untuk kembali bercokol di DPP. Indikasi ke arah ini cukup kuat. Pangkoptim telah merencanakan PDI akan dipasrahkan pada tangan-tangan terampil yang lebih muda usianya dan sekaligus telah mengajukan kriteria pimpinan DPP masa depan sebagai berikut: *pertama*, bisa memosisikan diri sebagai pribadi dan tim; *kedua*, harus bisa bekerja sama dengan Golkar; dan *ketiga*, tidak boleh menyerang kebijaksanaan Pemerintah.<sup>340</sup> Di samping skenario ini, Pangkoptim juga menegaskan tentang tidak perlu dilakukannya pemandangan umum dalam kongres. Ide ini ditolak sepenuhnya oleh Sanusi karena akan semakin melembagakan praktik yang jauh dari mewakili impiannya tentang demokrasi. Dari sumber lain disebutkan, sebagai kompensasi bagi Sanusi untuk memenuhi keinginan di atas, ia dijanjikan jabatan tertentu.<sup>341</sup>

Pengalir dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Sanusi akhirnya menobatkan pengunduran dirinya sebagai "*bentuk perlawanan paling lunak terhadap keadaan*".<sup>342</sup> Alasan-alasan di atas mungkin benar sebagai sebab dari pengunduran diri Sanusi, tetapi boleh jadi baru separuh jawaban. Betapa pun, alasan-alasan di atas tetap perlu dipersoalkan, terutama karena Sanusi telah cukup lama adaptif dan akomodatif terhadap situasi yang dinilainya sudah semrawut; bahkan rela menarik kembali pengunduran dirinya yang pertama dari partai guna memasuki situasi semrawut tersebut. Perasaan "terasing dan disia-siakan" oleh Pemerintah, khususnya oleh Presiden, yang justru memintanya mengemban misi "memadukan" komponen PNI dalam PDI adalah faktor psikologis yang banyak memainkan

---

340 Wawancara penulis dengan Sanusi, *Op.cit.*

341 Sumber yang diwawancarai menyebutkan tiga jabatan yang ditawarkan pada Sanusi, masing-masing, Ketua DPA, Dewan Komisaris salah satu Bank Pemerintah, atau Dubes. Hal ini juga dibenarkan Sanusi dalam wawancara dengan penulis.

342 Lihat *Merdeka*, 28 Oktober 1980.

peranan dalam pengunduran dirinya. Apalagi berbagai upayanya untuk kembali bertemu Soeharto setelah pertemuan antara keduanya di akhir 1977, tidak pernah ditanggapi.<sup>343</sup>

Pengunduran diri Sanusi di luar skenario yang direncanakan di atas, tidak melahirkan efek perubahan yang berarti bagi sistem politik secara umum atau PDI secara khusus, walaupun ia cukup merisaukan karena melahirkan banyak spekulasi di tingkat massa. Bagi Sanusi, citra politik yang lebih baik di hadapan massa yang diekspresikan lewat meluasnya simpati yang ditumpahruahkan kepadanya bisa diraihinya, sekalipun ini mesti dibayar dengan citra hitam di mata Pemerintah. Bagi PDI sendiri, dan terlebih lagi Pemerintah, kepergian Sanusi bahkan telah menjadi berkah terselubung. Ia “membebaskan” DPP PDI dari belitan hambatan yang sangat serius. Figur, apalagi yang menempati posisi sangat menentukan secara resmi, yang secara gigih menentang rencana kongres, kini telah pergi. Bagi elite PDI lainnya, terutama Isnaeni, Sunawar, dan Hardjantho, kepergian Sanusi tidak banyak membuahkan hasil bagi masing-masing secara pribadi. Peristiwa ini, misalnya, tidak secara otomatis menaikkan posisi Isnaeni—orang nomor dua di DPP—ke posisi ketua umum, bahkan DPP PDI akhirnya ditetapkan untuk bertindak secara kolektif, yakni masing-masing ketua secara periodik mengendalikan DPP.

## **H. Panitia Nasional Kongres II: Kerikil-Kerikil yang Tersisa**

Dari kalangan DPP PDI, seperti mudah diperkirakan, pengunduran diri Sanusi diamani secara ringan dengan ucapan

---

343 Wawancara dengan saya, *Op.cit.* Diungkapkannya, setelah ia meminta Pemerintah terbuka dalam kasus Isnaeni dan memastikan pendiriannya yang menolak PDI diperlakukan hanya sebagai “alat” Pemerintah, *appeal* yang berulang kali diajukan ke Presiden untuk bisa bertemu tidak pernah mendapat sambutan.

"terima kasih" serta "penghargaan", membiarkan imbauan moral Sanusi untuk menggunakan peristiwa kali ini sebagai "*bahan pertimbangan untuk meninjau kembali kedudukan PDI dalam masyarakat*"<sup>344</sup> merana sendirian. DPP tetap berjalan rutin. Persiapan-persiapan ke arah Kongres II terus berlangsung.

Pada tanggal 27 Oktober 1980 DPP berhasil menetapkan keputusan tentang "*Ketentuan-ketentuan mengenai Kongres ke II PDI*"<sup>345</sup> serta "*Panitia Nasional Kongres ke II PDI*".<sup>346</sup> Namun, baru pada 14 November 1980, susunan dan tugas panitia di atas berhasil dirumuskan secara jelas.<sup>347</sup> Tema Kongres II adalah "*Dengan menggaling persatuan-kesatuan dalam rangka memantapkan Fusi, meningkatkan peranan dan partisipasi PDI untuk mensukseskan pembangunan*",<sup>348</sup> yang lebih mewakili dunia harapan ketimbang sesuatu yang mungkin diwujudkan. Waktu penyelenggaraan kongres sendiri, disepakati berlangsung antara 14-17 Desember 1980—yang akan mengalami penundaan lagi.

Pasal 14, ayat (3) dan (4) *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Kongres Kedua PDI* mengharuskan adanya "*surat mandat*" bagi peserta utusan daerah dan cabang, yang harus ditandatangani Ketua dan Sekretaris masing-masing tingkat, dan lebih mendasar lagi, harus "*diketahui oleh Muspida setempat*". Langkah pengamanan politik yang luar biasa ketatnya ini sangat mudah

---

344 Lihat keterangan Sanusi kepada DPP PDI, *Op.cit.*

345 Ketentuan ini dituangkan dalam SK DPP PDI No. I/DPP/X/1980 yang ditandatangani Nasution dan Sabam.

346 Keputusan ini dituangkan dalam SK DPP PDI No. II/DPP/X/1980 dan ditandatangani Nasution dan Sabam.

347 Lihat "Keputusan DPP PDI No. III/DPP/XI/1980" yang ditandatangani Sukarmadidjaja dan Sabam.

348 Lihat SK No. I/DPP/X/1980, *Op.cit.* Tema ini mengungkapkan bahwa masalah persatuan-kesatuan dan pemantapan fusi telah gagal dikembangkan PDI selama kurun waktu yang telah dilewatinya. Tema ini sekaligus ingin mengekspresikan tekad untuk kembali meraih mimpi bersama mereka yang sekian lama gagal direngkuh.

diikuti logikanya. Ia difungsikan mengeliminasi kemungkinan hadirnya kekuatan-kekuatan “radikal” di arena forum tertinggi yang secara formal memegang kedaulatan parpol ini. Namun, terlepas dari rasionalitas di balik keharusan di atas, implikasi yang ditimbulkannya sangat luar biasa: ia dengan segera menggeret dinamika internal di tingkat DPD/DPC sampai pada tataran yang sangat rawan. Dinamika internal di tingkat lokal ini di ujung-ujungnya bertransformasi menjadi intrik dan konflik yang merambah luas ke anggota-anggota DPD/DPC, terutama bagi daerah-daerah yang memiliki kepengurusan “kembar”. “Menjilat” ke atas dan “memfitnah” antarasesama anggota pengurus menjadi hukum-hukum wajib yang mesti dilakoni setiap elite lokal, sementara perlombaan untuk membuktikan diri sebagai yang “paling loyal, paling penurut dan paling membela kepentingan Pemerintah” menjadi prinsip dasar dalam berpolitik. Ini tidak jarang menyebabkan tersingkirnya tokoh-tokoh daerah yang justru sah dan benar-benar memperjuangkan PDI di daerahnya masing-masing selama ini. Ketentuan di atas, juga merupakan pengalihan kekuasaan dari anggota PDI dan kepengurusan resminya ke tangan Muspida. Keabsahan dan kelayakan politik yang wajarnya didefinisikan oleh dan menurut garis-garis konstitusi partai menemukan dirinya terhimpit di cengkeraman birokrasi lokal sebagai pemegang monopoli baru. Yang berkembang kemudian, bukan lagi mekanisme PDI atau unsur atau elite seperti yang mewarnai tingkat nasional dalam mengelola PDI, tapi mekanisme birokrasi lokal yang kini berfungsi sebagai pusat rujukan baru dalam mendefinisikan “kebenaran, keabsahan dan kelayakan” politik dan sekaligus pusat untuk mendapatkan “pengampunan politik”. Dengannya, birokrasi dan penguasa lokal kini berubah menjadi arena politik yang paling bermakna bagi warga PDI: menjadi awal dan muara dari politik PDI di tingkat lokal.

Kecenderungan ini semakin memperkokoh ketimpangan



kedudukan antarapolda dan Muspida yang memang sudah sangat tidak seimbang. Diikuti fakta obyektif rendahnya kemampuan keuangan yang dimiliki PDI dan besarnya dukungan keuangan dari bantuan birokrasi lokal, keadaan itu semakin mempertegas ketergantungan PDI pada Pemerintah. Akhirnya, dalam banyak kasus, PDI bertukar wajah menjadi subordinasi Pemda dan bahkan hadir sebagai bagian dari struktur Pemerintahan daerah. Ia menjadi semacam "dinas daerah". Sekalipun DPP PDI lewat Sabam Sirait, menegaskan soal "diketahui Muspida" jangan terlampaui "dibesarkan",<sup>349</sup> tapi nyatanya hanya Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan edaran ke semua jajarannya agar "tidak boleh memberikan rekomendasi kepada utusan Kongres PDI<sup>350</sup> sebagai ekspresi kenetralannya. Di daerah-daerah lainnya, pemberian rekomendasi menjadi bagian dari tugas baru birokrasi lokal.

Situasi daerah-daerah yang sudah kacau balau sejak dulu, diimbui keharusan "*rekomendasi Muspida*" semakin diperkeruh oleh DPP sendiri, khususnya oleh Panitia Ad Hoc. *Panitia* yang dibentuk guna membantu DPP, dalam perkembangannya mengubah diri menjadi "lembaga ekstrakonstitusi Partai" yang bukan saja mengambil alih banyak fungsi DPP, tapi sekaligus melampaui kewenangan DPP dan kedaulatan anggota (DPD/DPC). Atas nama "*untuk membantu membenahi daerah-daerah*", Panitia Ad Hoc melakukan serangkaian perombakan di DPD/DPC, yang lebih tampak sebagai langkah penyingkiran dan pembersihan tokoh-tokoh daerah pendukung mantan Ketua Umum, Sanusi. Di Jateng, tempat para anggota DPD-nya—

---

349 Lihat pernyataan pers Sabam Sirait, seperti dikutip *Sinar Harapan*, 10 November 1980. Sebenarnya Pemerintah sendiri "tidak secara tegas mengeluarkan instruksi untuk memberikan mandat pada utusan kongres PDI"; lihat juga pernyataan pers Mendagri dalam *Merdeka*, 26 November 1980. Namun, dalam kenyataannya, hal itu tetap dipraktikkan.

350 Lihat *Kompas*, 12 Januari 1981 yang melansir telegram Gubernur Jateng kepada semua Bupati/Walikota se-Jateng.

kecuali almarhum Burhan—selalu menopang Sanusi selama kemelut, misalnya, dipaksa bertekuk lutut di hadapan SK DPP untuk memasukkan Soetopo dan Subekti ke dalam jajaran DPD<sup>351</sup> sebagai katup pengaman untuk meredam suara Jateng yang memiliki 35 cabang.<sup>352</sup> Perlawanan atas tekanan *Panitia Ad Hoc* di Jateng sangat kuat karena pemaksaan ini dipahami elite-elite PDI di tingkat ini sebagai telah merusak kekompakan yang ada.<sup>353</sup> Jateng bahkan mengancam akan memboikot kongres.<sup>354</sup>

Kerumitan di daerah-daerah semakin bertambah, karena banyak cabang yang belum mendapat izin penyelenggaraan Konpercab, seperti yang dialami di Jabar;<sup>355</sup> dan adanya pembentukan mendadak beberapa DPC di daerah-daerah yang justru telah memiliki DPC yang sah, seperti yang terjadi di Jateng.<sup>356</sup> Untuk kasus kedua ini, umumnya karena DPC-DPC sah yang ada, bukan merupakan pendukung DPP (anggota DPP) yang kini mengendalikan PDI. Di sejumlah daerah lain, penyingkiran tokoh-tokoh daerah melalui pencopotan dari posisi sebagai fungsionaris DPC untuk diganti dengan tokoh lain yang loyal

---

351 Kedua tokoh ini oleh Panitia Ad Hoc dipaksakan untuk masuk menjadi Ketua-ketua dalam kepengurusan DPD PDI melalui SK DPP, dan bukan Konperda sebagai forum yang menggenggam kedaulatan untuk itu; lihat *Kompas*, 24 November 1980.

352 Dengan 35 cabang yang ada di lingkungan DPD Jateng, sangat mudah dibayangkan pengaruhnya atas hasil akhir kongres.

353 Lihat pernyataan pers para anggota DPD dan DPC di Jateng, seperti Sumario (Ketua I DPD Jateng), I.g.n. R. Widyadarma (Ketua III) dan Nuhono (Sekretaris DPC Semarang) dalam *Kompas*, 24 November 1980.

354 Lihat, *Berita Buana*, 4 Desember 1980.

355 Sebanyak 25 DPC di Jabar, walaupun telah mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan Kopercab, belum juga mendapatkan izin tersebut. Hal ini, menurut juru bicaranya masing-masing, yakni Djen Zainul, R. Oetoyo, Memed Suwaryo, A. Effendi, dan Djajang Kurniadi yang menemui DPP PDI, disebabkan karena "belum adanya lampu hijau" dari DPP kepada Kapolda Jabar. Lihat *Merdeka*, 25 November 1980.

356 DPC-DPC yang dibentuk mendadak tersebut, masing-masing, adalah Karanganyar, Purwodadi, dan Kebumen, yang justru telah memiliki DPC yang sah. Lihat *Kompas*, 12 Januari 1981.

ke DPP (anggota DPP), seperti yang terjadi di Sumut, menjadi pekerjaan pokok Panitia Ad Hoc,<sup>357</sup> di samping pembentukan *caretaker* DPD PDI, seperti yang dialami di Sumut,<sup>358</sup> guna mengeliminasi DPD resmi yang telah ada.

Kembali pada Panitia Kongres ke II PDI, akhirnya disepakati berbentuk *Presidium* dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:<sup>359</sup>

Ketua-ketua : Isnaeni  
Sunawar  
Wenas  
Wignjosumarsono  
Sukarmadidjaja  
Nasution  
Hardjantho  
Sekretaris : Sabam Sirait  
Bendahara : Notosukardjo

---

357 Sejak 1978 hingga menjelang Kongres II, telah terjadi "pencopotan" fungsionaris DPC pada 15 cabang di Sumatera Utara dan digantikan dengan tokoh-tokoh lainnya. Lihat *Berita Buana*, 5 Desember 1980.

358 Hal ini dilakukan melalui SK yang ditandatangani Isnaeni dan John Pakan, 7 Desember 1979. *Caretaker* DPD PDI dipimpin oleh Soeparno, pendukung Isnaeni, sementara DPD berada di bawah pimpinan Abdul Eteng dan P. Siregar, salah satu pemrakarsa Munas Pandaan. Keduanya dinonaktifkan. Lihat *Berita Buana*, 4 Desember 1980.

359 Keputusan DPP No. III/DPP/IX/1980 tentang "Susunan dan Tugas Panitia Nasional Kongres ke II PDI", 14 November 1980.

Anggota-anggota : Tahamata  
Pelansoeka  
Tanri  
Simatupang  
Duriat  
Madjid  
Aberson  
Blegur  
Samosir  
Rush Dachlan  
John Pakan  
Adipranoto  
Da Costa  
Sani Fenat  
Supangat  
Ra'ib  
Indra Bhakti.

Panitia Pengarah terdiri dari Ketua, Wenas dengan Wakilnya Sukarmadidjaja dan anggota-anggotanya, terdiri dari: Duriat, da Costa, Bhakti, Madjid, Simatupang, dan Isnaeni. Sedangkan Panitia Pelaksana, posisi ketua dikendalikan Sunawar, Wakil adalah Hardjantho, dengan anggota-anggotanya: Sabam Sirait, Aberson, Adipranoto, John Pakan, Amosir, Pelansoeka, Blegur, dan Isnaeni. Panitia Logistik diketuai oleh Wignjosumarsono dengan Nasution sebagai Wakil, dan Notosukardjo, Tahamata, Sani Fenat, Dachlan, dan Lencang—menggantikan Walandouw yang menolak duduk dalam kepanitiaan—sebagai anggota-anggotanya.<sup>360</sup>

### I. **“Kelompok Empat”:** Impian yang Terempas

Walaupun perjalanan menuju kongres tinggal sejengkal lagi dan semangat untuk itu sudah mendekati titik didih, tetapi

---

<sup>360</sup> *Ibid.*

tidak otomatis mampu menguburkan benih-benih disintegrasi dan konflik yang telah menahun. *Kelompok Konstitusi* yang dimotori Madjid-Aberson, yang dalam proses penyelesaian kemelut kurang diperhitungkan dan banyak diabaikan, tiba-tiba muncul dari tengah-tengah reruntuhan perlawanan Sanusi sebagai pilar penentang kongres yang paling gigih. Keduanya, mengibarkan bendera "*Konstitusi*" sebagai simbol dan landasan perlawanan. Secara cepat, kelompok ini menjadi magnetik penarik elite-elite PDI yang tersisih, yang ditandai dengan bergabungnya Usep (PNI), Walandouw (PARKINDO) dan Zakaria Ra'ib (MURBA). Kehadiran Walanouw dan Ra'ib, masing-masing dari PARKINDO dan MURBA di tengah-tengah kubu penentang DPP PDI yang dibentengi tokoh-tokoh utama asal unsur keduanya, mempertegas adanya polarisasi, bahkan konflik yang keras dalam masing-masing unsur yang selama ini terkesan solid. Klaim unsur-unsur non-PNI tentang keutuhan diri kehilangan pijakannya. Kini terungkap, keretakan internal mereka selama sekian lama hanya bisa terbebas dari sorotan karena berlindung dan terlindungi tirai kemelut antartokoh PNI.

Masuknya Walandouw dalam kubu Madjid didorong perbedaan pandangan yang sangat tajam dengan Wenas dan Sabam. Bagi dua tokoh teras PARKINDO ini, Walandouw dinilai "terlalu radikal", sebaliknya di mata Walandouw, Wenas-Sabam divonis sebagai terlampau akomodatif. Zakaria Ra'ib—tokoh garis "keras" MURBA, yang bersama-sama Maruto Nitimihardjo (salah satu pendiri KDP), dan Wasid Suwanto (mantan Ketua Umum MURBA)—adalah pengendali "*Forum Komunikasi-MURBA*". Forum ini adalah benteng utama para penentang tokoh-tokoh moderat MURBA, seperti Pakan, Nasution, dan Murbantoko, yang dinilai banyak melakukan "permainan atau konsensus terselubung" dengan tokoh-tokoh utama PNI yang bertikai, yakni Isnaeni dan Sunawar.

Walandouw dan Raib, akhirnya bergabung dengan kubu Madjid (tokoh PNI garis keras yang pernah menjadi tangan kanan Isnaeni) dan Usep (tokoh garis keras lainnya yang paling ditargetkan untuk disingkirkan dan dikenal sebagai tokoh “pengendali” Sanusi). Perkawinan empat tokoh garis keras dari tiga unsur yang berbeda ini akhirnya membuahkan *Kelompok Empat*. Kelompok ini, bukan saja sangat kritis terhadap berbagai usulan Pemerintah, seperti terungkap dalam pembahasan materi konsep NKK di DPR, misalnya, tapi sekaligus terhadap PDI. Ke pihak PDI mereka menuntut diberlakukannya ketentuan konstitusi partai dan sterilisasi PDI dari campur tangan kekuatan luar (yang senantiasa bermakna elite-elite di pusat-pusat kekuasaan). Akibatnya, *Panitia Ad Hoc*, *Panitia Kongres* dan DPP PDI akhirnya harus berhadap-hadapan dengan kubu ini. Sebagai misal, aktivitas Panitia Ad Hoc yang jauh melampaui kewenangannya dan mengganggu DPP seperti menghubungi Muspida Jabar guna merombak kepengurusan Cabang Jabar guna mengeliminir Otto Suryapranata, tokoh PDI Jabar yang tetap setia pada Sanusi, dan menyediakan jalan masuk bagi Rivai yang dekat dengan “pusat” untuk menjadi Ketua DPD Jabar,<sup>361</sup> mendapat sorotan tajam dari kubu *Kelompok Empat*. Secara keseluruhan kelompok ini menolak Kongres ke II karena dinilai akan bermuara sebagai “Kongres Unsur” yang memunggungi cita-cita konstitusi partai, apalagi mereka tidak disertakan dalam pembicaraan untuk kongres.<sup>362</sup> Karenanya, empat tokoh ini memilih untuk “*mengundurkan diri dari kedudukan mereka dalam kepanitiaan yang ada*”, meskipun tetap mempertahankan

---

361 Kunjungan ke Muspida Jabar dilakukan pada tanggal 3 November 1980. Lihat *Merdeka*, 20 November 1980, yang mengabarkan bahwa Muspida setempat mengusulkan untuk diselesaikan PDI sendiri, dengan catatan, tetap dapat memuaskan semua pihak.

362 Wawancara penulis dengan Madjid, *Op.cit.*, menegaskan hal ini; lihat pula *Merdeka*, 20 November 1980.

keanggotaannya di DPP PDI.<sup>363</sup> Pengunduran diri diawali Walandouw<sup>364</sup> yang akhirnya mesti berhadapan dengan tindakan "penarikannya sebagai anggota DPP PDI" oleh Wenas yang menyebut dirinya sebagai pimpinan DPP likuidasi dari eks unsur PARKINDO.<sup>365</sup> Konflik terbuka sesama elite PARKINDO, dengan ini, tak dapat dielakkan lagi.<sup>366</sup> Usep, Madjid, dan Ra'ib akhirnya juga menempuh rute Walandouw, tetapi bukan semata-mata sebagai ekspresi ketidaksetujuan atas kongres, tapi sekaligus sebagai ekspresi dari protes mereka atas perlakuan atas Walandouw.

Berbeda dengan konflik-konflik sebelumnya, perlawanan *Kelompok Empat* membawa serta Ketua DPR/MPR, Daryatmo, serta Wakil Ketua, Mashuri.<sup>367</sup> Dalam pembicaraan dengan dua tokoh wakil rakyat ini, *Kelompok Empat* secara pokok meminta perhatian atas tindakan yang dinilai mereka "mengancam kehidupan demokrasi" yang dilakukan sejawatnya di DPP. Pemaksaan keinginan mayoritas anggota DPP melaksanakan kongres, dijadikan sebagai salah satu alat bukti ke Ketua dan

---

363 Merdeka, *Ibid.*

364 Lihat *Ibid.*, juga *Sinar Harapan*, 21 November 1980. Usul penarikan Walandouw oleh Wenas dan Sabam akhirnya dibicarakan dalam rapat DPP PDI 20 November 1980. Walandouw di ujungnya diganti oleh Lencang (nantinya Bendahara DPP PDI di era Suryadi).

365 Lihat *Ibid.*

366 Lihat surat Walandouw yang ditujukan kepada DPP PDI, 10 November 1980. Ia menegaskan bahwa ia tidak dapat menerima tindakan ini dengan enam alasan. Satu di antaranya adalah bahwa tindakan mengatasnamakan unsur PARKINDO bertentangan dengan UU No. 3/1975, karena menghendaki dihidupkannya kembali eksistensi unsur dan juga memungguni Keputusan Kongres I. Hal ini didukung oleh Usep yang mengirimkan surat ke DPP PDI, 21 November 1980, dengan alasan-alasan yang sama. Usep juga menegaskan, keputusan rapat DPP 20 November yang menarik Walandouw serta digantikan oleh Lencang merupakan tindakan "melalaikan kewajiban untuk melaksanakan UU 3/75". Perang antarunsur PARKINDO ini akhirnya berlanjut dalam rapat DPP PDI, 20 November 1980, bahkan bermuara ke masalah pribadi; lihat *Merdeka*, 22 November 1980.

367 Lihat *Sinar Harapan*, 21 dan 24 November 1980.

Wakil Ketua DPR/MPR. Rangkaian protes kubu ini mengusik temperamen politik Isnaeni yang mengancam tidak akan mengundang mereka ke kongres nanti,<sup>368</sup> yang segera memproduksi reaksi balik. Bagi *Kelompok Empat*, posisi resmi mereka sebagai anggota DPP<sup>369</sup> adalah paspor yang sah guna memasuki arena kongres yang tidak dapat dinihilkan begitu saja oleh siapa pun, termasuk Isnaeni.

Perlawanan *Kelompok Empat* merupakan ancaman langsung bagi DPP PDI, dan lebih lagi, bagi skenario penyelesaian yang ditawarkan Pemerintah. Karenanya, mudah diperkirakan nasib politik mereka akan berakhir dengan kenestapaan. Kelompok ini akhirnya tersingkir, bahkan dipecat dari keanggotaan DPP PDI dan PDI dan di-*recall* dari keanggotaan mereka di DPR/MPR. Dalam wawancara dengan penulis Madjid menceritakan, sebelum di-*black out* media massa, ia sudah dihubungi berbagai pihak yang memintanya menghentikan segala kegiatannya. Lebih lanjut diungkapkannya, ia telah menyatakan kesediaannya mengikuti permintaan tersebut, jika memang kegiatan dan perang pernyataan yang dilakukan kubunya merugikan PDI secara keseluruhan. Namun, langkah keras terpaksa kembali ditempuhnya setelah isyarat kesediaannya ini dikaitkan dengan jaminan bahwa ia tidak akan di-*recall*. Bagi Madjid, hal di atas merupakan penghinaan luar biasa, bukan saja karena ia berusaha dibeli, tapi lebih lagi, karena mengukuhkan citra bahwa semua tindakannya selama ini difungsikan semata-mata sebagai instrumen untuk mempertahankan kedudukannya di DPR/MPR.<sup>370</sup>

Tokoh-tokoh *Kelompok Empat*, meskipun sama-sama

---

368 Lihat *Kompas*, 10 Januari 1981.

369 Lihat *Kompas*, 12 Januari 1981.

370 Wawancara dengan Madjid, *Op.cit.*



menggantungkan diri pada impian bersama untuk tegaknya konstitusi partai, berjalannya mekanisme demokrasi, serta bebasnya PDI dari campur tangan luar, tetap berpijak di kepentingan yang berbeda-beda. Pemberontakan atas sikap unsur sendiri dan penolakan atas campur-tangan luar menjadi kepedulian Walandouw dan Ra'ib yang tetap menempatkan PDI sebagai PDI. Tetapi bagi Madjid khususnya, perwujudan impian-impian di atas dibaca sebatas sebagai sarana antara atau prakondisi yang memungkinkan munculnya kembali PNI sebagai kekuatan dominan dalam PDI. Dalam kalkulasi Madjid, apabila gagasan di atas terealisasi, maka, dengan jumlah massa pendukung yang besar, sudah dapat dipastikan setiap Konpercab/Konperda atau kongres akan memunculkan PNI sebagai kekuatan yang akan menguasai struktur organisasi PDI di semua jenjang dan bidang, kecuali tentunya bagi daerah-daerah yang secara tradisional merupakan basis PARKINDO dan Partai Katolik. IP-KI-MURBA yang tidak memiliki basis pendukung yang berarti, karenanya, akan tersisihkan dan akhirnya larut dalam PDI. Obsesi Madjid ini tentunya rasional karena obsesi yang sama juga tetap mengganggu tidur elite-elite unsur-unsur lain di luar PNI yang juga ingin menguasai PDI, atau setidaknya menggenggam pengaruh yang kuat dalam PDI. Akan tetapi, obsesi itu juga ironis karena setiap elite PDI, termasuk Madjid, sangat fasih melafalkan demokrasi dan selalu berusaha hadir sebagai demokrat, tapi justru memendam kerinduan mendalam untuk membangun kembali kejayaan di atas puing-puing minoritas yang sengaja dilindas lewat mekanisme yang mengesankan demokratis. Rancangan strategi "kudeta konstitusional" semacam inilah yang sebenarnya sangat ditakuti unsur-unsur lain, termasuk Pemerintah. Ini yang membuat Madjid harus dimusnahkan secara politik, sebelum terlampaui jauh melangkah.

Besar kemungkinan, inilah salah satu penjelasan atas

kegagalan berantai PDI bermain menurut logika konstitusinya sendiri—termasuk kecemasan penguasa mengizinkan mekanisme PDI untuk menemukan diri sendiri—walaupun hampir semuanya fasih dalam melafalkannya. Keinginan sungguh-sungguh untuk merealisasikan mekanisme konstitusi PDI, pada prinsipnya, tidak pernah menjadi moralitas politik elite PDI, apalagi yang berasal dari unsur kecil, justru karena eksistensinya selama ini terlindungi oleh adanya mekanisme ekstrakonstitusional partai.

Keinginan membangun kembali PNI lewat “kudeta konstitusional” versi Madjid ini mungkin tetap bisa diperdebatkan. Tetapi obsesi ke arah itu sendiri, adalah sesuatu yang riil. Aktivitas Madjid selepas penyingkirannya dari PDI dan serambi DPR/MPR mengkonfirmasi hal ini. Safari politik ke Jawa-Madura-Bali secara tegas ditargetkan untuk menghidupkan PNI.<sup>371</sup> Gagasan Madjid ini tidak mengembara kesepian karena menurutnya, dukungan tokoh-tokoh garis keras, seperti, Sanusi, Usep, Slamet Ginting, Manai Sophian, Karna Radjasa, Isnaeni, dan Iskak ikut menyertai pengembaraannya. Memang ada perbedaan yang menandai masing-masing tokoh, tetapi perbedaan antara tokoh-tokoh ini lebih berkaitan dengan kalkulasi waktu: mereka tidak akurat dalam menentukan “jadwal” yang tepat bagi “pernyataan lahirnya PNI”. Madjid menghendaki dikeluarkan sebelum SU-MPR, sedangkan tokoh lainnya, kecuali Iskak yang sepakat dengan Madjid, menghendaki sebaliknya. Kegagalan ini, menghempaskan keinginan yang ada ke dunia angan-angan. Ia akhirnya menjadi penghuni tetap kuburan sejarah partai, terlepas dari telah disepakatinya menyusun DPP PNI Baru yang menempatkan Madjid di pucuk kekuasaan partai, dengan Sekretaris dan Bendahara, masing-masing, Rasyid dan Iskak.<sup>372</sup>

---

371 *Ibid.*

372 *Ibid.*

Obsesi melahirkan kembali PNI, juga terungkap dalam wawancara penulis dengan Madjid. Dalam wawancara Madjid mengungkapkan, bahwa hasil Keputusan Munas PNI 27-28 Januari 1975 adalah benar untuk menyepakati fusi. Akan tetapi, menurutnya, fusi tidak dibaca sebagai titik akhir karena keputusan yang ada tetap mengharuskan kelahiran kembali PNI, atau, pada tingkat paling minim, PDI "di-PNI-kan".<sup>373</sup> Dengan pemahaman seperti ini, Madjid memperjuangkan penguasaan struktur PDI oleh *slagorde* PNI. Upaya ini gagal pada awalnya, seperti yang tercermin dalam komposisi DPP PDI hasil Kongres I. Karenanya, ia merasa berkewajiban terus memperjuangkan ide ini pada fase berikutnya. Setelah Kongres I menyatakan "fusi tuntas pari-puma", masih menurut Madjid, guna menghadapi Kongres ke II, strategi mem-PNI-kan PDI kembali disusun. Ini dimulai dengan batas waktu pendaftaran anggota dan memilih pengurus dari dan oleh anggota. Dengan cara ini, diharapkan PNI yang mayoritas akan menguasai struktur PDI di semua tingkat yang akan bermuara pada Kongres II. Skenario ini gagal, bukan saja karena dukungan yang terbatas,<sup>374</sup> atau karena ia telah menciptakan ketakutan bersama unsur-unsur kecil yang justru mampu mentransformasikannya menjadi kekuatan bersama untuk melawan PNI dan, terlebih lagi, karena ia berada di luar logika penataan politik yang sedang dirancang Orba.

Kembali ke aktivitas *Kelompok Empat*. Badai lepas badai yang menerjang tak juga menyusutkan perlawanan mereka. Sekalipun pemberitaan tentang aktivitas mereka tiba-tiba menghilang dari berbagai media massa, perlawanan tetap berlanjut. Pada 12 Januari 1981, mereka mengajukan surat ke Presiden yang meminta perhatian atas "masalah penegakan hukum dan keadilan serta pemerataan kesempatan untuk

---

373 *Ibid.*

374 *Ibid.*

memperoleh keadilan”,<sup>375</sup> yang tak mendapat sambutan apa pun. Sehari sebelum Kongres II dibuka, *Kelompok Empat* mengeluarkan 17 dalil perjuangan dalam menegakkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dilawankan dengan penyelenggaraan Kongres ke II yang disebutkan sebagai “Kongres Gadungan”.<sup>376</sup> 17 Dalil tersebut secara pokok menggugat Kongres ke II PDI, menolak campur tangan Pemerintah, dan menuntut diakhirinya praktik manipulasi dan sandiwara politik yang merusak kehidupan bangsa dan negara serta memerkosakan demokrasi.<sup>377</sup> Dalil-dalil ini kemudian disebarkan kepada para utusan kongres dan menciptakan kepanikan. Selepas itu, 16 Januari 1981, *Kelompok Empat* memproklamkan “Deklarasi Eksistensi”. Deklarasi ini diniati untuk membuktikan keabsahan DPP hasil Kongres I yang anggota-anggotanya tinggal mereka berempat, dan sebaliknya mengadili DPP hasil Kongres II sebagai “tidak sah”<sup>378</sup> karena dihasilkan forum yang “tidak sah” dan bertentangan dengan konstitusi partai dan UU No. 3/1973.<sup>379</sup>

## **J. Kongres ke II: Pertarungan Tiga “Pendekar”**

Setelah beberapa kali penundaan, akhirnya Kongres II PDI dapat diselenggarakan. Diterimanya Panitia Kongres oleh Presiden, 8 Januari 1981, adalah isyarat paling kuat ke arah ini, sekalipun masih dibayangi gundukan masalah, mulai dari belum tuntasnya penataan DPC-DPD kembar hingga

---

375 Lihat surat yang ditandatangani empat tokoh ini kepada Presiden, perihal “Yang Berhak dan Absah sebagai DPP PDI”, 12 Januari 1981.

376 Lihat “Kongres Gadungan versus Dalil-Dalil Perjuangan Menegakkan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat”, stensilan, tanpa tahun dan tanpa tanda tangan.

377 *Ibid.*

378 “Deklarasi Eksistensi”, yang ditandatangani empat tokoh ini, 16 Januari 1981.

379 *Ibid.*

pada undangan bagi peserta kongres. Persoalan terakhir ini, berpangkal pada sikap DPP PDI, khususnya, *Panitia Kongres*, yang untuk kepentingan penyingkiran tokoh-tokoh daerah yang tidak sejalan dengan DPP (anggota DPP), secara sengaja tidak memberikan undangan pada DPC/DPD yang dianggap tidak sejalan tersebut. Banyak daerah, seperti di Jateng, yang sampai menjelang kongres pun belum mendapat undangan, sementara DPC-DPC yang dibentuk mendadak justru sudah menerimanya lewat kurir yang sengaja dikirim DPP. Di Sumut, hal serupa juga terjadi. *Caretaker* DPD PDI diberi undangan, sedangkan DPD-nya sendiri tidak dikirim. Kesimpangsiuran di banyak daerah merupakan konsekuensi logis yang bisa diperkirakan. Karenanya, sekalipun Sekjen Sabam Sirait menegaskan, "*dapat atau tidak undangan, semua DPD/DPC diharapkan untuk hadir*,"<sup>380</sup> kekacauan di daerah-daerah tidak banyak tertolong. Menjelang kongres pun, kekacauan di sekitar arena tak terhindarkan. Penolakan terhadap peserta, seperti yang dialami kelompok DPD A.P. Batubara dari DKI Jaya yang merupakan DPD "tandingan" atau "yang ditandingi" DPD di bawah Ipik Asmasubrata, turut mewarnai kekacauan yang ada.

Hal yang menarik pada saat menjelang kongres adalah pemisahan tempat pendaftaran peserta bagi masing-masing unsur dan diselenggarakannya "*pertemuan pendahuluan*" intra tiap-tiap unsur. Dengan ini, sinyalemen sekaligus tuduhan *Kelompok Empat* bahwa Kongres ke II PDI merupakan "*Kongres Unsur*" atau digiring ke arah tersebut, setidaknya tidak mengada-ada karena menemukan pembuktian di tingkat praktis. Jika pertemuan antarunsur lainnya berjalan dengan

---

380 Lihat, pernyataan pers Sabam Sirait, seperti dikutip, *Kompas*, 13 Januari 1981.

relatif tanpa hambatan,<sup>381</sup> pertemuan unsur PNI ditaburi banyak persoalan. Forum ini menjadi arena “*pibu*”<sup>382</sup> yang sengit antara kubu Isnaeni-Sunawar dan Hardjantho. Elite-elite yang menggerombol di kubu Isnaeni-Sunawar awalnya telah sepakat menampilkan Isnaeni sebagai pengendali utama PDI. Hal ini dilandaskan pada hierarki kepemimpinan DPP PNI (in likuidasi): Isnaeni adalah orang pertama setelah meninggalnya Ketua Umum, Hadi Subeno.<sup>383</sup> Kesepakatan ini dicapai, konon, setelah kedua tokoh utama di kubu ini, Isnaeni dan Sunawar, dipertemukan lewat jasa baik Pangkopkamtib Sudomo yang menganggap kunci kesuksesan kongres adalah sangat tergantung pada dicapainya persatuan antara kedua tokoh ini. Keduanya juga sampai pada kesepakatan, yang juga disepakati Sudomo, untuk “berdiam diri” sementara operasional kongres dipercayakan pada “*para mandataris kedua kubu*”. Untuk itu, Sunawar menunjuk Merukh sebagai mandatarisnya, sedangkan Isnaeni menunjuk Andjar Siswojo.<sup>384</sup> Secara tidak langsung tokoh Pandaan, Marsoesi, mewakili kepentingan Hardjantho di arena kongres. Figur-figur yang ditunjuk berdasarkan “konsensus” ini yang akhirnya dikenal sebagai “*Tim asistensi DPP PNI in*

---

381 Pertemuan antarunsur PARKINDO dilangsungkan di ruang Rama-Shita Hotel Hasta, 13 Januari 1981. Pertemuan diawali acara kebaktian dan diikuti oleh sambutan pengarah oleh Wenas. Pertemuan antar unsur Partai Katolik dilangsungkan di Boekit Hall, Senayan, 13 Januari 1981; IP-KI mengadakan pertemuan di ruang Tampak Siring Hotel Hasta, tempat Sukarmadidjaja melaporkan hasil pertemuan dengan Pangkopkamtib hari sebelumnya. Sedangkan MURBA, mengadakan pertemuan di Hall C Senayan, dengan mayoritas pesertanya adalah orang tua.

382 Dalam cerita serial silat China dikenal istilah *pibu* atau perang tanding di antara teman seperguruan.

383 Wawancara penulis dengan Andjar Siswojo, 18 September 1986, di kantor Sekretariat DPP PDI, Jalan Diponegoro 58, Jakarta.

384 *Ibid.*

*likuidasi*",<sup>385</sup>—lembaga yang sungguh-sungguh baru menurut tradisi PNI—yang memainkan peranan sangat menentukan bagi munculnya salah satu tokoh sebagai Ketua Umum DPP PDI. Dan di arena Tim inilah pertarungan di antara kubu Isnaeni, Sunawar, Hardjantho berlangsung dengan serunya. "Konsensus" memunculkan Isnaeni sebagai Ketua Umum, mengalami perubahan drastis sehari sebelum penutupan kongres setelah Isnaeni, Sunawar dan Hardjantho dipertemukan oleh Sudomo, yang akhirnya justru menjagokan Sunawar sebagai warga pertama nantinya dalam hirarkhi PDI.<sup>386</sup>

Kembali ke pertemuan unsur PNI. Dengan mulai berfungsinya *Tim Asistensi PNI in likuidasi*, terjadi pula pengalihan mendadak tempat pertemuan.<sup>387</sup> Pengalihan tempat, dirancang untuk "meninggalkan" pendukung Hardjantho yang sedang bersaing keras dengan Sunawar dalam memperebutkan posisi Ketua Umum. Pada saat yang bersamaan, pemindahan lokasi ini merupakan upaya memantapkan posisi Sunawar. Sederhana saja alasannya, yakni karena perubahan sudah diberitahukan pada para pendukung Sunawar dan Isnaeni yang memihak Sunawar, sementara kubu Hardjantho tidak mendapatkan informasi apa pun.

Pertemuan unsur PNI mengukuhkan kembali konsensus "hierarki bergilir kepemimpinan PNI in likuidasi", yang berarti menaikkan Sunawar ke posisi nomor satu karena Isnaeni

---

385 Menurut Merukh dan Siswojo, tim ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan "Marcopolo", 18-19 Desember 1980, yang dikukuhkan dalam pertemuan antarunsur PNI, 8-10 Januari 1981. Pertemuan ini dihadiri oleh 21 daerah di Hotel Inter House. Lihat, pernyataan pers kedua tokoh ini, dalam *Kompas*, 15 Januari 1981.

386 Wawancara dengan Siswojo, *Op.cit.*

387 Pertemuan unsur PNI awalnya direncanakan berlangsung di Senayan. Tetapi satu jam sebelum waktu yang disepakati, Merukh dan Siswojo mengumumkan adanya perubahan tempat, yakni ke Ancol yang berjarak sekitar 20 Km. Lihat, *Kompas* dan *Sinar Harapan*, 14 Januari 1981.

sebelumnya sudah pernah memimpin PDI. Pengukuhan ini secara terbuka diungkapkan Merukh (Ketua Tim Asistensi PNI) dan Siswojo (Sekretaris) dalam pertemuan dengan wartawan, di *Coffee Shop* Wisma Hasta, Jakarta,<sup>388</sup> yang direaksi keras oleh Marsoesi<sup>389</sup> dan Hardjantho.<sup>390</sup>

Dengan hasil di atas, diikuti adanya rapat Panitia Ad Hoc yang memutuskan untuk mempertahankan 9 anggotanya tetap berada di lingkaran DPP mendatang dan hanya ditambah dengan 8 anggota di luar mereka, serta adanya konsensus Isnaeni-Sunawar-Hardjantho di depan Pangkopkamtib<sup>391</sup> yang menetapkan Sunawar sebagai Ketua Umum setelah kongres dan Hardjantho sebagai Ketua Umum periode berikutnya, maka kongres hanya difungsikan sebagai forum pengabsahan bagi berbagai konsensus terselubung antarunsur dan antartokoh. Bermodalkan aneka “konsensus” di atas, ditambah lagi dengan duduknya Sunawar dan Merukh masing-masing sebagai Ketua Komisi Organisasi dan Wakil Ketua—komisi paling strategis karena bertugas menggodok struktur, komposisi, dan susunan kepengurusan DPP PDI—, maka munculnya Sunawar sebagai Ketua Umum sesuai tuntutan skenario bukanlah persoalan berarti. Sekalipun demikian, tetap dibutuhkan kehadiran katup pengaman lainnya untuk menjamin setiap kemungkinan di luar skenario tidak terjadi. Pengusiran terhadap utusan kongres, terutama para pendukung Hardjantho yang dilakukan John Pakan, pengikut Sunawar yang berfungsi sebagai koordinator keamanan Kongres II PDI, merupakan salah satu katup

---

388 Lihat, misalnya, *Kompas*, 15 Januari 1981.

389 *Ibid.* Marsoesi menolak adanya konsensus yang menyebutkan Sunawar sebagai Ketua Umum DPP PDI, karena hal ini harus ditentukan peserta kongres.

390 Lihat pernyataan pers Hardjantho seperti dikutip dalam *Ibid.*

391 Hal ini dibenarkan dan sekaligus ditunjukkan buktinya oleh Hardjantho ketika saya mewawancarainya. Konsensus ini ditandatangani, 16 Januari 1981.



pengaman dimaksud.

Pengusiran yang meresahkan anggota kongres ini,<sup>392</sup> sama halnya dengan pembersihan tokoh-tokoh daerah sebelumnya, hanya berlaku untuk lingkungan PNI.<sup>393</sup> Namun, jika pada pembersihan tokoh daerah yang menjadi korban adalah pengikut Sanusi, maka kali ini yang menjadi sasaran adalah pendukung Hardjantho. Tindakan Pakan, tampaknya berkaitan dengan adanya "konsensus terselubung" antara MURBA dengan Sunawar dan Isnaeni<sup>394</sup> yang rupanya melibatkan kepentingan ekonomi dan politik. Suatu hal yang sebenarnya juga dilakukan unsur lain. Setiap unsur secara sistimatis mengoperasikan lembaga Ekubang yang dikhususkan untuk menyusun dan menjalankan strategi "mendapatkan atau merebut" sumber-sumber ekonomi, yang mau tidak mau, melibatkan mereka dalam "perjanjian terselubung". Boleh jadi, ini merupakan salah satu penjelasan dari adanya pola koalisi dan konflik dalam PDI yang terus berubah ibarat mimikri.

Penilaian negatif, protes dan kekecewaan atas penyelenggaraan kongres, bukan semata-mata monopoli *Kelompok Empat*. Tokoh-tokoh lainnya, seperti Batubara, Djakse, Aberson, Suryapranata (PNI), juga Parulia Silalahi,

---

392 Untuk ini, lihat, misalnya, *Sinar Harapan*, 15 Januari 1981.

393 Korban pengusiran, terutama utusan-utusan dari DPC-DPC Jateng dan Jabar. Dari Jateng, masing-masing: Gunawan (Karanganyar), Purwo (Sragen), Sastrosutarno (Boyolali), Suhono Poncowerekso (Wonogiri), Sulaiman Dwijosoekarto (Pati), dan Brotosardjono (Kodya Semarang). Sedangkan dari Jabar terdiri dari: Djadjang Kurniadi (Garut), Apong Djujiwa (Tangerang), Abbas (Kabupaten Bandung), Nana (Sumedang), Soemantri (Sukabumi) Nana Djumana (Ciarang), Djadja (Tasikmalaya), Utoyo (Kodya Bogor), Zen (Sarang), dan Uun (Pandeglang). Lihat *Sinar Harapan*, 15 Januari 1981.

394 Sebuah dokumen yang merupakan hasil pertemuan intern MURBA, masing-masing 21 dan 23 Januari 1981, mengungkapkan adanya konsensus serupa yang dilakukan dengan Isnaeni-Sunawar dan lainnya, yang kurang jelas. Dokumen ini ditandatangani Nasution dan Murbantoko dan disebutkan sebagai instruksi/perintah bagi intern MURBA.

Lumbangaol, Sabam (PARKINDO), serta Samosir (Partai Katolik) mengedepankan penilaian yang hampir senada.<sup>395</sup> Selain Komisi Organisasi, komisi lainnya, seperti Politik, Pemilu, Ekubang, Kesra, bekerja relatif tanpa gangguan berarti, terlepas dari kenyataan bahwa komisi-komisi ini banyak menggodok masalah-masalah penting partai, seperti program, sikap politik, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Ini mengungkapkan, tingginya orientasi elite-elite PDI pada figur dan kekuasaan yang menyangkali klaim mereka, yakni bahwa salah satu pusat sengketa selama ini adalah masalah yang fundamental.

Pada substansinya, Kongres II secara hampir sempurna telah berfungsi sebagai altar penyangkalan diri dan sekaligus penyerahan diri secara hampir total terhadap skenario besar yang disediakan Negara. Hal ini terungkap dari hasil-hasil Kongres II, antara lain: *Pertama*, penyangkalan ideologis yang terekspresikan melalui kesepakatan mengadopsi Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi PDI. Penyangkalan ideologis ini memang tidak bersifat total karena masih menyisakan *reserve* bagi diri sendiri. Ini terungkap lewat rekomposisi *Demokrasi, Kebangsaan, dan Keadilan Sosial* yang sebelumnya merupakan asas PDI untuk menempati posisi baru sebagai “ciri program PDI”.<sup>396</sup> Dengan ini, pergeseran dari partai ideologi ke arah partai program mulai menemukan pijakan awal dalam PDI. *Kedua*, penyangkalan diri pada tingkat wadah yang diekspresikan

---

395 Untuk ini, lihat, misalnya, *Kompas*, 16 Januari 1981 yang meliput reaksi masing-masing tokoh peserta kongres.

396 Lihat Keputusan Kongres ke II PDI, No. 03/KPTS/K.II/PDI/1981 tentang “Asas, Hakikat dan Landasan Perjuangan PDI”, 16 Januari 1981, yang ditandatangani oleh Pimpinan Kongres, Sunawar (Ketua) dan Sabam Sirait (Sekretaris).

lewat kesepakatan tentang pengakhiran eksistensi unsur<sup>397</sup> yang diikuti pengumuman ikrar<sup>398</sup> pengakhiran eksistensi masing-masing unsur. *Ketiga*, upaya identifikasi sekaligus pemantapan posisi sebagai "anak kandung yang sah" dari Orba yang diekspresikan lewat penetapan "garis politik partai" yang secara pokok mengikuti rumusan yang dikedepankan Sunawar pada pembukaan kongres. Pemeliharaan dan pengembangan semangat Orba, pengakuan atas Dwi Fungsi ABRI, penyatuan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Soeharto; dan partisipasi aktif dalam pembangunan,<sup>399</sup> merupakan pokok-pokok dari garis politik partai dimaksud.

Dengan tiga kesepakatan di atas, PDI bukan saja berusaha menepis keragu-raguan penguasa, tapi sekaligus berusaha memberikan pijakan ideologis bagi dirinya sendiri agar bisa menggenggam hak sah sebagai bagian dari format politik baru yang dirancang Orba. Sebuah perjuangan panjang yang akan terus dilakukan, tanpa pernah mencapai hasil maksimal. Hingga lebih dari 20 tahun perjalanan PDI, ia tetap menempati posisi sebagai "anak haram" yang tidak diharapkan, karena lebih banyak memproduksi kejengahan politik ketimbang kebanggaan.

Di samping pencapaian bentuk-bentuk penyangkalan dan penyerahan diri yang bersifat substantif di atas, Kongres II juga berhasil mengesahkan DPP baru yang merefleksikan ketaatan atas preferensi Pemerintah. Pengesahan susunan DPP yang diajukan Komisi Organisasi dilakukan setelah dicapai

---

397 Lihat "Keputusan Kongres No. 01 /KPTS/K-II/PDI/1981", tentang "Pernyataan mengakhiri eksistensi unsur dan tuntas paripurnanya Fusi", 17 Januari 1981.

398 Dibacakan oleh Notosukardjo mewakili PNI, Wenas mewakili PARKINDO, Wignjosumarsono atas nama Partai Katolik, Sukarmadidjaja atas nama IP-KI, dan Nasution mewakili MURBA.

399 Keputusan Kongres II PDI, No. 05/KPTS/K-II/PDI / 1981 tentang, "Sikap Politik", 17 Januari 1981.

kesepakatan antara Isnaeni- Sunawar-Hardjantho untuk memunculkan Sunawar sebagai Ketua Umum DPP PDI seperti yang sudah “dikonsensuskan”. Penegasan kembali “konsensus” terwujud, sekali lagi, atas jasa Pangkoptim yang menengahi pertemuan di antara ketiganya di kediaman Pangkoptim Sudomo. Sebelumnya, upaya serupa yang diprakarsai Marsoesi (PNI Jatim) dan Tjokorde (PNI Bali), dalam kapasitas sebagai Tim Asistensi PNI, mengalami kegagalan total.

Sebelum penetapan Sunawar sebagai ketua umum, pertemuan unsur-unsur non-PNI sepakat memberikan posisi ketua umum pada PNI, posisi sekjen dipasrahkan pada PARKINDO dan bendahara pada Partai Katolik. Formula yang diakuri sebagai dasar penentuan komposisi kepengurusan adalah 5 : 3 : 3 : 3 : 3 (5 bagi PNI, sementara kekuatan lainnya berbagi sama, yakni 3). Kesepakatan-kesepakatan ini sebenarnya lebih berfungsi mempertegas kesepakatan rapat Panitia Ad Hoc sebelumnya. Dengan komposisi ini, tuntutan IP-KI-MURBA yang selama ini menjadi ganjalan dalam hubungannya dengan PARKINDO-Partai Katolik sudah terpenuhi. Susunan selengkapnya DPP hasil Kongres II adalah sebagai berikut:

Ketua Umum	:	Prof. Dr. Sunawar Sukowati, SH
Ketua-ketua	:	Drs. Harijantho Sumodisastro Alexander Wenas F.S Wignjosumarsono Akhmad Sukarmadidjaja H. Muhidin Nasution MH. Isnaeni.
Sekjen	:	Sabam Sirait

Para Wakil Sekjen : Drs. Jusuf Merukh  
V.B da Costa  
Andri Parengrengi Tanri  
John Pakan.  
Bendahara Umum : Drs. M.B Samosir  
Para Bendahara : Notosukardjo  
J.H.D. Tahamata  
Mustafa Supangat  
Indra Bhakti.<sup>400</sup>

DPP baru dibebani kewajiban menyelesaikan masalah DPD/DPC yang ada sebelum kongres berlangsung<sup>401</sup> di samping menyempurnakan AD/ART Partai.<sup>402</sup>

---

400 Lihat "Lampiran", Keputusan Kongres II PDI, No. 07/KPTS/K-11/PDI/1981.

401 Keputusan Kongres II PDI, No. 09/KPTS/K-11/PDI/ 1981 tentang "Penyelesaian Masalah-masalah yang ada dalam tubuh DPD dan DPC PDI sebelum diselenggarakan Kongres II PDI".

402 Keputusan Kongres II PDI, No. 04/KPTS/K-II/PDI/ 1981 tentang "Penyempurnaan AD dan ART PDI", 16 Januari 1981.

## **BAB VI**

### **PDI 1981-1986:**

# ***“Kuncup pun Berkembang, dan Kembang pun Layu”***

Tahapan ketiga pengembaraan sang Banteng berawal sejak Kongres II (1981) hingga berakhirnya Kongres III (1986). Membalut kembali luka-luka lama yang menganga akibat perang panjang periode kedua adalah kisah utama periode ini. Namun, seperti juga kisah-kisah kemelut di periode sebelumnya, konflik selalu saja punya alasan untuk bisa hadir secara sah. Bagi elite-elite PDI, makna politik belum bergeser jauh. Mereka masih tetap berputar-putar di lingkaran konflik. Walaupun suasana damai di atas permukaan bisa dicapai untuk jangka waktu agak panjang, benih-benih konflik tetap berkeliaran di bawah permukaan. Dengannya, upaya-upaya merajut kembali serpihan-serpihan potensi PDI yang berserakan menjadi pekerjaan luar biasa sulitnya, bahkan mungkin lebih sulit dari periode sebelumnya. Hal ini, terutama, karena para aktor yang melakoni peran konflik tidak lagi bisa dengan mudah diidentifikasi sebagai kaum radikal yang siap memungguni Negara setiap saat, tapi justru para elite yang punya kesantunan politik tinggi di hadapan Negara. Pelaku-pelaku politik bukan lagi mereka-mereka yang tetap setia menggenggam pedang Marhaenisme di tangan kanan dan cambuk PNI di tangan kiri yang siap melibas siapa pun yang

berseberangan dengan mereka, tapi justru mereka-mereka yang sudah terseleksi secara ideologis dan cukup cerdas dalam memahami logika politik baru yang ditawarkan Orba.

Keadaan ini, bisa diperkirakan, cukup merisaukan. Ancaman atas kelangsungan skenario untuk “mengadabkan” dunia politik Indonesia, sekali lagi, terbentang di depan mata. Karenanya, langkah penyelamatan politik mesti bisa disediakan. Dalam kepanikan inilah, secara samar-samar, suatu rancangan baru penyelesaian intern mulai metampakan sosoknya di era ini. Skenario baru ini, seperti yang akan dibicarakan lebih detail, di ujungnya hadir dalam raut pembusukan politik secara massal atas generasi pertama PDI. Di atas pusara generasi pertama inilah, tegak berdiri suatu generasi baru yang diandaikan sebagai pewaris kebudayaan politik baru hasil rekaan Orba. Sebuah pengandaian yang tidak pernah terbukti, bahkan di era sekarang ini, ketika kepolitikan PDI sudah beralih ke generasi lapisan ketiga.

DPP hasil Kongres II di bawah Sunawar mengawali aktivitasnya jauh dari situasi damai. Sejak awal DPP Sunawar sudah harus berhadapan dengan perlawanan *Kelompok Empat* yang menolak eksistensinya, berikutan seluruh produk Kongres II karena menilainya tidak sah dan bukan Kongres PDI. Lewat SK. No. 001/ORG/TUS/1-81, 17 Januari 1981, *Kelompok Empat* yang tetap memosisikan diri sebagai DPP PDI yang sah, mengambil langkah “*pemberhentian sementara semua orang yang menamakan diri DPP PDI hasil Kongres kedua PDI*”.<sup>1</sup> Pemberhentian sementara dilakukan karena menilai Sunawar, dkk. sebagai “*pelaku-pelaku utama dalam pelanggaran hukum organisasi dan hukum negara*”.<sup>2</sup> Reaksi balik dari DPP Sunawar berupa “*pemecatan sementara*” atas tokoh-tokoh *Kelompok*

---

1 Lihat SK DPP PDI No. 001/ORG/TUG/1981 yang ditandatangani Madjid, Usep, Walandauw dan Ra'ib.

2 *Ibid.*, bagian “Menimbang”, angka 6.

*Empat* muncul pada 22 Januari 1981,<sup>3</sup> yang, karena tidak ditanggapi *Kelompok Empat*, disusuli dengan tindakan berantai berupa “*pemecatan tetap*” dan penarikan tiga dari empat tokoh ini dari keanggotaannya di DPR/MPR.<sup>44</sup> Dua langkah terakhir ditempuh sesuai dengan rekomendasi rapat DPP tanggal 30 Januari 1981. Kemungkinan akan di-*recall* sudah diperkirakan sejak dini oleh *Kelompok Empat*. Karenanya, jauh sebelumnya mereka telah mengajukan surat kepada Ketua DPR/MPR yang menegaskan tidak adanya perubahan dalam F-PDI.<sup>55</sup>

Pemecatan *Kelompok Empat* dari keanggotaan PDI memproduksi reaksi balik berupa penjelasan *Kelompok Empat* mengenai keabsahan mereka sebagai DPP PDI;<sup>6</sup> hampir sebangun dengan surat yang dialamatkan kepada Presiden.<sup>7</sup> Menanggapi *recalling* atas tiga tokohnya, *Kelompok Empat* melakukan pertemuan dengan Ketua DPR/MPR,<sup>8</sup> yang disusul dengan surat yang mempersoalkan *recalling* tersebut.<sup>9</sup> Baik dalam pertemuan maupun surat ke Ketua DPR/MPR mereka tidak mendapatkan tanggapan. Karenanya, mereka kembali menyampaikan surat lebih keras, berupa “*protes dan pengaduan*”. Surat ini menggugat Ketua DPR/MPR karena dinilai “melalaikan kewajiban, melanggar makna dan hakikat UU No. 16/1969 (*diubah dengan UU No. 5/1975*), ikut menghakimi anggota DPR yang tidak bersalah, tidak mengindahkan yang sah, melanggar

---

3 Lihat *Merdeka*, 3 Februari 1981.

4 *Ibid.*

5 Lihat surat DPP PDI kepada Ketua DPR yang ditandatangani Madjid, No. 002/ Fraksi, perihal “Fraksi PDI”, 19 Januari 1981.

6 Lihat Penjelasan tentang “Keabsahan Eksistensi PDI di bawah pimpinan DPP PDI hasil Kongres Pertama PDI”, ditandatangani tokoh *Kelompok Empat*, 25 Januari 1981.

7 Lihat surat kepada Presiden perihal “Yang berhak dan Absah sebagai DPP PDI”, ditandatangani keempat tokoh *Kelompok Empat*, 12 Februari 1981.

8 Pertemuan dilakukan 25 Februari 1981.

9 Lihat surat Kepada Ketua DPR yang ditandatangani Madjid dan St. Radjamas, tentang “Peng-recall-an Anggota DPR/MPR”, 7 Maret 1981.



ketentuan UU No. 3/1975, dan, terlebih lagi, ikut terlibat dalam konflik internal PDI.”<sup>10</sup>

Perlawanan terbuka yang memungungi logika kultur politik Indonesia, ditambah sikap kritis dan keras dalam menanggapi berbagai usulan Pemerintah selama masa sidang MPR dan DPR sebelumnya, dikombinasikan dengan meluasnya ketidaksenangan atas figur Usep di lingkaran atas kekuasaan, secara kumulatif akhirnya menyudahi peran politik *Kelompok Empat*. Apalagi upaya lunak, seperti *iming-iming* keamanan posisi keanggotaan di DPR/MPR sebagai kompensasi atas pelunakan sikap, justru ditanggapi sebagai “penghinaan” oleh Madjid, dkk.<sup>11</sup> Skenario pengakhiran politik ini akhirnya mengambil bentuk pencabutan keanggotaan mereka dari DPR/MPR yang mulai berlaku 1 April 1981 dan mem-*black out* mereka dari media massa. Akibatnya, sekalipun ada sejumlah perlawanan, seperti safari politik guna menggalang kembali massa PNI di Jawa dan Bali selepas terempasnya mereka dari kursi DPR/MPR terus dilakukan Madjid, hasil yang dituainya sangat terbatas. Aktivitas kelompok ini bukan saja terbentur pada keengganan, bahkan ketakutan dan kecurigaan di kalangan massa, tapi juga “boikot terpaksa” oleh media massa.

Tersingkirnya *Kelompok Empat* mengakhiri oposisi terbuka atas DPP PDI hasil kongres. Dengannya terbuka ruang agak leluasa untuk melakukan perajutan kembali anekasegmen yang tercerai berai. Konsepsi “*merangkum semua potensi*” guna menciptakan suasana kerukunan (persatuan-kesatuan)

---

10 Lihat “Nota Protes dan Pengaduan” mengenai Ketua/Pimpinan DPR yang dialamatkan kepada DPR. Nota ini ditandatangani oleh Madjid, Usep, Walandauw, Santoso Donoseputro dan Solomo—dua orang yang juga di-*recall*.

11 Dalam wawancara dengan penulis, Madjid menegaskan, ia berulang kali dihubungi berbagai pihak yang membujuknya untuk bersifat lunak. Tetapi karena bujukan ini dikaitkan dengan posisinya di DPR/MPR, ia merasa terhina dan karenanya menolak.

seperti yang dicanangkan DPP PDI<sup>12</sup> dihadirkan sebagai jargon baru yang mulai sedikit menemukan bentuk. Apalagi pemilu 1982 yang semakin mendekat telah menyediakan diri secara sukarela dan sempurna sebagai “kepentingan bersama” yang memaksa mereka untuk tetap memelihara suasana kerukunan yang mulai dibangun. Akan tetapi, optimisme itu dibangun di atas keyakinan keliru karena mengabaikan kedigdayaan kekuatan destruktif yang inheren di dalam PDI. Di bawah permukaan, konflik terselubung tetap berlangsung. Bahkan kini menghadap-hadapkan kekuatan PARKINDO dan Partai Katolik yang telah sekian lama berangkulkan mesra. Permusuhan sesama sejawat lama ini, terutama, dipicu oleh pilihan politik PARKINDO berkoalisi dengan Sunawar. Padahal ia merupakan “musuh bersama” keduanya di masa lalu karena diyakini anti PARKINDO-Partai Katolik.<sup>13</sup> Ketegangan yang akhirnya bermuara pada permusuhan di antara dua kubu ini memupus semua kenangan manis yang pernah ada di antara keduanya. Hubungan keduanya, seperti yang diakui sendiri oleh da Costa, telah mencapai titik terendah sejak munculnya kedua kekuatan ini.<sup>14</sup>

Sebab serupa, yakni bersekutunya PARKINDO, cq. Sabam-Wenas, dengan kubu Sunawar, menggiring langkah elite-elite PARKINDO kembali memasuki arena “*pibu*”. T.A.M. Simatupang, salah satu tokoh teras PARKINDO kini berhadap-hadapan sebagai lawan dengan Sabam-Wenas. Bagi Simatupang, mendukung Sunawar berarti pengingkaran atas kesepakatan internal yang, bersama-sama Partai Katolik, telah mencanangkan langkah “pengunduran diri dari PDI dan proklamasi partai baru” apabila

---

12 Keinginan untuk merangkum semua potensi ini dapat dilihat dari pernyataan pers Hardjantho, seperti dikutip *Merdeka*, 3 Februari 1981.

13 Sunawar sendiri membantah bahwa ia “antikekuatan Kristen-Katolik”, bahkan ia menunjukkan bahwa istrinya seorang Kristen.

14 Wawancara dengan da Costa, ..., *Op.cit.*

Sunawar terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI di arena Kongres II. Segala kemungkinan risiko yang timbul karena langkah di atas, bahkan bersedia dipukul Simatupang.<sup>15</sup> Silang pendapat dua kubu ini bukan saja menemukan dirinya berakhir sebagai konflik sesama PARKINDO, tapi melebar hingga menjangkau kubu Sunawar. Dengan ini, pilar-pilar yang mulai ditata guna membangun persatuan-kesatuan PDI mulai menunjukkan kerapuhannya.

Sikap keras Simatupang membuahkan hasil berupa ancaman *recalling* dan penyingkiran namanya dari daftar calon anggota DPR Pemilu 1982. Usul penarikannya dari DPR akhirnya dipersoalkan Simatupang lewat surat yang dialamatkan pada pimpinan Fraksi dan DPP. Dijelaskannya, usulan pimpinan Fraksi kepada DPP yang meminta peninjauan kembali kedudukannya sebagai anggota DPR/MPR,<sup>16</sup> setelah pernyataan persnya yang menyatakan “*tidak bersedia dicalonkan kembali*”, bukan merupakan produk rapat Fraksi, tapi hasil kreasi Akhmad Subagyo dan Suryadi dalam masa reses.<sup>17</sup> Namun, penjelasan ini tidak banyak menolong. Simatupang di ujungnya menemukan dirinya di-*recall*. Ketidaktahuan Mahbub Djunaedi yang menilai penarikan Simatupang sebagai “*hal yang mengagetkan yang melebihi keajaiban apa pun di dunia*”,<sup>18</sup> juga tidak mengubah skenario yang ada. Padahal bagi Mahbub, PDI dikenal di kampus-kampus justru berkat Simatupang dan bukan karena yang bergelar Profesor—Sunawar, maksudnya. Perjalanan Simatupang boleh jadi akan berakhir tragis seperti halnya Madjid, dkk. Karenanya, sebelum penalti politik berikutnya menyimpannya, secara dini ia menyatakan diri keluar

---

15 Wawancara dengan Simatupang, ..., *Op.cit.*

16 Surat ini ditujukan kepada DPP dan ditandatangani Akhmad Subagyo dan Suryadi, 28 September 1981.

17 Lihat surat Simatupang kepada Pimpinan Fraksi DPP PDI, 3 November 1981.

18 Lihat Mahbub Djunaedi, “Sebuah Kado Bagi T.A.M. Simatupang”, dalam *Merdeka*, 9 November 1981.

dari PDI untuk selanjutnya bergabung dengan Golkar. Bahkan ia berkampanye untuk Golkar dalam Pemilu 1982 setelah PDI dianggap tidak lagi dapat dipergunakan sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat.<sup>19</sup>

Kepergian Simatupang membangkitkan harapan bagi DPP Sunawar untuk mengadakan konsolidasi internal, sekalipun konflik bawah permukaan antara kubu Sunawar-PARKINDO versus Partai Katolik tetap saja mengintip dari sudut-sudut kegelapan. Di permukaan konflik terbuka—setidak-tidaknya yang berskala masif, karena intrik di sekitar pencolanan anggota DPR/D, terutama di sekitar “jadi calon” dan “calon jadi” terus berlanjut—tidak merekah antara akhir 1981 sampai awal Agustus 1983. Inilah periode stabil di permukaan yang paling panjang yang pernah dinikmati PDI.

#### **A. Negara sekuler: Pertarungan Dua “Pendekar”**

Melewati saat-saat teduh yang cukup panjang tampaknya bukan sebuah pilihan menggembirakan, bahkan mungkin sangat membosankan bagi para petinggi PDI. Dunia politik yang dikenal adalah sebuah dunia “hiruk-pikuk”. “Keteduhan”, dengannya, merupakan ekspresi dari penyangkalan atas *nature* politik. Ia merupakan keanehan yang sulit diakrabi. Apalagi, “keteduhan”—yang terekspresi dalam raut penghormatan konflik dan pemujaan atas harmoni (sosial) dan serasi-selaras-seimbang—rumusan baru yang dikreasikan secara sepihak oleh Negara. Proses “penyangkalan diri” berulang yang coba dilakukan elite-elite PDI untuk mengamini “keteduhan” sebagai sesuatu yang sakral, karenanya, harus dibaca sebagai sebuah kegagalan untuk berdamai dengan hasrat diri ketimbang dibaca dalam makna sebaliknya. Karenanya, kembali memasuki dunia konflik yang sudah sangat diakrabi menjadi obsesi sangat normal. Yang tersisa adalah soal “sopan santun”, yakni

---

19 Lihat keterangan pers T.A.M. Simatupang, dalam *Merdeka*, 30 Maret 1982.

menemukan alasan yang sah untuk itu. Dan alasan itu segera muncul.

Mekar kembalinya konflik terbuka dalam PDI menemukan alasannya pada isi pidato pengarahan Ketua Umum PDI, Sunawar, kepada F-PDI. Pidato yang merupakan tanggapan atas pidato kenegaraan Presiden di depan Sidang Paripurna DPR, 16 Agustus 1983, segera ditangkap Hardjantho sebagai celah untuk menerobos ke wilayah konflik. Dalam pengarahannya, Sunawar, antara lain, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara sekuler berdasarkan Pancasila.<sup>20</sup> Karenanya, kepada anggota F-PDI diminta tidak alergi dengan istilah ini.<sup>21</sup> Kesimpulan Sunawar berangkat dari pemahaman adanya pemisahan antara masalah agama dengan masalah politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang merupakan karakteristik dari suatu negara sekuler. Namun, kesimpulan yang ditabur di lahan F-PDI ini menuai silang pendapat di masyarakat luas,<sup>22</sup> bahkan di lingkaran Pemerintah.

Menkokesra, Alamsyah, segera menyahutinya dengan mengatakan bahwa kesimpulan Sunawar sangat berbahaya, serta tidak cocok dengan Pembukaan UUD 1945.<sup>23</sup> Alamsyah tidak sendirian. Hal ini secara tidak langsung dibenarkan Ketua

---

20 Lihat *Merdeka*, 19 Agustus 1983, dan *Suara Karya*, 19 Agustus 1983.

21 *Kompas*, 19 Agustus 1983.

22 Misalnya, Wakil Sekretaris F-KP, Krisantono menegaskan, Indonesia bukan negara sekuler dan bukan negara agama, *Suara Karya*, 20 Agustus 1983; Zamroni, anggota DPR dari PPP yang membenarkan Indonesia sebagai negara sekuler, tapi menolak sekulerisme, *Merdeka*, 20 Agustus 1983; Lukman Harun, yang menegaskan, interpretasi Sunawar adalah keliru; *Pelita*, 20 Agustus 1983; Ruslan Abdulgani yang menilai tidak adanya nilai sekulerisme dalam pidato kenegaraan Presiden; Imron Rosjidi yang menegaskan, Indonesia bukan negara sekuler, *Antara*, 23 Agustus 1983; dan masih banyak lain, seperti Sayuti Melik, Abdy S. Kusumanegara, H. Oemar Bakry, Abdurahman Wahid, B. Yass, Ayib Bakar, Pranata SSP, BP. Messakh, Babari, dan sebagainya.

23 *Merdeka*, 20 Agustus 1983.

DPR/MPR<sup>24</sup> yang meminta F-PDI menarik kembali dukungannya atas kesimpulan Sunawar.<sup>25</sup> Imbauan yang ada, ternyata tidak ditanggapi F-PDI,<sup>26</sup> karena meyakini diri sudah cukup dewasa sehingga tidak perlu dipengaruhi pihak lain.<sup>27</sup> Kisah selanjutnya dari penolakan F-PDI bisa diperkirakan: ketegangan hubungan antara pimpinan DPR/MPR dengan F-PDI. Apalagi sikap penolakan Amir Makmud atas kesimpulan Sunawar juga mendapatkan pembenaran dari F-ABRI. Bagi fraksi ini, perkembangan isu negara sekuler bukan saja membingungkan, tapi juga menyesatkan masyarakat.<sup>28</sup> Presiden sendiri, dalam pertemuan dengan pimpinan Tim P-7, memperingatkan Sunawar secara halus, tanpa mempersoalkan substansinya. Soeharto secara tidak langsung mengingatkan Sunawar menghindari penggunaan istilah-istilah asing dalam membicarakan masalah ketatanegaraan Indonesia.<sup>29</sup> Bagi Kepala negara, penggunaan istilah-istilah tersebut dapat melahirkan polemik yang tidak menguntungkan siapa pun.

Ketika gagasan di atas pertama kali dimunculkan Sunawar, reaksi penolakan yang bersifat tegas praktis tidak dijumpai di dalam PDI. Penolakan keras mulai bermekaran ketika aneka tanggapan yang merefleksikan preferensi negara di atas mulai menghiasi diskusi publik. Hardjantho, yang nantinya menjadi pilar penentang Sunawar dalam isu ini bahkan awalnya cukup berhati-hati dalam menanggapi kesimpulan Sunawar. Ia menyebutkan ucapan Sunawar, "*kemungkinan hanya keseleo lidah*".<sup>30</sup> Ini baru kisah awalnya. Seiring dengan mengerasnya

---

24 *Merdeka*, 24 Agustus 1983.

25 *Merdeka*, 7 September 1983.

26 *Merdeka*, 8 September 1983.

27 *Ibid.* Ditegaskan oleh Merukh.

28 *Sinar Harapan*, 12 September 1983.

29 Penegasan Presiden ini disampaikan melalui Ketua Tim BP-7 Ruslan Abdulgani; lihat *Berita Buana*, 26 Agustus 1983.

30 Lihat *Antara*, 21 Agustus 1983.

penolakan sejumlah aktor perwakilan negara, diimbuhi oleh penegasan kembali Sunawar dan juga Fraksi PDI bahwa kesimpulan tersebut bukan salah ucap seperti yang diperkirakan Hardjantho,<sup>31</sup> sikap Hardjantho juga mulai mengalami perubahan ke arah yang sejajar dengan kecenderungan perwakilan Negara di atas. Dengan itu, mencuatnya kembali konflik lama antara Sunawar dan Hardjantho tak terbendung lagi.

Bagi Hardjantho, secara makro konfliknya dengan Sunawar dipicu oleh kecenderungan individualistis untuk tampil sebagai pahlawan bagi kepentingan bangsa dan negara dengan mengabaikan asas-asas kultur yang diciptakan parpol dan orang yang bersangkutan.<sup>32</sup> Sunawar, di mata Hardjantho, jatuh ke dalam kategori ini. Khusus menyangkut isu negara sekuler, dalam wawancara dengan penulis, Hardjantho menegaskan, dilihat dari segi PNI dan sejarah bangsa yang tidak pernah mengenalnya, isu ini merupakan persoalan prinsip. Dengannya, ia menepis anggapan umum bahwa konflik yang terjadi dalam PDI bersumber pada kepentingan individu. Baginya generalisasi di atas merupakan pandangan “*man on the street*” yang tidak mengetahui persoalan sebenarnya.<sup>33</sup>

Sebenarnya, munculnya isu “negara sekuler” ini tidak sekadar bersumber pada keinginan Sunawar untuk menafsirkan pidato kenegaraan Presiden. Dari sejumlah sumber PDI<sup>34</sup> disebutkan, lahirnya *statement* di atas ditujukan demi menjawab surat Syafrudin Prawiranegara kepada Kepala Negara dan pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Pada intinya, Prawiranegara menggugat negara berdasarkan Pancasila dengan

---

31 *Merdeka*, 23 Agustus 1983.

32 Wawancara dengan Hardjantho, ..., *Op.cit.* Hal ini dimaksudkan Hardjantho tidak hanya sebatas dalam konteks konfliknya dengan Sunawar, tapi menyangkut konteks yang lebih luas lagi.

33 *Ibid.*

34 Misalnya wawancara dengan Pakan, ..., *Op.cit.*

menyebutkan bahwa pemikiran tersebut hanya menghasilkan pelacuran, ganja, perjudian, dan sebagainya. Dengan alasan ini, tokoh ini menghimbau agar dasar kenegaraan dikembalikan kepada wahyu Ilahi yang berarti masuk dalam kerangka negara teokratis.

“Meluruskan kembali” alur logika yang melenceng seperti inilah yang ingin dilakukan Sunawar lewat pengarahannya di F-PDI. Namun, rupanya, masih menurut sumber-sumber tersebut, makna negara sekuler diekspose sebagai *secularism* yang akhirnya membuahkan silang pendapat luas dalam masyarakat. Silang pendapat yang berbuah konflik ini semakin menajam, terutama karena adanya dukungan kuat dari sejumlah elite Pemerintahan terhadap Hardjantho.<sup>35</sup> Karena isu ini terus bertahan sampai memasuki Kongres III, maka, menurut perkiraan Pakan, ia memang sengaja diciptakan untuk menimbulkan pertentangan internal.<sup>36</sup> Tokoh lain yang berseberangan dengan Pakan, yakni Supangat, menegaskan keterkaitan isu *negara sekuler* dengan surat Syafruddin Prawiranegara hanya “pembenar” karena, seperti juga yang dipersoalkan Hardjantho, mengapa bukan Pancasila yang dimunculkan sebagai istilah oleh Sunawar.<sup>37</sup>

Kontroversi di sekitar isu negara sekuler, boleh jadi, lebih merupakan persoalan interpretasi istilah (semantik). Namun, yang mendasar darinya adalah, ia telah memberikan alasan absah bagi elite-elite PDI untuk bisa membebaskan diri dari cengkeraman penjara “masa-masa teduh” yang menjenuhkan. Secara aktual, atas nama penolakan dan/atau pendukungan atas ide negara sekuler, elite-elite PDI memutuskan bercerai untuk kemudian membangun padepokan terpisah yang saling

---

35 *Ibid.*

36 *Ibid.* Sinyalemen serupa sebenarnya juga diajukan oleh hampir semua tokoh PDI dalam menilai konflik yang berkepanjangan dalam PDI.

37 Misalnya wawancara dengan Supangat, *Op.cit.*



meniadakan: DPP PDI Negara Sekuler di bawah patronase Sunawar dan DPP PDI Pancasila di bawah patronase Hardjantho. Keadaan ini berlangsung untuk jangka waktu lebih dari satu tahun sejak munculnya isu ini.

Polarisasi ke dalam dua DPP di atas, secara cepat mengapungkan ke permukaan konflik bawah permukaan PARKINDO versus Partai Katolik. Dengannya, secara resmi era bulan madu keduanya telah berlalu, yang mengungkapkan kerasnya konflik di bawah permukaan antara keduanya yang sekian lama terserap ke dalam konflik sesama PNI. Di samping itu, polarisasi ini menandai berakhirnya era koalisi PARKINDO-Partai Katolik-kubu Hardjantho yang kenyal di arena Munas Pandaan. Dengan ambruknya konfigurasi konflik-koalisi lama, konfigurasi baru segera terbentuk. PARKINDO-kubu Sunawar serta Partai Katolik-kubu Hardjantho yang saling berhadapan kini hadir menggantikan polarisasi lama.

Sulit ditelusuri sebab-sebab pasti dari pemihakan PARKINDO pada Sunawar serta pemihakan Partai Katolik pada Hardjantho. Apalagi masing-masing dari mereka lebih banyak berlindung di balik tirai argumentasi pembenaran yang dikedepankan Hardjantho atau Sunawar, tanpa pernah secara tegas merumuskan posisi mereka. Sekalipun demikian, dapat diperkirakan bahwa Partai Katolik juga ingin memiliki “pelindung” yang mempunyai kedekatan hubungan dengan elite-elite di lingkaran kekuasaan dan sekaligus berasal dari unsur terbesar (PNI) guna mengimbangi PARKINDO yang sebelumnya telah mendapatkannya dalam figur Sunawar. Gerak Partai Katolik menjauhi Sunawar semakin didorong—seperti terungkap dalam wawancara dengan sejumlah tokohnya—oleh kebijaksanaan Sunawar yang konon dipengaruhi Merukh, seperti dalam penempatan pimpinan-pimpinan daerah yang berasal dari Partai Katolik yang tidak sejalan dengan pimpinan

Partai Katolik di pusat yang merugikan Partai Katolik.<sup>38</sup> Samosir, tokoh Partai Katolik, menegaskan bahwa pemihakan kepada Hardjantho semata-mata disebabkan ketidaksepakatan kubunya dengan gagasan negara sekuler yang dikedepankan Sunawar. Akan tetapi, alasan ini lebih bersifat sekunder untuk membenarkan pemihakan pada Hardjantho dan permusuhan terhadap Sunawar. Secara gamblang da Costa menyebutkan, dukungan atas Hardjantho diberikan karena bagi Partai Katolik Sunawar merupakan tokoh “anti Katolik” dan karena Sunawar dalam situasi berkonflik dengan Hardjantho, sehingga secara otomatis Hardjantho didukung kubu Partai Katolik.<sup>39</sup>

Pemihakan PARKINDO pada Sunawar sulit diketahui secara pasti alasannya. Sebelum berkembangnya isu *negara sekuler*, kekuatan ini telah melakukan persekutuan dengan Sunawar, yakni setelah berakhirnya Kongres II PDI yang memastikan naiknya Sunawar sebagai Ketua Umum PDI. Wawancara penulis dengan tokoh-tokohnya tidak dapat mengungkapkan hal ini secara jelas. Namun, spekulasi yang mungkin adalah karena adanya keterkaitan agamais antar Merukh—yang bagi Partai Katolik-IP-KI-MURBA dimusuhi karena diyakini paling berpengaruh atas keputusan Sunawar—dengan PARKINDO dan keterkaitan yang sama antara PARKINDO dan istri Sunawar yang juga beragama Kristen. Akan tetapi, spekulasi semacam ini tidak cukup memadai, bahkan bisa sangat menjebak, kecuali tudingan yang selama hampir sepuluh tahun dialamatkan pada Sunawar dan Merukh sebagai tokoh-tokoh yang menolak masuknya PARKINDO-Partai Katolik dalam PDI diabaikan. Dan ini sulit karena persoalan di atas bukan saja telah memproduksi sekian banyak konflik internal PARKINDO, tapi, terlebih lagi, telah memakan cukup banyak anak sendiri, semisal Simatupang dan Walandouw. Karenanya, spekulasi kedua yang lebih mungkin

---

38 Wawancara dengan Samosir, ..., *Op.cit.*

39 Wawancara dengan Samosir, ..., *Op.cit.*

adalah tentang adanya kepentingan-kepentingan individual yang mempertautkan Sunawar dengan Wenas-Sabam, seperti yang ditudingkan Walandouw dan Simatupang. Namun, tidak mudah menemukan bukti untuk mendukung kemungkinan di atas atau setidaknya-tidaknya mendapatkan indikasi ke arah tersebut. Sabam misalnya, seperti diungkapkan Sadrie, tokoh IP-KI, bukan merupakan tokoh partai yang punya kepentingan bisnis sehingga membutuhkan pengamanan melalui pengembangan jaringan terselubung.

Spekulasi ketiga yang lebih bersifat umum dan menyangkut keseluruhan konflik adalah seperti yang diyakini sejumlah tokoh PNI. Pemihakan yang bertolak-belakang di atas diyakini sebagai strategi *divide et impera* yang dirancang PARKINDO-Partai Katolik yang sangat mengkhawatirkan kemungkinan bersatunya tokoh-tokoh PNI. Dalam pengertian ini, PARKINDO dan Partai Katolik melakonkan sandiwara perpisahan guna tetap memaksa elite-elite PNI berada dalam kubu-kubu terpisah pula. Bangunan argumentasi semacam ini pun masih kurang meyakinkan, terutama bila dilihat bahwa hubungan PARKINDO-Partai Katolik sungguh-sungguh berada dalam situasi sangat buruk sehubungan polarisasi yang ada. Kubu Partai Katolik, misalnya, Lo Ginting atau Wignyosumarsono, bahkan sebaliknya meyakini justru unsur-unsur non-PNI-lah yang secara sengaja dipaksa terlibat dalam polarisasi konflik antarsesama tokoh PNI. Dengan ini, spekulasi keempat yang berkebalikan dengan yang ketiga di atas adalah, justru pihak PARKINDO dan Partai Katolik yang secara sengaja dilibatkan oleh tokoh-tokoh PNI untuk mengadu domba kedua kubu ini.

Spekulasi terakhir yang juga memiliki kemungkinan adalah terlibatnya kekuatan ekstra-PDI yang bertindak sebagai “sutradara atau sponsor” yang secara keseluruhan tidak menghendaki kuat dan besarnya PDI. Terciptanya rujuk (persatuan-kesatuan) yang murni dalam PDI dipandang sebagai

ancaman. Dan karena itu, konflik harus dilembagakan sebagai instrumen guna mencegah terjadi persatuan internal PDI.

Apa pun alasan yang mendasari masing-masing kekuatan untuk berkoalisi, satu hal yang pasti, yakni merebaknya konflik telah kembali meruntuhkan kemungkinan dan syarat-syarat bagi terciptanya persatuan-kesatuan internal yang dapat merangkum semua potensi. Ini berarti, langkah reunifikasi yang mestinya sudah dapat dimulai setelah kesepakatan-kesepakatan konsepsional, seperti penunggalan asas, kesamaan sikap politik, dan pembenahan DPD/DPC yang dihasilkan dalam Kongres II menjadi mentah kembali. Di ujungnya, seperti kisah-kisah kemelut sebelumnya, harapan yang tersisa untuk membangun situasi damai internal adalah kehadiran pihak ketiga, yang senantiasa bermakna Negara, guna menjalankan fungsi sebagai mediator. Hal ini mengindikasikan, dalam skenario terakhir, keterlibatan pihak Negara sebagai fasilitator konflik intern lebih masuk akal untuk dipercaya.

Tekanan dari jajaran PDI sendiri ke arah dua kubu datang silih berganti. Namun, untuk sebagiannya, tekanan yang ada merupakan mobilisasi yang sengaja dilakukan guna mendukung salah satu kubu, dan bukan tekanan ke arah penyelesaian. *Statemen Keluarga Besar dan Generasi Penerus PDI (KBGP-PDI)*, misalnya, dihadirkan untuk menolak pendapat Sunawar tentang negara sekuler.<sup>40</sup> Karenanya, ia didukung Hardjantho dan da Costa.<sup>41</sup> Hingga pertengahan Oktober 1984—berarti usia konflik sudah melampaui setahun—, di permukaan, Pemerintah tetap memosisikan dirinya netral, dan mengharapkan PDI

---

40 Lihat *Berita Buana*, 20 Oktober 1984. Pernyataan yang ditandatangani 23 aktivis PDI Pusat dan daerah ini disampaikan kepada Presiden, Wapres, Lembaga-Lembaga Tinggi Negara, Organisasi Pendukung PDI dan DPD/DPC PDI Seluruh Indonesia.

41 Lihat *Kompas*, 24 Oktober 1984, yang memuat keterangan pers Hardjantho dan da Costa setelah pertemuan mereka dengan Ketua DPR/MPR, Amir Makhmud.

menuntaskan urusan internalnya sendiri.<sup>42</sup> Akan tetapi, karena tanda-tanda ke arah penyelesaian tak juga tampak, Mendagri Supardjo Rustam akhirnya resmi memasuki arena konflik sebagai “penengah”. Langkah Mendagri diawali dengan mempertemukan Sunawar dan Hardjantho pada 7 November 1984.<sup>43</sup> Sekalipun belum mampu mendekatkan pemikiran keduanya, pertemuan ini memaksa Sunawar untuk menyangkali rumusannya dengan mengeluarkan pernyataan, “PDI tidak pernah mempunyai paham negara sekuler dan negara agama”.<sup>44</sup>

Pertemuan keduanya kembali digelar pada 15 November 1984 dengan hasil yang masih sangat jauh dari mengundang senyum.<sup>45</sup> Senyuman baru mulai merekah pada pertemuan 21 November 1984 yang menghasilkan kesepakatan untuk menyelenggarakan “Sidang Pleno DPP PDI sebagai forum penyelesaian semua masalah.”<sup>46</sup> Realisasi forum ini dilakukan akhir November 1984, ketika semua fungsionaris (berjumlah 15 orang) hadir. Inilah rapat bersama pertama yang berlangsung di kantor DPP di Jl. Diponegoro setelah lebih dari setahun rapat-rapat DPP menggelandang dari rumah ke rumah.<sup>47</sup> Rapat-rapat berikutnya semakin menjernihkan masalah di tingkat atas, sekalipun masih jauh dari bening. Namun, akibat-akibat polarisasi di tingkat basis masih jauh dari terselesaikan. Tuntutan Keluarga Besar dan Generasi Penerus PDI DKI Jaya agar DPP Hardjantho menyelenggarakan KLB atau Sidang MPP

---

42 Tercermin dari sikap Mendagri yang meminta agar pimpinan PDI menuntaskan sebaik-baiknya masalah internalnya sesuai ketentuan konstitusi Partai; lihat *Kompas*, 23 Oktober 1984. Juga, tercermin dari penegasan Pemerintah tidak ingin mencampuri urusan intern PDI; lihat *Suara Karya*, 23 Oktober 1984.

43 Lihat *Merdeka*, 8 Oktober 1984.

44 Lihat *Kompas*, 14 November 1984 yang memuat siaran pers DPP PDI yang ditandatangani Sunawar dan Sabam.

45 Lihat *Kompas*, 22 November 1984.

46 *Ibid.*

47 Lihat *Merdeka*, 30 November 1984.

PDI Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Sunawar atas pernyataannya dan sekaligus difungsikan untuk menyusun DPP yang bersih dari penganut paham sekuler,<sup>48</sup> mengindikasikan masih bertahannya kebingungan di tingkat basis. Apalagi tuntutan ini dimunculkan setelah kesepakatan Sunawar-Hardjantho mencapai usia sebulan, yang, karenanya, tidak menguntungkan Hardjantho yang mereka dukung.

Perkembangan di atas memaksa Hardjantho mengimbuu jajaran PDI untuk menahan diri, untuk tidak saling mencerca dan mengungkit-ungkit permasalahan antarteman karena persoalan masih dalam proses penjernihan.<sup>49</sup> Upaya Hardjantho mengendalikan pengikutnya ini, tidak secara otomatis bermakna penyelesaian sudah di ambang pintu. Dalam perkembangannya, penyelesaian masalah yang bertumpu pada logika strategi “penyatuan kutub-kutub konflik” lewat kekuatan ekstrapartai ini menyimpan benih-benih kerapuhan serius. Munculnya letupan kecil di atas, dalam kenyataannya, merupakan pemanasan atau prolog bagi munculnya konflik baru antara Sunawar-Hardjantho dengan alasan-alasan baru pula.

## **B. Catur Mantap: Menguji Akal Sehat**

Di tengah-tengah situasi konflik, DPP Sunawar menelurkan gagasan konsepsional, yang kalau saja terealisasi, punya makna cukup berarti bagi reunifikasi serpihan-serpihan dalam PDI. Gagasan ini sudah mulai diupayakan sejak berakhirnya SU-MPR 1983 yang berwujud pada usaha-usaha konsolidasi dalam bidang ideologi, wawasan, dan organisasi.<sup>50</sup>

---

48 Pernyataan ini dikeluarkan oleh aktivis-aktivis PDI DKI Jaya yang juga melibatkan salah seorang Wakil Ketua DPD DKI, A. Takumansang. Pernyataan dikeluarkan pada tanggal 17 Desember 1984; lihat, *Berita Buana*, 27 Desember 1984.

49 Lihat pernyataan pers Hardjantho seperti dikutip *Merdeka*, 29 Desember 1984.

50 Lihat *Antara*, 26 Oktober 1984.

Konsolidasi ini, menurut pertimbangan idealnya, adalah bagian dari pelaksanaan Keputusan Kongres II dan sekaligus sebagai perwujudan partisipasi PDI dalam Pembangunan Nasional.<sup>51</sup> Rancangan konsolidasi ditujukan untuk menciptakan “empat (catur) mantap” dalam PDI: mantap ideologi, mantap politik, mantap organisasi, dan mantap personel.<sup>52</sup>

Konsolidasi ideologi, bagi PDI, tidak merupakan masalah. Sekalipun konflik di sekitar isu *negara sekuler* diklaim bersifat ideologis, yang sebenarnya lebih sebagai persoalan semantik, isu ideologis sudah tidak memonopoli ruang konflik PDI. Dalam Kongres II, PDI menempuh langkah penyangkalan ideologis dengan menyepakati Pancasila sebagai satu-satunya asas partai. Demikian pula dengan konsolidasi wawasan. Dicapainya kesepakatan dalam Kongres II mengenai empat isu strategis yang selalu menjadi pusat sengketa sebelumnya, yakni komitmen terhadap Orba, pengakuan atas Dwi Fungsi ABRI, penyatuan diri dengan kepemimpinan nasional di bawah Soeharto, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional telah meminimalkan kontroversi di sekitar wawasan partai. Namun, dalam hal konsolidasi organisasi, PDI praktis tidak pernah melangkah lebih baik dari periode-periode sebelumnya. Konsolidasi organisasi yang menyangkut manusia dan mekanisme organisasi yang mengatur lintas hubungan antarmereka tetap menjadi pusat kontroversi tanpa kesudahan dalam PDI. Karena alasan itulah, DPP Sunawar mengupayakan serangkaian usaha yang mencakup: a) Konsolidasi pelaksanaan juklak-juklak yang diproduksi DPP; b) Konperda-Konperda peralihan guna melaksanakan Pasal 29 AD; c) Konsolidasi aparat partai; d) Konsolidasi pelaksanaan konpercab-konpercab peralihan guna merealisasikan Juklak IV/1984; e) Membantu

---

51 Lihat *Merdeka*, 26 Oktober 1984 yang memuat keterangan pers DPP Sunawar.

52 Lihat *Sinar Harapan*, 25 Oktober 1984.

konsolidasi organisasi-organisasi pendukung; dan Penataran P-4 untuk semua jajaran.<sup>53</sup>

Rangkaian usaha-usaha persiapan konsolidasi organisasi ini merupakan langkah maju bagi PDI. Apalagi sejak tahun 1981 telah dibentuk suatu tim yang ditugaskan untuk itu. Tim ini melibatkan tokoh-tokoh dari masing-masing unsur, antara lain Merukh, Tahamata, da Costa, Pakan, Supangat.<sup>54</sup> Kesulitan yang muncul adalah, rangkaian persiapan ini menemukan dirinya terimpit di tengah-tengah konflik yang menajam antara Sunawar-Hardjantho. Karenanya, dengan mudah mengundang kecurigaan, sikap kontra, dan pemboikotan di tingkat pelaksanaannya. Persoalan lebih parah lagi muncul karena, dalam banyak kasus, pelaksanaan konsolidasi itu sendiri mengalami kemerosotan sehingga lebih metampakan diri sebagai bagian dari upaya penyingkiran tokoh-tokoh daerah pendukung Hardjantho. Kasus-kasus seperti yang terjadi di Malang dan Tulung Agung ketika Ketua DPC terpilih tidak diberi SK pengangkatan karena ketidaksetujuan atas ide negara sekuler<sup>55</sup> bisa dilihat sebagai contoh. Demikian pula, penyingkiran semua anggota DPD Sulut yang antigagasan negara sekuler,<sup>56</sup> yang juga terjadi di Lampung,<sup>57</sup> pemecatan atas Daulat Sitorus dari keanggotaannya di DPD Sumut,<sup>58</sup> merupakan contoh-contoh lain ketika upaya konsolidasi organisasi justru dimerosotkan fungsinya hingga hadir sebatas sebagai upaya

---

53 Lihat keterangan pers DPP PDI seperti dikutip *Merdeka*, 26 Oktober 1984.

54 Wawancara dengan Supangat, ..., *Op.cit.*

55 Lihat keterangan pers Imam Soroso, Wakil Sekretaris DPD PDI Jatim, dalam *Berita Buana*, 20 Oktober 1984.

56 Keterangan pers A.l. Mingkid, Wakil Ketua DPD PDI Sulut, dalam *Ibid.*

57 Keterangan pers Matt Al Amin Kraying dari DPD PDI Bandar Lampung, dalam *Ibid.*

58 Pemecatan didasarkan pada SK 003/DPP/X/1984, 31 Oktober 1984, oleh DPP Sunawar karena Sitorus ikut menandatangani pernyataan KBGP-PDI, 16 Oktober 1984. Sebelumnya Sitorus adalah Sekretaris DPD Sumut.



penyudahan pengikut-pengikut Hardjantho. Langkah-langkah tadi diikuti oleh tidak diberikannya kesempatan bagi peserta Konperda DKI melakukan salat wajib kendati sudah diusulkan peserta dan tidak diberikannya kesempatan untuk kebaktian bagi umat Kristen-Katolik di hari Ahad,<sup>59</sup> semakin mengukuhkan anggapan pengikut Hardjantho bahwa kubu Sunawar memaksa memasyarakatkan paham sekuler, yang oleh pengikut kubu Hardjantho diidentikkan dengan antiagama.

Sebagai akibat dari hal-hal di atas, di level antarpersonal beredar kembali kisah lama yang mengaitkan Sunawar dengan PKI melalui keanggotaannya pada Serikat Buruh POSTEL (SOBSI), organisasi yang dipayungi PKI.<sup>60</sup> Sementara, bagi PDI, dampaknya secara keseluruhan adalah terbengkalainya usaha-usaha konsolidasi yang sedang dijalankan, terlepas dari kenyataan bahwa pelaksanaan Konperda-Konperda dan Konpercab-Konpercab Peralihan tetap dapat diselenggarakan di hampir seluruh DPD/DPC hingga Oktober 1984, kecuali untuk Sumsel dan Jateng.

Upaya lain untuk melancarkan mekanisme organisasi adalah melalui penciptaan Departemen-Departemen, yakni Departemen Politik, Departemen Organisasi, Departemen Pemuda, Departemen Kaderisasi, Departemen Ekubang dan Departemen Kesra.<sup>61</sup> Akan tetapi, ini pun praktis tidak berjalan, kecuali Departemen Kaderisasi yang dipimpin Merukh yang sejak 20 Mei 1984 berhasil mencanangkan pelaksanaan kaderisasi skala nasional.<sup>62</sup> Pelaksanaan kaderisasi tahap

---

59 Pernyataan KBGP-PDI, seperti dikutip *Berita Buana*, 20 Oktober 1984.

60 *Ibid.*

61 Wawancara dengan Supangat, ..., *Op.cit.*

62 Lihat *Merdeka*, 14 Maret 1984.

I<sup>63</sup> yang akan dimulai bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional<sup>64</sup> ini merupakan tonggak kemajuan tersendiri. Inilah untuk pertama kalinya— setelah 11 tahun 5 bulan 10 hari perjalanan PDI—suatu kaderisasi sistematis, terencana, terarah, dan berskala nasional berhasil diselenggarakan. Saat kaderisasi sekaligus dicanangkan sebagai awal pendaftaran anggota PDI untuk seluruh wilayah negara. Karenanya, terlepas dari hasil yang dicapai, momentum tersebut menandai adanya lompatan besar dalam PDI yang mulai berorientasi ke depan.

Momentum kaderisasi sekaligus dipergunakan Sunawar untuk kembali mempertegas upaya pencapaian empat (catur) mantap yang sudah dicanangkan, yakni mantap ideologi yang berarti Pancasila dan UUD '45; mantap politik yang berarti semangat Orba perlu senantiasa ditumbuhkembangkan, dwi fungsi ABRI sebagai kenyataan sejarah perlu dipelihara dan dikembangkan, bersatu padu dengan kepemimpinan nasional di bawah Presiden Soeharto, dan partisipasi aktif dalam pembangunan nasional dengan tetap mengembang sikap korektif-konstruktif. Sedangkan mantap organisasi, bagi PDI, berarti peningkatan disiplin organisasi dalam partai yang bersih dan berwibawa guna menyalurkan dan mengembangkan aspirasi rakyat. Dan terakhir, mantap personal berarti kader-kader PDI harus merupakan tenaga-tenaga terpilih, terlatih, terdidik, tepercaya, dan jujur.<sup>65</sup>

---

63 Disebutkan sebagai tahap I karena memang akan diikuti tahap-tahap selanjutnya. Tahap II direncanakan berlangsung tahun 1985. Wawancara dengan Merukh..., *Op.cit.* Tetapi pelaksanaan kaderisasi tahap II tidak pernah terealisasi karena semua energi dan perhatian elite-elite PDI terserap oleh konflik Hardjantho-Sunawar yang kembali menajam di tahun tersebut.

64 Pemilihan tanggal disengaja oleh PDI, terutama guna mengeliminasi perkembangan isu yang meragukan hari lahirnya Boedi Oetomo sebagai hari kebangkitan nasional. Bahkan, menurut Merukh, PDI-lah yang mendesak Pemerintah untuk secara resmi menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, *Ibid.* Wawancara dengan Supangat, *Op.cit.* Pakan ..., *Op.cit.* juga menegaskan hal ini.

65 Lihat *Berita Buana*, 22 Mei 1984.

Jika konsep konsolidasi di atas diperhatikan, maka, terlepas dari berhasil-tidaknya dalam praktik, hal itu jelas merupakan langkah maju. Bahwasanya hal tersebut melahirkan implikasi yang sebaliknya, dan juga dengan praktik yang kurang menyokong, itu persoalan lain yang justru terpulang pada derajat kearifan berpolitik dan orientasi elite dan massa PDI serta cara pandang Pemerintah, termasuk ABRI terhadap parpol. Pada tingkat kearifan yang rendah seperti ditunjukkan elite PDI, suatu konsep, betapa pun baiknya, akan berakhir muspra. Demikian pula, orientasi yang semata-mata bertumpu pada kekuasaan dan figur tidak memberikan peluang bagi adanya penghargaan atas kualitas yang mengharuskan penguasaan syarat-syarat konsepsional, dan tidak sekadar bertumpu pada kemampuan menggalang massa. Pada tahap selanjutnya, cara pandang Pemerintah, juga ABRI, yang cenderung menempatkan parpol sebagai “lawan”, atau pada tingkat yang lebih sopan, sebagai sebuah pilihan buruk yang terpaksa harus diambil, jelas bukan merupakan kondisi yang kondusif bagi PDI. Sederhana saja, cara melihat seperti di atas terus memendam kecurigaan dan nafsu untuk menghancurkan.

Penyelenggaraan kaderisasi tidak terlepas dari adanya langkah penting yang diambil sebelumnya oleh DPP Sunawar, yakni pembentukan laboratorium partai berupa lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang difungsikan sebagai benteng pemikir guna memberikan masukan bagi DPP dan anggota-anggotanya.<sup>66</sup> Litbang inilah yang berhasil menyusun sebuah paket materi yang pada akhirnya dipergunakan sebagai standar materi kaderisasi. Kehadiran Litbang yang diketuai Prof. Dr. Prayudi dengan wakilnya Drs. Suyono ini menarik untuk disimak. *Pertama*, karena PDI telah mempersenjatai diri dengan “tim pemikir” yang cukup tangguh. Dan *kedua*, melalui

---

66 Litbang berhasil mengeluarkan “Kurikulum dan Buku Panduan Kaderisasi” yang akhirnya digunakan dalam Penyelenggaraan Kaderisasi.

inisiatif lembaga ini, telah berhasil dijaring setidaknya 2000 “suara keprihatinan” tokoh-tokoh intelektual PDI, dengan setidaknya 500 orang di antaranya sedang menuntut ilmu di luar negeri.<sup>67</sup> Suatu jaringan yang bekerja secara diam-diam, lepas dari sorotan luar dan, yang terpenting, bebas dari konflik, yang nantinya akan mekar setelah elite tua PDI membusuk di Kongres 1986.

Menurut Parakitri,<sup>68</sup> generasi Litbang ini ditandai oleh solidaritas yang mulai mendalam, rasa asing terhadap cara pikir dan tindakan tokoh-tokoh asal partai unsur, usia yang rata-rata lebih muda dan latar belakang pendidikan yang lebih bersifat kosmopolit. Di samping itu, generasi ini tetap memanfaatkan pemikiran tokoh-tokoh tua PDI yang tidak terbelit konflik, seperti, Frans Seda, Dr. Soeharto, Sutikno Slamet, Sadjarwo, S.H., Simorangkir, dan sebagainya<sup>69</sup> sebagai acuan mereka. Litbang dan jaringan yang dibangun ini adalah generasi baru yang siap menyongsong *bagaskara* yang nantinya merekah bersamaan dengan membusuknya para elite tua PDI di Kongres 1986.<sup>70</sup> Mereka ini tidak pernah mengekspresikan keberpiihakan atas kubu yang saling bertikai, sekaligus tidak pernah mengekspresikan keprihatinannya atas konflik yang ada. Bagi mereka, apa pun kesudahannya dan siapa pun pemenangnya, tetap akan membawa PDI ke jurang kehancuran dan dari sanalah suatu era baru akan dibangun. Kehancuran dan kebangkitan kembali PDI, bahkan secara dini diestimasi generasi baru ini akan terjadi pada tahun 1987 dan 1990. Proyeksi ini terbukti benar, sekalipun oleh sebab-sebab yang berbeda dari yang diperkirakan, dan pada waktu yang lebih cepat dari yang

---

67 Jumlah di atas adalah hasil konfirmasi Parakitri terhadap tokoh Litbang. Lihat Parakitri, “Bila PDI Amblas, Akan Muncul Loncatan Besar”, *Kompas*, 16 November 1985.

68 *Ibid.*

69 Lihat *Merdeka*, 14 Maret 1984.

70 Parakitri, *Bila PDI Amblas ...*, *Op.cit.*

ditargetkan. Keambrokan PDI terjadi di tahun 1986 ketika Kongres III gagal menemukan kompromi yang berarti di antara tokoh-tokoh tua generasi pertama. Dan seperti perkiraan awal, kehancuran elite tua memberikan alasan bagi generasi litbang untuk tampil ke permukaan. Munculnya B.N. Marbun, salah satu ketua PDI produk Mendagri, sekaligus pemikir dan konseptor utama PDI di bawah kendali Suryadi, adalah salah satu contoh tergenapinya ramalan atau, mungkin, skenario di atas.

Ramalan jaringan kelompok litbang di atas tidak jauh berbeda dengan perkiraan generasi tua seumpama Sanusi dan Simatupang yang melihat semakin mendekatnya masa-masa keambrokan PDI yang tak dapat lagi berfungsi sebagai alat perjuangan rakyat. Namun, berbeda—perbedaan yang tipis saja menurut Parakitri—dengan politisi tua, generasi litbang menangkapnya dengan optimisme dan tidak sebagai kesimpulan akhir, sebagaimana generasi tua melihatnya. Bahkan sebaliknya, mereka melihat keambrokan PDI sebagai premis bagi kemunculan era baru. Perbedaan ini boleh jadi bersumber pada perbedaan tajam di antara dua generasi ini dalam mengeja hakikat parpol. Bagi politisi tua, semisal Sanusi dan Simatupang, parpol merupakan instrumen, alat atau sarana bagi kepentingan rakyat. Sementara bagi generasi litbang, parpol pertama-tama justru merupakan seperangkat pengertian atau wawasan—sebuah wawasan atau pengertian tentang Indonesia.<sup>71</sup>

Dari sisi lain, perkiraan akan ambruknya PDI mengungkapkan bahwa generasi litbang telah menangkap isyarat “proses pembusukan politik” dalam PDI yang akan mengakhiri peran politik para pelaku aktualnya, yakni para elite generasi tua. Proses pembusukan politik ini, dapat saja berkembang alamiah, tapi, yang lebih mungkin, ia dirancang oleh suatu kekuatan besar di luar PDI. Hal terakhir ini punya

---

71 *Ibid.*

alasan yang kuat. *Pertama*, demikian besarnya kepentingan politik dan sekaligus demikian kuat dan luasnya keterlibatan kekuatan luar di dalam PDI. *Kedua*, model atau strategi penyelesaian kemelut yang dipakai, yakni “penyatuan kutub-kutub konflik” tidak pernah mengalami sedikit pun pergeseran, bahkan cenderung diskralkan atas nama “persatuan-kesatuan”. Padahal pengalaman dalam menggunakannya secara berulang membuktikan bahwa bukan saja parta tak berdaya dalam menyudahi konflik atau kemelut, tapi, terlebih lagi, di dalamnya partai mengandung daya untuk mereproduksi, bahkan menciptakan konflik baru. Tidak satu pun dari generasi tua angkatan pertama PDI yang menangkap sinyal ini.

### **C. Kongres Versus Munas: Pertarungan Akhir Dua “Pendekar”**

Di penghujung tahun, akhir Desember, 1984— hampir sebulan setelah Hardjantho-Sunawar “didamaikan” oleh Mendagri—melejit ke permukaan tuntutan KBGP-PDI DKI Jaya agar DPP Hardjantho segera menyelenggarakan KLB atau Sidang MPP Istimewa guna meminta pertanggungjawaban Sunawar atas konsepsi negara sekuler yang dicetuskannya. Tuntutan ini merupakan titik awal munculnya konflik baru Sunawar-Hardjantho dengan gagasan “Munas versus Kongres” terapit sebagai pelanduk di tengah-tengahnya. Kubu Hardjantho menuntut segera diselenggarakannya Kongres PDI sehubungan dengan akan berakhirnya masa berkuasa DPP hasil Kongres II, sedangkan kubu Sunawar menolaknya dan justru mengusulkan forum Musyawarah Nasional (Munas).

Konflik mulai mengapung di permukaan setelah secara terbuka Hardjantho menyatakan tidak ada alternatif lain bagi PDI untuk pergantian pengurus DPP kecuali melalui kongres,<sup>72</sup>

---

72 Pernyataan pers Hardjantho seperti dikutip *Sinar Harapan*, 19 September 1985.

menyusul kegagalan DPP untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan forum yang tepat untuk itu. Hardjantho mendasarkan tuntutan dan keinginannya pada keharusan Anggaran Dasar, khususnya Pasal 11 yang menempatkan kongres sebagai lembaga tertinggi partai yang diselenggarakan sekali dalam lima tahun guna mengesahkan AD/ART, Program Perjuangan Partai, dan memilih DPP Partai.<sup>73</sup> Karena DPP yang ada merupakan produk kongres, maka, bagi Hardjantho, segala penyelesaian mengenaiinya harus pula dikembalikan kepada kongres. Di luar forum ini, semua produk yang dihasilkan keabsahannya diragukan. Kongres juga dituntut untuk diselenggarakan sesegera mungkin karena apabila dilakukan setelah masa bakti DPP berakhir, maka berarti DPP telah kadaluwarsa, yang dari segi hukum tidak lagi memiliki status sebagai DPP.<sup>74</sup> Sebagai kontrasnya, Sunawar hanya menghendaki Munas, suatu forum tertinggi antara dua kongres sebagai arena penyelesaian segala ikhwal. Pemilu 1987 yang semakin mendekat dan keterbatasan dana dipakai Sunawar untuk membenarkan preferensinya: alasan-alasan yang sama sekali tak mampu menggoyahkan kubu Hardjantho.<sup>75</sup> Pilihan atas Munas sebenarnya—sama halnya dengan pilihan Hardjantho atas kongres—bermuara pada konstitusi partai. Pasal 12 Anggaran Dasar PDI secara tegas memosisikan Munas sebagai forum substitusi penyelenggaraan kongres, sekalipun dengan catatan, apabila setelah setahun kongres gagal direalisasikan karena kondisi yang tidak memungkinkan.<sup>76</sup>

Perbedaan itu menggiring DPP PDI untuk membentuk dua kutub kubu yang saling berhadap-hadapan, masing-masing

---

73 Lihat AD PDI, ..., *Op.cit.*

74 Lihat *Sinar Harapan*, 19 September 1985.

75 Wawancara dengan Pakan, ..., *Op.cit.*

76 Lihat, misalnya, pernyataan Martin Mba Balu, Wakil Bendahara DPD PDI DKI Jaya, dalam *Berita Buana*, 5 Oktober 1985.

adalah kubu Hardjantho yang ditopang kekuatan Partai Katolik, IPKI dan MURBA— kecuali John Pakan—dan kubu Sunawar yang ditopang PARKINDO dan John Pakan—anggota DPP unsur MURBA. Polarisasi di tingkat DPP ini akhirnya menerabas pula ke tingkat daerah dan massa.<sup>77</sup> Dinamika ini mengembalikan PDI pada situasi semrawut yang menandai era sebelum Kongres II ketika daerah-daerah dan massa terpolarisasi ke dalam kutub-kutub berseberangan.

Hingga rapat DPP pada 1 November 1984, kata sepakat untuk menyelenggarakan Munas atau Kongres belum juga dicapai. Bahkan meja perundingan di tingkat DPP yang sangat diharapkan daerah dan massa untuk menjernihkan persoalan dan sekaligus untuk mencapai kata akhir justru menjadi ajang pertarungan yang menjurus ke maknanya yang bersifat adu fisik antarasesama anggota DPP.<sup>78</sup> Dalam situasi seperti ini, kembali lagi, harapan satu-satunya untuk penyelesaian kemelut adalah dengan kembali mengundang pihak ketiga sebagai mediator, yang secara tradisional, berarti Negara atau Pemerintah. Ini ditandai dengan kehadiran Mendagri—untuk kedua kalinya dalam dua tahun terakhir—sebagai pembina politik dalam negeri di tengah-tengah kandang sang Banteng.

Konflik di sekitar Munas atau Kongres normalnya tidak perlu terjadi karena telah sedemikian jelas dan tegasnya

---

77 Sebagai misal, DPD PDI Jatim melalui Wakil Ketuanya, Ramelan, mendesak pengadaaan kongres; hal yang juga dituntut oleh Forum Komunikasi Generasi Muda (Fokus Gema) PDI Kodya Semarang dan Fokus Gema Jateng; lihat, *Merdeka*, 24 Oktober 1985. Di DKI Jaya, para elitnya terbelah ke dalam tiga kutub penilaian yang berbeda, bahkan yang saling meniadakan satu dengan lainnya muncul. Wakil Ketua DPD PDI DKI, Ismunandar, menilai ide di atas sebagai sesuatu yang menggelikan, *Berita Buana*, 25 September 1985, sementara Wakil Bendahara, Martin Mba Balu. Balu melihat penolakan atas ide ini adalah pengangkangan atas AD/ART, *Berita Buana*, 5 Oktober 1985. Pandangan ketiga dimunculkan sang Ketua DPD DKI Jaya, Ipik Asmasubrata, yang menganggap baik kongres, maupun Munas belum mungkin diselenggarakan, *Pelita*, 12 November 1985.

78 Lihat *Merdeka*, 1 November 1985.



diatur dalam AD/ART partai. Akan tetapi, rupanya substansi masalahnya tidak terletak pada perbedaan interpretasi atas konstitusi, sekalipun alasan ini yang lebih banyak mewarnai pertengkaran terbuka. Ia bersumber pada adanya perjanjian yang diprakarsai oleh Sudomo antara Isnaeni-Sunawar-Hardjantho pada 16 Januari 1981 tentang lembaga Ketua Umum DPP PDI. Kesepakatan yang berhasil menerobos kebuntuan dalam menetapkan figur nomor satu yang akan ditelurkan dalam Kongres II ini rupanya memberikan “jaminan” bagi Hardjantho untuk secara otomatis nantinya menduduki posisi Ketua Umum selepas kepemimpinan Sunawar. Disepakati, Sunawar dijamin kesempatannya untuk memimpin PDI setelah Kongres II—sebab utama, bahkan mungkin sebab tunggal, terpilihnya Sunawar—setelah sebelumnya Isnaeni sudah memperoleh kesempatan. Sedangkan “jatah” bagi Hardjantho ditetapkan untuk periode berikutnya, yang berarti setelah Kongres III PDI. Logika dari “konsensus” ini sendiri didasarkan pada prinsip “hierarki bergilir” di lingkaran PNI. Setelah Isnaeni dan Sunawar, Hardjantho menduduki ranking berikutnya dalam hierarki kepemimpinan resmi PNI sebelum fusi yang masih tersisa. Skenario inilah yang sebenarnya menggiring Munas dan Kongres menjadi pilihan-pilihan dikotomis di antara dua kubu yang ada, karena menjatuhkan pilihan pada salah satu merupakan keuntungan bagi diri sendiri dan, sebaliknya, kerugian bagi pihak lawan.

Tuntutan Hardjantho bagi adanya Kongres III sangat logis. Hanya saja, hal ini tidak sekadar karena alasan konstitusi PDI seperti yang diklaimnya, tapi, terlebih lagi, kongres—sejauh “konsensus 16 Januari 1981” dijadikan pusat rujukan—akan berfungsi sempurna sebagai forum yang akan melegalkan dirinya untuk bertengger di posisi Ketua Umum PDI. Sebaliknya, keengganan Sunawar atas kongres bisa pula dimaklumi. Ini karena forum ini—sekali lagi dengan berpatokan pada

“konsensus” yang sama— akan mendelegitimasi kepemimpinan formalnya di PDI. Hal ini akan bertambah jelas jika diperhatikan beberapa perbedaan di antara Kongres dan Munas.

Kongres, menurut konstitusi PDI, merupakan lembaga tertinggi partai yang berhak menentukan/menyusun DPP. Keistimewaan semacam ini tidak dimiliki Munas. Dari pertimbangan demokrasi, kongres lebih mencerminkan cita-cita ini, karena forum ini dihadiri utusan-utusan cabang partai yang merupakan hasil Konpercab. Sebaliknya, Munas hanya dihadiri utusan-utusan DPD sehingga kurang mencerminkan kedaulatan anggota. Munas, sekalipun dibenarkan konstitusi PDI, secara prinsipiell hanya merupakan lembaga substitusi kongres dalam keadaan atau kondisi yang tidak memungkinkan diselenggarakannya kongres. Karenanya, dalam arti sekalipun internal DPP berada dalam situasi konflik, asalkan perputaran roda organisasi tetap berjalan, maka penyelenggaraan kongres merupakan pilihan paling masuk akal dan paling absah. Apalagi kalau melihat pada waktu itu DPP PDI berada dalam keadaan normal. Terlebih lagi, sebagai lembaga substitusi, sekalipun Munas memiliki kualitas yang hampir setara dengan kongres, ia hanya dibenarkan untuk diselenggarakan apabila upaya ke arah kongres sudah dilakukan, tapi tetap tidak dapat diwujudkan. Ketentuan AD menegaskan, Munas hanya dapat dilaksanakan satu tahun setelah ternyata penyelenggaraan kongres gagal diwujudkan. Dengan ini, keinginan Sunawar menggelarkan Mimas pada Januari-Februari 1986 kurang dapat dimengerti. Bila bertumpu pada ketentuan AD, Munas baru dapat diselenggarakan setelah 17 Januari 1987, satu tahun setelah selesainya masa bakti DPP hasil Kongres II. Mengalir dari perbincangan di atas, kongres, dengannya, bersifat imperatif, sementara Munas bersifat opsional.

Sekalipun kongres merupakan pilihan yang lebih rasional dan sekaligus imperatif sifatnya, tapi secara obyektif

kemungkinan penyelenggaraan kongres yang selaras dengan rumusan Anggaran Dasar sulit direalisasi. Untuk dapat menggelar kongres, suatu tahapan persiapan—keharusan yang juga dimandatkan Kongres II—ke arah tersebut mesti dilalui. Tahapan persiapan yang merupakan syarat bagi kongres meliputi keharusan untuk dihadiri utusan-utusan DPC hasil Konpercab. Untuk ini, DPC-DPC wajib melakukan pendataan atau pendaftaran anggota. Sialnya, justru hal ini praktis masih berstatus sebagai rencana bagi PDI. Hingga awal Desember 1985, berarti satu bulan lagi sebelum kongres harus diselenggarakan, baru 40% Cabang yang berhasil mendaftarkan anggota.<sup>79</sup> Dengannya, walaupun DPC-DPC berhasil menyelenggarakan Konpercab, maka maksimal hanya ada 40% DPC yang sah menurut konstitusi. Dalam situasi obyektif seperti ini, apabila kongres dipaksakan juga, ia akan diadang kendala konstitusional berikutnya: kongres tidak akan bisa mencapai korum. Untuk bisa dinyatakan sah, sesuai ketentuan AD, kongres haruslah dihadiri oleh 2/3 Cabang dan suatu keputusan yang diambil hanya sah apabila 2/3 yang hadir menyepakatinya.

Seperti sudah diindikasikan sebelumnya, polarisasi ke dalam kutub-kutub Munas dan Kongres membawa serta polarisasi dalam tubuh MURBA yang ditandai dengan membelotnya Pakan dari arus kecenderungan umum tokoh-tokoh MURBA. Di sisi Sunawar tegak berdiri John Pakan, di sisi Hardjantho berdiri tegar Muhidin Nasution. Konflik terbuka antara Pakan dan Nasution pada galibnya sekadar mempertegas konflik internal yang sudah menahun dalam diri MURBA.<sup>80</sup> Bagi tokoh-tokoh MURBA yang berseberangan dengan Pakan, figur ini dihakimi telah melakukan tindakan yang merugikan MURBA untuk keuntungan PNI. Sementara Pakan justru membenarkan

---

79 Lihat pernyataan Sunawar dalam *Sinar Harapan*, 4 Desember 1985.

80 Sanusi mengkonfirmasi adanya perpecahan di antara tokoh MURBA selama era kepemimpinannya. Wawancara dengan Sanusi, *Op.cit.*

langkahnya sebagai ekspresi dari sikapnya selama ini yang tidak lagi memikirkan masalah keunsuran seperti yang dikehendaki kalangan MURBA.<sup>81</sup> Karena perbedaan tajam ini, Pakan menemukan dirinya terkucil secara total dari komunitas MURBA bahkan untuk mewakili kepentingan MURBA dalam PDI setelah meninggalnya Nasution sekalipun, karena kubu MURBA justru mempercayakan jabatan itu kepada Sukarmadidjaja, tokoh pertama IP-KI.<sup>82</sup>

Sulit dipastikan apakah setelah disisihkan baru Pakan mencari perlindungan pada PNI ataukah memang koalisinya dengan PNI (Sunawar) merupakan pilihan bebas yang didorong oleh kecenderungan “anti mekanisme unsur” seperti yang ditegaskannya. Apabila langkah politik Pakan ditempatkan dalam konteks logika di balik terempasnya ia dari arena MURBA, yakni karena ia bukan merupakan tokoh “asli” MURBA, maka langkahnya lebih merupakan cara mendapatkan payung perlindungan politik ketimbang karena ketidaksetujuannya atas adanya mekanisme unsur. Informasi dari kalangan Murba mengungkapkan, setelah restorasi MURBA, terjadi fusi antara kekuatan ini dengan PARTINDO (Iskandar Kamil) dan PSI (Sitorus). Pakan adalah tokoh asal PARTINDO yang bagi kalangan MURBA (Tan Malaka) tetap dipertimbangkan sebagai bukan “MURBA asli”.<sup>83</sup> Karenanya, ia tidak pernah mendapat kepercayaan seutuhnya dari MURBA, sekalipun di awal-awal ia cukup diterima. Kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk menandatangani Deklarasi 10 Januari 1973, dalam kapasitas sebagai Sekjen MURBA, memastikan tingginya penerimaan elite-elite MURBA pada awalnya terhadap Pakan.

Polarisasi ke dalam kubu pro-Kongres dan pro-MUNAS sekaligus membawa serta ke permukaan polarisasi lain yang

---

81 Wawancara dengan Pakan, *Op.cit.*

82 Wawancara dengan Murbantoko, ..., *Op.cit.*

83 *Ibid.*

mempunyai tendensi mengikuti garis-garis keagamaan. Di kubu Hardjantho masih terdapat kombinasi latar belakang agama, yakni Islam dan Katolik di antara tokoh-tokoh utamanya. Sementara di kubu Sunawar, selain dirinya sendiri, tokoh lainnya—Merukh, Pakan, Tahamata, dan Wenas—adalah tokoh-tokoh dengan latar belakang agama sama, yakni Kristen (Protestan). Walaupun fenomena ini mungkin sebuah kebetulan, tidak tertutup kemungkinan bahwa elemen agama, betapa pun tersamarnya, ikut mewarnai kemelut yang ada.

#### **D. Kongres III: Perjalanan Menuju Kematian**

Kegagalan beruntun rapat-rapat DPP PDI untuk mencapai kata mufakat berakhir dengan keluarnya pernyataan terbuka kubu Hardjantho (Hardjantho, Notosukardjo, Wignjosumarsono, V.B. da Costa, Samosir, Supangat, Sukarmadidjaja, dan Tanri Nasution) yang menuntut penyelenggaraan Kongres III pada medio Januari 1986.<sup>84</sup> Implikasi yang ditimbulkannya sangat mustahak: semakin menjauhkan PDI dari jalur penyelesaian lewat mekanisme internal. Bahkan sebatas kemungkinan bagi adanya rapat bersama atas inisiatif internal pun sudah tertutup. “Konsultasi” dengan Mendagri, dengannya, menjadi pilihan satu-satunya yang harus diambil.

Pada 5 Desember 1985 suatu pertemuan atas inisiatif Mendagri antara kubu-kubu yang bertikai berhasil dilakukan. Forum konsultasi ini melenggang dengan sedemikian perkasanya karena berhasil menyepakati penyelenggaraan kongres seperti yang dikehendaki kubu Hardjantho.<sup>85</sup> Namun, kemenangan politik kubu Hardjantho dalam perang ini tidak secara otomatis menghancurkan perjuangan Sunawar di front-front pertempuran. Keberhasilan kubu Sunawar dalam pertempuran untuk menentukan waktu kongres, yang disepakati masih

---

84 Lihat *Merdeka*, 12 November 1985.

85 Lihat *Sinar Harapan*, 6 Desember 1985.

tergantung pada “penyelesaian masalah teknis”, merupakan kemenangan yang cukup berarti karena telah menihilkan tuntutan kubu Hardjantho yang menghendaki medio Januari 1986 sebagai tapal batas waktu bagi pementasan kongres. Karenanya, hampir dapat dipastikan, seandainya Sunawar tidak meninggal dunia beberapa saat kemudian,<sup>86</sup> “penyelesaian masalah-masalah teknis” akan terus mengembara dan menjelma menjadi batu sandungan bagi ide penyelenggaraan kongres. Sedemikian longgarnya rumusan di atas hingga membuka ruang teramat luas bagi penafsiran yang beraneka ragam, bahkan yang bertolak belakang sekalipun. Indikasi ke arah ini cukup kuat. Penentuan jadwal penyelenggaraan kongres baru dapat dicapai setelah meninggalnya Sunawar. Bahkan dalam penentuan OC dan SC, DPP tidak pernah mencapai kata mufakat sampai kongres diselenggarakan.<sup>87</sup> Padahal OC dan SC, dari segi tata organisasi, merupakan syarat inheren bagi terselenggaranya kongres dengan baik.

Sejumlah tokoh Partai Katolik menyebutkan, gagalnya pembentukan OC karena penolakan kubu Sunawar atas duduknya Wignjosumarsono sebagai Ketua Panitia Pelaksana, posisi yang sangat penting dalam kongres.<sup>88</sup> Akibatnya, walaupun Wignjosumarsono yang memimpin jalannya kongres, hal ini semata-mata soal kebetulan, yakni karena ia sedang berada pada posisi sebagai Ketua PDI sesuai prinsip “bergilir” yang diberlakukan sejak meninggalnya Sunawar.<sup>89</sup> Dalam keadaan serba kacau ini pun kongres yang dijadwalkan antara tanggal 15-18 April 1986 masih cukup banyak menyita perhatian, lengkap dengan harapan dan bahkan, impian, dan anekasaran

---

86 Sunawar meninggal dunia pada 12 Januari 1986.

87 Wawancara dengan Supangat, *Op.cit.*

88 Wawancara dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.*

89 *Ibid.* Perlu ditegaskan bahwa kepemimpinan DPP PDI setelah meninggalnya Sunawar bersifat kolektif-bergilir, sama seperti yang pernah diterapkan sesaat setelah Sanusi mengundurkan diri tahun 1980.

yang dibebankan ke pundak PDI.

Magenda,<sup>90</sup> sebagai misal, menegaskan keharusan bagi PDI menuntaskan tiga masalah utama: kejelasan orientasi partai, regenerasi, dan penataan organisasi. Sementara Alfian<sup>91</sup> mengedepankan harapannya agar PDI mampu memanfaatkan Kongres III untuk mentransformasikan diri dari kekuatan penuh kemelut menjadi kekuatan yang terkonsolidasi. Menurut Alfian, hanya dengan ini PDI bisa mendapatkan ruang gerak lebih luas bagi diri sendiri guna menyusun strategi dan program-programnya.

Perjalanan tertatih-tatih menuju arena Kongres III juga diiringi oleh mengerasnya kembali tuntutan generasi muda untuk ikut berandil diri. Tuntutan yang dimunculkan tokoh-tokoh muda unsur-unsur, yakni Suryadi (PNI),<sup>92</sup> Marbun (Partai Katolik),<sup>93</sup> dan dr. Sukowaluyo (PARKINDO),<sup>94</sup> tiga tokoh muda yang nantinya menjadi ketua-ketua DPP PDI buah kerja Mendagri, bisa dipakai sebagai ilustrasi. Tuntutan ini kembali menyulut pertentangan antargenerasi seperti telah sempat berkembang menyongsong dan selama Munas Pandaan. Silang pendapat ini akhirnya menggumpal di sekitar pemaknaan “regenerasi dalam politik”. Di kalangan tokoh-tokoh tua, walaupun tidak secara langsung menolak ide regenerasi, tetapi mengisyaratkan penentangan halus atas penonjolan secara berlebihan isu ini menjelang Kongres III. Dari pernyataan beberapa tokoh kalangan tua<sup>95</sup> dapat diperoleh gambaran sikap mereka. Pernyataan bahwa, “generasi muda yang tidak mengakar akan tersingkir

---

90 Lihat *Pikiran Rakyat*, 15 April 1986.

91 Lihat *Suara Karya*, 12 April 1986.

92 Lihat *Pelita*, 27 Maret 1986.

93 Lihat *Kompas*, 12 April 1986.

94 Lihat *Sinar Harapan*, 8 April 1986.

95 Lihat, misalnya, pendapat Marsoesi, Burhan, dan Suparman Hadimidjaja dalam *Pelita*, 11 April 1986.

dengan sendirinya,” merupakan isyarat umum bahwa regenerasi merupakan suatu proses yang tidak dapat dipaksakan. Isnaeni,<sup>96</sup> Djakse,<sup>97</sup> Notosukardjo,<sup>98</sup> dan Madjid,<sup>99</sup> serta beberapa tokoh tua PDI lainnya, melangkah lebih jauh. Dengan nada berlainan mereka menegaskan, regenerasi merupakan terminologi yang tidak dikenal dalam dunia politik. Isu ini hanya berlaku absah pada bidang kehidupan yang membutuhkan syarat-syarat fisik-biologis seperti kemilteran. Mereka bahkan menegaskan, dalam dunia politik, usia yang semakin tua justru berkorelasi positif dengan semakin menebalnya endapan pengalaman, kematangan, dan kearifan berpolitik yang justru tidak atau belum dimiliki generasi muda. Dalam membenarkan pemahaman mereka, tokoh-tokoh ini mengacu pada sejarah politisi-politisi di banyak negara yang menunjukkan prestasi gemilangnya di usia di atas 60-an tahun. Karenanya, meskipun gagasan regenerasi tidak ditentang, mereka tetap memperingatkan bahaya regenerasi yang dipaksakan.

Menggumpalnya isu regenerasi yang menghadap-hadapkan generasi muda dan tua dalam kutub-kutub dikotomis tidak terlepas dari kuatnya tekanan penguasa terhadap elite tua di DPP PDI agar secara bersungguh-sungguh mempertimbangkan dan merealisasikan gagasan ini.<sup>100</sup> Tekanan politik ini sendiri secara tidak langsung dipahami generasi baru PDI sebagai isyarat dukungan penguasa atas mereka. Karenanya, hal itu semakin memberikan keyakinan pada generasi baru ini untuk tampil lebih vokal lagi dalam mendendangkan isu ini.

---

96 Wawancara dengan Isnaeni, ..., *Op.cit.*

97 Wawancara dengan Djakse, ..., *Op.cit.*

98 Wawancara dengan Notosukarto, ..., *Op.cit.*

99 Wawancara dengan Madjid, ..., *Op.cit.*

100 Sumber-sumber di PDI menjelaskan adanya surat Mendagri kepada Sunawar, Ketua DPP PDI. Secara pokok Mendagri meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari Sunawar untuk mempertimbangkan arus perkembangan politik yang berkaitan dengan munculnya tuntutan bagi adanya regenerasi.



Jalin-menjalannya sejumlah fenomena yang secara prinsipiel memberikan tekanan besar pada PDI—mulai dari isu negara sekuler versus Pancasila, Munas versus Kongres, dan isu regenerasi—memberikan keyakinan pada tokoh PDI Jatim, Marsoesi, untuk berkesimpulan tentang adanya pihak ketiga yang sengaja “mengipasi” konflik dalam PDI.<sup>101</sup>

Dengan aneka problema internal yang masih membelit, PDI akhirnya memasuki arena kongresnya ketiga. Forum ini diawali dengan sambutan Kepala Negara yang menceritakan proses pembaharuan dan penyegaran kehidupan politik yang telah mencapai tahap baru yang ditandai dengan penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pada fase ini, menurut Soeharto, peranan parpol dan Golkar sangat diperlukan.<sup>102</sup> Di samping itu, Presiden juga menekankan perlunya peningkatan mutu kekuatan politik agar dapat mengikuti dinamika peningkatan arus tuntutan aspirasi rakyat. Dengan cara seperti ini, kekuatan politik dapat bertindak sebagai saluran yang memadai.<sup>103</sup> Mendagri yang juga memberikan sambutan, menegaskan perlunya PDI membebaskan diri dari penyakit lama yakni kemelut internal, yang, menurutnya, lebih bersumber pada faktor-faktor intern;<sup>104</sup> harapan yang juga dikedepankan Pangab/Pangkopkamtib L.B. Moerdani.<sup>105</sup>

Wignjosumarsono yang memberi sambutan atas nama DPP, justru berujar dalam makna sebaliknya dari yang dikedepankan elite-elite perwakilan negara di atas. Ia menegaskan perlunya pemberian kesempatan yang lebih luas kepada PDI untuk dapat

---

101 Lihat *Sinar Harapan*, 11 Februari 1986.

102 Lihat “Makalah Sambutan Presiden dalam Pembukaan Kongres III PDI”, 15 April 1986.

103 *Ibid.*

104 Lihat sambutan Mendagri dalam Kongres III PDI, “Pertumbuhan PDI di Masa Mendatang dan Pembangunan Politik Nasional Kita”, 15 April 1986.

105 Lihat *Sinar Harapan*, 16 April 1986.

berprestasi demi pengabdian pada nusa dan bangsa. Harapan ini bertumpu pada keinginan PDI muncul ke permukaan secara wajar, setapak demi setapak.<sup>106</sup> Sambutan ini, tidak dapat ditafsirkan lain selain sebagai gugatan halus atas politik rezim menghadapi parpol, khususnya PDI, selama ini. Namun, substansi sambutan ini sendiri jauh dari mencerminkan visi PDI atau elite-elitenya di lingkaran atas, setidaknya menurut Wignjosumarsono. Dalam wawancara dengan penulis ia mengungkapkan, konsep yang telah disiapkannya banyak diprotes kalangan DPP.<sup>107</sup>

Kongres III yang diawali dengan harapan yang sedemikian besarnya secara bertahap tapi pasti mulai memasuki fase kritis. Puncaknya ditandai kegagalan Komisi Organisasi yang dipimpin Merukh mengakuri susunan formatur yang bertugas menyusun formasi kepengurusan DPP baru. Kemacetan Komisi Organisasi ini berakibat panjang. Secara keseluruhan kongres gagal memilih dan mengesahkan pengurus DPP PDI baru sesuai perintah konstitusi PDI. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya penyusunan DPP baru “dilimpahkan” kepada Pemerintah yang segera disambut hangat Mendagri. Inilah peristiwa politik pertama dalam sejarah parpol di Indonesia sejak kemerdekaannya ketika penyusunan pengurusnya dibidani penguasa.

Kegagalan Komisi Organisasi menyusun formatur yang bertugas menyusun DPP baru ini bersumber pada berbagai sebab yang kompleks. Dari berbagai sumber disebutkan, sidang komisi ini sudah berhasil menetapkan beberapa hal pokok, yakni ikhwal Pimpinan Komisi Organisasi yang terdiri dari para Sekjen dan para Bendahara, masing-masing Sabam Sirait, Jusuf

---

106 Lihat sambutan Wignjosumarsono dalam Kongres III PDI, 15 April 1986.

107 Wawancara penulis dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.* Ia mengungkapkan, gaya pidato “Solo”-nya dianggap terlalu lunak oleh sejumlah koleganya di DPP PDI.

Merukh, da Costa, Tanri; Pakan, Samosir, Tahamata, Supangat, dan Notosukardjo. Sebagai Pendamping Pimpinan Komisi, ditentukan akan dipilih dari utusan-utusan daerah sebanyak 37 orang. Pimpinan Komisi dan Pendamping Pimpinan Komisi di atas secara bersama-sama menjadi "Tim Panitia Perumus Komisi Organisasi".<sup>108</sup>

Pada awalnya sidang berjalan lancar, bahkan telah mendengarkan pandangan umum 107 anggota. Sidang mulai memasuki fase ketidakpastian setelah rapat tertutup pimpinan komisi yang membicarakan operasionalisasi dari makna "tokoh-tokoh aspiratif" dan "tokoh-tokoh utusan daerah" yang akan duduk sebagai formatur. Dalam penentuan tokoh-tokoh aspiratif, direncanakan berjumlah lima orang yang setiap unsurnya diwakili satu orang yang berasal dari anggota DPP. Namun, rencana ini gagal diterjemahkan lebih lanjut ketika pembicaraan mulai memasuki babak penentuan figur-figur yang akan mewakili masing-masing unsur. Kegagalan ini bisa diperkirakan merupakan buah langsung dari konflik antarelite antarunsur yang telah melembaga. Terpolarisasinya tiap-tiap unsur ke dalam dua, bahkan tiga, kubu yang saling mencakar menyulitkan operasionalisasi konsep "perwakilan satu orang" ini karena pasti akan mengorbankan salah satu kubu. Dengan ini, sebuah terobosan yang bisa mengakomodasi kutub-kutub yang berseberangan mesti dilakukan. Dari internal PNI, misalnya, atas usul Merukh, Notosukardjo, dan Hardjantho, mengajukan tokoh-tokoh yang saling berseberangan sebagai calon-calon tokoh aspiratif asal PNI. Pola yang sama tampaknya juga diminati unsur-unsur lain yang segera mengimitasinya.

Hanya saja, tidak semua tokoh mengakuri pola di atas. Mereka-mereka yang terpaksa harus duduk di luar arena yang

---

108 Lihat "Beberapa Catatan Penting tentang Jalannya Sidang Komisi Organisasi sampai dengan Panitia Perumus Komisi Organisasi" yang dibuat Pakan, 25 April 1986.

paling menentukan ini gagal meyakinkan diri sendiri untuk mempercayai sejawat sendiri sebagai wakil kepentingan kelompoknya. Adagium bahwa “tidak ada kawan dan lawan kecuali kepentingan yang permanen dalam politik”, tampaknya merupakan moralitas masing-masing elite. Dengannya, kejujuran dan saling mempercayai dieja sebagai norma-norma yang sedapatnya harus disangkal. Memakai keduanya sebagai acuan dalam politik akan terlihat sebagai suatu kejanggalan, bahkan mungkin kebodohan. Sederhana saja, ia menyalahi logika kerja rimba raya politik. Kegagalan mempercayai kawan sendiri ini membuahkan konsekuensi lanjutan: sidang pimpinan komisi yang dimaksudkan mencari pemecahan harus menemukan bentuk kompromi berikutnya guna menghindari stagnasi. Hal ini dicapai setelah sidang memutuskan menyertakan semua anggota DPP (13 orang) sebagai operasionalisasi dari pengertian “tokoh-tokoh aspiratif”.<sup>109</sup>

Kebijaksanaan di atas sedikit bisa menolong, tetapi ini baru sebagian dari jawaban. Sisi lain dari Tim Formatour, yakni yang menyangkut tokoh utusan daerah yang membutuhkan jawaban, hadir sebagai ganjalan baru. Kehadiran tokoh-tokoh utusan daerah dalam Tim Formatour tidak melahirkan silang pendapat berarti di kalangan elite PDI di tingkat atas, tetapi, seperti juga dalam penentuan tokoh-tokoh aspiratif, permasalahan mulai mengintip ketika pembicaraan memasuki fase penentuan figur-figur yang dianggap layak dan absah menjadi “tokoh-tokoh utusan daerah”. Di fase ini, pertarungan antarkubu kembali menyeruak.

Notosukardjo-Merukh mengajukan Sumario (Jateng) dan Singadilaga (Jabar), pilar-pilar pendukung kubu Sunawar di daerah, sebagai utusan daerah asal PNI. Selepas PNI, unsur-unsur lain pun mulai mengajukan nama-nama utusan

---

109 *Ibid.*

daerah mereka. Dari kubu PARKINDO, Sabam menawarkan Lumbangaol dan Sinaga, keduanya dari Sumut, sebagai wakil dari daerah. Da Costa mengajukan dua tokoh Partai Katolik dari NTT. Tanri mengajukan Djohan Aruf (Bengkulu) dan A. Muis (Sulsel) mewakili kepentingan IP-KI, sementara Dharsuki Sardjito (Jateng) dan Syamsul Anwar (Sumsel) dimunculkan MURBA sebagai wakilnya dari daerah.<sup>110</sup> Akan tetapi, rupanya kesepakatan-kesepakatan di atas tidak pernah dibicarakan dalam rapat Panitia Perumus Komisi Organisasi. Kesepakatan-kesepakatan ini sebatas konsensus tingkat pimpinan komisi. Karena itu, silang pendapat yang semakin rumit di tingkat komisi merupakan harga wajar yang tidak mengagetkan.

Di tengah-tengah kerumitan yang dihadapi, Panitia Perumus Komisi Organisasi tetap menggelar rapatnya pada tanggal 17 April 1986. Kesulitan mencapai kesesuaian pendapat menyebabkan Sabam meminta waktu untuk berkonsultasi dengan para Ketua DPP PDI. Namun, peluang ini, oleh beberapa sumber PDI,<sup>111</sup> ada disebutkan sekaligus dimanfaatkan Sabam untuk memanipulasi tanda tangan para ketua yang nantinya akan digunakannya untuk menyusun DPP baru. Sepeninggal Sabam, rapat panitia masih terus berlanjut ketika usulan Jusuf Merukh agar Duddy Singadilaga ditetapkan sebagai pimpinan rapat guna membicarakan materi lainnya, kecuali tata cara pemilihan DPP PDI,<sup>112</sup> disepakati forum. Sementara rapat Panitia Perumus Komisi Organisasi ini masih terseok-seok dan gagal dalam penyusunan formatur, Merukh dan Sumario mengikuti langkah Sabam dengan ikut-ikutan menghilang dari

---

110 *Ibid.*

111 Wawancara dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.* Diungkapkannya, ia diminta Sabam untuk menandatangani daftar sebagai bukti kesediaannya untuk menjadi salah satu formatur. Dokumen ini, masih menurut tokoh Partai Katolik ini, digunakan oleh Sabam sebagai lampiran dari susunan DPP baru yang dibentuk Sabam dan Merukh yang disampaikan pada Mendagri.

112 "Beberapa Catatan Penting ..., *Op.cit.*

forum rapat, meninggalkan tanda tanya besar di benak peserta rapat. Menurut beberapa sumber, kepergian ketiga tokoh ini sepenuhnya atas penugasan DPP untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah, tetapi sumber-sumber lainnya membantah hal ini.<sup>113</sup>

Kepergian Sabam, Merukh dan Sumario melahirkan kecurigaan yang terus berbuntut pada kesulitan. Utusan-utusan daerah mulai mengendus sejumlah ketidakberesan. Mereka mulai menangkap isyarat samar-samar adanya usaha DPP untuk “mengangkat diri sendiri” sebagai formatur dan melalui jalur-jalur khusus, dan mulai melakukan konsultasi dengan Pemerintah guna membenarkan langkah di atas. Suasana semakin memanas, ketika isu bahwa ketiganya sedang melakukan konsultasi dengan Pemerintah mengenai susunan DPP baru mulai mengapung di seantero arena kongres. Hal ini dengan cepat diterjemahkan oleh para utusan daerah sebagai pencerminan dari sikap DPP yang “ingin mendikte kongres.”<sup>114</sup> Akibatnya, para utusan daerah mulai pula mengambil ancap-ancang melakukan “perang terbuka”. Suasana benar-benar mencapai titik didih setelah selama berjam-jam ketiganya tidak juga kembali ke arena kongres guna menuntaskan rapat panitia yang terlunta-lunta.

Dari banyak sumber disebutkan, ketiga tokoh tersebut melakukan pertemuan dengan Harry Sugiman, Dirjen Sospol Depdagri di TMII. Sumber-sumber yang sama juga menyebutkan ketiganya justru tidak diizinkan kembali ke arena kongres oleh Dirjen Sospol dengan alasan yang hingga kini tersimpan sebagai teka-teki, bahkan bagi elite PDI sendiri. Karena alasan di atas, tidak berlebihan bila Sadrie berkeyakinan bahwa Sabam

---

113 Misalnya, Lo Ginting yang menegaskan bahwa Sabam “memang ditugaskan”; wawancara Lo Ginting, *Op.cit.* Pendapat ini dibantah oleh, antara lain Ipik Asmasubrata.

114 *Ibid.*

memang sengaja ditahan untuk menciptakan situasi krusial. Dengan ini ia membantah anggapan yang beredar umum bahwa Sabam-lah yang bertanggung jawab atas kegagalan Panitia Perumus Komisi Organisasi dalam menyusun formatur. Menurutnya, faktor luarlah yang memainkan peranan sentral dalam menggagalkan kerja panitia ini. Alasannya sangat sederhana, bahkan cenderung romantis: bagi Sadrie, "Sabam bukan orang gila yang mau menghancurkan PDI".<sup>115</sup> Hanya saja, tidak semua tokoh sepakat dengan pendapat Sadrie.

Di mata sejumlah tokoh PDI, Sabam, Merukh, dan Sumario adalah tokoh-tokoh yang bertanggung jawab penuh atas kegagalan kongres, terutama kegagalan dalam membentuk formatur. Ketiganya, terutama Sabam dan Merukh, diyakini secara cerdas telah memanipulasi hasil rapat Panitia Perumus Komisi Organisasi dengan cara menyusun DPP baru sendiri sesuai dengan yang disampaikan kepada Mendagri. Padahal, masih menurut sejumlah tokoh ini, hingga penundaan rapat karena kepergian Sabam-Merukh-Sumario untuk melakukan konsultasi dengan Pemerintah, susunan formatur sama sekali belum dibentuk.

Belum terbentuknya susunan formatur tampaknya tidak diketahui oleh Mendagri. Hal ini dibuktikan dengan kehadirannya mengikuti acara penutupan yang sudah dijadwalkan, padahal sebelumnya sudah dibatalkan.<sup>116</sup> Keadaan ini mengundang kemarahan Mendagri.<sup>117</sup> Ia punya alasan kuat

---

115 Wawancara dengan Sadrie, *Op.cit.* Dari catatan yang dibuat Pakan, juga terungkap adanya pertemuan antara Sabam-Merukh dengan Harry Sugiman, sekalipun tidak pernah terungkap substansi yang dibicarakan. Lihat, "Beberapa Catatan Penting ..., *Op.cit.*

116 Pembatalan ini bersifat mendadak guna mementahkan kecurangan Sabam-Merukh. Para undangan tidak ada yang diberitahu, kecuali Wapres yang akan menutup kongres yang sempat dihubungi Hardjantho.

117 Menurut Wignjosumarsono, ia dimarahi Mendagri karena kasus ini. Wawancara dengan Wignjosumarsono, ..., *Op.cit.*

untuk itu. *Pertama*, karena PDI dianggap telah mempermainkan Wapres yang dijadwalkan menutup secara resmi Kongres III PDI. *Kedua*, karena Mendagri, menurut pengakuannya sendiri, telah mengantongi nama-nama susunan anggota DPP PDI baru dan siap melantiknya. Dalam pembicaraannya dengan Wignjosumarsono, Mendagri bahkan menegaskan bahwa dalam susunan formatur yang ada, nama Wignjosumarsono beserta tanda tangannya juga terlampir sebagai salah satu formatur.<sup>118</sup> Kekacauan ini, menurut sumber-sumber PDI, baru dipahami Mendagri setelah dijelaskan kepadanya bahwa formatur belum terbentuk.

Keadaan di atas mengharuskan Mendagri sebagai pembina politik dalam negeri melakukan pertemuan “konsultasi” dengan DPP PDI. Forum ini, akhirnya sampai pada kesepakatan “menunda kongres” dengan pembiayaan dibebankan pada kantong Pemerintah. Panitia Perumus Komisi Organisasi diberi kesempatan satu hari guna menuntaskan semua hal, termasuk menyusun DPP baru. Namun, kesepakatan untuk memperpanjang kongres satu hari lagi itu tidak pernah diwujudkan. Situasi sudah terlampau eksplosif. Jalan keluar dari kebuntuan tidak bisa ditemukan. Akhirnya, setelah pertemuan “konsultasi” kembali dilakukan dengan Mendagri keesokan harinya— setelah dibahas berbagai alternatif guna memecahkan persoalan DPP baru yang tak berhasil dibentuk— diputuskan “dilimpahkan kepada Pemerintah”. Keputusan ini bisa diambil, terutama, setelah Ipik Asmasubrata (DKI Jaya) dan Marsoesi (Jatim) mengusulkan hal tersebut.<sup>119</sup> Kongres III PDI akhirnya ditutup tanpa pernah mampu menyusun DPP sendiri. Lewat Keputusan No. XVII/KPTS/KONGRES-III/PDI/IV/1986, penyusunan DPP PDI baru dipasrahkan seutuhnya pada keinginan dan “kearifan” Pemerintah. Keputusan yang

---

118 *Ibid.* Hal ini juga dibenarkan oleh banyak pihak dalam PDI.

119 Lihat *Sinar Harapan*, 23 April 1986.



sama juga menetapkan "demisionernya" DPP lama hasil Kongres II, terlepas dari kenyataan bahwa lembaga "demisioner" tidak pernah dikenal dalam AD/ART PDI. Di ujungnya, lembaga kongres yang dari waktu ke waktu selalu muncul sebagai pusat harapan dari elite dan warga kebanyakan PDI guna mengurai kerumitan internal yang dibikin mereka sendiri, kali ini berakhir sebagai bencana. Banyak kalangan PDI menolak anggapan semacam ini dan tetap mengigau bahwa Kongres III telah berhasil dengan baik, sekalipun tetap banyak catatan. Bahkan sebagian lainnya tetap berkeyakinan bahwa DPP yang dihasilkan dari tangan terampil Mendagri, juga merupakan hasil Kongres III, justru karena kongres yang memandatkannya kepada Mendagri.

Spekulasi yang beredar di kalangan PDI tentang sebab-sebab kegagalan Kongres III menyusun DPP baru sangat beragam, terlepas dari adanya kesamaan dalam melihat Kongres III, yakni berhasil dengan baik, terutama jika mencermati produk-produk lain yang dihasilkan. Spekulasi pertama yang kuat beredar adalah bahwasanya Sabam-Merukh merupakan sumber malapetaka Kongres III. Tindakan manipulatif keduanya merupakan sumber dari kegagalan kongres menyusun DPP sendiri. Pernyataan keras Ipik,<sup>120</sup> diikuti pernyataan dan protes DPD Jatim, Bali, dan Lampung yang menuntut kedua tokoh ini bersama Pakan ditindak karena dinilai telah melanggar norma-norma organisasi,<sup>121</sup> atau keyakinan Murbantoko bahwa "Sabam telah meninggalkan rakyat karena mendorong ke arah penyerahan kepada Pemerintah",<sup>122</sup> adalah contoh-contoh dari garis pandang pertama ini. Penilaian yang bahkan lebih keras datangnya dari kubu Partai Katolik, seperti yang terungkap lewat pendapat da Costa<sup>123</sup> yang menyayangkan moralitas

---

120 Lihat *Kompas*, 21 April 1986.

121 Lihat *Kompas*, 19 April 1986.

122 Wawancara dengan Murbantoko, ..., *Op.cit.*

123 Wawancara dengan da Costa, ..., *Op.cit.*

Merukh-Sabam yang sedemikian buruknya, padahal mereka adalah orang-orang Kristen. Sabam-Merukh memang secara umum cenderung ditempatkan sebagai penanggung jawab kegagalan kongres. Akan tetapi, di antara tokoh-tokoh yang menilai menurut garis ini, terdapat perbedaan dalam melihat latar belakang tindakan Sabam-Merukh.

Beberapa tokoh, terutama lawan-lawan politik Merukh, melihat Sabam sebagai korban dari siasat Merukh. Sabam hanya “dimanfaatkan” Merukh. Bagi mereka, tanpa tindakan apa pun (manipulasi, misalnya) sudah bisa dipastikan Sabam akan tetap dapat mengamankan posisi Sekjen Partai di genggamannya,<sup>124</sup> jauh berbeda dengan Merukh yang bisa terempas setiap saat. Asal-muasal Sabam yang bersumber dari unsur PARKINDO memberikan kepastian bahwa ia akan tetap menggenggam posisi Sekjen karena merupakan konsensus antarunsur. Apalagi dalam susunan DPP yang dibentuknya, ia menempatkan dirinya kembali pada posisi Sekjen ini. Karenanya, menjadi sangat tidak logis bila langkah “manipulasi” merupakan pilihan Sabam. Sabam sendiri tidak memberi komentar apa pun tentang pendapat-pendapat di atas. Dalam beberapa kali kesempatan wawancara dengan penulis, Sabam tidak pernah memberikan jawaban jelas, kecuali hanya mengungkapkan bahwa ia sekadar bertugas untuk “melap mencret” orang lain. Dengan ini, Sabam ingin menegaskan posisinya sebagai korban dari “sesuatu” yang sayangnya tak pernah diungkapkannya secara jelas hingga saat ini. Sabam tidak sendirian dalam menilai dirinya.

Sadrie, salah salah seorang tokoh teras IP-KI menampik spekulasi keterlibatan Sabam dalam “permainan kotor”. Bagi Sadrie, walaupun pertentangan PARKINDO dan Hardjantho dipakai sebagai rujukan alasan membenarkan keterlibatan Sabam dalam “permainan kotor” untuk menggagalkan

---

124 Misalnya wawancara dengan Sadrie, *Op.cit.*

kongres—karena lewat cara ini berarti menihilkan peluang Hardjantho yang sudah diskenariokan lewat konsensus internal PNI dan Sudomo— hal ini tidak terlampau meyakinkan. Kedua figur ini pernah membentuk benteng persekutuan yang sangat kokoh untuk jangka waktu yang cukup lama. Apalagi, lewat mekanisme unsur yang masih terus bertahan kuat, Sabam masih dapat tetap mempertahankan posisi Sekjen PDI tanpa bisa dicegah Hardjantho seandainya yang terakhir ini tampil sebagai petinggi utama dalam PDI.

Agak berbeda dengan Sabam, Merukh—karena kedekatannya dengan Sunawar, bahkan disebut sebagai orang yang banyak mempengaruhi keputusan Sunawar— menempati posisi sulit jika skenario munculnya Hardjantho seperti konsensus Isnaeni-Sunawar- Hardjantho pada 16 Januari 1981 tetap berlaku. Karenanya, ia mempunyai alasan cukup logis untuk menggagalkan kemungkinan munculnya Hardjantho sebagai Ketua Umum PDI. Akan tetapi, sebenarnya posisinya sebagai Ketua Panitia Perumus Komisi Organisasi cukup berpengaruh untuk memplot skenario yang bisa memaksa Hardjantho menawarkan konsesi-konsesi politik yang menguntungkan dirinya.

Pendapat lain yang beredar mengenai sumber kegagalan Kongres III dimunculkan tokoh-tokoh garis "keras" PNI. Kegagalan ini dibaca sebagai produk dari suatu konspirasi yang dimaksudkan memotong unsur PNI agar tidak mendominasi PDI. Menurut logika Madjid, misalnya, para utusan kongres yang mayoritas PNI akan memberikan peluang bagi munculnya PNI sebagai kekuatan dominan seperti yang selama ini dikuatirkan. Madjid, boleh jadi benar, karena, terlepas dari riil atau imajinatif, kecemasan akan bangkit kembalinya kekuatan ini masih terus menjadi mimpi buruk bagi sejumlah elite Orba dan elite-elite unsur-unsur lainnya dalam PDI. Akan tetapi, bangunan logika semacam ini ditentang, misalnya, oleh Supangat

yang menegaskan hal itu kurang beralasan. PNI, menurutnya, sebenarnya tidak lagi merupakan kekuatan besar, dan banyak anggota PNI (massa front marhaenis) yang sudah tidak percaya kepada kepemimpinan di PDI.

Spekulasi lain yang muncul adalah bahwa kekisruhan benar mengalir dari tingkah laku politik Sabam-Merukh, tapi mereka bukan merupakan hulu masalah. Keduanya dinilai hanya “mengikuti arus kecenderungan salah satu pusat kekuasaan” yang berkembang, yakni keinginan mendudukkan Ahmad Subagyo—tokoh PDI yang sederhana dengan Mendagri dan Wakil Ketua F-PDI di DPR<sup>125</sup>— sebagai Ketua Umum PDI. Skenario ini dilakukan Sabam dan Merukh karena menjanjikan tingkat keamanan politik yang tinggi bagi keduanya dan juga kubunya. Hal ini karena *pertama*, skenario ini dirancang di salah satu jantung kekuasaan, oleh sebab itu sekaligus bisa dibaca sebagai cerminan keinginan Negara. Dan ketika rezim berkeinginan, hampir merupakan kemustahilan untuk hal tersebut tidak terwujud. *Kedua*, operasioanalisis skenario ini secara otomatis akan berakhir dengan tersisihnya Hardjantho, rival utama mereka itu. *Ketiga*, skenario ini sekaligus akan menjadi kuburan politik bagi tokoh-tokoh lainnya yang berseberangan dengan kubu Merukh-Sabam yang juga berancang-ancang merebut posisi Ketua Umum. Kemunculan Djakse, salah satu tokoh lawan Merukh, sebagai calon serius Ketua Umum PDI, membuat kubu Merukh semakin yakin akan kebenaran rute “mengikuti arus kecenderungan” salah satu pusat kekuasaan itu.

Spekulasi seperti di atas memang sulit dipastikan kebenarannya. Apalagi tidak satupun elite PDI yang diwawancarai penulis memberikan informasi memadai di sekitaran hal ini. Namun, penegasan Ketua DPR/ MPR Amir Makhmud bahwa, selama menjabat sebagai Mendagri, ia tidak pernah ingin

---

125 Wawancara dengan, misalnya, Murbantoko, *Op.cit.*

menempatkan "jagonya" di dalam organisasi kekuatan sosial politik<sup>126</sup> mengindikasikan kemungkinan kebenaran spekulasi di atas. Sesuatu yang menurut Sadrie berasal dari *high level* dalam Pemerintahan. Kemungkinan "mengikuti arus salah satu pusat kekuasaan" ini semakin menemukan pijakannya jika susunan DPP PDI yang diciptakan Merukh-Sabam dicermati. Akhmad Subagyo yang konon diinginkan Mendagri dinobatkan sebagai Ketua Umum dengan Jusuf Merukh bertengger di posisi nomor dua dalam hierarki PDI. Sabam sendiri kembali ke pos tradisionalnya sebagai sekjen,<sup>127</sup> pos yang bisa dipastikan akan tetap didudukinya, siapa pun pimpinan tertinggi PDI hasil Kongres III.

Di luar skenario gagal di atas, DPP PDI sendiri sebenarnya telah merancang suatu susunan DPP baru yang dibayangkan akan mujarab untuk mengakomodasi tuntutan regenerasi yang semakin mengental sekaligus, di saat bersamaan, tidak mengorbankan generasi yang secara aktual mengendalikan PDI. Dalam DPP baru, sebagian anggota DPP lama tetap menemukan pijakannya, sementara generasi yang lebih belia akan disisipkan dalam komposisi DPP baru. Masing-masing generasi akan menguasai posisi yang tersedia secara proporsional. Generasi tua, yakni yang berusia di atas 60 tahun akan dijatah 1/3 posisi, generasi penerus, yakni yang berusia antara 50-60 tahun, dengan jumlah penguasaan posisi yang sama, dan generasi muda, yakni yang berusia antara 40-50 tahun, menguasai 1/3 posisi lainnya yang tersisa.<sup>128</sup> Secara keseluruhan DPP yang direncanakan akan berjumlah 30 anggota,<sup>129</sup> yang 13 anggota DPP-nya<sup>130</sup> tetap akan dipertahankan guna mengeliminasi

---

126 Lihat *Berita Buana*, 22 April 1986.

127 Berbagai sumber di PDI membenarkan hal ini.

128 Wawancara dengan, misalnya, Hardjantho, *Op.cit.*

129 Wawancara dengan Sukarmadidjaja, *Op.cit.*

130 Wawancara dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.*

sumber konflik (pengambilan beberapa di antaranya berarti mengundang konflik baru). Sedangkan 17 anggota selebihnya diambil dari generasi muda.<sup>131</sup> Akan tetapi rancangan ini gagal total, karena perkembangan di luar skenario seperti dijelaskan di atas.

Kongres III sendiri dipayungi iklim keamanan superketat, yang tercermin dari banyaknya pihak keamanan yang terlibat, baik dari Laksus, maupun dari pihak lainnya. Para petugas politik dari Depdagri, baik yang berasal dari Pusat maupun daerah-daerah, dengan kewaspadaan penuh ikut meramaikan suasana kongres, di samping kehadiran “para penghubung” yang merupakan mata rantai kunci guna dapat berkonsultasi dengan pihak rezim.<sup>132</sup> Akibatnya, bukan saja arena ini menjadi “kongres nasional bagi banyak pihak”, tetapi tidak jarang memproduksi ketegangan dan kekesalan di antara para peserta. Hal ini mudah dimengerti karena, misalnya saja, untuk memasuki ruang rapat komisi peserta bukan saja harus diabsen satu per satu, tapi juga harus melewati pemeriksaan ketat oleh dua orang petugas keamanan yang berada di depan pintu masuk.<sup>133</sup>

Di mata elite-elite PDI secara keseluruhan Kongres III tidak pernah dinilai gagal. Berbagai produk—di luar kegagalan penyusunan DPP—yang dihasilkannya dipakai oleh elite-elite PDI sebagai tolok ukur dalam menilai kongres. Namun, ditinjau dari fungsinya sebagai arena tempat nilai-nilai

---

131 4 dari 17 anggota DPP PDI hasil Kongres II, tidak lagi menduduki posisi sebagai anggota DPP PDI. Tiga di antaranya, masing-masing Indra Bhakti, Wakil Bendahara (MURBA), Muhidin Nasution, Ketua (MURBA), dan Sunawar Sukowati, Ketua Umum (PNI) meninggal dunia. Sementara Isnaeni, Ketua (PNI), mengundurkan diri sehubungan dengan penunjukannya sebagai Duta Besar untuk Rumania, tahun 1982.

132 Nama sejumlah perwira menengah berpangkat Letkol dari Laksus Jaya dan juga dari Depdagri, tertera dalam sebuah dokumen yang dibuat sesaat selepas kekisruhan kongres. Lihat, “Beberapa Catatan Penting ...,” *Op.cit.*

133 Lihat *Merdeka*, 17 April 1986. Wawancara dengan tokoh-tokoh PDI juga mengungkapkan hal yang sama

kualitatif dan berjangka panjang disemai, kongres sulit diamini dengan optimisme. Kongres gagal meletakkan landasan bagi kepentingan pembinaan kepartaian unluk dapat tumbuh sehat dan mandiri serta menjadi mitra sebanding bagi Pemerintah seperti yang diobsesikan kebanyakan orang. Kegagalan kongres menyusun DPP PDI hanya merupakan ekspresi permukaan dari kegagalan partai yang hadir sewajarnya partai yang dikenal dalam kepustakaan ilmu politik. Di ujungnya kita bisa sama-sama melihat, Kongres III PDI justru semakin memapankan struktur politik Indonesia yang memang sudah terlampau berat ke atas. Untuk kepentingan jangka panjang sistem politik, hal ini justru kontraproduktif karena meletakkan terlampau berat beban di pundak sistem politik. Kongres III PDI sekaligus juga semakin mengukuhkan ketimpangan antara suprastruktur dan infrastruktur politik dengan risiko hilangnya fungsi kontrol rakyat—lewat parpol—atas Pemerintah. Suatu syarat dasar bagi suatu kehidupan demokratis yang sehat. Hal-hal di atas secara langsung telah mengukuhkan dasar bagi semakin kuatnya bangunan sistem politik monolitis dan autokratis: otoritarianisme.

Kembali pada Kongres III. Selain Komisi Organisasi, komisi-komisi lainnya berhasil menuntaskan aneka rancangan yang akhirnya disahkan dalam Sidang Pleno Kongres. Peneguhan kembali langkah "penyangkalan dan penyerahan diri" yang telah dilakukan di arena Kongres II menjadi salah satu produk terpenting dari ritual politik kali ini. Pengukuhan kembali sikap politik PDI yakni komitmen kepada Orba, pengakuan atas Dwi Fungsi ABRI, penyatuan diri dengan kepemimpinan Nasional di bawah Presiden Soeharto, dan partisipasi aktif dalam pembangunan<sup>134</sup> kembali dilafalkan secara fasih di arena ini. Ini pun belum merupakan terminal terakhir. Keputusan lain sama mendasarnya: pencalonan kembali Jenderal

---

134 Lihat "Keputusan Kongres III PDI No. IV/KPTS/K-III/IV/1986".

(Purn) Soeharto sebagai Presiden Indonesia periode 1988-1993.<sup>135</sup> Keputusan ini mendasar bukan karena ia tidak bisa diperkirakan sebelumnya, tapi karena PDI telah “mendahului” Golkar dan ABRI yang secara tradisional selalu memonopoli hak untuk itu. Pada periode-periode lalu pencalonan Presiden oleh PDI senantiasa “menunggu” ketegasan sikap Golkar dan ABRI. Namun, lewat Kongres III, PDI melakukan langkah awal yang secara politis dapat membebaskannya dari anggapan lama bahwa dukungannya atas tokoh tertentu lebih karena mengikuti “arah kecenderungan”, bukan keputusan politik yang tulus dari PDI. Sesuatu yang berulang menjadi pusat sengketa internal. Penegasan kembali komitmen PDI melestarikan Dwi Fungsi ABRI—frasa sentral guna melegitimasi diri atau mendelegitimasi lawan selama periode konflik yang sudah-sudah<sup>136</sup>—juga sangat strategis untuk dua alasan. *Pertama*, membuka peluang bagi PDI untuk lebih mengakrabkan diri dengan ABRI yang selama ini lumayan berjarak. Dan *kedua*, keputusan ini fungsional dalam mengurangi kecurigaan kalangan militer kepada PDI. Keduanya, sangat memengaruhi perkembangan sang Banteng.

### **E. Lahirnya DPP PDI: Akhir Proses Pembusukan Politik**

Saat-saat menyongsong dan selama Kongres III diwarnai persaingan antartokoh PDI untuk merebut posisi nomor satu dalam Partai ini. Hardjantho, Suryadi, Djakse, Akhmad Subagyo, Isnaeni, Ipik, dan Merukh, bahkan Probosutedjo hadir menghiasi bursa spekulasi sebagai calon Ketua Umum DPP PDI. Sekalipun sopan santun analisis mengharuskan banyak pihak unluK mengungkapkan peluang masing-masingnya relatif sebanding pada awal-awalnya, beberapa di antaranya secara obyektif jelas memiliki peluang lebih.

Hardjantho, misalnya, memiliki peluang sangat besar

---

135 *Ibid.*, No. V/KPTS/K-III/IV/1986.

136 *Ibid.*, No. VI/KPTS/K-III/IV/1986.



karena bukan saja telah mengakumulasi pengalaman yang menggunung dan memiliki pengikut cukup banyak, tapi menggenggam di tangannya warisan “konsensus 16 Januari 1981”, di antaranya dengan Isnaeni dan Sunawar atas prakarsa Sudomo. Warisan yang memberinya hak otomatis menjadi Ketua Umum PDI ini bisa dengan mudah digunakannya untuk banyak tujuan: meyakinkan bawahan, memperluas dukungan, menakut-nakuti lawan, dan melobi ke “atas”. Kedekatan hubungannya dengan Amir Makhmud, mantan Mendagri yang sedang menduduki posisi Ketua DPR/MPR, memberikan nilai tambah bagi Hardjantho: ia bisa cukup efektif menjangkau “dukungan atas” melalui saluran ini. Tetapi perkembangan berjalan ke arah sebaliknya. Hardjantho semakin surut. Bahkan isi “konsensus” sebelumnya tidak pernah lagi muncul ke permukaan. Surutnya peranan politik Sudomo, arsitek “konsensus”, di internal PDI membikin “konsensus” yang ada tiba-tiba hadir sebagai kertas tanpa makna. Padahal jauh sebelum penyelenggaraan Kongres III namanya tetap merupakan pilihan utama bagi sebagian massa PDI dan elitee di pusat-pusat kekuasaan. Konflik kerasnya dengan Sunawar yang juga memiliki “pelindung kuat” di pusat-pusat kekuasaan, telah menggerogoti basis dukungan “atas” terhadap dirinya. Kibaran bendera Hardjantho, dengannya, semakin melemah. Akibatnya daerah-daerah mulai mengkalkulasi kembali kesetiaan mereka pada Hardjantho. Kehadiran tokoh lain, akhirnya muncul sebagai alternatif.

Djakse, figur yang jauh sebelum kongres sudah dihubungi cukup banyak daerah untuk bertarung ke arah orang nomor satu dalam PDI<sup>137</sup> menemukan tempat pijakan di tengah-tengah dukungan yang semakin merapuh bagi Hardjantho. Hanya saja, dalam situasi terpasungnya politik massa, mengandalkan

---

137 Wawancara dengan Djakse, *Op.cit.*, menegaskan daerah-daerah: Sumut, Yogya, Lampung, Bali, NTT, Kalbar, Maluku, Irja, sebagian Jateng dan sebagian Jabar telah menghubungi dan sekaligus memberikan jaminan dukungan padanya untuk tampil sebagai Ketua Umum PDI dalam Kongres III.

dukungan sepihak dari DPD/DPC merupakan kebobrohan. Karenanya “restu atas” menjadi sesuatu yang prinsipiel. Djakse ikut menikmati kemewahan ini. Oleh kalangan elite di lingkaran kekuasaan, ia telah ditempatkan sebagai tokoh alternatif guna memimpin PDI yang setara kualifikasinya dengan Hardjantho.<sup>138</sup> Dalam keadaan seperti ini, menurut Djakse, antara dirinya dan Hardjantho berhasil dibangun semacam kesepakatan. Keduanya akan sama-sama maju ke arena kongres dengan catatan, siapa pun yang terpilih, haruslah didukung penuh oleh yang tersisih; sementara yang terjegal, harus menganggur di luar pagar DPP.<sup>139</sup> Skenario ini, masih menurut Djakse, dirancang untuk menghindari kemungkinan timbulnya rivalitas di antara keduanya yang sangat mungkin terjadi apabila keduanya sama-sama masuk ke dalam struktur kepengurusan DPP PDI. Perasaan sama-sama berhak dan berkualitas sebagai Ketua Umum PDI disadari potensial menjadi pemicu perkelahian di antara keduanya, yang bisa dipastikan akan diikuti oleh polarisasi pada tingkat massa pengikut atau daerah-daerah, seperti yang sudah dibuktikan oleh perkelahian para pendahulu. Beberapa hari sebelum kongres, dukungan Pemerintah pada Djakse masih tetap kuat, bahkan sudah bersifat terbuka. “Dibebastugaskannya” tokoh ini dari kedudukan sebagai Hakim Agung,<sup>140</sup> merupakan isyarat “restu atas” yang tak terbantahkan. Akan tetapi, seperti juga kisah Hardjantho, perkembangan justru berjalan ke arah sebaliknya. Sejumlah kemungkinan faktor bisa dipakai sebagai penjelas.

*Pertama*, kedekatan hubungannya dengan Hardi—Pejabat Ketua Umum PNI yang disingkirkan dalam kongres Semarang—, tokoh garis keras pada tahun-tahun akhir 1960-

---

138 Wawancara dengan Wenas dan Supangat, *Op.cit.* Kedua tokoh ini mengungkapkan, dalam pertemuan konsultasi DPP PDI dengan Pangab, Pangab mengindikasikan adanya dukungan Pemerintah terhadap tokoh ini.

139 Wawancara dengan Djakse, *Op.cit.*

140 *Ibid.*

an dan awal 1970-an, berakibat serius pada penyusutan “dukungan atas”. Bisa diperkirakan bahwa Djakse ditakutkan mewarisi perangai “radikal” Hardi atau bahkan menjadi alat politik tokoh-tokoh PNI “radikal” yang masih setia memelihara Soekarno di benak dan dadanya. Hanya saja, kedekatan hubungannya dengan Hardi, sebenarnya tidak merupakan kartu mati bagi Djakse. Penjelasannya cukup ringkas: sama seperti Djakse, Suryadi—tokoh yang akhirnya menjadi Ketua Umum— sebenarnya juga kader langsung Hardi.<sup>141</sup> Faktor *kedua* adalah semakin memadatnya arus tuntutan regenerasi yang terutama difokuskan pada peranan generasi angkatan '66. Akibatnya, Djakse harus disisihkan Suryadi yang punya legitimasi sebagai generasi angkatan '66. Faktor *ketiga*— dan ini yang terpenting—, munculnya variabel agama sebagai syarat politik bagi Ketua Umum DPP PDI. Tuntutan yang bersifat diskriminatif dan menyangkal komitmen dasar pembentukan PDI ini, dimunculkan Thaib Ali (Aceh) dan kubu MMI, organisasi simpatisan PDI yang berpusat di pesantren di Sumedang, Jabar.<sup>142</sup> Apa pun alasan guna membenarkan syarat keagamaan bagi Ketua Umum DPP PDI di atas,<sup>143</sup> serta betapa pun kecilnya persentase suara yang menuntutnya, kehadiran syarat ini merupakan langkah mundur yang drastis bagi PDI. Syarat di atas, masih ditingkahi—sekalipun samar-samar— kemunculan syarat kesukuan bagi Ketua Umum PDI. Dengan ini, latar belakang yang disandang Djakse, sebagai Kristen dan Bali, bertukar diri menjadi “cacat politik” bagi dirinya sendiri. Kemunculan isu ini, seperti yang diungkapkan Supangat dalam wawancara dengan penulis, memang dalam kerangka menyingkirkan Djakse, meskipun ia sendiri sulit memastikan pihak yang berkepentingan atas tersingkirnya Djakse. Kesulitan

---

141 Wawancara dengan Hardi, *Op.cit.*, juga dibenarkan oleh Djakse, *Ibid.*

142 Wawancara dengan Supangat dan Parulian Silalahi, *Op.cit.*

143 Menurut sumber PDI, hal ini lebih untuk menjawab kepentingan DPD PDI Aceh.

memastikan pihak yang berkepentingan menyudahi Djakse semakin terasa apabila diperhatikan bahwa Thaib Ali yang memunculkan tuntutan ini, misalnya, adalah tokoh senior dari PNI Aceh yang tentunya menyadari arti tuntutannya.

Tokoh ketiga yang memiliki peluang sebagai Ketua Umum PDI adalah Akhmad Subagyo, terutama karena diproyeksi Mendagri untuk itu.<sup>144</sup> Namun, dalam perkembangannya, preferensi Mendagri ini tidak pernah terealisasi dengan alasan-alasan yang hingga kini sulit dipastikan. Yang paling mungkin adalah perihal orientasinya ke PNI dan Soekarno yang terlampau kuat, membuat tokoh yang seasal dengan Mendagri ini terempas di tengah jalan. Yang lebih mendasar, Akhmad Subagyo, konon, pernah memunculkan jargon politik “seratus Soeharto sama dengan satu Sukarno”.<sup>145</sup> Perbandingan antarelite politik utama yang masih haram dalam kultur politik Indonesia.

Jusuf Merukh, Ipik Asmasubrata, Probosutedjo, dan Isnaeni juga merupakan figur-figur yang muncul ke permukaan. Bagi Merukh dan Ipik, walaupun dijagokan PDI DKI Jaya, dukungan bagi keduanya sangat terbatas. Sementara nama Probosutedjo dengan cepat menghilang dari peredaran di bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Di ujungnya, Isnaeni yang diproyeksikan akan kembali tampil mengendalikan PDI apabila pemilihan Ketua dipasrahkan pada *floor*, memang hadir sebagai ancaman serius bagi kandidat lainnya. Tetapi pengembaraannya yang sangat jauh dan dalam di rimba raya konflik, bahkan

---

144 Wawancara dengan Murbantoko, *Op.cit.*, yang juga diperkuat oleh tokoh-tokoh lainnya, misalnya Supangat.

145 Sulit dipastikan kebenaran isu ini. Tetapi dari pertanyaan yang dikedepankan wartawan sehubungan dengan adanya kampanye Merukh untuk memunculkan Subagyo sebagai figur utama dalam PDI, kebenaran isu ini sedikit banyak punya landasan. Pertanyaan wartawan dimaksud adalah, “Apakah bisa dijamin bila Akhmad Subagyo muncul sebagai Ketua Umum PDI unsur PNI tidak terlalu ditonjolkan dan istilah seratus Pak Harto sama dengan satu Bung Karno bisa dihilangkan?”; Lihat *Pikiran Rakyat*, 17 April 1986.

merupakan pencipta dan sekaligus rimba raya konflik itu sendiri, menempatkannya pada posisi kurang menguntungkan. Bagi daerah-daerah, kejenuhan atas konflik berlarut yang diciptakan dan melibatkan Isnaeni menyebabkan figur ini semakin jauh dari menarik. Sementara bagi penguasa, seperti terungkap dari sikap Mendagri<sup>146</sup> yang memintanya untuk "tidak turun dalam Kongres III", Isnaeni adalah masa lalu yang harus menghuni museum politik PDI.

Tokoh terakhir yang mewarnai bursa calon Ketua Umum adalah Suryadi. Tokoh ini pertama-tama mendapatkan kemewahan politik berupa dukungan kuat Pangab<sup>147</sup> dan generasi angkatan '66. Sikap politiknya yang akomodatif dan kooperatif menyebarkan kesejukan di hati banyak petinggi di pusat-pusat kekuasaan. Karenanya, mereka bermurah hati memberikan "restu". Kedekatan hubungan kekeluargaan dengan Menkopolkam Jenderal Suroño semakin menjamakkan sisi-sisi menyejukkan Suryadi.<sup>148</sup> Bagi PDI, aktivitas Suryadi sebagai petugas partai di DPR dan DPA untuk waktu cukup lama dan kebersihan dirinya karena relatif terbebas dari belitan konflik intern muncul sebagai variabel-variabel yang memuluskan jalan Suryadi. Dukungan cukup luas dari generasi muda PDI dan daerah-daerah yang didorong kejenuhan kedua komponen

---

146 Wawancara dengan Supangat, *Op.cit.* Ia menegaskan adanya permintaan serupa oleh Mendagri ketika menjawab telepon dari Isnaeni. Wawancara dengan Isnaeni, *Op.cit.*, juga membenarkan adanya permintaan agar ia tak turun di arena kongres.

147 Wawancara dengan Wenas, Samosir, dan Supangat, *Op.cit.* Ketiganya menyebutkan bahwa dalam konsultasi DPP dengan Pangab, L.B. Moerdani, sekalipun Pangab tidak menyebut nama secara langsung, ia mengisyaratkan figur Suryadi sebagai tokoh alternatif yang diharapkan oleh Pemerintah untuk tampil memimpin PDI, setelah Djakse diindikasikan sebagai figur pertama.

148 Dari berbagai sumber diperoleh keterangan, Suryadi adalah menantu Hadisubeno - Ketua Umum PNI hasil Kongres Semarang yang meninggalkan dunia 1971. Adikandung tokoh ini adalah istri Jenderal Suroño. Wawancara, misalnya dengan Hardi dan Simatupang, *Op.cit.*

ini atas berbagai kemelut produksi generasi tua semakin memperkaya komponen keunggulan yang sudah digenggam Suryadi. Ke internal PNI, unsur yang secara tradisional berhak atas posisi Ketua Umum PDI, Suryadi menggenggam legitimasi politik di tangannya. Ia adalah mantan aktivis GMNI, salah satu *onderbouw* PNI, bahkan menjabat sebagai Ketua Presidium. Di atas segalanya, Suryadi adalah kader langsung tokoh utama PNI masa lalu, Ketua Umum PNI Hadisubeno, yang sekaligus adalah mertuanya, dan Hardi, salah satu Ketua yang disisihkan di area Kongres Semarang. Ke unsur-unsur lain pun, Suryadi bukan figur ancaman dan jauh dari kontroversial. Ia tidak menggenggam kuat-kuat PNI dan Soekarnoisme di tangannya sebagai senjata politik yang menakutkan. Bahkan lewat aktivitas bisnisnya, Suryadi memiliki jaringan hubungan yang sudah cukup mapan dengan sejumlah tokoh Partai Katolik. Dengan sederetan keunggulan tadi, naiknya Suryadi—sekalipun atas “jasa” Mendagri—tidak banyak melahirkan “kemarahan politik”, meskipun tidak secara otomatis meniadakan konflik intern.

Sebenarnya, baik Suryadi maupun Djakse menggenggam peluang yang sama besarnya untuk menapaki tangga Ketua Umum PDI. Keduanya sama-sama berbekal “restu” kuat penguasa. Karena itu, kedua tokoh ini, sama halnya dengan yang terjadi antara Djakse dan Hardjantho—setelah beberapa kali pertemuan—sama menyepakati bersaing secara *fair* dan siapa pun yang keluar sebagai pemenang harus didukung oleh yang terempas. Guna mencegah kemungkinan rivalitas keduanya, disepakati pula agar pihak yang gagal mengundurkan diri dari

kepengurusan resmi partai.<sup>149</sup>

Posisi berbagai tokoh seperti disketsakan secara kasar di atas, kehilangan maknanya ketika Kongres III PDI memutuskan untuk mempercayakan kepada Pemerintah untuk menyusun DPP PDI. Presiden, lewat tangan Mendagri, mulai memainkan peranan sebagai “bidan” tunggal. Serangkaian “konsultasi” baik secara vertikal, dengan anggota parpol di daerah-daerah, maupun secara horisontal, dengan anggota-anggota DPP dan elite-elite PDI di luar DPP, dilakukan secara maraton. “Konsultasi” ini membuahakan empat kemungkinan penyelesaian penyusunan DPP baru. *Pertama*, semua anggota DPP lama yang berjumlah 13 orang dipilih kembali sebagai pengurus baru dengan dikombinasikan oleh 14 orang generasi muda. *Kedua*, DPP baru disusun secara terpisah antara pihak Mendagri dan Sekjen untuk kemudian dikombinasikan. *Ketiga*, memilih salah satu atau beberapa dari 13 anggota DPP yang sudah didemisionerkan untuk kembali duduk dalam DPP baru, sedangkan selebihnya diambil dari generasi muda dan tokoh-tokoh daerah. *Keempat*, seluruh anggota DPP baru terdiri dari tokoh-tokoh yang sama sekali baru di luar DPP yang ada.<sup>150</sup> Alternatif pertama, kedua, dan ketiga, dalam perkembangannya, akhirnya ditinggalkan. Konflik diyakini, tetap mengintip dari celah-celah ketiga alternatif pertama di atas. Karenanya terlampaui berisiko untuk memilih salah satu di antaranya. Dengan hadirnya ketakutan atas terulangnya konflik di masa depan di tengah-tengah meja perundingan antara Mendagri dan elite-elite PDI ini, maka kemungkinan terakhir, yakni

---

149 Wawancara dengan Djakse, *Op.cit.* Hal ini diperkuat Hardi dalam wawancara dengan penulis, *Op.cit.* Hardi antara lain menyebutkan, setelah keduanya ternyata sama mendapatkan dukungan, mereka dipertemukannya. Dalam pertemuan ini berhasil dicapai kesepakatan agar nantinya kedua figur ini berbagi posisi masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekjen. Skenario ini akhirnya dibatalkan, karena dipertimbangkannya prinsip proporsional-toleran, di mana posisi Sekjen, merupakan “hak” kekuatan lain di luar PNI.

150 Wawancara dengan Wignjosumarsono, *Op.cit.*

pembusukan politik secara total atas generasi pertama (tua), menjadi pilihan logis. Hal ini, tercermin dalam susunan DPP baru yang diumumkan Mendagri pada 2 Mei 1986.

Susunan DPP PDI, seperti diakui Mendagri, gagal menihilkan pertimbangan-pertimbangan keunsuran. Namun, berbeda dengan periode sebelumnya, formula yang digunakan kali ini adalah 7:5:4:2:2. PNI dijamin dengan tujuh posisi dan secara otomatis berhak atas posisi Ketua Umum. PARKINDO mengkaveling lima posisi, tapi kehilangan hak tradisionalnya sebagai Sekjen. Partai Katolik mengantongi empat posisi dan merebut posisi berkualitas sebagai Sekjen. Sementara IP-KI dan MURBA berbagi masing-masing dua posisi. Susunan selengkapnya dari DPP PDI hasil penyusunan Mendagri adalah sebagai berikut:<sup>151</sup>

- |                 |   |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|
| 1. Ketua Umum   | : | Drs. Suryadi                |
| 2. Ketua        | : | B.N. Marbun, SH.            |
| 3. Ketua        | : | dr. Sukowaluyo              |
| 4. Ketua        | : | Drs. Noor Achari            |
| 5. Ketua        | : | Drs. Yahya Nasution         |
| 6. Ketua        | : | Duddy Singadilaga, SH. MPA. |
| 7. Wakil Ketua  | : | Ir. Andjar Siswojo          |
| 8. Wakil Ketua  | : | Marcel Beding               |
| 9. Wakil Ketua  | : | Parulin Silalahi            |
| 10. Wakil Ketua | : | Fatimah Akhmad, Sm.Hk.      |
| 11. Wakil Ketua | : | Jupri, SH.                  |
| 12. Wakil Ketua | : | Royani Haminullah           |
| 13. Sekjen      | : | Nico Daryanto               |
| 14. WaSekjen    | : | Dra. Titi Yuliasih          |

---

151 "Kongres Ketiga PDI", 15-18 April 1986, dikeluarkan oleh DPP PDI, hal. 153.



15. WaSekjen : Dimmy Haryanto
16. WaSekjen : Ir. Anwar Datuk
17. Bendahara : Lencang B.A.
18. Wakil Bendahara : St. J. Bennuhardjo
19. Wakil Bendahara : Steef Patrick Mafuni
20. Wakil Bendahara : Drs. Markus Wauran

Dengan keanggotaan di atas, DPP baru dihuni tokoh-tokoh yang untuk skala nasional PDI praktis tidak banyak dikenal, kecuali Ir. Andjar Siswojo. Demikian pula, mereka relatif bebas dari konflik internal, sekali lagi, kecuali Andjar Siswojo sebagai tokoh yang ikut me-*reshuffle* DPP Sanusi.

Ada beberapa pergeseran penting yang mengiringi DPP Suryadi di atas. *Pertama*, jika komposisi di atas dilihat sebagai hasil dari pertarungan kekuasaan dan pengaruh antarunsur, maka susunan DPP yang ada merupakan kekalahan besar bagi PARKINDO. Secara kuantitatif PARKINDO tetap berada di posisi kedua setelah PNI, tapi, dari segi distribusi posisi dalam DPP, kekuatan ini kini menggenggam posisi yang kualitasnya lebih rendah. Tergusurnya unsur ini dari posisi tradisional sebagai Sekjen, diikuti perubahan urutan susunan DPP tempat Sukowaluyo maupun Parulian Silalahi menjadi Ketua dan Wakil Ketua, membuatnya berada pada urutan ketiga setelah PNI dan Partai Katolik. Meskipun tata urutan di atas tidak otomatis menunjukkan perbedaan peranan dari masing-masing tokoh, tapi jelas bukan pula merupakan suatu kebetulan. Secara tersamar, tata urutan di atas dimaksudkan sebagai tata urutan pengaruh dalam DPP. Sebaliknya bagi Partai Katolik, susunan DPP di atas adalah kemenangan secara kualitas baginya. “Pertukaran posisi dan urutan” antara unsur ini dengan PARKINDO mengindikasikan hal ini. Nico Daryanto (Partai Katolik) kini menggenggam posisi Sekjen yang dibarter dengan posisi Bendahara yang kini menjadi kaveling PARKINDO.

Sementara itu, Marbun (Partai Katolik) diposisikan pada urutan kedua setelah Suryadi.

*Kedua*, jika komposisi DPP di atas dilihat sebagai buah dari pertarungan kekuasaan dan pengaruh antargenerasi, maka ia merupakan kekalahan dramatis bagi generasi tua. Sebaliknya, ia merupakan kemenangan sensasional bagi generasi muda. Sejak awal memang sudah bisa diperkirakan bahwa kongres kali ini akan diwarnai proses regenerasi. Isu ini sudah sedemikian mengental sebelum dan selama berlangsungnya kongres yang memberikan tekanan luar biasa pada kongres, sehingga tidak bisa tidak, harus diakomodasi. Apalagi, kecenderungan yang sama juga mewabah di kalangan elite di pusat-pusat kekuasaan. Isyarat yang dikedepankan Mendagri lewat pidatonya pada pembukaan Kongres III PDI memastikan hal di atas. Mendagri antara lain menegaskan:<sup>152</sup>

*“Sebagaimana halnya seorang ibu maka DPP sebagai penyelenggara Kongres tidak akan merasa kehilangan diri dengan tumbuhnya PDI sesudah Kongres ini nanti, sebab PDI sesudah Kongres ini pun tidak lain adalah darah daging sendiri”.*

Pernyataan di atas cukup gamblang bercerita tentang kehendak Negara untuk membusukkan secara total generasi tua. Hanya saja isyarat bagi generasi tua bahwa peran politik mereka sudah harus berakhir dan, di atasnya, suatu generasi baru akan dilahirkan, tidak sepenuhnya ditangkap. Dan seperti dibuktikan sejarah PDI, sekali Negara berkehendak, hampir tak ada jalan untuk menghentikan. Negara baru bisa dihentikan kehendaknya tujuh tahun kemudian, lewat KLB Surabaya yang memunculkan Megawati yang ditentang negara sebagai Ketua Umum, “kuncup pun berkembang, dan kembang pun layu” adalah tamsil alamiah yang berceritera tentang pergantian

---

<sup>152</sup> Lihat pidato sambutan Mendagri dalam Kongres III PDI, “Pertumbuhan PDI di Masa Mendatang”, ..., *Op.cit.*, hal. 13-14.

generasi yang tak terhentikan oleh kekuasaan apa pun. Namun, bahwasanya regenerasi akan mengambil jalan atau bentuk penyelesaian yang sedemikian ekstremnya merupakan hal yang sama sekali di luar perhitungan pihak mana pun, baik lingkungan PDI maupun di lingkaran para pengamat.

Terlepas dari kemungkinan prestasi yang nantinya akan dihasilkan, DPP baru ini lebih mengedepan sebagai pembantaian massal secara politik atau pembusukan massal secara politik atas generasi tua ketimbang suatu langkah alih generasi. Kongres kali ini, dengannya, telah menjadi kuburan politik bagi generasi tua, generasi pertama PDI yang dikontraskan dengan generasi muda. Karena itu, wajar apabila kehadiran generasi baru ini dalam mengendalikan PDI dipersoalkan keabsahannya. Bagi sejumlah elite, PDI selepas Kongres III sangat sulit mengklaim keabsahan sebagai bagian dari mata-rantai sejarah PDI hasil fusi 10 Januari 1973.

*Ketiga*, kehadiran generasi baru yang bertumpu pada kehancuran massal generasi tua mengungkapkan sisi lain dari politik Indonesia. Partai politik sekaligus dirancang sebagai kendaraan politik yang akan membawa generasi yang terlampau “politik” memasuki halaman pekuburan mereka. Perjalanan tiga belas tahun elite-elite PDI adalah perjalanan menuju ke liang kematian sendiri. Suatu proses pembusukan politik yang berskala massal. Anggota-anggota DPP Kongres II yang tersingkir setelah Kongres III adalah barikade terakhir yang mampu bertahan hingga ke puncak penuntasan proses pembusukan politik yang berlangsung. Sebelumnya, tokoh-tokoh seperti Sanusi, Usep, Walandouw, Madjid, Simatupang, dan sederetan panjang tokoh lainnya, tak pernah bertahan hingga mencapai puncak: mereka membusuk secara politik di tengah perjalanan dengan sebab dan alasannya sendiri-sendiri.

Pertanyaan yang tetap menggantung di rongga kepenasaran kita adalah, benarkah kelahiran generasi baru ini

merupakan garis akhir yang memisah dunia politik lama yang “tak beradab” dengan dunia politik baru yang diangankan? Benarkah kepunahan secara politik generasi pertama ini merupakan ekspresi dari telah tuntasnya proses penaklukan politik atas PDI—simbol dari sesuatu di luar Negara— oleh Negara?

## Daftar Pustaka

- Anderson, Ben dan Ruth McVey, 1971, *"A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup In Indonesia"*, Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Crouch, Harold, 1979, *"Patrimonialism and Military Rule in Indonesia"*, World Politics, Vol.31.
- Cribb, Robert, 1990, *"The Indonesian Killing of 1965-1966"*, Australia: Monash University.
- Donald K. Emmerson, *"Will Indonesia Survive?"*, Foreign Affairs, May/ June 2000.
- Feith and Castles, 1970, *"Indonesian Political Thinking; 1945-1965"*.
- Herbert, Feith, 1968, *"The decline of Constitutional Democracy in Indonesia"*.
- Harold Crouch, 1986, *"Militer dan Politik di Indonesia"*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Geertz, Clifford, 1960, *"The Religion of Java"*, Chicago: Chicago Press, (Terj.), Geertz, 1983, *"Abangan, santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa"*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gordon, Alec, 1993, *"Imagining Histories and the Real Thing: A Critique of Anderson and Benda on the 'Otonomous State' in Indonesia"*, dalam Journal of Contemporary Asia, vol.23, issue 4.

- Huntington, Samuel P., 1968, *“Political Order in Changing Society”*, New Haven: Yale University Press.
- Huntington, Samuel P., 1971, *“Political Development and Political Decay”*, in Henry Bienen, ed., *The Military and Modernization*, Chicago: Aldine- Atherton Inc.
- Jackson, Karl D, 1980, *“Bureaucratic Polity: A Theoretical Framework for Analysis of Power and Communications in Indonesia”*, dalam Karl D. Jackson and Lucian W. Pye (eds.), *“Political Power and Communications in Indonesia”*, UCP.
- Jusuf Wanandi, *“Indonesia: A Failed State”*, *The Washington Queterly*, Vol. 25, No. 3, Summer 2002.
- Kunio, Yoshihara, 1990, *“Kapitalisme Semu Asia Tenggara”*, Jakarta: LP3ES.
- Kahin, Audrey R dan Kahin, George McT, 1997, *“Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia”*, (Terj.), *“Subversion as Foreign Policy: The Secret of Eisenhower and Dulles Debacle in Indonesia”*, (ed.), Leirissa, Jakarta: Pustaka Utama.
- McVey, Ruth T, 1977, *“The Beamtenstaat in Indonesia”*, hal. 137, chapter in *“Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate”*, Ben Anderson and Kahin (ed), Singapore: Equinox Publishing.
- Mas’oed, Mohtar, 1989, *“Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966 - 1971”*, LP3ES.
- Marwati dan Notosusanto, *“Sejarah Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia”*, Jakarta: Balai Pustaka.
- M.C Rickleft, 1998, *“Sejarah Indonesia Modern”*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mortimer, Rex, 1974, "Indonesian Communist Under Soekarno", Ithaca and London: Cornell University Press.

M, Fic, Victor, 2005, "Kudeta 1 Oktober 1965", Jakarta: YOI.

Mac Iver and Charles H. Page, 1967, "Society, an Introductory Analysis", New York: Rinehart and Company Inc.

Murtopo Ali, 1978, "Strategi Kebudayaan", Jakarta: Yayasan

Proklamasi, 1992, Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta: CSIS.

Nasikun, 1984, "Sistem Sosial Indonesia", Jakarta: Rajawali.

Pratikno, 2005, "Lokal Democracy and Governance in Indonesia", dalam Priyambudi sulistyanto, et.al (ed), "Regionalism in Post-Soeharto Indonesia", Routledge Curzon.

Paul Dibb and Peter Prince, "*Indonesia's Grim Outlook*", Orbis, Fall 2001.

Pamungkas, Sigit, 2009, "*Perihal Pemilu*", Yogyakarta: JIP Fisipol UGM

Parlindungan, Utan, 2007, "*Genjer-Genjer: Kuasa dan Kontestasi Makna*", Yogyakarta: JIP Fisipol UGM.

Robison, Richard, 1997, "*Capitalisme and Bureaucratic State in Indonesia: 1965-1975*", Australia: Sidney University.

Riwu Kaho, Josef, 1982, "*Hubungan Pusat dan Daerah di Indonesia*", Jakarta: Bina Aksara.

,1988, "*Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik*

*Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*", Jakarta: Rajawali Press.

Robert I. Roberg, "*The New Nature of Nation-State Failure*", The

Washington Quaterly, Vol 25, No. 3, Summer 2002.

Rocha, 2002, "*Pembangkangan Sipil*", Pasuruan: Tadarus.

Ransom, David, 1974, "*Ford Country: Building an Elitee for Indonesia*", Essay in "*The Trojan Horse: A Radical Look at Foreign Aid*", (ed.), Steve Weissmen: Ramparts Press Inc.

R. Michels, 1997, "*The Iron Law of Oligarchy*", Vol.III Encyclopedia Britannia.

Sutherland, Heather, 1979, "*The Making of a Bureaucratic Elitee: The Colonial Transformation of the Javanese Priyayi*", Singapore: Southeast Asia Publication Series.

Sanit, Arbi, 1981, "*Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuasaan Politik dan Sistem Kepartaian*", Jakarta.

Soekarno, 2001, "*Indonesia Menggugat*", Cetakan II, Jakarta: Gunung Agung.

Webber, D, 2006, "*A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Soeharto Indonesia*", Democratization Vol. 13 No.3.

W. W. Rostow, 1971, "*Politics and The Stages of Growth*".

\_\_\_\_\_, 1959, "*The Stages of Economic Growth*", *Econ History Review*.

\_\_\_\_\_, 1960, "*The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto*", Cambridge: Cambridge University Press., Chapter 2, "*The Five Stages of Growth-A Summary*".

Zartman, I William, 1995, "*Introduction: Posing the Problem of State Collapse*" yang di edit oleh I William Zartman, (ed.), *Collapsed States. The Disintegration and Restoration of Legitimate Authority*, Lynne Reinner Publishers, Boulder-London.



**DOKUMEN-DOKUMEN:**

Dokumen “Catatan Konsultasi Antara Presiden Soeharto dengan PNI, IP-KI, MURBA, PARKINDO, dan Partai Katolik”, 27 Februari 1970.

Dokumen “Catatan Dari Pertemuan Lima Parpol”, 7 Maret 1970.

Dokumen “Pertemuan Kelompok Lima Partai dengan Presiden Soeharto”, 12 Maret 1970.

Dokumen “Pernyataan Bersama”, 9 Maret 1970.

Dokumen “Pertemuan Lima Partai”, 24 Maret 1970.

Dokumen Ketentuan Ketentuan Pokok KDP.

Dokumen Kelompok Demokrasi Pembangunan Pusat, Landasan dan Tujuan Perjuangan Kelompok Demokrasi Pembangunan.

Dokumen DPP IP-KI, “Penjelasan Mengenai Situasi Politik serta Eksistensi Partai partai Politik Pada Saat Akhir akhir ini”, 30 Oktober 1971.

Dokumen Deklarasi Pembentukan Partai Demokrasi Indonesia.

Dokumen Laporan DPP PDI mengenai Pertumbuhan dan Perkembangan PDI sejak Deklarasi 10 Januari 1973 kepada Kongres I PDI, dalam “Kongres Pertama PDI”.

Dokumen Piagam Perjuangan Partai.

Dokumen Program Perjuangan PDI.

Dokumen AD/ART PDI.

Dokumen DPP PDI, Dokumen Selektas Partai Demokrasi Indonesia, 1973.

Dokumen “Kemelut Fusi PDI”, tanpa tanggal dan tahun.

Dokumen Kata Mufakat Munas PNI, 2 dan 3 Februari 1974.

Dokumen Surat yang ditandatangani 8 fungsionaris DPP PDI tanggal 18 Februari 1974.

Dokumen Keputusan pembebasan tugas Isnaeni dan Madjid dalam SK. No. 02/ORG/1974.

Dokumen Keputusan Musyawarah antardaerah PNI Se-Indonesia No. 01/ORG/1974.

Dokumen Surat yang ditandatangani oleh 8 fungsionaris DPP PNI (in Hkwidasi), masing masing Isnaeni, I.A. Muis, Abdul Madjid, Karundeng, Budi Dipoyuwono, M.A. Gowi, Adipranoto, H.N.P.S. Siregar yang dialamatkan kepada Kaskopkamtib, 21 Oktober 1974.

Dokumen Surat Isnaeni tanggal 15 November 1974 kepada Kaskopkamtib.

Dokumen Surat Isnaeni kepada Kaskopkamtib tanggal 12 November 1974.

Dokumen "Risalah Pertemuan Pangkopkamtib dengan DPP PDI", 5 Januari 1980.

Dokumen Surat Sanusi kepada Isnaeni, 13 Januari 1973.

Dokumen Inventarisasi Masalah.

Dokumen Surat Presiden tertanggal 20 Februari nomor B 11/Pres/2/1975.

Dokumen SK No: 246, 247, 248, 249, 250/IN/A/III/DPP/1975, 26 Juli

perihal "Pengesahan susunan DPC DPC PDI di Jakarta" dan SK DPP No. XXVII/DPP/1975, perihal "pergantian personalia unsur PNI dalam DPD PDI DKI Jakarta".

Dokumen Surat DPP PDI tanggal 25 Juli 1975 No. 288/EX/C/DPP/ VII/1975 perihal "permintaan clearance" yang ditandatangani Usep Ranawidjaja dan Abdul Madjid. Surat ini dialamatkan kepada Laksus KopKamtibda/Kodam V Jaya.

Dokumen Surat DPP PDI tanggal 28 Juli 1975 kepada Laksus KopKamtibda/Kodam V Jaya No. 291/EX/C/DPP/VII/1975 yang ditandatangani oleh Akhmad Sukarmadi-idjaja dan John Pakan; Surat DPP PDI tanggal 30 Juli 1975 yang ditujukan kepada DPD PDI DKI Jakarta, No. 293/EX/C/- DPP/VII/1975.

Dokumen Surat DPP PNI (in likuidasi) tanggal 29 Juli 1975, No. 12/ DPP/VII/1975 perihal "Penetapan Personalialia dari Unsur PNI di DPD PDI DKI Jakarta dan DPC DPC PDI".

Dokumen IP-KI, 3 April 1976, "Ikhtiar Perkembangan Fusi".

Dokumen Surat Sanusi tertanggal 26 Juli 1975 yang ditujukan kepada DPP PDI yang dimaksudkan sebagai "laporan" pada DPD mengenai langkah-langkah pembenahan atas DPD/DPC DKI Jaya yang dilakukannya.

Dokumen Surat bernomor khusus 02/DPD/1975 tanggal 31 Juli 1975, perihal "Sikap DPD PDI DKI Jakarta" yang ditujukan kepada DPP PDI.

Dokumen Surat "Penundaan Peresmian Pejabat-Pejabat baru DPD PDI DKI Jaya", 13 Agustus 1975.

Dokumen Surat yang ditandatangani oleh Sukarmadidjaja, Muhidin Nasution, John Pakan, Adi Tagor, Pamudji, tanggal 14 Januari 1976, yang ditujukan kepada tokoh tokoh PDI dari unsur PNI, PARKINDO dan Partai Katolik.

Dokumen Surat DPP PNI (in likuidasi) tanggal 10 November 1975, No. 014/DPP P2S/XI/1975.

Dokumen Surat yang ditandatangani Akhmad Sukarmadidjaja dan Adi Tagor, 30 Desember 1975, yang ditujukan kepada DPP PDI.

Dokumen SK DPP PDI No. 221/IN/D/DPP/1975, 12 Mei 1975.

Dokumen "permintaan pengunduran diri" ini dibuat tanggal 25 Oktober 1975 dan disampaikan melalui IP-KI dengan Surat DPP IPKI No. 25/OP/DPP/XII/1975.

Dokumen SK DPP PDI tanggal 14 November 1975, No. 373/IN/D/DPP/XI/1975.

Dokumen Lampiran Keputusan No. II/Kongres I/MPP/ 1976.

Dokumen Pidato Pembukaan Sanusi Hardjadinata.

Dokumen Sambutan Presiden pada Kongres I PDI.

Dokumen Keputusan Kongres, No. I s/d No. IX/KPTS/KD/PDI/1976.

Dokumen Pidato Penutupan Kongres I PDI oleh Ketua Umum, Sanusi Hardjadinata, 13 April 1976.

Dokumen Keputusan Kongres I PDI, No. VI/KPTS/KP/PDI/1976.

Dokumen Lampiran Keputusan MPP No. II/MPP/1976.

Dokumen "Pernyataan Sikap Unsur IPKI", tanggal 1 Desember 1978.

Dokumen Resume Pokok pokok Pembicaraan antara Tim Enam DPP PDI bersama Mendagri dan Kaskopkamtib", tanggal 30 November 1976.

Dokumen "Pernyataan" DPD DKI Jaya, 25 Oktober 1976.

Dokumen "Pernyataan eksponen eksponen IPKI dalam Tubuh PDI

- se DKI Jakarta”, 28 Oktober 1976.
- Dokumen “Resume Rapat DPP”, 27 September 1977.
- Dokumen “Siaran Pers” Depdagri yang disampaikan oleh Kabag Humas Depdagri, Feisal Tamim, 26 Oktober 1976.
- Dokumen “Pidato Politik Ketua Umum PDI” dalam rangka HUT PDI ke IV Salemba, No. 32/Tahun II, 16 Mei 1976.
- Dokumen Surat DPD, 10 Juni 1977, dengan nomor 306/DPD PDI/IN/A/VI 77.
- Dokumen “Tanggapan Ketua DPP Akhmad Sukarmadidjaja Terhadap Penyiaran Wawancara Ketua Umum Sanusi Hardjadinata tanggal 27 September 1977”, tertanggal 27 September 1977.
- Dokumen “Konferensi pers Sanusi”, 27 September 1977.
- Dokumen “Konferensi pers T.A.M. Simatupang”, 24 September 1977.
- Dokumen “Risalah Pertemuan Pangkopkamtib dengan DPP PDI”, 5 Januari 1980.
- Dokumen “Surat” dari A.P. Batubara, 30 September 1976.
- Dokumen “Penjelasan mengenai tindak penyelewengan yang dilakukan Sanusi dan Usep dalam menghadapi persidangan IDPR/MPR”, 21 Oktober 1977.
- Dokumen “Surat pencalonan Isnaeni sebagai pimpinan DPR/MPR” tanggal 19 September 1977.
- Dokumen “Ketetapan Reshuffle DPP PDI” Bagian memperhatikan, angka 5, yang ditandatangani Sukarmadidjaja, Nasution, Noto Sukardjo, A. Tagor, 25 November 1977.

Dokumen “Penjelasan tentang apa yang dinamakan Reshuffle DPP PDI”, tanggal 13 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh DPP PDI dengan SK No. 412/IN/D/DPP/XII/1977.

Dokumen “Surat” A.P. Batubara yang mengatas namakan Tokoh muda/ generasi penerus PDI DKI Jaya, 18 Oktober 1977.

Dokumen “Surat terbuka” kepada semua anggota DPP yang disampaikan oleh PARKINDO dan Partai Katolik, 10 November 1977.

Dokumen “*Press release* Ketua Umum DPP PDI”, 25 November 1977.

Dokumen “Penjelasan dan Pernyataan” anggota DPP PDI asal eks unsur PNI, 29 November 1977.

Dokumen “pernyataan” PARKINDO dan Partai Katolik, 25 November 1977.

Dokumen Surat No. 399/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Surat No. 400/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Surat No. 394/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Surat No. 398/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 8 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Surat No. 397/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 9 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Surat No. 401/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 9 Desember 1977, ditandatangani Sanusi dan Sabam Sirait.

Dokumen Naskah keterangan pers DPP PDI, “Kepribadian dan

Struktur PDI diselewengkan dari UUD 1945 oleh apa yang menamakan dirinya DPP Isnaeni Sunawar”, 23 Desember 1977.

Dokumen “Surat DPP PDI” kepada DPD/DPC PDI seluruh Indonesia, No. 346/IN/D/DPP/XII/1977, tanggal 22 Desember 1977, tentang, “Apa yang dinamakan MPP PDI adalah tidak sah”.

Dokumen Surat DPP PDI No. 398a/EX/C/DPP/XII/1977, tanggal 13 Desember 1977; No. 400a/EX/C/DPP/XII/1977; No. 394a/EX/C/ DPP/XII/1977.

Dokumen “Usaha penyelesaian Kemelut PDI” yang dibuat kubu PARKINDO Partai Katolik, 12 Desember 1977.

Dokumen Surat protes dengan No. 396/EX/C/DPP/XII/1977 kepada Menteri Penerangan dan No. 397 kepada Direktur TVRI.

Dokumen Konferensi pers DPP PDI, 1 Desember 1977.

Dokumen “Konsep Penyelesaian Kemelut PDI” yang dibuat oleh PARKINDO-Partai Katolik, 3 Desember 1977.

Dokumen Surat PARKINDO Partai Katolik kepada Presiden perihal “Penyelesaian Kemelut PDI”, 12 Januari 1978.

Dokumen “Usaha Penyelesaian Kemelut PDI”, paper yang diajukan PARKINDO Partai Katolik dalam pertemuan dengan Bakin, 2 Januari 1978.

Dokumen “Pernyataan” tanggal 17 Januari 1978.

Dokumen “Memorandum Perihal Perkembangan Masalah Penyelesaian Dalam Tubuh DPP PDI”, yang dikeluarkan unsur IP-KI. Hal ini dibenarkan oleh M. Naution dan John Pakan (MURBA), tanggal 15 Maret 1978.

Dokumen “Surat” M. Supangat, tanggal 11 Januari 1978.

Dokumen “Surat T.A.M. Simatupang dan Tahamata”, tanggal 25 Februari 1978.

Dokumen “Pokok pokok Permasalahan DPP PDI” yang tampaknya dibuat oleh Kelompok Pandaan, 23 Desember 1979.

Dokumen “Alasan yang dapat membenarkan Tindakan Ketua Umum DPP PDI” yang dikeluarkan kubu Sanusi, 11 Desember 1978.

Dokumen “Pernyataan DPD-DPD PNI in likuidasi”, 25 November 1978.

Dokumen “Pernyataan” PARKINDO-Partai Katolik, 27 November 1978.

Dokumen “Pernyataan”, yang dikeluarkan para penanggung-jawab referendum MURBA perihal fusi, 30 November 1978.

Dokumen “Pernyataan Unsur IP-KI”, 1 Desember 1978.

Dokumen “Pendapat” DPD PDI Jawa Barat terhadap apa yang dinamakan Kongres PDI II.

Dokumen “Laporan” ke Komdak Metro Jaya, 5 Januari 1979.

Dokumen Keputusan No. I/KPTS/MAD/1979, tentang “Jalan Keluar Mengatasi Kemelut DPP PDI”, tanggal 28 Februari 1979.

Dokumen “Lampiran Pedoman Kerja dan Penugasan kepada DPP PDI” yang merupakan hasil keputusan Munas Pandaan.

Dokumen Surat yang dikirimkan Hardjantho dan Sabam atas nama DPP PDI keseluruhan DPD/DPC, tanggal 26 April 1979, No. 45/ IN/DPP/IV/1979.

Dokumen “Kesimpulan Rapat Kelompok Organisasi DPD PDI”, 17



Oktober 1979.

Dokumen Keputusan DPP PDI No. XI/ORG/DPP/XI/1978.

Dokumen “Kesimpulan Rapat DPP PDI”, 12 Oktober 1978.

Dokumen “Kesimpulan Rapat DPP PDI” 18 Oktober 1978.

Dokumen “Surat” Sanusi kepada DPD PDI, 21 September 1978.

Dokumen “Keputusan Rapat DPD PDI”, 6 Desember 1978.

Dokumen “Surat” DPP PDI yang ditandatangani Hardjantho-Sabam, 8 September 1979 dan 16 Oktober 1979 kepada DPD/DPC seluruh Indonesia.

Dokumen Surat kepada Presiden, 10 November 1979 perihal “Perkembangan Dalam Tubuh PDI”.

Dokumen Surat kubu PARKINDO Partai Katolik kepada Presiden, 25 April 1979.

Dokumen “Kata Mufakat Bersama”, 20 Juli 1979.

Dokumen Surat kepada DPP PDI, 1 November 1979, dengan No. R 1250/XI/1979.

Dokumen Surat 8 November 1979, No. 425/EX/C/DPP/ XI/1979 perihal “Pendapat DPP PDI tentang Surat Kabakin No. R-1250.

Dokumen “Risalah Rapat DPP PDI”, 7 November 1979.

Dokumen “Resume Pertemuan dengan Kabakin”, 13 November 1979.

Dokumen Surat DPP Hardjantho kepada Presiden, 20 November 1979, No. 351/EX/D/DPP/XI/1979 tentang “Laporan Perkembangan PDI dan Penyelesaian Kemelut DPP PDI.

Dokumen “Deklarasi Pimpinan Pelaksanaan Harian DPP PDI”, 15 Desember 1979.

Dokumen Surat nomor 17/PPH/PDI/XII/79 perihal “Pemberitahuan adanya Surat DPP SU-SI pada Pangkoptik, 15 Desember 1979, No. 767/EX/C/DPP/XII/ 1979 perihal “Ketertiban Kantor DPP PDI”.

Dokumen Surat DPP SU-SI kepada Kadapol Kodak Metro Jaya, 15 Desember 1979 perihal “Mengeluarkan orang-orang yang tidak berhak dari ruangan gedung DPP PDI”.

Dokumen “Risalah Pertemuan Pangkoptik dengan anggota anggota DPP PDI”, 26 Desember 1979.

Dokumen “Risalah Pertemuan Pangkoptik dengan DPP PDI”, 5 Januari 1980.

Dokumen “Kesimpulan Rapat DPP PDI”, 13 Maret 1980.

Dokumen “Risalah Singkat Pertemuan DPP PDI”, 17 Maret 1980.

Dokumen “Pernyataan dan Pengumuman Ketua Umum DPP PDI”, No. X 60/KU/VI/PDI/80, 11 Juni 1980.

Dokumen “Surat Sanusi kepada Pangkoptik, Sudomo”, 23 Juli 1980.

Dokumen “Surat Sanusi kepada anggota DPP PDI”, tanggal 21 Juli 1980.

Dokumen “Nota Ketua Umum DPP PDI kepada Laksmana Sudomo”, 28 Juni 1980.

Dokumen Surat dari Laksamana TNI Sudomo kepada Sanusi, Ketua Umum DPP PDI, 21 Juni 1980.

Dokumen Surat dari Sanusi kepada Pangkoptik, 18 Juli 1980.

- Dokumen Surat Sanusi kepada Pangkopkamtib, 23 Juli 1980.
- Dokumen "Resume Rapat Panitia Ad hoc DPP PDI ke I", 6 Agustus 1980.
- Dokumen "Resume Rapat DPP PDI", 5 September 1980.
- Dokumen Konferensi pers Ketua Umum DPP PDI, 6 September 1980.
- Dokumen "Risalah pertemuan Pangkopkamtib dengan DPP PDI", 5 Januari 1980.
- Dokumen "Surat Sanusi kepada Isnaeni", 12 Maret 1973.
- Dokumen "Penjelasan Sanusi kepada DPP PDI tentang Pengunduran dirinya", 31 Oktober 1980.
- Dokumen SK DPP PDI No. I/DPP/X/1980 yang ditandatangani Nasution dan Sabam.
- Dokumen SK DPP PDI No. II/DPP/X/1980 dan ditandatangani Nasution dan Sabam.
- Dokumen "Keputusan DPP PDI No. III/DPP/XI/1980".
- Dokumen Keputusan DPP, No. III/DPP/IX/1980 tentang, "Susunan dan Tugas Panitia Nasional Kongres ke II PDI", 14 November 1980.
- Dokumen "Surat" Walandouw yang ditujukan kepada DPP PDI, 10 November 1980.
- Dokumen Surat Kelompok Empat kepada Presiden, "Yang Berhak dan Absah sebagai DPP PDI", 12 Januari 1981.
- Dokumen "Kongres Gadungan versus Dalil-Dalil Perjuangan Menegakkan Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat", stensilan, tanpa tahun dan tanpa tanda tangan.

Dokumen “Deklarasi Eksistensi”, yang ditandatangani empat tokoh, 16 Januari 1981.

Dokumen Keputusan Kongres ke II PDI, No. 03/KPTS/K.II/PDI/1981 tentang “Asas, Hakikat dan Landasan Perjuangan PDI”, 16 Januari 1981.

Dokumen “Keputusan Kongres No. 01/KPTS/KII/PDI/1981”, tentang “Pernyataan mengakhiri eksistensi unsur dan tuntas paripurnanya Fusi”, 17 Januari 1981.

Dokumen Keputusan Kongres II PDI, No. 05/KPTS/K II/PDI/ 1981 tentang, “Sikap Politik”, 17 Januari 1981.

Dokumen “Lampiran”, Keputusan Kongres II PDI, No. 07/KPTS/K II/ PDI/1981.

Dokumen Keputusan Kongres II PDI, No. 09/KPTS/K II/PDI/ 1981 tentang “Penyelesaian Masalah masalah yang ada dalam tubuh DPD dan DPC PDI sebelum diselenggarakan Kongres II PDI”.

Dokumen Keputusan Kongres II PDI, No. 04/KPTS/K II/PDI/ 1981 tentang “Penyempurnaan AD dan ART PDI”, 16 Januari 1981.

Dokumen SKDPP PDI No. 001/ORG/TUG/1981 yang ditandatangani Madjid, Usep, Walandouw dan Ra’ib.

Dokumen Surat DPP PDI kepada Ketua DPR yang ditandatangani Madjid, No. 002/Fraksi, perihal “Fraksi PDI”, 19 Januari 1981.

Dokumen Penjelasan tentang “Keabsahan Eksistensi PDI di bawah pimpinan DPP PDI hasil Kongres Pertama PDI”, ditandatangani tokoh Kelompok Empat, 25 Januari 1981.

Dokumen Surat kepada Presiden perihal “Yang berhak dan Absah sebagai DPP PDI”, ditandatangani keempat tokoh Kelompok Empat, 12 Februari 1981.

Dokumen Surat Kepada Ketua DPR yang ditandatangani Madjid dan St. Radjamas, tentang "Peng-recall-an Anggota DPR/MPR", 7 Maret 1981.

Dokumen "Surat Simatupang kepada Pimpinan Fraksi DPP PDI", 3 November 1981.

Dokumen "Makalah Sambutan Presiden dalam Pembukaan Kongres III PDI" 15 April 1986.

Dokumen Sambutan Mendagri dalam Kongres III PDI, "Pertumbuhan PDI di Masa Mendatang dan Pembangunan Politik Nasional Kita", 15 April 1986.

Dokumen "Sambutan" Wignjosumarsono dalam Kongres III PDI, 15 April 1986.

Dokumen "Beberapa Catatan Penting tentang Jalannya Sidang Komisi Organisasi sampai dengan Panitia Perumus Komisi Organisasi" yang dibuat Pakan, 25 April 1986.

Dokumen "Keputusan Kongres III PDI No. IV/KPTS/KIII/IV/1986".

Dokumen "Kongres Ketiga PDI", 15 18 April 1986, dikeluarkan oleh DPP PDI.

## **KORAN**

**Sinar Harapan:** 11 November 1970, 23 Maret 1971. 13 April 1970, 14 April 1976, 29 November 1977, 6 Desember 1977, 7 Desember 1977, 9 Desember 1977, 20 Januari 1978, 29 November 1978, 10 Maret 1979, 14 Februari 1979, 3 Februari 1979, 14 Februari 1979, 5 Maret 1979, 6 Maret 1979, 8 Maret 1979, 14 Juli 1980, 10 November 1980, 21 November 1980, 24 November 1980, 14 Januari 1981, 15 Januari 1981, 12 September 1983, 25 Oktober 1984, 19

September 1985, 4 Desember 1985, 6 Desember 1985, 8 April 1986, 11 Februari 1986, 16 April 1986, 23 April 1986.

**Suluh Marhaen:** 11 Maret 1970, 21 Maret 1970.

**Berita Yudha:** 11 Maret 1970, 12 April 1976.

**Angkatan Bersenjata:** 11 Maret 1970, 30 November 1978.

**Kami:** 11 Maret 1970.

**Kompas:** 10 Maret 1970, 11 dan 23 Maret 1970, 12 Januari 1973, 29 Maret 1976, 2 Desember 1977, 30 September 1977, 28 Oktober 1977, 12 Oktober 1977, 29 November 1977, 2 Desember 1977, 8 Desember 1977, 25 November 1978, 20 Desember 1978, 24 Februari 1979, 27 Februari 1979, 20 Desember 1979, 16 November 14 November 1979, 19 Desember 1979, 3 Januari 1980, 13 Januari 1981, 31 Oktober 1980, 24 November 1980, 12 Januari 1981, 10 Januari 1981, 13 Januari 1981, 14 Januari 1981, 15 Januari 1981, 19 Agustus 1983, 24 Oktober 1984, 23 Oktober 1984, 14 November 1984, 22 November 1984, 12 April 1986, 21 April 1986, April 1986.

**Indonesia Raya:** 12 Februari 1970, 7 April 1971.

**Merdeka:** 12 April 1976, 29 November 1977, 21 Januari 1977, 27 Mei 1976, 27 September 1977, 28 Oktober 1977, 3 Desember 15 Oktober 1977, 11 Oktober 1977, 15 Oktober 1977, 26 November 1977, 27 November 1977, 7 Desember 1977, 4 Januari 3 Desember 1977, 5 Desember 1977, 7 Desember 1977, 8 Desember 1977, 16 Januari 1978, 14 Januari 1978, 13 Januari 1978, 25 November 1978, 28 November 1978, 27 November 1978, 26 Februari 1979, 20 Desember 1978, 24 Februari 1979, 23 Desember 1978, 14 November 1979, 19 Desember 1979, 3 Januari 28 Oktober 1980, 26 November 1980, 25 November 1980, November 1980, 22 November

1980,3 Februari 1981,30 Maret 19 Agustus 1983, 20 Agustus 1983, 24 Agustus 1983, 7 September 1983, 8 September 1983, 23 Agustus 1983, 8 Oktober 30 November 1984, 29 Desember 1984, 26 Oktober 1984, 14 Maret 1984, 24 Oktober 1985, 1 November 1985, 12 November 17 April 1986.

**Berita Buana:** 28 November 1977, 4 Juni 1977, 12 Oktober 1977, 3 Desember 1977, 26 Januari 1978, 27 November 1978, 28 November 1978, 9 Desember 1978, 28 November 1978, 3 Maret 1979, 3 Maret 1979, 19 Desember 1979, 24 Desember 1979, 27 November 1979, 4 Desember 1980, 5 Desember 1980, 4 Desember 1980, 26 Agustus 20 Oktober 1984, 27 Desember 1984, 20 Oktober 1984, 22 Mei 1984, 5 Oktober 1985, 25 September 1985, 22 April 1986.

**Suara Karya:** 4 Januari 1978, 5 Desember 1977, 4 Januari 1978, 25 Januari 1978, 19 Agustus 1983, 20 Agustus 1983, 23 Oktober 1984, 12 April 1986.

**Pelitea:** 1 Desember 1977, 24 Desember 1977, 14 Desember 1977, 17 Januari 1980, 20 Agustus 1983, 12 November 1985, 27 Maret 1986, 11 April 1986. Antara: 25 November 1977, 26 November 1977, 27 November 1977, 23 Agustus 1983, 21 Agustus 1983, 26 Oktober 1984.

**Harian Rakyat:** 4 November 1955.

**Sinar Pagi:** 24 Desember 1977.

**Pikiran Rakyat,** 15 April 1986, 17 April 1986.

## ARTIKEL

S. Tasrif, "Ide Pengelompokan Partai partai" dalam "Kritik dan Komentar", Indonesia Raya, 10 Maret 1970.

Sufyar, "Satu Pemikiran tentang 'Pengelompokan bagaimana kalau dimulai dari Pemuda?', dalam Suluh Marhaen, 7 Maret 1970.

Mahbub Djunaedi, "Fraksi Gaya Baru, Suatu "Devaluasi" Parpol", dalam harian Kompas, 8 November 1971.

Induk Karang, "Pengelompokan Partai Dari Segi Lain", KAMI, 12 Februari 1970.

Sanusi Hardjadinata, "Mampukah Rakyat Memikul Beban Yang Terus Menerus Bertambah Sebagai Akibat Pembangunan Politik Orde Baru?", dalam Selamatkan Demokrasi.

Sinar Harapan dalam Tajuk Rencananya, "Menyongsong Kongres Pertama PDI", 7 April 1976.

"Kelompok Salemba Raya 1973" yang "mendukung konstitusi", Merdeka, 8 Desember 1977.

"Generasi Baru Indonesia 1977", yang mengirim karangan bunga kepada Isnaeni sebagai simbol "telah matinya demokrasi dalam PDI", Merdeka, 1 Desember 1977.

"Kelompok Generasi Muda PDI" (74 orang) yang menegaskan "bukan mendukung person-person, tapi putusan kongres", Kompas, 2 Desember 1977.

"Generasi Muda Indonesia" yang menilai reshuffle sebagai "pengeruhan kehidupan

Virga Belen, "Dilema PDI menghadapi Pencalonan Pimpinan DPR" dalam Merdeka, 11 Oktober 1977.

Parakitri, "Bila PDI Amblas, Akan Muncul Loncatan Besar", Kompas, 16 November 1985.



## PROFIL PENULIS



**Cornelis** Lay, lahir di Kupang, 6 September 1959, adalah Profesor Ilmu Politik dan Pemerintahan di Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia meraih gelar Sarjana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Fisipol UGM tahun 1987. Kemudian melanjutkan S2 di Internasional Development Studies St. Marry's University, Halifax, Nova Scotia, Canada, tahun 1992 dan meraih gelar Doktor Ilmu Politik di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UGM. Kini ia menjabat Kepala Research Centre for Politics and Government (PolGov), Departemen Politik dan Pemerintahan.

Kajian penelitiannya meliputi tautan politik, partai politik dan pemilu, relawan politik, masyarakat sipil, desentralisasi yang demokratis, dan tata kelola perbatasan. Ia mengampu mata kuliah, di antaranya: Strategi dan Teknik Komunikasi Politik, Politik Keamanan dan Pembangunan, Politik Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Birokrasi Pemilu, Seminar Penelitian, Sejarah Sosial Politik Indonesia, Pengantar Studi Pemerintahan, dan Politik Perbatasan.

Selain buku “Melawan Negara: PDI 1973-1986”, ia juga menulis buku “Involusi Politik: Esai-Esai Transisi Indonesia

(PolGov, 2010), dan salah satu bab di buku “In Search of Middle Indonesia”, editor Gerry van Klinken dan Ward Berenschot (Brill, 2014) dan “Democratization in the Global South: The Importance of Transformative Politics”, editor Olle Törnquist dan Kristian Stokke (Palgrave Macmillan, 2013). Penelitiannya telah diterbitkan di berbagai jurnal seperti Prisma, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Power, Conflict and Democracy Journal, Asian Journal of Political Science, Southeast Asian Studies, Contemporary Southeast Asia, Asian Survey, dan Copenhagen Journal of Asian Studies.

MELAWAN

# NEGARA

PDI 1973-1986

Perkembangan politik Indonesia selalu mencerminkan kondisi yang tampak diarahkan secara gamblang akan segera tunduk di hadapan kuasa negara. Menceritakan negara sebagai magnet yang menarik setiap elemen apapun yang kuat berwatak besi, bahkan “mereka” yang berkarat untuk bersanding dengannya, dan lalu mengokohkan hegemoni negara. Namun, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di satu episode silam; 1973-1986, yang secara merinci dikisahkan buku ini, berkembang menjadi sebuah kutub yang tidak saja melawan kecenderungan, tetapi juga menguras lebih banyak energi penguasa lebih dari satu dasawarsa.

Kajian spesifik tentang PDI ini mengungkapkan secara terang-terangan karakter sesungguhnya Negara. Tidak hanya membongkar masa lalu, tetapi juga melawan limitasi teori dan perdebatan-perdebatan politik jaman Orde Baru yang terlanjut “mahfum” dipahami dari sudut pandang sentralitas yang mengandaikan Negara kohesif dan solid. Hasil studi ini justru berkata sebaliknya, Negara jauh dari kuat, Negara jauh dari otonom, dan barangkali mudah dimasuki oleh kekuatan (politik) di luar dirinya. Sesungguhnya di dalam dirinya yang sensitif, Negara itu cenderung berwatak reaktif dan mudah terfragmentasi.

Research Centre for Politics and Government (PolGov) is an institution under the Department of Politics and Government, Faculty of Social and Politic Science, Gadjah Mada University. PolGov organizes researches, publications, and advocacy on politics and government affairs with special emphasises on: (1) state reform and national politics, (2) local politics and regional autonomy, (3) political parties, elections, and parliament, and (4) informal politics and multiculturalism.

Polgov merged the Laboratory for Politics-known as Laboratorium JIP-in the Department of Government , and the Division of Research and Publication in the Postgraduate School on Local Politics and Regional Anatomu. As such. this 2009 established institution inherited all traditions and activities of the previous 2 institutions, PolGov, therefore, is both continuation and improvement of those institutions' works, tradition and performance.